BUPATI BELITUNG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

TANJUNGPANDAN, 31 AGUSTUS 2026

BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 100.3.3.1/648/BAKUDA/2026 tanggal 20 Agustus 2026 tentang Hasil Evaluasi Rancangan

Peraturan.....

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Belitung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-undang....

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6951);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Perubahan Atas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor....

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 95);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 14);

19. Peraturan....

19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Belitung Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 46);
21. Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 Nomor 27) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG
dan
BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berupa laporan keuangan memuat:
   a. Laporan Realisasi Anggaran;
   b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
   c. Neraca;
   d. Laporan Operasional;
   e. Laporan Arus Kas;

f. Laporan...

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

g. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan iktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp	940.242.247.555,09	
b.	Belanja	Rp	943.425.590.181,53	
	Surplus/(defisit)			Rp (3.183.342.626,44)
c.	Pembiayaan			
	- Penerimaan	Rp	99.023.375.881,70	
	- Pengeluaran	Rp	-	
	Surplus/(defisit)			Rp99.023.375.881,70

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (348.233.666,91) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	940.590.481.222,00
2. Realisasi	Rp	940.242.247.555,09
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(348.233.666,91)

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (96.188.266.922,17) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	1.039.613.857.103,70
2. Realisasi	Rp	943.425.590.181,53
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(96.188.266.922,17)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 95.840.033.255,26 dengan rincian sebagai berikut:

1. Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp	(99.023.375.881,70)
2. Realisasi	Rp	(3.183.342.626,44)
Selisih lebih/(kurang)	Rp	95.840.033.255,26

d. Selisih....

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Penerimaan Pembiayaan

- Anggaran setelah perubahan	Rp	99.023.375.881,70
- Realisasi	Rp	99.023.375.881,70
Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pengeluaran Pembiayaan

- Anggaran setelah perubahan	Rp	-
- Realisasi	Rp	-
Selisih lebih/(kurang)	Rp	-

f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan Neto sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pembiayaan Neto

- Anggaran setelah perubahan	Rp	99.023.375.881,70
- Realisasi	Rp	99.023.375.881,70
Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00

Pasal 4

Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a.	Saldo anggaran lebih awal	Rp	99.023.375.881,70
b.	Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp	99.023.375.881,70
c.	Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SilPA/SiKPA)	Rp	95.840.033.255,26
d.	Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp	-
e.	Lain-lain	Rp	-
f.	Saldo anggaran lebih akhir	Rp	95.840.033.255,26

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a.	Jumlah Aset	Rp	2.257.860.424.303,11
b.	Jumlah Kewajiban	Rp	111.902.284.728,78
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp	2.145.958.139.574,33

Pasal....

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a.	Pendapatan LO	Rp	971.640.600.479,84
b.	Beban	Rp	981.142.365.224,75
c.	Surplus/(defisit) dari kegiatan operasional	Rp	(9.501.764.744,91)
d.	Surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional	Rp	(1.336.086.458,28)
e.	Pos Luar Biasa	Rp	-
f.	Surplus/(defisit) - LO	Rp	(10.837.851.203,19)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a.	Saldo kas awal per 1 Januari 2025	Rp	97.209.726.116,70
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	28.926.779.573,56
c.	Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp	(31.759.842.660,00)
d.	Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	-
e.	Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	764.592.363,00
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2025	Rp	95.141.255.393,26

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a.	Ekuitas awal	Rp	2.265.137.100.521,02
b.	Surplus/(defisit) - LO	Rp	(10.837.851.203,19)
c.	Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp	(108.341.109.743,50)
d.	Ekutas akhir	Rp	2.145.958.139.574,33

Pasal....

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2025 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a.	Lampiran I	:	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
	Lampiran I.1	:	Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
	Lampiran I.2	:	Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
	Lampiran I.3	:	Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
	Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
b.	Lampiran II	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.	Lampiran III	:	Laporan Operasional;
d.	Lampiran IV	:	Laporan Perubahan Ekuitas;
e.	Lampiran V	:	Neraca;
f.	Lampiran VI	:	Laporan Arus Kas;
g.	Lampiran VII	:	Catatan atas laporan keuangan;
h.	Lampiran VIII	:	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.	Lampiran IX	:	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;

j. Lampiran....

j.	Lampiran X	:	Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.	Lampiran XI	:	Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
l.	Lampiran XII	:	Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m.	Lampiran XIII	:	Daftar rekapitulasi aset tetap;
n.	Lampiran XIV	:	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
o.	Lampiran XV	:	Daftar Rekapitulasi Aset lainnya;
p.	Lampiran XVI	:	Daftar Dana Cadangan Daerah;
q.	Lampiran XVII	:	Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.	Lampiran XVIII	:	Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s.	Lampiran XIX	:	Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
t.	Lampiran XX	:	Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah yang terdiri atas:
	Lampiran XX.1	:	Ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.
	Lampiran XX.2	:	Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal....

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 31 Agustus 2026
BUPATI BELITUNG,

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 31 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

MARZUKI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2026 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (2.21/2026)

DAFTAR LAMPIRAN PERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA. 2025

Lampiran	Uraian	Halaman
Lampiran I.1	Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi	12 - 27
Lampiran I.2	Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan	28 – 31
Lampiran I.3	Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan	32 - 162
Lampiran I.4	Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan	163 - 213
Lampiran II	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	214
Lampiran III	Laporan Operasional	215 - 217
Lampiran IV	Laporan Perubahan Ekuitas	218
Lampiran V	Neraca	219 – 222
Lampiran VI	Laporan Arus Kas	223 – 226
Lampiran VII	Catatan atas laporan keuangan	227 – 416
Lampiran VIII	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah	417 – 418
Lampiran IX	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	419 – 420
Lampiran X	Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir	421
Lampiran XI	Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	422
Lampiran XII	Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah	423 – 424
Lampiran XIII	Daftar rekapitulasi aset tetap	425
Lampiran XIV	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan	426
Lampiran XV	Daftar Rekapitulasi Aset lainnya	427
Lampiran XVI	Daftar Dana Cadangan Daerah	428
Lampiran XVII	Daftar Kewajiban Jangka Pendek	429 – 430
Lampiran XVIII	Daftar Kewajiban Jangka Panjang	431
Lampiran XIX	Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya	432
Lampiran XX	Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah	433

Lampiran I.1 : Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

KAB. BELITUNG
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
		4	Pendapatan	940.590.481.222,00	940.242.247.555,09	(348.233.666,91)	99,96
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	70.749.299.721,00	84.071.873.696,50	13.322.573.975,50	118,83
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	109.200.000,00	85.168.500,00	(24.031.500,00)	77,99
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	109.200.000,00	85.168.500,00	(24.031.500,00)	77,99
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	109.200.000,00	85.168.500,00	(24.031.500,00)	77,99
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	109.200.000,00	85.168.500,00	(24.031.500,00)	77,99
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	109.200.000,00	85.168.500,00	(24.031.500,00)	77,99
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	69.465.099.721,00	82.770.981.876,50	13.305.882.155,50	119,15
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan	13.996.796.209,00	13.528.012.129,00	(468.784.080,00)	96,65
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	13.996.796.209,00	13.528.012.129,00	(468.784.080,00)	96,65
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13.996.796.209,00	13.528.012.129,00	(468.784.080,00)	96,65
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	13.985.846.209,00	2.130.867.900,00	(11.854.978.309,00)	15,24
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.950.000,00	11.397.144.229,00	11.386.194.229,00	104.083,51
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		UPT RSUD dr. H. MARSIDI JUDONO	55.468.303.512,00	69.242.969.747,50	13.774.666.235,50	124,83
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	55.468.303.512,00	69.242.969.747,50	13.774.666.235,50	124,83
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	55.468.303.512,00	69.242.969.747,50	13.774.666.235,50	124,83
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4.1.02	Retribusi Daerah	55.468.303.512,00	69.242.969.747,50	13.774.666.235,50	124,83
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.175.000.000,00	1.215.723.320,00	40.723.320,00	103,47
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.175.000.000,00	1.215.723.320,00	40.723.320,00	103,47
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.175.000.000,00	1.215.723.320,00	40.723.320,00	103,47
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.175.000.000,00	1.215.723.320,00	40.723.320,00	103,47
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	1.175.000.000,00	1.215.708.320,00	40.708.320,00	103,46
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4.907.843.425,00	5.685.015.531,00	777.172.106,00	115,84
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.842.344.025,00	1.885.801.650,00	43.457.625,00	102,36
2.07	2.17.3.30.2.07.01.0000		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja	1.842.344.025,00	1.885.801.650,00	43.457.625,00	102,36
2.07	2.17.3.30.2.07.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.842.344.025,00	1.885.801.650,00	43.457.625,00	102,36
2.07	2.17.3.30.2.07.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.842.344.025,00	1.885.801.650,00	43.457.625,00	102,36
2.07	2.17.3.30.2.07.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	1.839.344.025,00	1.873.406.000,00	34.061.975,00	101,85
2.07	2.17.3.30.2.07.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.000.000,00	12.395.650,00	9.395.650,00	413,19

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	160.000.000,00	198.652.000,00	38.652.000,00	124,16
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	160.000.000,00	198.652.000,00	38.652.000,00	124,16
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	160.000.000,00	198.652.000,00	38.652.000,00	124,16
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	160.000.000,00	198.652.000,00	38.652.000,00	124,16
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	160.000.000,00	198.652.000,00	38.652.000,00	124,16
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	1.671.600.000,00	1.823.948.500,00	152.348.500,00	109,11
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000		Dinas Lingkungan Hidup	1.671.600.000,00	1.823.948.500,00	152.348.500,00	109,11
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.671.600.000,00	1.823.948.500,00	152.348.500,00	109,11
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.671.600.000,00	1.823.948.500,00	152.348.500,00	109,11
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	1.671.600.000,00	1.823.948.500,00	152.348.500,00	109,11
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	700.000.000,00	783.141.131,00	83.141.131,00	111,88
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	700.000.000,00	783.141.131,00	83.141.131,00	111,88
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	700.000.000,00	783.141.131,00	83.141.131,00	111,88
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	700.000.000,00	783.141.131,00	83.141.131,00	111,88
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	700.000.000,00	783.141.131,00	83.141.131,00	111,88
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	426.899.400,00	765.422.250,00	338.522.850,00	179,30
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	426.899.400,00	765.422.250,00	338.522.850,00	179,30
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	426.899.400,00	765.422.250,00	338.522.850,00	179,30
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	426.899.400,00	765.422.250,00	338.522.850,00	179,30
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	425.737.200,00	762.453.350,00	336.716.150,00	179,09
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.162.200,00	2.968.900,00	1.806.700,00	255,46
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	107.000.000,00	228.050.000,00	121.050.000,00	213,13
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pemuda dan Olahraga	107.000.000,00	228.050.000,00	121.050.000,00	213,13
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	107.000.000,00	228.050.000,00	121.050.000,00	213,13
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	107.000.000,00	228.050.000,00	121.050.000,00	213,13
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	107.000.000,00	228.050.000,00	121.050.000,00	213,13
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.195.710.000,00	2.942.446.028,00	746.736.028,00	134,01
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	507.800.000,00	743.902.000,00	236.102.000,00	146,50
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perikanan	507.800.000,00	743.902.000,00	236.102.000,00	146,50
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	507.800.000,00	743.902.000,00	236.102.000,00	146,50
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	507.800.000,00	743.902.000,00	236.102.000,00	146,50
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	507.800.000,00	743.902.000,00	236.102.000,00	146,50
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1.687.910.000,00	2.198.544.028,00	510.634.028,00	130,25
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pariwisata	1.687.910.000,00	2.198.544.028,00	510.634.028,00	130,25
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.687.910.000,00	2.198.544.028,00	510.634.028,00	130,25
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.687.910.000,00	2.198.544.028,00	510.634.028,00	130,25
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	1.687.910.000,00	2.188.380.345,00	500.470.345,00	129,65
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	10.163.683,00	10.163.683,00	0,00

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	862.567.928.076,00	847.335.464.299,59	(15.232.463.776,41)	98,23
5.02			KEUANGAN	862.567.928.076,00	847.335.464.299,59	(15.232.463.776,41)	98,23
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000		Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah	862.567.928.076,00	847.335.464.299,59	(15.232.463.776,41)	98,23
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	862.567.928.076,00	847.335.464.299,59	(15.232.463.776,41)	98,23
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	124.331.771.493,00	120.582.702.489,59	(3.749.069.003,41)	96,98
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.1.01	Pajak Daerah	109.084.621.493,00	104.082.515.970,00	(5.002.105.523,00)	95,41
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.600.000.000,00	4.886.428.412,02	(713.571.587,98)	87,26
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.647.150.000,00	11.613.758.107,57	1.966.608.107,57	120,39
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	738.236.156.583,00	726.752.761.810,00	(11.483.394.773,00)	98,44
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	693.711.838.190,00	678.824.011.142,00	(14.887.827.048,00)	97,85
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	44.524.318.393,00	47.928.750.668,00	3.404.432.275,00	107,65
7			UNSUR KEWILAYAHAN	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00
7.01			KECAMATAN	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		Kecamatan Selat Nasik	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00
				169.100.000,00	207.448.000,00	38.348.000,00	122,68
	4.01.2.10.0.00.01.0000		Sekretariat Daerah	169.100.000,00	207.448.000,00	38.348.000,00	122,68
	4.01.2.10.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	169.100.000,00	207.448.000,00	38.348.000,00	122,68
	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	169.100.000,00	207.448.000,00	38.348.000,00	122,68
	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	169.100.000,00	191.234.000,00	22.134.000,00	113,09
	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	16.214.000,00	16.214.000,00	0,00
		5	Belanja	1.039.613.857.103,70	943.425.590.181,53	(96.188.266.922,17)	90,75
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	601.534.237.526,70	546.280.826.142,00	(55.253.411.384,70)	90,81
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	238.876.414.117,00	221.530.296.917,00	(17.346.117.200,00)	92,74
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	238.876.414.117,00	221.530.296.917,00	(17.346.117.200,00)	92,74
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	238.876.414.117,00	221.530.296.917,00	(17.346.117.200,00)	92,74
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	229.773.303.554,00	212.603.562.588,00	(17.169.740.966,00)	92,53
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	188.852.167.188,00	173.816.403.458,00	(15.035.763.730,00)	92,04
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.016.266.366,00	30.011.519.940,00	(2.004.746.426,00)	93,74
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	8.904.870.000,00	8.775.639.190,00	(129.230.810,00)	98,55
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	9.103.110.563,00	8.926.734.329,00	(176.376.234,00)	98,06
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.537.497.216,00	4.421.950.122,00	(115.547.094,00)	97,45
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.538.000.000,00	1.501.821.510,00	(36.178.490,00)	97,65
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.027.613.347,00	3.002.962.697,00	(24.650.650,00)	99,19
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	278.641.618.532,66	247.910.211.799,00	(30.731.406.733,66)	88,97

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan	108.676.551.750,00	98.176.407.657,00	(10.500.144.093,00)	90,34
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	108.676.551.750,00	98.176.407.657,00	(10.500.144.093,00)	90,34
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	104.868.865.850,00	94.381.154.360,00	(10.487.711.490,00)	90,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	51.423.976.261,00	45.697.203.495,00	(5.726.772.766,00)	88,86
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.127.889.589,00	47.366.953.888,00	(4.760.935.701,00)	90,87
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	1.200.000.000,00	1.199.996.977,00	(3.023,00)	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.807.685.900,00	3.795.253.297,00	(12.432.603,00)	99,67
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	283.302.800,00	279.737.203,00	(3.565.597,00)	98,74
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.524.383.100,00	3.515.516.094,00	(8.867.006,00)	99,75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		UPT RSUD dr. H. MARSIDI JUDONO	142.166.896.080,66	124.513.529.088,00	(17.653.366.992,66)	87,58
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	142.166.896.080,66	124.513.529.088,00	(17.653.366.992,66)	87,58
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	137.105.586.711,66	121.438.779.101,00	(15.666.807.610,66)	88,57
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	80.131.284.070,00	69.668.916.147,00	(10.462.367.923,00)	86,94
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.974.302.641,66	51.769.862.954,00	(5.204.439.687,66)	90,87
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	5.061.309.369,00	3.074.749.987,00	(1.986.559.382,00)	60,75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.661.309.369,00	3.074.749.987,00	(586.559.382,00)	83,98
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.400.000.000,00	0,00	(1.400.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02		UPT PUSKESMAS SELAT NASIK DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	2.282.917.575,00	2.084.163.441,00	(198.754.134,00)	91,29
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	5	BELANJA DAERAH	2.282.917.575,00	2.084.163.441,00	(198.754.134,00)	91,29
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	5.1	BELANJA OPERASI	2.282.917.575,00	2.084.163.441,00	(198.754.134,00)	91,29
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	5.1.01	Belanja Pegawai	324.561.000,00	322.405.414,00	(2.155.586,00)	99,34
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.958.356.575,00	1.761.758.027,00	(196.598.548,00)	89,96
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03		UPT PUSKESMAS TANJUNG BINGA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	3.436.240.504,00	3.064.504.042,00	(371.736.462,00)	89,18
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	5	BELANJA DAERAH	3.436.240.504,00	3.064.504.042,00	(371.736.462,00)	89,18
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	5.1	BELANJA OPERASI	3.280.023.544,00	2.948.536.973,00	(331.486.571,00)	89,89
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	5.1.01	Belanja Pegawai	818.179.000,00	766.258.747,00	(51.920.253,00)	93,65
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.461.844.544,00	2.182.278.226,00	(279.566.318,00)	88,64
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	5.2	BELANJA MODAL	156.216.960,00	115.967.069,00	(40.249.891,00)	74,23
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156.216.960,00	115.967.069,00	(40.249.891,00)	74,23
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04		UPT PUSKESMAS MEMBALONG DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	3.129.857.663,00	2.925.578.508,00	(204.279.155,00)	93,47
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	5	BELANJA DAERAH	3.129.857.663,00	2.925.578.508,00	(204.279.155,00)	93,47
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	5.1	BELANJA OPERASI	3.024.683.663,00	2.827.967.758,00	(196.715.905,00)	93,50
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	5.1.01	Belanja Pegawai	855.553.100,00	801.161.348,00	(54.391.752,00)	93,64
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.169.130.563,00	2.026.806.410,00	(142.324.153,00)	93,44
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	5.2	BELANJA MODAL	105.174.000,00	97.610.750,00	(7.563.250,00)	92,81
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105.174.000,00	97.610.750,00	(7.563.250,00)	92,81
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05		UPT PUSKESMAS BADAU DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	3.190.546.214,00	2.909.416.893,00	(281.129.321,00)	91,19

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	5	BELANJA DAERAH	3.190.546.214,00	2.909.416.893,00	(281.129.321,00)	91,19
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	5.1	BELANJA OPERASI	3.100.223.214,00	2.821.221.293,00	(279.001.921,00)	91,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	5.1.01	Belanja Pegawai	854.084.060,00	755.336.543,00	(98.747.517,00)	88,44
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.246.139.154,00	2.065.884.750,00	(180.254.404,00)	91,97
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	5.2	BELANJA MODAL	90.323.000,00	88.195.600,00	(2.127.400,00)	97,64
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.323.000,00	88.195.600,00	(2.127.400,00)	97,64
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06		UPT PUSKESMAS PERAWAS DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	2.544.405.912,00	2.379.793.034,00	(164.612.878,00)	93,53
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	5	BELANJA DAERAH	2.544.405.912,00	2.379.793.034,00	(164.612.878,00)	93,53
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	5.1	BELANJA OPERASI	2.458.983.736,00	2.298.673.713,00	(160.310.023,00)	93,48
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	5.1.01	Belanja Pegawai	854.923.158,00	782.470.819,00	(72.452.339,00)	91,53
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.604.060.578,00	1.516.202.894,00	(87.857.684,00)	94,52
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	5.2	BELANJA MODAL	85.422.176,00	81.119.321,00	(4.302.855,00)	94,96
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.422.176,00	81.119.321,00	(4.302.855,00)	94,96
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07		UPT PUSKESMAS SIJUK DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	2.567.855.381,00	2.353.497.628,00	(214.357.753,00)	91,65
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	5	BELANJA DAERAH	2.567.855.381,00	2.353.497.628,00	(214.357.753,00)	91,65
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	5.1	BELANJA OPERASI	2.392.869.467,00	2.235.777.728,00	(157.091.739,00)	93,44
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	5.1.01	Belanja Pegawai	670.933.920,00	734.883.074,00	63.949.154,00	109,53
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.721.935.547,00	1.500.894.654,00	(221.040.893,00)	87,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	5.2	BELANJA MODAL	174.985.914,00	117.719.900,00	(57.266.014,00)	67,27
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	174.985.914,00	117.719.900,00	(57.266.014,00)	67,27
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08		UPT PUSKESMAS AIR SAGA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	3.950.145.537,00	3.559.085.135,00	(391.060.402,00)	90,10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	5	BELANJA DAERAH	3.950.145.537,00	3.559.085.135,00	(391.060.402,00)	90,10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	5.1	BELANJA OPERASI	3.809.051.607,00	3.457.853.135,00	(351.198.472,00)	90,78
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	5.1.01	Belanja Pegawai	1.568.423.188,00	1.383.878.945,00	(184.544.243,00)	88,23
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.240.628.419,00	2.073.974.190,00	(166.654.229,00)	92,56
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	5.2	BELANJA MODAL	141.093.930,00	101.232.000,00	(39.861.930,00)	71,75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.093.930,00	101.232.000,00	(39.861.930,00)	71,75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09		UPT PUSKESMAS TANJUNGPANDAN DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	4.490.302.489,00	3.978.744.209,00	(511.558.280,00)	88,61
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	5	BELANJA DAERAH	4.490.302.489,00	3.978.744.209,00	(511.558.280,00)	88,61
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	5.1	BELANJA OPERASI	4.307.490.842,00	3.845.244.209,00	(462.246.633,00)	89,27
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	5.1.01	Belanja Pegawai	1.920.986.715,00	1.860.053.543,00	(60.933.172,00)	96,83
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.386.504.127,00	1.985.190.666,00	(401.313.461,00)	83,18
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	5.2	BELANJA MODAL	182.811.647,00	133.500.000,00	(49.311.647,00)	73,03
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	182.811.647,00	133.500.000,00	(49.311.647,00)	73,03
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10		UPT PUSKESMAS SIMPANG RUSA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	2.205.899.427,00	1.965.492.164,00	(240.407.263,00)	89,10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	5	BELANJA DAERAH	2.205.899.427,00	1.965.492.164,00	(240.407.263,00)	89,10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	5.1	BELANJA OPERASI	2.125.254.179,00	1.887.994.064,00	(237.260.115,00)	88,84
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	5.1.01	Belanja Pegawai	585.526.237,00	553.650.930,00	(31.875.307,00)	94,56

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.539.727.942,00	1.334.343.134,00	(205.384.808,00)	86,66
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	5.2	BELANJA MODAL	80.645.248,00	77.498.100,00	(3.147.148,00)	96,10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.645.248,00	77.498.100,00	(3.147.148,00)	96,10
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	48.296.663.592,04	43.867.435.937,00	(4.429.227.655,04)	90,83
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	48.296.663.592,04	43.867.435.937,00	(4.429.227.655,04)	90,83
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	48.296.663.592,04	43.867.435.937,00	(4.429.227.655,04)	90,83
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	40.282.074.281,04	36.759.577.711,00	(3.522.496.570,04)	91,26
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	8.844.060.422,00	7.483.609.545,00	(1.360.450.877,00)	84,62
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.438.013.859,04	29.275.968.166,00	(2.162.045.693,04)	93,12
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	8.014.589.311,00	7.107.858.226,00	(906.731.085,00)	88,69
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.2.01	Belanja Modal Tanah	500.000.000,00	491.325.000,00	(8.675.000,00)	98,27
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	258.196.000,00	257.353.500,00	(842.500,00)	99,67
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	800.000.000,00	0,00	(800.000.000,00)	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.456.393.311,00	6.359.179.726,00	(97.213.585,00)	98,49
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8.696.242.452,00	8.413.618.081,00	(282.624.371,00)	96,75
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	8.696.242.452,00	8.413.618.081,00	(282.624.371,00)	96,75
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	8.696.242.452,00	8.413.618.081,00	(282.624.371,00)	96,75
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.734.653.688,00	3.552.090.047,00	(182.563.641,00)	95,11
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.734.653.688,00	3.552.090.047,00	(182.563.641,00)	95,11
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	4.961.588.764,00	4.861.528.034,00	(100.060.730,00)	97,98
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.332.000,00	168.831.000,00	(501.000,00)	99,70
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.024.500.000,00	946.703.200,00	(77.796.800,00)	92,41
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.767.756.764,00	3.745.993.834,00	(21.762.930,00)	99,42
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	18.522.862.399,00	17.074.040.457,00	(1.448.821.942,00)	92,18
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		Satuan Polisi Pamong Praja	12.092.360.204,00	11.671.166.884,00	(421.193.320,00)	96,52
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	12.092.360.204,00	11.671.166.884,00	(421.193.320,00)	96,52
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	11.960.736.404,00	11.547.818.134,00	(412.918.270,00)	96,55
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.484.369.720,00	6.146.172.011,00	(338.197.709,00)	94,78
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.476.366.684,00	5.401.646.123,00	(74.720.561,00)	98,64
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	131.623.800,00	123.348.750,00	(8.275.050,00)	93,71
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.623.800,00	123.348.750,00	(8.275.050,00)	93,71
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.430.502.195,00	5.402.873.573,00	(1.027.628.622,00)	84,02
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	6.430.502.195,00	5.402.873.573,00	(1.027.628.622,00)	84,02
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.417.192.185,00	5.389.670.123,00	(1.027.522.062,00)	83,99
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.774.435.021,00	3.300.117.858,00	(474.317.163,00)	87,43
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.642.757.164,00	2.089.552.265,00	(553.204.899,00)	79,07
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	13.310.010,00	13.203.450,00	(106.560,00)	99,20

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.310.010,00	13.203.450,00	(106.560,00)	99,20
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	8.500.436.434,00	7.485.222.951,00	(1.015.213.483,00)	88,06
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.500.436.434,00	7.485.222.951,00	(1.015.213.483,00)	88,06
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	8.500.436.434,00	7.485.222.951,00	(1.015.213.483,00)	88,06
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.527.543.374,00	6.521.652.902,00	(1.005.890.472,00)	86,64
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.158.811.532,00	4.420.754.120,00	(738.057.412,00)	85,69
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.019.516.224,00	1.770.152.057,00	(249.364.167,00)	87,65
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	349.215.618,00	330.746.725,00	(18.468.893,00)	94,71
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	972.893.060,00	963.570.049,00	(9.323.011,00)	99,04
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.257.060,00	12.459.750,00	(3.797.310,00)	76,64
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	956.636.000,00	951.110.299,00	(5.525.701,00)	99,42
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	107.110.962.464,00	96.390.432.749,68	(10.720.529.714,32)	89,99
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	366.029.053,00	355.169.440,00	(10.859.613,00)	97,03
2.07	2.17.3.30.2.07.01.0000		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja	366.029.053,00	355.169.440,00	(10.859.613,00)	97,03
2.07	2.17.3.30.2.07.01.0000	5	BELANJA DAERAH	366.029.053,00	355.169.440,00	(10.859.613,00)	97,03
2.07	2.17.3.30.2.07.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	366.029.053,00	355.169.440,00	(10.859.613,00)	97,03
2.07	2.17.3.30.2.07.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	366.029.053,00	355.169.440,00	(10.859.613,00)	97,03
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.068.325.655,00	868.085.744,00	(200.239.911,00)	81,26
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.068.325.655,00	868.085.744,00	(200.239.911,00)	81,26
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.068.325.655,00	868.085.744,00	(200.239.911,00)	81,26
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.068.325.655,00	868.085.744,00	(200.239.911,00)	81,26
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.068.325.655,00	868.085.744,00	(200.239.911,00)	81,26
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	417.962.667,00	350.058.883,68	(67.903.783,32)	83,75
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	417.962.667,00	350.058.883,68	(67.903.783,32)	83,75
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	417.962.667,00	350.058.883,68	(67.903.783,32)	83,75
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	417.962.667,00	350.058.883,68	(67.903.783,32)	83,75
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.962.667,00	350.058.883,68	(67.903.783,32)	83,75
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	23.322.800,00	21.335.881,00	(1.986.919,00)	91,48
2.10	4.01.2.10.0.00.01.0007		BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BELITUNG	23.322.800,00	21.335.881,00	(1.986.919,00)	91,48
2.10	4.01.2.10.0.00.01.0007	5	BELANJA DAERAH	23.322.800,00	21.335.881,00	(1.986.919,00)	91,48
2.10	4.01.2.10.0.00.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	23.322.800,00	21.335.881,00	(1.986.919,00)	91,48
2.10	4.01.2.10.0.00.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.322.800,00	21.335.881,00	(1.986.919,00)	91,48
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	16.499.628.266,00	15.817.382.918,00	(682.245.348,00)	95,87
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000		Dinas Lingkungan Hidup	16.499.628.266,00	15.817.382.918,00	(682.245.348,00)	95,87
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	16.499.628.266,00	15.817.382.918,00	(682.245.348,00)	95,87
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	16.136.728.876,00	15.492.347.168,00	(644.381.708,00)	96,01
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.126.845.068,00	5.746.859.886,00	(379.985.182,00)	93,80

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.009.883.808,00	9.745.487.282,00	(264.396.526,00)	97,36
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	362.899.390,00	325.035.750,00	(37.863.640,00)	89,57
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	362.899.390,00	325.035.750,00	(37.863.640,00)	89,57
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.518.829.571,00	4.999.349.540,00	(519.480.031,00)	90,59
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.518.829.571,00	4.999.349.540,00	(519.480.031,00)	90,59
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.518.829.571,00	4.999.349.540,00	(519.480.031,00)	90,59
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.470.163.111,00	4.977.673.940,00	(492.489.171,00)	91,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.828.258.070,00	3.512.827.525,00	(315.430.545,00)	91,76
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.641.905.041,00	1.464.846.415,00	(177.058.626,00)	89,22
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	48.666.460,00	21.675.600,00	(26.990.860,00)	44,54
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.666.460,00	21.675.600,00	(26.990.860,00)	44,54
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.949.075.660,00	6.740.369.358,00	(1.208.706.302,00)	84,79
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.949.075.660,00	6.740.369.358,00	(1.208.706.302,00)	84,79
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.949.075.660,00	6.740.369.358,00	(1.208.706.302,00)	84,79
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.899.120.660,00	6.691.962.858,00	(1.207.157.802,00)	84,72
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.184.238.716,00	4.330.520.234,00	(853.718.482,00)	83,53
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.714.881.944,00	2.361.442.624,00	(353.439.320,00)	86,98
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	49.955.000,00	48.406.500,00	(1.548.500,00)	96,90
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.955.000,00	48.406.500,00	(1.548.500,00)	96,90
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.336.544.280,00	3.678.843.623,00	(657.700.657,00)	84,83
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.336.544.280,00	3.678.843.623,00	(657.700.657,00)	84,83
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.336.544.280,00	3.678.843.623,00	(657.700.657,00)	84,83
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.117.574.580,00	2.703.550.023,00	(414.024.557,00)	86,72
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.117.574.580,00	2.703.550.023,00	(414.024.557,00)	86,72
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.218.969.700,00	975.293.600,00	(243.676.100,00)	80,01
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	93.018.000,00	(6.982.000,00)	93,02
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.118.969.700,00	882.275.600,00	(236.694.100,00)	78,85
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	25.441.754.047,00	23.136.306.304,00	(2.305.447.743,00)	90,94
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	25.441.754.047,00	23.136.306.304,00	(2.305.447.743,00)	90,94
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	25.441.754.047,00	23.136.306.304,00	(2.305.447.743,00)	90,94
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	21.705.275.927,00	19.626.378.677,00	(2.078.897.250,00)	90,42
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.507.241.345,00	5.284.816.568,00	(1.222.424.777,00)	81,21
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.198.034.582,00	14.341.562.109,00	(856.472.473,00)	94,36
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.736.478.120,00	3.509.927.627,00	(226.550.493,00)	93,94

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.186.478.120,00	2.961.075.819,00	(225.402.301,00)	92,93
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	550.000.000,00	548.851.808,00	(1.148.192,00)	99,79
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.926.852.860,00	7.821.270.461,00	(1.105.582.399,00)	87,62
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	8.926.852.860,00	7.821.270.461,00	(1.105.582.399,00)	87,62
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	8.926.852.860,00	7.821.270.461,00	(1.105.582.399,00)	87,62
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.670.392.840,00	7.574.041.548,00	(1.096.351.292,00)	87,36
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.386.612.840,00	4.593.365.810,00	(793.247.030,00)	85,27
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.283.780.000,00	2.980.675.738,00	(303.104.262,00)	90,77
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	256.460.020,00	247.228.913,00	(9.231.107,00)	96,40
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	256.460.020,00	247.228.913,00	(9.231.107,00)	96,40
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8.977.171.645,00	7.249.227.382,00	(1.727.944.263,00)	80,75
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja	8.977.171.645,00	7.249.227.382,00	(1.727.944.263,00)	80,75
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	5	BELANJA DAERAH	8.977.171.645,00	7.249.227.382,00	(1.727.944.263,00)	80,75
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.845.123.145,00	7.242.567.382,00	(1.602.555.763,00)	81,88
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.518.984.626,00	5.717.311.570,00	(801.673.056,00)	87,70
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.326.138.519,00	1.525.255.812,00	(800.882.707,00)	65,57
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	132.048.500,00	6.660.000,00	(125.388.500,00)	5,04
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	132.048.500,00	6.660.000,00	(125.388.500,00)	5,04
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.805.468.690,00	5.182.666.336,00	(622.802.354,00)	89,27
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	5.805.468.690,00	5.182.666.336,00	(622.802.354,00)	89,27
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.805.468.690,00	5.182.666.336,00	(622.802.354,00)	89,27
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.805.468.690,00	5.182.666.336,00	(622.802.354,00)	89,27
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.179.492.894,00	4.642.675.583,00	(536.817.311,00)	89,64
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	625.975.796,00	539.990.753,00	(85.985.043,00)	86,26
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	9.769.055.105,00	9.001.808.871,00	(767.246.234,00)	92,15
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pemuda dan Olahraga	9.769.055.105,00	9.001.808.871,00	(767.246.234,00)	92,15
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	9.769.055.105,00	9.001.808.871,00	(767.246.234,00)	92,15
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	9.629.015.105,00	8.870.258.871,00	(758.756.234,00)	92,12
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.513.713.400,00	3.109.295.068,00	(404.418.332,00)	88,49
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.715.301.705,00	4.432.122.087,00	(283.179.618,00)	93,99
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	1.400.000.000,00	1.328.841.716,00	(71.158.284,00)	94,92
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	140.040.000,00	131.550.000,00	(8.490.000,00)	93,94
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.040.000,00	131.550.000,00	(8.490.000,00)	93,94
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	257.315.367,00	250.665.200,00	(6.650.167,00)	97,42
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	257.315.367,00	250.665.200,00	(6.650.167,00)	97,42
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	257.315.367,00	250.665.200,00	(6.650.167,00)	97,42
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	257.315.367,00	250.665.200,00	(6.650.167,00)	97,42
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.315.367,00	250.665.200,00	(6.650.167,00)	97,42

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	262.360.709,00	205.052.802,00	(57.307.907,00)	78,16
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	262.360.709,00	205.052.802,00	(57.307.907,00)	78,16
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	262.360.709,00	205.052.802,00	(57.307.907,00)	78,16
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	262.360.709,00	205.052.802,00	(57.307.907,00)	78,16
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.360.709,00	205.052.802,00	(57.307.907,00)	78,16
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4.998.738.397,00	4.436.016.141,00	(562.722.256,00)	88,74
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.998.738.397,00	4.436.016.141,00	(562.722.256,00)	88,74
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.998.738.397,00	4.436.016.141,00	(562.722.256,00)	88,74
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.807.469.817,00	3.260.385.831,00	(547.083.986,00)	85,63
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.807.469.817,00	3.260.385.831,00	(547.083.986,00)	85,63
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.191.268.580,00	1.175.630.310,00	(15.638.270,00)	98,69
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	158.595.690,00	155.054.721,00	(3.540.969,00)	97,77
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.000.000.000,00	987.926.500,00	(12.073.500,00)	98,79
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.672.890,00	32.649.089,00	(23.801,00)	99,93
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	6.412.157.594,00	6.199.418.071,00	(212.739.523,00)	96,68
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	6.412.157.594,00	6.199.418.071,00	(212.739.523,00)	96,68
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	6.412.157.594,00	6.199.418.071,00	(212.739.523,00)	96,68
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.359.638.594,00	6.168.293.071,00	(191.345.523,00)	96,99
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.818.758.133,00	4.692.795.204,00	(125.962.929,00)	97,39
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.540.880.461,00	1.475.497.867,00	(65.382.594,00)	95,76
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	52.519.000,00	31.125.000,00	(21.394.000,00)	59,26
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.379.000,00	0,00	(21.379.000,00)	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	31.140.000,00	31.125.000,00	(15.000,00)	99,95
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	80.370.098,00	77.405.794,00	(2.964.304,00)	96,31
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	80.370.098,00	77.405.794,00	(2.964.304,00)	96,31
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	80.370.098,00	77.405.794,00	(2.964.304,00)	96,31
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	80.370.098,00	77.405.794,00	(2.964.304,00)	96,31
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.370.098,00	77.405.794,00	(2.964.304,00)	96,31
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	44.261.751.498,00	38.434.622.159,64	(5.827.129.338,36)	86,83
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	10.016.566.106,00	8.855.314.129,99	(1.161.251.976,01)	88,41
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perikanan	10.016.566.106,00	8.855.314.129,99	(1.161.251.976,01)	88,41
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	10.016.566.106,00	8.855.314.129,99	(1.161.251.976,01)	88,41
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	9.886.266.106,00	8.728.774.129,99	(1.157.491.976,01)	88,29
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.250.535.875,00	5.524.233.049,00	(726.302.826,00)	88,38
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.068.632.541,00	2.685.285.325,99	(383.347.215,01)	87,51
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	567.097.690,00	519.255.755,00	(47.841.935,00)	91,56
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	130.300.000,00	126.540.000,00	(3.760.000,00)	97,11
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.300.000,00	126.540.000,00	(3.760.000,00)	97,11

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	13.864.253.138,00	11.771.444.546,00	(2.092.808.592,00)	84,91
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pariwisata	13.864.253.138,00	11.771.444.546,00	(2.092.808.592,00)	84,91
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	13.864.253.138,00	11.771.444.546,00	(2.092.808.592,00)	84,91
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	13.736.534.318,00	11.644.638.176,00	(2.091.896.142,00)	84,77
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.642.551.660,00	4.626.228.491,00	(1.016.323.169,00)	81,99
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.093.982.658,00	7.018.409.685,00	(1.075.572.973,00)	86,71
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	127.718.820,00	126.806.370,00	(912.450,00)	99,29
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	127.718.820,00	126.806.370,00	(912.450,00)	99,29
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	18.113.018.254,00	16.018.397.137,65	(2.094.621.116,35)	88,44
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	18.113.018.254,00	16.018.397.137,65	(2.094.621.116,35)	88,44
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	18.113.018.254,00	16.018.397.137,65	(2.094.621.116,35)	88,44
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	17.934.967.254,00	15.877.069.637,65	(2.057.897.616,35)	88,53
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	14.121.329.121,00	12.330.331.175,00	(1.790.997.946,00)	87,32
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.932.600.593,00	2.672.576.187,65	(260.024.405,35)	91,13
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	881.037.540,00	874.162.275,00	(6.875.265,00)	99,22
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	178.051.000,00	141.327.500,00	(36.723.500,00)	79,37
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.051.000,00	21.772.500,00	(36.278.500,00)	37,51
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120.000.000,00	119.555.000,00	(445.000,00)	99,63
3.28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	22.829.668,00	19.097.971,00	(3.731.697,00)	83,65
3.28	2.11.3.28.0.00.01.0000		Dinas Lingkungan Hidup	22.829.668,00	19.097.971,00	(3.731.697,00)	83,65
3.28	2.11.3.28.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	22.829.668,00	19.097.971,00	(3.731.697,00)	83,65
3.28	2.11.3.28.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	22.829.668,00	19.097.971,00	(3.731.697,00)	83,65
3.28	2.11.3.28.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.829.668,00	19.097.971,00	(3.731.697,00)	83,65
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.545.456.820,00	1.196.830.546,00	(348.626.274,00)	77,44
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja	1.545.456.820,00	1.196.830.546,00	(348.626.274,00)	77,44
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.545.456.820,00	1.196.830.546,00	(348.626.274,00)	77,44
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	912.418.120,00	841.020.346,00	(71.397.774,00)	92,17
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	912.418.120,00	841.020.346,00	(71.397.774,00)	92,17
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	633.038.700,00	355.810.200,00	(277.228.500,00)	56,21
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.273.700,00	46.465.000,00	(808.700,00)	98,29
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	385.765.000,00	309.345.200,00	(76.419.800,00)	80,19
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	699.627.512,00	573.537.829,00	(126.089.683,00)	81,98
3.31	2.18.3.31.0.00.01.0000		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	699.627.512,00	573.537.829,00	(126.089.683,00)	81,98
3.31	2.18.3.31.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	699.627.512,00	573.537.829,00	(126.089.683,00)	81,98
3.31	2.18.3.31.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	548.038.132,00	456.206.389,00	(91.831.743,00)	83,24
3.31	2.18.3.31.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	548.038.132,00	456.206.389,00	(91.831.743,00)	83,24
3.31	2.18.3.31.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	151.589.380,00	117.331.440,00	(34.257.940,00)	77,40

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.31	2.18.3.31.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	143.609.380,00	109.561.440,00	(34.047.940,00)	76,29
3.31	2.18.3.31.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	7.980.000,00	7.770.000,00	(210.000,00)	97,37
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	84.371.481.302,00	75.469.973.770,00	(8.901.507.532,00)	89,45
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	48.448.702.762,00	43.416.106.981,00	(5.032.595.781,00)	89,61
4.01	4.01.0.00.0.00.01.01		BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BELITUNG	208.482.400,00	150.967.564,00	(57.514.836,00)	72,41
4.01	4.01.0.00.0.00.01.01	5	BELANJA DAERAH	208.482.400,00	150.967.564,00	(57.514.836,00)	72,41
4.01	4.01.0.00.0.00.01.01	5.1	BELANJA OPERASI	208.482.400,00	150.967.564,00	(57.514.836,00)	72,41
4.01	4.01.0.00.0.00.01.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.482.400,00	150.967.564,00	(57.514.836,00)	72,41
4.01	4.01.0.00.0.00.01.02		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KAB. BELITUNG	1.778.121.982,00	1.684.348.489,00	(93.773.493,00)	94,73
4.01	4.01.0.00.0.00.01.02	5	BELANJA DAERAH	1.778.121.982,00	1.684.348.489,00	(93.773.493,00)	94,73
4.01	4.01.0.00.0.00.01.02	5.1	BELANJA OPERASI	1.778.121.982,00	1.684.348.489,00	(93.773.493,00)	94,73
4.01	4.01.0.00.0.00.01.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.778.121.982,00	1.684.348.489,00	(93.773.493,00)	94,73
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003		BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG	33.867.012.655,00	29.614.922.322,00	(4.252.090.333,00)	87,44
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	33.867.012.655,00	29.614.922.322,00	(4.252.090.333,00)	87,44
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	33.625.105.035,00	29.382.265.222,00	(4.242.839.813,00)	87,38
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	22.300.712.176,00	19.270.685.644,00	(3.030.026.532,00)	86,41
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.324.392.859,00	10.111.579.578,00	(1.212.813.281,00)	89,29
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	241.907.620,00	232.657.100,00	(9.250.520,00)	96,18
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	231.917.620,00	223.222.100,00	(8.695.520,00)	96,25
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.990.000,00	9.435.000,00	(555.000,00)	94,44
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KAB. BELITUNG	237.073.500,00	150.402.313,00	(86.671.187,00)	63,44
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	5	BELANJA DAERAH	237.073.500,00	150.402.313,00	(86.671.187,00)	63,44
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	237.073.500,00	150.402.313,00	(86.671.187,00)	63,44
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.073.500,00	150.402.313,00	(86.671.187,00)	63,44
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. BELITUNG	141.416.200,00	126.455.424,00	(14.960.776,00)	89,42
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	5	BELANJA DAERAH	141.416.200,00	126.455.424,00	(14.960.776,00)	89,42
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	141.416.200,00	126.455.424,00	(14.960.776,00)	89,42
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.416.200,00	126.455.424,00	(14.960.776,00)	89,42
4.01	4.01.0.00.0.00.01.06		BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BELITUNG	381.257.300,00	353.024.744,00	(28.232.556,00)	92,59
4.01	4.01.0.00.0.00.01.06	5	BELANJA DAERAH	381.257.300,00	353.024.744,00	(28.232.556,00)	92,59
4.01	4.01.0.00.0.00.01.06	5.1	BELANJA OPERASI	381.257.300,00	353.024.744,00	(28.232.556,00)	92,59
4.01	4.01.0.00.0.00.01.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	381.257.300,00	353.024.744,00	(28.232.556,00)	92,59
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0007		BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BELITUNG	643.351.900,00	552.936.144,00	(90.415.756,00)	85,95
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0007	5	BELANJA DAERAH	643.351.900,00	552.936.144,00	(90.415.756,00)	85,95
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	643.351.900,00	552.936.144,00	(90.415.756,00)	85,95
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.351.900,00	227.936.144,00	(90.415.756,00)	71,60
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0007	5.1.05	Belanja Hibah	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.08		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. BELITUNG	460.098.475,00	312.641.233,00	(147.457.242,00)	67,95

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
4.01	4.01.0.00.0.00.01.08	5	BELANJA DAERAH	460.098.475,00	312.641.233,00	(147.457.242,00)	67,95
4.01	4.01.0.00.0.00.01.08	5.1	BELANJA OPERASI	460.098.475,00	312.641.233,00	(147.457.242,00)	67,95
4.01	4.01.0.00.0.00.01.08	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	460.098.475,00	312.641.233,00	(147.457.242,00)	67,95
4.01	4.01.0.00.0.00.01.09		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KAB. BELITUNG	10.731.888.350,00	10.470.408.748,00	(261.479.602,00)	97,56
4.01	4.01.0.00.0.00.01.09	5	BELANJA DAERAH	10.731.888.350,00	10.470.408.748,00	(261.479.602,00)	97,56
4.01	4.01.0.00.0.00.01.09	5.1	BELANJA OPERASI	10.731.888.350,00	10.470.408.748,00	(261.479.602,00)	97,56
4.01	4.01.0.00.0.00.01.09	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.141.888.350,00	3.958.293.019,00	(183.595.331,00)	95,57
4.01	4.01.0.00.0.00.01.09	5.1.05	Belanja Hibah	6.590.000.000,00	6.512.115.729,00	(77.884.271,00)	98,82
4.02			SEKRETARIAT DPRD	35.922.778.540,00	32.053.866.789,00	(3.868.911.751,00)	89,23
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat DPRD	35.922.778.540,00	32.053.866.789,00	(3.868.911.751,00)	89,23
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	35.922.778.540,00	32.053.866.789,00	(3.868.911.751,00)	89,23
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	34.449.921.400,00	30.835.981.045,00	(3.613.940.355,00)	89,51
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	18.343.038.000,00	16.578.595.354,00	(1.764.442.646,00)	90,38
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.106.883.400,00	14.257.385.691,00	(1.849.497.709,00)	88,52
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.472.857.140,00	1.217.885.744,00	(254.971.396,00)	82,69
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.472.857.140,00	1.217.885.744,00	(254.971.396,00)	82,69
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	152.281.975.057,00	142.905.728.596,90	(9.376.246.460,10)	93,84
5.01			PERENCANAAN	10.290.562.642,00	9.767.473.853,90	(523.088.788,10)	94,92
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	10.290.562.642,00	9.767.473.853,90	(523.088.788,10)	94,92
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	10.290.562.642,00	9.767.473.853,90	(523.088.788,10)	94,92
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	10.240.562.642,00	9.718.053.077,90	(522.509.564,10)	94,90
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.557.420.500,00	7.370.345.351,00	(187.075.149,00)	97,52
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.683.142.142,00	2.347.707.726,90	(335.434.415,10)	87,50
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.420.776,00	(579.224,00)	98,84
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	49.420.776,00	(579.224,00)	98,84
5.02			KEUANGAN	131.652.911.314,00	124.297.612.235,00	(7.355.299.079,00)	94,41
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	119.188.504.469,00	114.533.315.492,00	(4.655.188.977,00)	96,09
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	119.188.504.469,00	114.533.315.492,00	(4.655.188.977,00)	96,09
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	11.227.972.984,00	8.847.417.692,00	(2.380.555.292,00)	78,80
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.026.128.363,00	5.947.265.621,00	(1.078.862.742,00)	84,64
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.553.156.393,00	2.359.328.444,00	(1.193.827.949,00)	66,40
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.04	Belanja Subsidi	648.688.228,00	540.823.627,00	(107.864.601,00)	83,37
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	71.248.680,00	63.880.500,00	(7.368.180,00)	89,66
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.248.680,00	63.880.500,00	(7.368.180,00)	89,66
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.250.000.000,00	0,00	(1.250.000.000,00)	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.250.000.000,00	0,00	(1.250.000.000,00)	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4	BELANJA TRANSFER	106.639.282.805,00	105.622.017.300,00	(1.017.265.505,00)	99,05
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.811.046.305,00	11.787.830.000,00	(23.216.305,00)	99,80

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	94.828.236.500,00	93.834.187.300,00	(994.049.200,00)	98,95
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000		Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah	12.464.406.845,00	9.764.296.743,00	(2.700.110.102,00)	78,34
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	12.464.406.845,00	9.764.296.743,00	(2.700.110.102,00)	78,34
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	12.306.872.315,00	9.626.068.443,00	(2.680.803.872,00)	78,22
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	8.597.809.312,00	6.915.537.120,00	(1.682.272.192,00)	80,43
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.709.063.003,00	2.710.531.323,00	(998.531.680,00)	73,08
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	157.534.530,00	138.228.300,00	(19.306.230,00)	87,74
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	157.534.530,00	138.228.300,00	(19.306.230,00)	87,74
5.03			KEPEGAWAIAN	9.169.918.911,00	8.058.359.008,00	(1.111.559.903,00)	87,88
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.169.918.911,00	8.058.359.008,00	(1.111.559.903,00)	87,88
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	9.169.918.911,00	8.058.359.008,00	(1.111.559.903,00)	87,88
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	9.169.918.911,00	8.058.359.008,00	(1.111.559.903,00)	87,88
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.265.602.538,00	5.764.196.808,00	(501.405.730,00)	92,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.904.316.373,00	2.294.162.200,00	(610.154.173,00)	78,99
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.063.504.883,00	712.536.794,00	(350.968.089,00)	67,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.063.504.883,00	712.536.794,00	(350.968.089,00)	67,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.063.504.883,00	712.536.794,00	(350.968.089,00)	67,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.063.504.883,00	712.536.794,00	(350.968.089,00)	67,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.063.504.883,00	712.536.794,00	(350.968.089,00)	67,00
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	105.077.307,00	69.746.706,00	(35.330.601,00)	66,38
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	105.077.307,00	69.746.706,00	(35.330.601,00)	66,38
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	105.077.307,00	69.746.706,00	(35.330.601,00)	66,38
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	105.077.307,00	69.746.706,00	(35.330.601,00)	66,38
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.077.307,00	69.746.706,00	(35.330.601,00)	66,38
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	11.385.275.163,00	10.113.194.498,00	(1.272.080.665,00)	88,83
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	11.385.275.163,00	10.113.194.498,00	(1.272.080.665,00)	88,83
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		Inspektorat	11.385.275.163,00	10.113.194.498,00	(1.272.080.665,00)	88,83
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	11.385.275.163,00	10.113.194.498,00	(1.272.080.665,00)	88,83
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	11.293.095.213,00	10.036.981.898,00	(1.256.113.315,00)	88,88
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	9.845.274.567,00	8.837.957.919,00	(1.007.316.648,00)	89,77
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.447.820.646,00	1.199.023.979,00	(248.796.667,00)	82,82
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	92.179.950,00	76.212.600,00	(15.967.350,00)	82,68
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.179.950,00	76.212.600,00	(15.967.350,00)	82,68
7			UNSUR KEWILAYAHAN	30.489.961.852,00	26.203.666.180,31	(4.286.295.671,69)	85,94
7.01			KECAMATAN	30.489.961.852,00	26.203.666.180,31	(4.286.295.671,69)	85,94
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00		Kecamatan Tanjungpandan	10.977.872.301,00	9.050.410.468,00	(1.927.461.833,00)	82,44
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	5	BELANJA DAERAH	10.977.872.301,00	9.050.410.468,00	(1.927.461.833,00)	82,44
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	5.1	BELANJA OPERASI	10.977.872.301,00	9.050.410.468,00	(1.927.461.833,00)	82,44

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	5.1.01	Belanja Pegawai	9.855.065.349,00	8.159.168.701,00	(1.695.896.648,00)	82,79
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.122.806.952,00	891.241.767,00	(231.565.185,00)	79,38
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		Kecamatan Badau	3.125.603.554,00	2.638.575.268,00	(487.028.286,00)	84,42
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	3.125.603.554,00	2.638.575.268,00	(487.028.286,00)	84,42
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.125.603.554,00	2.638.575.268,00	(487.028.286,00)	84,42
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.352.124.491,00	1.952.848.194,00	(399.276.297,00)	83,02
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	773.479.063,00	685.727.074,00	(87.751.989,00)	88,65
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		Kecamatan Sijuk	3.588.730.266,00	3.046.203.339,00	(542.526.927,00)	84,88
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	3.588.730.266,00	3.046.203.339,00	(542.526.927,00)	84,88
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.567.449.826,00	3.026.556.339,00	(540.893.487,00)	84,84
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.696.742.926,00	2.202.486.406,00	(494.256.520,00)	81,67
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	870.706.900,00	824.069.933,00	(46.636.967,00)	94,64
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	21.280.440,00	19.647.000,00	(1.633.440,00)	92,32
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.280.440,00	19.647.000,00	(1.633.440,00)	92,32
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		Kecamatan Membalong	3.685.870.083,00	3.345.279.517,00	(340.590.566,00)	90,76
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	3.685.870.083,00	3.345.279.517,00	(340.590.566,00)	90,76
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.685.870.083,00	3.345.279.517,00	(340.590.566,00)	90,76
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.777.286.788,00	2.588.178.472,00	(189.108.316,00)	93,19
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	908.583.295,00	757.101.045,00	(151.482.250,00)	83,33
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		Kecamatan Selat Nasik	3.313.847.303,00	2.737.848.162,31	(575.999.140,69)	82,62
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5	BELANJA DAERAH	3.313.847.303,00	2.737.848.162,31	(575.999.140,69)	82,62
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.313.847.303,00	2.737.848.162,31	(575.999.140,69)	82,62
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.376.400.983,00	1.878.232.577,00	(498.168.406,00)	79,04
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	937.446.320,00	859.615.585,31	(77.830.734,69)	91,70
7.01	7.01.0.00.0.00.01.01		KELURAHAN KOTA	808.838.471,00	774.622.620,00	(34.215.851,00)	95,77
7.01	7.01.0.00.0.00.01.01	5	BELANJA DAERAH	808.838.471,00	774.622.620,00	(34.215.851,00)	95,77
7.01	7.01.0.00.0.00.01.01	5.1	BELANJA OPERASI	808.838.471,00	774.622.620,00	(34.215.851,00)	95,77
7.01	7.01.0.00.0.00.01.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	808.838.471,00	774.622.620,00	(34.215.851,00)	95,77
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02		KELURAHAN PARIT	730.098.636,00	696.750.450,00	(33.348.186,00)	95,43
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	5	BELANJA DAERAH	730.098.636,00	696.750.450,00	(33.348.186,00)	95,43
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	5.1	BELANJA OPERASI	730.098.636,00	696.750.450,00	(33.348.186,00)	95,43
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	730.098.636,00	696.750.450,00	(33.348.186,00)	95,43
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03		KELURAHAN KAMPONG DAMAI	701.011.480,00	693.110.049,00	(7.901.431,00)	98,87
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	5	BELANJA DAERAH	701.011.480,00	693.110.049,00	(7.901.431,00)	98,87
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	5.1	BELANJA OPERASI	701.011.480,00	693.110.049,00	(7.901.431,00)	98,87
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	701.011.480,00	693.110.049,00	(7.901.431,00)	98,87
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04		KELURAHAN PAAL SATU	802.200.626,00	747.175.596,00	(55.025.030,00)	93,14
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	5	BELANJA DAERAH	802.200.626,00	747.175.596,00	(55.025.030,00)	93,14

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	5.1	BELANJA OPERASI	802.200.626,00	747.175.596,00	(55.025.030,00)	93,14
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	802.200.626,00	747.175.596,00	(55.025.030,00)	93,14
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05		KELURAHAN LESUNG BATANG	844.493.194,00	754.521.073,00	(89.972.121,00)	89,35
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	5	BELANJA DAERAH	844.493.194,00	754.521.073,00	(89.972.121,00)	89,35
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	5.1	BELANJA OPERASI	844.493.194,00	754.521.073,00	(89.972.121,00)	89,35
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	844.493.194,00	754.521.073,00	(89.972.121,00)	89,35
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06		KELURAHAN PANGKAL LALANG	1.096.592.073,00	1.006.008.670,00	(90.583.403,00)	91,74
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	5	BELANJA DAERAH	1.096.592.073,00	1.006.008.670,00	(90.583.403,00)	91,74
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	5.1	BELANJA OPERASI	1.096.592.073,00	1.006.008.670,00	(90.583.403,00)	91,74
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.096.592.073,00	1.006.008.670,00	(90.583.403,00)	91,74
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07		KELURAHAN TANJUNG PENDAM	814.803.865,00	713.160.968,00	(101.642.897,00)	87,53
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	5	BELANJA DAERAH	814.803.865,00	713.160.968,00	(101.642.897,00)	87,53
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	5.1	BELANJA OPERASI	814.803.865,00	713.160.968,00	(101.642.897,00)	87,53
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	814.803.865,00	713.160.968,00	(101.642.897,00)	87,53
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.178.212.241,00	7.627.146.085,00	(551.066.156,00)	93,26
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.178.212.241,00	7.627.146.085,00	(551.066.156,00)	93,26
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.178.212.241,00	7.627.146.085,00	(551.066.156,00)	93,26
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	8.178.212.241,00	7.627.146.085,00	(551.066.156,00)	93,26
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.158.033.241,00	7.607.046.085,00	(550.987.156,00)	93,25
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.755.953.176,00	3.387.866.543,00	(368.086.633,00)	90,20
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.774.760.065,00	2.591.859.542,00	(182.900.523,00)	93,41
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	1.627.320.000,00	1.627.320.000,00	0,00	100,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	20.179.000,00	20.100.000,00	(79.000,00)	99,61
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.179.000,00	20.100.000,00	(79.000,00)	99,61
			Jumlah	(99.023.375.881,70)	(3.183.342.626,44)	95.840.033.255,26	3,21

BUPATI BELITUNG,

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

Lampiran I.2 : Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
Audited

(dalam rupiah)

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI PER 31 DESEMBER 2025	(%)	REALISASI 2024
1	**PENDAPATAN**				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**				
3	Pendapatan Pajak Daerah	109.084.621.493,00	104.082.515.970,00	95,41	95.733.329.497,25
4	Pendapatan Retribusi Daerah	78.007.440.946,00	81.467.881.793,50	104,44	28.328.411.252,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.600.000.000,00	4.886.428.412,02	87,26	5.566.654.063,95
6	Lain-lain PAD Yang Sah	9.662.262.200,00	23.052.659.569,57	238,58	55.404.647.823,13
7	**JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA (3 s.d 6)**	**202.354.324.639,00**	**213.489.485.745,09**	**105,50**	**185.033.042.636,33**
8	**PENDAPATAN TRANSFER**				
9	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**				
10	Dana Bagi Hasil	39.425.962.000,00	38.705.944.300,00	98,17	80.735.062.654,00
11	Dana Alokasi Umum	489.709.683.000,00	478.853.010.054,00	97,78	485.393.500.051,00
12	Dana Alokasi Khusus - Fisik	10.821.511.000,00	8.848.258.410,00	81,77	10.766.768.288,00
13	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	91.553.177.190,00	91.209.342.578,00	99,62	84.237.114.249,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (10 s.d 13)	631.510.333.190,00	617.616.555.342,00	97,80	661.132.445.242,00
15	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**				
16	Dana Insentif Daerah		-	-	-
17	Dana Otonomi Khusus	-	-		-

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI PER 31 DESEMBER 2025	(%)	REALISASI 2024
18	Dana Keistimewaan	-	-		-
19	Dana Desa	41.614.636.000,00	40.620.586.800,00	97,61	41.477.591.670,00
20	Insentif Fiskal	20.586.869.000,00	20.586.869.000,00	100,00	15.976.321.000,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (16 s.d 20)	62.201.505.000,00	61.207.455.800,00	98,40	57.453.912.670,00
22	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**				
23	Pendapatan Bagi Hasil	42.743.036.393,00	46.262.718.168,00	108,23	59.001.661.334,00
24	Bantuan Keuangan	1.781.282.000,00	1.666.032.500,00	93,53	3.971.626.000,00
25	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (23 s.d 24)	44.524.318.393,00	47.928.750.668,00	107,65	62.973.287.334,00
26	**JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (14+21+25)**	**738.236.156.583,00**	**726.752.761.810,00**	**98,44**	**781.559.645.246,00**
27	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**				
28	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
29	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
30	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	10.777.416.768,00
31	**JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH (28 s.d 30)**	**-**	**-**	**-**	**10.777.416.768,00**
32	**TOTAL PENDAPATAN (7+26+31)**	**940.590.481.222,00**	**940.242.247.555,09**	**99,96**	**977.370.104.650,33**
33	**BELANJA**				
34	**BELANJA OPERASI**				
35	Belanja Pegawai	529.950.395.509,00	473.457.900.870,00	89,34	475.569.482.472,00
36	Belanja Barang dan Jasa	335.543.976.031,70	303.357.300.325,53	90,41	363.320.239.519,78
37	Belanja Subsidi	648.688.228,00	540.823.627,00	83,37	638.399.797,00
38	Belanja Hibah	21.495.325.230,00	21.162.331.642,00	98,45	46.220.077.443,00
39	Belanja Bantuan Sosial	466.215.618,00	447.746.725,00	96,04	235.972.000,00
40	**JUMLAH BELANJA OPERASI (35 s.d 39)**	**888.104.600.616,70**	**798.966.103.189,53**	**89,96**	**885.984.171.231,78**

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI PER 31 DESEMBER 2025	(%)	REALISASI 2024
41	**BELANJA MODAL**				
42	Belanja Modal Tanah	500.000.000,00	491.325.000,00	98,27	4.135.660.290,00
43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.118.173.570,00	15.344.503.359,00	89,64	26.330.082.535,00
44	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.732.488.800,00	8.954.328.979,00	76,32	18.418.277.038,62
45	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.192.587.965,00	10.996.019.657,00	98,24	14.696.115.290,00
46	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.037.603.347,00	3.012.397.697,00	99,17	3.400.250.200,00
47	Belanja Modal Aset Lainnya	39.120.000,00	38.895.000,00	99,42	164.983.850,00
48	**JUMLAH BELANJA MODAL (42 s.d 47)**	**43.619.973.682,00**	**38.837.469.692,00**	**89,04**	**67.145.369.203,62**
49	**BELANJA TAK TERDUGA**				
50	Belanja Tak Terduga	1.250.000.000,00	-	-	-
51	**JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA (50)**	**1.250.000.000,00**	**-**	-	**-**
52	**BELANJA TRANSFER**				
53	Belanja Bagi Hasil	11.811.046.305,00	11.787.830.000,00	99,80	9.753.057.800,00
54	Belanja Bantuan Keuangan	94.828.236.500,00	93.834.187.300,00	98,95	98.096.162.570,00
55	**JUMLAH BELANJA TRANSFER (53 s.d 54)**	**106.639.282.805,00**	**105.622.017.300,00**	99,05	**107.849.220.370,00**
56	**JUMLAH BELANJA (40+48+50+55)**	**1.039.613.857.103,70**	**943.425.590.181,53**	**90,75**	**1.060.978.760.805,40**
57	**SURPLUS / (DEFISIT) (32-56)**	**(99.023.375.881,70)**	**(3.183.342.626,44)**	**3,21**	**(83.608.656.155,07)**
58	**PEMBIAYAAN**				
59	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**				
60	Penggunaan SiLPA	99.023.375.881,70	99.023.375.881,70	100,00	185.632.032.036,77
61	**JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (59)**	**99.023.375.881,70**	**99.023.375.881,70**	**100,00**	**185.632.032.036,77**

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI PER 31 DESEMBER 2025	(%)	REALISASI 2024
62	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**				
63	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	-	-	3.000.000.000,00
64	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
65	**JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (63 s.d 64)**	**-**	**-**	**-**	**3.000.000.000,00**
66	**PEMBIAYAAN NETTO (61-65)**	**99.023.375.881,70**	**99.023.375.881,70**	**100,00**	**182.632.032.036,77**
67	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (57+66)**	**-**	**95.840.033.255,26**	**-**	**99.023.375.881,70**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPATI BELITUNG,

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.01.2.22.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	109.200.000,00	85.168.500,00	(24.031.500,00)	77,99	
	1.01.2.22.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	109.200.000,00	85.168.500,00	(24.031.500,00)	77,99	
	1.01.2.22.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	109.200.000,00	85.168.500,00	(24.031.500,00)	77,99	
				JUMLAH PENDAPATAN	109.200.000,00	85.168.500,00	(24.031.500,00)	77,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	238.876.414.117,00	221.530.296.917,00	(17.346.117.200,00)	92,73	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	191.462.949.475,00	176.054.403.582,00	(15.408.545.893,00)	91,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	12.194.460,00	8.593.500,00	(3.600.960,00)	70,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5.567.760,00	3.577.500,00	(1.990.260,00)	64,25	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.567.760,00	3.577.500,00	(1.990.260,00)	64,25	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.567.760,00	3.577.500,00	(1.990.260,00)	64,25	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.626.700,00	5.016.000,00	(1.610.700,00)	75,69	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	6.626.700,00	5.016.000,00	(1.610.700,00)	75,69	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.626.700,00	5.016.000,00	(1.610.700,00)	75,69	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	188.868.133.428,00	173.830.170.458,00	(15.037.962.970,00)	92,03	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	188.852.167.188,00	173.816.403.458,00	(15.035.763.730,00)	92,03	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	188.852.167.188,00	173.816.403.458,00	(15.035.763.730,00)	92,03	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	188.852.167.188,00	173.816.403.458,00	(15.035.763.730,00)	92,03	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	11.635.353,00	10.483.700,00	(1.151.653,00)	90,10	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.635.353,00	10.483.700,00	(1.151.653,00)	90,10	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.635.353,00	10.483.700,00	(1.151.653,00)	90,10	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	4.330.887,00	3.283.300,00	(1.047.587,00)	75,81	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	4.330.887,00	3.283.300,00	(1.047.587,00)	75,81	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.330.887,00	3.283.300,00	(1.047.587,00)	75,81	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	221.268.937,00	176.911.650,00	(44.357.287,00)	79,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0001		PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	150.000.000,00	119.396.450,00	(30.603.550,00)	79,59	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	119.396.450,00	(30.603.550,00)	79,59	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	119.396.450,00	(30.603.550,00)	79,59	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0004		PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	55.000.000,00	42.447.000,00	(12.553.000,00)	77,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	42.447.000,00	(12.553.000,00)	77,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	42.447.000,00	(12.553.000,00)	77,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0005		REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	16.268.937,00	15.068.200,00	(1.200.737,00)	92,61	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16.268.937,00	15.068.200,00	(1.200.737,00)	92,61	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.268.937,00	15.068.200,00	(1.200.737,00)	92,61	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	107.250.000,00	78.006.001,00	(29.243.999,00)	72,73	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0005		MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	23.250.000,00	0,00	(23.250.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	23.250.000,00	0,00	(23.250.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.250.000,00	0,00	(23.250.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	84.000.000,00	78.006.001,00	(5.993.999,00)	92,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	84.000.000,00	78.006.001,00	(5.993.999,00)	92,86	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	78.006.001,00	(5.993.999,00)	92,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	706.354.336,00	637.808.973,00	(68.545.363,00)	90,29	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	12.258.174,00	12.225.500,00	(32.674,00)	99,73	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.258.174,00	12.225.500,00	(32.674,00)	99,73	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.258.174,00	12.225.500,00	(32.674,00)	99,73	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	95.587.965,00	93.351.200,00	(2.236.765,00)	97,65	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	95.587.965,00	93.351.200,00	(2.236.765,00)	97,65	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.587.965,00	93.351.200,00	(2.236.765,00)	97,65	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	29.803.833,00	29.802.000,00	(1.833,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	29.803.833,00	29.802.000,00	(1.833,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.803.833,00	29.802.000,00	(1.833,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	335.121.594,00	301.476.175,00	(33.645.419,00)	89,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	335.121.594,00	301.476.175,00	(33.645.419,00)	89,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.121.594,00	301.476.175,00	(33.645.419,00)	89,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	75.504.420,00	66.280.000,00	(9.224.420,00)	87,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	75.504.420,00	66.280.000,00	(9.224.420,00)	87,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.504.420,00	66.280.000,00	(9.224.420,00)	87,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	8.604.720,00	8.430.000,00	(174.720,00)	97,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.604.720,00	8.430.000,00	(174.720,00)	97,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.604.720,00	8.430.000,00	(174.720,00)	97,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	149.473.630,00	126.244.098,00	(23.229.532,00)	84,45	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	149.473.630,00	126.244.098,00	(23.229.532,00)	84,45	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.473.630,00	126.244.098,00	(23.229.532,00)	84,45	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	312.019.470,00	206.630.000,00	(105.389.470,00)	66,22	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	177.019.470,00	72.333.000,00	(104.686.470,00)	40,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.571.980,00	0,00	(3.571.980,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.571.980,00	0,00	(3.571.980,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	173.447.490,00	72.333.000,00	(101.114.490,00)	41,70	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	173.447.490,00	72.333.000,00	(101.114.490,00)	41,70	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	135.000.000,00	134.297.000,00	(703.000,00)	99,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0010	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.990.000,00	(10.000,00)	99,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.990.000,00	(10.000,00)	99,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	125.000.000,00	124.307.000,00	(693.000,00)	99,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	125.000.000,00	124.307.000,00	(693.000,00)	99,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	885.072.834,00	798.721.000,00	(86.351.834,00)	90,24	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	149.152.434,00	134.686.700,00	(14.465.734,00)	90,30	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	149.152.434,00	134.686.700,00	(14.465.734,00)	90,30	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.152.434,00	134.686.700,00	(14.465.734,00)	90,30	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	729.920.400,00	658.034.300,00	(71.886.100,00)	90,15	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	729.920.400,00	658.034.300,00	(71.886.100,00)	90,15	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	729.920.400,00	658.034.300,00	(71.886.100,00)	90,15	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	350.656.010,00	317.562.000,00	(33.094.010,00)	90,56	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	101.679.000,00	88.179.600,00	(13.499.400,00)	86,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	101.679.000,00	88.179.600,00	(13.499.400,00)	86,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.679.000,00	88.179.600,00	(13.499.400,00)	86,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	49.669.000,00	38.433.400,00	(11.235.600,00)	77,37	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	49.669.000,00	38.433.400,00	(11.235.600,00)	77,37	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.669.000,00	38.433.400,00	(11.235.600,00)	77,37	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	61.833.010,00	54.129.000,00	(7.704.010,00)	87,54	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	61.833.010,00	54.129.000,00	(7.704.010,00)	87,54	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.833.010,00	54.129.000,00	(7.704.010,00)	87,54	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	137.475.000,00	136.820.000,00	(655.000,00)	99,52	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	137.475.000,00	136.820.000,00	(655.000,00)	99,52	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.475.000,00	136.820.000,00	(655.000,00)	99,52	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.1.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	47.302.503.756,00	45.403.008.835,00	(1.899.494.921,00)	95,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01		PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	25.050.403.776,00	23.953.595.844,00	(1.096.807.932,00)	95,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025		PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	483.945.976,00	188.516.408,00	(295.429.568,00)	38,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1	BELANJA OPERASI	483.945.976,00	188.516.408,00	(295.429.568,00)	38,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	483.945.976,00	188.516.408,00	(295.429.568,00)	38,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026		PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	1.808.270.244,00	1.707.170.600,00	(101.099.644,00)	94,40	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	1.808.270.244,00	1.707.170.600,00	(101.099.644,00)	94,40	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.808.270.244,00	1.707.170.600,00	(101.099.644,00)	94,40	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	645.366.060,00	291.831.300,00	(353.534.760,00)	45,21	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	5.1	BELANJA OPERASI	645.366.060,00	291.831.300,00	(353.534.760,00)	45,21	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	645.366.060,00	291.831.300,00	(353.534.760,00)	45,21	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH	2.254.620.000,00	2.170.920.000,00	(83.700.000,00)	96,28	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	2.254.620.000,00	2.170.920.000,00	(83.700.000,00)	96,28	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000,00	0,00	(60.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1.05	Belanja Hibah	2.254.560.000,00	2.170.920.000,00	(83.640.000,00)	96,29	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029		PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	17.688.501.776,00	17.606.402.210,00	(82.099.566,00)	99,53	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	13.122.804.722,00	13.065.213.206,00	(57.591.516,00)	99,56	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.486.734.722,00	11.438.483.655,00	(48.251.067,00)	99,57	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.05	Belanja Hibah	1.636.070.000,00	1.626.729.551,00	(9.340.449,00)	99,42	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2	BELANJA MODAL	4.565.697.054,00	4.541.189.004,00	(24.508.050,00)	99,46	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.651.677.307,00	2.651.555.707,00	(121.600,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.914.019.747,00	1.889.633.297,00	(24.386.450,00)	98,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	158.627.700,00	89.712.000,00	(68.915.700,00)	56,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030	5.1	BELANJA OPERASI	158.627.700,00	89.712.000,00	(68.915.700,00)	56,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.627.700,00	89.712.000,00	(68.915.700,00)	56,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	460.023.020,00	402.153.400,00	(57.869.620,00)	87,42	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	5.1	BELANJA OPERASI	460.023.020,00	402.153.400,00	(57.869.620,00)	87,42	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	460.023.020,00	402.153.400,00	(57.869.620,00)	87,42	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	831.600.000,00	797.509.930,00	(34.090.070,00)	95,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.2	BELANJA MODAL	831.600.000,00	797.509.930,00	(34.090.070,00)	95,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	831.600.000,00	797.509.930,00	(34.090.070,00)	95,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0054		PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR	505.000.000,00	495.283.000,00	(9.717.000,00)	98,07	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0054	5.1	BELANJA OPERASI	505.000.000,00	495.283.000,00	(9.717.000,00)	98,07	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0054	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	505.000.000,00	495.283.000,00	(9.717.000,00)	98,07	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055		PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK	214.449.000,00	204.096.996,00	(10.352.004,00)	95,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055	5.1	BELANJA OPERASI	1.236.000,00	395.000,00	(841.000,00)	31,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.236.000,00	395.000,00	(841.000,00)	31,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055	5.2	BELANJA MODAL	213.213.000,00	203.701.996,00	(9.511.004,00)	95,53	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	213.213.000,00	203.701.996,00	(9.511.004,00)	95,53	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02		PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	14.992.777.272,00	14.546.209.554,00	(446.567.718,00)	97,02	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032		PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	508.749.802,00	501.373.000,00	(7.376.802,00)	98,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	5.1	BELANJA OPERASI	508.749.802,00	501.373.000,00	(7.376.802,00)	98,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	508.749.802,00	501.373.000,00	(7.376.802,00)	98,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038		PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	420.000.292,00	296.400.234,00	(123.600.058,00)	70,57	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	5.1	BELANJA OPERASI	420.000.292,00	296.400.234,00	(123.600.058,00)	70,57	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.000.292,00	296.400.234,00	(123.600.058,00)	70,57	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039		PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	998.894.550,00	877.081.800,00	(121.812.750,00)	87,80	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039	5.1	BELANJA OPERASI	998.894.550,00	877.081.800,00	(121.812.750,00)	87,80	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	998.894.550,00	877.081.800,00	(121.812.750,00)	87,80	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	158.667.497,00	86.319.000,00	(72.348.497,00)	54,40	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	158.667.497,00	86.319.000,00	(72.348.497,00)	54,40	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.667.497,00	86.319.000,00	(72.348.497,00)	54,40	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH	1.012.819.620,00	1.008.987.600,00	(3.832.020,00)	99,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	1.012.819.620,00	1.008.987.600,00	(3.832.020,00)	99,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.819.620,00	33.867.600,00	(952.020,00)	97,26	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	5.1.05	Belanja Hibah	978.000.000,00	975.120.000,00	(2.880.000,00)	99,70	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042		PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	9.653.640.000,00	9.610.965.582,00	(42.674.418,00)	99,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	7.159.927.981,00	7.122.317.763,00	(37.610.218,00)	99,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.157.187.981,00	6.120.148.624,00	(37.039.357,00)	99,39	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.05	Belanja Hibah	1.002.740.000,00	1.002.169.139,00	(570.861,00)	99,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2	BELANJA MODAL	2.493.712.019,00	2.488.647.819,00	(5.064.200,00)	99,79	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.455.209.419,00	1.450.409.419,00	(4.800.000,00)	99,67	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.038.502.600,00	1.038.238.400,00	(264.200,00)	99,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	2.240.005.511,00	2.165.082.338,00	(74.923.173,00)	96,65	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	5.1	BELANJA OPERASI	2.240.005.511,00	2.165.082.338,00	(74.923.173,00)	96,65	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.240.005.511,00	2.165.082.338,00	(74.923.173,00)	96,65	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03		PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	5.032.877.324,00	4.839.269.207,00	(193.608.117,00)	96,15	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD	581.400.000,00	580.004.580,00	(1.395.420,00)	99,75	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	581.400.000,00	580.004.580,00	(1.395.420,00)	99,75	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	581.400.000,00	580.004.580,00	(1.395.420,00)	99,75	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0011		PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK PAUD	453.000.000,00	443.400.000,00	(9.600.000,00)	97,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0011	5.1	BELANJA OPERASI	453.000.000,00	443.400.000,00	(9.600.000,00)	97,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0011	5.1.05	Belanja Hibah	453.000.000,00	443.400.000,00	(9.600.000,00)	97,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015		PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PAUD	1.532.023.500,00	1.414.686.000,00	(117.337.500,00)	92,34	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015	5.1	BELANJA OPERASI	1.532.023.500,00	1.414.686.000,00	(117.337.500,00)	92,34	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.532.023.500,00	1.414.686.000,00	(117.337.500,00)	92,34	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD	214.608.222,00	166.574.664,00	(48.033.558,00)	77,61	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1	BELANJA OPERASI	214.608.222,00	166.574.664,00	(48.033.558,00)	77,61	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.608.222,00	166.574.664,00	(48.033.558,00)	77,61	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018		PENGELOLAAN DANA BOP PAUD	2.038.920.000,00	2.036.090.500,00	(2.829.500,00)	99,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1	BELANJA OPERASI	1.959.162.000,00	1.956.332.500,00	(2.829.500,00)	99,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	392.802.000,00	392.052.000,00	(750.000,00)	99,80	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1.05	Belanja Hibah	1.566.360.000,00	1.564.280.500,00	(2.079.500,00)	99,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.2	BELANJA MODAL	79.758.000,00	79.758.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.050.000,00	27.050.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	52.708.000,00	52.708.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0025		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	49.328.000,00	49.319.791,00	(8.209,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0025	5.1	BELANJA OPERASI	49.328.000,00	49.319.791,00	(8.209,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.328.000,00	49.319.791,00	(8.209,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0047		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR PAUD	163.597.602,00	149.193.672,00	(14.403.930,00)	91,19	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0047	5.1	BELANJA OPERASI	163.597.602,00	149.193.672,00	(14.403.930,00)	91,19	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.597.602,00	149.193.672,00	(14.403.930,00)	91,19	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04		PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	2.226.445.384,00	2.063.934.230,00	(162.511.154,00)	92,70	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0014		PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	120.000.000,00	62.400.000,00	(57.600.000,00)	52,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0014	5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	62.400.000,00	(57.600.000,00)	52,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	62.400.000,00	(57.600.000,00)	52,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017		PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	1.183.264.700,00	1.169.567.230,00	(13.697.470,00)	98,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1	BELANJA OPERASI	1.143.981.700,00	1.130.284.230,00	(13.697.470,00)	98,80	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.841.700,00	197.264.230,00	(2.577.470,00)	98,71	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1.05	Belanja Hibah	944.140.000,00	933.020.000,00	(11.120.000,00)	98,82	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.2	BELANJA MODAL	39.283.000,00	39.283.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.383.000,00	22.383.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0027		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	186.642.296,00	137.268.890,00	(49.373.406,00)	73,54	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0027	5.1	BELANJA OPERASI	186.642.296,00	137.268.890,00	(49.373.406,00)	73,54	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.642.296,00	77.268.890,00	(39.373.406,00)	66,24	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0027	5.1.05	Belanja Hibah	70.000.000,00	60.000.000,00	(10.000.000,00)	85,71	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	736.538.388,00	694.698.110,00	(41.840.278,00)	94,31	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	5.1	BELANJA OPERASI	736.538.388,00	694.698.110,00	(41.840.278,00)	94,31	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	736.538.388,00	694.698.110,00	(41.840.278,00)	94,31	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.1.04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	110.960.886,00	72.884.500,00	(38.076.386,00)	65,68	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01		PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	110.960.886,00	72.884.500,00	(38.076.386,00)	65,68	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002		PENATAAN PENDISTRIBUSIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	110.960.886,00	72.884.500,00	(38.076.386,00)	65,68	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	110.960.886,00	72.884.500,00	(38.076.386,00)	65,68	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.960.886,00	72.884.500,00	(38.076.386,00)	65,68	
				JUMLAH BELANJA	238.876.414.117,00	221.530.296.917,00	(17.346.117.200,00)	92,73	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(238.767.214.117,00)	(221.445.128.417,00)	17.322.085.700,00	92,74	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(238.767.214.117,00)	(221.445.128.417,00)	17.322.085.700,00	92,74	

PEMERINTAH KAB. BELITUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.01.2.22.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	109.200.000,00	85.168.500,00	(24.031.500,00)	77,99	
	1.01.2.22.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	109.200.000,00	85.168.500,00	(24.031.500,00)	77,99	
	1.01.2.22.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	109.200.000,00	85.168.500,00	(24.031.500,00)	77,99	
				JUMLAH PENDAPATAN	109.200.000,00	85.168.500,00	(24.031.500,00)	77,99	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.998.738.397,00	4.436.016.141,00	(562.722.256,00)	88,74	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	921.759.919,00	764.210.890,00	(157.549.029,00)	82,90	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01		PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	466.645.894,00	347.089.190,00	(119.556.704,00)	74,37	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001		PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN	415.497.294,00	298.225.190,00	(117.272.104,00)	71,77	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	415.497.294,00	298.225.190,00	(117.272.104,00)	71,77	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	415.497.294,00	298.225.190,00	(117.272.104,00)	71,77	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0002		PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA KEBUDAYAAN	51.148.600,00	48.864.000,00	(2.284.600,00)	95,53	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	51.148.600,00	48.864.000,00	(2.284.600,00)	95,53	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.148.600,00	48.864.000,00	(2.284.600,00)	95,53	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02		PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	67.564.650,00	66.027.600,00	(1.537.050,00)	97,72	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0003		PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PIHAK YANG BERPRESTASI ATAU BERKONTRIBUSI LUAR BIASA SESUAI DENGAN PRESTASI DAN KONTRIBUSINYA DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN	67.564.650,00	66.027.600,00	(1.537.050,00)	97,72	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	67.564.650,00	66.027.600,00	(1.537.050,00)	97,72	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.564.650,00	66.027.600,00	(1.537.050,00)	97,72	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03		PEMBINAAN LEMBAGA ADAT YANG PENGANUTNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	387.549.375,00	351.094.100,00	(36.455.275,00)	90,59	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03.0002		PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA ADAT	387.549.375,00	351.094.100,00	(36.455.275,00)	90,59	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	387.549.375,00	351.094.100,00	(36.455.275,00)	90,59	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	387.549.375,00	351.094.100,00	(36.455.275,00)	90,59	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	323.306.208,00	254.359.355,00	(68.946.853,00)	78,67	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01		PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	102.844.204,00	48.270.400,00	(54.573.804,00)	46,93	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01.0001		PENDAFTARAN OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA	102.844.204,00	48.270.400,00	(54.573.804,00)	46,93	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	102.844.204,00	48.270.400,00	(54.573.804,00)	46,93	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.844.204,00	48.270.400,00	(54.573.804,00)	46,93	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02		PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	220.462.004,00	206.088.955,00	(14.373.049,00)	93,48	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0001		PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA	159.274.470,00	158.742.555,00	(531.915,00)	99,66	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	119.274.470,00	118.768.555,00	(505.915,00)	99,57	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.274.470,00	118.768.555,00	(505.915,00)	99,57	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	40.000.000,00	39.974.000,00	(26.000,00)	99,93	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.327.110,00	7.324.911,00	(2.199,00)	99,96	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0001	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.672.890,00	32.649.089,00	(23.801,00)	99,92	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0002		PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA	61.187.534,00	47.346.400,00	(13.841.134,00)	77,37	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	61.187.534,00	47.346.400,00	(13.841.134,00)	77,37	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.187.534,00	47.346.400,00	(13.841.134,00)	77,37	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	3.753.672.270,00	3.417.445.896,00	(336.226.374,00)	91,04	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01		PENGELOLAAN MUSEUM KABUPATEN/KOTA	3.753.672.270,00	3.417.445.896,00	(336.226.374,00)	91,04	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0001		PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFATAAN KOLEKSI SECARA TERPADU	221.383.339,00	162.221.850,00	(59.161.489,00)	73,27	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	221.383.339,00	162.221.850,00	(59.161.489,00)	73,27	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.383.339,00	162.221.850,00	(59.161.489,00)	73,27	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0002		PEMBINAAN DAN PENINGKATAN MUTU DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PERMUSEUMAN	46.550.000,00	8.720.983,00	(37.829.017,00)	18,73	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	46.550.000,00	8.720.983,00	(37.829.017,00)	18,73	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.550.000,00	8.720.983,00	(37.829.017,00)	18,73	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0003		PENINGKATAN PELAYANAN DAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP MUSEUM	1.993.176.901,00	1.814.991.503,00	(178.185.398,00)	91,06	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.993.176.901,00	1.814.991.503,00	(178.185.398,00)	91,06	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.993.176.901,00	1.814.991.503,00	(178.185.398,00)	91,06	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0004		PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA MUSEUM	1.492.562.030,00	1.431.511.560,00	(61.050.470,00)	95,90	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	341.293.450,00	295.855.250,00	(45.438.200,00)	86,68	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.293.450,00	295.855.250,00	(45.438.200,00)	86,68	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	1.151.268.580,00	1.135.656.310,00	(15.612.270,00)	98,64	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	151.268.580,00	147.729.810,00	(3.538.770,00)	97,66	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.000.000.000,00	987.926.500,00	(12.073.500,00)	98,79	
				JUMLAH BELANJA	4.998.738.397,00	4.436.016.141,00	(562.722.256,00)	88,74	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(4.889.538.397,00)	(4.350.847.641,00)	538.690.756,00	88,98	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.889.538.397,00)	(4.350.847.641,00)	538.690.756,00	88,98	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : Dinas Kesehatan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	13.996.796.209,00	13.528.012.129,00	(468.784.080,00)	96,65	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13.996.796.209,00	13.528.012.129,00	(468.784.080,00)	96,65	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	13.985.846.209,00	2.130.867.900,00	(11.854.978.309,00)	15,23	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.950.000,00	11.397.144.229,00	11.386.194.229,00	104.083,50	
				JUMLAH PENDAPATAN	13.996.796.209,00	13.528.012.129,00	(468.784.080,00)	96,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	136.474.722.452,00	123.396.682.711,00	(13.078.039.741,00)	90,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	71.178.041.258,00	63.575.845.159,00	(7.602.196.099,00)	89,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	42.302.787,00	42.103.757,00	(199.030,00)	99,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	31.956.075,00	31.764.884,00	(191.191,00)	99,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	31.956.075,00	31.764.884,00	(191.191,00)	99,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.956.075,00	31.764.884,00	(191.191,00)	99,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	10.346.712,00	10.338.873,00	(7.839,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	10.346.712,00	10.338.873,00	(7.839,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.346.712,00	10.338.873,00	(7.839,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	51.949.846.821,00	46.223.073.595,00	(5.726.773.226,00)	88,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	51.423.976.261,00	45.697.203.495,00	(5.726.772.766,00)	88,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	51.423.976.261,00	45.697.203.495,00	(5.726.772.766,00)	88,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	51.423.976.261,00	45.697.203.495,00	(5.726.772.766,00)	88,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	511.020.000,00	511.020.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	511.020.000,00	511.020.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	511.020.000,00	511.020.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	14.850.560,00	14.850.100,00	(460,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	14.850.560,00	14.850.100,00	(460,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.850.560,00	14.850.100,00	(460,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	300.000.000,00	228.508.920,00	(71.491.080,00)	76,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0001		PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	300.000.000,00	228.508.920,00	(71.491.080,00)	76,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	228.508.920,00	(71.491.080,00)	76,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	228.508.920,00	(71.491.080,00)	76,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0005		MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.485.564.649,00	1.403.191.848,00	(82.372.801,00)	94,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	13.642.500,00	13.600.000,00	(42.500,00)	99,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.642.500,00	13.600.000,00	(42.500,00)	99,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.642.500,00	13.600.000,00	(42.500,00)	99,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	46.263.579,00	46.178.350,00	(85.229,00)	99,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	46.263.579,00	46.178.350,00	(85.229,00)	99,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.263.579,00	46.178.350,00	(85.229,00)	99,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	12.614.600,00	12.613.200,00	(1.400,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.614.600,00	12.613.200,00	(1.400,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.614.600,00	12.613.200,00	(1.400,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	1.309.822.370,00	1.230.405.311,00	(79.417.059,00)	93,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.309.822.370,00	1.230.405.311,00	(79.417.059,00)	93,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.309.822.370,00	1.230.405.311,00	(79.417.059,00)	93,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	33.341.600,00	33.341.600,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	33.341.600,00	33.341.600,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.341.600,00	33.341.600,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.000.000,00	5.820.000,00	(180.000,00)	97,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.820.000,00	(180.000,00)	97,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.820.000,00	(180.000,00)	97,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	63.880.000,00	61.233.387,00	(2.646.613,00)	95,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	63.880.000,00	61.233.387,00	(2.646.613,00)	95,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.880.000,00	61.233.387,00	(2.646.613,00)	95,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	249.838.402,00	223.632.000,00	(26.206.402,00)	89,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	24.560.000,00	24.281.250,00	(278.750,00)	98,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.290.000,00	9.213.000,00	(77.000,00)	99,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.290.000,00	9.213.000,00	(77.000,00)	99,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	15.270.000,00	15.068.250,00	(201.750,00)	98,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.270.000,00	15.068.250,00	(201.750,00)	98,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	225.278.402,00	199.350.750,00	(25.927.652,00)	88,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	21.367.742,00	19.465.300,00	(1.902.442,00)	91,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.367.742,00	19.465.300,00	(1.902.442,00)	91,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	203.910.660,00	179.885.450,00	(24.025.210,00)	88,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	203.910.660,00	179.885.450,00	(24.025.210,00)	88,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.388.137.012,00	2.293.444.259,00	(94.692.753,00)	96,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.498.000,00	2.316.000,00	(1.182.000,00)	66,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.498.000,00	2.316.000,00	(1.182.000,00)	66,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.498.000,00	2.316.000,00	(1.182.000,00)	66,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	951.832.552,00	865.008.179,00	(86.824.373,00)	90,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	951.832.552,00	865.008.179,00	(86.824.373,00)	90,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	951.832.552,00	865.008.179,00	(86.824.373,00)	90,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.432.806.460,00	1.426.120.080,00	(6.686.380,00)	99,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.432.806.460,00	1.426.120.080,00	(6.686.380,00)	99,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.432.806.460,00	1.426.120.080,00	(6.686.380,00)	99,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.008.684.247,00	971.850.423,00	(36.833.824,00)	96,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	64.604.000,00	60.008.000,00	(4.596.000,00)	92,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	64.604.000,00	60.008.000,00	(4.596.000,00)	92,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.604.000,00	60.008.000,00	(4.596.000,00)	92,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	428.576.000,00	400.293.250,00	(28.282.750,00)	93,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	428.576.000,00	400.293.250,00	(28.282.750,00)	93,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	428.576.000,00	400.293.250,00	(28.282.750,00)	93,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	271.034.100,00	267.789.644,00	(3.244.456,00)	98,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	271.034.100,00	267.789.644,00	(3.244.456,00)	98,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.034.100,00	267.789.644,00	(3.244.456,00)	98,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	244.470.147,00	243.759.529,00	(710.618,00)	99,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	244.470.147,00	243.759.529,00	(710.618,00)	99,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.470.147,00	243.759.529,00	(710.618,00)	99,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	13.745.667.340,00	12.182.040.357,00	(1.563.626.983,00)	88,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	13.745.667.340,00	12.182.040.357,00	(1.563.626.983,00)	88,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.915.661.005,00	11.534.958.317,00	(1.380.702.688,00)	89,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	8.131.745.283,00	7.701.026.944,00	(430.718.339,00)	94,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.783.915.722,00	3.833.931.373,00	(949.984.349,00)	80,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	830.006.335,00	647.082.040,00	(182.924.295,00)	77,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	830.006.335,00	647.082.040,00	(182.924.295,00)	77,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.2.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	63.415.167.364,00	58.120.504.502,00	(5.294.662.862,00)	91,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.789.734.036,00	9.712.435.732,00	(77.298.304,00)	99,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003		PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	1.450.128.500,00	1.440.711.448,00	(9.417.052,00)	99,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	165.745.400,00	164.439.754,00	(1.305.646,00)	99,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.745.400,00	164.439.754,00	(1.305.646,00)	99,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	1.284.383.100,00	1.276.271.694,00	(8.111.406,00)	99,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.284.383.100,00	1.276.271.694,00	(8.111.406,00)	99,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006		PENGEMBANGAN PUSKESMAS	2.254.296.498,00	2.249.422.078,00	(4.874.420,00)	99,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	164.296.498,00	159.922.078,00	(4.374.420,00)	97,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.296.498,00	159.922.078,00	(4.374.420,00)	97,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	2.090.000.000,00	2.089.500.000,00	(500.000,00)	99,97	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.090.000.000,00	2.089.500.000,00	(500.000,00)	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0011		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH DINAS TENAGA KESEHATAN	155.000.000,00	154.744.400,00	(255.600,00)	99,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0011	5.2	BELANJA MODAL	150.000.000,00	149.744.400,00	(255.600,00)	99,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0011	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	149.744.400,00	(255.600,00)	99,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014		PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	193.000.000,00	193.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	193.000.000,00	193.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	193.000.000,00	193.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020		PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	283.820.210,00	270.723.362,00	(13.096.848,00)	95,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	283.820.210,00	270.723.362,00	(13.096.848,00)	95,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.820.210,00	270.723.362,00	(13.096.848,00)	95,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023		PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN	5.355.002.828,00	5.319.978.914,00	(35.023.914,00)	99,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	5.355.002.828,00	5.319.978.914,00	(35.023.914,00)	99,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.355.002.828,00	5.319.978.914,00	(35.023.914,00)	99,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0026		DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN, OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN KE FASILITAS KESEHATAN	98.486.000,00	83.855.530,00	(14.630.470,00)	85,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	98.486.000,00	83.855.530,00	(14.630.470,00)	85,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.486.000,00	83.855.530,00	(14.630.470,00)	85,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	53.395.150.328,00	48.216.512.945,00	(5.178.637.383,00)	90,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	916.865.300,00	903.520.100,00	(13.345.200,00)	98,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	916.865.300,00	903.520.100,00	(13.345.200,00)	98,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	799.865.300,00	786.520.100,00	(13.345.200,00)	98,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	1.820.000,00	570.000,00	(1.250.000,00)	31,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.820.000,00	570.000,00	(1.250.000,00)	31,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.820.000,00	570.000,00	(1.250.000,00)	31,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	1.320.000,00	570.000,00	(750.000,00)	43,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.320.000,00	570.000,00	(750.000,00)	43,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	570.000,00	(750.000,00)	43,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA	2.420.000,00	1.270.000,00	(1.150.000,00)	52,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.420.000,00	1.270.000,00	(1.150.000,00)	52,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.420.000,00	1.270.000,00	(1.150.000,00)	52,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	313.864.304,00	310.421.400,00	(3.442.904,00)	98,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	313.864.304,00	310.421.400,00	(3.442.904,00)	98,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	313.864.304,00	310.421.400,00	(3.442.904,00)	98,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	123.901.900,00	114.704.135,00	(9.197.765,00)	92,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	123.901.900,00	114.704.135,00	(9.197.765,00)	92,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.901.900,00	114.704.135,00	(9.197.765,00)	92,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	8.061.900,00	7.261.900,00	(800.000,00)	90,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	8.061.900,00	7.261.900,00	(800.000,00)	90,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.061.900,00	7.261.900,00	(800.000,00)	90,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	3.012.500,00	1.912.500,00	(1.100.000,00)	63,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.012.500,00	1.912.500,00	(1.100.000,00)	63,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.012.500,00	1.912.500,00	(1.100.000,00)	63,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	2.912.500,00	1.812.500,00	(1.100.000,00)	62,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.912.500,00	1.812.500,00	(1.100.000,00)	62,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.912.500,00	1.812.500,00	(1.100.000,00)	62,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	118.912.500,00	118.187.500,00	(725.000,00)	99,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	118.912.500,00	118.187.500,00	(725.000,00)	99,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.912.500,00	118.187.500,00	(725.000,00)	99,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	111.087.500,00	110.487.500,00	(600.000,00)	99,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	111.087.500,00	110.487.500,00	(600.000,00)	99,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.087.500,00	110.487.500,00	(600.000,00)	99,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	129.827.500,00	104.562.200,00	(25.265.300,00)	80,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	129.827.500,00	104.562.200,00	(25.265.300,00)	80,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.827.500,00	104.562.200,00	(25.265.300,00)	80,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	1.535.349.350,00	1.293.190.245,00	(242.159.105,00)	84,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	1.535.349.350,00	1.293.190.245,00	(242.159.105,00)	84,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.535.349.350,00	1.293.190.245,00	(242.159.105,00)	84,22	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	60.217.400,00	58.954.000,00	(1.263.400,00)	97,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	60.217.400,00	58.954.000,00	(1.263.400,00)	97,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.217.400,00	58.954.000,00	(1.263.400,00)	97,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	158.370.000,00	134.980.000,00	(23.390.000,00)	85,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	158.370.000,00	134.980.000,00	(23.390.000,00)	85,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.370.000,00	134.980.000,00	(23.390.000,00)	85,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018		PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	483.632.100,00	390.730.300,00	(92.901.800,00)	80,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	483.632.100,00	390.730.300,00	(92.901.800,00)	80,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	483.632.100,00	390.730.300,00	(92.901.800,00)	80,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	417.169.000,00	386.823.466,00	(30.345.534,00)	92,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	417.169.000,00	386.823.466,00	(30.345.534,00)	92,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.169.000,00	386.823.466,00	(30.345.534,00)	92,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	56.750.000,00	56.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	56.750.000,00	56.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.750.000,00	56.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	2.464.980.356,00	2.076.635.907,00	(388.344.449,00)	84,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	2.464.980.356,00	2.076.635.907,00	(388.344.449,00)	84,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.464.980.356,00	2.076.635.907,00	(388.344.449,00)	84,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	38.318.349.401,00	34.835.695.844,00	(3.482.653.557,00)	90,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	38.318.349.401,00	34.835.695.844,00	(3.482.653.557,00)	90,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.318.349.401,00	34.835.695.844,00	(3.482.653.557,00)	90,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028		PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL	132.924.375,00	40.450.000,00	(92.474.375,00)	30,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028	5.1	BELANJA OPERASI	132.924.375,00	40.450.000,00	(92.474.375,00)	30,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.924.375,00	40.450.000,00	(92.474.375,00)	30,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0029		PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT	39.486.309,00	19.170.174,00	(20.316.135,00)	48,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0029	5.1	BELANJA OPERASI	39.486.309,00	19.170.174,00	(20.316.135,00)	48,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.486.309,00	19.170.174,00	(20.316.135,00)	48,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	4.154.079.695,00	3.692.718.097,00	(461.361.598,00)	88,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	4.154.079.695,00	3.692.718.097,00	(461.361.598,00)	88,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	321.425.095,00	259.072.419,00	(62.352.676,00)	80,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.832.654.600,00	3.433.645.678,00	(399.008.922,00)	89,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034		OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	2.900.169.813,00	2.770.938.069,00	(129.231.744,00)	95,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	5.1	BELANJA OPERASI	2.888.528.133,00	2.759.394.069,00	(129.134.064,00)	95,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.688.528.133,00	1.559.397.092,00	(129.131.041,00)	92,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	5.1.05	Belanja Hibah	1.200.000.000,00	1.199.996.977,00	(3.023,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	5.2	BELANJA MODAL	11.641.680,00	11.544.000,00	(97.680,00)	99,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.641.680,00	11.544.000,00	(97.680,00)	99,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0038		PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PENANGANAN GAWAT DARURAT TERPADU (SPGDT)	399.038.525,00	341.919.513,00	(57.119.012,00)	85,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0038	5.1	BELANJA OPERASI	399.038.525,00	341.919.513,00	(57.119.012,00)	85,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.038.525,00	341.919.513,00	(57.119.012,00)	85,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	54.912.700,00	53.484.400,00	(1.428.300,00)	97,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	54.912.700,00	53.484.400,00	(1.428.300,00)	97,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.912.700,00	53.484.400,00	(1.428.300,00)	97,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	372.615.400,00	275.918.195,00	(96.697.205,00)	74,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	372.615.400,00	275.918.195,00	(96.697.205,00)	74,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	372.615.400,00	275.918.195,00	(96.697.205,00)	74,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0047		PENGELOLAAN PELAYANAN KELANJUTUSIAAN	113.100.000,00	112.875.000,00	(225.000,00)	99,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0047	5.1	BELANJA OPERASI	113.100.000,00	112.875.000,00	(225.000,00)	99,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.100.000,00	112.875.000,00	(225.000,00)	99,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03		PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	184.334.500,00	161.247.995,00	(23.086.505,00)	87,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002		PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	184.334.500,00	161.247.995,00	(23.086.505,00)	87,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	138.187.500,00	115.247.792,00	(22.939.708,00)	83,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.187.500,00	115.247.792,00	(22.939.708,00)	83,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	46.147.000,00	46.000.203,00	(146.797,00)	99,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.147.000,00	46.000.203,00	(146.797,00)	99,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04		PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	45.948.500,00	30.307.830,00	(15.640.670,00)	65,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0003		PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN	45.948.500,00	30.307.830,00	(15.640.670,00)	65,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	45.948.500,00	30.307.830,00	(15.640.670,00)	65,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.948.500,00	30.307.830,00	(15.640.670,00)	65,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.2.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.249.651.530,00	1.116.771.147,00	(132.880.383,00)	89,36	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02		PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	691.707.030,00	656.561.071,00	(35.145.959,00)	94,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0002		PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR	596.270.030,00	574.611.570,00	(21.658.460,00)	96,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	596.270.030,00	574.611.570,00	(21.658.460,00)	96,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	596.270.030,00	574.611.570,00	(21.658.460,00)	96,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	95.437.000,00	81.949.501,00	(13.487.499,00)	85,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	95.437.000,00	81.949.501,00	(13.487.499,00)	85,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.437.000,00	81.949.501,00	(13.487.499,00)	85,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	557.944.500,00	460.210.076,00	(97.734.424,00)	82,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	557.944.500,00	460.210.076,00	(97.734.424,00)	82,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	557.944.500,00	460.210.076,00	(97.734.424,00)	82,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	557.944.500,00	460.210.076,00	(97.734.424,00)	82,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.2.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	298.158.000,00	286.407.814,00	(11.750.186,00)	96,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01		PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	59.199.000,00	58.667.500,00	(531.500,00)	99,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	59.199.000,00	58.667.500,00	(531.500,00)	99,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	59.199.000,00	58.667.500,00	(531.500,00)	99,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.199.000,00	58.667.500,00	(531.500,00)	99,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03		PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	86.274.000,00	84.656.150,00	(1.617.850,00)	98,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	86.274.000,00	84.656.150,00	(1.617.850,00)	98,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	86.274.000,00	84.656.150,00	(1.617.850,00)	98,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.274.000,00	84.656.150,00	(1.617.850,00)	98,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06		PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	152.685.000,00	143.084.164,00	(9.600.836,00)	93,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001		PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN-MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN	152.685.000,00	143.084.164,00	(9.600.836,00)	93,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	152.685.000,00	143.084.164,00	(9.600.836,00)	93,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.685.000,00	143.084.164,00	(9.600.836,00)	93,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.2.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	333.704.300,00	297.154.089,00	(36.550.211,00)	89,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02		PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	191.196.000,00	168.485.000,00	(22.711.000,00)	88,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001		PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT	191.196.000,00	168.485.000,00	(22.711.000,00)	88,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	191.196.000,00	168.485.000,00	(22.711.000,00)	88,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.196.000,00	168.485.000,00	(22.711.000,00)	88,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	142.508.300,00	128.669.089,00	(13.839.211,00)	90,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	142.508.300,00	128.669.089,00	(13.839.211,00)	90,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	142.508.300,00	128.669.089,00	(13.839.211,00)	90,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.508.300,00	128.669.089,00	(13.839.211,00)	90,28	
				JUMLAH BELANJA	136.474.722.452,00	123.396.682.711,00	(13.078.039.741,00)	90,41	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(122.477.926.243,00)	(109.868.670.582,00)	12.609.255.661,00	89,70	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(122.477.926.243,00)	(109.868.670.582,00)	12.609.255.661,00	89,70	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : UPT RSUD dr. H. MARSIDI JUDONO

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0001		4	PENDAPATAN DAERAH	55.468.303.512,00	69.242.969.747,50	13.774.666.235,50	124,83	
	1.02.0.00.0.00.01.0001		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	55.468.303.512,00	69.242.969.747,50	13.774.666.235,50	124,83	
	1.02.0.00.0.00.01.0001		4.1.02	Retribusi Daerah	55.468.303.512,00	69.242.969.747,50	13.774.666.235,50	124,83	
				JUMLAH PENDAPATAN	55.468.303.512,00	69.242.969.747,50	13.774.666.235,50	124,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		5	BELANJA DAERAH	142.166.896.080,66	124.513.529.088,00	(17.653.366.992,66)	87,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	128.012.629.566,66	114.962.213.795,00	(13.050.415.771,66)	89,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	45.587.956.139,00	40.362.115.500,00	(5.225.840.639,00)	88,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	45.587.956.139,00	40.362.115.500,00	(5.225.840.639,00)	88,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	45.587.956.139,00	40.362.115.500,00	(5.225.840.639,00)	88,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	45.587.956.139,00	40.362.115.500,00	(5.225.840.639,00)	88,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	753.987.725,00	596.944.874,00	(157.042.851,00)	79,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	100.951.725,00	99.681.330,00	(1.270.395,00)	98,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	78.418.725,00	77.553.480,00	(865.245,00)	98,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.418.725,00	77.553.480,00	(865.245,00)	98,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	22.533.000,00	22.127.850,00	(405.150,00)	98,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.533.000,00	22.127.850,00		98,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	576.036.000,00	424.002.400,00	(152.033.600,00)	73,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	576.036.000,00	424.002.400,00	(152.033.600,00)	73,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	576.036.000,00	424.002.400,00	(152.033.600,00)	73,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	77.000.000,00	73.261.144,00	(3.738.856,00)	95,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	77.000.000,00	73.261.144,00	(3.738.856,00)	95,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.000.000,00	73.261.144,00	(3.738.856,00)	95,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	409.310.280,00	259.100.000,00	(150.210.280,00)	63,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	409.310.280,00	259.100.000,00	(150.210.280,00)	63,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	409.310.280,00	259.100.000,00	(150.210.280,00)	63,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	409.310.280,00	259.100.000,00	(150.210.280,00)	63,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.966.250.000,00	2.358.144.765,00	(608.105.235,00)	79,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	2.966.250.000,00	2.358.144.765,00	(608.105.235,00)	79,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.966.250.000,00	2.358.144.765,00	(608.105.235,00)	79,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.966.250.000,00	2.358.144.765,00	(608.105.235,00)	79,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	349.117.000,00	292.498.300,00	(56.618.700,00)	83,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	349.117.000,00	292.498.300,00	(56.618.700,00)	83,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	349.117.000,00	292.498.300,00	(56.618.700,00)	83,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.117.000,00	292.498.300,00	(56.618.700,00)	83,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	77.946.008.422,66	71.093.410.356,00	(6.852.598.066,66)	91,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	77.946.008.422,66	71.093.410.356,00	(6.852.598.066,66)	91,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	76.762.748.422,66	70.004.585.356,00	(6.758.163.066,66)	91,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	34.543.327.931,00	29.306.800.647,00	(5.236.527.284,00)	84,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.219.420.491,66	40.697.784.709,00	(1.521.635.782,66)	96,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	1.183.260.000,00	1.088.825.000,00	(94.435.000,00)	92,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.183.260.000,00	1.088.825.000,00	(94.435.000,00)	92,01	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.2.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	14.154.266.514,00	9.551.315.293,00	(4.602.951.221,00)	67,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.078.891.089,00	6.972.179.316,00	(2.106.711.773,00)	76,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0008		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH SAKIT	1.780.000.000,00	308.971.510,00	(1.471.028.490,00)	17,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	380.000.000,00	308.971.510,00	(71.028.490,00)	81,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.000.000,00	308.971.510,00	(71.028.490,00)	81,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	1.400.000.000,00	0,00	(1.400.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0008	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.400.000.000,00	0,00	(1.400.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0014		PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	2.046.206.089,00	1.704.697.137,00	(341.508.952,00)	83,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	2.046.206.089,00	1.704.697.137,00	(341.508.952,00)	83,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.046.206.089,00	1.704.697.137,00	(341.508.952,00)	83,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0020		PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	5.252.685.000,00	4.958.510.669,00	(294.174.331,00)	94,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	5.252.685.000,00	4.958.510.669,00	(294.174.331,00)	94,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.252.685.000,00	4.958.510.669,00	(294.174.331,00)	94,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.059.310.950,00	2.570.516.167,00	(2.488.794.783,00)	50,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	199.960.950,00	195.914.832,00	(4.046.118,00)	97,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	199.960.950,00	195.914.832,00	(4.046.118,00)	97,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.960.950,00	195.914.832,00	(4.046.118,00)	97,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	237.110.000,00	128.466.802,00	(108.643.198,00)	54,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	237.110.000,00	128.466.802,00	(108.643.198,00)	54,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.110.000,00	128.466.802,00	(108.643.198,00)	54,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0032		OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT	4.622.240.000,00	2.246.134.533,00	(2.376.105.467,00)	48,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0032	5.1	BELANJA OPERASI	4.622.240.000,00	2.246.134.533,00	(2.376.105.467,00)	48,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.622.240.000,00	2.246.134.533,00	(2.376.105.467,00)	48,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.04		PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.064.475,00	8.619.810,00	(7.444.665,00)	53,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.04.0003		PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN	16.064.475,00	8.619.810,00	(7.444.665,00)	53,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	16.064.475,00	8.619.810,00	(7.444.665,00)	53,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.064.475,00	8.619.810,00	(7.444.665,00)	53,65	
				JUMLAH BELANJA	142.166.896.080,66	124.513.529.088,00	(17.653.366.992,66)	87,58	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(86.698.592.568,66)	(55.270.559.340,50)	31.428.033.228,16	63,75	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(86.698.592.568,66)	(55.270.559.340,50)	31.428.033.228,16	63,75	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.03.1.04.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.175.000.000,00	1.215.723.320,00	40.723.320,00	103,46	
	1.03.1.04.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.175.000.000,00	1.215.723.320,00	40.723.320,00	103,46	
	1.03.1.04.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.175.000.000,00	1.215.708.320,00	40.708.320,00	103,46	
	1.03.1.04.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.175.000.000,00	1.215.723.320,00	40.723.320,00	103,46	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	48.296.663.592,04	43.867.435.937,00	(4.429.227.655,04)	90,82	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.3.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.981.892.113,00	8.538.854.346,00	(1.443.037.767,00)	85,54	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	8.241.084,00	4.519.285,00	(3.721.799,00)	54,83	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4.821.285,00	3.764.900,00	(1.056.385,00)	78,08	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.821.285,00	3.764.900,00	(1.056.385,00)	78,08	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.821.285,00	3.764.900,00	(1.056.385,00)	78,08	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.419.799,00	754.385,00	(2.665.414,00)	22,05	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.419.799,00	754.385,00	(2.665.414,00)	22,05	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.419.799,00	754.385,00	(2.665.414,00)	22,05	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.844.060.422,00	7.483.609.545,00	(1.360.450.877,00)	84,61	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	8.844.060.422,00	7.483.609.545,00	(1.360.450.877,00)	84,61	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.844.060.422,00	7.483.609.545,00	(1.360.450.877,00)	84,61	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	8.844.060.422,00	7.483.609.545,00	(1.360.450.877,00)	84,61	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	49.300.000,00	45.952.300,00	(3.347.700,00)	93,20	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	49.300.000,00	45.952.300,00	(3.347.700,00)	93,20	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	49.300.000,00	45.952.300,00	(3.347.700,00)	93,20	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.300.000,00	45.952.300,00	(3.347.700,00)	93,20	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	492.038.877,00	476.858.756,00	(15.180.121,00)	96,91	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.549.225,00	3.543.120,00	(6.105,00)	99,82	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.549.225,00	3.543.120,00	(6.105,00)	99,82	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.549.225,00	3.543.120,00	(6.105,00)	99,82	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	85.724.079,00	83.957.461,00	(1.766.618,00)	97,93	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	85.724.079,00	83.957.461,00	(1.766.618,00)	97,93	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.724.079,00	83.957.461,00	(1.766.618,00)	97,93	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	6.322.893,00	6.259.290,00	(63.603,00)	98,99	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.322.893,00	6.259.290,00	(63.603,00)	98,99	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.322.893,00	6.259.290,00	(63.603,00)	98,99	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	140.843.500,00	138.902.000,00	(1.941.500,00)	98,62	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	140.843.500,00	138.902.000,00	(1.941.500,00)	98,62	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.843.500,00	138.902.000,00	(1.941.500,00)	98,62	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	30.156.480,00	22.574.217,00	(7.582.263,00)	74,85	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	30.156.480,00	22.574.217,00	(7.582.263,00)	74,85	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.156.480,00	22.574.217,00	(7.582.263,00)	74,85	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	10.567.200,00	7.080.000,00	(3.487.200,00)	66,99	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.567.200,00	7.080.000,00	(3.487.200,00)	66,99	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.567.200,00	7.080.000,00	(3.487.200,00)	66,99	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	214.875.500,00	214.542.668,00	(332.832,00)	99,84	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	214.875.500,00	214.542.668,00	(332.832,00)	99,84	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.875.500,00	214.542.668,00	(332.832,00)	99,84	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.635.030,00	1.631.700,00	(3.330,00)	99,79	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.635.030,00	1.631.700,00	(3.330,00)	99,79	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.635.030,00	1.631.700,00	(3.330,00)	99,79	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.635.030,00	1.631.700,00	(3.330,00)	99,79	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	335.965.700,00	314.978.870,00	(20.986.830,00)	93,75	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.652.900,00	2.390.000,00	(262.900,00)	90,09	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.652.900,00	2.390.000,00	(262.900,00)	90,09	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.652.900,00	2.390.000,00	(262.900,00)	90,09	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	156.100.000,00	143.089.420,00	(13.010.580,00)	91,66	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	156.100.000,00	143.089.420,00	(13.010.580,00)	91,66	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.100.000,00	143.089.420,00	(13.010.580,00)	91,66	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	150.712.800,00	142.999.450,00	(7.713.350,00)	94,88	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	150.712.800,00	142.999.450,00	(7.713.350,00)	94,88	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.712.800,00	142.999.450,00	(7.713.350,00)	94,88	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	250.651.000,00	211.303.890,00	(39.347.110,00)	84,30	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU	79.243.000,00	43.808.600,00	(35.434.400,00)	55,28	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	79.243.000,00	43.808.600,00	(35.434.400,00)	55,28	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.243.000,00	43.808.600,00	(35.434.400,00)	55,28	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS	73.293.000,00	70.343.850,00	(2.949.150,00)	95,97	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	73.293.000,00	70.343.850,00	(2.949.150,00)	95,97	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.293.000,00	70.343.850,00	(2.949.150,00)	95,97	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	45.615.000,00	44.826.440,00	(788.560,00)	98,27	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	45.615.000,00	44.826.440,00	(788.560,00)	98,27	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.615.000,00	44.826.440,00	(788.560,00)	98,27	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	52.500.000,00	52.325.000,00	(175.000,00)	99,66	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	52.500.000,00	52.325.000,00	(175.000,00)	99,66	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.500.000,00	52.325.000,00	(175.000,00)	99,66	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.3.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.781.050.615,00	1.778.569.850,00	(2.480.765,00)	99,86	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01		PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH	1.434.886.055,00	1.432.913.850,00	(1.972.205,00)	99,86	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0072		EVALUASI DAN REKOMENDASI TEKNIS (REKOMTEK) PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI	54.159.345,00	53.966.850,00	(192.495,00)	99,64	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0072	5.1	BELANJA OPERASI	54.159.345,00	53.966.850,00	(192.495,00)	99,64	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0072	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.159.345,00	53.966.850,00	(192.495,00)	99,64	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0080		OPERASI DAN PEMELIHARAAN TANGGUL DAN TEBING SUNGAI	1.066.984.960,00	1.065.620.000,00	(1.364.960,00)	99,87	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0080	5.2	BELANJA MODAL	1.066.984.960,00	1.065.620.000,00	(1.364.960,00)	99,87	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0080	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.066.984.960,00	1.065.620.000,00	(1.364.960,00)	99,87	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0101		PENINGKATAN BANGUNAN PERKUATAN TEBING	166.111.750,00	165.827.000,00	(284.750,00)	99,82	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0101	5.2	BELANJA MODAL	166.111.750,00	165.827.000,00	(284.750,00)	99,82	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0101	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	166.111.750,00	165.827.000,00	(284.750,00)	99,82	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0115		PEMBANGUNAN TANGGUL SUNGAI	147.630.000,00	147.500.000,00	(130.000,00)	99,91	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0115	5.2	BELANJA MODAL	147.630.000,00	147.500.000,00	(130.000,00)	99,91	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0115	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	147.630.000,00	147.500.000,00	(130.000,00)	99,91	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02		PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	346.164.560,00	345.656.000,00	(508.560,00)	99,85	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0014		REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	160.460.160,00	160.250.000,00	(210.160,00)	99,86	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0014	5.2	BELANJA MODAL	160.460.160,00	160.250.000,00	(210.160,00)	99,86	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0014	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	160.460.160,00	160.250.000,00	(210.160,00)	99,86	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0021		OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	185.704.400,00	185.406.000,00	(298.400,00)	99,83	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0021	5.2	BELANJA MODAL	185.704.400,00	185.406.000,00	(298.400,00)	99,83	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0021	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	185.704.400,00	185.406.000,00	(298.400,00)	99,83	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.3.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7.982.335.020,00	7.626.526.412,00	(355.808.608,00)	95,54	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.982.335.020,00	7.626.526.412,00	(355.808.608,00)	95,54	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0029		OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)	2.099.283.506,00	2.075.632.853,00	(23.650.653,00)	98,87	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	1.999.283.506,00	1.975.732.853,00	(23.550.653,00)	98,82	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.999.283.506,00	1.975.732.853,00	(23.550.653,00)	98,82	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0029	5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.900.000,00	(100.000,00)	99,90	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0029	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	99.900.000,00	(100.000,00)	99,90	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032		PERLUASAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN	5.883.051.514,00	5.550.893.559,00	(332.157.955,00)	94,35	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032	5.1	BELANJA OPERASI	2.841.855.514,00	2.581.297.559,00	(260.557.955,00)	90,83	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.841.855.514,00	2.581.297.559,00	(260.557.955,00)	90,83	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032	5.2	BELANJA MODAL	3.041.196.000,00	2.969.596.000,00	(71.600.000,00)	97,64	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.196.000,00	26.973.000,00	(223.000,00)	99,18	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.014.000.000,00	2.942.623.000,00	(71.377.000,00)	97,63	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.3.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	645.000.000,00	640.792.500,00	(4.207.500,00)	99,34	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.05.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	645.000.000,00	640.792.500,00	(4.207.500,00)	99,34	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0039		PENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) SETEMPAT	595.000.000,00	592.765.000,00	(2.235.000,00)	99,62	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0039	5.2	BELANJA MODAL	595.000.000,00	592.765.000,00	(2.235.000,00)	99,62	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0039	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	595.000.000,00	592.765.000,00	(2.235.000,00)	99,62	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0040		PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH	50.000.000,00	48.027.500,00	(1.972.500,00)	96,05	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0040	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	48.027.500,00	(1.972.500,00)	96,05	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	48.027.500,00	(1.972.500,00)	96,05	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.3.06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	558.502.041,00	556.992.000,00	(1.510.041,00)	99,72	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.06.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM	558.502.041,00	556.992.000,00	(1.510.041,00)	99,72	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0012		PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE LINGKUNGAN	361.542.041,00	360.567.000,00	(975.041,00)	99,73	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0012	5.2	BELANJA MODAL	361.542.041,00	360.567.000,00	(975.041,00)	99,73	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0012	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	361.542.041,00	360.567.000,00	(975.041,00)	99,73	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0029		PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	196.960.000,00	196.425.000,00	(535.000,00)	99,72	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0029	5.2	BELANJA MODAL	196.960.000,00	196.425.000,00	(535.000,00)	99,72	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0029	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	196.960.000,00	196.425.000,00	(535.000,00)	99,72	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.3.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	7.979.122.300,00	6.846.939.850,00	(1.132.182.450,00)	85,81	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01		PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	7.979.122.300,00	6.846.939.850,00	(1.132.182.450,00)	85,81	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0017		PENGUBAHSUAIAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.756.486.000,00	3.482.464.000,00	(274.022.000,00)	92,70	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	3.756.486.000,00	3.482.464.000,00	(274.022.000,00)	92,70	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.756.486.000,00	3.482.464.000,00	(274.022.000,00)	92,70	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0021		PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK	3.845.413.350,00	3.002.556.000,00	(842.857.350,00)	78,08	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	2.965.413.350,00	2.922.747.000,00	(42.666.350,00)	98,56	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.965.413.350,00	2.922.747.000,00	(42.666.350,00)	98,56	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0021	5.2	BELANJA MODAL	880.000.000,00	79.809.000,00	(800.191.000,00)	9,06	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0021	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.000.000,00	79.809.000,00	(191.000,00)	99,76	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0021	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	800.000.000,00	0,00	(800.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023		PENYELENGGARAAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG), RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG (RTB), TIM PROFESI AHLI (TPA), TIM PENILAI TEKNIS (TPT), PENILIK DAN PENGATAAN BANGUNAN GEDUNG	377.222.950,00	361.919.850,00	(15.303.100,00)	95,94	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	377.222.950,00	361.919.850,00	(15.303.100,00)	95,94	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	377.222.950,00	361.919.850,00	(15.303.100,00)	95,94	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.3.09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	520.000.000,00	159.881.100,00	(360.118.900,00)	30,74	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.09.2.01		PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	520.000.000,00	159.881.100,00	(360.118.900,00)	30,74	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0010		PENYUSUNAN RENCANA DAN TEKNIS PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH	520.000.000,00	159.881.100,00	(360.118.900,00)	30,74	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	520.000.000,00	159.881.100,00	(360.118.900,00)	30,74	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	520.000.000,00	159.881.100,00	(360.118.900,00)	30,74	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.3.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	18.604.651.660,04	17.477.746.337,00	(1.126.905.323,04)	93,94	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01		PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	18.604.651.660,04	17.477.746.337,00	(1.126.905.323,04)	93,94	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0028		PENGELOLAAN LEGER JALAN	50.106.600,00	33.672.200,00	(16.434.400,00)	67,20	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	50.106.600,00	33.672.200,00	(16.434.400,00)	67,20	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.106.600,00	33.672.200,00	(16.434.400,00)	67,20	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0029		PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	100.000.000,00	98.790.000,00	(1.210.000,00)	98,79	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	98.790.000,00	(1.210.000,00)	98,79	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	98.790.000,00	(1.210.000,00)	98,79	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032		PEMBANGUNAN JALAN	1.562.000.000,00	1.542.921.726,00	(19.078.274,00)	98,77	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032	5.1	BELANJA OPERASI	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032	5.2	BELANJA MODAL	462.000.000,00	442.921.726,00	(19.078.274,00)	95,87	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	462.000.000,00	442.921.726,00	(19.078.274,00)	95,87	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0034		PEMELIHARAAN BERKALA JALAN	10.488.585.387,04	9.423.749.411,00	(1.064.835.976,04)	89,84	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0034	5.1	BELANJA OPERASI	10.488.585.387,04	9.423.749.411,00	(1.064.835.976,04)	89,84	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.488.585.387,04	9.423.749.411,00	(1.064.835.976,04)	89,84	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0038		PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN	200.000.000,00	199.817.000,00	(183.000,00)	99,90	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0038	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	199.817.000,00	(183.000,00)	99,90	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.817.000,00	(183.000,00)	99,90	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040		PEMBANGUNAN JEMBATAN	500.000.000,00	491.325.000,00	(8.675.000,00)	98,26	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	5.2	BELANJA MODAL	500.000.000,00	491.325.000,00	(8.675.000,00)	98,26	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	5.2.01	Belanja Modal Tanah	500.000.000,00	491.325.000,00	(8.675.000,00)	98,26	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046		PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	5.703.959.673,00	5.687.471.000,00	(16.488.673,00)	99,71	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.1	BELANJA OPERASI	5.603.959.673,00	5.588.196.000,00	(15.763.673,00)	99,71	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.603.959.673,00	5.588.196.000,00	(15.763.673,00)	99,71	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.275.000,00	(725.000,00)	99,27	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.000.000,00	99.275.000,00	(725.000,00)	99,27	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.3.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	155.124.163,00	152.245.542,00	(2.878.621,00)	98,14	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.11.2.01		PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI	28.632.903,00	26.340.500,00	(2.292.403,00)	91,99	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0016		PELATIHAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR, TEKNISI ATAU ANALIS	28.632.903,00	26.340.500,00	(2.292.403,00)	91,99	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	28.632.903,00	26.340.500,00	(2.292.403,00)	91,99	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.632.903,00	26.340.500,00	(2.292.403,00)	91,99	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.11.2.04		PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI	126.491.260,00	125.905.042,00	(586.218,00)	99,53	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.11.2.04.0005		PENGAWASAN DAN EVALUASI TERTIB PEMANFAATAN PRODUK JASA KONSTRUKSI KABUPATEN/KOTA	126.491.260,00	125.905.042,00	(586.218,00)	99,53	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.11.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	75.491.260,00	75.233.542,00	(257.718,00)	99,65	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.11.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.491.260,00	75.233.542,00	(257.718,00)	99,65	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.11.2.04.0005	5.2	BELANJA MODAL	51.000.000,00	50.671.500,00	(328.500,00)	99,35	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.11.2.04.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.000.000,00	50.671.500,00	(328.500,00)	99,35	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.3.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	88.985.680,00	88.888.000,00	(97.680,00)	99,89	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.01		PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR)	48.985.680,00	48.888.000,00	(97.680,00)	99,80	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0006		PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RDTR KABUPATEN/KOTA	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0007		PENYEBARLUASAN INFORMASI PENATAAN RUANG	985.680,00	888.000,00	(97.680,00)	90,09	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	985.680,00	888.000,00	(97.680,00)	90,09	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	985.680,00	888.000,00	(97.680,00)	90,09	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.03		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.03.0004		PELAKSANAAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	48.296.663.592,04	43.867.435.937,00	(4.429.227.655,04)	90,82	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(47.121.663.592,04)	(42.651.712.617,00)	4.469.950.975,04	90,51	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(47.121.663.592,04)	(42.651.712.617,00)	4.469.950.975,04	90,51	

PEMERINTAH KAB. BELITUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.03.1.04.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.175.000.000,00	1.215.723.320,00	40.723.320,00	103,46	
	1.03.1.04.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.175.000.000,00	1.215.723.320,00	40.723.320,00	103,46	
	1.03.1.04.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.175.000.000,00	1.215.708.320,00	40.708.320,00	103,46	
	1.03.1.04.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.175.000.000,00	1.215.723.320,00	40.723.320,00	103,46	
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	8.696.242.452,00	8.413.618.081,00	(282.624.371,00)	96,75	
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.4.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	93.472.500,00	0,00	(93.472.500,00)	0,00	
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.02.2.03		PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	93.472.500,00	0,00	(93.472.500,00)	0,00	
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0004		PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA	93.472.500,00	0,00	(93.472.500,00)	0,00	
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	93.472.500,00	0,00	(93.472.500,00)	0,00	
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.472.500,00	0,00	(93.472.500,00)	0,00	
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.4.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	75.494.601,00	58.634.567,00	(16.860.034,00)	77,66	
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.03.2.02		PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	75.494.601,00	58.634.567,00	(16.860.034,00)	77,66	
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0008		PENYUSUNAN/REVIEW/LEGALISASI KEBIJAKAN BIDANG PKP	75.494.601,00	58.634.567,00	(16.860.034,00)	77,66	
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	75.494.601,00	58.634.567,00	(16.860.034,00)	77,66	
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.494.601,00	58.634.567,00	(16.860.034,00)	77,66	
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.4.04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	468.133.930,00	466.839.000,00	(1.294.930,00)	99,72	
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.04.2.01		PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA	468.133.930,00	466.839.000,00	(1.294.930,00)	99,72	
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0001		PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DI LUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	468.133.930,00	466.839.000,00	(1.294.930,00)	99,72	
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	468.133.930,00	466.839.000,00	(1.294.930,00)	99,72	
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	468.133.930,00	466.839.000,00	(1.294.930,00)	99,72	
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.4.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	8.059.141.421,00	7.888.144.514,00	(170.996.907,00)	97,87	
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.05.2.01		URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	8.059.141.421,00	7.888.144.514,00	(170.996.907,00)	97,87	
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002		PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN	8.059.141.421,00	7.888.144.514,00	(170.996.907,00)	97,87	
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.097.552.657,00	3.026.616.480,00	(70.936.177,00)	97,70	
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.097.552.657,00	3.026.616.480,00	(70.936.177,00)	97,70	
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	4.961.588.764,00	4.861.528.034,00	(100.060.730,00)	97,98	
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.332.000,00	168.831.000,00	(501.000,00)	99,70	
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.024.500.000,00	946.703.200,00	(77.796.800,00)	92,40	
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.767.756.764,00	3.745.993.834,00	(21.762.930,00)	99,42	
				JUMLAH BELANJA	8.696.242.452,00	8.413.618.081,00	(282.624.371,00)	96,75	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(7.521.242.452,00)	(7.197.894.761,00)	323.347.691,00	95,70	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.521.242.452,00)	(7.197.894.761,00)	323.347.691,00	95,70	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	12.092.360.204,00	11.671.166.884,00	(421.193.320,00)	96,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.5.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.967.471.609,00	7.565.931.884,00	(401.539.725,00)	94,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.484.369.720,00	6.146.172.011,00	(338.197.709,00)	94,78	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.484.369.720,00	6.146.172.011,00	(338.197.709,00)	94,78	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.484.369.720,00	6.146.172.011,00	(338.197.709,00)	94,78	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.484.369.720,00	6.146.172.011,00	(338.197.709,00)	94,78	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	227.670.000,00	201.910.750,00	(25.759.250,00)	88,68	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	107.670.000,00	94.315.000,00	(13.355.000,00)	87,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	107.670.000,00	94.315.000,00	(13.355.000,00)	87,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.670.000,00	94.315.000,00	(13.355.000,00)	87,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	120.000.000,00	107.595.750,00	(12.404.250,00)	89,66	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	107.595.750,00	(12.404.250,00)	89,66	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	107.595.750,00	(12.404.250,00)	89,66	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	532.694.419,00	528.031.862,00	(4.662.557,00)	99,12	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	11.295.360,00	11.219.000,00	(76.360,00)	99,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.295.360,00	11.219.000,00	(76.360,00)	99,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.295.360,00	11.219.000,00	(76.360,00)	99,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	108.256.620,00	104.712.700,00	(3.543.920,00)	96,72	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	108.256.620,00	104.712.700,00	(3.543.920,00)	96,72	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.256.620,00	104.712.700,00	(3.543.920,00)	96,72	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	12.998.433,00	12.854.500,00	(143.933,00)	98,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.998.433,00	12.854.500,00	(143.933,00)	98,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.998.433,00	12.854.500,00	(143.933,00)	98,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	232.912.470,00	232.573.800,00	(338.670,00)	99,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	232.912.470,00	232.573.800,00	(338.670,00)	99,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.912.470,00	232.573.800,00	(338.670,00)	99,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	32.431.536,00	32.336.000,00	(95.536,00)	99,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	32.431.536,00	32.336.000,00	(95.536,00)	99,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.431.536,00	32.336.000,00	(95.536,00)	99,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	130.000.000,00	129.535.862,00	(464.138,00)	99,64	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000,00	129.535.862,00	(464.138,00)	99,64	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	129.535.862,00	(464.138,00)	99,64	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	131.623.800,00	123.348.750,00	(8.275.050,00)	93,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	4.245.750,00	3.635.250,00	(610.500,00)	85,62	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	4.245.750,00	3.635.250,00	(610.500,00)	85,62	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.245.750,00	3.635.250,00	(610.500,00)	85,62	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	127.378.050,00	119.713.500,00	(7.664.550,00)	93,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	127.378.050,00	119.713.500,00	(7.664.550,00)	93,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	127.378.050,00	119.713.500,00	(7.664.550,00)	93,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	147.178.200,00	125.997.294,00	(21.180.906,00)	85,60	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	110.000.000,00	88.819.094,00	(21.180.906,00)	80,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	110.000.000,00	88.819.094,00	(21.180.906,00)	80,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	88.819.094,00	(21.180.906,00)	80,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	33.178.200,00	33.178.200,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	33.178.200,00	33.178.200,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.178.200,00	33.178.200,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	443.935.470,00	440.471.217,00	(3.464.253,00)	99,21	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	219.704.370,00	218.221.150,00	(1.483.220,00)	99,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	219.704.370,00	218.221.150,00	(1.483.220,00)	99,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.704.370,00	218.221.150,00	(1.483.220,00)	99,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	53.465.370,00	52.652.000,00	(813.370,00)	98,47	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	53.465.370,00	52.652.000,00	(813.370,00)	98,47	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.465.370,00	52.652.000,00	(813.370,00)	98,47	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	170.765.730,00	169.598.067,00	(1.167.663,00)	99,31	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	170.765.730,00	169.598.067,00	(1.167.663,00)	99,31	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.765.730,00	169.598.067,00	(1.167.663,00)	99,31	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.5.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.124.888.595,00	4.105.235.000,00	(19.653.595,00)	99,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01		PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.104.428.595,00	4.085.034.250,00	(19.394.345,00)	99,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0003		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA	45.405.925,00	43.588.000,00	(1.817.925,00)	95,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	45.405.925,00	43.588.000,00	(1.817.925,00)	95,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.405.925,00	43.588.000,00	(1.817.925,00)	95,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0004		PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.010.377.100,00	3.010.277.550,00	(99.550,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.010.377.100,00	3.010.277.550,00	(99.550,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.010.377.100,00	3.010.277.550,00	(99.550,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0005		PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERMASUK DALAM PELAKSANAAN TUGAS YANG BERNUANSA HAK ASASI MANUSIA	79.200.000,00	76.050.000,00	(3.150.000,00)	96,02	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	79.200.000,00	76.050.000,00	(3.150.000,00)	96,02	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.200.000,00	76.050.000,00	(3.150.000,00)	96,02	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0015		PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN	932.150.000,00	924.212.400,00	(7.937.600,00)	99,14	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	932.150.000,00	924.212.400,00	(7.937.600,00)	99,14	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	932.150.000,00	924.212.400,00	(7.937.600,00)	99,14	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0016		PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA MELALUI PENERTIBAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA	31.200.000,00	30.906.300,00	(293.700,00)	99,05	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	31.200.000,00	30.906.300,00	(293.700,00)	99,05	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	30.906.300,00	(293.700,00)	99,05	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0017		PENYEDIAAN LAYANAN DASAR DALAM RANGKA DAMPAK PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERTURAN KEPALA DAERAH	6.095.570,00	0,00	(6.095.570,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	6.095.570,00	0,00	(6.095.570,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.095.570,00	0,00	(6.095.570,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02		PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	20.460.000,00	20.200.750,00	(259.250,00)	98,73	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0012		PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	20.460.000,00	20.200.750,00	(259.250,00)	98,73	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	20.460.000,00	20.200.750,00	(259.250,00)	98,73	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.460.000,00	20.200.750,00	(259.250,00)	98,73	
				JUMLAH BELANJA	12.092.360.204,00	11.671.166.884,00	(421.193.320,00)	96,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.092.360.204,00)	(11.671.166.884,00)	421.193.320,00	96,51	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(12.092.360.204,00)	(11.671.166.884,00)	421.193.320,00	96,51	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. BELITUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	6.430.502.195,00	5.402.873.573,00	(1.027.628.622,00)	84,01	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.5.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.423.775.765,00	3.864.884.898,00	(558.890.867,00)	87,36	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.998.800,00	3.064.600,00	(934.200,00)	76,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	999.800,00	782.600,00	(217.200,00)	78,27	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	999.800,00	782.600,00	(217.200,00)	78,27	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	999.800,00	782.600,00	(217.200,00)	78,27	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	499.800,00	374.850,00	(124.950,00)	75,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	499.800,00	374.850,00	(124.950,00)	75,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.800,00	374.850,00	(124.950,00)	75,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	499.800,00	374.850,00	(124.950,00)	75,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	499.800,00	374.850,00	(124.950,00)	75,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.800,00	374.850,00	(124.950,00)	75,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	499.800,00	374.850,00	(124.950,00)	75,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	499.800,00	374.850,00	(124.950,00)	75,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.800,00	374.850,00	(124.950,00)	75,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	499.800,00	374.850,00	(124.950,00)	75,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	499.800,00	374.850,00	(124.950,00)	75,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.800,00	374.850,00	(124.950,00)	75,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	999.800,00	782.600,00	(217.200,00)	78,27	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	999.800,00	782.600,00	(217.200,00)	78,27	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	999.800,00	782.600,00	(217.200,00)	78,27	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.776.434.621,00	3.301.683.058,00	(474.751.563,00)	87,42	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.774.435.021,00	3.300.117.858,00	(474.317.163,00)	87,43	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.774.435.021,00	3.300.117.858,00	(474.317.163,00)	87,43	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.774.435.021,00	3.300.117.858,00	(474.317.163,00)	87,43	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	999.800,00	782.600,00	(217.200,00)	78,27	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	999.800,00	782.600,00	(217.200,00)	78,27	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	999.800,00	782.600,00	(217.200,00)	78,27	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	999.800,00	782.600,00	(217.200,00)	78,27	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	999.800,00	782.600,00	(217.200,00)	78,27	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	999.800,00	782.600,00	(217.200,00)	78,27	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	96.000.000,00	92.700.007,00	(3.299.993,00)	96,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	96.000.000,00	92.700.007,00	(3.299.993,00)	96,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	96.000.000,00	92.700.007,00	(3.299.993,00)	96,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	92.700.007,00	(3.299.993,00)	96,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	212.035.944,00	189.303.715,00	(22.732.229,00)	89,27	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.025.970,00	3.785.000,00	(240.970,00)	94,01	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.025.970,00	3.785.000,00	(240.970,00)	94,01	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.025.970,00	3.785.000,00	(240.970,00)	94,01	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	36.732.231,00	29.899.900,00	(6.832.331,00)	81,39	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	36.732.231,00	29.899.900,00	(6.832.331,00)	81,39	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.732.231,00	29.899.900,00	(6.832.331,00)	81,39	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	7.999.548,00	6.995.000,00	(1.004.548,00)	87,44	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.999.548,00	6.995.000,00	(1.004.548,00)	87,44	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.999.548,00	6.995.000,00	(1.004.548,00)	87,44	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	114.991.800,00	105.152.000,00	(9.839.800,00)	91,44	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	114.991.800,00	105.152.000,00	(9.839.800,00)	91,44	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.991.800,00	105.152.000,00	(9.839.800,00)	91,44	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.676.475,00	6.439.800,00	(4.236.675,00)	60,31	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.676.475,00	6.439.800,00	(4.236.675,00)	60,31	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.676.475,00	6.439.800,00	(4.236.675,00)	60,31	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.409.920,00	2.940.000,00	(469.920,00)	86,21	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.409.920,00	2.940.000,00	(469.920,00)	86,21	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.409.920,00	2.940.000,00	(469.920,00)	86,21	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	34.200.000,00	34.092.015,00	(107.985,00)	99,68	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	34.200.000,00	34.092.015,00	(107.985,00)	99,68	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.200.000,00	34.092.015,00	(107.985,00)	99,68	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	145.206.400,00	116.063.018,00	(29.143.382,00)	79,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	75.000.000,00	46.213.018,00	(28.786.982,00)	61,61	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	46.213.018,00	(28.786.982,00)	61,61	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	46.213.018,00	(28.786.982,00)	61,61	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	66.356.400,00	66.000.000,00	(356.400,00)	99,46	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	66.356.400,00	66.000.000,00	(356.400,00)	99,46	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.356.400,00	66.000.000,00	(356.400,00)	99,46	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	190.100.000,00	162.070.500,00	(28.029.500,00)	85,25	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS	100.500.000,00	79.370.500,00	(21.129.500,00)	78,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	100.500.000,00	79.370.500,00	(21.129.500,00)	78,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.500.000,00	79.370.500,00	(21.129.500,00)	78,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	13.920.000,00	8.700.000,00	(5.220.000,00)	62,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.920.000,00	8.700.000,00	(5.220.000,00)	62,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.920.000,00	8.700.000,00	(5.220.000,00)	62,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	75.680.000,00	74.000.000,00	(1.680.000,00)	97,78	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	75.680.000,00	74.000.000,00	(1.680.000,00)	97,78	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.680.000,00	74.000.000,00	(1.680.000,00)	97,78	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.5.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	759.252.130,00	589.376.000,00	(169.876.130,00)	77,62	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01		PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	84.334.600,00	59.676.350,00	(24.658.250,00)	70,76	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0007		SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS	84.334.600,00	59.676.350,00	(24.658.250,00)	70,76	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	84.334.600,00	59.676.350,00	(24.658.250,00)	70,76	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.334.600,00	59.676.350,00	(24.658.250,00)	70,76	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02		PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	13.310.010,00	13.203.450,00	(106.560,00)	99,19	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0015		PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA	13.310.010,00	13.203.450,00	(106.560,00)	99,19	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0015	5.2	BELANJA MODAL	13.310.010,00	13.203.450,00	(106.560,00)	99,19	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.310.010,00	13.203.450,00	(106.560,00)	99,19	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03		PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	661.607.520,00	516.496.200,00	(145.111.320,00)	78,06	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0002		RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA	661.607.520,00	516.496.200,00	(145.111.320,00)	78,06	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	661.607.520,00	516.496.200,00	(145.111.320,00)	78,06	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	661.607.520,00	516.496.200,00	(145.111.320,00)	78,06	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.5.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON	1.247.474.300,00	948.612.675,00	(298.861.625,00)	76,04	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04.2.01		PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.247.474.300,00	948.612.675,00	(298.861.625,00)	76,04	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0002		PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.094.799.200,00	815.912.000,00	(278.887.200,00)	74,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.094.799.200,00	815.912.000,00	(278.887.200,00)	74,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.094.799.200,00	815.912.000,00	(278.887.200,00)	74,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0005		STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG	126.801.000,00	106.893.175,00	(19.907.825,00)	84,29	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	126.801.000,00	106.893.175,00	(19.907.825,00)	84,29	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.801.000,00	106.893.175,00	(19.907.825,00)	84,29	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0017		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG	25.874.100,00	25.807.500,00	(66.600,00)	99,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	25.874.100,00	25.807.500,00	(66.600,00)	99,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.874.100,00	25.807.500,00	(66.600,00)	99,74	
				JUMLAH BELANJA	6.430.502.195,00	5.402.873.573,00	(1.027.628.622,00)	84,01	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.430.502.195,00)	(5.402.873.573,00)	1.027.628.622,00	84,01	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.430.502.195,00)	(5.402.873.573,00)	1.027.628.622,00	84,01	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	8.500.436.434,00	7.485.222.951,00	(1.015.213.483,00)	88,05	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.6.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.992.608.153,00	6.201.536.258,00	(791.071.895,00)	88,68	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	16.970.010,00	15.199.400,00	(1.770.610,00)	89,56	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	9.557.430,00	7.799.400,00	(1.758.030,00)	81,60	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.557.430,00	7.799.400,00	(1.758.030,00)	81,60	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.557.430,00	7.799.400,00	(1.758.030,00)	81,60	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.412.580,00	7.400.000,00	(12.580,00)	99,83	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	7.412.580,00	7.400.000,00	(12.580,00)	99,83	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.412.580,00	7.400.000,00	(12.580,00)	99,83	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.160.910.732,00	4.422.718.120,00	(738.192.612,00)	85,69	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.158.811.532,00	4.420.754.120,00	(738.057.412,00)	85,69	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.158.811.532,00	4.420.754.120,00	(738.057.412,00)	85,69	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.158.811.532,00	4.420.754.120,00	(738.057.412,00)	85,69	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	2.099.200,00	1.964.000,00	(135.200,00)	93,55	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.099.200,00	1.964.000,00	(135.200,00)	93,55	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.099.200,00	1.964.000,00	(135.200,00)	93,55	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	198.282.701,00	188.393.678,00	(9.889.023,00)	95,01	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.783.988,00	5.345.760,00	(438.228,00)	92,42	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.783.988,00	5.345.760,00	(438.228,00)	92,42	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.783.988,00	5.345.760,00	(438.228,00)	92,42	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	19.338.420,00	19.230.892,00	(107.528,00)	99,44	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.338.420,00	19.230.892,00	(107.528,00)	99,44	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.338.420,00	19.230.892,00	(107.528,00)	99,44	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	6.605.610,00	6.483.521,00	(122.089,00)	98,15	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.605.610,00	6.483.521,00	(122.089,00)	98,15	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.605.610,00	6.483.521,00	(122.089,00)	98,15	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	83.048.100,00	82.088.200,00	(959.900,00)	98,84	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	83.048.100,00	82.088.200,00	(959.900,00)	98,84	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.048.100,00	82.088.200,00	(959.900,00)	98,84	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	22.916.360,00	22.822.700,00	(93.660,00)	99,59	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	22.916.360,00	22.822.700,00	(93.660,00)	99,59	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.916.360,00	22.822.700,00	(93.660,00)	99,59	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.460.000,00	5.435.000,00	(25.000,00)	99,54	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.460.000,00	5.435.000,00	(25.000,00)	99,54	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.460.000,00	5.435.000,00	(25.000,00)	99,54	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	55.130.223,00	46.987.605,00	(8.142.618,00)	85,23	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	55.130.223,00	46.987.605,00	(8.142.618,00)	85,23	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.130.223,00	46.987.605,00	(8.142.618,00)	85,23	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	16.257.060,00	12.459.750,00	(3.797.310,00)	76,64	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	16.257.060,00	12.459.750,00	(3.797.310,00)	76,64	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	16.257.060,00	12.459.750,00	(3.797.310,00)	76,64	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.257.060,00	12.459.750,00	(3.797.310,00)	76,64	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	300.354.650,00	281.031.691,00	(19.322.959,00)	93,56	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.680.000,00	1.237.200,00	(442.800,00)	73,64	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.680.000,00	1.237.200,00	(442.800,00)	73,64	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.680.000,00	1.237.200,00	(442.800,00)	73,64	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	107.900.000,00	89.153.491,00	(18.746.509,00)	82,62	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	107.900.000,00	89.153.491,00	(18.746.509,00)	82,62	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.900.000,00	89.153.491,00	(18.746.509,00)	82,62	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	190.774.650,00	190.641.000,00	(133.650,00)	99,92	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	190.774.650,00	190.641.000,00	(133.650,00)	99,92	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.774.650,00	190.641.000,00	(133.650,00)	99,92	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.299.833.000,00	1.281.733.619,00	(18.099.381,00)	98,60	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	44.010.000,00	41.282.500,00	(2.727.500,00)	93,80	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	44.010.000,00	41.282.500,00	(2.727.500,00)	93,80	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.010.000,00	41.282.500,00	(2.727.500,00)	93,80	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	122.340.000,00	113.734.320,00	(8.605.680,00)	92,96	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	122.340.000,00	113.734.320,00	(8.605.680,00)	92,96	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.340.000,00	113.734.320,00	(8.605.680,00)	92,96	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN MEBEL	3.633.000,00	3.570.000,00	(63.000,00)	98,26	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.633.000,00	3.570.000,00	(63.000,00)	98,26	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.633.000,00	3.570.000,00	(63.000,00)	98,26	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	29.850.000,00	29.762.500,00	(87.500,00)	99,70	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	29.850.000,00	29.762.500,00	(87.500,00)	99,70	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.850.000,00	29.762.500,00	(87.500,00)	99,70	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	1.100.000.000,00	1.093.384.299,00	(6.615.701,00)	99,39	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	143.364.000,00	142.274.000,00	(1.090.000,00)	99,23	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.364.000,00	142.274.000,00	(1.090.000,00)	99,23	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	956.636.000,00	951.110.299,00	(5.525.701,00)	99,42	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	956.636.000,00	951.110.299,00	(5.525.701,00)	99,42	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.6.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	146.525.261,00	137.586.265,00	(8.938.996,00)	93,89	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.02.2.03		PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	146.525.261,00	137.586.265,00	(8.938.996,00)	93,89	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0002		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	3.363.310,00	3.236.670,00	(126.640,00)	96,23	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.363.310,00	3.236.670,00	(126.640,00)	96,23	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.363.310,00	3.236.670,00	(126.640,00)	96,23	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0003		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	64.070.645,00	61.493.730,00	(2.576.915,00)	95,97	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	64.070.645,00	61.493.730,00	(2.576.915,00)	95,97	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.070.645,00	61.493.730,00	(2.576.915,00)	95,97	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0005		PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUATAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)	79.091.306,00	72.855.865,00	(6.235.441,00)	92,11	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	79.091.306,00	72.855.865,00	(6.235.441,00)	92,11	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.091.306,00	72.855.865,00	(6.235.441,00)	92,11	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.6.03		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	13.537.849,00	9.118.618,00	(4.419.231,00)	67,35	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.03.2.01		PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/KELURAHAN ASAL	13.537.849,00	9.118.618,00	(4.419.231,00)	67,35	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.03.2.01.0001		FASILITASI PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/KELURAHAN ASAL	13.537.849,00	9.118.618,00	(4.419.231,00)	67,35	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.537.849,00	9.118.618,00	(4.419.231,00)	67,35	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.537.849,00	9.118.618,00	(4.419.231,00)	67,35	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.6.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	425.656.874,00	367.177.195,00	(58.479.679,00)	86,26	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01		REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	425.656.874,00	367.177.195,00	(58.479.679,00)	86,26	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0001		PENYEDIAAN PERMAKANAN	137.123.081,00	134.303.570,00	(2.819.511,00)	97,94	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	137.123.081,00	134.303.570,00	(2.819.511,00)	97,94	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.123.081,00	10.943.720,00	(179.361,00)	98,38	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0001	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	126.000.000,00	123.359.850,00	(2.640.150,00)	97,90	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0002		PENYEDIAAN SANDANG	53.625.000,00	52.069.650,00	(1.555.350,00)	97,09	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	53.625.000,00	52.069.650,00	(1.555.350,00)	97,09	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	937.500,00	(187.500,00)	83,33	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0002	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	52.500.000,00	51.132.150,00	(1.367.850,00)	97,39	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0003		PENYEDIAAN ALAT BANTU	49.062.000,00	46.597.800,00	(2.464.200,00)	94,97	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	49.062.000,00	46.597.800,00	(2.464.200,00)	94,97	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	49.062.000,00	46.597.800,00	(2.464.200,00)	94,97	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0004		PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA	8.308.617,00	4.044.000,00	(4.264.617,00)	48,67	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	8.308.617,00	4.044.000,00	(4.264.617,00)	48,67	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.308.617,00	4.044.000,00	(4.264.617,00)	48,67	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0005		PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL	4.051.140,00	0,00	(4.051.140,00)	0,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.051.140,00	0,00	(4.051.140,00)	0,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.051.140,00	0,00	(4.051.140,00)	0,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0006		PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT	4.084.887,00	3.850.000,00	(234.887,00)	94,24	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.084.887,00	3.850.000,00	(234.887,00)	94,24	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.084.887,00	3.850.000,00	(234.887,00)	94,24	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0007		FASILITASI PEMBUATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, AKTA KELAHIRAN, SURAT NIKAH, DAN KARTU IDENTITAS ANAK	2.665.950,00	709.400,00	(1.956.550,00)	26,60	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.665.950,00	709.400,00	(1.956.550,00)	26,60	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.665.950,00	709.400,00	(1.956.550,00)	26,60	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0008		PEMBERIAN AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR	750.000,00	623.500,00	(126.500,00)	83,13	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	750.000,00	623.500,00	(126.500,00)	83,13	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	623.500,00	(126.500,00)	83,13	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0009		PEMBERIAN LAYANAN DATA DAN PENGADUAN	7.241.487,00	6.095.650,00	(1.145.837,00)	84,17	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	7.241.487,00	6.095.650,00	(1.145.837,00)	84,17	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.241.487,00	6.095.650,00	(1.145.837,00)	84,17	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0010		PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN	130.684.130,00	106.991.230,00	(23.692.900,00)	81,87	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	130.684.130,00	106.991.230,00	(23.692.900,00)	81,87	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.684.130,00	106.991.230,00	(23.692.900,00)	81,87	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0011		PEMBERIAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA	3.574.437,00	1.478.145,00	(2.096.292,00)	41,35	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	3.574.437,00	1.478.145,00	(2.096.292,00)	41,35	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.574.437,00	1.478.145,00	(2.096.292,00)	41,35	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0012		PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN	24.486.145,00	10.414.250,00	(14.071.895,00)	42,53	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	24.486.145,00	10.414.250,00	(14.071.895,00)	42,53	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.486.145,00	10.414.250,00	(14.071.895,00)	42,53	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.6.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	521.651.212,00	451.797.645,00	(69.853.567,00)	86,60	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.05.2.01		PEMELIHARAAN ANAK-ANAK TERLANTAR	20.501.782,00	8.791.555,00	(11.710.227,00)	42,88	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.05.2.01.0001		PENJANGKAUAN ANAK-ANAK TERLANTAR	6.751.000,00	1.038.800,00	(5.712.200,00)	15,38	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.751.000,00	1.038.800,00	(5.712.200,00)	15,38	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.751.000,00	1.038.800,00	(5.712.200,00)	15,38	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.05.2.01.0002		RUJUKAN ANAK-ANAK TERLANTAR	13.750.782,00	7.752.755,00	(5.998.027,00)	56,38	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.750.782,00	7.752.755,00	(5.998.027,00)	56,38	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.750.782,00	7.752.755,00	(5.998.027,00)	56,38	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.05.2.02		PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	501.149.430,00	443.006.090,00	(58.143.340,00)	88,39	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0002		PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	357.026.050,00	318.949.020,00	(38.077.030,00)	89,33	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	357.026.050,00	318.949.020,00	(38.077.030,00)	89,33	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	357.026.050,00	318.949.020,00	(38.077.030,00)	89,33	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0003		FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA	114.819.400,00	95.341.945,00	(19.477.455,00)	83,03	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	114.819.400,00	95.341.945,00	(19.477.455,00)	83,03	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.274.782,00	10.141.945,00	(11.132.837,00)	47,67	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	93.544.618,00	85.200.000,00	(8.344.618,00)	91,07	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0004		FASILITASI BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT	29.303.980,00	28.715.125,00	(588.855,00)	97,99	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	29.303.980,00	28.715.125,00	(588.855,00)	97,99	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.303.980,00	4.258.200,00	(45.780,00)	98,93	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0004	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	25.000.000,00	24.456.925,00	(543.075,00)	97,82	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.6.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	394.070.085,00	314.220.840,00	(79.849.245,00)	79,73	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.06.2.01		PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA	50.496.525,00	1.126.000,00	(49.370.525,00)	2,22	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001		PENYEDIAAN MAKANAN	14.278.929,00	0,00	(14.278.929,00)	0,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.278.929,00	0,00	(14.278.929,00)	0,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.278.929,00	0,00	(14.278.929,00)	0,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0002		PENYEDIAAN SANDANG	3.561.836,00	0,00	(3.561.836,00)	0,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.561.836,00	0,00	(3.561.836,00)	0,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.561.836,00	0,00	(3.561.836,00)	0,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0003		PENYEDIAAN TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI	2.756.800,00	0,00	(2.756.800,00)	0,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.756.800,00	0,00	(2.756.800,00)	0,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.756.800,00	0,00	(2.756.800,00)	0,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0004		PENANGANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN	3.619.000,00	0,00	(3.619.000,00)	0,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.619.000,00	0,00	(3.619.000,00)	0,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	510.000,00	0,00	(510.000,00)	0,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0004	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.109.000,00	0,00	(3.109.000,00)	0,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0005		PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL	26.279.960,00	1.126.000,00	(25.153.960,00)	4,28	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	26.279.960,00	1.126.000,00	(25.153.960,00)	4,28	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.279.960,00	1.126.000,00	(25.153.960,00)	4,28	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.06.2.02		PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	343.573.560,00	313.094.840,00	(30.478.720,00)	91,12	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0002		KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA	343.573.560,00	313.094.840,00	(30.478.720,00)	91,12	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	343.573.560,00	313.094.840,00	(30.478.720,00)	91,12	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.573.560,00	313.094.840,00	(30.478.720,00)	91,12	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.6.07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	6.387.000,00	3.786.130,00	(2.600.870,00)	59,27	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.07.2.01		PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	6.387.000,00	3.786.130,00	(2.600.870,00)	59,27	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.07.2.01.0002		PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	6.387.000,00	3.786.130,00	(2.600.870,00)	59,27	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.07.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.387.000,00	3.786.130,00	(2.600.870,00)	59,27	
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.07.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.387.000,00	3.786.130,00	(2.600.870,00)	59,27	
				JUMLAH BELANJA	8.500.436.434,00	7.485.222.951,00	(1.015.213.483,00)	88,05	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(8.500.436.434,00)	(7.485.222.951,00)	1.015.213.483,00	88,05	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.500.436.434,00)	(7.485.222.951,00)	1.015.213.483,00	88,05	

PEMERINTAH KAB. BELITUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	1.068.325.655,00	868.085.744,00	(200.239.911,00)	81,25	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.8.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	318.857.773,00	294.635.280,00	(24.222.493,00)	92,40	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.02.2.01		PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	11.674.700,00	11.517.630,00	(157.070,00)	98,65	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.02.2.01.0001		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERUMUSAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUG	11.674.700,00	11.517.630,00	(157.070,00)	98,65	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.674.700,00	11.517.630,00	(157.070,00)	98,65	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.674.700,00	11.517.630,00	(157.070,00)	98,65	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.02.2.02		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	283.964.623,00	260.242.650,00	(23.721.973,00)	91,64	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.02.2.02.0002		ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DAN POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI	283.964.623,00	260.242.650,00	(23.721.973,00)	91,64	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	283.964.623,00	260.242.650,00	(23.721.973,00)	91,64	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.964.623,00	260.242.650,00	(23.721.973,00)	91,64	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.02.2.03		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	23.218.450,00	22.875.000,00	(343.450,00)	98,52	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.02.2.03.0001		ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN KEPADA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	10.878.050,00	10.726.000,00	(152.050,00)	98,60	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.878.050,00	10.726.000,00	(152.050,00)	98,60	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.878.050,00	10.726.000,00	(152.050,00)	98,60	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.02.2.03.0003		PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	12.340.400,00	12.149.000,00	(191.400,00)	98,44	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.340.400,00	12.149.000,00	(191.400,00)	98,44	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.340.400,00	12.149.000,00	(191.400,00)	98,44	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.8.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	300.789.006,00	140.272.850,00	(160.516.156,00)	46,63	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.03.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	300.789.006,00	140.272.850,00	(160.516.156,00)	46,63	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.03.2.02.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	300.789.006,00	140.272.850,00	(160.516.156,00)	46,63	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	300.789.006,00	140.272.850,00	(160.516.156,00)	46,63	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.789.006,00	140.272.850,00	(160.516.156,00)	46,63	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.8.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	13.986.354,00	12.771.000,00	(1.215.354,00)	91,31	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.04.2.02		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.986.354,00	12.771.000,00	(1.215.354,00)	91,31	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.04.2.02.0001		ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.986.354,00	12.771.000,00	(1.215.354,00)	91,31	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.986.354,00	12.771.000,00	(1.215.354,00)	91,31	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.986.354,00	12.771.000,00	(1.215.354,00)	91,31	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.8.05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	24.945.830,00	22.057.900,00	(2.887.930,00)	88,42	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.05.2.01		PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.945.830,00	22.057.900,00	(2.887.930,00)	88,42	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.05.2.01.0001		PENYEDIAAN DATA GENDER DAN ANAK DI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	24.945.830,00	22.057.900,00	(2.887.930,00)	88,42	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.945.830,00	22.057.900,00	(2.887.930,00)	88,42	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.8.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	191.346.692,00	185.186.457,00	(6.160.235,00)	96,78	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.06.2.01		PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	10.618.050,00	6.204.000,00	(4.414.050,00)	58,42	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.06.2.01.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	10.618.050,00	6.204.000,00	(4.414.050,00)	58,42	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.618.050,00	6.204.000,00	(4.414.050,00)	58,42	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.618.050,00	6.204.000,00	(4.414.050,00)	58,42	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.06.2.02		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	180.728.642,00	178.982.457,00	(1.746.185,00)	99,03	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.06.2.02.0003		PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI PEMENUHAN HAK ANAK BAGI LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.153.508,00	17.971.600,00	(181.908,00)	98,99	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.06.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	18.153.508,00	17.971.600,00	(181.908,00)	98,99	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.06.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.153.508,00	17.971.600,00	(181.908,00)	98,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.06.2.02.0004		PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	162.575.134,00	161.010.857,00	(1.564.277,00)	99,03	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.06.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	162.575.134,00	161.010.857,00	(1.564.277,00)	99,03	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.06.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.575.134,00	161.010.857,00	(1.564.277,00)	99,03	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.8.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	218.400.000,00	213.162.257,00	(5.237.743,00)	97,60	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.07.2.01		PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	130.000.000,00	127.435.000,00	(2.565.000,00)	98,02	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.07.2.01.0004		ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN /PROGRAM/ KEGIATAN PENCEGAHAN KTA	130.000.000,00	127.435.000,00	(2.565.000,00)	98,02	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.07.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000,00	127.435.000,00	(2.565.000,00)	98,02	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.07.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	127.435.000,00	(2.565.000,00)	98,02	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.07.2.03		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	88.400.000,00	85.727.257,00	(2.672.743,00)	96,97	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.07.2.03.0006		PENINGKATAN KAPASITAS SDM LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN BAGI AMPK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/	88.400.000,00	85.727.257,00	(2.672.743,00)	96,97	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.07.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	88.400.000,00	85.727.257,00	(2.672.743,00)	96,97	
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.07.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.400.000,00	85.727.257,00	(2.672.743,00)	96,97	
				JUMLAH BELANJA	1.068.325.655,00	868.085.744,00	(200.239.911,00)	81,25	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.068.325.655,00)	(868.085.744,00)	200.239.911,00	81,25	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.068.325.655,00)	(868.085.744,00)	200.239.911,00	81,25	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.09.3.27.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	160.000.000,00	198.652.000,00	38.652.000,00	124,15	
	2.09.3.27.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	160.000.000,00	198.652.000,00	38.652.000,00	124,15	
	2.09.3.27.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	160.000.000,00	198.652.000,00	38.652.000,00	124,15	
				JUMLAH PENDAPATAN	160.000.000,00	198.652.000,00	38.652.000,00	124,15	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	417.962.667,00	350.058.883,68	(67.903.783,32)	83,75	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.9.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	313.266.977,00	250.503.004,68	(62.763.972,32)	79,96	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.01		PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	40.633.445,00	37.743.526,00	(2.889.919,00)	92,88	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0014		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN STOK, PASOKAN DAN HARGA PANGAN POKOK STRATEGIS	24.592.000,00	21.778.000,00	(2.814.000,00)	88,55	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	24.592.000,00	21.778.000,00	(2.814.000,00)	88,55	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.592.000,00	21.778.000,00	(2.814.000,00)	88,55	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0016		PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN (NBM)	16.041.445,00	15.965.526,00	(75.919,00)	99,52	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	16.041.445,00	15.965.526,00	(75.919,00)	99,52	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.041.445,00	15.965.526,00	(75.919,00)	99,52	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.02		PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA	248.765.032,00	190.891.478,68	(57.873.553,32)	76,73	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0003		PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	198.800.000,00	179.302.060,00	(19.497.940,00)	90,19	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	198.800.000,00	179.302.060,00	(19.497.940,00)	90,19	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.800.000,00	179.302.060,00	(19.497.940,00)	90,19	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0004		PEMELIHARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	34.000.000,00	4.328.068,68	(29.671.931,32)	12,72	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	34.000.000,00	4.328.068,68	(29.671.931,32)	12,72	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	4.328.068,68	(29.671.931,32)	12,72	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0005		PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KAB/KOTA	15.965.032,00	7.261.350,00	(8.703.682,00)	45,48	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	15.965.032,00	7.261.350,00	(8.703.682,00)	45,48	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.965.032,00	7.261.350,00	(8.703.682,00)	45,48	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.04		PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI	23.868.500,00	21.868.000,00	(2.000.500,00)	91,61	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0001		PENYUSUNAN DAN PENETAPAN TARGET KONSUMSI PANGAN PER KAPITA PER TAHUN	800.500,00	800.500,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	800.500,00	800.500,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.500,00	800.500,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0002		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	23.068.000,00	21.067.500,00	(2.000.500,00)	91,32	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.068.000,00	21.067.500,00	(2.000.500,00)	91,32	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.068.000,00	21.067.500,00	(2.000.500,00)	91,32	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.9.04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	22.263.200,00	22.175.879,00	(87.321,00)	99,60	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.04.2.01		PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN	5.116.500,00	5.086.000,00	(30.500,00)	99,40	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.04.2.01.0001		PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN	5.116.500,00	5.086.000,00	(30.500,00)	99,40	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.116.500,00	5.086.000,00	(30.500,00)	99,40	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.116.500,00	5.086.000,00	(30.500,00)	99,40	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.04.2.02		PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	17.146.700,00	17.089.879,00	(56.821,00)	99,66	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.04.2.02.0003		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENANGANAN KERAWANAN PANGAN DAN GIZI KABUPATEN/KOTA	17.146.700,00	17.089.879,00	(56.821,00)	99,66	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.04.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	17.146.700,00	17.089.879,00	(56.821,00)	99,66	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.04.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.146.700,00	17.089.879,00	(56.821,00)	99,66	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.9.05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	82.432.490,00	77.380.000,00	(5.052.490,00)	93,87	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.05.2.01		PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	82.432.490,00	77.380.000,00	(5.052.490,00)	93,87	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0007		PENYEDIAAN SARANA PENGUJIAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	82.432.490,00	77.380.000,00	(5.052.490,00)	93,87	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	82.432.490,00	77.380.000,00	(5.052.490,00)	93,87	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.432.490,00	77.380.000,00	(5.052.490,00)	93,87	
				JUMLAH BELANJA	417.962.667,00	350.058.883,68	(67.903.783,32)	83,75	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(257.962.667,00)	(151.406.883,68)	106.555.783,32	58,69	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(257.962.667,00)	(151.406.883,68)	106.555.783,32	58,69	

PEMERINTAH KAB. BELITUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.09.3.27.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	160.000.000,00	198.652.000,00	38.652.000,00	124,15	
	2.09.3.27.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	160.000.000,00	198.652.000,00	38.652.000,00	124,15	
	2.09.3.27.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	160.000.000,00	198.652.000,00	38.652.000,00	124,15	
				JUMLAH PENDAPATAN	160.000.000,00	198.652.000,00	38.652.000,00	124,15	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	18.113.018.254,00	16.018.397.137,65	(2.094.621.116,35)	88,43	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.385.813.621,00	13.480.183.915,00	(1.905.629.706,00)	87,61	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.008.800,00	1.956.400,00	(52.400,00)	97,39	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	1.089.400,00	1.063.200,00	(26.200,00)	97,59	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.089.400,00	1.063.200,00	(26.200,00)	97,59	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.089.400,00	1.063.200,00	(26.200,00)	97,59	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	919.400,00	893.200,00	(26.200,00)	97,15	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	919.400,00	893.200,00	(26.200,00)	97,15	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	919.400,00	893.200,00	(26.200,00)	97,15	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	14.124.147.721,00	12.333.146.775,00	(1.791.000.946,00)	87,31	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	14.121.329.121,00	12.330.331.175,00	(1.790.997.946,00)	87,31	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.121.329.121,00	12.330.331.175,00	(1.790.997.946,00)	87,31	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	14.121.329.121,00	12.330.331.175,00	(1.790.997.946,00)	87,31	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2.818.600,00	2.815.600,00	(3.000,00)	99,89	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.818.600,00	2.815.600,00	(3.000,00)	99,89	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.818.600,00	2.815.600,00	(3.000,00)	99,89	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	51.080.000,00	33.149.124,00	(17.930.876,00)	64,89	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	51.080.000,00	33.149.124,00	(17.930.876,00)	64,89	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	51.080.000,00	33.149.124,00	(17.930.876,00)	64,89	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.080.000,00	33.149.124,00	(17.930.876,00)	64,89	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	328.469.020,00	320.916.964,00	(7.552.056,00)	97,70	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.795.400,00	9.794.000,00	(1.400,00)	99,98	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.795.400,00	9.794.000,00	(1.400,00)	99,98	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.795.400,00	9.794.000,00	(1.400,00)	99,98	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	50.676.620,00	47.929.250,00	(2.747.370,00)	94,57	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	50.676.620,00	47.929.250,00	(2.747.370,00)	94,57	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.676.620,00	47.929.250,00	(2.747.370,00)	94,57	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	10.697.800,00	10.696.500,00	(1.300,00)	99,98	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.697.800,00	10.696.500,00	(1.300,00)	99,98	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.697.800,00	10.696.500,00	(1.300,00)	99,98	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	148.083.000,00	148.072.750,00	(10.250,00)	99,99	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	148.083.000,00	148.072.750,00	(10.250,00)	99,99	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.083.000,00	148.072.750,00	(10.250,00)	99,99	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	23.216.200,00	19.284.600,00	(3.931.600,00)	83,06	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	23.216.200,00	19.284.600,00	(3.931.600,00)	83,06	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.216.200,00	19.284.600,00	(3.931.600,00)	83,06	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.920.000,00	1.860.000,00	(60.000,00)	96,87	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.920.000,00	1.860.000,00	(60.000,00)	96,87	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	1.860.000,00	(60.000,00)	96,87	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	84.080.000,00	83.279.864,00	(800.136,00)	99,04	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	84.080.000,00	83.279.864,00	(800.136,00)	99,04	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.080.000,00	83.279.864,00	(800.136,00)	99,04	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	13.467.000,00	4.384.500,00	(9.082.500,00)	32,55	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	13.467.000,00	4.384.500,00	(9.082.500,00)	32,55	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	13.467.000,00	4.384.500,00	(9.082.500,00)	32,55	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.467.000,00	4.384.500,00	(9.082.500,00)	32,55	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	517.283.880,00	444.137.727,00	(73.146.153,00)	85,85	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.344.000,00	1.531.000,00	(813.000,00)	65,31	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.344.000,00	1.531.000,00	(813.000,00)	65,31	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.344.000,00	1.531.000,00	(813.000,00)	65,31	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	191.000.000,00	168.434.147,00	(22.565.853,00)	88,18	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	191.000.000,00	168.434.147,00	(22.565.853,00)	88,18	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.000.000,00	168.434.147,00	(22.565.853,00)	88,18	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	323.939.880,00	274.172.580,00	(49.767.300,00)	84,63	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	323.939.880,00	274.172.580,00	(49.767.300,00)	84,63	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.939.880,00	274.172.580,00	(49.767.300,00)	84,63	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	349.357.200,00	342.492.425,00	(6.864.775,00)	98,03	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	37.573.000,00	35.087.800,00	(2.485.200,00)	93,38	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	37.573.000,00	35.087.800,00	(2.485.200,00)	93,38	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.573.000,00	35.087.800,00	(2.485.200,00)	93,38	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	53.074.000,00	51.940.200,00	(1.133.800,00)	97,86	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	53.074.000,00	51.940.200,00	(1.133.800,00)	97,86	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.074.000,00	51.940.200,00	(1.133.800,00)	97,86	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0003		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR	75.760.000,00	74.418.800,00	(1.341.200,00)	98,22	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0003	5.1	BELANJA OPERASI	75.760.000,00	74.418.800,00	(1.341.200,00)	98,22	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.760.000,00	74.418.800,00	(1.341.200,00)	98,22	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	25.165.200,00	24.171.500,00	(993.700,00)	96,05	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	25.165.200,00	24.171.500,00	(993.700,00)	96,05	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.165.200,00	24.171.500,00	(993.700,00)	96,05	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	157.785.000,00	156.874.125,00	(910.875,00)	99,42	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	37.785.000,00	37.319.125,00	(465.875,00)	98,76	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.785.000,00	37.319.125,00	(465.875,00)	98,76	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	120.000.000,00	119.555.000,00	(445.000,00)	99,62	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120.000.000,00	119.555.000,00	(445.000,00)	99,62	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.631.784.735,00	1.540.542.590,00	(91.242.145,00)	94,40	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.01		PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	500.276.935,00	493.418.672,00	(6.858.263,00)	98,62	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001		PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI	500.276.935,00	493.418.672,00	(6.858.263,00)	98,62	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	500.276.935,00	493.418.672,00	(6.858.263,00)	98,62	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.744.395,00	52.026.957,00	(1.717.438,00)	96,80	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	446.532.540,00	441.391.715,00	(5.140.825,00)	98,84	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.02		PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	472.654.800,00	397.041.800,00	(75.613.000,00)	84,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0003		PEMANFAATAN SDG HEWAN/TANAMAN	472.654.800,00	397.041.800,00	(75.613.000,00)	84,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	472.654.800,00	397.041.800,00	(75.613.000,00)	84,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	472.654.800,00	397.041.800,00	(75.613.000,00)	84,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.03		PENINGKATAN MUTU DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK SERTA PAKAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	142.266.000,00	138.443.300,00	(3.822.700,00)	97,31	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.03.0001		PENGAWASAN MUTU BENIH/BIBIT TERNAK, BAHAN PAKAN/PAKAN/TANAMAN SKALA KECIL	142.266.000,00	138.443.300,00	(3.822.700,00)	97,31	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	142.266.000,00	138.443.300,00	(3.822.700,00)	97,31	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.266.000,00	138.443.300,00	(3.822.700,00)	97,31	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.06		PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	516.587.000,00	511.638.818,00	(4.948.182,00)	99,04	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0003		PENGADAAN BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	479.227.000,00	474.278.818,00	(4.948.182,00)	98,96	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	479.227.000,00	474.278.818,00	(4.948.182,00)	98,96	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.722.000,00	41.508.258,00	(3.213.742,00)	92,81	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0003	5.1.05	Belanja Hibah	434.505.000,00	432.770.560,00	(1.734.440,00)	99,60	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0004		PENGADAAN BENIH TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	37.360.000,00	37.360.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	37.360.000,00	37.360.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.360.000,00	37.360.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	429.049.385,00	364.073.142,65	(64.976.242,35)	84,85	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.01		PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	386.574.600,00	328.407.600,00	(58.167.000,00)	84,95	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0003		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PRASARANA PENDUKUNG PERTANIAN LAINNYA	299.978.600,00	275.828.600,00	(24.150.000,00)	91,94	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	299.978.600,00	275.828.600,00	(24.150.000,00)	91,94	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.978.600,00	275.828.600,00	(24.150.000,00)	91,94	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0015		PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/LP2B, KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/KP2B DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/LCP2B DI KABUPATEN/KOTA	54.600.000,00	47.779.000,00	(6.821.000,00)	87,50	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	54.600.000,00	47.779.000,00	(6.821.000,00)	87,50	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.600.000,00	47.779.000,00	(6.821.000,00)	87,50	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0016		PENYUSUNAN PETA KAWASAN, LAHAN DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN/KOTA	31.996.000,00	4.800.000,00	(27.196.000,00)	15,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0016	5.2	BELANJA MODAL	27.196.000,00	0,00	(27.196.000,00)	0,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0016	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.196.000,00	0,00	(27.196.000,00)	0,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.02		PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	42.474.785,00	35.665.542,65	(6.809.242,35)	83,96	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0015		PEMBANGUNAN, REHABILITASI, PEMELIHARAAN DAN OPERASIONALISASI RUMAH POTONG HEWAN	42.474.785,00	35.665.542,65	(6.809.242,35)	83,96	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	35.208.785,00	28.399.542,65	(6.809.242,35)	80,66	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0015	5.2	BELANJA MODAL	7.266.000,00	7.266.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.266.000,00	7.266.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	160.865.801,00	149.814.961,00	(11.050.840,00)	93,13	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.04.2.01		PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.976.000,00	50.976.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.04.2.01.0008		PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN ZOONOSIS DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.976.000,00	50.976.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	50.976.000,00	50.976.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.976.000,00	50.976.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.04.2.03		PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	86.721.001,00	78.909.211,00	(7.811.790,00)	90,99	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.04.2.03.0002		PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER	86.721.001,00	78.909.211,00	(7.811.790,00)	90,99	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.04.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	86.721.001,00	78.909.211,00	(7.811.790,00)	90,99	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.04.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.721.001,00	78.909.211,00	(7.811.790,00)	90,99	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.04.2.04		PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	23.168.800,00	19.929.750,00	(3.239.050,00)	86,01	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.04.2.04.0008		PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KESMAVET DAN KESEJAHTERAAN HEWAN	23.168.800,00	19.929.750,00	(3.239.050,00)	86,01	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.04.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	23.168.800,00	19.929.750,00	(3.239.050,00)	86,01	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.04.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.168.800,00	19.929.750,00	(3.239.050,00)	86,01	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	85.686.382,00	79.824.000,00	(5.862.382,00)	93,15	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.2.01		PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA	85.686.382,00	79.824.000,00	(5.862.382,00)	93,15	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0001		PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	85.686.382,00	79.824.000,00	(5.862.382,00)	93,15	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	85.686.382,00	79.824.000,00	(5.862.382,00)	93,15	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.686.382,00	79.824.000,00	(5.862.382,00)	93,15	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.06		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	37.754.000,00	37.185.961,00	(568.039,00)	98,49	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.06.2.01		PENERBITAN IZIN USAHA PERTANIAN YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.754.000,00	37.185.961,00	(568.039,00)	98,49	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.06.2.01.0005		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR DAN IZIN USAHA PERTANIAN	37.754.000,00	37.185.961,00	(568.039,00)	98,49	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	37.754.000,00	37.185.961,00	(568.039,00)	98,49	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.754.000,00	37.185.961,00	(568.039,00)	98,49	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	382.064.330,00	366.772.568,00	(15.291.762,00)	95,99	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01		PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	382.064.330,00	366.772.568,00	(15.291.762,00)	95,99	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0001		PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA	170.712.330,00	168.026.568,00	(2.685.762,00)	98,42	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	160.590.330,00	157.904.568,00	(2.685.762,00)	98,32	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.590.330,00	157.904.568,00	(2.685.762,00)	98,32	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	10.122.000,00	10.122.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.122.000,00	10.122.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0002		PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA	28.952.000,00	28.886.000,00	(66.000,00)	99,77	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	28.952.000,00	28.886.000,00	(66.000,00)	99,77	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.952.000,00	28.886.000,00	(66.000,00)	99,77	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0006		PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PENYULUH PERTANIAN	182.400.000,00	169.860.000,00	(12.540.000,00)	93,12	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	182.400.000,00	169.860.000,00	(12.540.000,00)	93,12	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.400.000,00	169.860.000,00	(12.540.000,00)	93,12	
				JUMLAH BELANJA	18.113.018.254,00	16.018.397.137,65	(2.094.621.116,35)	88,43	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(17.953.018.254,00)	(15.819.745.137,65)	2.133.273.116,35	88,11	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(17.953.018.254,00)	(15.819.745.137,65)	2.133.273.116,35	88,11	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.11.3.28.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.671.600.000,00	1.823.948.500,00	152.348.500,00	109,11	
	2.11.3.28.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.671.600.000,00	1.823.948.500,00	152.348.500,00	109,11	
	2.11.3.28.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.671.600.000,00	1.823.948.500,00	152.348.500,00	109,11	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.671.600.000,00	1.823.948.500,00	152.348.500,00	109,11	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	16.499.628.266,00	15.817.382.918,00	(682.245.348,00)	95,86	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.692.235.451,00	6.281.973.472,00	(410.261.979,00)	93,86	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.631.805,00	5.451.210,00	(2.180.595,00)	71,42	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	1.020.312,00	704.628,00	(315.684,00)	69,06	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.020.312,00	704.628,00	(315.684,00)	69,06	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.020.312,00	704.628,00	(315.684,00)	69,06	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1.461.870,00	999.000,00	(462.870,00)	68,33	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.461.870,00	999.000,00	(462.870,00)	68,33	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.461.870,00	999.000,00	(462.870,00)	68,33	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1.668.996,00	1.137.084,00	(531.912,00)	68,12	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.668.996,00	1.137.084,00	(531.912,00)	68,12	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.668.996,00	1.137.084,00	(531.912,00)	68,12	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.128.870,00	777.000,00	(351.870,00)	68,82	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.128.870,00	777.000,00	(351.870,00)	68,82	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.128.870,00	777.000,00	(351.870,00)	68,82	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	1.041.291,00	794.760,00	(246.531,00)	76,32	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.041.291,00	794.760,00	(246.531,00)	76,32	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.041.291,00	794.760,00	(246.531,00)	76,32	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.310.466,00	1.038.738,00	(271.728,00)	79,26	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.310.466,00	1.038.738,00	(271.728,00)	79,26	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.310.466,00	1.038.738,00	(271.728,00)	79,26	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.158.812.006,00	5.777.194.450,00	(381.617.556,00)	93,80	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.157.460.368,00	5.776.525.020,00	(380.935.348,00)	93,81	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.157.460.368,00	5.776.525.020,00	(380.935.348,00)	93,81	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.126.845.068,00	5.746.859.886,00	(379.985.182,00)	93,79	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.615.300,00	29.665.134,00	(950.166,00)	96,89	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	819.096,00	375.280,00	(443.816,00)	45,81	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	819.096,00	375.280,00	(443.816,00)	45,81	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	819.096,00	375.280,00	(443.816,00)	45,81	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	532.542,00	294.150,00	(238.392,00)	55,23	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	532.542,00	294.150,00	(238.392,00)	55,23	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	532.542,00	294.150,00	(238.392,00)	55,23	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	22.470.000,00	16.788.394,00	(5.681.606,00)	74,71	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	22.470.000,00	16.788.394,00	(5.681.606,00)	74,71	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	22.470.000,00	16.788.394,00	(5.681.606,00)	74,71	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.470.000,00	16.788.394,00	(5.681.606,00)	74,71	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	156.212.340,00	137.123.540,00	(19.088.800,00)	87,78	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.964.144,00	1.546.785,00	(1.417.359,00)	52,18	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.964.144,00	1.546.785,00	(1.417.359,00)	52,18	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.964.144,00	1.546.785,00	(1.417.359,00)	52,18	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	20.141.616,00	15.920.590,00	(4.221.026,00)	79,04	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.141.616,00	15.920.590,00	(4.221.026,00)	79,04	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.141.616,00	15.920.590,00	(4.221.026,00)	79,04	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.269.614,00	4.285.710,00	(983.904,00)	81,32	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.269.614,00	4.285.710,00	(983.904,00)	81,32	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.269.614,00	4.285.710,00	(983.904,00)	81,32	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	52.374.687,00	47.303.940,00	(5.070.747,00)	90,31	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	52.374.687,00	47.303.940,00	(5.070.747,00)	90,31	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.374.687,00	47.303.940,00	(5.070.747,00)	90,31	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	26.117.190,00	20.661.800,00	(5.455.390,00)	79,11	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	26.117.190,00	20.661.800,00	(5.455.390,00)	79,11	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.117.190,00	20.661.800,00	(5.455.390,00)	79,11	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.409.920,00	2.160.000,00	(1.249.920,00)	63,34	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.409.920,00	2.160.000,00	(1.249.920,00)	63,34	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.409.920,00	2.160.000,00	(1.249.920,00)	63,34	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	45.935.169,00	45.244.715,00	(690.454,00)	98,49	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	45.935.169,00	45.244.715,00	(690.454,00)	98,49	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.935.169,00	45.244.715,00	(690.454,00)	98,49	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	242.320.300,00	241.302.679,00	(1.017.621,00)	99,58	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.272.000,00	955.000,00	(317.000,00)	75,07	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.272.000,00	955.000,00	(317.000,00)	75,07	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.272.000,00	955.000,00	(317.000,00)	75,07	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	135.984.000,00	135.431.879,00	(552.121,00)	99,59	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	135.984.000,00	135.431.879,00	(552.121,00)	99,59	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.984.000,00	135.431.879,00	(552.121,00)	99,59	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	105.064.300,00	104.915.800,00	(148.500,00)	99,85	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	105.064.300,00	104.915.800,00	(148.500,00)	99,85	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.064.300,00	104.915.800,00	(148.500,00)	99,85	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	104.789.000,00	104.113.199,00	(675.801,00)	99,35	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	80.639.000,00	79.963.199,00	(675.801,00)	99,16	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	80.639.000,00	79.963.199,00	(675.801,00)	99,16	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.639.000,00	79.963.199,00	(675.801,00)	99,16	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	24.150.000,00	24.150.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	24.150.000,00	24.150.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.150.000,00	24.150.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	250.386.741,00	246.886.612,00	(3.500.129,00)	98,60	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.02.2.01		RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA	250.386.741,00	246.886.612,00	(3.500.129,00)	98,60	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0002		PENGENDALIAN PELAKSANAAN RPPLH KABUPATEN/KOTA	250.386.741,00	246.886.612,00	(3.500.129,00)	98,60	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	250.386.741,00	246.886.612,00	(3.500.129,00)	98,60	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.386.741,00	246.886.612,00	(3.500.129,00)	98,60	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	925.176.788,00	894.069.515,00	(31.107.273,00)	96,63	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.03.2.01		PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	829.613.081,00	801.463.764,00	(28.149.317,00)	96,60	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT	135.468.813,00	133.456.254,00	(2.012.559,00)	98,51	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	135.468.813,00	133.456.254,00	(2.012.559,00)	98,51	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.468.813,00	133.456.254,00	(2.012.559,00)	98,51	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM	32.738.740,00	31.327.284,00	(1.411.456,00)	95,68	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	32.738.740,00	31.327.284,00	(1.411.456,00)	95,68	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.738.740,00	31.327.284,00	(1.411.456,00)	95,68	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015		PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	661.405.528,00	636.680.226,00	(24.725.302,00)	96,26	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	642.405.528,00	617.921.226,00	(24.484.302,00)	96,18	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	642.405.528,00	617.921.226,00	(24.484.302,00)	96,18	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015	5.2	BELANJA MODAL	19.000.000,00	18.759.000,00	(241.000,00)	98,73	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.000.000,00	18.759.000,00	(241.000,00)	98,73	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.03.2.03		PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	95.563.707,00	92.605.751,00	(2.957.956,00)	96,90	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.03.2.03.0001		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGHENTIAN SUMBER PENCEMARAN	20.568.682,00	19.354.191,00	(1.214.491,00)	94,09	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.568.682,00	19.354.191,00	(1.214.491,00)	94,09	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.568.682,00	19.354.191,00	(1.214.491,00)	94,09	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.03.2.03.0013		KOORDINASI DAN SINKRONISASI REHABILITASI	74.995.025,00	73.251.560,00	(1.743.465,00)	97,67	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.03.2.03.0013	5.1	BELANJA OPERASI	74.995.025,00	73.251.560,00	(1.743.465,00)	97,67	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.03.2.03.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.995.025,00	73.251.560,00	(1.743.465,00)	97,67	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	145.130.878,00	131.244.759,00	(13.886.119,00)	90,43	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.04.2.01		PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	145.130.878,00	131.244.759,00	(13.886.119,00)	90,43	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0007		PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KEANEKARAGAMAN HAYATI	145.130.878,00	131.244.759,00	(13.886.119,00)	90,43	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	141.497.848,00	131.244.759,00	(10.253.089,00)	92,75	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.497.848,00	131.244.759,00	(10.253.089,00)	92,75	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	3.633.030,00	0,00	(3.633.030,00)	0,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.633.030,00	0,00	(3.633.030,00)	0,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	20.390.072,00	16.023.000,00	(4.367.072,00)	78,58	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.05.2.01		PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	20.390.072,00	16.023.000,00	(4.367.072,00)	78,58	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0002		VERIFIKASI LAPANGAN UNTUK MEMASTIKAN PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	20.390.072,00	16.023.000,00	(4.367.072,00)	78,58	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.390.072,00	16.023.000,00	(4.367.072,00)	78,58	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.390.072,00	16.023.000,00	(4.367.072,00)	78,58	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	63.059.047,00	57.633.516,00	(5.425.531,00)	91,39	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.06.2.01		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	63.059.047,00	57.633.516,00	(5.425.531,00)	91,39	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001		FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN DAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU IZIN PPLH	16.236.750,00	15.343.000,00	(893.750,00)	94,49	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.236.750,00	15.343.000,00	(893.750,00)	94,49	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.236.750,00	15.343.000,00	(893.750,00)	94,49	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0009		PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	46.822.297,00	42.290.516,00	(4.531.781,00)	90,32	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	46.822.297,00	42.290.516,00	(4.531.781,00)	90,32	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.822.297,00	42.290.516,00	(4.531.781,00)	90,32	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.07		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	22.340.323,00	21.372.882,00	(967.441,00)	95,66	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.07.2.02		PENINGKATAN KAPASITAS MHA DAN KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	22.340.323,00	21.372.882,00	(967.441,00)	95,66	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.07.2.02.0001		PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENDAMPINGAN, DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN MHA, KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL, DAN HAK MHA TERKAIT DENGAN PPLH	22.340.323,00	21.372.882,00	(967.441,00)	95,66	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.07.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	22.340.323,00	21.372.882,00	(967.441,00)	95,66	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.07.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.340.323,00	21.372.882,00	(967.441,00)	95,66	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	89.978.676,00	88.964.658,00	(1.014.018,00)	98,87	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.08.2.01		PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	89.978.676,00	88.964.658,00	(1.014.018,00)	98,87	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0002		PENDAMPINGAN GERAKAN PEDULI LINGKUNGAN HIDUP	89.978.676,00	88.964.658,00	(1.014.018,00)	98,87	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	89.978.676,00	88.964.658,00	(1.014.018,00)	98,87	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.978.676,00	88.964.658,00	(1.014.018,00)	98,87	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	9.054.795,00	8.795.390,00	(259.405,00)	97,13	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.10.2.01		PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA	9.054.795,00	8.795.390,00	(259.405,00)	97,13	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004		PENGELOLAAN PENGADUAN PERMASALAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KABUPATEN/KOTA	9.054.795,00	8.795.390,00	(259.405,00)	97,13	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.054.795,00	8.795.390,00	(259.405,00)	97,13	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.054.795,00	8.795.390,00	(259.405,00)	97,13	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	8.281.875.495,00	8.070.419.114,00	(211.456.381,00)	97,44	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.11.2.01		PENGELOLAAN SAMPAH	8.062.294.698,00	7.873.373.056,00	(188.921.642,00)	97,65	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0012		PENANGANAN SAMPAH MELALUI PENGANGKUTAN	6.516.441.321,00	6.335.365.906,00	(181.075.415,00)	97,22	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	6.176.174.961,00	6.029.089.156,00	(147.085.805,00)	97,61	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.176.174.961,00	6.029.089.156,00	(147.085.805,00)	97,61	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0012	5.2	BELANJA MODAL	340.266.360,00	306.276.750,00	(33.989.610,00)	90,01	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0012	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	340.266.360,00	306.276.750,00	(33.989.610,00)	90,01	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0020		PENANGANAN SAMPAH MELALUI PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST KABUPATEN/KOTA ATAU TPA/TPST REGIONAL	1.545.853.377,00	1.538.007.150,00	(7.846.227,00)	99,49	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	1.545.853.377,00	1.538.007.150,00	(7.846.227,00)	99,49	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.545.853.377,00	1.538.007.150,00	(7.846.227,00)	99,49	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.11.2.03		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN SAMPAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PIHAK SWASTA	219.580.797,00	197.046.058,00	(22.534.739,00)	89,73	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.11.2.03.0003		MONITORING DAN EVALUASI PEMENUHAN TARGET DAN STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH	219.580.797,00	197.046.058,00	(22.534.739,00)	89,73	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.11.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	219.580.797,00	197.046.058,00	(22.534.739,00)	89,73	
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.11.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.580.797,00	197.046.058,00	(22.534.739,00)	89,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	JUMLAH BELANJA	16.499.628.266,00	15.817.382.918,00	(682.245.348,00)	95,86	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(14.828.028.266,00)	(13.993.434.418,00)	834.593.848,00	94,37	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(14.828.028.266,00)	(13.993.434.418,00)	834.593.848,00	94,37	

PEMERINTAH KAB. BELITUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.11.3.28.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.671.600.000,00	1.823.948.500,00	152.348.500,00	109,11	
	2.11.3.28.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.671.600.000,00	1.823.948.500,00	152.348.500,00	109,11	
	2.11.3.28.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.671.600.000,00	1.823.948.500,00	152.348.500,00	109,11	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.671.600.000,00	1.823.948.500,00	152.348.500,00	109,11	
3.28	2.11.3.28.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	22.829.668,00	19.097.971,00	(3.731.697,00)	83,65	
3.28	2.11.3.28.0.00.01.0000	3.28.04		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	22.829.668,00	19.097.971,00	(3.731.697,00)	83,65	
3.28	2.11.3.28.0.00.01.0000	3.28.04.2.01		PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) KABUPATEN/KOTA	22.829.668,00	19.097.971,00	(3.731.697,00)	83,65	
3.28	2.11.3.28.0.00.01.0000	3.28.04.2.01.0006		PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN TAHURA KABUPATEN/KOTA	22.829.668,00	19.097.971,00	(3.731.697,00)	83,65	
3.28	2.11.3.28.0.00.01.0000	3.28.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	22.829.668,00	19.097.971,00	(3.731.697,00)	83,65	
3.28	2.11.3.28.0.00.01.0000	3.28.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.829.668,00	19.097.971,00	(3.731.697,00)	83,65	
				JUMLAH BELANJA	22.829.668,00	19.097.971,00	(3.731.697,00)	83,65	
				SURPLUS / (DEFISIT)	1.648.770.332,00	1.804.850.529,00	156.080.197,00	109,46	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	1.648.770.332,00	1.804.850.529,00	156.080.197,00	109,46	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.518.829.571,00	4.999.349.540,00	(519.480.031,00)	90,58	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.100.884.579,00	4.646.609.866,00	(454.274.713,00)	91,09	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.459.534,00	6.149.000,00	(310.534,00)	95,19	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	1.588.410,00	1.365.000,00	(223.410,00)	85,93	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.588.410,00	1.365.000,00	(223.410,00)	85,93	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.588.410,00	1.365.000,00	(223.410,00)	85,93	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.058.940,00	1.040.000,00	(18.940,00)	98,21	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.058.940,00	1.040.000,00	(18.940,00)	98,21	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.058.940,00	1.040.000,00	(18.940,00)	98,21	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.812.184,00	3.744.000,00	(68.184,00)	98,21	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.812.184,00	3.744.000,00	(68.184,00)	98,21	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.812.184,00	3.744.000,00	(68.184,00)	98,21	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.830.375.950,00	3.514.647.525,00	(315.728.425,00)	91,75	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.828.258.070,00	3.512.827.525,00	(315.430.545,00)	91,76	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.828.258.070,00	3.512.827.525,00	(315.430.545,00)	91,76	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.828.258.070,00	3.512.827.525,00	(315.430.545,00)	91,76	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.058.940,00	910.000,00	(148.940,00)	85,93	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.058.940,00	910.000,00	(148.940,00)	85,93	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.058.940,00	910.000,00	(148.940,00)	85,93	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	1.058.940,00	910.000,00	(148.940,00)	85,93	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.058.940,00	910.000,00	(148.940,00)	85,93	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.058.940,00	910.000,00	(148.940,00)	85,93	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	75.000.000,00	70.579.680,00	(4.420.320,00)	94,10	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	75.000.000,00	70.579.680,00	(4.420.320,00)	94,10	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	70.579.680,00	(4.420.320,00)	94,10	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	70.579.680,00	(4.420.320,00)	94,10	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	336.224.095,00	315.905.312,00	(20.318.783,00)	93,95	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	7.988.670,00	6.930.000,00	(1.058.670,00)	86,74	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.988.670,00	6.930.000,00	(1.058.670,00)	86,74	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.988.670,00	6.930.000,00	(1.058.670,00)	86,74	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	51.851.730,00	43.192.820,00	(8.658.910,00)	83,30	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	51.851.730,00	43.192.820,00	(8.658.910,00)	83,30	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.851.730,00	43.192.820,00	(8.658.910,00)	83,30	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	6.966.360,00	5.488.395,00	(1.477.965,00)	78,78	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.966.360,00	5.488.395,00	(1.477.965,00)	78,78	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.966.360,00	5.488.395,00	(1.477.965,00)	78,78	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	89.926.920,00	89.196.530,00	(730.390,00)	99,18	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	89.926.920,00	89.196.530,00	(730.390,00)	99,18	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.926.920,00	89.196.530,00	(730.390,00)	99,18	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	24.699.400,00	18.572.500,00	(6.126.900,00)	75,19	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	24.699.400,00	18.572.500,00	(6.126.900,00)	75,19	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.699.400,00	18.572.500,00	(6.126.900,00)	75,19	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.997.440,00	6.940.000,00	(57.440,00)	99,17	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.997.440,00	6.940.000,00	(57.440,00)	99,17	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.997.440,00	6.940.000,00	(57.440,00)	99,17	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	147.793.575,00	145.585.067,00	(2.208.508,00)	98,50	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	147.793.575,00	145.585.067,00	(2.208.508,00)	98,50	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.793.575,00	145.585.067,00	(2.208.508,00)	98,50	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	54.853.600,00	27.802.800,00	(27.050.800,00)	50,68	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	14.065.920,00	13.852.800,00	(213.120,00)	98,48	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.187.140,00	6.127.200,00	(59.940,00)	99,03	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.187.140,00	6.127.200,00	(59.940,00)	99,03	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	7.878.780,00	7.725.600,00	(153.180,00)	98,05	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.878.780,00	7.725.600,00	(153.180,00)	98,05	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	40.787.680,00	13.950.000,00	(26.837.680,00)	34,20	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	40.787.680,00	13.950.000,00	(26.837.680,00)	34,20	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.787.680,00	13.950.000,00	(26.837.680,00)	34,20	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	588.226.400,00	513.011.596,00	(75.214.804,00)	87,21	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.088.000,00	1.754.500,00	(3.333.500,00)	34,48	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.088.000,00	1.754.500,00	(3.333.500,00)	34,48	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.088.000,00	1.754.500,00	(3.333.500,00)	34,48	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	185.000.000,00	171.447.846,00	(13.552.154,00)	92,67	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	185.000.000,00	171.447.846,00	(13.552.154,00)	92,67	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.000.000,00	171.447.846,00	(13.552.154,00)	92,67	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	398.138.400,00	339.809.250,00	(58.329.150,00)	85,34	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	398.138.400,00	339.809.250,00	(58.329.150,00)	85,34	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	398.138.400,00	339.809.250,00	(58.329.150,00)	85,34	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	209.745.000,00	198.513.953,00	(11.231.047,00)	94,64	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	28.738.000,00	28.237.500,00	(500.500,00)	98,25	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	28.738.000,00	28.237.500,00	(500.500,00)	98,25	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.738.000,00	28.237.500,00	(500.500,00)	98,25	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	37.627.000,00	33.005.100,00	(4.621.900,00)	87,71	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	37.627.000,00	33.005.100,00	(4.621.900,00)	87,71	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.627.000,00	33.005.100,00	(4.621.900,00)	87,71	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN MEBEL	6.833.000,00	6.660.000,00	(173.000,00)	97,46	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.833.000,00	6.660.000,00	(173.000,00)	97,46	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.833.000,00	6.660.000,00	(173.000,00)	97,46	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	74.420.000,00	68.559.353,00	(5.860.647,00)	92,12	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	74.420.000,00	68.559.353,00	(5.860.647,00)	92,12	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.420.000,00	68.559.353,00	(5.860.647,00)	92,12	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	62.127.000,00	62.052.000,00	(75.000,00)	99,87	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	62.127.000,00	62.052.000,00	(75.000,00)	99,87	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.127.000,00	62.052.000,00	(75.000,00)	99,87	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	359.220.644,00	298.263.654,00	(60.956.990,00)	83,03	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01		PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	359.220.644,00	298.263.654,00	(60.956.990,00)	83,03	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002		PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK	311.768.729,00	255.797.119,00	(55.971.610,00)	82,04	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	311.768.729,00	255.797.119,00	(55.971.610,00)	82,04	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	311.768.729,00	255.797.119,00	(55.971.610,00)	82,04	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004		PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	47.451.915,00	42.466.535,00	(4.985.380,00)	89,49	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	47.451.915,00	42.466.535,00	(4.985.380,00)	89,49	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.451.915,00	42.466.535,00	(4.985.380,00)	89,49	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	21.588.410,00	18.788.410,00	(2.800.000,00)	87,03	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01		PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	21.588.410,00	18.788.410,00	(2.800.000,00)	87,03	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001		PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING	20.000.000,00	17.200.000,00	(2.800.000,00)	86,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	17.200.000,00	(2.800.000,00)	86,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	17.200.000,00	(2.800.000,00)	86,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002		PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	1.588.410,00	1.588.410,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.588.410,00	1.588.410,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.588.410,00	1.588.410,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	3.471.858,00	2.831.610,00	(640.248,00)	81,55	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03		PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.993.338,00	1.499.610,00	(493.728,00)	75,23	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0004		PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	1.993.338,00	1.499.610,00	(493.728,00)	75,23	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.993.338,00	1.499.610,00	(493.728,00)	75,23	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.993.338,00	1.499.610,00	(493.728,00)	75,23	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.478.520,00	1.332.000,00	(146.520,00)	90,09	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04.0001		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.478.520,00	1.332.000,00	(146.520,00)	90,09	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.478.520,00	1.332.000,00	(146.520,00)	90,09	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.478.520,00	1.332.000,00	(146.520,00)	90,09	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	33.664.080,00	32.856.000,00	(808.080,00)	97,59	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01		PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	33.664.080,00	32.856.000,00	(808.080,00)	97,59	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002		PENYUSUNAN PROFIL DATA PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI KEPENDUDUKAN SERTA KEBUTUHAN YANG LAIN	33.664.080,00	32.856.000,00	(808.080,00)	97,59	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	33.664.080,00	32.856.000,00	(808.080,00)	97,59	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.664.080,00	32.856.000,00	(808.080,00)	97,59	
				JUMLAH BELANJA	5.518.829.571,00	4.999.349.540,00	(519.480.031,00)	90,58	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.518.829.571,00)	(4.999.349.540,00)	519.480.031,00	90,58	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.518.829.571,00)	(4.999.349.540,00)	519.480.031,00	90,58	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	7.949.075.660,00	6.740.369.358,00	(1.208.706.302,00)	84,79	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.232.832.796,00	5.310.290.372,00	(922.542.424,00)	85,19	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.844.492,00	4.843.900,00	(592,00)	99,98	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	495.100,00	495.100,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	495.100,00	495.100,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	495.100,00	495.100,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	495.100,00	495.100,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	495.100,00	495.100,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	495.100,00	495.100,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	495.100,00	495.100,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	495.100,00	495.100,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	495.100,00	495.100,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	495.100,00	495.100,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	495.100,00	495.100,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	495.100,00	495.100,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	444.100,00	444.100,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	444.100,00	444.100,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.100,00	444.100,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.419.992,00	2.419.400,00	(592,00)	99,97	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.419.992,00	2.419.400,00	(592,00)	99,97	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.419.992,00	2.419.400,00	(592,00)	99,97	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.186.732.590,00	4.332.921.534,00	(853.811.056,00)	83,53	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.184.238.716,00	4.330.520.234,00	(853.718.482,00)	83,53	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.184.238.716,00	4.330.520.234,00	(853.718.482,00)	83,53	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.184.238.716,00	4.330.520.234,00	(853.718.482,00)	83,53	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	2.493.874,00	2.401.300,00	(92.574,00)	96,28	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.493.874,00	2.401.300,00	(92.574,00)	96,28	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.493.874,00	2.401.300,00	(92.574,00)	96,28	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	54.000.000,00	21.243.040,00	(32.756.960,00)	39,33	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	54.000.000,00	21.243.040,00	(32.756.960,00)	39,33	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	54.000.000,00	21.243.040,00	(32.756.960,00)	39,33	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	21.243.040,00	(32.756.960,00)	39,33	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	305.995.154,00	298.210.071,00	(7.785.083,00)	97,45	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	7.735.550,00	7.400.000,00	(335.550,00)	95,66	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.735.550,00	7.400.000,00	(335.550,00)	95,66	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.735.550,00	7.400.000,00	(335.550,00)	95,66	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	64.731.660,00	64.596.000,00	(135.660,00)	99,79	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	64.731.660,00	64.596.000,00	(135.660,00)	99,79	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.731.660,00	64.596.000,00	(135.660,00)	99,79	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	8.405.106,00	4.568.000,00	(3.837.106,00)	54,34	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.405.106,00	4.568.000,00	(3.837.106,00)	54,34	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.405.106,00	4.568.000,00	(3.837.106,00)	54,34	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	104.425.800,00	101.559.410,00	(2.866.390,00)	97,25	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	104.425.800,00	101.559.410,00	(2.866.390,00)	97,25	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.425.800,00	101.559.410,00	(2.866.390,00)	97,25	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	54.907.038,00	54.906.800,00	(238,00)	99,99	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	54.907.038,00	54.906.800,00	(238,00)	99,99	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.907.038,00	54.906.800,00	(238,00)	99,99	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.890.000,00	2.280.000,00	(610.000,00)	78,89	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.890.000,00	2.280.000,00	(610.000,00)	78,89	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.890.000,00	2.280.000,00	(610.000,00)	78,89	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	62.900.000,00	62.899.861,00	(139,00)	99,99	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	62.900.000,00	62.899.861,00	(139,00)	99,99	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.900.000,00	62.899.861,00	(139,00)	99,99	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	49.955.000,00	48.406.500,00	(1.548.500,00)	96,90	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	49.955.000,00	48.406.500,00	(1.548.500,00)	96,90	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	49.955.000,00	48.406.500,00	(1.548.500,00)	96,90	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.955.000,00	48.406.500,00	(1.548.500,00)	96,90	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	237.702.400,00	223.539.243,00	(14.163.157,00)	94,04	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	932.400,00	830.700,00	(101.700,00)	89,09	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	932.400,00	830.700,00	(101.700,00)	89,09	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	932.400,00	830.700,00	(101.700,00)	89,09	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	70.879.000,00	56.817.543,00	(14.061.457,00)	80,16	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	70.879.000,00	56.817.543,00	(14.061.457,00)	80,16	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.879.000,00	56.817.543,00	(14.061.457,00)	80,16	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	165.891.000,00	165.891.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	165.891.000,00	165.891.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.891.000,00	165.891.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	393.603.160,00	381.126.084,00	(12.477.076,00)	96,83	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS	157.193.000,00	149.149.150,00	(8.043.850,00)	94,88	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	157.193.000,00	149.149.150,00	(8.043.850,00)	94,88	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.193.000,00	149.149.150,00	(8.043.850,00)	94,88	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	40.352.940,00	40.183.000,00	(169.940,00)	99,57	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	40.352.940,00	40.183.000,00	(169.940,00)	99,57	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.352.940,00	40.183.000,00	(169.940,00)	99,57	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	196.057.220,00	191.793.934,00	(4.263.286,00)	97,82	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	196.057.220,00	191.793.934,00	(4.263.286,00)	97,82	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.057.220,00	191.793.934,00	(4.263.286,00)	97,82	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.313.257.663,00	1.038.077.872,00	(275.179.791,00)	79,04	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.313.257.663,00	1.038.077.872,00	(275.179.791,00)	79,04	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0001		FASILITASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.146.167.672,00	888.339.620,00	(257.828.052,00)	77,50	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.146.167.672,00	888.339.620,00	(257.828.052,00)	77,50	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.146.167.672,00	888.339.620,00	(257.828.052,00)	77,50	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0002		FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA	36.409.991,00	29.338.296,00	(7.071.695,00)	80,57	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	36.409.991,00	29.338.296,00	(7.071.695,00)	80,57	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.409.991,00	29.338.296,00	(7.071.695,00)	80,57	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0008		PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BUM DESA DAN LEMBAGA KERJA SAMA ANTAR DESA	61.805.000,00	54.373.764,00	(7.431.236,00)	87,97	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	61.805.000,00	54.373.764,00	(7.431.236,00)	87,97	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.805.000,00	54.373.764,00	(7.431.236,00)	87,97	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0018		FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN	68.875.000,00	66.026.192,00	(2.848.808,00)	95,86	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	68.875.000,00	66.026.192,00	(2.848.808,00)	95,86	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.875.000,00	66.026.192,00	(2.848.808,00)	95,86	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	402.985.201,00	392.001.114,00	(10.984.087,00)	97,27	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.05.2.01		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA	402.985.201,00	392.001.114,00	(10.984.087,00)	97,27	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0002		FASILITASI PENATAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	119.475.021,00	112.213.400,00	(7.261.621,00)	93,92	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	119.475.021,00	112.213.400,00	(7.261.621,00)	93,92	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.475.021,00	112.213.400,00	(7.261.621,00)	93,92	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003		PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK,	39.942.400,00	37.716.000,00	(2.226.400,00)	94,42	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	39.942.400,00	37.716.000,00	(2.226.400,00)	94,42	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.942.400,00	37.716.000,00	(2.226.400,00)	94,42	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0009		FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN	243.567.780,00	242.071.714,00	(1.496.066,00)	99,38	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	243.567.780,00	242.071.714,00	(1.496.066,00)	99,38	
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.567.780,00	242.071.714,00	(1.496.066,00)	99,38	
				JUMLAH BELANJA	7.949.075.660,00	6.740.369.358,00	(1.208.706.302,00)	84,79	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(7.949.075.660,00)	(6.740.369.358,00)	1.208.706.302,00	84,79	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.949.075.660,00)	(6.740.369.358,00)	1.208.706.302,00	84,79	

PEMERINTAH KAB. BELITUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.336.544.280,00	3.678.843.623,00	(657.700.657,00)	84,83	
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	63.967.000,00	63.683.271,00	(283.729,00)	99,55	
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.01		PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK	63.967.000,00	63.683.271,00	(283.729,00)	99,55	
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.01.0019		IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN JALUR PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL	63.967.000,00	63.683.271,00	(283.729,00)	99,55	
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.01.0019	5.1	BELANJA OPERASI	63.967.000,00	63.683.271,00	(283.729,00)	99,55	
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.01.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.967.000,00	63.683.271,00	(283.729,00)	99,55	
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.637.860.000,00	1.387.237.570,00	(250.622.430,00)	84,69	
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01		PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	1.283.126.000,00	1.039.009.820,00	(244.116.180,00)	80,97	
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0010		PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN BANGGA KENCANA	1.283.126.000,00	1.039.009.820,00	(244.116.180,00)	80,97	
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	64.156.300,00	63.716.220,00	(440.080,00)	99,31	
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.156.300,00	63.716.220,00	(440.080,00)	99,31	
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	1.218.969.700,00	975.293.600,00	(243.676.100,00)	80,00	
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	93.018.000,00	(6.982.000,00)	93,01	
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.118.969.700,00	882.275.600,00	(236.694.100,00)	78,84	
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02		PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)	307.841.600,00	301.754.500,00	(6.087.100,00)	98,02	
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0004		PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP)	275.368.600,00	270.554.500,00	(4.814.100,00)	98,25	
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	275.368.600,00	270.554.500,00	(4.814.100,00)	98,25	
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.368.600,00	270.554.500,00	(4.814.100,00)	98,25	
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0006		FASILITASI PELAKSANAAN PENYULUHAN, PENGGERAKAN, PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM BANGGA KENCANA UNTUK PETUGAS KELUARGA BERENCANA/PENYULUH LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PKB/PLKB)	32.473.000,00	31.200.000,00	(1.273.000,00)	96,07	
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	32.473.000,00	31.200.000,00	(1.273.000,00)	96,07	
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.473.000,00	31.200.000,00	(1.273.000,00)	96,07	
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03		PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.892.400,00	46.473.250,00	(419.150,00)	99,10	
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0003		PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)	46.892.400,00	46.473.250,00	(419.150,00)	99,10	
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	46.892.400,00	46.473.250,00	(419.150,00)	99,10	
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.892.400,00	46.473.250,00	(419.150,00)	99,10	
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.634.717.280,00	2.227.922.782,00	(406.794.498,00)	84,56	
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01		PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	133.717.280,00	127.850.500,00	(5.866.780,00)	95,61	
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0019		ORIENTASI/PELATIHAN TEKNIS PELAKSANA/KADER KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)	9.205.000,00	8.561.000,00	(644.000,00)	93,00	
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0019	5.1	BELANJA OPERASI	9.205.000,00	8.561.000,00	(644.000,00)	93,00	
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.205.000,00	8.561.000,00	(644.000,00)	93,00	
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0021		ORIENTASI DAN PELATIHAN TEKNIS PENGELOLA KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)	124.512.280,00	119.289.500,00	(5.222.780,00)	95,80	
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	124.512.280,00	119.289.500,00	(5.222.780,00)	95,80	
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.512.280,00	119.289.500,00	(5.222.780,00)	95,80	
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.02		PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	2.501.000.000,00	2.100.072.282,00	(400.927.718,00)	83,96	
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.02.0002		PENDAYAGUNAAN MITRA KERJA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENGGERAKAN OPERASIONAL PEMBINAAN PROGRAM KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA/UPPKS)	2.501.000.000,00	2.100.072.282,00	(400.927.718,00)	83,96	
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.501.000.000,00	2.100.072.282,00	(400.927.718,00)	83,96	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.501.000.000,00	2.100.072.282,00	(400.927.718,00)	83,96	
				JUMLAH BELANJA	4.336.544.280,00	3.678.843.623,00	(657.700.657,00)	84,83	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(4.336.544.280,00)	(3.678.843.623,00)	657.700.657,00	84,83	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.336.544.280,00)	(3.678.843.623,00)	657.700.657,00	84,83	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : Dinas Perhubungan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	426.899.400,00	765.422.250,00	338.522.850,00	179,29	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	426.899.400,00	765.422.250,00	338.522.850,00	179,29	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	425.737.200,00	762.453.350,00	336.716.150,00	179,09	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.162.200,00	2.968.900,00	1.806.700,00	255,45	
				JUMLAH PENDAPATAN	426.899.400,00	765.422.250,00	338.522.850,00	179,29	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	25.441.754.047,00	23.136.306.304,00	(2.305.447.743,00)	90,93	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.519.655.908,00	6.939.205.881,00	(1.580.450.027,00)	81,44	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	8.365.626,00	7.441.200,00	(924.426,00)	88,94	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	847.152,00	763.200,00	(83.952,00)	90,09	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	847.152,00	763.200,00	(83.952,00)	90,09	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	847.152,00	763.200,00	(83.952,00)	90,09	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1.058.940,00	954.000,00	(104.940,00)	90,09	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.058.940,00	954.000,00	(104.940,00)	90,09	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.058.940,00	954.000,00	(104.940,00)	90,09	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1.058.940,00	954.000,00	(104.940,00)	90,09	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.058.940,00	954.000,00	(104.940,00)	90,09	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.058.940,00	954.000,00	(104.940,00)	90,09	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.058.940,00	954.000,00	(104.940,00)	90,09	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.058.940,00	954.000,00	(104.940,00)	90,09	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.058.940,00	954.000,00	(104.940,00)	90,09	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	1.058.940,00	954.000,00	(104.940,00)	90,09	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.058.940,00	954.000,00	(104.940,00)	90,09	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.058.940,00	954.000,00	(104.940,00)	90,09	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.282.714,00	2.862.000,00	(420.714,00)	87,18	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.282.714,00	2.862.000,00	(420.714,00)	87,18	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.282.714,00	2.862.000,00	(420.714,00)	87,18	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.510.312.271,00	5.287.440.068,00	(1.222.872.203,00)	81,21	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.507.241.345,00	5.284.816.568,00	(1.222.424.777,00)	81,21	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.507.241.345,00	5.284.816.568,00	(1.222.424.777,00)	81,21	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.507.241.345,00	5.284.816.568,00	(1.222.424.777,00)	81,21	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.853.145,00	1.669.500,00	(183.645,00)	90,09	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.853.145,00	1.669.500,00	(183.645,00)	90,09	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.853.145,00	1.669.500,00	(183.645,00)	90,09	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	1.217.781,00	954.000,00	(263.781,00)	78,33	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.217.781,00	954.000,00	(263.781,00)	78,33	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.217.781,00	954.000,00	(263.781,00)	78,33	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.04		ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	4.023.972,00	3.625.200,00	(398.772,00)	90,09	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.04.0004		PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH	2.965.032,00	2.671.200,00	(293.832,00)	90,09	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.965.032,00	2.671.200,00	(293.832,00)	90,09	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.965.032,00	2.671.200,00	(293.832,00)	90,09	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.04.0007		PELAPORAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH	1.058.940,00	954.000,00	(104.940,00)	90,09	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.058.940,00	954.000,00	(104.940,00)	90,09	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.058.940,00	954.000,00	(104.940,00)	90,09	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	44.958.362,00	5.926.800,00	(39.031.562,00)	13,18	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0005		MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	4.257.627,00	1.394.800,00	(2.862.827,00)	32,76	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.257.627,00	1.394.800,00	(2.862.827,00)	32,76	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.257.627,00	1.394.800,00	(2.862.827,00)	32,76	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	40.700.735,00	4.532.000,00	(36.168.735,00)	11,13	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	40.700.735,00	4.532.000,00	(36.168.735,00)	11,13	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.700.735,00	4.532.000,00	(36.168.735,00)	11,13	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	608.516.797,00	486.373.194,00	(122.143.603,00)	79,92	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	15.778.983,00	14.353.200,00	(1.425.783,00)	90,96	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.778.983,00	14.353.200,00	(1.425.783,00)	90,96	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.778.983,00	14.353.200,00	(1.425.783,00)	90,96	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	87.358.998,00	74.725.600,00	(12.633.398,00)	85,53	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	87.358.998,00	74.725.600,00	(12.633.398,00)	85,53	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.358.998,00	74.725.600,00	(12.633.398,00)	85,53	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	46.549.959,00	37.981.000,00	(8.568.959,00)	81,59	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	46.549.959,00	37.981.000,00	(8.568.959,00)	81,59	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.549.959,00	37.981.000,00	(8.568.959,00)	81,59	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	244.594.827,00	155.161.000,00	(89.433.827,00)	63,43	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	244.594.827,00	155.161.000,00	(89.433.827,00)	63,43	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.594.827,00	155.161.000,00	(89.433.827,00)	63,43	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	39.205.755,00	33.336.200,00	(5.869.555,00)	85,02	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	39.205.755,00	33.336.200,00	(5.869.555,00)	85,02	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.205.755,00	33.336.200,00	(5.869.555,00)	85,02	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	10.034.400,00	8.100.000,00	(1.934.400,00)	80,72	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.034.400,00	8.100.000,00	(1.934.400,00)	80,72	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.034.400,00	8.100.000,00	(1.934.400,00)	80,72	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	164.993.875,00	162.716.194,00	(2.277.681,00)	98,61	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	164.993.875,00	162.716.194,00	(2.277.681,00)	98,61	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.993.875,00	162.716.194,00	(2.277.681,00)	98,61	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.833.940,00	3.833.940,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	3.833.940,00	3.833.940,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	3.833.940,00	3.833.940,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.833.940,00	3.833.940,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	805.340.620,00	640.875.979,00	(164.464.641,00)	79,57	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.577.420,00	1.994.000,00	(583.420,00)	77,36	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.577.420,00	1.994.000,00	(583.420,00)	77,36	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.577.420,00	1.994.000,00	(583.420,00)	77,36	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	271.912.000,00	166.092.629,00	(105.819.371,00)	61,08	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	271.912.000,00	166.092.629,00	(105.819.371,00)	61,08	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.912.000,00	166.092.629,00	(105.819.371,00)	61,08	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	530.851.200,00	472.789.350,00	(58.061.850,00)	89,06	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	530.851.200,00	472.789.350,00	(58.061.850,00)	89,06	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	530.851.200,00	472.789.350,00	(58.061.850,00)	89,06	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	534.304.320,00	503.689.500,00	(30.614.820,00)	94,27	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	76.713.560,00	61.502.700,00	(15.210.860,00)	80,17	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	76.713.560,00	61.502.700,00	(15.210.860,00)	80,17	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.713.560,00	61.502.700,00	(15.210.860,00)	80,17	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	143.948.560,00	139.736.800,00	(4.211.760,00)	97,07	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	143.948.560,00	139.736.800,00	(4.211.760,00)	97,07	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.948.560,00	139.736.800,00	(4.211.760,00)	97,07	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	49.716.900,00	39.515.000,00	(10.201.900,00)	79,48	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	49.716.900,00	39.515.000,00	(10.201.900,00)	79,48	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.716.900,00	39.515.000,00	(10.201.900,00)	79,48	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	170.085.300,00	169.255.000,00	(830.300,00)	99,51	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	170.085.300,00	169.255.000,00	(830.300,00)	99,51	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.085.300,00	169.255.000,00	(830.300,00)	99,51	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	93.840.000,00	93.680.000,00	(160.000,00)	99,82	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	93.840.000,00	93.680.000,00	(160.000,00)	99,82	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.840.000,00	93.680.000,00	(160.000,00)	99,82	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	15.510.234.939,00	14.899.661.515,00	(610.573.424,00)	96,06	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02		PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	13.587.895.980,00	13.034.932.407,00	(552.963.573,00)	95,93	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002		PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	4.570.921.180,00	4.289.790.483,00	(281.130.697,00)	93,84	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.513.532.000,00	2.303.077.104,00	(210.454.896,00)	91,62	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.513.532.000,00	2.303.077.104,00	(210.454.896,00)	91,62	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	2.057.389.180,00	1.986.713.379,00	(70.675.801,00)	96,56	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.057.389.180,00	1.986.713.379,00	(70.675.801,00)	96,56	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0003		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN	54.600.000,00	54.500.000,00	(100.000,00)	99,81	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	54.600.000,00	54.500.000,00	(100.000,00)	99,81	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.600.000,00	54.500.000,00	(100.000,00)	99,81	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN	8.962.374.800,00	8.690.641.924,00	(271.732.876,00)	96,96	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.837.119.800,00	7.720.113.424,00	(117.006.376,00)	98,50	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.837.119.800,00	7.720.113.424,00	(117.006.376,00)	98,50	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	5.2	BELANJA MODAL	1.125.255.000,00	970.528.500,00	(154.726.500,00)	86,24	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.125.255.000,00	970.528.500,00	(154.726.500,00)	86,24	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03		PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C	50.000.000,00	49.955.300,00	(44.700,00)	99,91	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03.0011		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN TERMINAL TIPE C (FASILITAS UTAMA DAN PENUNJANG)	50.000.000,00	49.955.300,00	(44.700,00)	99,91	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03.0011	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.955.300,00	(44.700,00)	99,91	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.955.300,00	(44.700,00)	99,91	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.04		PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR	22.380.552,00	19.552.800,00	(2.827.752,00)	87,36	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.04.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	22.380.552,00	19.552.800,00	(2.827.752,00)	87,36	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	22.380.552,00	19.552.800,00	(2.827.752,00)	87,36	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.380.552,00	19.552.800,00	(2.827.752,00)	87,36	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05		PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	205.983.660,00	200.422.498,00	(5.561.162,00)	97,30	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0004		PENYEDIAAN BUKTI LULUS UJI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	7.281.600,00	5.000.000,00	(2.281.600,00)	68,66	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.281.600,00	5.000.000,00	(2.281.600,00)	68,66	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.281.600,00	5.000.000,00	(2.281.600,00)	68,66	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0007		PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	184.447.360,00	181.812.498,00	(2.634.862,00)	98,57	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0007	5.1	BELANJA OPERASI	184.447.360,00	181.812.498,00	(2.634.862,00)	98,57	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.447.360,00	181.812.498,00	(2.634.862,00)	98,57	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0010		MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	14.254.700,00	13.610.000,00	(644.700,00)	95,47	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	14.254.700,00	13.610.000,00	(644.700,00)	95,47	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.254.700,00	13.610.000,00	(644.700,00)	95,47	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06		PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	450.765.347,00	414.848.240,00	(35.917.107,00)	92,03	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0004		PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA	11.412.050,00	9.535.000,00	(1.877.050,00)	83,55	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	11.412.050,00	9.535.000,00	(1.877.050,00)	83,55	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.412.050,00	9.535.000,00	(1.877.050,00)	83,55	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0014		SOSIALISASI PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	79.319.240,00	75.202.000,00	(4.117.240,00)	94,80	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0014	5.1	BELANJA OPERASI	79.319.240,00	75.202.000,00	(4.117.240,00)	94,80	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.319.240,00	75.202.000,00	(4.117.240,00)	94,80	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0015		FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	360.034.057,00	330.111.240,00	(29.922.817,00)	91,68	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0015	5.1	BELANJA OPERASI	360.034.057,00	330.111.240,00	(29.922.817,00)	91,68	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.034.057,00	330.111.240,00	(29.922.817,00)	91,68	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09		PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.193.209.400,00	1.179.950.270,00	(13.259.130,00)	98,88	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0002		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	95.447.000,00	92.206.770,00	(3.240.230,00)	96,60	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	95.447.000,00	92.206.770,00	(3.240.230,00)	96,60	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.447.000,00	92.206.770,00	(3.240.230,00)	96,60	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0003		PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.097.762.400,00	1.087.743.500,00	(10.018.900,00)	99,08	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.097.762.400,00	1.087.743.500,00	(10.018.900,00)	99,08	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.097.762.400,00	1.087.743.500,00	(10.018.900,00)	99,08	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.411.863.200,00	1.297.438.908,00	(114.424.292,00)	91,89	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12		PEMBANGUNAN, PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL	1.411.863.200,00	1.297.438.908,00	(114.424.292,00)	91,89	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12.0001		FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL	200.000.000,00	99.820.000,00	(100.180.000,00)	49,91	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12.0001	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	99.820.000,00	(100.180.000,00)	49,91	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	99.820.000,00	(100.180.000,00)	49,91	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12.0003		PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL	1.150.882.400,00	1.143.121.908,00	(7.760.492,00)	99,32	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12.0003	5.1	BELANJA OPERASI	600.882.400,00	594.270.100,00	(6.612.300,00)	98,89	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.882.400,00	594.270.100,00	(6.612.300,00)	98,89	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12.0003	5.2	BELANJA MODAL	550.000.000,00	548.851.808,00	(1.148.192,00)	99,79	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12.0003	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	550.000.000,00	548.851.808,00	(1.148.192,00)	99,79	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12.0004		PENGAWASAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL	60.980.800,00	54.497.000,00	(6.483.800,00)	89,36	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12.0004	5.1	BELANJA OPERASI	60.980.800,00	54.497.000,00	(6.483.800,00)	89,36	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.980.800,00	54.497.000,00	(6.483.800,00)	89,36	
				JUMLAH BELANJA	25.441.754.047,00	23.136.306.304,00	(2.305.447.743,00)	90,93	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(25.014.854.647,00)	(22.370.884.054,00)	2.643.970.593,00	89,43	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(25.014.854.647,00)	(22.370.884.054,00)	2.643.970.593,00	89,43	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		5	BELANJA DAERAH	8.926.852.860,00	7.821.270.461,00	(1.105.582.399,00)	87,61	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.257.857.026,00	5.258.873.881,00	(998.983.145,00)	84,03	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.747.560,00	4.615.000,00	(1.132.560,00)	80,29	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	1.114.780,00	841.000,00	(273.780,00)	75,44	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.114.780,00	841.000,00	(273.780,00)	75,44	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.114.780,00	841.000,00	(273.780,00)	75,44	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	865.600,00	724.000,00	(141.600,00)	83,64	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	865.600,00	724.000,00	(141.600,00)	83,64	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	865.600,00	724.000,00	(141.600,00)	83,64	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	865.600,00	724.000,00	(141.600,00)	83,64	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	865.600,00	724.000,00	(141.600,00)	83,64	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	865.600,00	724.000,00	(141.600,00)	83,64	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	865.600,00	724.000,00	(141.600,00)	83,64	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	865.600,00	724.000,00	(141.600,00)	83,64	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	865.600,00	724.000,00	(141.600,00)	83,64	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	865.600,00	691.500,00	(174.100,00)	79,88	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	865.600,00	691.500,00	(174.100,00)	79,88	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	865.600,00	691.500,00	(174.100,00)	79,88	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.170.380,00	910.500,00	(259.880,00)	77,79	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.170.380,00	910.500,00	(259.880,00)	77,79	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.170.380,00	910.500,00	(259.880,00)	77,79	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.388.932.890,00	4.594.885.810,00	(794.047.080,00)	85,26	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.386.612.840,00	4.593.365.810,00	(793.247.030,00)	85,27	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.386.612.840,00	4.593.365.810,00	(793.247.030,00)	85,27	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.386.612.840,00	4.593.365.810,00	(793.247.030,00)	85,27	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.160.250,00	960.000,00	(200.250,00)	82,74	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.160.250,00	960.000,00	(200.250,00)	82,74	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.160.250,00	960.000,00	(200.250,00)	82,74	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	1.159.800,00	560.000,00	(599.800,00)	48,28	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.159.800,00	560.000,00	(599.800,00)	48,28	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.159.800,00	560.000,00	(599.800,00)	48,28	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	68.000.000,00	61.288.937,00	(6.711.063,00)	90,13	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	68.000.000,00	61.288.937,00	(6.711.063,00)	90,13	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	68.000.000,00	61.288.937,00	(6.711.063,00)	90,13	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.000.000,00	61.288.937,00	(6.711.063,00)	90,13	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	285.363.156,00	231.400.673,00	(53.962.483,00)	81,08	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.047.832,00	7.237.000,00	(1.810.832,00)	79,98	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.047.832,00	7.237.000,00	(1.810.832,00)	79,98	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.047.832,00	7.237.000,00	(1.810.832,00)	79,98	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	27.371.553,00	24.212.600,00	(3.158.953,00)	88,45	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.371.553,00	24.212.600,00	(3.158.953,00)	88,45	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.371.553,00	24.212.600,00	(3.158.953,00)	88,45	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	6.522.471,00	5.635.500,00	(886.971,00)	86,40	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.522.471,00	5.635.500,00	(886.971,00)	86,40	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.522.471,00	5.635.500,00	(886.971,00)	86,40	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	101.051.000,00	78.379.800,00	(22.671.200,00)	77,56	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	101.051.000,00	78.379.800,00	(22.671.200,00)	77,56	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.051.000,00	78.379.800,00	(22.671.200,00)	77,56	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12.298.300,00	8.205.500,00	(4.092.800,00)	66,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	12.298.300,00	8.205.500,00	(4.092.800,00)	66,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.298.300,00	8.205.500,00	(4.092.800,00)	66,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9.072.000,00	6.840.000,00	(2.232.000,00)	75,39	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.072.000,00	6.840.000,00	(2.232.000,00)	75,39	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.072.000,00	6.840.000,00	(2.232.000,00)	75,39	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	120.000.000,00	100.890.273,00	(19.109.727,00)	84,07	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	100.890.273,00	(19.109.727,00)	84,07	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	100.890.273,00	(19.109.727,00)	84,07	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	20.182.020,00	13.764.000,00	(6.418.020,00)	68,19	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	2.775.000,00	0,00	(2.775.000,00)	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	2.775.000,00	0,00	(2.775.000,00)	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.775.000,00	0,00	(2.775.000,00)	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	17.407.020,00	13.764.000,00	(3.643.020,00)	79,07	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	17.407.020,00	13.764.000,00	(3.643.020,00)	79,07	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.407.020,00	13.764.000,00	(3.643.020,00)	79,07	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	317.447.400,00	205.789.453,00	(111.657.947,00)	64,82	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	150.000.000,00	91.230.603,00	(58.769.397,00)	60,82	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	91.230.603,00	(58.769.397,00)	60,82	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	91.230.603,00	(58.769.397,00)	60,82	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	166.247.400,00	113.358.850,00	(52.888.550,00)	68,18	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	166.247.400,00	113.358.850,00	(52.888.550,00)	68,18	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.247.400,00	113.358.850,00	(52.888.550,00)	68,18	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	172.184.000,00	147.130.008,00	(25.053.992,00)	85,44	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	76.198.000,00	64.559.000,00	(11.639.000,00)	84,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	76.198.000,00	64.559.000,00	(11.639.000,00)	84,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.198.000,00	64.559.000,00	(11.639.000,00)	84,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	46.072.000,00	32.906.700,00	(13.165.300,00)	71,42	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	46.072.000,00	32.906.700,00	(13.165.300,00)	71,42	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.072.000,00	32.906.700,00	(13.165.300,00)	71,42	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	49.914.000,00	49.664.308,00	(249.692,00)	99,49	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	49.914.000,00	49.664.308,00	(249.692,00)	99,49	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.914.000,00	49.664.308,00	(249.692,00)	99,49	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	555.135.170,00	482.365.030,00	(72.770.140,00)	86,89	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01		PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	555.135.170,00	482.365.030,00	(72.770.140,00)	86,89	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0014		RELASI MEDIA	91.155.300,00	86.089.880,00	(5.065.420,00)	94,44	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	91.155.300,00	86.089.880,00	(5.065.420,00)	94,44	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.155.300,00	86.089.880,00	(5.065.420,00)	94,44	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0015		KEMITRAAN KOMUNIKASI DENGAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT	12.867.790,00	11.251.100,00	(1.616.690,00)	87,43	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	12.867.790,00	11.251.100,00	(1.616.690,00)	87,43	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.867.790,00	11.251.100,00	(1.616.690,00)	87,43	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0017		PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	10.178.933,00	9.335.693,00	(843.240,00)	91,71	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	10.178.933,00	9.335.693,00	(843.240,00)	91,71	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.178.933,00	9.335.693,00	(843.240,00)	91,71	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0019		MONITORING INFORMASI KEBIJAKAN, OPINI, DAN ASPIRASI PUBLIK	38.938.376,00	36.337.706,00	(2.600.670,00)	93,32	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0019	5.1	BELANJA OPERASI	38.938.376,00	36.337.706,00	(2.600.670,00)	93,32	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.938.376,00	36.337.706,00	(2.600.670,00)	93,32	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0020		DISEMINASI INFORMASI	116.329.679,00	87.680.600,00	(28.649.079,00)	75,37	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	116.329.679,00	87.680.600,00	(28.649.079,00)	75,37	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.329.679,00	87.680.600,00	(28.649.079,00)	75,37	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0021		PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	285.665.092,00	251.670.051,00	(33.995.041,00)	88,09	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	234.387.092,00	201.664.551,00	(32.722.541,00)	86,03	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.387.092,00	201.664.551,00	(32.722.541,00)	86,03	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0021	5.2	BELANJA MODAL	51.278.000,00	50.005.500,00	(1.272.500,00)	97,51	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0021	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.278.000,00	50.005.500,00	(1.272.500,00)	97,51	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.113.860.664,00	2.080.031.550,00	(33.829.114,00)	98,39	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.01		PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.277.350,00	37.204.245,00	(2.073.105,00)	94,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.01.0004		PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN PEMERINTAH DESA	39.277.350,00	37.204.245,00	(2.073.105,00)	94,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	39.277.350,00	37.204.245,00	(2.073.105,00)	94,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.277.350,00	37.204.245,00	(2.073.105,00)	94,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02		PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.074.583.314,00	2.042.827.305,00	(31.756.009,00)	98,46	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0013		KOORDINASI PEMANFAATAN PUSAT DATA NASIONAL	124.500.000,00	122.876.263,00	(1.623.737,00)	98,69	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	124.500.000,00	122.876.263,00	(1.623.737,00)	98,69	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.500.000,00	122.876.263,00	(1.623.737,00)	98,69	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0015		FASILITASI PENYELENGGARAAN SPBE DI LINGKUNGAN PEMDA	12.653.982,00	11.382.600,00	(1.271.382,00)	89,95	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	12.653.982,00	11.382.600,00	(1.271.382,00)	89,95	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.653.982,00	11.382.600,00	(1.271.382,00)	89,95	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0016		PENYELENGGARAAN PUSAT KENDALI PEMERINTAH DAERAH	172.000.000,00	169.583.885,00	(2.416.115,00)	98,59	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	172.000.000,00	169.583.885,00	(2.416.115,00)	98,59	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.000.000,00	169.583.885,00	(2.416.115,00)	98,59	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0017		KOORDINASI PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI	10.897.350,00	9.781.600,00	(1.115.750,00)	89,76	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	10.897.350,00	9.781.600,00	(1.115.750,00)	89,76	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.897.350,00	9.781.600,00	(1.115.750,00)	89,76	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0021		PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH DAERAH	14.176.820,00	12.328.747,00	(1.848.073,00)	86,96	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	14.176.820,00	12.328.747,00	(1.848.073,00)	86,96	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.176.820,00	12.328.747,00	(1.848.073,00)	86,96	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0022		KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN SPBE PEMERINTAH DAERAH	14.141.670,00	12.571.468,00	(1.570.202,00)	88,89	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0022	5.1	BELANJA OPERASI	14.141.670,00	12.571.468,00	(1.570.202,00)	88,89	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.141.670,00	12.571.468,00	(1.570.202,00)	88,89	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0023		KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN KABUPATEN ATAU KOTA CERDAS	30.436.610,00	29.399.087,00	(1.037.523,00)	96,59	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0023	5.1	BELANJA OPERASI	30.436.610,00	29.399.087,00	(1.037.523,00)	96,59	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.436.610,00	29.399.087,00	(1.037.523,00)	96,59	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0024		PENYELENGGARAAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	1.445.570.000,00	1.440.238.143,00	(5.331.857,00)	99,63	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0024	5.1	BELANJA OPERASI	1.260.570.000,00	1.256.778.730,00	(3.791.270,00)	99,69	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.260.570.000,00	1.256.778.730,00	(3.791.270,00)	99,69	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0024	5.2	BELANJA MODAL	185.000.000,00	183.459.413,00	(1.540.587,00)	99,16	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0024	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	185.000.000,00	183.459.413,00	(1.540.587,00)	99,16	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0027		IMPLEMENTASI INOVASI PROGRAM KOTA CERDAS SESUAI DENGAN MASTERPLAN KABUPATEN ATAU KOTA CERDAS	33.229.311,00	28.121.280,00	(5.108.031,00)	84,62	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0027	5.1	BELANJA OPERASI	33.229.311,00	28.121.280,00	(5.108.031,00)	84,62	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.229.311,00	28.121.280,00	(5.108.031,00)	84,62	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0028		KOORDINASI DAN FASILITASI PROMOSI LITERASI SPBEDAN/ATAU KOLABORASI PENYELENGGARAAN SPBE	83.058.946,00	77.811.894,00	(5.247.052,00)	93,68	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0028	5.1	BELANJA OPERASI	83.058.946,00	77.811.894,00	(5.247.052,00)	93,68	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.058.946,00	77.811.894,00	(5.247.052,00)	93,68	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0029		KOORDINASI PEMANFAATAN APLIKASI UMUM SPBE	133.918.625,00	128.732.338,00	(5.186.287,00)	96,12	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0029	5.1	BELANJA OPERASI	133.918.625,00	128.732.338,00	(5.186.287,00)	96,12	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.918.625,00	128.732.338,00	(5.186.287,00)	96,12	
				JUMLAH BELANJA	8.926.852.860,00	7.821.270.461,00	(1.105.582.399,00)	87,61	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(8.926.852.860,00)	(7.821.270.461,00)	1.105.582.399,00	87,61	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.926.852.860,00)	(7.821.270.461,00)	1.105.582.399,00	87,61	

PEMERINTAH KAB. BELITUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000		5	BELANJA DAERAH	257.315.367,00	250.665.200,00	(6.650.167,00)	97,41	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	257.315.367,00	250.665.200,00	(6.650.167,00)	97,41	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01		PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	257.315.367,00	250.665.200,00	(6.650.167,00)	97,41	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0009		PENINGKATAN KUALITAS DATA STATISTIK SEKTORAL	237.494.849,00	232.590.700,00	(4.904.149,00)	97,93	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	237.494.849,00	232.590.700,00	(4.904.149,00)	97,93	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.494.849,00	232.590.700,00	(4.904.149,00)	97,93	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0010		PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA	19.820.518,00	18.074.500,00	(1.746.018,00)	91,19	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	19.820.518,00	18.074.500,00	(1.746.018,00)	91,19	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.820.518,00	18.074.500,00	(1.746.018,00)	91,19	
				JUMLAH BELANJA	257.315.367,00	250.665.200,00	(6.650.167,00)	97,41	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(257.315.367,00)	(250.665.200,00)	6.650.167,00	97,41	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(257.315.367,00)	(250.665.200,00)	6.650.167,00	97,41	

PEMERINTAH KAB. BELITUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000		5	BELANJA DAERAH	262.360.709,00	205.052.802,00	(57.307.907,00)	78,15	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	262.360.709,00	205.052.802,00	(57.307.907,00)	78,15	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01		PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	245.605.490,00	192.774.126,00	(52.831.364,00)	78,48	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0002		PELAKSANAAN ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	63.487.500,00	30.524.696,00	(32.962.804,00)	48,07	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	63.487.500,00	30.524.696,00	(32.962.804,00)	48,07	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.487.500,00	30.524.696,00	(32.962.804,00)	48,07	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0003		PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK	145.961.921,00	130.894.000,00	(15.067.921,00)	89,67	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	145.961.921,00	130.894.000,00	(15.067.921,00)	89,67	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.961.921,00	130.894.000,00	(15.067.921,00)	89,67	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0004		PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.156.069,00	31.355.430,00	(4.800.639,00)	86,72	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	36.156.069,00	31.355.430,00	(4.800.639,00)	86,72	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.156.069,00	31.355.430,00	(4.800.639,00)	86,72	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.02		PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.755.219,00	12.278.676,00	(4.476.543,00)	73,28	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.02.0001		OPERASIONALISASI JARING KOMUNIKASI SANDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.755.219,00	12.278.676,00	(4.476.543,00)	73,28	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.755.219,00	12.278.676,00	(4.476.543,00)	73,28	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.755.219,00	12.278.676,00	(4.476.543,00)	73,28	
				JUMLAH BELANJA	262.360.709,00	205.052.802,00	(57.307.907,00)	78,15	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(262.360.709,00)	(205.052.802,00)	57.307.907,00	78,15	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(262.360.709,00)	(205.052.802,00)	57.307.907,00	78,15	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.17.3.30.2.07.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.842.344.025,00	1.885.801.650,00	43.457.625,00	102,35	
	2.17.3.30.2.07.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.842.344.025,00	1.885.801.650,00	43.457.625,00	102,35	
	2.17.3.30.2.07.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.839.344.025,00	1.873.406.000,00	34.061.975,00	101,85	
	2.17.3.30.2.07.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.000.000,00	12.395.650,00	9.395.650,00	413,18	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.842.344.025,00	1.885.801.650,00	43.457.625,00	102,35	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000		5	BELANJA DAERAH	8.977.171.645,00	7.249.227.382,00	(1.727.944.263,00)	80,75	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.371.170.196,00	6.367.625.160,00	(1.003.545.036,00)	86,38	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.240.900,00	4.360.000,00	(2.880.900,00)	60,21	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	1.161.700,00	750.000,00	(411.700,00)	64,56	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.161.700,00	750.000,00	(411.700,00)	64,56	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.161.700,00	750.000,00	(411.700,00)	64,56	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1.321.800,00	680.000,00	(641.800,00)	51,44	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.321.800,00	680.000,00	(641.800,00)	51,44	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.321.800,00	680.000,00	(641.800,00)	51,44	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1.126.800,00	680.000,00	(446.800,00)	60,34	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.126.800,00	680.000,00	(446.800,00)	60,34	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.126.800,00	680.000,00	(446.800,00)	60,34	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.330.200,00	750.000,00	(580.200,00)	56,38	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.330.200,00	750.000,00	(580.200,00)	56,38	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.330.200,00	750.000,00	(580.200,00)	56,38	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	1.293.600,00	820.000,00	(473.600,00)	63,38	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.293.600,00	820.000,00	(473.600,00)	63,38	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.293.600,00	820.000,00	(473.600,00)	63,38	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.006.800,00	680.000,00	(326.800,00)	67,54	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.006.800,00	680.000,00	(326.800,00)	67,54	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.006.800,00	680.000,00	(326.800,00)	67,54	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.521.462.326,00	5.718.876.570,00	(802.585.756,00)	87,69	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.518.984.626,00	5.717.311.570,00	(801.673.056,00)	87,70	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.518.984.626,00	5.717.311.570,00	(801.673.056,00)	87,70	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.518.984.626,00	5.717.311.570,00	(801.673.056,00)	87,70	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.361.700,00	885.000,00	(476.700,00)	64,99	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.361.700,00	885.000,00	(476.700,00)	64,99	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.361.700,00	885.000,00	(476.700,00)	64,99	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	1.116.000,00	680.000,00	(436.000,00)	60,93	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.116.000,00	680.000,00	(436.000,00)	60,93	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.116.000,00	680.000,00	(436.000,00)	60,93	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	8.600.000,00	7.594.020,00	(1.005.980,00)	88,30	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	8.600.000,00	7.594.020,00	(1.005.980,00)	88,30	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	8.600.000,00	7.594.020,00	(1.005.980,00)	88,30	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	7.594.020,00	(1.005.980,00)	88,30	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	215.605.170,00	171.035.233,00	(44.569.937,00)	79,32	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.689.300,00	4.425.000,00	(6.264.300,00)	41,39	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.689.300,00	4.425.000,00	(6.264.300,00)	41,39	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.689.300,00	4.425.000,00	(6.264.300,00)	41,39	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	42.059.100,00	36.683.900,00	(5.375.200,00)	87,21	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	42.059.100,00	36.683.900,00	(5.375.200,00)	87,21	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.059.100,00	36.683.900,00	(5.375.200,00)	87,21	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	8.976.900,00	8.612.300,00	(364.600,00)	95,93	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.976.900,00	8.612.300,00	(364.600,00)	95,93	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.976.900,00	8.612.300,00	(364.600,00)	95,93	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	83.443.900,00	73.319.520,00	(10.124.380,00)	87,86	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	83.443.900,00	73.319.520,00	(10.124.380,00)	87,86	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.443.900,00	73.319.520,00	(10.124.380,00)	87,86	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	21.635.970,00	13.585.500,00	(8.050.470,00)	62,79	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	21.635.970,00	13.585.500,00	(8.050.470,00)	62,79	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.635.970,00	13.585.500,00	(8.050.470,00)	62,79	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	8.800.000,00	6.660.000,00	(2.140.000,00)	75,68	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.800.000,00	6.660.000,00	(2.140.000,00)	75,68	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	6.660.000,00	(2.140.000,00)	75,68	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	40.000.000,00	27.749.013,00	(12.250.987,00)	69,37	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	27.749.013,00	(12.250.987,00)	69,37	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	27.749.013,00	(12.250.987,00)	69,37	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	7.048.500,00	6.660.000,00	(388.500,00)	94,48	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	7.048.500,00	6.660.000,00	(388.500,00)	94,48	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	7.048.500,00	6.660.000,00	(388.500,00)	94,48	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.048.500,00	6.660.000,00	(388.500,00)	94,48	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	411.732.800,00	326.351.037,00	(85.381.763,00)	79,26	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.020.000,00	465.000,00	(3.555.000,00)	11,56	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.020.000,00	465.000,00	(3.555.000,00)	11,56	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.020.000,00	465.000,00	(3.555.000,00)	11,56	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	275.000.000,00	193.306.887,00	(81.693.113,00)	70,29	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	275.000.000,00	193.306.887,00	(81.693.113,00)	70,29	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000,00	193.306.887,00	(81.693.113,00)	70,29	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	132.712.800,00	132.579.150,00	(133.650,00)	99,89	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	132.712.800,00	132.579.150,00	(133.650,00)	99,89	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.712.800,00	132.579.150,00	(133.650,00)	99,89	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	199.480.500,00	132.748.300,00	(66.732.200,00)	66,54	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	47.574.000,00	23.315.000,00	(24.259.000,00)	49,00	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	47.574.000,00	23.315.000,00	(24.259.000,00)	49,00	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.574.000,00	23.315.000,00	(24.259.000,00)	49,00	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	54.520.000,00	27.143.300,00	(27.376.700,00)	49,78	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	54.520.000,00	27.143.300,00	(27.376.700,00)	49,78	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.520.000,00	27.143.300,00	(27.376.700,00)	49,78	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	37.280.000,00	33.225.000,00	(4.055.000,00)	89,12	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	37.280.000,00	33.225.000,00	(4.055.000,00)	89,12	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.280.000,00	33.225.000,00	(4.055.000,00)	89,12	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	60.106.500,00	49.065.000,00	(11.041.500,00)	81,63	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	60.106.500,00	49.065.000,00	(11.041.500,00)	81,63	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.106.500,00	49.065.000,00	(11.041.500,00)	81,63	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	170.390.156,00	152.806.600,00	(17.583.556,00)	89,68	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.06.2.01		PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	170.390.156,00	152.806.600,00	(17.583.556,00)	89,68	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.06.2.01.0009		PEMBERDAYAAN KOPERASI DENGAN KEANGGOTAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	170.390.156,00	152.806.600,00	(17.583.556,00)	89,68	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	170.390.156,00	152.806.600,00	(17.583.556,00)	89,68	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.390.156,00	152.806.600,00	(17.583.556,00)	89,68	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	988.936.173,00	379.931.150,00	(609.005.023,00)	38,41	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.07.2.01		PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	988.936.173,00	379.931.150,00	(609.005.023,00)	38,41	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.07.2.01.0004		PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	988.936.173,00	379.931.150,00	(609.005.023,00)	38,41	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.07.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	863.936.173,00	379.931.150,00	(484.005.023,00)	43,97	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.07.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	863.936.173,00	379.931.150,00	(484.005.023,00)	43,97	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.07.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	125.000.000,00	0,00	(125.000.000,00)	0,00	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.07.2.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.000.000,00	0,00	(125.000.000,00)	0,00	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	446.675.120,00	348.864.472,00	(97.810.648,00)	78,10	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.08.2.01		PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL	446.675.120,00	348.864.472,00	(97.810.648,00)	78,10	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.08.2.01.0002		PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	446.675.120,00	348.864.472,00	(97.810.648,00)	78,10	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.08.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	446.675.120,00	348.864.472,00	(97.810.648,00)	78,10	
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.08.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	446.675.120,00	348.864.472,00	(97.810.648,00)	78,10	
				JUMLAH BELANJA	8.977.171.645,00	7.249.227.382,00	(1.727.944.263,00)	80,75	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(7.134.827.620,00)	(5.363.425.732,00)	1.771.401.888,00	75,17	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.134.827.620,00)	(5.363.425.732,00)	1.771.401.888,00	75,17	

PEMERINTAH KAB. BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Organisasi : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.17.3.30.2.07.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.842.344.025,00	1.885.801.650,00	43.457.625,00	102,35	
	2.17.3.30.2.07.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.842.344.025,00	1.885.801.650,00	43.457.625,00	102,35	
	2.17.3.30.2.07.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.839.344.025,00	1.873.406.000,00	34.061.975,00	101,85	
	2.17.3.30.2.07.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.000.000,00	12.395.650,00	9.395.650,00	413,18	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.842.344.025,00	1.885.801.650,00	43.457.625,00	102,35	
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000		5	BELANJA DAERAH	1.545.456.820,00	1.196.830.546,00	(348.626.274,00)	77,44	
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.421.068.000,00	1.079.496.100,00	(341.571.900,00)	75,96	
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.03.2.01		PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.383.360.000,00	1.054.681.100,00	(328.678.900,00)	76,24	
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.03.2.01.0002		FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.383.360.000,00	1.054.681.100,00	(328.678.900,00)	76,24	
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	762.595.000,00	711.070.900,00	(51.524.100,00)	93,24	
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	762.595.000,00	711.070.900,00	(51.524.100,00)	93,24	
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.03.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	620.765.000,00	343.610.200,00	(277.154.800,00)	55,35	
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.03.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	34.265.000,00	(735.000,00)	97,90	
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.03.2.01.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00	
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.03.2.01.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	385.765.000,00	309.345.200,00	(76.419.800,00)	80,19	
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.03.2.02		PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA	37.708.000,00	24.815.000,00	(12.893.000,00)	65,80	
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.03.2.02.0001		PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	37.708.000,00	24.815.000,00	(12.893.000,00)	65,80	
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	37.708.000,00	24.815.000,00	(12.893.000,00)	65,80	
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.708.000,00	24.815.000,00	(12.893.000,00)	65,80	
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	15.321.600,00	10.767.500,00	(4.554.100,00)	70,27	
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.04.2.02		PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA	12.955.600,00	9.892.500,00	(3.063.100,00)	76,35	
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.04.2.02.0001		PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	12.955.600,00	9.892.500,00	(3.063.100,00)	76,35	
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.955.600,00	9.892.500,00	(3.063.100,00)	76,35	
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.955.600,00	9.892.500,00	(3.063.100,00)	76,35	
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.04.2.03		PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.366.000,00	875.000,00	(1.491.000,00)	36,98	
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.04.2.03.0003		PENGAWASAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI	2.366.000,00	875.000,00	(1.491.000,00)	36,98	
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.04.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.366.000,00	875.000,00	(1.491.000,00)	36,98	
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.04.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.366.000,00	875.000,00	(1.491.000,00)	36,98	
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	109.067.220,00	106.566.946,00	(2.500.274,00)	97,70	
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.06.2.01		PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN	109.067.220,00	106.566.946,00	(2.500.274,00)	97,70	
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.06.2.01.0001		PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG	109.067.220,00	106.566.946,00	(2.500.274,00)	97,70	
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	96.793.520,00	94.366.946,00	(2.426.574,00)	97,49	
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.793.520,00	94.366.946,00	(2.426.574,00)	97,49	
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	12.273.700,00	12.200.000,00	(73.700,00)	99,39	
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.273.700,00	12.200.000,00	(73.700,00)	99,39	
				JUMLAH BELANJA	1.545.456.820,00	1.196.830.546,00	(348.626.274,00)	77,44	
				SURPLUS / (DEFISIT)	296.887.205,00	688.971.104,00	392.083.899,00	232,06	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	296.887.205,00	688.971.104,00	392.083.899,00	232,06	

PEMERINTAH KAB. BELITUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.17.3.30.2.07.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.842.344.025,00	1.885.801.650,00	43.457.625,00	102,35	
	2.17.3.30.2.07.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.842.344.025,00	1.885.801.650,00	43.457.625,00	102,35	
	2.17.3.30.2.07.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.839.344.025,00	1.873.406.000,00	34.061.975,00	101,85	
	2.17.3.30.2.07.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.000.000,00	12.395.650,00	9.395.650,00	413,18	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.842.344.025,00	1.885.801.650,00	43.457.625,00	102,35	
2.07	2.17.3.30.2.07.01.0000		5	BELANJA DAERAH	366.029.053,00	355.169.440,00	(10.859.613,00)	97,03	
2.07	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.7.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	248.005.953,00	243.419.340,00	(4.586.613,00)	98,15	
2.07	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.07.03.2.01		PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	248.005.953,00	243.419.340,00	(4.586.613,00)	98,15	
2.07	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.07.03.2.01.0001		PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI	248.005.953,00	243.419.340,00	(4.586.613,00)	98,15	
2.07	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	248.005.953,00	243.419.340,00	(4.586.613,00)	98,15	
2.07	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.005.953,00	243.419.340,00	(4.586.613,00)	98,15	
2.07	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.7.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	118.023.100,00	111.750.100,00	(6.273.000,00)	94,68	
2.07	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.07.05.2.02		PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	118.023.100,00	111.750.100,00	(6.273.000,00)	94,68	
2.07	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.07.05.2.02.0001		PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	118.023.100,00	111.750.100,00	(6.273.000,00)	94,68	
2.07	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.07.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	118.023.100,00	111.750.100,00	(6.273.000,00)	94,68	
2.07	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.07.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.023.100,00	111.750.100,00	(6.273.000,00)	94,68	
				JUMLAH BELANJA	366.029.053,00	355.169.440,00	(10.859.613,00)	97,03	
				SURPLUS / (DEFISIT)	1.476.314.972,00	1.530.632.210,00	54.317.238,00	103,67	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	1.476.314.972,00	1.530.632.210,00	54.317.238,00	103,67	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.18.3.31.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	700.000.000,00	783.141.131,00	83.141.131,00	111,87	
	2.18.3.31.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	700.000.000,00	783.141.131,00	83.141.131,00	111,87	
	2.18.3.31.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	700.000.000,00	783.141.131,00	83.141.131,00	111,87	
				JUMLAH PENDAPATAN	700.000.000,00	783.141.131,00	83.141.131,00	111,87	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.805.468.690,00	5.182.666.336,00	(622.802.354,00)	89,27	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.643.278.739,00	5.032.692.367,00	(610.586.372,00)	89,18	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.098.800,00	1.682.500,00	(416.300,00)	80,16	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	349.800,00	291.500,00	(58.300,00)	83,33	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	349.800,00	291.500,00	(58.300,00)	83,33	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.800,00	291.500,00	(58.300,00)	83,33	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	349.800,00	291.500,00	(58.300,00)	83,33	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	349.800,00	291.500,00	(58.300,00)	83,33	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.800,00	291.500,00	(58.300,00)	83,33	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	349.800,00	291.500,00	(58.300,00)	83,33	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	349.800,00	291.500,00	(58.300,00)	83,33	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.800,00	291.500,00	(58.300,00)	83,33	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	349.800,00	291.500,00	(58.300,00)	83,33	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	349.800,00	291.500,00	(58.300,00)	83,33	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.800,00	291.500,00	(58.300,00)	83,33	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	349.800,00	291.500,00	(58.300,00)	83,33	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	349.800,00	291.500,00	(58.300,00)	83,33	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.800,00	291.500,00	(58.300,00)	83,33	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	349.800,00	225.000,00	(124.800,00)	64,32	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	349.800,00	225.000,00	(124.800,00)	64,32	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.800,00	225.000,00	(124.800,00)	64,32	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.180.192.494,00	4.643.257.083,00	(536.935.411,00)	89,63	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.179.492.894,00	4.642.675.583,00	(536.817.311,00)	89,63	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.179.492.894,00	4.642.675.583,00	(536.817.311,00)	89,63	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.179.492.894,00	4.642.675.583,00	(536.817.311,00)	89,63	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	349.800,00	290.000,00	(59.800,00)	82,90	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	349.800,00	290.000,00	(59.800,00)	82,90	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.800,00	290.000,00	(59.800,00)	82,90	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	349.800,00	291.500,00	(58.300,00)	83,33	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	349.800,00	291.500,00	(58.300,00)	83,33	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.800,00	291.500,00	(58.300,00)	83,33	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	16.632.000,00	14.520.500,00	(2.111.500,00)	87,30	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	16.632.000,00	14.520.500,00	(2.111.500,00)	87,30	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	16.632.000,00	14.520.500,00	(2.111.500,00)	87,30	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.632.000,00	14.520.500,00	(2.111.500,00)	87,30	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	131.023.205,00	110.878.835,00	(20.144.370,00)	84,62	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.544.451,00	3.635.762,00	(908.689,00)	80,00	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.544.451,00	3.635.762,00	(908.689,00)	80,00	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.544.451,00	3.635.762,00	(908.689,00)	80,00	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	18.993.577,00	12.677.550,00	(6.316.027,00)	66,74	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.993.577,00	12.677.550,00	(6.316.027,00)	66,74	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.993.577,00	12.677.550,00	(6.316.027,00)	66,74	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	6.768.809,00	5.560.790,00	(1.208.019,00)	82,15	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.768.809,00	5.560.790,00	(1.208.019,00)	82,15	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.768.809,00	5.560.790,00	(1.208.019,00)	82,15	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	51.576.132,00	44.881.670,00	(6.694.462,00)	87,02	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	51.576.132,00	44.881.670,00	(6.694.462,00)	87,02	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.576.132,00	44.881.670,00	(6.694.462,00)	87,02	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.840.236,00	6.576.500,00	(1.263.736,00)	83,88	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.840.236,00	6.576.500,00	(1.263.736,00)	83,88	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.840.236,00	6.576.500,00	(1.263.736,00)	83,88	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.800.000,00	2.620.000,00	(180.000,00)	93,57	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.800.000,00	2.620.000,00	(180.000,00)	93,57	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.620.000,00	(180.000,00)	93,57	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	38.500.000,00	34.926.563,00	(3.573.437,00)	90,71	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	38.500.000,00	34.926.563,00	(3.573.437,00)	90,71	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	34.926.563,00	(3.573.437,00)	90,71	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	250.194.600,00	215.006.149,00	(35.188.451,00)	85,93	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.100.000,00	1.121.000,00	(979.000,00)	53,38	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	1.121.000,00	(979.000,00)	53,38	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	1.121.000,00	(979.000,00)	53,38	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	148.560.000,00	114.350.549,00	(34.209.451,00)	76,97	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	148.560.000,00	114.350.549,00	(34.209.451,00)	76,97	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.560.000,00	114.350.549,00	(34.209.451,00)	76,97	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	99.534.600,00	99.534.600,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	99.534.600,00	99.534.600,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.534.600,00	99.534.600,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	63.137.640,00	47.347.300,00	(15.790.340,00)	74,99	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	30.753.000,00	19.871.800,00	(10.881.200,00)	64,61	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.753.000,00	19.871.800,00	(10.881.200,00)	64,61	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.753.000,00	19.871.800,00	(10.881.200,00)	64,61	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	11.111.740,00	7.811.500,00	(3.300.240,00)	70,29	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.111.740,00	7.811.500,00	(3.300.240,00)	70,29	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.111.740,00	7.811.500,00	(3.300.240,00)	70,29	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	19.633.900,00	18.025.000,00	(1.608.900,00)	91,80	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	19.633.900,00	18.025.000,00	(1.608.900,00)	91,80	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.633.900,00	18.025.000,00	(1.608.900,00)	91,80	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	1.639.000,00	1.639.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.639.000,00	1.639.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.639.000,00	1.639.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	43.681.944,00	41.506.046,00	(2.175.898,00)	95,01	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.02.2.01		PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	43.681.944,00	41.506.046,00	(2.175.898,00)	95,01	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.02.2.01.0001		PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH MENGENAI PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	33.060.919,00	31.166.350,00	(1.894.569,00)	94,26	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	33.060.919,00	31.166.350,00	(1.894.569,00)	94,26	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.060.919,00	31.166.350,00	(1.894.569,00)	94,26	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.02.2.01.0003		FASILITASI KEMITRAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	10.621.025,00	10.339.696,00	(281.329,00)	97,35	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.621.025,00	10.339.696,00	(281.329,00)	97,35	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.621.025,00	10.339.696,00	(281.329,00)	97,35	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	60.003.060,00	56.125.797,00	(3.877.263,00)	93,53	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.03.2.01		PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	60.003.060,00	56.125.797,00	(3.877.263,00)	93,53	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002		PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	60.003.060,00	56.125.797,00	(3.877.263,00)	93,53	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	60.003.060,00	56.125.797,00	(3.877.263,00)	93,53	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.003.060,00	56.125.797,00	(3.877.263,00)	93,53	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	39.261.860,00	34.517.696,00	(4.744.164,00)	87,91	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.04.2.01		PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	39.261.860,00	34.517.696,00	(4.744.164,00)	87,91	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006		PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	39.261.860,00	34.517.696,00	(4.744.164,00)	87,91	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	39.261.860,00	34.517.696,00	(4.744.164,00)	87,91	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.261.860,00	34.517.696,00	(4.744.164,00)	87,91	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	19.243.087,00	17.824.430,00	(1.418.657,00)	92,62	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.05.2.01		PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.243.087,00	17.824.430,00	(1.418.657,00)	92,62	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0004		PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA	19.243.087,00	17.824.430,00	(1.418.657,00)	92,62	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	19.243.087,00	17.824.430,00	(1.418.657,00)	92,62	
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.243.087,00	17.824.430,00	(1.418.657,00)	92,62	
				JUMLAH BELANJA	5.805.468.690,00	5.182.666.336,00	(622.802.354,00)	89,27	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.105.468.690,00)	(4.399.525.205,00)	705.943.485,00	86,17	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.105.468.690,00)	(4.399.525.205,00)	705.943.485,00	86,17	

PEMERINTAH KAB. BELITUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.18.3.31.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	700.000.000,00	783.141.131,00	83.141.131,00	111,87	
	2.18.3.31.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	700.000.000,00	783.141.131,00	83.141.131,00	111,87	
	2.18.3.31.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	700.000.000,00	783.141.131,00	83.141.131,00	111,87	
				JUMLAH PENDAPATAN	700.000.000,00	783.141.131,00	83.141.131,00	111,87	
3.31	2.18.3.31.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	699.627.512,00	573.537.829,00	(126.089.683,00)	81,97	
3.31	2.18.3.31.0.00.01.0000	3.31.02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	699.627.512,00	573.537.829,00	(126.089.683,00)	81,97	
3.31	2.18.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01		PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	699.627.512,00	573.537.829,00	(126.089.683,00)	81,97	
3.31	2.18.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0001		PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	178.680.000,00	170.922.330,00	(7.757.670,00)	95,65	
3.31	2.18.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	178.680.000,00	170.922.330,00	(7.757.670,00)	95,65	
3.31	2.18.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.680.000,00	170.922.330,00	(7.757.670,00)	95,65	
3.31	2.18.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0003		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI	410.753.342,00	372.626.144,00	(38.127.198,00)	90,71	
3.31	2.18.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	259.163.962,00	255.294.704,00	(3.869.258,00)	98,50	
3.31	2.18.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.163.962,00	255.294.704,00	(3.869.258,00)	98,50	
3.31	2.18.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	151.589.380,00	117.331.440,00	(34.257.940,00)	77,40	
3.31	2.18.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	143.609.380,00	109.561.440,00	(34.047.940,00)	76,29	
3.31	2.18.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0003	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	7.980.000,00	7.770.000,00	(210.000,00)	97,36	
3.31	2.18.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0005		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	110.194.170,00	29.989.355,00	(80.204.815,00)	27,21	
3.31	2.18.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	110.194.170,00	29.989.355,00	(80.204.815,00)	27,21	
3.31	2.18.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.194.170,00	29.989.355,00	(80.204.815,00)	27,21	
				JUMLAH BELANJA	699.627.512,00	573.537.829,00	(126.089.683,00)	81,97	
				SURPLUS / (DEFISIT)	372.488,00	209.603.302,00	209.230.814,00	56.271,15	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	372.488,00	209.603.302,00	209.230.814,00	56.271,15	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi : Dinas Pemuda dan Olahraga

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.19.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	107.000.000,00	228.050.000,00	121.050.000,00	213,13	
	2.19.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	107.000.000,00	228.050.000,00	121.050.000,00	213,13	
	2.19.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	107.000.000,00	228.050.000,00	121.050.000,00	213,13	
				JUMLAH PENDAPATAN	107.000.000,00	228.050.000,00	121.050.000,00	213,13	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	9.769.055.105,00	9.001.808.871,00	(767.246.234,00)	92,14	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.390.129.487,00	3.918.030.124,00	(472.099.363,00)	89,24	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	10.497.492,00	10.440.900,00	(56.592,00)	99,46	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5.248.746,00	5.197.200,00	(51.546,00)	99,01	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.248.746,00	5.197.200,00	(51.546,00)	99,01	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.248.746,00	5.197.200,00	(51.546,00)	99,01	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.248.746,00	5.243.700,00	(5.046,00)	99,90	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	5.248.746,00	5.243.700,00	(5.046,00)	99,90	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.248.746,00	5.243.700,00	(5.046,00)	99,90	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.524.210.892,00	3.119.784.868,00	(404.426.024,00)	88,52	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.513.713.400,00	3.109.295.068,00	(404.418.332,00)	88,49	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.513.713.400,00	3.109.295.068,00	(404.418.332,00)	88,49	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.513.713.400,00	3.109.295.068,00	(404.418.332,00)	88,49	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	5.248.746,00	5.244.900,00	(3.846,00)	99,92	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.248.746,00	5.244.900,00	(3.846,00)	99,92	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.248.746,00	5.244.900,00	(3.846,00)	99,92	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	5.248.746,00	5.244.900,00	(3.846,00)	99,92	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.248.746,00	5.244.900,00	(3.846,00)	99,92	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.248.746,00	5.244.900,00	(3.846,00)	99,92	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	47.100.000,00	21.713.304,00	(25.386.696,00)	46,10	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	47.100.000,00	21.713.304,00	(25.386.696,00)	46,10	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	47.100.000,00	21.713.304,00	(25.386.696,00)	46,10	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.100.000,00	21.713.304,00	(25.386.696,00)	46,10	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	259.684.923,00	255.373.375,00	(4.311.548,00)	98,33	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	11.983.005,00	11.973.400,00	(9.605,00)	99,91	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.983.005,00	11.973.400,00	(9.605,00)	99,91	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.983.005,00	11.973.400,00	(9.605,00)	99,91	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	58.750.767,00	58.655.825,00	(94.942,00)	99,83	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	58.750.767,00	58.655.825,00	(94.942,00)	99,83	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.750.767,00	58.655.825,00	(94.942,00)	99,83	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	13.935.384,00	13.931.000,00	(4.384,00)	99,96	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	13.935.384,00	13.931.000,00	(4.384,00)	99,96	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.935.384,00	13.931.000,00	(4.384,00)	99,96	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	92.086.346,00	88.961.350,00	(3.124.996,00)	96,60	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	92.086.346,00	88.961.350,00	(3.124.996,00)	96,60	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.086.346,00	88.961.350,00	(3.124.996,00)	96,60	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	34.433.421,00	34.431.800,00	(1.621,00)	99,99	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	34.433.421,00	34.431.800,00	(1.621,00)	99,99	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.433.421,00	34.431.800,00	(1.621,00)	99,99	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.496.000,00	3.420.000,00	(1.076.000,00)	76,06	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.496.000,00	3.420.000,00	(1.076.000,00)	76,06	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.496.000,00	3.420.000,00	(1.076.000,00)	76,06	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	405.378.000,00	371.269.577,00	(34.108.423,00)	91,58	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.596.000,00	3.540.000,00	(56.000,00)	98,44	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.596.000,00	3.540.000,00	(56.000,00)	98,44	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.596.000,00	3.540.000,00	(56.000,00)	98,44	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	70.000.000,00	69.422.777,00	(577.223,00)	99,17	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	69.422.777,00	(577.223,00)	99,17	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	69.422.777,00	(577.223,00)	99,17	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	331.782.000,00	298.306.800,00	(33.475.200,00)	89,91	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	331.782.000,00	298.306.800,00	(33.475.200,00)	89,91	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	331.782.000,00	298.306.800,00	(33.475.200,00)	89,91	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	143.258.180,00	139.448.100,00	(3.810.080,00)	97,34	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	22.223.480,00	21.715.400,00	(508.080,00)	97,71	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	22.223.480,00	21.715.400,00	(508.080,00)	97,71	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.223.480,00	21.715.400,00	(508.080,00)	97,71	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	31.766.800,00	28.797.700,00	(2.969.100,00)	90,65	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	31.766.800,00	28.797.700,00	(2.969.100,00)	90,65	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.766.800,00	28.797.700,00	(2.969.100,00)	90,65	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	54.267.900,00	54.045.000,00	(222.900,00)	99,58	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	54.267.900,00	54.045.000,00	(222.900,00)	99,58	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.267.900,00	54.045.000,00	(222.900,00)	99,58	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	35.000.000,00	34.890.000,00	(110.000,00)	99,68	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.890.000,00	(110.000,00)	99,68	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.890.000,00	(110.000,00)	99,68	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	743.186.931,00	670.374.773,00	(72.812.158,00)	90,20	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01		PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA	428.812.822,00	357.890.251,00	(70.922.571,00)	83,46	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0011		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA BAGI WIRAUSAHA PEMULA TINGKAT KABUPATEN/KOTA	57.281.212,00	53.154.400,00	(4.126.812,00)	92,79	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	57.281.212,00	53.154.400,00	(4.126.812,00)	92,79	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.281.212,00	53.154.400,00	(4.126.812,00)	92,79	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0012		PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPEMUDAAN BAGI YANG BERPRESTASI DAN/ATAU BERJASA DALAM MEMAJUKAN POTENSI PEMUDA	44.230.701,00	39.828.200,00	(4.402.501,00)	90,04	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	44.230.701,00	39.828.200,00	(4.402.501,00)	90,04	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.230.701,00	39.828.200,00	(4.402.501,00)	90,04	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0015		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEPELOPORAN PEMUDA BAGI PEMUDA PELOPOR TINGKAT KABUPATEN/KOTA	327.300.909,00	264.907.651,00	(62.393.258,00)	80,93	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	327.300.909,00	264.907.651,00	(62.393.258,00)	80,93	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	327.300.909,00	264.907.651,00	(62.393.258,00)	80,93	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.02		PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	314.374.109,00	312.484.522,00	(1.889.587,00)	99,39	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0003		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELENGGARAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA	314.374.109,00	312.484.522,00	(1.889.587,00)	99,39	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	314.374.109,00	312.484.522,00	(1.889.587,00)	99,39	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.374.109,00	113.199.842,00	(1.174.267,00)	98,97	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0003	5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	199.284.680,00	(715.320,00)	99,64	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	4.235.738.687,00	4.083.846.938,00	(151.891.749,00)	96,41	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	304.148.464,00	301.925.578,00	(2.222.886,00)	99,26	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA OLAHRAGA MELALUI PERENCANAAN, PENGADAAN, PEMANFAATAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGAWASAN PRASARANA OLAHRAGA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	304.148.464,00	301.925.578,00	(2.222.886,00)	99,26	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	304.148.464,00	301.925.578,00	(2.222.886,00)	99,26	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304.148.464,00	301.925.578,00	(2.222.886,00)	99,26	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02		PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.034.099.283,00	992.148.000,00	(41.951.283,00)	95,94	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0004		PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA MULTI EVENT DAN SINGLE EVENT TINGKAT KABUPATEN/KOTA	196.185.253,00	192.559.800,00	(3.625.453,00)	98,15	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	196.185.253,00	192.559.800,00	(3.625.453,00)	98,15	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.185.253,00	192.559.800,00	(3.625.453,00)	98,15	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0006		KEIKUTSERTAAN ANGGOTA KONTINGEN KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA	837.914.030,00	799.588.200,00	(38.325.830,00)	95,42	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	837.914.030,00	799.588.200,00	(38.325.830,00)	95,42	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	837.914.030,00	799.588.200,00	(38.325.830,00)	95,42	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI	1.167.327.640,00	1.087.627.000,00	(79.700.640,00)	93,17	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0007		PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA BAGI YANG BERPRESTASI DAN/ATAU BERJASA DALAM MEMAJUKAN OLAHRAGA	629.410.140,00	574.488.000,00	(54.922.140,00)	91,27	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	629.410.140,00	574.488.000,00	(54.922.140,00)	91,27	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	629.410.140,00	574.488.000,00	(54.922.140,00)	91,27	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0008		PEMUSATAN LATIHAN DAERAH YANG TERINTEGRASI DENGAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN (SPORT SCIENCE)	194.768.750,00	185.937.000,00	(8.831.750,00)	95,46	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	194.768.750,00	185.937.000,00	(8.831.750,00)	95,46	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.768.750,00	185.937.000,00	(8.831.750,00)	95,46	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0009		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGAWAN BERPRESTASI KABUPATEN/KOTA	343.148.750,00	327.202.000,00	(15.946.750,00)	95,35	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	203.108.750,00	195.652.000,00	(7.456.750,00)	96,32	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.108.750,00	195.652.000,00	(7.456.750,00)	96,32	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0009	5.2	BELANJA MODAL	140.040.000,00	131.550.000,00	(8.490.000,00)	93,93	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.040.000,00	131.550.000,00	(8.490.000,00)	93,93	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.04		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.04.0006		PENINGKATAN KERJA SAMA ORGANISASI KEOLAHRAGAAN KABUPATEN/KOTA DENGAN LEMBAGA TERKAIT	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.04.0006	5.1.05	Belanja Hibah	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI	930.163.300,00	902.146.360,00	(28.016.940,00)	96,98	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0007		PENGEMBANGAN OLAHRAGA WISATA, TANTANGAN DAN PETUALANGAN	472.360.500,00	455.283.000,00	(17.077.500,00)	96,38	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0007	5.1	BELANJA OPERASI	472.360.500,00	455.283.000,00	(17.077.500,00)	96,38	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	472.360.500,00	455.283.000,00	(17.077.500,00)	96,38	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0010		PEMASSALAN OLAHRAGA DAN PENYELENGGARAAN FESTIVAL OLAHRAGA REKREASI YANG BERJENJANG DAN BERKELANJUTAN PADA TINGKAT DAERAH, NASIONAL, DAN INTERNASIONAL	457.802.800,00	446.863.360,00	(10.939.440,00)	97,61	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	457.802.800,00	446.863.360,00	(10.939.440,00)	97,61	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	457.802.800,00	446.863.360,00	(10.939.440,00)	97,61	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	400.000.000,00	329.557.036,00	(70.442.964,00)	82,38	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN	400.000.000,00	329.557.036,00	(70.442.964,00)	82,38	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0002		PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH	400.000.000,00	329.557.036,00	(70.442.964,00)	82,38	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	329.557.036,00	(70.442.964,00)	82,38	
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	400.000.000,00	329.557.036,00	(70.442.964,00)	82,38	
				JUMLAH BELANJA	9.769.055.105,00	9.001.808.871,00	(767.246.234,00)	92,14	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(9.662.055.105,00)	(8.773.758.871,00)	888.296.234,00	90,80	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(9.662.055.105,00)	(8.773.758.871,00)	888.296.234,00	90,80	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	6.412.157.594,00	6.199.418.071,00	(212.739.523,00)	96,68	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.560.568.956,00	5.389.071.185,00	(171.497.771,00)	96,91	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.428.124,00	2.901.794,00	(526.330,00)	84,64	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	3.428.124,00	2.901.794,00	(526.330,00)	84,64	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.428.124,00	2.901.794,00	(526.330,00)	84,64	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.428.124,00	2.901.794,00	(526.330,00)	84,64	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.818.758.133,00	4.692.795.204,00	(125.962.929,00)	97,38	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.818.758.133,00	4.692.795.204,00	(125.962.929,00)	97,38	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.818.758.133,00	4.692.795.204,00	(125.962.929,00)	97,38	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.818.758.133,00	4.692.795.204,00	(125.962.929,00)	97,38	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	30.000.000,00	27.072.120,00	(2.927.880,00)	90,24	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	30.000.000,00	27.072.120,00	(2.927.880,00)	90,24	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	27.072.120,00	(2.927.880,00)	90,24	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	27.072.120,00	(2.927.880,00)	90,24	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	222.284.029,00	205.558.117,00	(16.725.912,00)	92,47	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6.949.932,00	6.808.463,00	(141.469,00)	97,96	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.949.932,00	6.808.463,00	(141.469,00)	97,96	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.949.932,00	6.808.463,00	(141.469,00)	97,96	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	31.249.719,00	24.535.396,00	(6.714.323,00)	78,51	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	31.249.719,00	24.535.396,00	(6.714.323,00)	78,51	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.249.719,00	24.535.396,00	(6.714.323,00)	78,51	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	14.726.481,00	14.297.591,00	(428.890,00)	97,08	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	14.726.481,00	14.297.591,00	(428.890,00)	97,08	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.726.481,00	14.297.591,00	(428.890,00)	97,08	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	76.633.200,00	70.561.718,00	(6.071.482,00)	92,07	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	76.633.200,00	70.561.718,00	(6.071.482,00)	92,07	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.633.200,00	70.561.718,00	(6.071.482,00)	92,07	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	17.343.417,00	14.086.889,00	(3.256.528,00)	81,22	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	17.343.417,00	14.086.889,00	(3.256.528,00)	81,22	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.343.417,00	14.086.889,00	(3.256.528,00)	81,22	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.381.280,00	5.310.000,00	(71.280,00)	98,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.381.280,00	5.310.000,00	(71.280,00)	98,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.381.280,00	5.310.000,00	(71.280,00)	98,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	70.000.000,00	69.958.060,00	(41.940,00)	99,94	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	69.958.060,00	(41.940,00)	99,94	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	69.958.060,00	(41.940,00)	99,94	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	21.379.000,00	0,00	(21.379.000,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	21.379.000,00	0,00	(21.379.000,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	21.379.000,00	0,00	(21.379.000,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.379.000,00	0,00	(21.379.000,00)	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	333.103.400,00	331.878.000,00	(1.225.400,00)	99,63	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	856.000,00	520.000,00	(336.000,00)	60,74	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	856.000,00	520.000,00	(336.000,00)	60,74	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	856.000,00	520.000,00	(336.000,00)	60,74	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	100.000.000,00	99.110.600,00	(889.400,00)	99,11	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.110.600,00	(889.400,00)	99,11	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.110.600,00	(889.400,00)	99,11	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	232.247.400,00	232.247.400,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	232.247.400,00	232.247.400,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.247.400,00	232.247.400,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	131.616.270,00	128.865.950,00	(2.750.320,00)	97,91	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	41.832.000,00	41.488.200,00	(343.800,00)	99,17	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	41.832.000,00	41.488.200,00	(343.800,00)	99,17	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.832.000,00	41.488.200,00	(343.800,00)	99,17	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	47.283.000,00	45.092.750,00	(2.190.250,00)	95,36	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	47.283.000,00	45.092.750,00	(2.190.250,00)	95,36	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.283.000,00	45.092.750,00	(2.190.250,00)	95,36	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	30.681.000,00	30.495.000,00	(186.000,00)	99,39	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	30.681.000,00	30.495.000,00	(186.000,00)	99,39	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.681.000,00	30.495.000,00	(186.000,00)	99,39	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	11.820.270,00	11.790.000,00	(30.270,00)	99,74	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	11.820.270,00	11.790.000,00	(30.270,00)	99,74	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.820.270,00	11.790.000,00	(30.270,00)	99,74	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	851.588.638,00	810.346.886,00	(41.241.752,00)	95,15	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01		PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	833.800.724,00	795.630.032,00	(38.170.692,00)	95,42	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0004		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	7.443.750,00	6.350.788,00	(1.092.962,00)	85,31	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.443.750,00	6.350.788,00	(1.092.962,00)	85,31	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.443.750,00	6.350.788,00	(1.092.962,00)	85,31	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0011		PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	691.908.774,00	660.141.288,00	(31.767.486,00)	95,40	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	691.908.774,00	660.141.288,00	(31.767.486,00)	95,40	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	691.908.774,00	660.141.288,00	(31.767.486,00)	95,40	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0012		PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN RUJUKAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA	55.318.800,00	54.199.448,00	(1.119.352,00)	97,97	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	55.318.800,00	54.199.448,00	(1.119.352,00)	97,97	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.318.800,00	54.199.448,00	(1.119.352,00)	97,97	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0014		PEMANFAATAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN (CETAK/DIGITAL) OLEH MASYARAKAT	10.498.000,00	7.726.500,00	(2.771.500,00)	73,59	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	10.498.000,00	7.726.500,00	(2.771.500,00)	73,59	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.498.000,00	7.726.500,00	(2.771.500,00)	73,59	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0018		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PERPUSTAKAAN	22.155.400,00	20.848.993,00	(1.306.407,00)	94,10	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	22.155.400,00	20.848.993,00	(1.306.407,00)	94,10	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.155.400,00	20.848.993,00	(1.306.407,00)	94,10	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0020		PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK	46.476.000,00	46.363.015,00	(112.985,00)	99,75	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	15.336.000,00	15.238.015,00	(97.985,00)	99,36	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.336.000,00	15.238.015,00	(97.985,00)	99,36	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0020	5.2	BELANJA MODAL	31.140.000,00	31.125.000,00	(15.000,00)	99,95	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0020	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	31.140.000,00	31.125.000,00	(15.000,00)	99,95	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02		PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.787.914,00	14.716.854,00	(3.071.060,00)	82,73	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0007		PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL	17.787.914,00	14.716.854,00	(3.071.060,00)	82,73	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	17.787.914,00	14.716.854,00	(3.071.060,00)	82,73	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.787.914,00	14.716.854,00	(3.071.060,00)	82,73	
				JUMLAH BELANJA	6.412.157.594,00	6.199.418.071,00	(212.739.523,00)	96,68	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(6.412.157.594,00)	(6.199.418.071,00)	212.739.523,00	96,68	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.412.157.594,00)	(6.199.418.071,00)	212.739.523,00	96,68	

PEMERINTAH KAB. BELITUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	80.370.098,00	77.405.794,00	(2.964.304,00)	96,31	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	80.370.098,00	77.405.794,00	(2.964.304,00)	96,31	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01		PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.638.074,00	36.970.280,00	(1.667.794,00)	95,68	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0001		PENCIPTAAN DAN PENGGUNAAN ARSIP DINAMIS	2.486.400,00	2.122.958,00	(363.442,00)	85,38	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.486.400,00	2.122.958,00	(363.442,00)	85,38	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.486.400,00	2.122.958,00	(363.442,00)	85,38	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0002		PEMELIHARAAN DAN PENYUSUTAN ARSIP DINAMIS	2.278.941,00	2.184.000,00	(94.941,00)	95,83	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.278.941,00	2.184.000,00	(94.941,00)	95,83	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.278.941,00	2.184.000,00	(94.941,00)	95,83	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003		PENGAWASAN ARSIP DINAMIS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	33.872.733,00	32.663.322,00	(1.209.411,00)	96,42	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	33.872.733,00	32.663.322,00	(1.209.411,00)	96,42	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.872.733,00	32.663.322,00	(1.209.411,00)	96,42	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03		PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA	41.732.024,00	40.435.514,00	(1.296.510,00)	96,89	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0001		PENYEDIAAN INFORMASI, AKSES DAN LAYANAN KEARSIPAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA MELALUI JIKN	15.500.000,00	15.470.656,00	(29.344,00)	99,81	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.500.000,00	15.470.656,00	(29.344,00)	99,81	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	15.470.656,00	(29.344,00)	99,81	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0002		PEMBERDAYAAN KAPASITAS UNIT KEARSIPAN DAN LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.232.024,00	24.964.858,00	(1.267.166,00)	95,16	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	26.232.024,00	24.964.858,00	(1.267.166,00)	95,16	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.232.024,00	24.964.858,00	(1.267.166,00)	95,16	
				JUMLAH BELANJA	80.370.098,00	77.405.794,00	(2.964.304,00)	96,31	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(80.370.098,00)	(77.405.794,00)	2.964.304,00	96,31	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(80.370.098,00)	(77.405.794,00)	2.964.304,00	96,31	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : Dinas Perikanan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.25.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	507.800.000,00	743.902.000,00	236.102.000,00	146,49	
	3.25.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	507.800.000,00	743.902.000,00	236.102.000,00	146,49	
	3.25.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	507.800.000,00	743.902.000,00	236.102.000,00	146,49	
				JUMLAH PENDAPATAN	507.800.000,00	743.902.000,00	236.102.000,00	146,49	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	10.016.566.106,00	8.855.314.129,99	(1.161.251.976,01)	88,40	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.024.954.875,00	6.158.762.549,00	(866.192.326,00)	87,66	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	10.415.500,00	8.981.000,00	(1.434.500,00)	86,22	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	1.789.500,00	1.535.000,00	(254.500,00)	85,77	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.789.500,00	1.535.000,00	(254.500,00)	85,77	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.789.500,00	1.535.000,00	(254.500,00)	85,77	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1.302.500,00	1.106.500,00	(196.000,00)	84,95	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.302.500,00	1.106.500,00	(196.000,00)	84,95	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.302.500,00	1.106.500,00	(196.000,00)	84,95	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1.037.300,00	864.000,00	(173.300,00)	83,29	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.037.300,00	864.000,00	(173.300,00)	83,29	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.037.300,00	864.000,00	(173.300,00)	83,29	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.985.000,00	1.721.500,00	(263.500,00)	86,72	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.985.000,00	1.721.500,00	(263.500,00)	86,72	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.985.000,00	1.721.500,00	(263.500,00)	86,72	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	866.600,00	745.000,00	(121.600,00)	85,96	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	866.600,00	745.000,00	(121.600,00)	85,96	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	866.600,00	745.000,00	(121.600,00)	85,96	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.434.600,00	3.009.000,00	(425.600,00)	87,60	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.434.600,00	3.009.000,00	(425.600,00)	87,60	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.434.600,00	3.009.000,00	(425.600,00)	87,60	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.252.530.875,00	5.525.953.549,00	(726.577.326,00)	88,37	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.250.535.875,00	5.524.233.049,00	(726.302.826,00)	88,38	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.250.535.875,00	5.524.233.049,00	(726.302.826,00)	88,38	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.250.535.875,00	5.524.233.049,00	(726.302.826,00)	88,38	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.000.000,00	853.000,00	(147.000,00)	85,30	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	853.000,00	(147.000,00)	85,30	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	853.000,00	(147.000,00)	85,30	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	995.000,00	867.500,00	(127.500,00)	87,18	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	995.000,00	867.500,00	(127.500,00)	87,18	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	995.000,00	867.500,00	(127.500,00)	87,18	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	9.100.000,00	7.500.000,00	(1.600.000,00)	82,41	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	9.100.000,00	7.500.000,00	(1.600.000,00)	82,41	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	9.100.000,00	7.500.000,00	(1.600.000,00)	82,41	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	7.500.000,00	(1.600.000,00)	82,41	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	299.638.700,00	263.838.283,00	(35.800.417,00)	88,05	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.758.300,00	9.155.500,00	(602.800,00)	93,82	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.758.300,00	9.155.500,00	(602.800,00)	93,82	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.758.300,00	9.155.500,00	(602.800,00)	93,82	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	18.157.300,00	17.120.500,00	(1.036.800,00)	94,28	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.157.300,00	17.120.500,00	(1.036.800,00)	94,28	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.157.300,00	17.120.500,00	(1.036.800,00)	94,28	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.715.100,00	3.691.000,00	(24.100,00)	99,35	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.715.100,00	3.691.000,00	(24.100,00)	99,35	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.715.100,00	3.691.000,00	(24.100,00)	99,35	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	109.065.000,00	99.647.900,00	(9.417.100,00)	91,36	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	109.065.000,00	99.647.900,00	(9.417.100,00)	91,36	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.065.000,00	99.647.900,00	(9.417.100,00)	91,36	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	28.027.000,00	24.182.100,00	(3.844.900,00)	86,28	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	28.027.000,00	24.182.100,00	(3.844.900,00)	86,28	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.027.000,00	24.182.100,00	(3.844.900,00)	86,28	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.416.000,00	2.375.000,00	(41.000,00)	98,30	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.416.000,00	2.375.000,00	(41.000,00)	98,30	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.416.000,00	2.375.000,00	(41.000,00)	98,30	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	128.500.000,00	107.666.283,00	(20.833.717,00)	83,78	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	128.500.000,00	107.666.283,00	(20.833.717,00)	83,78	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.500.000,00	107.666.283,00	(20.833.717,00)	83,78	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	268.496.800,00	174.042.240,00	(94.454.560,00)	64,82	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	784.000,00	116.000,00	(668.000,00)	14,79	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	784.000,00	116.000,00	(668.000,00)	14,79	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	784.000,00	116.000,00	(668.000,00)	14,79	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	135.000.000,00	96.569.840,00	(38.430.160,00)	71,53	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	135.000.000,00	96.569.840,00	(38.430.160,00)	71,53	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	96.569.840,00	(38.430.160,00)	71,53	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	132.712.800,00	77.356.400,00	(55.356.400,00)	58,28	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	132.712.800,00	77.356.400,00	(55.356.400,00)	58,28	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.712.800,00	77.356.400,00	(55.356.400,00)	58,28	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	184.773.000,00	178.447.477,00	(6.325.523,00)	96,57	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	47.138.000,00	42.947.800,00	(4.190.200,00)	91,11	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	47.138.000,00	42.947.800,00	(4.190.200,00)	91,11	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.138.000,00	42.947.800,00	(4.190.200,00)	91,11	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	21.058.000,00	19.244.900,00	(1.813.100,00)	91,38	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.058.000,00	19.244.900,00	(1.813.100,00)	91,38	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.058.000,00	19.244.900,00	(1.813.100,00)	91,38	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0003		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR	27.500.000,00	27.470.000,00	(30.000,00)	99,89	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0003	5.1	BELANJA OPERASI	27.500.000,00	27.470.000,00	(30.000,00)	99,89	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	27.470.000,00	(30.000,00)	99,89	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	31.690.000,00	31.495.000,00	(195.000,00)	99,38	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	31.690.000,00	31.495.000,00	(195.000,00)	99,38	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.690.000,00	31.495.000,00	(195.000,00)	99,38	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	57.387.000,00	57.289.777,00	(97.223,00)	99,83	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	57.387.000,00	57.289.777,00	(97.223,00)	99,83	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.387.000,00	57.289.777,00	(97.223,00)	99,83	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	891.879.180,00	803.847.338,99	(88.031.841,01)	90,12	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01		PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA	767.628.750,00	698.919.548,99	(68.709.201,01)	91,04	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0001		PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA IKAN	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0002		PENYEDIAAN PRASARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP	352.712.800,00	298.849.293,99	(53.863.506,01)	84,72	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	352.712.800,00	298.849.293,99	(53.863.506,01)	84,72	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	352.712.800,00	298.849.293,99	(53.863.506,01)	84,72	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0004		PENYEDIAAN SARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP	244.915.950,00	230.070.255,00	(14.845.695,00)	93,93	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	244.915.950,00	230.070.255,00	(14.845.695,00)	93,93	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0004	5.1.05	Belanja Hibah	244.915.950,00	230.070.255,00	(14.845.695,00)	93,93	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02		PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	120.434.430,00	102.111.790,00	(18.322.640,00)	84,78	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001		PENGEMBANGAN KAPASITAS NELAYAN KECIL	81.018.540,00	71.550.600,00	(9.467.940,00)	88,31	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	81.018.540,00	71.550.600,00	(9.467.940,00)	88,31	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	0,00	(750.000,00)	0,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001	5.1.05	Belanja Hibah	80.268.540,00	71.550.600,00	(8.717.940,00)	89,13	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0002		PELAKSANAAN FASILITASI PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN NELAYAN KECIL	39.415.890,00	30.561.190,00	(8.854.700,00)	77,53	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	39.415.890,00	30.561.190,00	(8.854.700,00)	77,53	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.415.890,00	30.561.190,00	(8.854.700,00)	77,53	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.04		PENERBITAN TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.816.000,00	2.816.000,00	(1.000.000,00)	73,79	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.04.0002		PELAYANAN PENERBITAN TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT	3.816.000,00	2.816.000,00	(1.000.000,00)	73,79	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.816.000,00	2.816.000,00	(1.000.000,00)	73,79	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.816.000,00	2.816.000,00	(1.000.000,00)	73,79	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	740.035.870,00	614.269.464,00	(125.766.406,00)	83,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02		PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL	544.258.700,00	440.571.564,00	(103.687.136,00)	80,94	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0001		PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMBUDI DAYA IKAN KECIL	16.873.020,00	9.324.556,00	(7.548.464,00)	55,26	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.873.020,00	9.324.556,00	(7.548.464,00)	55,26	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.873.020,00	9.324.556,00	(7.548.464,00)	55,26	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0004		PEMBERIAN PENDAMPINGAN, KEMUDAHANAN AKSES ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI, SERTA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	527.385.680,00	431.247.008,00	(96.138.672,00)	81,77	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	527.385.680,00	431.247.008,00	(96.138.672,00)	81,77	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	527.385.680,00	431.247.008,00	(96.138.672,00)	81,77	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.03		PENERBITAN TANDA DAFTAR BAGI PEMBUDI DAYA IKAN KECIL (TDPIK) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.951.500,00	2.794.000,00	(157.500,00)	94,66	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.03.0002		PELAYANAN PENERBITAN TANDA DAFTAR BAGI PEMBUDI DAYAAN IKAN KECIL (TDPIK) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.951.500,00	2.794.000,00	(157.500,00)	94,66	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.951.500,00	2.794.000,00	(157.500,00)	94,66	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.951.500,00	2.794.000,00	(157.500,00)	94,66	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04		PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	192.825.670,00	170.903.900,00	(21.921.770,00)	88,63	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002		PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	116.692.080,00	97.115.900,00	(19.576.180,00)	83,22	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	116.692.080,00	97.115.900,00	(19.576.180,00)	83,22	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.1.05	Belanja Hibah	116.692.080,00	97.115.900,00	(19.576.180,00)	83,22	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0009		PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	76.133.590,00	73.788.000,00	(2.345.590,00)	96,91	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0009	5.1	BELANJA OPERASI	76.133.590,00	73.788.000,00	(2.345.590,00)	96,91	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0009	5.1.05	Belanja Hibah	76.133.590,00	73.788.000,00	(2.345.590,00)	96,91	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	373.688.489,00	363.275.620,00	(10.412.869,00)	97,21	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.2.01		PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM KABUPATEN/KOTA	373.688.489,00	363.275.620,00	(10.412.869,00)	97,21	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.2.01.0007		PENGAWASAN USAHA PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU USAHA PENGANGKUTAN IKAN SESUAI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	373.688.489,00	363.275.620,00	(10.412.869,00)	97,21	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	373.688.489,00	363.275.620,00	(10.412.869,00)	97,21	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	373.688.489,00	363.275.620,00	(10.412.869,00)	97,21	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	986.007.692,00	915.159.158,00	(70.848.534,00)	92,81	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.01		PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA SKALA MIKRO DAN KECIL	29.221.200,00	29.039.200,00	(182.000,00)	99,37	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.01.0005		PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN SKALA USAHA DAN RISIKO	29.221.200,00	29.039.200,00	(182.000,00)	99,37	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	29.221.200,00	29.039.200,00	(182.000,00)	99,37	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.221.200,00	29.039.200,00	(182.000,00)	99,37	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02		PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL	900.193.354,00	831.970.470,00	(68.222.884,00)	92,42	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02.0002		PEMBINAAN TERHADAP PENERAPAN PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA PADA USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN SESUAI SKALA USAHA DAN RISIKO	900.193.354,00	831.970.470,00	(68.222.884,00)	92,42	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	769.893.354,00	705.430.470,00	(64.462.884,00)	91,62	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	769.893.354,00	705.430.470,00	(64.462.884,00)	91,62	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	130.300.000,00	126.540.000,00	(3.760.000,00)	97,11	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.300.000,00	126.540.000,00	(3.760.000,00)	97,11	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03		PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA	56.593.138,00	54.149.488,00	(2.443.650,00)	95,68	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001		PENINGKATAN KETERSEDIAAN IKAN UNTUK KONSUMSI DAN USAHA PENGOLAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.505.608,00	7.418.488,00	(87.120,00)	98,83	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.505.608,00	7.418.488,00	(87.120,00)	98,83	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.505.608,00	7.418.488,00	(87.120,00)	98,83	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0002		PEMBERIAN FASILITAS BAGI PELAKU USAHA PERIKANAN SKALA MIKRO DAN KECIL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.087.530,00	46.731.000,00	(2.356.530,00)	95,19	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	49.087.530,00	46.731.000,00	(2.356.530,00)	95,19	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0002	5.1.05	Belanja Hibah	49.087.530,00	46.731.000,00	(2.356.530,00)	95,19	
				JUMLAH BELANJA	10.016.566.106,00	8.855.314.129,99	(1.161.251.976,01)	88,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.508.766.106,00)	(8.111.412.129,99)	1.397.353.976,01	85,30	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : Dinas Pariwisata

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.26.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.687.910.000,00	2.198.544.028,00	510.634.028,00	130,25	
	3.26.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.687.910.000,00	2.198.544.028,00	510.634.028,00	130,25	
	3.26.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.687.910.000,00	2.188.380.345,00	500.470.345,00	129,65	
	3.26.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	10.163.683,00	10.163.683,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.687.910.000,00	2.198.544.028,00	510.634.028,00	130,25	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	13.864.253.138,00	11.771.444.546,00	(2.092.808.592,00)	84,90	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.681.730.609,00	5.553.649.329,00	(1.128.081.280,00)	83,11	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	10.019.370,00	8.298.000,00	(1.721.370,00)	82,81	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	3.386.970,00	2.857.000,00	(529.970,00)	84,35	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.386.970,00	2.857.000,00	(529.970,00)	84,35	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.386.970,00	2.857.000,00	(529.970,00)	84,35	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	810.000,00	630.000,00	(180.000,00)	77,77	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	810.000,00	630.000,00	(180.000,00)	77,77	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	810.000,00	630.000,00	(180.000,00)	77,77	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	810.000,00	675.000,00	(135.000,00)	83,33	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	810.000,00	675.000,00	(135.000,00)	83,33	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	810.000,00	675.000,00	(135.000,00)	83,33	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	810.000,00	665.000,00	(145.000,00)	82,09	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	810.000,00	665.000,00	(145.000,00)	82,09	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	810.000,00	665.000,00	(145.000,00)	82,09	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	810.000,00	654.000,00	(156.000,00)	80,74	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	810.000,00	654.000,00	(156.000,00)	80,74	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	810.000,00	654.000,00	(156.000,00)	80,74	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.392.400,00	2.817.000,00	(575.400,00)	83,03	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.392.400,00	2.817.000,00	(575.400,00)	83,03	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.392.400,00	2.817.000,00	(575.400,00)	83,03	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.649.029.360,00	4.631.707.491,00	(1.017.321.869,00)	81,99	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.642.551.660,00	4.626.228.491,00	(1.016.323.169,00)	81,98	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.642.551.660,00	4.626.228.491,00	(1.016.323.169,00)	81,98	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.642.551.660,00	4.626.228.491,00	(1.016.323.169,00)	81,98	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.110.000,00	932.500,00	(177.500,00)	84,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.110.000,00	932.500,00	(177.500,00)	84,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.110.000,00	932.500,00	(177.500,00)	84,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	5.367.700,00	4.546.500,00	(821.200,00)	84,70	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.367.700,00	4.546.500,00	(821.200,00)	84,70	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.367.700,00	4.546.500,00	(821.200,00)	84,70	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	314.187.679,00	268.806.286,00	(45.381.393,00)	85,55	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	14.021.520,00	8.773.366,00	(5.248.154,00)	62,57	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.021.520,00	8.773.366,00	(5.248.154,00)	62,57	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.021.520,00	8.773.366,00	(5.248.154,00)	62,57	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	53.055.447,00	40.870.522,00	(12.184.925,00)	77,03	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	53.055.447,00	40.870.522,00	(12.184.925,00)	77,03	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.055.447,00	40.870.522,00	(12.184.925,00)	77,03	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	15.875.997,00	12.251.633,00	(3.624.364,00)	77,17	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	15.875.997,00	12.251.633,00	(3.624.364,00)	77,17	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.875.997,00	12.251.633,00	(3.624.364,00)	77,17	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	139.117.215,00	123.998.550,00	(15.118.665,00)	89,13	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	139.117.215,00	123.998.550,00	(15.118.665,00)	89,13	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.117.215,00	123.998.550,00	(15.118.665,00)	89,13	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	16.275.500,00	13.106.438,00	(3.169.062,00)	80,52	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16.275.500,00	13.106.438,00	(3.169.062,00)	80,52	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.275.500,00	13.106.438,00	(3.169.062,00)	80,52	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	13.280.000,00	11.520.000,00	(1.760.000,00)	86,74	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.280.000,00	11.520.000,00	(1.760.000,00)	86,74	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.280.000,00	11.520.000,00	(1.760.000,00)	86,74	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	62.562.000,00	58.285.777,00	(4.276.223,00)	93,16	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	62.562.000,00	58.285.777,00	(4.276.223,00)	93,16	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.562.000,00	58.285.777,00	(4.276.223,00)	93,16	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	371.378.200,00	328.940.342,00	(42.437.858,00)	88,57	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.534.000,00	369.800,00	(1.164.200,00)	24,10	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.534.000,00	369.800,00	(1.164.200,00)	24,10	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.534.000,00	369.800,00	(1.164.200,00)	24,10	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	170.775.000,00	129.634.992,00	(41.140.008,00)	75,90	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	170.775.000,00	129.634.992,00	(41.140.008,00)	75,90	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.775.000,00	129.634.992,00	(41.140.008,00)	75,90	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	199.069.200,00	198.935.550,00	(133.650,00)	99,93	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	199.069.200,00	198.935.550,00	(133.650,00)	99,93	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.069.200,00	198.935.550,00	(133.650,00)	99,93	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	337.116.000,00	315.897.210,00	(21.218.790,00)	93,70	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	74.448.000,00	65.738.300,00	(8.709.700,00)	88,30	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	74.448.000,00	65.738.300,00	(8.709.700,00)	88,30	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.448.000,00	65.738.300,00	(8.709.700,00)	88,30	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	111.708.000,00	109.798.000,00	(1.910.000,00)	98,29	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	111.708.000,00	109.798.000,00	(1.910.000,00)	98,29	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.708.000,00	109.798.000,00	(1.910.000,00)	98,29	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	32.460.000,00	27.440.000,00	(5.020.000,00)	84,53	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	32.460.000,00	27.440.000,00	(5.020.000,00)	84,53	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.460.000,00	27.440.000,00	(5.020.000,00)	84,53	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	118.500.000,00	112.920.910,00	(5.579.090,00)	95,29	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	118.500.000,00	112.920.910,00	(5.579.090,00)	95,29	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.500.000,00	112.920.910,00	(5.579.090,00)	95,29	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4.248.762.913,00	3.876.057.307,00	(372.705.606,00)	91,22	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02		PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	428.257.822,00	298.840.127,00	(129.417.695,00)	69,78	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.0007		PENERAPAN DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN DALAM PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	428.257.822,00	298.840.127,00	(129.417.695,00)	69,78	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	428.257.822,00	298.840.127,00	(129.417.695,00)	69,78	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	428.257.822,00	298.840.127,00	(129.417.695,00)	69,78	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03		PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	3.820.505.091,00	3.577.217.180,00	(243.287.911,00)	93,63	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0002		PERENCANAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004		PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	3.720.505.091,00	3.577.217.180,00	(143.287.911,00)	96,14	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.697.840.001,00	3.555.326.810,00	(142.513.191,00)	96,14	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.697.840.001,00	3.555.326.810,00	(142.513.191,00)	96,14	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004	5.2	BELANJA MODAL	22.665.090,00	21.890.370,00	(774.720,00)	96,58	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.665.090,00	21.890.370,00	(774.720,00)	96,58	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.416.307.052,00	1.848.499.068,00	(567.807.984,00)	76,50	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01		PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	2.416.307.052,00	1.848.499.068,00	(567.807.984,00)	76,50	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0003		PENYEDIAAN DATA DAN PENYEBARAN INFORMASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA, BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI	193.600.000,00	15.700.000,00	(177.900.000,00)	8,10	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	193.600.000,00	15.700.000,00	(177.900.000,00)	8,10	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.600.000,00	15.700.000,00	(177.900.000,00)	8,10	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0004		PENINGKATAN KERJA SAMA DAN KEMITRAAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI	316.167.973,00	277.619.126,00	(38.548.847,00)	87,80	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	316.167.973,00	277.619.126,00	(38.548.847,00)	87,80	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.167.973,00	277.619.126,00	(38.548.847,00)	87,80	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0006		FASILITASI KEGIATAN PEMASARAN PARIWISATA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	878.290.556,00	656.957.866,00	(221.332.690,00)	74,79	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	878.290.556,00	656.957.866,00	(221.332.690,00)	74,79	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	878.290.556,00	656.957.866,00	(221.332.690,00)	74,79	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0007		PENGUATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK, DAN MEDIA LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI	1.028.248.523,00	898.222.076,00	(130.026.447,00)	87,35	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	923.194.793,00	793.306.076,00	(129.888.717,00)	85,93	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	923.194.793,00	793.306.076,00	(129.888.717,00)	85,93	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	105.053.730,00	104.916.000,00	(137.730,00)	99,86	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105.053.730,00	104.916.000,00	(137.730,00)	99,86	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	517.452.564,00	493.238.842,00	(24.213.722,00)	95,32	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01		PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR	517.452.564,00	493.238.842,00	(24.213.722,00)	95,32	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0005		FASILITASI PROSES KREASI, PRODUKSI, DISTRIBUSI KONSUMSI DAN KONSERVASI EKONOMI KREATIF	387.702.656,00	384.021.000,00	(3.681.656,00)	99,05	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	387.702.656,00	384.021.000,00	(3.681.656,00)	99,05	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	387.702.656,00	384.021.000,00	(3.681.656,00)	99,05	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0009		PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT UNTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA	129.749.908,00	109.217.842,00	(20.532.066,00)	84,17	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	129.749.908,00	109.217.842,00	(20.532.066,00)	84,17	
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.749.908,00	109.217.842,00	(20.532.066,00)	84,17	
				JUMLAH BELANJA	13.864.253.138,00	11.771.444.546,00	(2.092.808.592,00)	84,90	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(12.176.343.138,00)	(9.572.900.518,00)	2.603.442.620,00	78,61	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(12.176.343.138,00)	(9.572.900.518,00)	2.603.442.620,00	78,61	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Sekretariat Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	4.01.2.10.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	169.100.000,00	207.448.000,00	38.348.000,00	122,67	
	4.01.2.10.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	169.100.000,00	207.448.000,00	38.348.000,00	122,67	
	4.01.2.10.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	169.100.000,00	191.234.000,00	22.134.000,00	113,08	
	4.01.2.10.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	16.214.000,00	16.214.000,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	169.100.000,00	207.448.000,00	38.348.000,00	122,67	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	48.448.702.762,00	43.416.106.981,00	(5.032.595.781,00)	89,61	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.896.688.437,00	31.492.407.675,00	(4.404.280.762,00)	87,73	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	43.071.400,00	42.169.300,00	(902.100,00)	97,90	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	16.274.200,00	15.877.600,00	(396.600,00)	97,56	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.274.200,00	15.877.600,00	(396.600,00)	97,56	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.274.200,00	15.877.600,00	(396.600,00)	97,56	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	3.366.000,00	3.364.500,00	(1.500,00)	99,95	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.366.000,00	3.364.500,00	(1.500,00)	99,95	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.366.000,00	3.364.500,00	(1.500,00)	99,95	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	3.231.800,00	3.184.500,00	(47.300,00)	98,53	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.231.800,00	3.184.500,00	(47.300,00)	98,53	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.231.800,00	3.184.500,00	(47.300,00)	98,53	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	4.394.200,00	4.170.600,00	(223.600,00)	94,91	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.394.200,00	4.170.600,00	(223.600,00)	94,91	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.394.200,00	4.170.600,00	(223.600,00)	94,91	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	4.688.600,00	4.684.100,00	(4.500,00)	99,90	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.688.600,00	4.684.100,00	(4.500,00)	99,90	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.688.600,00	4.684.100,00	(4.500,00)	99,90	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	11.116.600,00	10.888.000,00	(228.600,00)	97,94	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	11.116.600,00	10.888.000,00	(228.600,00)	97,94	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.116.600,00	10.888.000,00	(228.600,00)	97,94	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	20.797.043.012,00	17.925.953.148,00	(2.871.089.864,00)	86,19	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	20.772.298.382,00	17.904.754.235,00	(2.867.544.147,00)	86,19	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.772.298.382,00	17.904.754.235,00	(2.867.544.147,00)	86,19	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	20.772.298.382,00	17.904.754.235,00	(2.867.544.147,00)	86,19	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	24.744.630,00	21.198.913,00	(3.545.717,00)	85,67	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	24.744.630,00	21.198.913,00	(3.545.717,00)	85,67	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.744.630,00	21.198.913,00	(3.545.717,00)	85,67	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	210.000.000,00	78.764.606,00	(131.235.394,00)	37,50	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	210.000.000,00	78.764.606,00	(131.235.394,00)	37,50	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	210.000.000,00	78.764.606,00	(131.235.394,00)	37,50	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	78.764.606,00	(131.235.394,00)	37,50	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	3.288.707.449,00	3.114.438.679,00	(174.268.770,00)	94,70	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	150.000.000,00	149.553.000,00	(447.000,00)	99,70	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	149.553.000,00	(447.000,00)	99,70	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	149.553.000,00	(447.000,00)	99,70	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	251.657.600,00	216.453.350,00	(35.204.250,00)	86,01	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	248.835.980,00	213.753.350,00	(35.082.630,00)	85,90	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.835.980,00	213.753.350,00	(35.082.630,00)	85,90	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	2.821.620,00	2.700.000,00	(121.620,00)	95,68	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.821.620,00	2.700.000,00	(121.620,00)	95,68	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	180.000.000,00	179.967.000,00	(33.000,00)	99,98	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	180.000.000,00	179.967.000,00	(33.000,00)	99,98	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	179.967.000,00	(33.000,00)	99,98	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	1.353.124.000,00	1.246.078.520,00	(107.045.480,00)	92,08	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.353.124.000,00	1.246.078.520,00	(107.045.480,00)	92,08	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.353.124.000,00	1.246.078.520,00	(107.045.480,00)	92,08	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	50.229.900,00	18.938.000,00	(31.291.900,00)	37,70	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	50.229.900,00	18.938.000,00	(31.291.900,00)	37,70	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.229.900,00	18.938.000,00	(31.291.900,00)	37,70	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	100.000.000,00	99.797.500,00	(202.500,00)	99,79	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.797.500,00	(202.500,00)	99,79	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.797.500,00	(202.500,00)	99,79	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.203.695.949,00	1.203.651.309,00	(44.640,00)	99,99	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.203.695.949,00	1.203.651.309,00	(44.640,00)	99,99	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.203.695.949,00	1.203.651.309,00	(44.640,00)	99,99	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	10.000.000,00	9.500.000,00	(500.000,00)	95,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	10.000.000,00	9.500.000,00	(500.000,00)	95,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	9.500.000,00	(500.000,00)	95,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	9.500.000,00	(500.000,00)	95,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.676.443.200,00	2.231.901.283,00	(444.541.917,00)	83,39	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	19.000.000,00	15.391.760,00	(3.608.240,00)	81,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.000.000,00	15.391.760,00	(3.608.240,00)	81,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	15.391.760,00	(3.608.240,00)	81,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.529.000.000,00	1.213.406.598,00	(315.593.402,00)	79,35	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.529.000.000,00	1.213.406.598,00	(315.593.402,00)	79,35	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.529.000.000,00	1.213.406.598,00	(315.593.402,00)	79,35	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.128.443.200,00	1.003.102.925,00	(125.340.275,00)	88,89	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.128.443.200,00	1.003.102.925,00	(125.340.275,00)	88,89	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.128.443.200,00	1.003.102.925,00	(125.340.275,00)	88,89	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.552.112.000,00	3.288.084.507,00	(264.027.493,00)	92,56	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	49.670.000,00	38.426.300,00	(11.243.700,00)	77,36	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	49.670.000,00	38.426.300,00	(11.243.700,00)	77,36	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.670.000,00	38.426.300,00	(11.243.700,00)	77,36	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	744.159.000,00	674.218.125,00	(69.940.875,00)	90,60	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	744.159.000,00	674.218.125,00	(69.940.875,00)	90,60	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	744.159.000,00	674.218.125,00	(69.940.875,00)	90,60	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN MEBEL	70.000.000,00	65.760.000,00	(4.240.000,00)	93,94	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	65.760.000,00	(4.240.000,00)	93,94	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	65.760.000,00	(4.240.000,00)	93,94	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	600.000.000,00	597.692.000,00	(2.308.000,00)	99,61	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000,00	597.692.000,00	(2.308.000,00)	99,61	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	597.692.000,00	(2.308.000,00)	99,61	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	2.088.283.000,00	1.911.988.082,00	(176.294.918,00)	91,55	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.088.283.000,00	1.911.988.082,00	(176.294.918,00)	91,55	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.088.283.000,00	1.911.988.082,00	(176.294.918,00)	91,55	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.11		ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	1.741.413.794,00	1.517.483.659,00	(223.930.135,00)	87,14	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	928.413.794,00	765.931.409,00	(162.482.385,00)	82,49	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001	5.1	BELANJA OPERASI	928.413.794,00	765.931.409,00	(162.482.385,00)	82,49	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	928.413.794,00	765.931.409,00	(162.482.385,00)	82,49	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0002		PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	106.500.000,00	106.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0002	5.1	BELANJA OPERASI	106.500.000,00	106.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.500.000,00	106.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0003		PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	106.500.000,00	45.052.250,00	(61.447.750,00)	42,30	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0003	5.1	BELANJA OPERASI	106.500.000,00	45.052.250,00	(61.447.750,00)	42,30	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.500.000,00	45.052.250,00	(61.447.750,00)	42,30	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0004		PENYEDIAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0004	5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.12		FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	1.797.793.200,00	1.655.093.940,00	(142.699.260,00)	92,06	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH	831.004.600,00	785.654.890,00	(45.349.710,00)	94,54	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001	5.1	BELANJA OPERASI	783.428.600,00	738.507.640,00	(44.920.960,00)	94,26	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	783.428.600,00	738.507.640,00	(44.920.960,00)	94,26	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001	5.2	BELANJA MODAL	47.576.000,00	47.147.250,00	(428.750,00)	99,09	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.576.000,00	47.147.250,00	(428.750,00)	99,09	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH	867.254.000,00	770.052.950,00	(97.201.050,00)	88,79	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002	5.1	BELANJA OPERASI	685.744.000,00	596.743.100,00	(89.000.900,00)	87,02	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	685.744.000,00	596.743.100,00	(89.000.900,00)	87,02	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002	5.2	BELANJA MODAL	181.510.000,00	173.309.850,00	(8.200.150,00)	95,48	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	171.520.000,00	163.874.850,00	(7.645.150,00)	95,54	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.990.000,00	9.435.000,00	(555.000,00)	94,44	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0003		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH	99.534.600,00	99.386.100,00	(148.500,00)	99,85	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0003	5.1	BELANJA OPERASI	99.534.600,00	99.386.100,00	(148.500,00)	99,85	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.534.600,00	99.386.100,00	(148.500,00)	99,85	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.13		PENATAAN ORGANISASI	208.482.400,00	150.967.564,00	(57.514.836,00)	72,41	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0001		PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	52.135.100,00	51.886.264,00	(248.836,00)	99,52	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0001	5.1	BELANJA OPERASI	52.135.100,00	51.886.264,00	(248.836,00)	99,52	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.135.100,00	51.886.264,00	(248.836,00)	99,52	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002		FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	39.877.900,00	25.266.300,00	(14.611.600,00)	63,35	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002	5.1	BELANJA OPERASI	39.877.900,00	25.266.300,00	(14.611.600,00)	63,35	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.877.900,00	25.266.300,00	(14.611.600,00)	63,35	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0003		PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	50.713.500,00	14.956.500,00	(35.757.000,00)	29,49	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0003	5.1	BELANJA OPERASI	50.713.500,00	14.956.500,00	(35.757.000,00)	29,49	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.713.500,00	14.956.500,00	(35.757.000,00)	29,49	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0004		MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	26.122.900,00	22.969.900,00	(3.153.000,00)	87,93	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0004	5.1	BELANJA OPERASI	26.122.900,00	22.969.900,00	(3.153.000,00)	87,93	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.122.900,00	22.969.900,00	(3.153.000,00)	87,93	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	39.633.000,00	35.888.600,00	(3.744.400,00)	90,55	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0005	5.1	BELANJA OPERASI	39.633.000,00	35.888.600,00	(3.744.400,00)	90,55	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.633.000,00	35.888.600,00	(3.744.400,00)	90,55	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.14		PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	1.571.621.982,00	1.478.050.989,00	(93.570.993,00)	94,04	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0001		FASILITASI KEPROTOKOLAN	512.156.000,00	481.918.681,00	(30.237.319,00)	94,09	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0001	5.1	BELANJA OPERASI	512.156.000,00	481.918.681,00	(30.237.319,00)	94,09	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	512.156.000,00	481.918.681,00	(30.237.319,00)	94,09	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0002		FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN	493.927.982,00	484.089.718,00	(9.838.264,00)	98,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0002	5.1	BELANJA OPERASI	493.927.982,00	484.089.718,00	(9.838.264,00)	98,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	493.927.982,00	484.089.718,00	(9.838.264,00)	98,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0003		PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN	565.538.000,00	512.042.590,00	(53.495.410,00)	90,54	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0003	5.1	BELANJA OPERASI	565.538.000,00	512.042.590,00	(53.495.410,00)	90,54	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	565.538.000,00	512.042.590,00	(53.495.410,00)	90,54	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.1.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11.756.497.550,00	11.376.369.636,00	(380.127.914,00)	96,76	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.02.2.01		ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	626.698.600,00	538.056.014,00	(88.642.586,00)	85,85	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0001		PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	481.431.500,00	396.066.769,00	(85.364.731,00)	82,26	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	481.431.500,00	396.066.769,00	(85.364.731,00)	82,26	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.431.500,00	71.066.769,00	(85.364.731,00)	45,42	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002		PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	35.899.200,00	34.660.090,00	(1.239.110,00)	96,54	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	35.899.200,00	34.660.090,00	(1.239.110,00)	96,54	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.899.200,00	34.660.090,00	(1.239.110,00)	96,54	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003		FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH	109.367.900,00	107.329.155,00	(2.038.745,00)	98,13	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	109.367.900,00	107.329.155,00	(2.038.745,00)	98,13	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.367.900,00	107.329.155,00	(2.038.745,00)	98,13	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.02.2.02		PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	10.731.888.350,00	10.470.408.748,00	(261.479.602,00)	97,56	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001		FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL	4.621.330.600,00	4.420.449.633,00	(200.880.967,00)	95,65	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.621.330.600,00	4.420.449.633,00	(200.880.967,00)	95,65	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.571.330.600,00	2.388.485.633,00	(182.844.967,00)	92,88	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001	5.1.05	Belanja Hibah	2.050.000.000,00	2.031.964.000,00	(18.036.000,00)	99,12	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0002		PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL	4.576.009.050,00	4.516.047.779,00	(59.961.271,00)	98,68	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.576.009.050,00	4.516.047.779,00	(59.961.271,00)	98,68	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.009.050,00	35.896.050,00	(113.000,00)	99,68	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0002	5.1.05	Belanja Hibah	4.540.000.000,00	4.480.151.729,00	(59.848.271,00)	98,68	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	1.534.548.700,00	1.533.911.336,00	(637.364,00)	99,95	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.534.548.700,00	1.533.911.336,00	(637.364,00)	99,95	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.534.548.700,00	1.533.911.336,00	(637.364,00)	99,95	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.02.2.03		FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	381.257.300,00	353.024.744,00	(28.232.556,00)	92,59	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH	74.157.300,00	73.705.855,00	(451.445,00)	99,39	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	74.157.300,00	73.705.855,00	(451.445,00)	99,39	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.157.300,00	73.705.855,00	(451.445,00)	99,39	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0002		FASILITASI BANTUAN HUKUM	267.163.100,00	240.454.159,00	(26.708.941,00)	90,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	267.163.100,00	240.454.159,00	(26.708.941,00)	90,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.163.100,00	240.454.159,00	(26.708.941,00)	90,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0003		PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM	39.936.900,00	38.864.730,00	(1.072.170,00)	97,31	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	39.936.900,00	38.864.730,00	(1.072.170,00)	97,31	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.936.900,00	38.864.730,00	(1.072.170,00)	97,31	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.02.2.04		FASILITASI KERJA SAMA DAERAH	16.653.300,00	14.880.130,00	(1.773.170,00)	89,35	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0001		FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI	16.653.300,00	14.880.130,00	(1.773.170,00)	89,35	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.653.300,00	14.880.130,00	(1.773.170,00)	89,35	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.653.300,00	14.880.130,00	(1.773.170,00)	89,35	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.1.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	795.516.775,00	547.329.670,00	(248.187.105,00)	68,80	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.03.2.01		PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	211.893.100,00	136.552.513,00	(75.340.587,00)	64,44	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD	185.081.400,00	117.201.813,00	(67.879.587,00)	63,32	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	185.081.400,00	117.201.813,00	(67.879.587,00)	63,32	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.081.400,00	117.201.813,00	(67.879.587,00)	63,32	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0002		PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN	21.389.600,00	15.917.800,00	(5.471.800,00)	74,41	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.389.600,00	15.917.800,00	(5.471.800,00)	74,41	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.389.600,00	15.917.800,00	(5.471.800,00)	74,41	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0003		PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL	5.422.100,00	3.432.900,00	(1.989.200,00)	63,31	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.422.100,00	3.432.900,00	(1.989.200,00)	63,31	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.422.100,00	3.432.900,00	(1.989.200,00)	63,31	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.03.2.02		PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	98.344.800,00	84.286.124,00	(14.058.676,00)	85,70	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN	6.000.000,00	4.558.500,00	(1.441.500,00)	75,97	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	4.558.500,00	(1.441.500,00)	75,97	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	4.558.500,00	(1.441.500,00)	75,97	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002		PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN	40.006.800,00	28.574.000,00	(11.432.800,00)	71,42	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	40.006.800,00	28.574.000,00	(11.432.800,00)	71,42	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.006.800,00	28.574.000,00	(11.432.800,00)	71,42	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0003		PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	52.338.000,00	51.153.624,00	(1.184.376,00)	97,73	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	52.338.000,00	51.153.624,00	(1.184.376,00)	97,73	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.338.000,00	51.153.624,00	(1.184.376,00)	97,73	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.03.2.03		PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	460.098.475,00	312.641.233,00	(147.457.242,00)	67,95	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001		PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	136.250.300,00	113.191.425,00	(23.058.875,00)	83,07	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	136.250.300,00	113.191.425,00	(23.058.875,00)	83,07	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.250.300,00	113.191.425,00	(23.058.875,00)	83,07	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0002		PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	237.978.575,00	168.680.008,00	(69.298.567,00)	70,88	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	237.978.575,00	168.680.008,00	(69.298.567,00)	70,88	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.978.575,00	168.680.008,00	(69.298.567,00)	70,88	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003		PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	85.869.600,00	30.769.800,00	(55.099.800,00)	35,83	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	85.869.600,00	30.769.800,00	(55.099.800,00)	35,83	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.869.600,00	30.769.800,00	(55.099.800,00)	35,83	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.03.2.04		PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	25.180.400,00	13.849.800,00	(11.330.600,00)	55,00	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN	11.659.900,00	5.849.500,00	(5.810.400,00)	50,16	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.659.900,00	5.849.500,00	(5.810.400,00)	50,16	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.659.900,00	5.849.500,00	(5.810.400,00)	50,16	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0003		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN ENERGI DAN AIR	13.520.500,00	8.000.300,00	(5.520.200,00)	59,17	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	13.520.500,00	8.000.300,00	(5.520.200,00)	59,17	
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.520.500,00	8.000.300,00	(5.520.200,00)	59,17	
				JUMLAH BELANJA	48.448.702.762,00	43.416.106.981,00	(5.032.595.781,00)	89,61	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(48.279.602.762,00)	(43.208.658.981,00)	5.070.943.781,00	89,49	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(48.279.602.762,00)	(43.208.658.981,00)	5.070.943.781,00	89,49	

PEMERINTAH KAB. BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Organisasi : Sekretariat Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	4.01.2.10.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	169.100.000,00	207.448.000,00	38.348.000,00	122,67	
	4.01.2.10.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	169.100.000,00	207.448.000,00	38.348.000,00	122,67	
	4.01.2.10.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	169.100.000,00	191.234.000,00	22.134.000,00	113,08	
	4.01.2.10.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	16.214.000,00	16.214.000,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	169.100.000,00	207.448.000,00	38.348.000,00	122,67	
2.10	4.01.2.10.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	23.322.800,00	21.335.881,00	(1.986.919,00)	91,48	
2.10	4.01.2.10.0.00.01.0000	2.10.04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	23.322.800,00	21.335.881,00	(1.986.919,00)	91,48	
2.10	4.01.2.10.0.00.01.0000	2.10.04.2.01		PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.322.800,00	21.335.881,00	(1.986.919,00)	91,48	
2.10	4.01.2.10.0.00.01.0000	2.10.04.2.01.0004		MEDIASI PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.322.800,00	21.335.881,00	(1.986.919,00)	91,48	
2.10	4.01.2.10.0.00.01.0000	2.10.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	23.322.800,00	21.335.881,00	(1.986.919,00)	91,48	
2.10	4.01.2.10.0.00.01.0000	2.10.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.322.800,00	21.335.881,00	(1.986.919,00)	91,48	
				JUMLAH BELANJA	23.322.800,00	21.335.881,00	(1.986.919,00)	91,48	
				SURPLUS / (DEFISIT)	145.777.200,00	186.112.119,00	40.334.919,00	127,66	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	145.777.200,00	186.112.119,00	40.334.919,00	127,66	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : Sekretariat DPRD

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	35.922.778.540,00	32.053.866.789,00	(3.868.911.751,00)	89,22	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.380.211.890,00	21.499.821.957,00	(2.880.389.933,00)	88,18	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	9.398.618,00	3.633.840,00	(5.764.778,00)	38,66	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	1.428.800,00	697.524,00	(731.276,00)	48,81	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.428.800,00	697.524,00	(731.276,00)	48,81	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.428.800,00	697.524,00	(731.276,00)	48,81	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.512.818,00	290.820,00	(2.221.998,00)	11,57	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.512.818,00	290.820,00	(2.221.998,00)	11,57	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.512.818,00	290.820,00	(2.221.998,00)	11,57	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1.320.000,00	396.000,00	(924.000,00)	30,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.320.000,00	396.000,00	(924.000,00)	30,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	396.000,00	(924.000,00)	30,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.147.700,00	887.500,00	(1.260.200,00)	41,32	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.147.700,00	887.500,00	(1.260.200,00)	41,32	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.147.700,00	887.500,00	(1.260.200,00)	41,32	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	971.800,00	947.496,00	(24.304,00)	97,49	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	971.800,00	947.496,00	(24.304,00)	97,49	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	971.800,00	947.496,00	(24.304,00)	97,49	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.017.500,00	414.500,00	(603.000,00)	40,73	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.017.500,00	414.500,00	(603.000,00)	40,73	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.017.500,00	414.500,00	(603.000,00)	40,73	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.287.899.500,00	3.690.901.915,00	(596.997.585,00)	86,07	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.285.750.000,00	3.689.433.705,00	(596.316.295,00)	86,08	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.285.750.000,00	3.689.433.705,00	(596.316.295,00)	86,08	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.285.750.000,00	3.689.433.705,00	(596.316.295,00)	86,08	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.173.000,00	1.012.000,00	(161.000,00)	86,27	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.173.000,00	1.012.000,00	(161.000,00)	86,27	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.173.000,00	1.012.000,00	(161.000,00)	86,27	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	976.500,00	456.210,00	(520.290,00)	46,71	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	976.500,00	456.210,00	(520.290,00)	46,71	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	976.500,00	456.210,00	(520.290,00)	46,71	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	157.000.000,00	136.877.063,00	(20.122.937,00)	87,18	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	157.000.000,00	136.877.063,00	(20.122.937,00)	87,18	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	157.000.000,00	136.877.063,00	(20.122.937,00)	87,18	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.000.000,00	136.877.063,00	(20.122.937,00)	87,18	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.187.840.392,00	999.088.962,00	(188.751.430,00)	84,10	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	59.269.005,00	35.095.000,00	(24.174.005,00)	59,21	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	59.269.005,00	35.095.000,00	(24.174.005,00)	59,21	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.269.005,00	35.095.000,00	(24.174.005,00)	59,21	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	112.697.079,00	84.653.400,00	(28.043.679,00)	75,11	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	112.697.079,00	84.653.400,00	(28.043.679,00)	75,11	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.697.079,00	84.653.400,00	(28.043.679,00)	75,11	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	46.831.788,00	37.971.000,00	(8.860.788,00)	81,07	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	46.831.788,00	37.971.000,00	(8.860.788,00)	81,07	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.831.788,00	37.971.000,00	(8.860.788,00)	81,07	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	774.235.240,00	694.384.100,00	(79.851.140,00)	89,68	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	774.235.240,00	694.384.100,00	(79.851.140,00)	89,68	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	774.235.240,00	694.384.100,00	(79.851.140,00)	89,68	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	62.612.880,00	22.866.125,00	(39.746.755,00)	36,51	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	62.612.880,00	22.866.125,00	(39.746.755,00)	36,51	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.612.880,00	22.866.125,00	(39.746.755,00)	36,51	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	72.194.400,00	72.095.000,00	(99.400,00)	99,86	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	72.194.400,00	72.095.000,00	(99.400,00)	99,86	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.194.400,00	72.095.000,00	(99.400,00)	99,86	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	60.000.000,00	52.024.337,00	(7.975.663,00)	86,70	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	52.024.337,00	(7.975.663,00)	86,70	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	52.024.337,00	(7.975.663,00)	86,70	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.472.857.140,00	1.217.885.744,00	(254.971.396,00)	82,68	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	91.206.480,00	88.333.000,00	(2.873.480,00)	96,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	91.206.480,00	88.333.000,00	(2.873.480,00)	96,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.206.480,00	88.333.000,00	(2.873.480,00)	96,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.381.650.660,00	1.129.552.744,00	(252.097.916,00)	81,75	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	1.381.650.660,00	1.129.552.744,00	(252.097.916,00)	81,75	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.381.650.660,00	1.129.552.744,00	(252.097.916,00)	81,75	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.190.907.000,00	1.014.194.061,00	(176.712.939,00)	85,16	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.952.000,00	2.000.000,00	(952.000,00)	67,75	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.952.000,00	2.000.000,00	(952.000,00)	67,75	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.952.000,00	2.000.000,00	(952.000,00)	67,75	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	358.500.000,00	271.214.261,00	(87.285.739,00)	75,65	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	358.500.000,00	271.214.261,00	(87.285.739,00)	75,65	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.500.000,00	271.214.261,00	(87.285.739,00)	75,65	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	829.455.000,00	740.979.800,00	(88.475.200,00)	89,33	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	829.455.000,00	740.979.800,00	(88.475.200,00)	89,33	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	829.455.000,00	740.979.800,00	(88.475.200,00)	89,33	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	760.236.000,00	639.741.200,00	(120.494.800,00)	84,15	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	128.951.000,00	67.258.200,00	(61.692.800,00)	52,15	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	128.951.000,00	67.258.200,00	(61.692.800,00)	52,15	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.951.000,00	67.258.200,00	(61.692.800,00)	52,15	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN MEBEL	35.000.000,00	32.924.000,00	(2.076.000,00)	94,06	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	32.924.000,00	(2.076.000,00)	94,06	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	32.924.000,00	(2.076.000,00)	94,06	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	118.985.000,00	63.924.000,00	(55.061.000,00)	53,72	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	118.985.000,00	63.924.000,00	(55.061.000,00)	53,72	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.985.000,00	63.924.000,00	(55.061.000,00)	53,72	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	477.300.000,00	475.635.000,00	(1.665.000,00)	99,65	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	477.300.000,00	475.635.000,00	(1.665.000,00)	99,65	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	477.300.000,00	475.635.000,00	(1.665.000,00)	99,65	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15		LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	14.775.538.000,00	13.439.399.172,00	(1.336.138.828,00)	90,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001		PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	14.057.288.000,00	12.889.161.649,00	(1.168.126.351,00)	91,69	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.057.288.000,00	12.889.161.649,00	(1.168.126.351,00)	91,69	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	14.057.288.000,00	12.889.161.649,00	(1.168.126.351,00)	91,69	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002		PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	360.750.000,00	299.375.000,00	(61.375.000,00)	82,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1	BELANJA OPERASI	360.750.000,00	299.375.000,00	(61.375.000,00)	82,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.750.000,00	299.375.000,00	(61.375.000,00)	82,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003		PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD	357.500.000,00	250.862.523,00	(106.637.477,00)	70,17	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003	5.1	BELANJA OPERASI	357.500.000,00	250.862.523,00	(106.637.477,00)	70,17	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	357.500.000,00	250.862.523,00	(106.637.477,00)	70,17	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16		LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	538.535.240,00	358.100.000,00	(180.435.240,00)	66,49	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003		FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD	538.535.240,00	358.100.000,00	(180.435.240,00)	66,49	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	5.1	BELANJA OPERASI	538.535.240,00	358.100.000,00	(180.435.240,00)	66,49	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	538.535.240,00	358.100.000,00	(180.435.240,00)	66,49	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	11.542.566.650,00	10.554.044.832,00	(988.521.818,00)	91,43	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01		PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	1.135.911.220,00	955.425.329,00	(180.485.891,00)	84,11	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001		PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	596.446.220,00	492.013.289,00	(104.432.931,00)	82,49	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	596.446.220,00	492.013.289,00	(104.432.931,00)	82,49	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	596.446.220,00	492.013.289,00	(104.432.931,00)	82,49	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002		PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	539.465.000,00	463.412.040,00	(76.052.960,00)	85,90	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	539.465.000,00	463.412.040,00	(76.052.960,00)	85,90	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	539.465.000,00	463.412.040,00	(76.052.960,00)	85,90	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04		PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	2.520.973.430,00	2.071.403.558,00	(449.569.872,00)	82,16	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002		PENDALAMAN TUGAS DPRD	1.500.000.000,00	1.266.419.398,00	(233.580.602,00)	84,42	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000.000,00	1.266.419.398,00	(233.580.602,00)	84,42	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000.000,00	1.266.419.398,00	(233.580.602,00)	84,42	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005		PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI	293.476.260,00	293.476.260,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	293.476.260,00	293.476.260,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.476.260,00	293.476.260,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008		PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPRD	727.497.170,00	511.507.900,00	(215.989.270,00)	70,31	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	727.497.170,00	511.507.900,00	(215.989.270,00)	70,31	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05		PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	473.632.000,00	146.425.000,00	(327.207.000,00)	30,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001		KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH	43.000.000,00	300.000,00	(42.700.000,00)	0,69	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	43.000.000,00	300.000,00	(42.700.000,00)	0,69	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.000.000,00	300.000,00	(42.700.000,00)	0,69	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003		PELAKSANAAN RESES	430.632.000,00	146.125.000,00	(284.507.000,00)	33,93	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	430.632.000,00	146.125.000,00	(284.507.000,00)	33,93	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430.632.000,00	146.125.000,00	(284.507.000,00)	33,93	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08		FASILITASI TUGAS DPRD	7.412.050.000,00	7.380.790.945,00	(31.259.055,00)	99,57	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001		KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	7.412.050.000,00	7.380.790.945,00	(31.259.055,00)	99,57	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.412.050.000,00	7.380.790.945,00	(31.259.055,00)	99,57	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.412.050.000,00	7.380.790.945,00	(31.259.055,00)	99,57	
				JUMLAH BELANJA	35.922.778.540,00	32.053.866.789,00	(3.868.911.751,00)	89,22	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(35.922.778.540,00)	(32.053.866.789,00)	3.868.911.751,00	89,22	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(35.922.778.540,00)	(32.053.866.789,00)	3.868.911.751,00	89,22	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PERENCANAAN
Organisasi : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	10.290.562.642,00	9.767.473.853,90	(523.088.788,10)	94,91	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.017.418.560,00	8.688.179.331,90	(329.239.228,10)	96,34	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.758.400,00	4.066.100,00	(692.300,00)	85,45	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	1.010.600,00	894.600,00	(116.000,00)	88,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.010.600,00	894.600,00	(116.000,00)	88,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.010.600,00	894.600,00	(116.000,00)	88,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	735.000,00	612.500,00	(122.500,00)	83,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	735.000,00	612.500,00	(122.500,00)	83,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	735.000,00	612.500,00	(122.500,00)	83,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	735.000,00	612.500,00	(122.500,00)	83,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	735.000,00	612.500,00	(122.500,00)	83,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	735.000,00	612.500,00	(122.500,00)	83,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	735.000,00	612.500,00	(122.500,00)	83,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	735.000,00	612.500,00	(122.500,00)	83,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	735.000,00	612.500,00	(122.500,00)	83,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	735.000,00	612.500,00	(122.500,00)	83,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	735.000,00	612.500,00	(122.500,00)	83,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	735.000,00	612.500,00	(122.500,00)	83,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	807.800,00	721.500,00	(86.300,00)	89,31	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	807.800,00	721.500,00	(86.300,00)	89,31	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	807.800,00	721.500,00	(86.300,00)	89,31	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.560.920.700,00	7.373.761.351,00	(187.159.349,00)	97,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.557.420.500,00	7.370.345.351,00	(187.075.149,00)	97,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.557.420.500,00	7.370.345.351,00	(187.075.149,00)	97,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.557.420.500,00	7.370.345.351,00	(187.075.149,00)	97,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	3.500.200,00	3.416.000,00	(84.200,00)	97,59	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.200,00	3.416.000,00	(84.200,00)	97,59	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.200,00	3.416.000,00	(84.200,00)	97,59	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	73.776.800,00	50.656.070,00	(23.120.730,00)	68,66	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.05.0005		MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	6.000.000,00	4.058.700,00	(1.941.300,00)	67,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	4.058.700,00	(1.941.300,00)	67,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	4.058.700,00	(1.941.300,00)	67,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	67.776.800,00	46.597.370,00	(21.179.430,00)	68,75	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	67.776.800,00	46.597.370,00	(21.179.430,00)	68,75	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.776.800,00	46.597.370,00	(21.179.430,00)	68,75	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	507.051.260,00	451.862.244,00	(55.189.016,00)	89,11	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	23.989.000,00	23.981.000,00	(8.000,00)	99,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.989.000,00	23.981.000,00	(8.000,00)	99,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.989.000,00	23.981.000,00	(8.000,00)	99,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	40.832.200,00	40.746.000,00	(86.200,00)	99,78	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	40.832.200,00	40.746.000,00	(86.200,00)	99,78	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.832.200,00	40.746.000,00	(86.200,00)	99,78	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	7.995.300,00	7.989.500,00	(5.800,00)	99,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.995.300,00	7.989.500,00	(5.800,00)	99,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.995.300,00	7.989.500,00	(5.800,00)	99,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	278.368.960,00	237.277.400,00	(41.091.560,00)	85,23	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	278.368.960,00	237.277.400,00	(41.091.560,00)	85,23	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.368.960,00	237.277.400,00	(41.091.560,00)	85,23	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	26.931.800,00	24.035.500,00	(2.896.300,00)	89,24	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	26.931.800,00	24.035.500,00	(2.896.300,00)	89,24	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.931.800,00	24.035.500,00	(2.896.300,00)	89,24	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	8.934.000,00	7.920.000,00	(1.014.000,00)	88,65	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.934.000,00	7.920.000,00	(1.014.000,00)	88,65	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.934.000,00	7.920.000,00	(1.014.000,00)	88,65	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	120.000.000,00	109.912.844,00	(10.087.156,00)	91,59	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	109.912.844,00	(10.087.156,00)	91,59	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	109.912.844,00	(10.087.156,00)	91,59	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	250.000.000,00	249.115.747,00	(884.253,00)	99,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	250.000.000,00	249.115.747,00	(884.253,00)	99,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0010	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	199.694.971,00	(305.029,00)	99,84	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.694.971,00	(305.029,00)	99,84	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.420.776,00	(579.224,00)	98,84	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	49.420.776,00	(579.224,00)	98,84	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	396.263.400,00	340.165.873,00	(56.097.527,00)	85,84	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.016.000,00	2.505.300,00	(1.510.700,00)	62,38	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.016.000,00	2.505.300,00	(1.510.700,00)	62,38	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.016.000,00	2.505.300,00	(1.510.700,00)	62,38	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	160.000.000,00	144.121.073,00	(15.878.927,00)	90,07	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000,00	144.121.073,00	(15.878.927,00)	90,07	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	144.121.073,00	(15.878.927,00)	90,07	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	232.247.400,00	193.539.500,00	(38.707.900,00)	83,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	232.247.400,00	193.539.500,00	(38.707.900,00)	83,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.247.400,00	193.539.500,00	(38.707.900,00)	83,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	224.648.000,00	218.551.946,90	(6.096.053,10)	97,28	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	87.041.000,00	82.158.900,00	(4.882.100,00)	94,39	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	87.041.000,00	82.158.900,00	(4.882.100,00)	94,39	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.041.000,00	82.158.900,00	(4.882.100,00)	94,39	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	25.607.000,00	25.520.000,00	(87.000,00)	99,66	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	25.607.000,00	25.520.000,00	(87.000,00)	99,66	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.607.000,00	25.520.000,00	(87.000,00)	99,66	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	112.000.000,00	110.873.046,90	(1.126.953,10)	98,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	112.000.000,00	110.873.046,90	(1.126.953,10)	98,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.000.000,00	110.873.046,90	(1.126.953,10)	98,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.006.965.178,00	847.438.833,00	(159.526.345,00)	84,15	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01		PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	763.369.994,00	671.007.313,00	(92.362.681,00)	87,90	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0003		PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK	25.317.915,00	21.476.500,00	(3.841.415,00)	84,82	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	25.317.915,00	21.476.500,00	(3.841.415,00)	84,82	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.317.915,00	21.476.500,00	(3.841.415,00)	84,82	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH	45.738.207,00	26.962.500,00	(18.775.707,00)	58,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	45.738.207,00	26.962.500,00	(18.775.707,00)	58,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.738.207,00	26.962.500,00	(18.775.707,00)	58,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005		PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA	83.863.642,00	70.360.000,00	(13.503.642,00)	83,89	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	83.863.642,00	70.360.000,00	(13.503.642,00)	83,89	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.863.642,00	70.360.000,00	(13.503.642,00)	83,89	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0006		PENYIAPAN BAHAN KOORDINASI MUSRENBANG KECAMATAN	13.236.612,00	11.059.000,00	(2.177.612,00)	83,54	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.236.612,00	11.059.000,00	(2.177.612,00)	83,54	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.236.612,00	11.059.000,00	(2.177.612,00)	83,54	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007		KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	595.213.618,00	541.149.313,00	(54.064.305,00)	90,91	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	595.213.618,00	541.149.313,00	(54.064.305,00)	90,91	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	595.213.618,00	541.149.313,00	(54.064.305,00)	90,91	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02		ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	93.298.249,00	60.155.100,00	(33.143.149,00)	64,47	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0002		PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH	85.461.205,00	52.662.200,00	(32.799.005,00)	61,62	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	85.461.205,00	52.662.200,00	(32.799.005,00)	61,62	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.461.205,00	52.662.200,00	(32.799.005,00)	61,62	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0003		PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.837.044,00	7.492.900,00	(344.144,00)	95,60	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.837.044,00	7.492.900,00	(344.144,00)	95,60	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.837.044,00	7.492.900,00	(344.144,00)	95,60	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03		PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	150.296.935,00	116.276.420,00	(34.020.515,00)	77,36	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0001		KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA	22.036.396,00	13.784.400,00	(8.251.996,00)	62,55	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	22.036.396,00	13.784.400,00	(8.251.996,00)	62,55	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.036.396,00	13.784.400,00	(8.251.996,00)	62,55	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003		MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	128.260.539,00	102.492.020,00	(25.768.519,00)	79,90	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	128.260.539,00	102.492.020,00	(25.768.519,00)	79,90	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.260.539,00	102.492.020,00	(25.768.519,00)	79,90	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	266.178.904,00	231.855.689,00	(34.323.215,00)	87,10	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	156.117.093,00	150.202.256,00	(5.914.837,00)	96,21	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0007		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	156.117.093,00	150.202.256,00	(5.914.837,00)	96,21	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	156.117.093,00	150.202.256,00	(5.914.837,00)	96,21	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.117.093,00	150.202.256,00	(5.914.837,00)	96,21	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	62.653.900,00	38.505.166,00	(24.148.734,00)	61,45	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0002		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	24.693.352,00	8.709.000,00	(15.984.352,00)	35,26	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.693.352,00	8.709.000,00	(15.984.352,00)	35,26	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.693.352,00	8.709.000,00	(15.984.352,00)	35,26	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0008		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA	37.960.548,00	29.796.166,00	(8.164.382,00)	78,49	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	37.960.548,00	29.796.166,00	(8.164.382,00)	78,49	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.960.548,00	29.796.166,00	(8.164.382,00)	78,49	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	47.407.911,00	43.148.267,00	(4.259.644,00)	91,01	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0003		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	12.928.650,00	11.550.000,00	(1.378.650,00)	89,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.928.650,00	11.550.000,00	(1.378.650,00)	89,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.928.650,00	11.550.000,00	(1.378.650,00)	89,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	34.479.261,00	31.598.267,00	(2.880.994,00)	91,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	34.479.261,00	31.598.267,00	(2.880.994,00)	91,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.479.261,00	31.598.267,00	(2.880.994,00)	91,64	
				JUMLAH BELANJA	10.290.562.642,00	9.767.473.853,90	(523.088.788,10)	94,91	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(10.290.562.642,00)	(9.767.473.853,90)	523.088.788,10	94,91	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(10.290.562.642,00)	(9.767.473.853,90)	523.088.788,10	94,91	

PEMERINTAH KAB. BELITUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Organisasi : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	105.077.307,00	69.746.706,00	(35.330.601,00)	66,37	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.5.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	105.077.307,00	69.746.706,00	(35.330.601,00)	66,37	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04		PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	105.077.307,00	69.746.706,00	(35.330.601,00)	66,37	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0003		DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF	105.077.307,00	69.746.706,00	(35.330.601,00)	66,37	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	105.077.307,00	69.746.706,00	(35.330.601,00)	66,37	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.077.307,00	69.746.706,00	(35.330.601,00)	66,37	
				JUMLAH BELANJA	105.077.307,00	69.746.706,00	(35.330.601,00)	66,37	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(105.077.307,00)	(69.746.706,00)	35.330.601,00	66,37	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(105.077.307,00)	(69.746.706,00)	35.330.601,00	66,37	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEUANGAN
Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	119.188.504.469,00	114.533.315.492,00	(4.655.188.977,00)	96,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.817.658.794,00	7.162.514.842,00	(1.655.143.952,00)	81,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.513.376,00	3.759.600,00	(1.753.776,00)	68,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	948.204,00	828.000,00	(120.204,00)	87,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	948.204,00	828.000,00	(120.204,00)	87,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	948.204,00	828.000,00	(120.204,00)	87,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	995.973,00	816.600,00	(179.373,00)	81,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	995.973,00	816.600,00	(179.373,00)	81,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	995.973,00	816.600,00	(179.373,00)	81,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	787.455,00	706.600,00	(80.855,00)	89,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	787.455,00	706.600,00	(80.855,00)	89,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	787.455,00	706.600,00	(80.855,00)	89,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	997.227,00	883.000,00	(114.227,00)	88,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	997.227,00	883.000,00	(114.227,00)	88,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	997.227,00	883.000,00	(114.227,00)	88,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	787.389,00	218.400,00	(568.989,00)	27,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	787.389,00	218.400,00	(568.989,00)	27,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	787.389,00	218.400,00	(568.989,00)	27,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	997.128,00	307.000,00	(690.128,00)	30,78	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	997.128,00	307.000,00	(690.128,00)	30,78	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	997.128,00	307.000,00	(690.128,00)	30,78	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.031.168.207,00	5.950.759.521,00	(1.080.408.686,00)	84,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.026.128.363,00	5.947.265.621,00	(1.078.862.742,00)	84,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.026.128.363,00	5.947.265.621,00	(1.078.862.742,00)	84,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.026.128.363,00	5.947.265.621,00	(1.078.862.742,00)	84,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2.925.294,00	1.907.000,00	(1.018.294,00)	65,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.925.294,00	1.907.000,00	(1.018.294,00)	65,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.925.294,00	1.907.000,00	(1.018.294,00)	65,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	2.114.550,00	1.586.900,00	(527.650,00)	75,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.114.550,00	1.586.900,00	(527.650,00)	75,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.114.550,00	1.586.900,00	(527.650,00)	75,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	70.000.000,00	25.434.320,00	(44.565.680,00)	36,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	70.000.000,00	25.434.320,00	(44.565.680,00)	36,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	25.434.320,00	(44.565.680,00)	36,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	25.434.320,00	(44.565.680,00)	36,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	734.435.971,00	503.125.682,00	(231.310.289,00)	68,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.116.762,00	3.878.200,00	(6.238.562,00)	38,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.116.762,00	3.878.200,00	(6.238.562,00)	38,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.116.762,00	3.878.200,00	(6.238.562,00)	38,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	56.973.192,00	28.759.820,00	(28.213.372,00)	50,47	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	56.973.192,00	28.759.820,00	(28.213.372,00)	50,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.973.192,00	28.759.820,00	(28.213.372,00)	50,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	24.897.721,00	16.008.000,00	(8.889.721,00)	64,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	24.897.721,00	16.008.000,00	(8.889.721,00)	64,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.897.721,00	16.008.000,00	(8.889.721,00)	64,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	250.502.856,00	177.114.150,00	(73.388.706,00)	70,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	250.502.856,00	177.114.150,00	(73.388.706,00)	70,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.502.856,00	177.114.150,00	(73.388.706,00)	70,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	49.945.440,00	18.164.800,00	(31.780.640,00)	36,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	49.945.440,00	18.164.800,00	(31.780.640,00)	36,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.945.440,00	18.164.800,00	(31.780.640,00)	36,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9.000.000,00	7.200.000,00	(1.800.000,00)	80,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	7.200.000,00	(1.800.000,00)	80,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	7.200.000,00	(1.800.000,00)	80,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	333.000.000,00	252.000.712,00	(80.999.288,00)	75,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	333.000.000,00	252.000.712,00	(80.999.288,00)	75,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.000.000,00	252.000.712,00	(80.999.288,00)	75,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	32.398.680,00	30.358.500,00	(2.040.180,00)	93,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	11.100.000,00	9.324.000,00	(1.776.000,00)	84,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	11.100.000,00	9.324.000,00	(1.776.000,00)	84,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.100.000,00	9.324.000,00	(1.776.000,00)	84,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	21.298.680,00	21.034.500,00	(264.180,00)	98,75	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	21.298.680,00	21.034.500,00	(264.180,00)	98,75	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.298.680,00	21.034.500,00	(264.180,00)	98,75	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	657.606.300,00	463.791.319,00	(193.814.981,00)	70,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	7.480.000,00	1.261.000,00	(6.219.000,00)	16,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.480.000,00	1.261.000,00	(6.219.000,00)	16,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.480.000,00	1.261.000,00	(6.219.000,00)	16,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	283.200.000,00	222.787.119,00	(60.412.881,00)	78,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	283.200.000,00	222.787.119,00	(60.412.881,00)	78,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.200.000,00	222.787.119,00	(60.412.881,00)	78,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	366.926.300,00	239.743.200,00	(127.183.100,00)	65,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	366.926.300,00	239.743.200,00	(127.183.100,00)	65,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	366.926.300,00	239.743.200,00	(127.183.100,00)	65,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	286.536.260,00	185.285.900,00	(101.250.360,00)	64,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	60.170.000,00	44.708.900,00	(15.461.100,00)	74,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	60.170.000,00	44.708.900,00	(15.461.100,00)	74,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.170.000,00	44.708.900,00	(15.461.100,00)	74,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	56.004.600,00	20.794.000,00	(35.210.600,00)	37,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	56.004.600,00	20.794.000,00	(35.210.600,00)	37,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.004.600,00	20.794.000,00	(35.210.600,00)	37,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN MEBEL	4.965.000,00	1.320.000,00	(3.645.000,00)	26,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.965.000,00	1.320.000,00	(3.645.000,00)	26,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.965.000,00	1.320.000,00	(3.645.000,00)	26,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	52.397.550,00	15.585.000,00	(36.812.550,00)	29,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	52.397.550,00	15.585.000,00	(36.812.550,00)	29,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.397.550,00	15.585.000,00	(36.812.550,00)	29,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	112.999.110,00	102.878.000,00	(10.121.110,00)	91,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	112.999.110,00	102.878.000,00	(10.121.110,00)	91,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.999.110,00	102.878.000,00	(10.121.110,00)	91,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	109.390.048.323,00	106.655.594.255,00	(2.734.454.068,00)	97,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	562.438.031,00	334.122.908,00	(228.315.123,00)	59,40	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	26.597.505,00	13.544.800,00	(13.052.705,00)	50,92	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.597.505,00	13.544.800,00	(13.052.705,00)	50,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.597.505,00	13.544.800,00	(13.052.705,00)	50,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	24.562.038,00	10.279.754,00	(14.282.284,00)	41,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.562.038,00	10.279.754,00	(14.282.284,00)	41,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.562.038,00	10.279.754,00	(14.282.284,00)	41,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD	290.055.566,00	172.044.115,00	(118.011.451,00)	59,31	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	290.055.566,00	172.044.115,00	(118.011.451,00)	59,31	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.055.566,00	172.044.115,00	(118.011.451,00)	59,31	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	221.222.922,00	138.254.239,00	(82.968.683,00)	62,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	221.222.922,00	138.254.239,00	(82.968.683,00)	62,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.222.922,00	138.254.239,00	(82.968.683,00)	62,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02		KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	156.311.317,00	78.372.110,00	(77.939.207,00)	50,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0001		KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH	113.471.061,00	74.881.640,00	(38.589.421,00)	65,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	113.471.061,00	74.881.640,00	(38.589.421,00)	65,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.471.061,00	74.881.640,00	(38.589.421,00)	65,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0011		PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	42.840.256,00	3.490.470,00	(39.349.786,00)	8,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	42.840.256,00	3.490.470,00	(39.349.786,00)	8,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.840.256,00	3.490.470,00	(39.349.786,00)	8,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	106.426.742,00	71.558.310,00	(34.868.432,00)	67,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004		KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	68.514.984,00	53.600.010,00	(14.914.974,00)	78,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	68.514.984,00	53.600.010,00	(14.914.974,00)	78,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.514.984,00	53.600.010,00	(14.914.974,00)	78,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA	21.792.305,00	15.163.300,00	(6.629.005,00)	69,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	21.792.305,00	15.163.300,00	(6.629.005,00)	69,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.792.305,00	15.163.300,00	(6.629.005,00)	69,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0008		PENYUSUNAN ANALISIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	1.128.648,00	710.000,00	(418.648,00)	62,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.128.648,00	710.000,00	(418.648,00)	62,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.128.648,00	710.000,00	(418.648,00)	62,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0011		PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	14.990.805,00	2.085.000,00	(12.905.805,00)	13,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0011	5.1	BELANJA OPERASI	14.990.805,00	2.085.000,00	(12.905.805,00)	13,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.990.805,00	2.085.000,00	(12.905.805,00)	13,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04		PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	108.537.971.033,00	106.162.840.927,00	(2.375.130.106,00)	97,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0007		PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN ALOKASI SUBSIDI	648.688.228,00	540.823.627,00	(107.864.601,00)	83,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	648.688.228,00	540.823.627,00	(107.864.601,00)	83,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0007	5.1.04	Belanja Subsidi	648.688.228,00	540.823.627,00	(107.864.601,00)	83,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008		ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN	94.828.236.500,00	93.834.187.300,00	(994.049.200,00)	98,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	5.4	BELANJA TRANSFER	94.828.236.500,00	93.834.187.300,00	(994.049.200,00)	98,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	94.828.236.500,00	93.834.187.300,00	(994.049.200,00)	98,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009		PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK	1.250.000.000,00	0,00	(1.250.000.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.250.000.000,00	0,00	(1.250.000.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.250.000.000,00	0,00	(1.250.000.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0010		PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA	11.811.046.305,00	11.787.830.000,00	(23.216.305,00)	99,80	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0010	5.4	BELANJA TRANSFER	11.811.046.305,00	11.787.830.000,00	(23.216.305,00)	99,80	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0010	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.811.046.305,00	11.787.830.000,00	(23.216.305,00)	99,80	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05		PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH	26.901.200,00	8.700.000,00	(18.201.200,00)	32,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0002		IMPLEMENTASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH	26.901.200,00	8.700.000,00	(18.201.200,00)	32,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	26.901.200,00	8.700.000,00	(18.201.200,00)	32,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.901.200,00	8.700.000,00	(18.201.200,00)	32,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	980.797.352,00	715.206.395,00	(265.590.957,00)	72,92	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01		PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	980.797.352,00	715.206.395,00	(265.590.957,00)	72,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0002		PENYUSUNAN STANDAR BARANG MILIK DAERAH DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH	36.945.966,00	33.046.500,00	(3.899.466,00)	89,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	36.945.966,00	33.046.500,00	(3.899.466,00)	89,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.945.966,00	33.046.500,00	(3.899.466,00)	89,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0003		PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH	51.535.112,00	43.432.760,00	(8.102.352,00)	84,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	51.535.112,00	43.432.760,00	(8.102.352,00)	84,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.535.112,00	43.432.760,00	(8.102.352,00)	84,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	97.436.950,00	80.836.346,00	(16.600.604,00)	82,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	97.436.950,00	80.836.346,00	(16.600.604,00)	82,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.436.950,00	80.836.346,00	(16.600.604,00)	82,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006		INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH	101.026.520,00	62.254.204,00	(38.772.316,00)	61,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	101.026.520,00	62.254.204,00	(38.772.316,00)	61,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.026.520,00	62.254.204,00	(38.772.316,00)	61,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH	348.281.398,00	218.088.740,00	(130.192.658,00)	62,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	309.431.398,00	184.566.740,00	(124.864.658,00)	59,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	309.431.398,00	184.566.740,00	(124.864.658,00)	59,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	38.850.000,00	33.522.000,00	(5.328.000,00)	86,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.850.000,00	33.522.000,00	(5.328.000,00)	86,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0010		OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH	268.653.016,00	231.948.295,00	(36.704.721,00)	86,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	268.653.016,00	231.948.295,00	(36.704.721,00)	86,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.653.016,00	231.948.295,00	(36.704.721,00)	86,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0012		PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	76.918.390,00	45.599.550,00	(31.318.840,00)	59,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	76.918.390,00	45.599.550,00	(31.318.840,00)	59,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.918.390,00	45.599.550,00	(31.318.840,00)	59,28	
				JUMLAH BELANJA	119.188.504.469,00	114.533.315.492,00	(4.655.188.977,00)	96,09	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(119.188.504.469,00)	(114.533.315.492,00)	4.655.188.977,00	96,09	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6	PEMBIAYAAN DAERAH	99.023.375.881,70	99.023.375.881,70	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	99.023.375.881,70	99.023.375.881,70	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	99.023.375.881,70	99.023.375.881,70	0,00	100,00	
				JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	99.023.375.881,70	99.023.375.881,70	0,00	100,00	
				PEMBIAYAAN NETTO	99.023.375.881,70	99.023.375.881,70	0,00	100,00	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(20.165.128.587,30)	(15.509.939.610,30)	4.655.188.977,00	76,91	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEUANGAN
Organisasi : Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	862.567.928.076,00	847.335.464.299,59	(15.232.463.776,41)	98,23	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	124.331.771.493,00	120.582.702.489,59	(3.749.069.003,41)	96,98	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.1.01	Pajak Daerah	109.084.621.493,00	104.082.515.970,00	(5.002.105.523,00)	95,41	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.600.000.000,00	4.886.428.412,02	(713.571.587,98)	87,25	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.647.150.000,00	11.613.758.107,57	1.966.608.107,57	120,38	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.2	PENDAPATAN TRANSFER	738.236.156.583,00	726.752.761.810,00	(11.483.394.773,00)	98,44	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	693.711.838.190,00	678.824.011.142,00	(14.887.827.048,00)	97,85	
	5.02.0.00.0.00.02.0000		4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	44.524.318.393,00	47.928.750.668,00	3.404.432.275,00	107,64	
				JUMLAH PENDAPATAN	862.567.928.076,00	847.335.464.299,59	(15.232.463.776,41)	98,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	12.464.406.845,00	9.764.296.743,00	(2.700.110.102,00)	78,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.695.919.185,00	8.557.338.160,00	(2.138.581.025,00)	80,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.780.500,00	1.534.000,00	(246.500,00)	86,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	471.750,00	378.000,00	(93.750,00)	80,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	471.750,00	378.000,00	(93.750,00)	80,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	471.750,00	378.000,00	(93.750,00)	80,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	262.515,00	228.000,00	(34.515,00)	86,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	262.515,00	228.000,00	(34.515,00)	86,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.515,00	228.000,00	(34.515,00)	86,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	262.515,00	228.000,00	(34.515,00)	86,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	262.515,00	228.000,00	(34.515,00)	86,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.515,00	228.000,00	(34.515,00)	86,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	262.515,00	230.000,00	(32.515,00)	87,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	262.515,00	230.000,00	(32.515,00)	87,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.515,00	230.000,00	(32.515,00)	87,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	262.515,00	226.500,00	(36.015,00)	86,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	262.515,00	226.500,00	(36.015,00)	86,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.515,00	226.500,00	(36.015,00)	86,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	258.690,00	243.500,00	(15.190,00)	94,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	258.690,00	243.500,00	(15.190,00)	94,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.690,00	243.500,00	(15.190,00)	94,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.598.444.232,00	6.916.057.120,00	(1.682.387.112,00)	80,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	8.597.809.312,00	6.915.537.120,00	(1.682.272.192,00)	80,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.597.809.312,00	6.915.537.120,00	(1.682.272.192,00)	80,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	8.597.809.312,00	6.915.537.120,00	(1.682.272.192,00)	80,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	375.180,00	313.000,00	(62.180,00)	83,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	375.180,00	313.000,00	(62.180,00)	83,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.180,00	313.000,00	(62.180,00)	83,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	259.740,00	207.000,00	(52.740,00)	79,69	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	259.740,00	207.000,00	(52.740,00)	79,69	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.740,00	207.000,00	(52.740,00)	79,69	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	39.300.000,00	9.941.380,00	(29.358.620,00)	25,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	39.300.000,00	9.941.380,00	(29.358.620,00)	25,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	39.300.000,00	9.941.380,00	(29.358.620,00)	25,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.300.000,00	9.941.380,00	(29.358.620,00)	25,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	497.244.873,00	432.360.740,00	(64.884.133,00)	86,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	8.071.365,00	6.589.825,00	(1.481.540,00)	81,64	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.071.365,00	6.589.825,00	(1.481.540,00)	81,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.071.365,00	6.589.825,00	(1.481.540,00)	81,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	84.462.120,00	63.642.510,00	(20.819.610,00)	75,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	84.462.120,00	63.642.510,00	(20.819.610,00)	75,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.462.120,00	63.642.510,00	(20.819.610,00)	75,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	6.374.508,00	5.248.635,00	(1.125.873,00)	82,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.374.508,00	5.248.635,00	(1.125.873,00)	82,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.374.508,00	5.248.635,00	(1.125.873,00)	82,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	229.680.720,00	193.422.110,00	(36.258.610,00)	84,21	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	229.680.720,00	193.422.110,00	(36.258.610,00)	84,21	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.680.720,00	193.422.110,00	(36.258.610,00)	84,21	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	14.918.400,00	11.573.000,00	(3.345.400,00)	77,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	14.918.400,00	11.573.000,00	(3.345.400,00)	77,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.918.400,00	11.573.000,00	(3.345.400,00)	77,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.237.760,00	900.000,00	(1.337.760,00)	40,21	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.237.760,00	900.000,00	(1.337.760,00)	40,21	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.237.760,00	900.000,00	(1.337.760,00)	40,21	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	151.500.000,00	150.984.660,00	(515.340,00)	99,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	151.500.000,00	150.984.660,00	(515.340,00)	99,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.500.000,00	150.984.660,00	(515.340,00)	99,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	157.534.530,00	138.228.300,00	(19.306.230,00)	87,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	157.534.530,00	138.228.300,00	(19.306.230,00)	87,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	157.534.530,00	138.228.300,00	(19.306.230,00)	87,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	157.534.530,00	138.228.300,00	(19.306.230,00)	87,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.056.233.000,00	816.579.640,00	(239.653.360,00)	77,31	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	7.028.000,00	5.205.000,00	(1.823.000,00)	74,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.028.000,00	5.205.000,00	(1.823.000,00)	74,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.028.000,00	5.205.000,00	(1.823.000,00)	74,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	360.000.000,00	273.699.040,00	(86.300.960,00)	76,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	360.000.000,00	273.699.040,00	(86.300.960,00)	76,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.000.000,00	273.699.040,00	(86.300.960,00)	76,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	689.205.000,00	537.675.600,00	(151.529.400,00)	78,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	689.205.000,00	537.675.600,00	(151.529.400,00)	78,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	689.205.000,00	537.675.600,00	(151.529.400,00)	78,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	345.382.050,00	242.636.980,00	(102.745.070,00)	70,25	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	135.558.750,00	74.638.220,00	(60.920.530,00)	55,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	135.558.750,00	74.638.220,00	(60.920.530,00)	55,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.558.750,00	74.638.220,00	(60.920.530,00)	55,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	66.633.300,00	32.662.760,00	(33.970.540,00)	49,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	66.633.300,00	32.662.760,00	(33.970.540,00)	49,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.633.300,00	32.662.760,00	(33.970.540,00)	49,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	143.190.000,00	135.336.000,00	(7.854.000,00)	94,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	143.190.000,00	135.336.000,00	(7.854.000,00)	94,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.190.000,00	135.336.000,00	(7.854.000,00)	94,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	202.117.410,00	138.634.256,00	(63.483.154,00)	68,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02		KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	202.117.410,00	138.634.256,00	(63.483.154,00)	68,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0005		KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA	202.117.410,00	138.634.256,00	(63.483.154,00)	68,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	202.117.410,00	138.634.256,00	(63.483.154,00)	68,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.117.410,00	138.634.256,00	(63.483.154,00)	68,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.566.370.250,00	1.068.324.327,00	(498.045.923,00)	68,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01		KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.566.370.250,00	1.068.324.327,00	(498.045.923,00)	68,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0003		PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	157.721.880,00	99.734.657,00	(57.987.223,00)	63,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	157.721.880,00	99.734.657,00	(57.987.223,00)	63,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.721.880,00	99.734.657,00	(57.987.223,00)	63,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0004		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	234.321.000,00	218.360.050,00	(15.960.950,00)	93,18	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	234.321.000,00	218.360.050,00	(15.960.950,00)	93,18	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.321.000,00	218.360.050,00	(15.960.950,00)	93,18	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0005		PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH	260.331.270,00	52.118.200,00	(208.213.070,00)	20,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	260.331.270,00	52.118.200,00	(208.213.070,00)	20,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.331.270,00	52.118.200,00	(208.213.070,00)	20,01	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0007		PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	716.834.800,00	581.706.170,00	(135.128.630,00)	81,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	716.834.800,00	581.706.170,00	(135.128.630,00)	81,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	716.834.800,00	581.706.170,00	(135.128.630,00)	81,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0011		PENAGIHAN PAJAK DAERAH	19.994.205,00	355.000,00	(19.639.205,00)	1,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	19.994.205,00	355.000,00	(19.639.205,00)	1,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.994.205,00	355.000,00	(19.639.205,00)	1,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0013		PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH	171.455.010,00	114.497.750,00	(56.957.260,00)	66,78	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	171.455.010,00	114.497.750,00	(56.957.260,00)	66,78	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.455.010,00	114.497.750,00	(56.957.260,00)	66,78	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0014		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	5.712.085,00	1.552.500,00	(4.159.585,00)	27,17	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	5.712.085,00	1.552.500,00	(4.159.585,00)	27,17	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.712.085,00	1.552.500,00	(4.159.585,00)	27,17	
				JUMLAH BELANJA	12.464.406.845,00	9.764.296.743,00	(2.700.110.102,00)	78,33	
				SURPLUS / (DEFISIT)	850.103.521.231,00	837.571.167.556,59	(12.532.353.674,41)	98,52	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	850.103.521.231,00	837.571.167.556,59	(12.532.353.674,41)	98,52	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEPEGAWAIAN
Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	9.169.918.911,00	8.058.359.008,00	(1.111.559.903,00)	87,87	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.3.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.170.355.273,00	6.538.538.980,00	(631.816.293,00)	91,18	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.265.602.538,00	5.764.196.808,00	(501.405.730,00)	91,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.265.602.538,00	5.764.196.808,00	(501.405.730,00)	91,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.265.602.538,00	5.764.196.808,00	(501.405.730,00)	91,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.265.602.538,00	5.764.196.808,00	(501.405.730,00)	91,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	52.500.000,00	5.121.295,00	(47.378.705,00)	9,75	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	52.500.000,00	5.121.295,00	(47.378.705,00)	9,75	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	52.500.000,00	5.121.295,00	(47.378.705,00)	9,75	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.500.000,00	5.121.295,00	(47.378.705,00)	9,75	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	290.544.485,00	262.396.848,00	(28.147.637,00)	90,31	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.793.308,00	9.238.722,00	(554.586,00)	94,33	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.793.308,00	9.238.722,00	(554.586,00)	94,33	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.793.308,00	9.238.722,00	(554.586,00)	94,33	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	78.384.537,00	71.267.269,00	(7.117.268,00)	90,92	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	78.384.537,00	71.267.269,00	(7.117.268,00)	90,92	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.384.537,00	71.267.269,00	(7.117.268,00)	90,92	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	11.188.800,00	9.846.045,00	(1.342.755,00)	87,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	11.188.800,00	9.846.045,00	(1.342.755,00)	87,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.188.800,00	9.846.045,00	(1.342.755,00)	87,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	72.507.840,00	69.058.350,00	(3.449.490,00)	95,24	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	72.507.840,00	69.058.350,00	(3.449.490,00)	95,24	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.507.840,00	69.058.350,00	(3.449.490,00)	95,24	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	29.274.000,00	22.271.090,00	(7.002.910,00)	76,07	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	29.274.000,00	22.271.090,00	(7.002.910,00)	76,07	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.274.000,00	22.271.090,00	(7.002.910,00)	76,07	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.896.000,00	4.860.000,00	(36.000,00)	99,26	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.896.000,00	4.860.000,00	(36.000,00)	99,26	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.896.000,00	4.860.000,00	(36.000,00)	99,26	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	84.500.000,00	75.855.372,00	(8.644.628,00)	89,76	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	84.500.000,00	75.855.372,00	(8.644.628,00)	89,76	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.500.000,00	75.855.372,00	(8.644.628,00)	89,76	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	354.034.800,00	316.015.829,00	(38.018.971,00)	89,26	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.872.000,00	1.703.000,00	(3.169.000,00)	34,95	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.872.000,00	1.703.000,00	(3.169.000,00)	34,95	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.872.000,00	1.703.000,00	(3.169.000,00)	34,95	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	216.450.000,00	181.600.029,00	(34.849.971,00)	83,89	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	216.450.000,00	181.600.029,00	(34.849.971,00)	83,89	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.450.000,00	181.600.029,00	(34.849.971,00)	83,89	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	132.712.800,00	132.712.800,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	132.712.800,00	132.712.800,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.712.800,00	132.712.800,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	207.673.450,00	190.808.200,00	(16.865.250,00)	91,87	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	67.192.960,00	60.628.700,00	(6.564.260,00)	90,23	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	67.192.960,00	60.628.700,00	(6.564.260,00)	90,23	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.192.960,00	60.628.700,00	(6.564.260,00)	90,23	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	70.556.040,00	61.079.500,00	(9.476.540,00)	86,56	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	70.556.040,00	61.079.500,00	(9.476.540,00)	86,56	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.556.040,00	61.079.500,00	(9.476.540,00)	86,56	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	69.924.450,00	69.100.000,00	(824.450,00)	98,82	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	69.924.450,00	69.100.000,00	(824.450,00)	98,82	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.924.450,00	69.100.000,00	(824.450,00)	98,82	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.3.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.999.563.638,00	1.519.820.028,00	(479.743.610,00)	76,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01		PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	312.793.618,00	146.719.916,00	(166.073.702,00)	46,90	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0002		PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, JENIS DAN JUMLAH JABATAN UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN ASN	227.815.817,00	94.902.950,00	(132.912.867,00)	41,65	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	227.815.817,00	94.902.950,00	(132.912.867,00)	41,65	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.815.817,00	94.902.950,00	(132.912.867,00)	41,65	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0008		FASILITASI LEMBAGA PROFESI ASN	51.339.861,00	38.702.430,00	(12.637.431,00)	75,38	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	51.339.861,00	38.702.430,00	(12.637.431,00)	75,38	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.339.861,00	38.702.430,00	(12.637.431,00)	75,38	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010		PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	21.571.200,00	13.114.536,00	(8.456.664,00)	60,79	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	21.571.200,00	13.114.536,00	(8.456.664,00)	60,79	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.571.200,00	13.114.536,00	(8.456.664,00)	60,79	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011		PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	12.066.740,00	0,00	(12.066.740,00)	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	12.066.740,00	0,00	(12.066.740,00)	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.066.740,00	0,00	(12.066.740,00)	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02		MUTASI DAN PROMOSI ASN	525.959.500,00	385.845.213,00	(140.114.287,00)	73,36	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001		PENGELOLAAN MUTASI ASN	63.336.000,00	55.507.500,00	(7.828.500,00)	87,63	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	63.336.000,00	55.507.500,00	(7.828.500,00)	87,63	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.336.000,00	55.507.500,00	(7.828.500,00)	87,63	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003		PENGELOLAAN PROMOSI ASN	462.623.500,00	330.337.713,00	(132.285.787,00)	71,40	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	462.623.500,00	330.337.713,00	(132.285.787,00)	71,40	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	462.623.500,00	330.337.713,00	(132.285.787,00)	71,40	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03		PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	1.160.810.520,00	987.254.899,00	(173.555.621,00)	85,04	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.160.810.520,00	987.254.899,00	(173.555.621,00)	85,04	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.160.810.520,00	987.254.899,00	(173.555.621,00)	85,04	
				JUMLAH BELANJA	9.169.918.911,00	8.058.359.008,00	(1.111.559.903,00)	87,87	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(9.169.918.911,00)	(8.058.359.008,00)	1.111.559.903,00	87,87	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(9.169.918.911,00)	(8.058.359.008,00)	1.111.559.903,00	87,87	

PEMERINTAH KAB. BELITUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	1.063.504.883,00	712.536.794,00	(350.968.089,00)	66,99	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.4.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.063.504.883,00	712.536.794,00	(350.968.089,00)	66,99	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01		PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS	229.889.180,00	122.860.314,00	(107.028.866,00)	53,44	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01.0003		PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	229.889.180,00	122.860.314,00	(107.028.866,00)	53,44	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	229.889.180,00	122.860.314,00	(107.028.866,00)	53,44	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.889.180,00	122.860.314,00	(107.028.866,00)	53,44	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02		SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	833.615.703,00	589.676.480,00	(243.939.223,00)	70,73	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007		PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN	833.615.703,00	589.676.480,00	(243.939.223,00)	70,73	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	833.615.703,00	589.676.480,00	(243.939.223,00)	70,73	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	833.615.703,00	589.676.480,00	(243.939.223,00)	70,73	
				JUMLAH BELANJA	1.063.504.883,00	712.536.794,00	(350.968.089,00)	66,99	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.063.504.883,00)	(712.536.794,00)	350.968.089,00	66,99	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.063.504.883,00)	(712.536.794,00)	350.968.089,00	66,99	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : Inspektorat

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	11.385.275.163,00	10.113.194.498,00	(1.272.080.665,00)	88,82	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.937.840.092,00	9.804.893.673,00	(1.132.946.419,00)	89,64	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.881.250,00	5.437.598,00	(1.443.652,00)	79,02	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.681.250,00	2.259.000,00	(422.250,00)	84,25	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.681.250,00	2.259.000,00	(422.250,00)	84,25	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.681.250,00	2.259.000,00	(422.250,00)	84,25	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1.200.000,00	888.000,00	(312.000,00)	74,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	888.000,00	(312.000,00)	74,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	888.000,00	(312.000,00)	74,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1.200.000,00	958.598,00	(241.402,00)	79,88	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	958.598,00	(241.402,00)	79,88	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	958.598,00	(241.402,00)	79,88	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	600.000,00	444.000,00	(156.000,00)	74,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	444.000,00	(156.000,00)	74,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	444.000,00	(156.000,00)	74,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	600.000,00	444.000,00	(156.000,00)	74,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	444.000,00	(156.000,00)	74,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	444.000,00	(156.000,00)	74,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	600.000,00	444.000,00	(156.000,00)	74,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	444.000,00	(156.000,00)	74,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	444.000,00	(156.000,00)	74,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	9.847.313.067,00	8.839.508.210,00	(1.007.804.857,00)	89,76	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	9.845.274.567,00	8.837.957.919,00	(1.007.316.648,00)	89,76	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.845.274.567,00	8.837.957.919,00	(1.007.316.648,00)	89,76	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	9.845.274.567,00	8.837.957.919,00	(1.007.316.648,00)	89,76	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.137.000,00	868.307,00	(268.693,00)	76,36	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.137.000,00	868.307,00	(268.693,00)	76,36	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.137.000,00	868.307,00	(268.693,00)	76,36	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	901.500,00	681.984,00	(219.516,00)	75,64	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	901.500,00	681.984,00	(219.516,00)	75,64	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	901.500,00	681.984,00	(219.516,00)	75,64	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	249.089.363,00	229.726.226,00	(19.363.137,00)	92,22	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0005		MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	2.647.350,00	2.262.500,00	(384.850,00)	85,46	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.647.350,00	2.262.500,00	(384.850,00)	85,46	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.647.350,00	2.262.500,00	(384.850,00)	85,46	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	246.442.013,00	227.463.726,00	(18.978.287,00)	92,29	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	246.442.013,00	227.463.726,00	(18.978.287,00)	92,29	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.442.013,00	227.463.726,00	(18.978.287,00)	92,29	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	300.075.982,00	267.562.637,00	(32.513.345,00)	89,16	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.625.260,00	3.152.400,00	(472.860,00)	86,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.625.260,00	3.152.400,00	(472.860,00)	86,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.625.260,00	3.152.400,00	(472.860,00)	86,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	34.189.519,00	23.999.750,00	(10.189.769,00)	70,19	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	34.189.519,00	23.999.750,00	(10.189.769,00)	70,19	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.189.519,00	23.999.750,00	(10.189.769,00)	70,19	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	10.069.143,00	8.336.200,00	(1.732.943,00)	82,78	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.069.143,00	8.336.200,00	(1.732.943,00)	82,78	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.069.143,00	8.336.200,00	(1.732.943,00)	82,78	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	110.210.340,00	96.984.980,00	(13.225.360,00)	87,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	110.210.340,00	96.984.980,00	(13.225.360,00)	87,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.210.340,00	96.984.980,00	(13.225.360,00)	87,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.664.600,00	933.500,00	(1.731.100,00)	35,03	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.664.600,00	933.500,00	(1.731.100,00)	35,03	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.664.600,00	933.500,00	(1.731.100,00)	35,03	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.317.120,00	7.235.000,00	(82.120,00)	98,87	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.317.120,00	7.235.000,00	(82.120,00)	98,87	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.317.120,00	7.235.000,00	(82.120,00)	98,87	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	132.000.000,00	126.920.807,00	(5.079.193,00)	96,15	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	132.000.000,00	126.920.807,00	(5.079.193,00)	96,15	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.000.000,00	126.920.807,00	(5.079.193,00)	96,15	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	93.010.230,00	76.212.600,00	(16.797.630,00)	81,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	11.246.520,00	9.279.600,00	(1.966.920,00)	82,51	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	11.246.520,00	9.279.600,00	(1.966.920,00)	82,51	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.246.520,00	9.279.600,00	(1.966.920,00)	82,51	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	81.763.710,00	66.933.000,00	(14.830.710,00)	81,86	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	830.280,00	0,00	(830.280,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	830.280,00	0,00	(830.280,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	80.933.430,00	66.933.000,00	(14.000.430,00)	82,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.933.430,00	66.933.000,00	(14.000.430,00)	82,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	296.571.000,00	257.444.352,00	(39.126.648,00)	86,80	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	680.000,00	557.000,00	(123.000,00)	81,91	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	680.000,00	557.000,00	(123.000,00)	81,91	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	557.000,00	(123.000,00)	81,91	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	130.000.000,00	113.115.152,00	(16.884.848,00)	87,01	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000,00	113.115.152,00	(16.884.848,00)	87,01	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	113.115.152,00	(16.884.848,00)	87,01	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	165.891.000,00	143.772.200,00	(22.118.800,00)	86,66	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	165.891.000,00	143.772.200,00	(22.118.800,00)	86,66	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.891.000,00	143.772.200,00	(22.118.800,00)	86,66	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	144.899.200,00	129.002.050,00	(15.897.150,00)	89,02	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	99.604.720,00	84.676.950,00	(14.927.770,00)	85,01	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	99.604.720,00	84.676.950,00	(14.927.770,00)	85,01	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.604.720,00	84.676.950,00	(14.927.770,00)	85,01	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	20.910.000,00	19.941.100,00	(968.900,00)	95,36	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	20.910.000,00	19.941.100,00	(968.900,00)	95,36	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.910.000,00	19.941.100,00	(968.900,00)	95,36	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	24.384.480,00	24.384.000,00	(480,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	24.384.480,00	24.384.000,00	(480,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.384.480,00	24.384.000,00	(480,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	265.940.730,00	158.892.995,00	(107.047.735,00)	59,74	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	105.312.130,00	55.575.235,00	(49.736.895,00)	52,77	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001		PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	5.901.610,00	5.052.000,00	(849.610,00)	85,60	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.901.610,00	5.052.000,00	(849.610,00)	85,60	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.901.610,00	5.052.000,00	(849.610,00)	85,60	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002		PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	14.984.994,00	5.318.000,00	(9.666.994,00)	35,48	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.984.994,00	5.318.000,00	(9.666.994,00)	35,48	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.984.994,00	5.318.000,00	(9.666.994,00)	35,48	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003		REVIU LAPORAN KINERJA	1.977.846,00	1.515.000,00	(462.846,00)	76,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.977.846,00	1.515.000,00	(462.846,00)	76,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.977.846,00	1.515.000,00	(462.846,00)	76,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004		REVIU LAPORAN KEUANGAN	20.072.945,00	10.181.965,00	(9.890.980,00)	50,72	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	20.072.945,00	10.181.965,00	(9.890.980,00)	50,72	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.072.945,00	10.181.965,00	(9.890.980,00)	50,72	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005		PENGAWASAN DESA	28.767.505,00	7.668.500,00	(21.099.005,00)	26,65	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	28.767.505,00	7.668.500,00	(21.099.005,00)	26,65	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.767.505,00	7.668.500,00	(21.099.005,00)	26,65	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007		MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP	33.607.230,00	25.839.770,00	(7.767.460,00)	76,88	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	33.607.230,00	25.839.770,00	(7.767.460,00)	76,88	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.607.230,00	25.839.770,00	(7.767.460,00)	76,88	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	160.628.600,00	103.317.760,00	(57.310.840,00)	64,32	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001		PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH	53.732.480,00	15.551.940,00	(38.180.540,00)	28,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	53.732.480,00	15.551.940,00	(38.180.540,00)	28,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.732.480,00	15.551.940,00	(38.180.540,00)	28,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002		PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	106.896.120,00	87.765.820,00	(19.130.300,00)	82,10	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	106.896.120,00	87.765.820,00	(19.130.300,00)	82,10	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.896.120,00	87.765.820,00	(19.130.300,00)	82,10	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.1.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	181.494.341,00	149.407.830,00	(32.086.511,00)	82,32	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01.0001		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN	7.342.700,00	4.247.580,00	(3.095.120,00)	57,84	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.342.700,00	4.247.580,00	(3.095.120,00)	57,84	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.342.700,00	4.247.580,00	(3.095.120,00)	57,84	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	174.151.641,00	145.160.250,00	(28.991.391,00)	83,35	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	26.904.282,00	23.442.500,00	(3.461.782,00)	87,13	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.904.282,00	23.442.500,00	(3.461.782,00)	87,13	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.904.282,00	23.442.500,00	(3.461.782,00)	87,13	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002		PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI	8.712.900,00	4.187.500,00	(4.525.400,00)	48,06	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.712.900,00	4.187.500,00	(4.525.400,00)	48,06	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.712.900,00	4.187.500,00	(4.525.400,00)	48,06	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003		KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	131.749.140,00	117.415.250,00	(14.333.890,00)	89,12	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	131.749.140,00	117.415.250,00	(14.333.890,00)	89,12	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.749.140,00	117.415.250,00	(14.333.890,00)	89,12	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0004		PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS	6.785.319,00	115.000,00	(6.670.319,00)	1,69	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.785.319,00	115.000,00	(6.670.319,00)	1,69	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.785.319,00	115.000,00	(6.670.319,00)	1,69	
				JUMLAH BELANJA	11.385.275.163,00	10.113.194.498,00	(1.272.080.665,00)	88,82	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(11.385.275.163,00)	(10.113.194.498,00)	1.272.080.665,00	88,82	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(11.385.275.163,00)	(10.113.194.498,00)	1.272.080.665,00	88,82	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Tanjungpandan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00		5	BELANJA DAERAH	16.775.910.646,00	14.435.759.894,00	(2.340.150.752,00)	86,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.544.002.994,00	10.415.185.308,00	(2.128.817.686,00)	83,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	10.364.720,00	9.591.600,00	(773.120,00)	92,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	697.200,00	697.200,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	697.200,00	697.200,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	697.200,00	697.200,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	3.360.700,00	3.092.700,00	(268.000,00)	92,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.360.700,00	3.092.700,00	(268.000,00)	92,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.360.700,00	3.092.700,00	(268.000,00)	92,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	3.360.700,00	3.093.700,00	(267.000,00)	92,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.360.700,00	3.093.700,00	(267.000,00)	92,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.360.700,00	3.093.700,00	(267.000,00)	92,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	697.200,00	615.000,00	(82.200,00)	88,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	697.200,00	615.000,00	(82.200,00)	88,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	697.200,00	615.000,00	(82.200,00)	88,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	697.200,00	696.000,00	(1.200,00)	99,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	697.200,00	696.000,00	(1.200,00)	99,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	697.200,00	696.000,00	(1.200,00)	99,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.551.720,00	1.397.000,00	(154.720,00)	90,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.551.720,00	1.397.000,00	(154.720,00)	90,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.551.720,00	1.397.000,00	(154.720,00)	90,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	9.865.980.349,00	8.169.372.901,00	(1.696.607.448,00)	82,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	9.855.065.349,00	8.159.168.701,00	(1.695.896.648,00)	82,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.855.065.349,00	8.159.168.701,00	(1.695.896.648,00)	82,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	9.855.065.349,00	8.159.168.701,00	(1.695.896.648,00)	82,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	5.066.500,00	4.737.300,00	(329.200,00)	93,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.066.500,00	4.737.300,00	(329.200,00)	93,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.066.500,00	4.737.300,00	(329.200,00)	93,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	5.848.500,00	5.466.900,00	(381.600,00)	93,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.848.500,00	5.466.900,00	(381.600,00)	93,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.848.500,00	5.466.900,00	(381.600,00)	93,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	738.815.525,00	626.365.690,00	(112.449.835,00)	84,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	34.712.713,00	33.267.622,00	(1.445.091,00)	95,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.712.713,00	33.267.622,00	(1.445.091,00)	95,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.712.713,00	33.267.622,00	(1.445.091,00)	95,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	153.206.818,00	139.776.478,00	(13.430.340,00)	91,23	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	153.206.818,00	139.776.478,00	(13.430.340,00)	91,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.206.818,00	139.776.478,00	(13.430.340,00)	91,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	41.260.111,00	38.443.855,00	(2.816.256,00)	93,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	41.260.111,00	38.443.855,00	(2.816.256,00)	93,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.260.111,00	38.443.855,00	(2.816.256,00)	93,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	268.125.113,00	230.860.568,00	(37.264.545,00)	86,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	268.125.113,00	230.860.568,00	(37.264.545,00)	86,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.125.113,00	230.860.568,00	(37.264.545,00)	86,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	83.470.550,00	77.650.900,00	(5.819.650,00)	93,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	83.470.550,00	77.650.900,00	(5.819.650,00)	93,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.470.550,00	77.650.900,00	(5.819.650,00)	93,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	35.379.040,00	25.118.000,00	(10.261.040,00)	70,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	35.379.040,00	25.118.000,00	(10.261.040,00)	70,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.379.040,00	25.118.000,00	(10.261.040,00)	70,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	122.661.180,00	81.248.267,00	(41.412.913,00)	66,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	122.661.180,00	81.248.267,00	(41.412.913,00)	66,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.661.180,00	81.248.267,00	(41.412.913,00)	66,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.363.935.400,00	1.115.150.718,00	(248.784.682,00)	81,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	269.054.800,00	230.794.718,00	(38.260.082,00)	85,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	269.054.800,00	230.794.718,00	(38.260.082,00)	85,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	269.054.800,00	230.794.718,00	(38.260.082,00)	85,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.094.880.600,00	884.356.000,00	(210.524.600,00)	80,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.094.880.600,00	884.356.000,00	(210.524.600,00)	80,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.094.880.600,00	884.356.000,00	(210.524.600,00)	80,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	552.907.000,00	494.704.399,00	(58.202.601,00)	89,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	111.307.000,00	83.819.499,00	(27.487.501,00)	75,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	111.307.000,00	83.819.499,00	(27.487.501,00)	75,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.307.000,00	83.819.499,00	(27.487.501,00)	75,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	48.593.000,00	35.281.700,00	(13.311.300,00)	72,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	48.593.000,00	35.281.700,00	(13.311.300,00)	72,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.593.000,00	35.281.700,00	(13.311.300,00)	72,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	123.437.000,00	109.647.990,00	(13.789.010,00)	88,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	123.437.000,00	109.647.990,00	(13.789.010,00)	88,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.437.000,00	109.647.990,00	(13.789.010,00)	88,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	269.570.000,00	265.955.210,00	(3.614.790,00)	98,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	269.570.000,00	265.955.210,00	(3.614.790,00)	98,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	269.570.000,00	265.955.210,00	(3.614.790,00)	98,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.339.995.800,00	1.334.166.500,00	(5.829.300,00)	99,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	1.339.995.800,00	1.334.166.500,00	(5.829.300,00)	99,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	1.339.995.800,00	1.334.166.500,00	(5.829.300,00)	99,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.339.995.800,00	1.334.166.500,00	(5.829.300,00)	99,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.339.995.800,00	1.334.166.500,00	(5.829.300,00)	99,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.373.400.385,00	2.232.389.086,00	(141.011.299,00)	94,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	141.423.620,00	131.485.000,00	(9.938.620,00)	92,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.03.2.01.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	27.467.720,00	24.629.500,00	(2.838.220,00)	89,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	27.467.720,00	24.629.500,00	(2.838.220,00)	89,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.467.720,00	24.629.500,00	(2.838.220,00)	89,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	113.955.900,00	106.855.500,00	(7.100.400,00)	93,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	113.955.900,00	106.855.500,00	(7.100.400,00)	93,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.955.900,00	106.855.500,00	(7.100.400,00)	93,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	2.231.976.765,00	2.100.904.086,00	(131.072.679,00)	94,12	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.03.2.02.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	98.100.468,00	92.135.267,00	(5.965.201,00)	93,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	98.100.468,00	92.135.267,00	(5.965.201,00)	93,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.100.468,00	92.135.267,00	(5.965.201,00)	93,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	392.305.900,00	368.604.271,00	(23.701.629,00)	93,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	392.305.900,00	368.604.271,00	(23.701.629,00)	93,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	392.305.900,00	368.604.271,00	(23.701.629,00)	93,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	1.741.570.397,00	1.640.164.548,00	(101.405.849,00)	94,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.741.570.397,00	1.640.164.548,00	(101.405.849,00)	94,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.741.570.397,00	1.640.164.548,00	(101.405.849,00)	94,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.1.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	432.435.842,00	372.646.900,00	(59.788.942,00)	86,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	432.435.842,00	372.646.900,00	(59.788.942,00)	86,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.05.2.01.0003		PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	17.260.450,00	16.169.200,00	(1.091.250,00)	93,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	17.260.450,00	16.169.200,00	(1.091.250,00)	93,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.260.450,00	16.169.200,00	(1.091.250,00)	93,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.05.2.01.0004		PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL	415.175.392,00	356.477.700,00	(58.697.692,00)	85,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	415.175.392,00	356.477.700,00	(58.697.692,00)	85,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	415.175.392,00	356.477.700,00	(58.697.692,00)	85,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.1.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	86.075.625,00	81.372.100,00	(4.703.525,00)	94,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	86.075.625,00	81.372.100,00	(4.703.525,00)	94,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.06.2.01.0002		FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	41.488.125,00	41.286.600,00	(201.525,00)	99,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	41.488.125,00	41.286.600,00	(201.525,00)	99,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.488.125,00	41.286.600,00	(201.525,00)	99,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.06.2.01.0009		FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA	44.587.500,00	40.085.500,00	(4.502.000,00)	89,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	44.587.500,00	40.085.500,00	(4.502.000,00)	89,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.587.500,00	40.085.500,00	(4.502.000,00)	89,90	
				JUMLAH BELANJA	16.775.910.646,00	14.435.759.894,00	(2.340.150.752,00)	86,05	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(16.775.910.646,00)	(14.435.759.894,00)	2.340.150.752,00	86,05	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(16.775.910.646,00)	(14.435.759.894,00)	2.340.150.752,00	86,05	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Badau

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	3.125.603.554,00	2.638.575.268,00	(487.028.286,00)	84,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.850.761.877,00	2.382.309.228,00	(468.452.649,00)	83,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.650.000,00	4.549.800,00	(100.200,00)	97,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	750.000,00	649.800,00	(100.200,00)	86,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	750.000,00	649.800,00	(100.200,00)	86,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	649.800,00	(100.200,00)	86,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.352.724.491,00	1.953.448.194,00	(399.276.297,00)	83,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.352.124.491,00	1.952.848.194,00	(399.276.297,00)	83,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.352.124.491,00	1.952.848.194,00	(399.276.297,00)	83,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.352.124.491,00	1.952.848.194,00	(399.276.297,00)	83,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	38.800.000,00	32.290.500,00	(6.509.500,00)	83,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	38.800.000,00	32.290.500,00	(6.509.500,00)	83,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	38.800.000,00	32.290.500,00	(6.509.500,00)	83,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.800.000,00	32.290.500,00	(6.509.500,00)	83,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	168.001.186,00	143.211.610,00	(24.789.576,00)	85,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.389.498,00	1.356.300,00	(33.198,00)	97,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.389.498,00	1.356.300,00	(33.198,00)	97,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.389.498,00	1.356.300,00	(33.198,00)	97,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	14.986.887,00	11.021.925,00	(3.964.962,00)	73,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.986.887,00	11.021.925,00	(3.964.962,00)	73,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.986.887,00	11.021.925,00	(3.964.962,00)	73,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	6.943.161,00	6.935.000,00	(8.161,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.943.161,00	6.935.000,00	(8.161,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.943.161,00	6.935.000,00	(8.161,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	99.475.320,00	88.059.750,00	(11.415.570,00)	88,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	99.475.320,00	88.059.750,00	(11.415.570,00)	88,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.475.320,00	88.059.750,00	(11.415.570,00)	88,52	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.662.000,00	7.624.800,00	(37.200,00)	99,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.662.000,00	7.624.800,00	(37.200,00)	99,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.662.000,00	7.624.800,00	(37.200,00)	99,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.544.320,00	1.800.000,00	(1.744.320,00)	50,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.544.320,00	1.800.000,00	(1.744.320,00)	50,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.544.320,00	1.800.000,00	(1.744.320,00)	50,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	34.000.000,00	26.413.835,00	(7.586.165,00)	77,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	34.000.000,00	26.413.835,00	(7.586.165,00)	77,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	26.413.835,00	(7.586.165,00)	77,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	222.769.200,00	188.641.124,00	(34.128.076,00)	84,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	700.000,00	650.000,00	(50.000,00)	92,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	700.000,00	650.000,00	(50.000,00)	92,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	650.000,00	(50.000,00)	92,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	23.000.000,00	22.100.124,00	(899.876,00)	96,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.000.000,00	22.100.124,00	(899.876,00)	96,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	22.100.124,00	(899.876,00)	96,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	199.069.200,00	165.891.000,00	(33.178.200,00)	83,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	199.069.200,00	165.891.000,00	(33.178.200,00)	83,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.069.200,00	165.891.000,00	(33.178.200,00)	83,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	63.817.000,00	60.168.000,00	(3.649.000,00)	94,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU	34.123.000,00	30.806.200,00	(3.316.800,00)	90,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.123.000,00	30.806.200,00	(3.316.800,00)	90,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.123.000,00	30.806.200,00	(3.316.800,00)	90,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	12.210.000,00	11.895.000,00	(315.000,00)	97,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	12.210.000,00	11.895.000,00	(315.000,00)	97,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.210.000,00	11.895.000,00	(315.000,00)	97,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	17.484.000,00	17.466.800,00	(17.200,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	17.484.000,00	17.466.800,00	(17.200,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.484.000,00	17.466.800,00	(17.200,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	42.967.210,00	39.843.000,00	(3.124.210,00)	92,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	42.967.210,00	39.843.000,00	(3.124.210,00)	92,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	20.886.310,00	18.486.000,00	(2.400.310,00)	88,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.886.310,00	18.486.000,00	(2.400.310,00)	88,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.886.310,00	18.486.000,00	(2.400.310,00)	88,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	22.080.900,00	21.357.000,00	(723.900,00)	96,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	22.080.900,00	21.357.000,00	(723.900,00)	96,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.080.900,00	21.357.000,00	(723.900,00)	96,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.1.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	182.898.375,00	173.494.440,00	(9.403.935,00)	94,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	182.898.375,00	173.494.440,00	(9.403.935,00)	94,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0003		PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	32.307.275,00	28.077.940,00	(4.229.335,00)	86,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	32.307.275,00	28.077.940,00	(4.229.335,00)	86,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.307.275,00	28.077.940,00	(4.229.335,00)	86,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0004		PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL	150.591.100,00	145.416.500,00	(5.174.600,00)	96,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	150.591.100,00	145.416.500,00	(5.174.600,00)	96,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.591.100,00	145.416.500,00	(5.174.600,00)	96,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.1.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	48.976.092,00	42.928.600,00	(6.047.492,00)	87,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	48.976.092,00	42.928.600,00	(6.047.492,00)	87,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0002		FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	24.284.250,00	21.967.000,00	(2.317.250,00)	90,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.284.250,00	21.967.000,00	(2.317.250,00)	90,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.284.250,00	21.967.000,00	(2.317.250,00)	90,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0009		FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA	24.691.842,00	20.961.600,00	(3.730.242,00)	84,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	24.691.842,00	20.961.600,00	(3.730.242,00)	84,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.691.842,00	20.961.600,00	(3.730.242,00)	84,89	
				JUMLAH BELANJA	3.125.603.554,00	2.638.575.268,00	(487.028.286,00)	84,41	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.125.603.554,00)	(2.638.575.268,00)	487.028.286,00	84,41	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.125.603.554,00)	(2.638.575.268,00)	487.028.286,00	84,41	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Sijuk

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	3.588.730.266,00	3.046.203.339,00	(542.526.927,00)	84,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.181.520.466,00	2.644.300.839,00	(537.219.627,00)	83,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.678.200,00	1.678.200,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	223.800,00	223.800,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	223.800,00	223.800,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.800,00	223.800,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	138.600,00	138.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	138.600,00	138.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.600,00	138.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	285.000,00	285.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	285.000,00	285.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.000,00	285.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	310.200,00	310.200,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	310.200,00	310.200,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.200,00	310.200,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	214.200,00	214.200,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	214.200,00	214.200,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.200,00	214.200,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	206.400,00	206.400,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	206.400,00	206.400,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.400,00	206.400,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.697.540.926,00	2.203.284.406,00	(494.256.520,00)	81,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.696.742.926,00	2.202.486.406,00	(494.256.520,00)	81,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.696.742.926,00	2.202.486.406,00	(494.256.520,00)	81,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.696.742.926,00	2.202.486.406,00	(494.256.520,00)	81,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	169.200,00	169.200,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	169.200,00	169.200,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.200,00	169.200,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	628.800,00	628.800,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	628.800,00	628.800,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	628.800,00	628.800,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	27.800.000,00	23.190.968,00	(4.609.032,00)	83,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	27.800.000,00	23.190.968,00	(4.609.032,00)	83,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	27.800.000,00	23.190.968,00	(4.609.032,00)	83,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.800.000,00	23.190.968,00	(4.609.032,00)	83,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	201.695.300,00	190.313.778,00	(11.381.522,00)	94,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.278.000,00	5.252.500,00	(25.500,00)	99,51	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.278.000,00	5.252.500,00	(25.500,00)	99,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.278.000,00	5.252.500,00	(25.500,00)	99,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	38.360.700,00	34.001.500,00	(4.359.200,00)	88,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	38.360.700,00	34.001.500,00	(4.359.200,00)	88,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.360.700,00	34.001.500,00	(4.359.200,00)	88,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	6.274.400,00	6.231.500,00	(42.900,00)	99,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.274.400,00	6.231.500,00	(42.900,00)	99,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.274.400,00	6.231.500,00	(42.900,00)	99,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	108.604.000,00	103.104.250,00	(5.499.750,00)	94,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	108.604.000,00	103.104.250,00	(5.499.750,00)	94,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.604.000,00	103.104.250,00	(5.499.750,00)	94,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.378.200,00	5.020.400,00	(1.357.800,00)	78,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.378.200,00	5.020.400,00	(1.357.800,00)	78,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.378.200,00	5.020.400,00	(1.357.800,00)	78,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	36.800.000,00	36.703.628,00	(96.372,00)	99,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	36.800.000,00	36.703.628,00	(96.372,00)	99,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.800.000,00	36.703.628,00	(96.372,00)	99,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	21.280.440,00	19.647.000,00	(1.633.440,00)	92,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	21.280.440,00	19.647.000,00	(1.633.440,00)	92,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	21.280.440,00	19.647.000,00	(1.633.440,00)	92,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.280.440,00	19.647.000,00	(1.633.440,00)	92,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	130.784.600,00	114.935.700,00	(15.848.900,00)	87,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	31.000.000,00	15.151.100,00	(15.848.900,00)	48,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	31.000.000,00	15.151.100,00	(15.848.900,00)	48,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	15.151.100,00	(15.848.900,00)	48,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	99.534.600,00	99.534.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	99.534.600,00	99.534.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.534.600,00	99.534.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100.741.000,00	91.250.787,00	(9.490.213,00)	90,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	20.868.000,00	19.751.100,00	(1.116.900,00)	94,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.868.000,00	19.751.100,00	(1.116.900,00)	94,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.868.000,00	19.751.100,00	(1.116.900,00)	94,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	35.158.000,00	32.733.200,00	(2.424.800,00)	93,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	35.158.000,00	32.733.200,00	(2.424.800,00)	93,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.158.000,00	32.733.200,00	(2.424.800,00)	93,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	19.990.000,00	14.555.000,00	(5.435.000,00)	72,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	19.990.000,00	14.555.000,00	(5.435.000,00)	72,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.990.000,00	14.555.000,00	(5.435.000,00)	72,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	24.725.000,00	24.211.487,00	(513.513,00)	97,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	24.725.000,00	24.211.487,00	(513.513,00)	97,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.725.000,00	24.211.487,00	(513.513,00)	97,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	66.907.000,00	66.567.000,00	(340.000,00)	99,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	66.907.000,00	66.567.000,00	(340.000,00)	99,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	17.427.000,00	17.427.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.427.000,00	17.427.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.427.000,00	17.427.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	49.480.000,00	49.140.000,00	(340.000,00)	99,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	49.480.000,00	49.140.000,00	(340.000,00)	99,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.480.000,00	49.140.000,00	(340.000,00)	99,31	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.1.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	316.127.800,00	311.160.500,00	(4.967.300,00)	98,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	316.127.800,00	311.160.500,00	(4.967.300,00)	98,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0003		PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	193.154.000,00	191.586.700,00	(1.567.300,00)	99,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	193.154.000,00	191.586.700,00	(1.567.300,00)	99,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.154.000,00	191.586.700,00	(1.567.300,00)	99,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0004		PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL	122.973.800,00	119.573.800,00	(3.400.000,00)	97,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	122.973.800,00	119.573.800,00	(3.400.000,00)	97,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.973.800,00	119.573.800,00	(3.400.000,00)	97,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.1.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	24.175.000,00	24.175.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	24.175.000,00	24.175.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0002		FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	17.020.000,00	17.020.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.020.000,00	17.020.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.020.000,00	17.020.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0009		FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA	7.155.000,00	7.155.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	7.155.000,00	7.155.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.155.000,00	7.155.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	3.588.730.266,00	3.046.203.339,00	(542.526.927,00)	84,88	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.588.730.266,00)	(3.046.203.339,00)	542.526.927,00	84,88	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.588.730.266,00)	(3.046.203.339,00)	542.526.927,00	84,88	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

3
Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Membalong

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		5	BELANJA DAERAH	3.685.870.083,00	3.345.279.517,00	(340.590.566,00)	90,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.288.614.483,00	2.973.029.257,00	(315.585.226,00)	90,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.253.000,00	2.250.000,00	(3.000,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	375.500,00	375.000,00	(500,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	375.500,00	375.000,00	(500,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.500,00	375.000,00	(500,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	375.500,00	375.000,00	(500,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	375.500,00	375.000,00	(500,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.500,00	375.000,00	(500,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	375.500,00	375.000,00	(500,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	375.500,00	375.000,00	(500,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.500,00	375.000,00	(500,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	375.500,00	375.000,00	(500,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	375.500,00	375.000,00	(500,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.500,00	375.000,00	(500,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	375.500,00	375.000,00	(500,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	375.500,00	375.000,00	(500,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.500,00	375.000,00	(500,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	375.500,00	375.000,00	(500,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI		375.000,00	(500,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.500,00	375.000,00	(500,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.778.037.788,00	2.588.928.472,00	(189.109.316,00)	93,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.777.286.788,00	2.588.178.472,00	(189.108.316,00)	93,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.777.286.788,00	2.588.178.472,00	(189.108.316,00)	93,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.777.286.788,00	2.588.178.472,00	(189.108.316,00)	93,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	375.500,00	375.000,00	(500,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	375.500,00	375.000,00	(500,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.500,00	375.000,00	(500,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	375.500,00	375.000,00	(500,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	375.500,00	375.000,00	(500,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.500,00	375.000,00	(500,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	30.000.000,00	17.723.003,00	(12.276.997,00)	59,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	30.000.000,00	17.723.003,00	(12.276.997,00)	59,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	17.723.003,00	(12.276.997,00)	59,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	17.723.003,00	(12.276.997,00)	59,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	186.418.895,00	169.465.125,00	(16.953.770,00)	90,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.378.616,00	3.625.200,00	(1.753.416,00)	67,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.378.616,00	3.625.200,00	(1.753.416,00)	67,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.378.616,00	3.625.200,00	(1.753.416,00)	67,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	33.586.998,00	29.718.600,00	(3.868.398,00)	88,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	33.586.998,00	29.718.600,00	(3.868.398,00)	88,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.586.998,00	29.718.600,00	(3.868.398,00)	88,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.269.281,00	4.585.500,00	(683.781,00)	87,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.269.281,00	4.585.500,00	(683.781,00)	87,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.269.281,00	4.585.500,00	(683.781,00)	87,02	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	97.984.000,00	90.842.200,00	(7.141.800,00)	92,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	97.984.000,00	90.842.200,00	(7.141.800,00)	92,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.984.000,00	90.842.200,00	(7.141.800,00)	92,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.200.000,00	7.104.500,00	(95.500,00)	98,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	7.104.500,00	(95.500,00)	98,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.104.500,00	(95.500,00)	98,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	37.000.000,00	33.589.125,00	(3.410.875,00)	90,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	37.000.000,00	33.589.125,00	(3.410.875,00)	90,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	33.589.125,00	(3.410.875,00)	90,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	207.712.800,00	121.246.057,00	(86.466.743,00)	58,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	74.000.000,00	40.081.473,00	(33.918.527,00)	54,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	74.000.000,00	40.081.473,00	(33.918.527,00)	54,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.000.000,00	40.081.473,00	(33.918.527,00)	54,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	132.712.800,00	80.164.584,00	(52.548.216,00)	60,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	132.712.800,00	80.164.584,00	(52.548.216,00)	60,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.712.800,00	80.164.584,00	(52.548.216,00)	60,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	84.192.000,00	73.416.600,00	(10.775.400,00)	87,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU	35.848.000,00	33.868.000,00	(1.980.000,00)	94,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	35.848.000,00	33.868.000,00	(1.980.000,00)	94,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.848.000,00	33.868.000,00	(1.980.000,00)	94,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS	23.624.000,00	21.938.600,00	(1.685.400,00)	92,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.624.000,00	21.938.600,00	(1.685.400,00)	92,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.624.000,00	21.938.600,00	(1.685.400,00)	92,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	20.420.000,00	13.319.000,00	(7.101.000,00)	65,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	20.420.000,00	13.319.000,00	(7.101.000,00)	65,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.420.000,00	13.319.000,00	(7.101.000,00)	65,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	4.300.000,00	4.291.000,00	(9.000,00)	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	4.300.000,00	4.291.000,00	(9.000,00)	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	4.291.000,00	(9.000,00)	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	99.575.000,00	87.532.000,00	(12.043.000,00)	87,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	99.575.000,00	87.532.000,00	(12.043.000,00)	87,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	75.575.000,00	63.532.000,00	(12.043.000,00)	84,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	75.575.000,00	63.532.000,00	(12.043.000,00)	84,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.575.000,00	63.532.000,00	(12.043.000,00)	84,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.1.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	277.359.600,00	265.156.460,00	(12.203.140,00)	95,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	277.359.600,00	265.156.460,00	(12.203.140,00)	95,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0003		PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	142.379.600,00	130.726.460,00	(11.653.140,00)	91,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	142.379.600,00	130.726.460,00	(11.653.140,00)	91,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.379.600,00	130.726.460,00	(11.653.140,00)	91,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0004		PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL	134.980.000,00	134.430.000,00	(550.000,00)	99,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	134.980.000,00	134.430.000,00	(550.000,00)	99,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.980.000,00	134.430.000,00	(550.000,00)	99,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.1.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.321.000,00	19.561.800,00	(759.200,00)	96,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.321.000,00	19.561.800,00	(759.200,00)	96,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0002		FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	18.491.000,00	18.483.000,00	(8.000,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.491.000,00	18.483.000,00	(8.000,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.491.000,00	18.483.000,00	(8.000,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0009		FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA	1.830.000,00	1.078.800,00	(751.200,00)	58,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.830.000,00	1.078.800,00	(751.200,00)	58,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.830.000,00	1.078.800,00	(751.200,00)	58,95	
				JUMLAH BELANJA	3.685.870.083,00	3.345.279.517,00	(340.590.566,00)	90,75	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.685.870.083,00)	(3.345.279.517,00)	340.590.566,00	90,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.685.870.083,00)	(3.345.279.517,00)	340.590.566,00	90,75	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Selat Nasik

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	7.01.0.00.0.00.05.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
	7.01.0.00.0.00.05.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
	7.01.0.00.0.00.05.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		5	BELANJA DAERAH	3.313.847.303,00	2.737.848.162,31	(575.999.140,69)	82,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.968.967.141,00	2.421.560.811,31	(547.406.329,69)	81,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.729.408,00	2.338.000,00	(391.408,00)	85,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	446.392,00	425.800,00	(20.592,00)	95,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	446.392,00	425.800,00	(20.592,00)	95,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	446.392,00	425.800,00	(20.592,00)	95,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	497.076,00	492.500,00	(4.576,00)	99,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	497.076,00	492.500,00	(4.576,00)	99,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	497.076,00	492.500,00	(4.576,00)	99,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	494.172,00	492.500,00	(1.672,00)	99,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	494.172,00	492.500,00	(1.672,00)	99,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	494.172,00	492.500,00	(1.672,00)	99,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	449.500,00	449.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	449.500,00	449.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.500,00	449.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	467.532,00	108.000,00	(359.532,00)	23,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	467.532,00	108.000,00	(359.532,00)	23,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	467.532,00	108.000,00	(359.532,00)	23,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	374.736,00	369.700,00	(5.036,00)	98,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	374.736,00	369.700,00	(5.036,00)	98,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	374.736,00	369.700,00	(5.036,00)	98,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.377.086.783,00	1.878.894.377,00	(498.192.406,00)	79,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.376.400.983,00	1.878.232.577,00	(498.168.406,00)	79,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.376.400.983,00	1.878.232.577,00	(498.168.406,00)	79,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.376.400.983,00	1.878.232.577,00	(498.168.406,00)	79,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	685.800,00	661.800,00	(24.000,00)	96,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	685.800,00	661.800,00	(24.000,00)	96,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	685.800,00	661.800,00	(24.000,00)	96,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	24.450.000,00	18.212.400,00	(6.237.600,00)	74,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	24.450.000,00	18.212.400,00	(6.237.600,00)	74,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	24.450.000,00	18.212.400,00	(6.237.600,00)	74,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.450.000,00	18.212.400,00	(6.237.600,00)	74,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	95.547.510,00	87.619.016,00	(7.928.494,00)	91,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.635.471,00	4.561.000,00	(74.471,00)	98,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.635.471,00	4.561.000,00	(74.471,00)	98,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.635.471,00	4.561.000,00	(74.471,00)	98,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	10.833.822,00	10.687.500,00	(146.322,00)	98,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.833.822,00	10.687.500,00	(146.322,00)	98,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.833.822,00	10.687.500,00	(146.322,00)	98,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.514.705,00	2.499.200,00	(15.505,00)	99,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.514.705,00	2.499.200,00	(15.505,00)	99,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.514.705,00	2.499.200,00	(15.505,00)	99,38	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	52.215.175,00	47.668.566,00	(4.546.609,00)	91,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	52.215.175,00	47.668.566,00	(4.546.609,00)	91,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.215.175,00	47.668.566,00	(4.546.609,00)	91,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.548.337,00	3.413.000,00	(135.337,00)	96,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.548.337,00	3.413.000,00	(135.337,00)	96,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.548.337,00	3.413.000,00	(135.337,00)	96,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	21.800.000,00	18.789.750,00	(3.010.250,00)	86,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	21.800.000,00	18.789.750,00	(3.010.250,00)	86,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.800.000,00	18.789.750,00	(3.010.250,00)	86,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	184.141.000,00	160.597.722,00	(23.543.278,00)	87,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	18.250.000,00	14.060.672,00	(4.189.328,00)	77,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.250.000,00	14.060.672,00	(4.189.328,00)	77,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	14.060.672,00	(4.189.328,00)	77,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	165.891.000,00	146.537.050,00	(19.353.950,00)	88,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	165.891.000,00	146.537.050,00	(19.353.950,00)	88,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.891.000,00	146.537.050,00	(19.353.950,00)	88,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	285.012.440,00	273.899.296,31	(11.113.143,69)	96,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	20.818.480,00	19.160.100,00	(1.658.380,00)	92,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.818.480,00	19.160.100,00	(1.658.380,00)	92,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.818.480,00	19.160.100,00	(1.658.380,00)	92,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	41.660.960,00	35.304.800,00	(6.356.160,00)	84,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	41.660.960,00	35.304.800,00	(6.356.160,00)	84,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.660.960,00	35.304.800,00	(6.356.160,00)	84,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	22.533.000,00	20.820.000,00	(1.713.000,00)	92,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	22.533.000,00	20.820.000,00	(1.713.000,00)	92,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.533.000,00	20.820.000,00	(1.713.000,00)	92,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	200.000.000,00	198.614.396,31	(1.385.603,69)	99,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	198.614.396,31	(1.385.603,69)	99,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	198.614.396,31	(1.385.603,69)	99,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	114.431.440,00	92.688.200,00	(21.743.240,00)	80,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	114.431.440,00	92.688.200,00	(21.743.240,00)	80,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	14.362.290,00	13.597.500,00	(764.790,00)	94,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.362.290,00	13.597.500,00	(764.790,00)	94,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.362.290,00	13.597.500,00	(764.790,00)	94,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	100.069.150,00	79.090.700,00	(20.978.450,00)	79,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	100.069.150,00	79.090.700,00	(20.978.450,00)	79,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.069.150,00	79.090.700,00	(20.978.450,00)	79,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.1.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	219.858.582,00	213.214.951,00	(6.643.631,00)	96,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	219.858.582,00	213.214.951,00	(6.643.631,00)	96,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0003		PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	142.840.652,00	138.668.551,00	(4.172.101,00)	97,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	142.840.652,00	138.668.551,00	(4.172.101,00)	97,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.840.652,00	138.668.551,00	(4.172.101,00)	97,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0004		PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL	77.017.930,00	74.546.400,00	(2.471.530,00)	96,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	77.017.930,00	74.546.400,00	(2.471.530,00)	96,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.017.930,00	74.546.400,00	(2.471.530,00)	96,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.1.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.590.140,00	10.384.200,00	(205.940,00)	98,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.590.140,00	10.384.200,00	(205.940,00)	98,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0002		FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	2.565.950,00	2.553.000,00	(12.950,00)	99,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.565.950,00	2.553.000,00	(12.950,00)	99,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.565.950,00	2.553.000,00	(12.950,00)	99,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0009		FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA	8.024.190,00	7.831.200,00	(192.990,00)	97,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	8.024.190,00	7.831.200,00	(192.990,00)	97,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.024.190,00	7.831.200,00	(192.990,00)	97,59	
				JUMLAH BELANJA	3.313.847.303,00	2.737.848.162,31	(575.999.140,69)	82,61	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.313.247.303,00)	(2.737.848.162,31)	575.399.140,69	82,63	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.313.247.303,00)	(2.737.848.162,31)	575.399.140,69	82,63	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. BELITUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	8.178.212.241,00	7.627.146.085,00	(551.066.156,00)	93,26	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.265.989.625,00	3.870.443.949,00	(395.545.676,00)	90,72	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.550.968,00	4.662.025,00	(888.943,00)	83,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	794.429,00	751.250,00	(43.179,00)	94,56	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	794.429,00	751.250,00	(43.179,00)	94,56	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	794.429,00	751.250,00	(43.179,00)	94,56	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	823.122,00	643.110,00	(180.012,00)	78,13	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	823.122,00	643.110,00	(180.012,00)	78,13	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	823.122,00	643.110,00	(180.012,00)	78,13	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	898.602,00	587.640,00	(310.962,00)	65,39	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	898.602,00	587.640,00	(310.962,00)	65,39	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	898.602,00	587.640,00	(310.962,00)	65,39	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	998.841,00	954.300,00	(44.541,00)	95,54	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	998.841,00	954.300,00	(44.541,00)	95,54	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	998.841,00	954.300,00	(44.541,00)	95,54	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	853.548,00	816.960,00	(36.588,00)	95,71	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	853.548,00	816.960,00	(36.588,00)	95,71	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	853.548,00	816.960,00	(36.588,00)	95,71	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.182.426,00	908.765,00	(273.661,00)	76,85	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.182.426,00	908.765,00	(273.661,00)	76,85	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.182.426,00	908.765,00	(273.661,00)	76,85	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.757.928.409,00	3.389.443.013,00	(368.485.396,00)	90,19	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.755.953.176,00	3.387.866.543,00	(368.086.633,00)	90,19	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.755.953.176,00	3.387.866.543,00	(368.086.633,00)	90,19	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.755.953.176,00	3.387.866.543,00	(368.086.633,00)	90,19	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	990.636,00	766.920,00	(223.716,00)	77,41	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	990.636,00	766.920,00	(223.716,00)	77,41	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	990.636,00	766.920,00	(223.716,00)	77,41	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	984.597,00	809.550,00	(175.047,00)	82,22	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	984.597,00	809.550,00	(175.047,00)	82,22	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	984.597,00	809.550,00	(175.047,00)	82,22	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	35.000.000,00	28.028.873,00	(6.971.127,00)	80,08	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	35.000.000,00	28.028.873,00	(6.971.127,00)	80,08	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	28.028.873,00	(6.971.127,00)	80,08	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	28.028.873,00	(6.971.127,00)	80,08	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	170.355.648,00	167.496.341,00	(2.859.307,00)	98,32	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.499.100,00	3.483.600,00	(15.500,00)	99,55	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.499.100,00	3.483.600,00	(15.500,00)	99,55	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.499.100,00	3.483.600,00	(15.500,00)	99,55	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	28.456.426,00	28.088.600,00	(367.826,00)	98,70	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	28.456.426,00	28.088.600,00	(367.826,00)	98,70	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.456.426,00	28.088.600,00	(367.826,00)	98,70	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	4.995.400,00	4.983.600,00	(11.800,00)	99,76	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.995.400,00	4.983.600,00	(11.800,00)	99,76	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.995.400,00	4.983.600,00	(11.800,00)	99,76	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	60.554.100,00	60.356.031,00	(198.069,00)	99,67	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	60.554.100,00	60.356.031,00	(198.069,00)	99,67	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.554.100,00	60.356.031,00	(198.069,00)	99,67	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	21.690.000,00	21.280.400,00	(409.600,00)	98,11	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	21.690.000,00	21.280.400,00	(409.600,00)	98,11	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.690.000,00	21.280.400,00	(409.600,00)	98,11	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.680.000,00	6.000.000,00	(1.680.000,00)	78,12	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.680.000,00	6.000.000,00	(1.680.000,00)	78,12	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.680.000,00	6.000.000,00	(1.680.000,00)	78,12	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	43.480.622,00	43.304.110,00	(176.512,00)	99,59	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	43.480.622,00	43.304.110,00	(176.512,00)	99,59	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.480.622,00	43.304.110,00	(176.512,00)	99,59	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	153.634.600,00	143.228.064,00	(10.406.536,00)	93,22	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.500.000,00	1.800.000,00	(700.000,00)	72,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	1.800.000,00	(700.000,00)	72,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	1.800.000,00	(700.000,00)	72,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	51.600.000,00	41.898.414,00	(9.701.586,00)	81,19	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	51.600.000,00	41.898.414,00	(9.701.586,00)	81,19	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.600.000,00	41.898.414,00	(9.701.586,00)	81,19	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	99.534.600,00	99.529.650,00	(4.950,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	99.534.600,00	99.529.650,00	(4.950,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.534.600,00	99.529.650,00	(4.950,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	143.520.000,00	137.585.633,00	(5.934.367,00)	95,86	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	18.868.000,00	16.715.000,00	(2.153.000,00)	88,58	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.868.000,00	16.715.000,00	(2.153.000,00)	88,58	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.868.000,00	16.715.000,00	(2.153.000,00)	88,58	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	37.253.000,00	36.829.900,00	(423.100,00)	98,86	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	37.253.000,00	36.829.900,00	(423.100,00)	98,86	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.253.000,00	36.829.900,00	(423.100,00)	98,86	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	37.399.000,00	34.490.000,00	(2.909.000,00)	92,22	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	37.399.000,00	34.490.000,00	(2.909.000,00)	92,22	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.399.000,00	34.490.000,00	(2.909.000,00)	92,22	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	50.000.000,00	49.550.733,00	(449.267,00)	99,10	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.550.733,00	(449.267,00)	99,10	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.550.733,00	(449.267,00)	99,10	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.1.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.078.444.159,00	999.166.384,00	(79.277.775,00)	92,64	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.078.444.159,00	999.166.384,00	(79.277.775,00)	92,64	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	842.582.159,00	806.204.869,00	(36.377.290,00)	95,68	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	842.582.159,00	806.204.869,00	(36.377.290,00)	95,68	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	842.582.159,00	806.204.869,00	(36.377.290,00)	95,68	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	187.726.000,00	150.757.500,00	(36.968.500,00)	80,30	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	173.080.000,00	136.157.500,00	(36.922.500,00)	78,66	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.080.000,00	136.157.500,00	(36.922.500,00)	78,66	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	14.646.000,00	14.600.000,00	(46.000,00)	99,68	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.646.000,00	14.600.000,00	(46.000,00)	99,68	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	48.136.000,00	42.204.015,00	(5.931.985,00)	87,67	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	48.136.000,00	42.204.015,00	(5.931.985,00)	87,67	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.136.000,00	42.204.015,00	(5.931.985,00)	87,67	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.1.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.795.516.800,00	1.774.978.687,00	(20.538.113,00)	98,85	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	1.795.516.800,00	1.774.978.687,00	(20.538.113,00)	98,85	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0002		PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	1.694.689.000,00	1.685.284.850,00	(9.404.150,00)	99,44	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.694.689.000,00	1.685.284.850,00	(9.404.150,00)	99,44	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.369.000,00	57.964.850,00	(9.404.150,00)	86,04	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	1.627.320.000,00	1.627.320.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	72.802.800,00	62.524.137,00	(10.278.663,00)	85,88	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	72.802.800,00	62.524.137,00	(10.278.663,00)	85,88	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.802.800,00	62.524.137,00	(10.278.663,00)	85,88	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	28.025.000,00	27.169.700,00	(855.300,00)	96,94	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	28.025.000,00	27.169.700,00	(855.300,00)	96,94	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.025.000,00	27.169.700,00	(855.300,00)	96,94	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.1.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	70.325.400,00	62.913.612,00	(7.411.788,00)	89,46	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	70.325.400,00	62.913.612,00	(7.411.788,00)	89,46	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	37.976.100,00	33.454.100,00	(4.522.000,00)	88,09	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	37.976.100,00	33.454.100,00	(4.522.000,00)	88,09	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.976.100,00	33.454.100,00	(4.522.000,00)	88,09	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	32.349.300,00	29.459.512,00	(2.889.788,00)	91,06	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	32.349.300,00	29.459.512,00	(2.889.788,00)	91,06	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.349.300,00	29.459.512,00	(2.889.788,00)	91,06	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.1.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	502.676.300,00	464.965.257,00	(37.711.043,00)	92,49	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	502.676.300,00	464.965.257,00	(37.711.043,00)	92,49	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	85.948.000,00	58.400.400,00	(27.547.600,00)	67,94	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	85.948.000,00	58.400.400,00	(27.547.600,00)	67,94	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.948.000,00	58.400.400,00	(27.547.600,00)	67,94	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	354.228.300,00	348.911.920,00	(5.316.380,00)	98,49	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	348.695.300,00	343.411.920,00	(5.283.380,00)	98,48	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.695.300,00	343.411.920,00	(5.283.380,00)	98,48	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	5.533.000,00	5.500.000,00	(33.000,00)	99,40	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.533.000,00	5.500.000,00	(33.000,00)	99,40	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	62.500.000,00	57.652.937,00	(4.847.063,00)	92,24	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	85.948.000,00	58.400.400,00	(27.547.600,00)	67,94	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	85.948.000,00	58.400.400,00	(27.547.600,00)	67,94	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.948.000,00	58.400.400,00	(27.547.600,00)	67,94	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	354.228.300,00	348.911.920,00	(5.316.380,00)	98,49	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	348.695.300,00	343.411.920,00	(5.283.380,00)	98,48	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.695.300,00	343.411.920,00	(5.283.380,00)	98,48	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	5.533.000,00	5.500.000,00	(33.000,00)	99,40	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.533.000,00	5.500.000,00	(33.000,00)	99,40	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	62.500.000,00	57.652.937,00	(4.847.063,00)	92,24	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	62.500.000,00	57.652.937,00	(4.847.063,00)	92,24	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.500.000,00	57.652.937,00	(4.847.063,00)	92,24	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.1.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	465.259.957,00	454.678.196,00	(10.581.761,00)	97,72	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	465.259.957,00	454.678.196,00	(10.581.761,00)	97,72	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	136.833.424,00	135.128.057,00	(1.705.367,00)	98,75	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	136.833.424,00	135.128.057,00	(1.705.367,00)	98,75	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.833.424,00	135.128.057,00	(1.705.367,00)	98,75	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	88.426.533,00	81.237.469,00	(7.189.064,00)	91,87	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	88.426.533,00	81.237.469,00	(7.189.064,00)	91,87	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.426.533,00	81.237.469,00	(7.189.064,00)	91,87	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0006		PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	240.000.000,00	238.312.670,00	(1.687.330,00)	99,29	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	240.000.000,00	238.312.670,00	(1.687.330,00)	99,29	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	238.312.670,00	(1.687.330,00)	99,29	
				JUMLAH BELANJA	8.178.212.241,00	7.627.146.085,00	(551.066.156,00)	93,26	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(8.178.212.241,00)	(7.627.146.085,00)	551.066.156,00	93,26	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.178.212.241,00)	(7.627.146.085,00)	551.066.156,00	93,26	

BUPATI BELITUNG,

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

Lampiran I.4 : Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

KAB. BELITUNG

REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	568.451.453.874,70	516.601.737.280,00	33.082.783.652,00	29.679.088.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	229.773.303.554,00	212.603.562.588,00	9.103.110.563,00	8.926.734.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	229.773.303.554,00	212.603.562.588,00	9.103.110.563,00	8.926.734.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	191.164.501.985,00	175.857.763.582,00	298.447.490,00	196.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.194.460,00	8.593.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.567.760,00	3.577.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.626.700,00	5.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	188.868.133.428,00	173.830.170.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	188.852.167.188,00	173.816.403.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.635.353,00	10.483.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.330.887,00	3.283.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	221.268.937,00	176.911.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	150.000.000,00	119.396.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	55.000.000,00	42.447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.268.937,00	15.068.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	107.250.000,00	78.006.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	23.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	84.000.000,00	78.006.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	706.354.336,00	637.808.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.258.174,00	12.225.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.587.965,00	93.351.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.803.833,00	29.802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	335.121.594,00	301.476.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	75.504.420,00	66.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.604.720,00	8.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.473.630,00	126.244.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.571.980,00	9.990.000,00	298.447.490,00	196.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.571.980,00	0,00	173.447.490,00	72.333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	9.990.000,00	125.000.000,00	124.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	885.072.834,00	798.721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149.152.434,00	134.686.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	729.920.400,00	658.034.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	350.656.010,00	317.562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	101.679.000,00	88.179.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.669.000,00	38.433.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.833.010,00	54.129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	137.475.000,00	136.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	38.497.840.683,00	36.672.914.506,00	8.804.663.073,00	8.730.094.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	19.439.893.722,00	18.411.194.914,00	5.610.510.054,00	5.542.400.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	483.945.976,00	188.516.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.808.270.244,00	1.707.170.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	645.366.060,00	291.831.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	2.254.620.000,00	2.170.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	13.122.804.722,00	13.065.213.206,00	4.565.697.054,00	4.541.189.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	158.627.700,00	89.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	460.023.020,00	402.153.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0,00	0,00	831.600.000,00	797.509.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	505.000.000,00	495.283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.236.000,00	395.000,00	213.213.000,00	203.701.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	12.499.065.253,00	12.057.561.735,00	2.493.712.019,00	2.488.647.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	508.749.802,00	501.373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	420.000.292,00	296.400.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	998.894.550,00	877.081.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	158.667.497,00	86.319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.012.819.620,00	1.008.987.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	7.159.927.981,00	7.122.317.763,00	2.493.712.019,00	2.488.647.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	2.240.005.511,00	2.165.082.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4.371.719.324,00	4.179.506.627,00	661.158.000,00	659.762.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0,00	0,00	581.400.000,00	580.004.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	453.000.000,00	443.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.532.023.500,00	1.414.686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	214.608.222,00	166.574.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.959.162.000,00	1.956.332.500,00	79.758.000,00	79.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	49.328.000,00	49.319.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	163.597.602,00	149.193.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.187.162.384,00	2.024.651.230,00	39.283.000,00	39.283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	120.000.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.143.981.700,00	1.130.284.230,00	39.283.000,00	39.283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	186.642.296,00	137.268.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	736.538.388,00	694.698.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	110.960.886,00	72.884.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	110.960.886,00	72.884.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	110.960.886,00	72.884.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	268.755.950.388,66	240.227.365.775,00	9.885.668.144,00	7.682.846.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan	104.868.865.850,00	94.381.154.360,00	3.807.685.900,00	3.795.253.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	52.756.325.687,00	46.942.327.903,00	32.514.120,00	29.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.302.787,00	42.103.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.956.075,00	31.764.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.346.712,00	10.338.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	51.438.826.821,00	45.712.053.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	51.423.976.261,00	45.697.203.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	14.850.560,00	14.850.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	300.000.000,00	228.508.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	300.000.000,00	228.508.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	273.838.279,00	270.769.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.642.500,00	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.263.579,00	46.178.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.614.600,00	12.613.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.096.000,00	97.983.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.341.600,00	33.341.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,00	5.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.880.000,00	61.233.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	32.514.120,00	29.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	32.514.120,00	29.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	488.170.400,00	485.004.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.498.000,00	2.316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	252.425.000,00	250.545.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	232.247.400,00	232.143.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.187.400,00	195.887.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.604.000,00	60.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.152.000,00	29.834.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.225.100,00	48.157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	58.206.300,00	57.887.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	50.751.027.313,00	46.243.668.426,00	3.775.171.780,00	3.766.060.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.683.563.560,00	5.628.420.276,00	3.717.383.100,00	3.708.516.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	165.745.400,00	164.439.754,00	1.284.383.100,00	1.276.271.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	164.296.498,00	159.922.078,00	2.090.000.000,00	2.089.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	5.000.000,00	5.000.000,00	150.000.000,00	149.744.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	193.000.000,00	193.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	5.250.035.662,00	5.215.202.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	98.486.000,00	83.855.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.883.327.753,00	40.469.692.528,00	11.641.680,00	11.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.944.304,00	2.776.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	111.401.900,00	102.954.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	125.765.000,00	101.049.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	139.347.350,00	138.657.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12.892.400,00	12.829.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	36.220.000,00	15.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	483.632.100,00	390.730.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	214.654.000,00	187.983.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.513.732.556,00	1.144.027.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	38.318.349.401,00	34.835.695.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	132.924.375,00	40.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	39.486.309,00	19.170.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.870.474.133,00	2.742.326.169,00	11.641.680,00	11.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	399.038.525,00	341.919.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	359.990.400,00	270.968.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	138.187.500,00	115.247.792,00	46.147.000,00	46.000.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	138.187.500,00	115.247.792,00	46.147.000,00	46.000.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45.948.500,00	30.307.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	45.948.500,00	30.307.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	809.078.850,00	686.510.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	251.134.350,00	226.300.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	155.697.350,00	144.350.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	95.437.000,00	81.949.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	557.944.500,00	460.210.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	557.944.500,00	460.210.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	298.158.000,00	286.407.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	59.199.000,00	58.667.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	59.199.000,00	58.667.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	86.274.000,00	84.656.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	86.274.000,00	84.656.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	152.685.000,00	143.084.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	152.685.000,00	143.084.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	254.276.000,00	222.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	191.196.000,00	168.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	191.196.000,00	168.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	63.080.000,00	53.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	63.080.000,00	53.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		UPT RSUD dr. H. MARSIDI JUDONO	137.105.586.711,66	121.438.779.101,00	5.061.309.369,00	3.074.749.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	126.397.526.286,66	113.592.160.945,00	1.615.103.280,00	1.370.052.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.587.956.139,00	40.362.115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45.587.956.139,00	40.362.115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	731.454.725,00	574.817.024,00	22.533.000,00	22.127.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	78.418.725,00	77.553.480,00	22.533.000,00	22.127.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	576.036.000,00	424.002.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.000.000,00	73.261.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	409.310.280,00	259.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	409.310.280,00	259.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.966.250.000,00	2.358.144.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.966.250.000,00	2.358.144.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	349.117.000,00	292.498.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	349.117.000,00	292.498.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	76.762.748.422,66	70.004.585.356,00	1.183.260.000,00	1.088.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	76.762.748.422,66	70.004.585.356,00	1.183.260.000,00	1.088.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	10.708.060.425,00	7.846.618.156,00	3.446.206.089,00	1.704.697.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.632.685.000,00	5.267.482.179,00	3.446.206.089,00	1.704.697.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	380.000.000,00	308.971.510,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	2.046.206.089,00	1.704.697.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.252.685.000,00	4.958.510.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.059.310.950,00	2.570.516.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	199.960.950,00	195.914.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	237.110.000,00	128.466.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4.622.240.000,00	2.246.134.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.064.475,00	8.619.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	16.064.475,00	8.619.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02		UPT PUSKESMAS SELAT NASIK DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	2.282.917.575,00	2.084.163.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.031.251.570,00	934.349.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	62.040.000,00	62.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62.040.000,00	62.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	103.044.200,00	95.101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.044.200,00	95.101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000,00	18.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	18.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.980.800,00	168.946.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.268.000,00	36.233.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.712.800,00	132.712.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.745.000,00	112.103.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.395.000,00	62.037.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.740.000,00	20.465.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.610.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	560.441.570,00	478.058.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	560.441.570,00	478.058.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.215.141.645,00	1.114.749.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	21.067.390,00	20.623.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	21.067.390,00	20.623.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.194.074.255,00	1.094.125.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	64.224.000,00	64.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	51.300.000,00	50.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.300.000,00	5.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.600.000,00	12.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	140.795.500,00	102.146.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.250.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.650.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	82.665.000,00	81.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	760.914.755,00	704.290.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	28.869.360,00	28.653.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	28.869.360,00	28.653.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	28.869.360,00	28.653.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.655.000,00	6.410.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.655.000,00	6.410.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.02	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.655.000,00	6.410.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03		UPT PUSKESMAS TANJUNG BINGA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	3.280.023.544,00	2.948.536.973,00	156.216.960,00	115.967.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.181.473.484,00	1.928.985.190,00	156.216.960,00	115.967.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	62.040.000,00	62.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62.040.000,00	62.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	370.589.160,00	334.667.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	370.589.160,00	334.667.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.367.742,00	1.365.300,00	89.616.960,00	80.697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.367.742,00	1.365.300,00	89.616.960,00	80.697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.306.500,00	293.496.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.091.250,00	86.281.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	207.215.250,00	207.215.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.301.000,00	123.430.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.726.000,00	64.530.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.020.000,00	42.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.555.000,00	16.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.311.869.082,00	1.113.985.134,00	66.600.000,00	35.270.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.311.869.082,00	1.113.985.134,00	66.600.000,00	35.270.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.040.711.300,00	961.830.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	54.500.000,00	53.704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	54.500.000,00	53.704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	986.211.300,00	908.126.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	91.496.000,00	91.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.050.000,00	25.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	224.400,00	224.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	135.924.700,00	105.549.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	16.650.000,00	15.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	94.179.000,00	91.704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	554.053.300,00	510.351.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.533.900,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	53.101.760,00	52.984.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	53.101.760,00	52.984.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	53.101.760,00	52.984.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.737.000,00	4.737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.737.000,00	4.737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.03	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.737.000,00	4.737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04		UPT PUSKESMAS MEMBALONG DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	3.024.683.663,00	2.827.967.758,00	105.174.000,00	97.610.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.904.481.002,00	1.790.368.717,00	105.174.000,00	97.610.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	62.040.000,00	62.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62.040.000,00	62.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	288.037.500,00	273.125.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	288.037.500,00	273.125.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.290.500,00	207.617.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.577.700,00	80.671.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.712.800,00	126.945.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.225.400,00	123.747.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.703.000,00	58.356.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.140.000,00	38.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.382.400,00	27.297.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.204.887.602,00	1.123.837.754,00	105.174.000,00	97.610.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.204.887.602,00	1.123.837.754,00	105.174.000,00	97.610.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.081.648.181,00	999.278.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	35.041.080,00	32.787.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	35.041.080,00	32.787.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.046.607.101,00	966.490.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	102.342.000,00	98.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	39.450.000,00	39.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.950.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.675.000,00	5.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	138.040.300,00	98.856.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.750.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	156.333.200,00	155.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	513.523.201,00	480.036.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	14.543.400,00	14.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.250.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	31.200.880,00	31.167.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	31.200.880,00	31.167.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	31.200.880,00	31.167.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.353.600,00	7.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.353.600,00	7.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.04	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.353.600,00	7.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05		UPT PUSKESMAS BADAU DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	3.100.223.214,00	2.821.221.293,00	90.323.000,00	88.195.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.883.191.930,00	1.712.420.079,00	90.323.000,00	88.195.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	62.040.000,00	62.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62.040.000,00	62.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	181.640.000,00	181.354.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	181.640.000,00	181.354.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.290.000,00	9.213.000,00	59.223.000,00	59.007.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	9.290.000,00	9.213.000,00	15.270.000,00	15.068.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	43.953.000,00	43.939.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242.954.930,00	235.148.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.667.880,00	107.965.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.287.050,00	127.183.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.667.000,00	107.708.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.682.000,00	47.855.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.630.000,00	39.501.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.355.000,00	20.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.277.600.000,00	1.116.954.979,00	31.100.000,00	29.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.277.600.000,00	1.116.954.979,00	31.100.000,00	29.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.151.397.424,00	1.044.594.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000,00	59.996.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	30.000.000,00	24.996.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.086.397.424,00	984.598.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	80.537.000,00	80.537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	41.745.000,00	41.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	337.500,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	337.500,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	337.500,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	30.937.500,00	30.937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.437.500,00	8.437.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	337.500,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	196.301.000,00	162.062.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	30.150.000,00	30.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	128.059.600,00	127.826.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	515.596.824,00	450.057.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	9.603.000,00	8.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	51.835.560,00	51.727.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	51.835.560,00	51.727.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	51.835.560,00	51.727.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	13.798.300,00	12.478.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.798.300,00	12.478.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.05	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	13.798.300,00	12.478.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06		UPT PUSKESMAS PERAWAS DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	2.458.983.736,00	2.298.673.713,00	85.422.176,00	81.119.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.557.991.315,00	1.427.656.126,00	85.422.176,00	81.119.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	62.040.000,00	62.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62.040.000,00	62.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	70.190.000,00	66.233.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.190.000,00	66.233.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.106.400,00	189.260.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000,00	87.362.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.106.400,00	101.898.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.737.447,00	67.214.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.016.000,00	28.717.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.739.000,00	23.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.982.447,00	14.981.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.164.917.468,00	1.042.908.191,00	85.422.176,00	81.119.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.164.917.468,00	1.042.908.191,00	85.422.176,00	81.119.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	878.051.341,00	848.195.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	68.267.166,00	68.266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	34.967.166,00	34.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	809.784.175,00	779.929.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	48.037.800,00	48.037.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	26.475.000,00	26.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.225.000,00	9.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.725.000,00	13.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	146.902.100,00	136.831.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16.050.000,00	16.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.925.000,00	8.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	123.017.200,00	122.343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	377.708.875,00	359.499.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.325.800,00	3.325.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	10.442.400,00	10.442.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.050.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	15.700.880,00	15.583.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	15.700.880,00	15.583.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	15.700.880,00	15.583.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.240.200,00	7.238.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.240.200,00	7.238.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.06	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.240.200,00	7.238.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07		UPT PUSKESMAS SIJUK DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	2.392.869.467,00	2.235.777.728,00	174.985.914,00	117.719.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.446.262.746,00	1.365.077.617,00	174.985.914,00	117.719.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.020.000,00	31.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31.020.000,00	31.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	83.357.700,00	80.200.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.357.700,00	80.200.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	21.569.520,00	9.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	21.569.520,00	9.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.641.000,00	200.559.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.000.000,00	54.022.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	146.641.000,00	146.537.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.760.000,00	55.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.086.000,00	29.382.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.240.000,00	15.899.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.434.000,00	10.433.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.058.484.046,00	997.581.964,00	153.416.394,00	107.769.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.058.484.046,00	997.581.964,00	153.416.394,00	107.769.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	904.733.961,00	829.052.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	51.957.410,00	47.760.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	16.957.410,00	12.950.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	35.000.000,00	34.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	852.776.551,00	781.291.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	99.950.800,00	99.950.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	24.450.000,00	24.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	11.180.000,00	11.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	17.925.000,00	17.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	167.639.700,00	140.539.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18.075.000,00	18.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.875.000,00	19.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	96.977.800,00	96.977.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	360.853.251,00	316.468.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	30.135.560,00	29.910.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	30.135.560,00	29.910.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	30.135.560,00	29.910.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	11.737.200,00	11.737.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.737.200,00	11.737.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.07	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	11.737.200,00	11.737.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08		UPT PUSKESMAS AIR SAGA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	3.809.051.607,00	3.457.853.135,00	141.093.930,00	101.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.737.492.379,00	2.468.975.523,00	141.093.930,00	101.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	53.880.000,00	53.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	53.880.000,00	53.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.850.000,00	24.988.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.850.000,00	24.988.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.228.322,00	171.713.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.693.722,00	72.283.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.534.600,00	99.430.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.067.500,00	56.015.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.330.000,00	22.695.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.020.000,00	19.611.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.717.500,00	13.708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.397.466.557,00	2.162.378.356,00	141.093.930,00	101.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.397.466.557,00	2.162.378.356,00	141.093.930,00	101.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.002.756.588,00	920.309.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	31.681.200,00	31.398.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	31.681.200,00	31.398.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	971.075.388,00	888.910.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	124.829.700,00	122.485.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	37.050.000,00	36.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.075.000,00	9.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	174.972.400,00	171.556.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	26.700.000,00	24.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.500.000,00	6.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	115.950.000,00	110.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	448.192.388,00	381.802.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6.855.900,00	5.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	68.802.640,00	68.568.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	68.802.640,00	68.568.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.08	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	68.802.640,00	68.568.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09		UPT PUSKESMAS TANJUNGPANDAN DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	4.307.490.842,00	3.845.244.209,00	182.811.647,00	133.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.294.819.790,00	2.952.166.746,00	182.811.647,00	133.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	53.880.000,00	53.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	53.880.000,00	53.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.417.810,00	25.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.417.810,00	25.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.221.800,00	168.969.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.509.000,00	69.435.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.712.800,00	99.534.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.121.500,00	50.014.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.644.000,00	24.540.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.477.500,00	25.474.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.984.178.680,00	2.654.142.371,00	182.811.647,00	133.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.984.178.680,00	2.654.142.371,00	182.811.647,00	133.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	923.435.412,00	804.755.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	24.678.000,00	24.386.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	24.678.000,00	24.386.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	898.757.412,00	780.368.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	94.488.000,00	94.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	149.552.200,00	126.981.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.450.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	23.250.000,00	23.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	94.081.000,00	91.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	400.063.912,00	314.192.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7.872.300,00	7.826.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	68.802.640,00	68.568.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	68.802.640,00	68.568.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	68.802.640,00	68.568.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	20.433.000,00	19.753.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.433.000,00	19.753.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.09	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	20.433.000,00	19.753.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10		UPT PUSKESMAS SIMPANG RUSA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	2.125.254.179,00	1.887.994.064,00	80.645.248,00	77.498.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.335.564.360,00	1.211.482.033,00	80.645.248,00	77.498.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	62.040.000,00	62.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62.040.000,00	62.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.600.000,00	51.590.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.600.000,00	51.590.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	16.257.060,00	16.106.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	16.257.060,00	16.106.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.236.360,00	172.726.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.600.000,00	20.207.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	152.636.360,00	152.519.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.872.000,00	80.013.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.842.000,00	32.342.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.280.000,00	20.165.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.750.000,00	27.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	955.816.000,00	845.111.156,00	64.388.188,00	61.392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	955.816.000,00	845.111.156,00	64.388.188,00	61.392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	691.092.419,00	588.009.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	36.595.130,00	36.576.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	36.595.130,00	36.576.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	654.497.289,00	551.433.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	93.960.000,00	87.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	28.500.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.300.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.700.000,00	8.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	145.874.100,00	110.008.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.675.000,00	6.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	112.650.000,00	106.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	223.173.189,00	176.019.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	6.990.000,00	6.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	9.000.000,00	8.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	92.123.400,00	83.096.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	92.123.400,00	83.096.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	92.123.400,00	83.096.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.474.000,00	5.406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.474.000,00	5.406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.10	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.474.000,00	5.406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	40.282.074.281,04	36.759.577.711,00	8.014.589.311,00	7.107.858.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	40.282.074.281,04	36.759.577.711,00	8.014.589.311,00	7.107.858.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.981.892.113,00	8.538.854.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.241.084,00	4.519.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.821.285,00	3.764.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.419.799,00	754.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.844.060.422,00	7.483.609.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.844.060.422,00	7.483.609.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.300.000,00	45.952.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	49.300.000,00	45.952.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	492.038.877,00	476.858.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.549.225,00	3.543.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.724.079,00	83.957.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.322.893,00	6.259.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	140.843.500,00	138.902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.156.480,00	22.574.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.567.200,00	7.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	214.875.500,00	214.542.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.635.030,00	1.631.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.635.030,00	1.631.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	335.965.700,00	314.978.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.652.900,00	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156.100.000,00	143.089.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.712.800,00	142.999.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.651.000,00	211.303.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.243.000,00	43.808.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.293.000,00	70.343.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.615.000,00	44.826.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52.500.000,00	52.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	54.159.345,00	53.966.850,00	1.726.891.270,00	1.724.603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	54.159.345,00	53.966.850,00	1.380.726.710,00	1.378.947.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0072	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	54.159.345,00	53.966.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	0,00	0,00	1.066.984.960,00	1.065.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	0,00	0,00	166.111.750,00	165.827.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	0,00	0,00	147.630.000,00	147.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	346.164.560,00	345.656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	0,00	0,00	160.460.160,00	160.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	0,00	0,00	185.704.400,00	185.406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.841.139.020,00	4.557.030.412,00	3.141.196.000,00	3.069.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.841.139.020,00	4.557.030.412,00	3.141.196.000,00	3.069.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.999.283.506,00	1.975.732.853,00	100.000.000,00	99.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.841.855.514,00	2.581.297.559,00	3.041.196.000,00	2.969.596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	50.000.000,00	48.027.500,00	595.000.000,00	592.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	48.027.500,00	595.000.000,00	592.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	0,00	0,00	595.000.000,00	592.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	50.000.000,00	48.027.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	0,00	0,00	558.502.041,00	556.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	558.502.041,00	556.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	0,00	0,00	361.542.041,00	360.567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	196.960.000,00	196.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	7.099.122.300,00	6.767.130.850,00	880.000.000,00	79.809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	7.099.122.300,00	6.767.130.850,00	880.000.000,00	79.809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3.756.486.000,00	3.482.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.965.413.350,00	2.922.747.000,00	880.000.000,00	79.809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	377.222.950,00	361.919.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	520.000.000,00	159.881.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	520.000.000,00	159.881.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	520.000.000,00	159.881.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	17.542.651.660,04	16.444.224.611,00	1.062.000.000,00	1.033.521.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	17.542.651.660,04	16.444.224.611,00	1.062.000.000,00	1.033.521.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	50.106.600,00	33.672.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	100.000.000,00	98.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	462.000.000,00	442.921.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	10.488.585.387,04	9.423.749.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	200.000.000,00	199.817.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	0,00	0,00	500.000.000,00	491.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.603.959.673,00	5.588.196.000,00	100.000.000,00	99.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	104.124.163,00	101.574.042,00	51.000.000,00	50.671.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	28.632.903,00	26.340.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	28.632.903,00	26.340.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	75.491.260,00	75.233.542,00	51.000.000,00	50.671.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	75.491.260,00	75.233.542,00	51.000.000,00	50.671.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	88.985.680,00	88.888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	48.985.680,00	48.888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	985.680,00	888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.734.653.688,00	3.552.090.047,00	4.961.588.764,00	4.861.528.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.734.653.688,00	3.552.090.047,00	4.961.588.764,00	4.861.528.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	93.472.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	93.472.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	93.472.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	75.494.601,00	58.634.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	75.494.601,00	58.634.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	75.494.601,00	58.634.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	468.133.930,00	466.839.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	468.133.930,00	466.839.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	468.133.930,00	466.839.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3.097.552.657,00	3.026.616.480,00	4.961.588.764,00	4.861.528.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	3.097.552.657,00	3.026.616.480,00	4.961.588.764,00	4.861.528.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	3.097.552.657,00	3.026.616.480,00	4.961.588.764,00	4.861.528.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	18.377.928.589,00	16.937.488.257,00	144.933.810,00	136.552.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		Satuan Polisi Pamong Praja	11.960.736.404,00	11.547.818.134,00	131.623.800,00	123.348.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.835.847.809,00	7.442.583.134,00	131.623.800,00	123.348.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.484.369.720,00	6.146.172.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.484.369.720,00	6.146.172.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	227.670.000,00	201.910.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	107.670.000,00	94.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	120.000.000,00	107.595.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	532.694.419,00	528.031.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.295.360,00	11.219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.256.620,00	104.712.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.998.433,00	12.854.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	232.912.470,00	232.573.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.431.536,00	32.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.000.000,00	129.535.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	131.623.800,00	123.348.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	4.245.750,00	3.635.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	127.378.050,00	119.713.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.178.200,00	125.997.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000,00	88.819.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.178.200,00	33.178.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	443.935.470,00	440.471.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	219.704.370,00	218.221.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.465.370,00	52.652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	170.765.730,00	169.598.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.124.888.595,00	4.105.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.104.428.595,00	4.085.034.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	45.405.925,00	43.588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.010.377.100,00	3.010.277.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	79.200.000,00	76.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	932.150.000,00	924.212.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	31.200.000,00	30.906.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	6.095.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	20.460.000,00	20.200.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20.460.000,00	20.200.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.417.192.185,00	5.389.670.123,00	13.310.010,00	13.203.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.423.775.765,00	3.864.884.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.998.800,00	3.064.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	999.800,00	782.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	499.800,00	374.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	499.800,00	374.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	499.800,00	374.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	499.800,00	374.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	999.800,00	782.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.776.434.621,00	3.301.683.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.774.435.021,00	3.300.117.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	999.800,00	782.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	999.800,00	782.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96.000.000,00	92.700.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	96.000.000,00	92.700.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	212.035.944,00	189.303.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.025.970,00	3.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.732.231,00	29.899.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.999.548,00	6.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.991.800,00	105.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.676.475,00	6.439.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.409.920,00	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.200.000,00	34.092.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.206.400,00	116.063.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000,00	46.213.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.356.400,00	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.100.000,00	162.070.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.500.000,00	79.370.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.920.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.680.000,00	74.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	745.942.120,00	576.172.550,00	13.310.010,00	13.203.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	84.334.600,00	59.676.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	84.334.600,00	59.676.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0,00	0,00	13.310.010,00	13.203.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	0,00	0,00	13.310.010,00	13.203.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	661.607.520,00	516.496.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	661.607.520,00	516.496.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.247.474.300,00	948.612.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.247.474.300,00	948.612.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.094.799.200,00	815.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	126.801.000,00	106.893.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	25.874.100,00	25.807.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	7.527.543.374,00	6.521.652.902,00	972.893.060,00	963.570.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.527.543.374,00	6.521.652.902,00	972.893.060,00	963.570.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.019.715.093,00	5.237.966.209,00	972.893.060,00	963.570.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.970.010,00	15.199.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.557.430,00	7.799.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.412.580,00	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.160.910.732,00	4.422.718.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.158.811.532,00	4.420.754.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.099.200,00	1.964.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	198.282.701,00	188.393.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.783.988,00	5.345.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.338.420,00	19.230.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.605.610,00	6.483.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.048.100,00	82.088.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.916.360,00	22.822.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.460.000,00	5.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.130.223,00	46.987.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	16.257.060,00	12.459.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	16.257.060,00	12.459.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.354.650,00	281.031.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.680.000,00	1.237.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107.900.000,00	89.153.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	190.774.650,00	190.641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	343.197.000,00	330.623.320,00	956.636.000,00	951.110.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.010.000,00	41.282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.340.000,00	113.734.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	3.633.000,00	3.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.850.000,00	29.762.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	143.364.000,00	142.274.000,00	956.636.000,00	951.110.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	146.525.261,00	137.586.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	146.525.261,00	137.586.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	3.363.310,00	3.236.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	64.070.645,00	61.493.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	79.091.306,00	72.855.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	13.537.849,00	9.118.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	13.537.849,00	9.118.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	13.537.849,00	9.118.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	425.656.874,00	367.177.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	425.656.874,00	367.177.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	137.123.081,00	134.303.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	53.625.000,00	52.069.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	49.062.000,00	46.597.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	8.308.617,00	4.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	4.051.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	4.084.887,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	2.665.950,00	709.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	750.000,00	623.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	7.241.487,00	6.095.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	130.684.130,00	106.991.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3.574.437,00	1.478.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	24.486.145,00	10.414.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	521.651.212,00	451.797.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	20.501.782,00	8.791.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	6.751.000,00	1.038.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	13.750.782,00	7.752.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	501.149.430,00	443.006.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	357.026.050,00	318.949.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	114.819.400,00	95.341.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	29.303.980,00	28.715.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	394.070.085,00	314.220.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	50.496.525,00	1.126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	14.278.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	3.561.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	2.756.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	3.619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	26.279.960,00	1.126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	343.573.560,00	313.094.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	343.573.560,00	313.094.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	6.387.000,00	3.786.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	6.387.000,00	3.786.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.01.0000	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	6.387.000,00	3.786.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	99.921.657.694,00	89.917.899.449,68	7.189.304.770,00	6.472.533.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	366.029.053,00	355.169.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.17.3.30.2.07.01.0000		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja	366.029.053,00	355.169.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	248.005.953,00	243.419.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	248.005.953,00	243.419.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	248.005.953,00	243.419.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	118.023.100,00	111.750.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	118.023.100,00	111.750.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	118.023.100,00	111.750.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.068.325.655,00	868.085.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.068.325.655,00	868.085.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	318.857.773,00	294.635.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	11.674.700,00	11.517.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	11.674.700,00	11.517.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	283.964.623,00	260.242.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	283.964.623,00	260.242.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	23.218.450,00	22.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.878.050,00	10.726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	12.340.400,00	12.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	300.789.006,00	140.272.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	300.789.006,00	140.272.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	300.789.006,00	140.272.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	13.986.354,00	12.771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	13.986.354,00	12.771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.986.354,00	12.771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	24.945.830,00	22.057.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.945.830,00	22.057.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	24.945.830,00	22.057.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	191.346.692,00	185.186.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	10.618.050,00	6.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10.618.050,00	6.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	180.728.642,00	178.982.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.153.508,00	17.971.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	162.575.134,00	161.010.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	218.400.000,00	213.162.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	130.000.000,00	127.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	130.000.000,00	127.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	88.400.000,00	85.727.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.01.0000	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	88.400.000,00	85.727.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	417.962.667,00	350.058.883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	417.962.667,00	350.058.883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	313.266.977,00	250.503.004,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	40.633.445,00	37.743.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	24.592.000,00	21.778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	16.041.445,00	15.965.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	248.765.032,00	190.891.478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	198.800.000,00	179.302.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	34.000.000,00	4.328.068,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	15.965.032,00	7.261.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	23.868.500,00	21.868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	800.500,00	800.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	23.068.000,00	21.067.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	22.263.200,00	22.175.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	5.116.500,00	5.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	5.116.500,00	5.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	17.146.700,00	17.089.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	17.146.700,00	17.089.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	82.432.490,00	77.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	82.432.490,00	77.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	82.432.490,00	77.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	23.322.800,00	21.335.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	4.01.2.10.0.00.01.0007		BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BELITUNG	23.322.800,00	21.335.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	4.01.2.10.0.00.01.0007	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	23.322.800,00	21.335.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	4.01.2.10.0.00.01.0007	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	23.322.800,00	21.335.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	4.01.2.10.0.00.01.0007	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	23.322.800,00	21.335.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	16.136.728.876,00	15.492.347.168,00	362.899.390,00	325.035.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000		Dinas Lingkungan Hidup	16.136.728.876,00	15.492.347.168,00	362.899.390,00	325.035.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.692.235.451,00	6.281.973.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.631.805,00	5.451.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.020.312,00	704.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.461.870,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.668.996,00	1.137.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.128.870,00	777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.041.291,00	794.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.310.466,00	1.038.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.158.812.006,00	5.777.194.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.157.460.368,00	5.776.525.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	819.096,00	375.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	532.542,00	294.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.470.000,00	16.788.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.470.000,00	16.788.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.212.340,00	137.123.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.964.144,00	1.546.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.141.616,00	15.920.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.269.614,00	4.285.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.374.687,00	47.303.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.117.190,00	20.661.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.409.920,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.935.169,00	45.244.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242.320.300,00	241.302.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.272.000,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.984.000,00	135.431.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105.064.300,00	104.915.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.789.000,00	104.113.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.639.000,00	79.963.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.150.000,00	24.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	250.386.741,00	246.886.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	250.386.741,00	246.886.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	250.386.741,00	246.886.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	906.176.788,00	875.310.515,00	19.000.000,00	18.759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	810.613.081,00	782.704.764,00	19.000.000,00	18.759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	135.468.813,00	133.456.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	32.738.740,00	31.327.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	642.405.528,00	617.921.226,00	19.000.000,00	18.759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	95.563.707,00	92.605.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	20.568.682,00	19.354.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	74.995.025,00	73.251.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	141.497.848,00	131.244.759,00	3.633.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	141.497.848,00	131.244.759,00	3.633.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	141.497.848,00	131.244.759,00	3.633.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	20.390.072,00	16.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	20.390.072,00	16.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	20.390.072,00	16.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	63.059.047,00	57.633.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	63.059.047,00	57.633.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	16.236.750,00	15.343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	46.822.297,00	42.290.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	22.340.323,00	21.372.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	22.340.323,00	21.372.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	22.340.323,00	21.372.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	89.978.676,00	88.964.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	89.978.676,00	88.964.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	89.978.676,00	88.964.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	9.054.795,00	8.795.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	9.054.795,00	8.795.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	9.054.795,00	8.795.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.941.609.135,00	7.764.142.364,00	340.266.360,00	306.276.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	7.722.028.338,00	7.567.096.306,00	340.266.360,00	306.276.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	6.176.174.961,00	6.029.089.156,00	340.266.360,00	306.276.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	1.545.853.377,00	1.538.007.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	219.580.797,00	197.046.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.3.28.0.00.01.0000	2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	219.580.797,00	197.046.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.470.163.111,00	4.977.673.940,00	48.666.460,00	21.675.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.470.163.111,00	4.977.673.940,00	48.666.460,00	21.675.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.052.218.119,00	4.624.934.266,00	48.666.460,00	21.675.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.459.534,00	6.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.588.410,00	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.058.940,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.812.184,00	3.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.830.375.950,00	3.514.647.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.828.258.070,00	3.512.827.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.058.940,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.058.940,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.000.000,00	70.579.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000,00	70.579.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	336.224.095,00	315.905.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.988.670,00	6.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.851.730,00	43.192.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.966.360,00	5.488.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	89.926.920,00	89.196.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.699.400,00	18.572.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.997.440,00	6.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	147.793.575,00	145.585.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.187.140,00	6.127.200,00	48.666.460,00	21.675.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	6.187.140,00	6.127.200,00	7.878.780,00	7.725.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	40.787.680,00	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	588.226.400,00	513.011.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.088.000,00	1.754.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.000.000,00	171.447.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	398.138.400,00	339.809.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209.745.000,00	198.513.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.738.000,00	28.237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.627.000,00	33.005.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	6.833.000,00	6.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.420.000,00	68.559.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	62.127.000,00	62.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	359.220.644,00	298.263.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	359.220.644,00	298.263.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	311.768.729,00	255.797.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	47.451.915,00	42.466.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	21.588.410,00	18.788.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	21.588.410,00	18.788.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	20.000.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	1.588.410,00	1.588.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	3.471.858,00	2.831.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.993.338,00	1.499.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1.993.338,00	1.499.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.478.520,00	1.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.478.520,00	1.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	33.664.080,00	32.856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	33.664.080,00	32.856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	33.664.080,00	32.856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.899.120.660,00	6.691.962.858,00	49.955.000,00	48.406.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.899.120.660,00	6.691.962.858,00	49.955.000,00	48.406.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.182.877.796,00	5.261.883.872,00	49.955.000,00	48.406.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.844.492,00	4.843.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	495.100,00	495.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	495.100,00	495.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	495.100,00	495.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	495.100,00	495.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	444.100,00	444.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.419.992,00	2.419.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.186.732.590,00	4.332.921.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.184.238.716,00	4.330.520.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.493.874,00	2.401.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.000.000,00	21.243.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	54.000.000,00	21.243.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	305.995.154,00	298.210.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.735.550,00	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.731.660,00	64.596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.405.106,00	4.568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	104.425.800,00	101.559.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	54.907.038,00	54.906.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.890.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.900.000,00	62.899.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	49.955.000,00	48.406.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	49.955.000,00	48.406.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.702.400,00	223.539.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	932.400,00	830.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.879.000,00	56.817.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.891.000,00	165.891.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.603.160,00	381.126.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	157.193.000,00	149.149.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.352.940,00	40.183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	196.057.220,00	191.793.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.313.257.663,00	1.038.077.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.313.257.663,00	1.038.077.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.146.167.672,00	888.339.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	36.409.991,00	29.338.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	61.805.000,00	54.373.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	68.875.000,00	66.026.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	402.985.201,00	392.001.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	402.985.201,00	392.001.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	119.475.021,00	112.213.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	39.942.400,00	37.716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	243.567.780,00	242.071.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.117.574.580,00	2.703.550.023,00	1.218.969.700,00	975.293.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.117.574.580,00	2.703.550.023,00	1.218.969.700,00	975.293.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	63.967.000,00	63.683.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	63.967.000,00	63.683.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	63.967.000,00	63.683.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	418.890.300,00	411.943.970,00	1.218.969.700,00	975.293.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	64.156.300,00	63.716.220,00	1.218.969.700,00	975.293.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	64.156.300,00	63.716.220,00	1.218.969.700,00	975.293.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	307.841.600,00	301.754.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	275.368.600,00	270.554.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	32.473.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	46.892.400,00	46.473.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	46.892.400,00	46.473.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.634.717.280,00	2.227.922.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	133.717.280,00	127.850.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	9.205.000,00	8.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	124.512.280,00	119.289.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.501.000.000,00	2.100.072.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.13.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.501.000.000,00	2.100.072.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	21.705.275.927,00	19.626.378.677,00	3.736.478.120,00	3.509.927.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	21.705.275.927,00	19.626.378.677,00	3.736.478.120,00	3.509.927.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.515.821.968,00	6.935.371.941,00	3.833.940,00	3.833.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.365.626,00	7.441.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	847.152,00	763.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.058.940,00	954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.058.940,00	954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.058.940,00	954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.058.940,00	954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.282.714,00	2.862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.510.312.271,00	5.287.440.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.507.241.345,00	5.284.816.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.853.145,00	1.669.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.217.781,00	954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	4.023.972,00	3.625.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	2.965.032,00	2.671.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1.058.940,00	954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.958.362,00	5.926.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.257.627,00	1.394.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.700.735,00	4.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	608.516.797,00	486.373.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.778.983,00	14.353.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.358.998,00	74.725.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	46.549.959,00	37.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	244.594.827,00	155.161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.205.755,00	33.336.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.034.400,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164.993.875,00	162.716.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	3.833.940,00	3.833.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	3.833.940,00	3.833.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	805.340.620,00	640.875.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.577.420,00	1.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	271.912.000,00	166.092.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	530.851.200,00	472.789.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	534.304.320,00	503.689.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.713.560,00	61.502.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	143.948.560,00	139.736.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.716.900,00	39.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	170.085.300,00	169.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	93.840.000,00	93.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	12.327.590.759,00	11.942.419.636,00	3.182.644.180,00	2.957.241.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	10.405.251.800,00	10.077.690.528,00	3.182.644.180,00	2.957.241.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.513.532.000,00	2.303.077.104,00	2.057.389.180,00	1.986.713.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	54.600.000,00	54.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	7.837.119.800,00	7.720.113.424,00	1.125.255.000,00	970.528.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	50.000.000,00	49.955.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	50.000.000,00	49.955.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	22.380.552,00	19.552.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	22.380.552,00	19.552.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	205.983.660,00	200.422.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	7.281.600,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	184.447.360,00	181.812.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	14.254.700,00	13.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	450.765.347,00	414.848.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	11.412.050,00	9.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	79.319.240,00	75.202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	360.034.057,00	330.111.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.193.209.400,00	1.179.950.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	95.447.000,00	92.206.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.097.762.400,00	1.087.743.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	861.863.200,00	748.587.100,00	550.000.000,00	548.851.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	861.863.200,00	748.587.100,00	550.000.000,00	548.851.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	200.000.000,00	99.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	600.882.400,00	594.270.100,00	550.000.000,00	548.851.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	60.980.800,00	54.497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.670.392.840,00	7.574.041.548,00	256.460.020,00	247.228.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	8.670.392.840,00	7.574.041.548,00	256.460.020,00	247.228.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.237.675.006,00	5.245.109.881,00	20.182.020,00	13.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.747.560,00	4.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.114.780,00	841.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	865.600,00	724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	865.600,00	724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	865.600,00	724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	865.600,00	691.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.170.380,00	910.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.388.932.890,00	4.594.885.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.386.612.840,00	4.593.365.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.160.250,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.159.800,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68.000.000,00	61.288.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	68.000.000,00	61.288.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	285.363.156,00	231.400.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.047.832,00	7.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.371.553,00	24.212.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.522.471,00	5.635.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	101.051.000,00	78.379.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.298.300,00	8.205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.072.000,00	6.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000,00	100.890.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	20.182.020,00	13.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	17.407.020,00	13.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	317.447.400,00	205.789.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000,00	91.230.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166.247.400,00	113.358.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.184.000,00	147.130.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.198.000,00	64.559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.072.000,00	32.906.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.914.000,00	49.664.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	503.857.170,00	432.359.530,00	51.278.000,00	50.005.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	503.857.170,00	432.359.530,00	51.278.000,00	50.005.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	91.155.300,00	86.089.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	12.867.790,00	11.251.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	10.178.933,00	9.335.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	38.938.376,00	36.337.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	116.329.679,00	87.680.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	234.387.092,00	201.664.551,00	51.278.000,00	50.005.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.928.860.664,00	1.896.572.137,00	185.000.000,00	183.459.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	39.277.350,00	37.204.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	39.277.350,00	37.204.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.889.583.314,00	1.859.367.892,00	185.000.000,00	183.459.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	124.500.000,00	122.876.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	12.653.982,00	11.382.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	172.000.000,00	169.583.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	10.897.350,00	9.781.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	14.176.820,00	12.328.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	14.141.670,00	12.571.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	30.436.610,00	29.399.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	1.260.570.000,00	1.256.778.730,00	185.000.000,00	183.459.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	33.229.311,00	28.121.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	83.058.946,00	77.811.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0029	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	133.918.625,00	128.732.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8.845.123.145,00	7.242.567.382,00	132.048.500,00	6.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja	8.845.123.145,00	7.242.567.382,00	132.048.500,00	6.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.364.121.696,00	6.360.965.160,00	7.048.500,00	6.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.240.900,00	4.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.161.700,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.321.800,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.126.800,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.330.200,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.293.600,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.006.800,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.521.462.326,00	5.718.876.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.518.984.626,00	5.717.311.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.361.700,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.116.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.600.000,00	7.594.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.600.000,00	7.594.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	215.605.170,00	171.035.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.689.300,00	4.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.059.100,00	36.683.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.976.900,00	8.612.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.443.900,00	73.319.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.635.970,00	13.585.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.800.000,00	6.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000,00	27.749.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	7.048.500,00	6.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	7.048.500,00	6.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.732.800,00	326.351.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.020.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	275.000.000,00	193.306.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.712.800,00	132.579.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.480.500,00	132.748.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.574.000,00	23.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.520.000,00	27.143.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.280.000,00	33.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.106.500,00	49.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	170.390.156,00	152.806.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	170.390.156,00	152.806.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	170.390.156,00	152.806.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	863.936.173,00	379.931.150,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	863.936.173,00	379.931.150,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	863.936.173,00	379.931.150,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	446.675.120,00	348.864.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	446.675.120,00	348.864.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.2.07.01.0000	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	446.675.120,00	348.864.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.805.468.690,00	5.182.666.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	5.805.468.690,00	5.182.666.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.643.278.739,00	5.032.692.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.098.800,00	1.682.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	349.800,00	291.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	349.800,00	291.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	349.800,00	291.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	349.800,00	291.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	349.800,00	291.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	349.800,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.180.192.494,00	4.643.257.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.179.492.894,00	4.642.675.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	349.800,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	349.800,00	291.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.632.000,00	14.520.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16.632.000,00	14.520.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	131.023.205,00	110.878.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.544.451,00	3.635.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.993.577,00	12.677.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.768.809,00	5.560.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.576.132,00	44.881.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.840.236,00	6.576.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.800.000,00	2.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.500.000,00	34.926.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.194.600,00	215.006.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.100.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	148.560.000,00	114.350.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.534.600,00	99.534.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.137.640,00	47.347.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.753.000,00	19.871.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.111.740,00	7.811.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.633.900,00	18.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.639.000,00	1.639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	43.681.944,00	41.506.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	43.681.944,00	41.506.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	33.060.919,00	31.166.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	10.621.025,00	10.339.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	60.003.060,00	56.125.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	60.003.060,00	56.125.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	60.003.060,00	56.125.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	39.261.860,00	34.517.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	39.261.860,00	34.517.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	39.261.860,00	34.517.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	19.243.087,00	17.824.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	19.243.087,00	17.824.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.3.31.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	19.243.087,00	17.824.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	9.629.015.105,00	8.870.258.871,00	140.040.000,00	131.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pemuda dan Olahraga	9.629.015.105,00	8.870.258.871,00	140.040.000,00	131.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.390.129.487,00	3.918.030.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.497.492,00	10.440.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.248.746,00	5.197.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.248.746,00	5.243.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.524.210.892,00	3.119.784.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.513.713.400,00	3.109.295.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.248.746,00	5.244.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.248.746,00	5.244.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47.100.000,00	21.713.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	47.100.000,00	21.713.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	259.684.923,00	255.373.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.983.005,00	11.973.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.750.767,00	58.655.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.935.384,00	13.931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92.086.346,00	88.961.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.433.421,00	34.431.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.496.000,00	3.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	405.378.000,00	371.269.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.596.000,00	3.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000,00	69.422.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	331.782.000,00	298.306.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.258.180,00	139.448.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.223.480,00	21.715.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.766.800,00	28.797.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.267.900,00	54.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.000,00	34.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	743.186.931,00	670.374.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	428.812.822,00	357.890.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	57.281.212,00	53.154.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	44.230.701,00	39.828.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	327.300.909,00	264.907.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	314.374.109,00	312.484.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	314.374.109,00	312.484.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	4.095.698.687,00	3.952.296.938,00	140.040.000,00	131.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	304.148.464,00	301.925.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	304.148.464,00	301.925.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.034.099.283,00	992.148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	196.185.253,00	192.559.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	837.914.030,00	799.588.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1.027.287.640,00	956.077.000,00	140.040.000,00	131.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	629.410.140,00	574.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	194.768.750,00	185.937.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	203.108.750,00	195.652.000,00	140.040.000,00	131.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	930.163.300,00	902.146.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	472.360.500,00	455.283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	457.802.800,00	446.863.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	400.000.000,00	329.557.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	400.000.000,00	329.557.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	2.19.0.00.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	400.000.000,00	329.557.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	257.315.367,00	250.665.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	257.315.367,00	250.665.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	257.315.367,00	250.665.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	257.315.367,00	250.665.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	237.494.849,00	232.590.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	19.820.518,00	18.074.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	262.360.709,00	205.052.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	262.360.709,00	205.052.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	262.360.709,00	205.052.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	245.605.490,00	192.774.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	63.487.500,00	30.524.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	145.961.921,00	130.894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	36.156.069,00	31.355.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	16.755.219,00	12.278.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.755.219,00	12.278.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3.807.469.817,00	3.260.385.831,00	1.191.268.580,00	1.175.630.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.807.469.817,00	3.260.385.831,00	1.191.268.580,00	1.175.630.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	921.759.919,00	764.210.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	466.645.894,00	347.089.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	415.497.294,00	298.225.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	51.148.600,00	48.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	67.564.650,00	66.027.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	67.564.650,00	66.027.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	387.549.375,00	351.094.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	387.549.375,00	351.094.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	283.306.208,00	214.385.355,00	40.000.000,00	39.974.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	102.844.204,00	48.270.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	102.844.204,00	48.270.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	180.462.004,00	166.114.955,00	40.000.000,00	39.974.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	119.274.470,00	118.768.555,00	40.000.000,00	39.974.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	61.187.534,00	47.346.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.602.403.690,00	2.281.789.586,00	1.151.268.580,00	1.135.656.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	2.602.403.690,00	2.281.789.586,00	1.151.268.580,00	1.135.656.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	221.383.339,00	162.221.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	46.550.000,00	8.720.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1.993.176.901,00	1.814.991.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	341.293.450,00	295.855.250,00	1.151.268.580,00	1.135.656.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	6.359.638.594,00	6.168.293.071,00	52.519.000,00	31.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	6.359.638.594,00	6.168.293.071,00	52.519.000,00	31.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.539.189.956,00	5.389.071.185,00	21.379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.428.124,00	2.901.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.428.124,00	2.901.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.818.758.133,00	4.692.795.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.818.758.133,00	4.692.795.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000,00	27.072.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	27.072.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	222.284.029,00	205.558.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.949.932,00	6.808.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.249.719,00	24.535.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.726.481,00	14.297.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.633.200,00	70.561.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.343.417,00	14.086.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.381.280,00	5.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000,00	69.958.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	21.379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	21.379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333.103.400,00	331.878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	856.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000,00	99.110.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	232.247.400,00	232.247.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.616.270,00	128.865.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.832.000,00	41.488.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.283.000,00	45.092.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.681.000,00	30.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.820.270,00	11.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	820.448.638,00	779.221.886,00	31.140.000,00	31.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	802.660.724,00	764.505.032,00	31.140.000,00	31.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	7.443.750,00	6.350.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	691.908.774,00	660.141.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	55.318.800,00	54.199.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	10.498.000,00	7.726.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	22.155.400,00	20.848.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	15.336.000,00	15.238.015,00	31.140.000,00	31.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.787.914,00	14.716.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	17.787.914,00	14.716.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	80.370.098,00	77.405.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	80.370.098,00	77.405.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	80.370.098,00	77.405.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	38.638.074,00	36.970.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	2.486.400,00	2.122.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	2.278.941,00	2.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	33.872.733,00	32.663.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	41.732.024,00	40.435.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	15.500.000,00	15.470.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	26.232.024,00	24.964.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	43.041.053.598,00	37.566.806.649,64	1.220.697.900,00	867.815.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	9.886.266.106,00	8.728.774.129,99	130.300.000,00	126.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perikanan	9.886.266.106,00	8.728.774.129,99	130.300.000,00	126.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.024.954.875,00	6.158.762.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.415.500,00	8.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.789.500,00	1.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.302.500,00	1.106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.037.300,00	864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.985.000,00	1.721.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	866.600,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.434.600,00	3.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.252.530.875,00	5.525.953.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.250.535.875,00	5.524.233.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000,00	853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	995.000,00	867.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.100.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.100.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	299.638.700,00	263.838.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.758.300,00	9.155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.157.300,00	17.120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.715.100,00	3.691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109.065.000,00	99.647.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.027.000,00	24.182.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.416.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128.500.000,00	107.666.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	268.496.800,00	174.042.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	784.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.000.000,00	96.569.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.712.800,00	77.356.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.773.000,00	178.447.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.138.000,00	42.947.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.058.000,00	19.244.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	27.500.000,00	27.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.690.000,00	31.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57.387.000,00	57.289.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	891.879.180,00	803.847.338,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	767.628.750,00	698.919.548,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	352.712.800,00	298.849.293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	244.915.950,00	230.070.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	120.434.430,00	102.111.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	81.018.540,00	71.550.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	39.415.890,00	30.561.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.816.000,00	2.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	3.816.000,00	2.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	740.035.870,00	614.269.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	544.258.700,00	440.571.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	16.873.020,00	9.324.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	527.385.680,00	431.247.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.951.500,00	2.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.951.500,00	2.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	192.825.670,00	170.903.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	116.692.080,00	97.115.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	76.133.590,00	73.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	373.688.489,00	363.275.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	373.688.489,00	363.275.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	373.688.489,00	363.275.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	855.707.692,00	788.619.158,00	130.300.000,00	126.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	29.221.200,00	29.039.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	29.221.200,00	29.039.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	769.893.354,00	705.430.470,00	130.300.000,00	126.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	769.893.354,00	705.430.470,00	130.300.000,00	126.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	56.593.138,00	54.149.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.505.608,00	7.418.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.087.530,00	46.731.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	13.736.534.318,00	11.644.638.176,00	127.718.820,00	126.806.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pariwisata	13.736.534.318,00	11.644.638.176,00	127.718.820,00	126.806.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.681.730.609,00	5.553.649.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.019.370,00	8.298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.386.970,00	2.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	810.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	810.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	810.000,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	810.000,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.392.400,00	2.817.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.649.029.360,00	4.631.707.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.642.551.660,00	4.626.228.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.110.000,00	932.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.367.700,00	4.546.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	314.187.679,00	268.806.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.021.520,00	8.773.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.055.447,00	40.870.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.875.997,00	12.251.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	139.117.215,00	123.998.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.275.500,00	13.106.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.280.000,00	11.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.562.000,00	58.285.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	371.378.200,00	328.940.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.534.000,00	369.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.775.000,00	129.634.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.069.200,00	198.935.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337.116.000,00	315.897.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.448.000,00	65.738.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.708.000,00	109.798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.460.000,00	27.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	118.500.000,00	112.920.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4.226.097.823,00	3.854.166.937,00	22.665.090,00	21.890.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	428.257.822,00	298.840.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	428.257.822,00	298.840.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.797.840.001,00	3.555.326.810,00	22.665.090,00	21.890.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.697.840.001,00	3.555.326.810,00	22.665.090,00	21.890.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.311.253.322,00	1.743.583.068,00	105.053.730,00	104.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.311.253.322,00	1.743.583.068,00	105.053.730,00	104.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	193.600.000,00	15.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	316.167.973,00	277.619.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	878.290.556,00	656.957.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	923.194.793,00	793.306.076,00	105.053.730,00	104.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	517.452.564,00	493.238.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	517.452.564,00	493.238.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	387.702.656,00	384.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	129.749.908,00	109.217.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	17.934.967.254,00	15.877.069.637,65	178.051.000,00	141.327.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	17.934.967.254,00	15.877.069.637,65	178.051.000,00	141.327.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.252.346.621,00	13.356.244.415,00	133.467.000,00	123.939.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.008.800,00	1.956.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.089.400,00	1.063.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	919.400,00	893.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.124.147.721,00	12.333.146.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.121.329.121,00	12.330.331.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.818.600,00	2.815.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	51.080.000,00	33.149.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	51.080.000,00	33.149.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	328.469.020,00	320.916.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.795.400,00	9.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.676.620,00	47.929.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.697.800,00	10.696.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	148.083.000,00	148.072.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.216.200,00	19.284.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.920.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.080.000,00	83.279.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	13.467.000,00	4.384.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	13.467.000,00	4.384.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	517.283.880,00	444.137.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.344.000,00	1.531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	191.000.000,00	168.434.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	323.939.880,00	274.172.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.357.200,00	222.937.425,00	120.000.000,00	119.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.573.000,00	35.087.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.074.000,00	51.940.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	75.760.000,00	74.418.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.165.200,00	24.171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.785.000,00	37.319.125,00	120.000.000,00	119.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.631.784.735,00	1.540.542.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	500.276.935,00	493.418.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	500.276.935,00	493.418.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	472.654.800,00	397.041.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	472.654.800,00	397.041.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	142.266.000,00	138.443.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	142.266.000,00	138.443.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	516.587.000,00	511.638.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	479.227.000,00	474.278.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	37.360.000,00	37.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	394.587.385,00	356.807.142,65	34.462.000,00	7.266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	359.378.600,00	328.407.600,00	27.196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	299.978.600,00	275.828.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	54.600.000,00	47.779.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	4.800.000,00	4.800.000,00	27.196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	35.208.785,00	28.399.542,65	7.266.000,00	7.266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	35.208.785,00	28.399.542,65	7.266.000,00	7.266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	160.865.801,00	149.814.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	50.976.000,00	50.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.976.000,00	50.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	86.721.001,00	78.909.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	86.721.001,00	78.909.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	23.168.800,00	19.929.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.04.2.04.0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	23.168.800,00	19.929.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	85.686.382,00	79.824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	85.686.382,00	79.824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	85.686.382,00	79.824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	37.754.000,00	37.185.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	37.754.000,00	37.185.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	37.754.000,00	37.185.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	371.942.330,00	356.650.568,00	10.122.000,00	10.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	371.942.330,00	356.650.568,00	10.122.000,00	10.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	160.590.330,00	157.904.568,00	10.122.000,00	10.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	28.952.000,00	28.886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	182.400.000,00	169.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	22.829.668,00	19.097.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.01.0000		Dinas Lingkungan Hidup	22.829.668,00	19.097.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.28	2.11.3.28.0.00.01.0000	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	22.829.668,00	19.097.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.01.0000	3.28.04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	22.829.668,00	19.097.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	2.11.3.28.0.00.01.0000	3.28.04.2.01.0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	22.829.668,00	19.097.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	912.418.120,00	841.020.346,00	633.038.700,00	355.810.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja	912.418.120,00	841.020.346,00	633.038.700,00	355.810.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	800.303.000,00	735.885.900,00	620.765.000,00	343.610.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	762.595.000,00	711.070.900,00	620.765.000,00	343.610.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	762.595.000,00	711.070.900,00	620.765.000,00	343.610.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	37.708.000,00	24.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	37.708.000,00	24.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	15.321.600,00	10.767.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	12.955.600,00	9.892.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12.955.600,00	9.892.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.366.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	2.366.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	96.793.520,00	94.366.946,00	12.273.700,00	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	96.793.520,00	94.366.946,00	12.273.700,00	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.30.2.07.01.0000	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	96.793.520,00	94.366.946,00	12.273.700,00	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	548.038.132,00	456.206.389,00	151.589.380,00	117.331.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	2.18.3.31.0.00.01.0000		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	548.038.132,00	456.206.389,00	151.589.380,00	117.331.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	2.18.3.31.0.00.01.0000	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	548.038.132,00	456.206.389,00	151.589.380,00	117.331.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	2.18.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	548.038.132,00	456.206.389,00	151.589.380,00	117.331.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	2.18.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	178.680.000,00	170.922.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	2.18.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	259.163.962,00	255.294.704,00	151.589.380,00	117.331.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	2.18.3.31.0.00.01.0000	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	110.194.170,00	29.989.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	82.656.716.542,00	74.019.430.926,00	1.714.764.760,00	1.450.542.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	48.206.795.142,00	43.183.449.881,00	241.907.620,00	232.657.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.01		BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BELITUNG	208.482.400,00	150.967.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.01	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	208.482.400,00	150.967.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.01	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	208.482.400,00	150.967.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.01	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	52.135.100,00	51.886.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.01	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	39.877.900,00	25.266.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.01	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	50.713.500,00	14.956.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.01	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	26.122.900,00	22.969.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.01	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	39.633.000,00	35.888.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.02		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KAB. BELITUNG	1.778.121.982,00	1.684.348.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.02	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.778.121.982,00	1.684.348.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.02	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.000.000,00	99.797.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.02	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.000.000,00	99.797.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.02	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	106.500.000,00	106.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.02	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	106.500.000,00	106.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.02	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.571.621.982,00	1.478.050.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.02	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	512.156.000,00	481.918.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.02	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	493.927.982,00	484.089.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.02	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	565.538.000,00	512.042.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.06		BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BELITUNG	381.257.300,00	353.024.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.06	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	381.257.300,00	353.024.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.06	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	381.257.300,00	353.024.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.06	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	74.157.300,00	73.705.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.06	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	267.163.100,00	240.454.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.06	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	39.936.900,00	38.864.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.08		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. BELITUNG	460.098.475,00	312.641.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.08	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	460.098.475,00	312.641.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.08	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	460.098.475,00	312.641.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.08	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	136.250.300,00	113.191.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.08	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	237.978.575,00	168.680.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.08	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	85.869.600,00	30.769.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.09		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KAB. BELITUNG	10.731.888.350,00	10.470.408.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.09	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	10.731.888.350,00	10.470.408.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.09	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	10.731.888.350,00	10.470.408.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.09	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4.621.330.600,00	4.420.449.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.09	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	4.576.009.050,00	4.516.047.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.09	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.534.548.700,00	1.533.911.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003		BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG	33.625.105.035,00	29.382.265.222,00	241.907.620,00	232.657.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.625.105.035,00	29.382.265.222,00	241.907.620,00	232.657.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.797.043.012,00	17.925.953.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.772.298.382,00	17.904.754.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.744.630,00	21.198.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	210.000.000,00	78.764.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	210.000.000,00	78.764.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.185.885.829,00	3.011.941.179,00	2.821.620,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150.000.000,00	149.553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	248.835.980,00	213.753.350,00	2.821.620,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	180.000.000,00	179.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.353.124.000,00	1.246.078.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.229.900,00	18.938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.203.695.949,00	1.203.651.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	10.000.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	10.000.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.676.443.200,00	2.231.901.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.000.000,00	15.391.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.529.000.000,00	1.213.406.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.128.443.200,00	1.003.102.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.552.112.000,00	3.288.084.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.670.000,00	38.426.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	744.159.000,00	674.218.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	70.000.000,00	65.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	600.000.000,00	597.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.088.283.000,00	1.911.988.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.634.913.794,00	1.410.983.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	928.413.794,00	765.931.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	106.500.000,00	45.052.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.568.707.200,00	1.434.636.840,00	229.086.000,00	220.457.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	783.428.600,00	738.507.640,00	47.576.000,00	47.147.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	685.744.000,00	596.743.100,00	181.510.000,00	173.309.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0003	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	99.534.600,00	99.386.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KAB. BELITUNG	237.073.500,00	150.402.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	237.073.500,00	150.402.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	211.893.100,00	136.552.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	185.081.400,00	117.201.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	21.389.600,00	15.917.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5.422.100,00	3.432.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	25.180.400,00	13.849.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	11.659.900,00	5.849.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0004	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	13.520.500,00	8.000.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. BELITUNG	141.416.200,00	126.455.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	43.071.400,00	42.169.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.071.400,00	42.169.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.274.200,00	15.877.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.366.000,00	3.364.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.231.800,00	3.184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.394.200,00	4.170.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.688.600,00	4.684.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.116.600,00	10.888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	98.344.800,00	84.286.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	98.344.800,00	84.286.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	6.000.000,00	4.558.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	40.006.800,00	28.574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0005	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	52.338.000,00	51.153.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0007		BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BELITUNG	643.351.900,00	552.936.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0007	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	643.351.900,00	552.936.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0007	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	626.698.600,00	538.056.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0007	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	481.431.500,00	396.066.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0007	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	35.899.200,00	34.660.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0007	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	109.367.900,00	107.329.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0007	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	16.653.300,00	14.880.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.2.10.0.00.01.0007	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	16.653.300,00	14.880.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02			SEKRETARIAT DPRD	34.449.921.400,00	30.835.981.045,00	1.472.857.140,00	1.217.885.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat DPRD	34.449.921.400,00	30.835.981.045,00	1.472.857.140,00	1.217.885.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.907.354.750,00	20.281.936.213,00	1.472.857.140,00	1.217.885.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.398.618,00	3.633.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.428.800,00	697.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.512.818,00	290.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.320.000,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.147.700,00	887.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	971.800,00	947.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.017.500,00	414.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.287.899.500,00	3.690.901.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.285.750.000,00	3.689.433.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.173.000,00	1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	976.500,00	456.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	157.000.000,00	136.877.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	157.000.000,00	136.877.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.187.840.392,00	999.088.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	59.269.005,00	35.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.697.079,00	84.653.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	46.831.788,00	37.971.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	774.235.240,00	694.384.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	62.612.880,00	22.866.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72.194.400,00	72.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	52.024.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	1.472.857.140,00	1.217.885.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	91.206.480,00	88.333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	1.381.650.660,00	1.129.552.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.190.907.000,00	1.014.194.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.952.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	358.500.000,00	271.214.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	829.455.000,00	740.979.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	760.236.000,00	639.741.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	128.951.000,00	67.258.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	35.000.000,00	32.924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	118.985.000,00	63.924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	477.300.000,00	475.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	14.775.538.000,00	13.439.399.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	14.057.288.000,00	12.889.161.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	360.750.000,00	299.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	357.500.000,00	250.862.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	538.535.240,00	358.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	538.535.240,00	358.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	11.542.566.650,00	10.554.044.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.135.911.220,00	955.425.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	596.446.220,00	492.013.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	539.465.000,00	463.412.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.520.973.430,00	2.071.403.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	1.500.000.000,00	1.266.419.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	293.476.260,00	293.476.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	727.497.170,00	511.507.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	473.632.000,00	146.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	43.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	430.632.000,00	146.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	7.412.050.000,00	7.380.790.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	7.412.050.000,00	7.380.790.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	44.113.909.042,00	37.032.181.720,90	278.783.210,00	251.529.576,00	1.250.000.000,00	0,00	106.639.282.805,00	105.622.017.300,00
5.01			PERENCANAAN	10.240.562.642,00	9.718.053.077,90	50.000.000,00	49.420.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	10.240.562.642,00	9.718.053.077,90	50.000.000,00	49.420.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.967.418.560,00	8.638.758.555,90	50.000.000,00	49.420.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.758.400,00	4.066.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.010.600,00	894.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	735.000,00	612.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	735.000,00	612.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	735.000,00	612.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	735.000,00	612.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	807.800,00	721.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.560.920.700,00	7.373.761.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.557.420.500,00	7.370.345.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.500.200,00	3.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	73.776.800,00	50.656.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6.000.000,00	4.058.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	67.776.800,00	46.597.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	507.051.260,00	451.862.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.989.000,00	23.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.832.200,00	40.746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.995.300,00	7.989.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	278.368.960,00	237.277.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.931.800,00	24.035.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.934.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000,00	109.912.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000,00	199.694.971,00	50.000.000,00	49.420.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	199.694.971,00	50.000.000,00	49.420.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	396.263.400,00	340.165.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.016.000,00	2.505.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.000.000,00	144.121.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	232.247.400,00	193.539.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.648.000,00	218.551.946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.041.000,00	82.158.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.607.000,00	25.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	112.000.000,00	110.873.046,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.006.965.178,00	847.438.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	763.369.994,00	671.007.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	25.317.915,00	21.476.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	45.738.207,00	26.962.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	83.863.642,00	70.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	13.236.612,00	11.059.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	595.213.618,00	541.149.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	93.298.249,00	60.155.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	85.461.205,00	52.662.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	7.837.044,00	7.492.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	150.296.935,00	116.276.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	22.036.396,00	13.784.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	128.260.539,00	102.492.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	266.178.904,00	231.855.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	156.117.093,00	150.202.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	156.117.093,00	150.202.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	62.653.900,00	38.505.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	24.693.352,00	8.709.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	37.960.548,00	29.796.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	47.407.911,00	43.148.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	12.928.650,00	11.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	34.479.261,00	31.598.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02			KEUANGAN	23.534.845.299,00	18.473.486.135,00	228.783.210,00	202.108.800,00	1.250.000.000,00	0,00	106.639.282.805,00	105.622.017.300,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11.227.972.984,00	8.847.417.692,00	71.248.680,00	63.880.500,00	1.250.000.000,00	0,00	106.639.282.805,00	105.622.017.300,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.785.260.114,00	7.132.156.342,00	32.398.680,00	30.358.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.513.376,00	3.759.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	948.204,00	828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	995.973,00	816.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	787.455,00	706.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	997.227,00	883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	787.389,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	997.128,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.031.168.207,00	5.950.759.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.026.128.363,00	5.947.265.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.925.294,00	1.907.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.114.550,00	1.586.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.000.000,00	25.434.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	70.000.000,00	25.434.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	734.435.971,00	503.125.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.116.762,00	3.878.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.973.192,00	28.759.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.897.721,00	16.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250.502.856,00	177.114.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.945.440,00	18.164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	333.000.000,00	252.000.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	32.398.680,00	30.358.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	11.100.000,00	9.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	21.298.680,00	21.034.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	657.606.300,00	463.791.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.480.000,00	1.261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	283.200.000,00	222.787.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	366.926.300,00	239.743.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	286.536.260,00	185.285.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.170.000,00	44.708.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.004.600,00	20.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	4.965.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.397.550,00	15.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	112.999.110,00	102.878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.500.765.518,00	1.033.576.955,00	0,00	0,00	1.250.000.000,00	0,00	106.639.282.805,00	105.622.017.300,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	562.438.031,00	334.122.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	26.597.505,00	13.544.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	24.562.038,00	10.279.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	290.055.566,00	172.044.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	221.222.922,00	138.254.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	156.311.317,00	78.372.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	113.471.061,00	74.881.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	42.840.256,00	3.490.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	106.426.742,00	71.558.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	68.514.984,00	53.600.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	21.792.305,00	15.163.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1.128.648,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	14.990.805,00	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	648.688.228,00	540.823.627,00	0,00	0,00	1.250.000.000,00	0,00	106.639.282.805,00	105.622.017.300,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	648.688.228,00	540.823.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.828.236.500,00	93.834.187.300,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811.046.305,00	11.787.830.000,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	26.901.200,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	26.901.200,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	941.947.352,00	681.684.395,00	38.850.000,00	33.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	941.947.352,00	681.684.395,00	38.850.000,00	33.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	36.945.966,00	33.046.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	51.535.112,00	43.432.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	97.436.950,00	80.836.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	101.026.520,00	62.254.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	309.431.398,00	184.566.740,00	38.850.000,00	33.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	268.653.016,00	231.948.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	76.918.390,00	45.599.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000		Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah	12.306.872.315,00	9.626.068.443,00	157.534.530,00	138.228.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.538.384.655,00	8.419.109.860,00	157.534.530,00	138.228.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.780.500,00	1.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	471.750,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	262.515,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	262.515,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	262.515,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	262.515,00	226.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	258.690,00	243.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.598.444.232,00	6.916.057.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.597.809.312,00	6.915.537.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	375.180,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	259.740,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.300.000,00	9.941.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	39.300.000,00	9.941.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	497.244.873,00	432.360.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.071.365,00	6.589.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.462.120,00	63.642.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.374.508,00	5.248.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	229.680.720,00	193.422.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.918.400,00	11.573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.237.760,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.500.000,00	150.984.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	157.534.530,00	138.228.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	157.534.530,00	138.228.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.056.233.000,00	816.579.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.028.000,00	5.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	360.000.000,00	273.699.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	689.205.000,00	537.675.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	345.382.050,00	242.636.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	135.558.750,00	74.638.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.633.300,00	32.662.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	143.190.000,00	135.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	202.117.410,00	138.634.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	202.117.410,00	138.634.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	202.117.410,00	138.634.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.566.370.250,00	1.068.324.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.566.370.250,00	1.068.324.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	157.721.880,00	99.734.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	234.321.000,00	218.360.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	260.331.270,00	52.118.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	716.834.800,00	581.706.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	19.994.205,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	171.455.010,00	114.497.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	5.712.085,00	1.552.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03			KEPEGAWAIAN	9.169.918.911,00	8.058.359.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.169.918.911,00	8.058.359.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.170.355.273,00	6.538.538.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.265.602.538,00	5.764.196.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.265.602.538,00	5.764.196.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52.500.000,00	5.121.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	52.500.000,00	5.121.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	290.544.485,00	262.396.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.793.308,00	9.238.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.384.537,00	71.267.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.188.800,00	9.846.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.507.840,00	69.058.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.274.000,00	22.271.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.896.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.500.000,00	75.855.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	354.034.800,00	316.015.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.872.000,00	1.703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	216.450.000,00	181.600.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.712.800,00	132.712.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.673.450,00	190.808.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.192.960,00	60.628.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.556.040,00	61.079.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.924.450,00	69.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.999.563.638,00	1.519.820.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	312.793.618,00	146.719.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	227.815.817,00	94.902.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	51.339.861,00	38.702.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	21.571.200,00	13.114.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	12.066.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	525.959.500,00	385.845.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	63.336.000,00	55.507.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	462.623.500,00	330.337.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	1.160.810.520,00	987.254.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1.160.810.520,00	987.254.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.063.504.883,00	712.536.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.063.504.883,00	712.536.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.063.504.883,00	712.536.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	229.889.180,00	122.860.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	229.889.180,00	122.860.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	833.615.703,00	589.676.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	833.615.703,00	589.676.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	105.077.307,00	69.746.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	105.077.307,00	69.746.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	105.077.307,00	69.746.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	105.077.307,00	69.746.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	105.077.307,00	69.746.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	11.293.095.213,00	10.036.981.898,00	92.179.950,00	76.212.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	11.293.095.213,00	10.036.981.898,00	92.179.950,00	76.212.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		Inspektorat	11.293.095.213,00	10.036.981.898,00	92.179.950,00	76.212.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.845.660.142,00	9.728.681.073,00	92.179.950,00	76.212.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.881.250,00	5.437.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.681.250,00	2.259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.200.000,00	888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.200.000,00	958.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	600.000,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	600.000,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	600.000,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.847.313.067,00	8.839.508.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.845.274.567,00	8.837.957.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.137.000,00	868.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	901.500,00	681.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	249.089.363,00	229.726.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.647.350,00	2.262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	246.442.013,00	227.463.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	300.075.982,00	267.562.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.625.260,00	3.152.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.189.519,00	23.999.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.069.143,00	8.336.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110.210.340,00	96.984.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.664.600,00	933.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.317.120,00	7.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132.000.000,00	126.920.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	830.280,00	0,00	92.179.950,00	76.212.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	11.246.520,00	9.279.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	830.280,00	0,00	80.933.430,00	66.933.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	296.571.000,00	257.444.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	680.000,00	557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000,00	113.115.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.891.000,00	143.772.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.899.200,00	129.002.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.604.720,00	84.676.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.910.000,00	19.941.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.384.480,00	24.384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	265.940.730,00	158.892.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	105.312.130,00	55.575.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5.901.610,00	5.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	14.984.994,00	5.318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	1.977.846,00	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	20.072.945,00	10.181.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	28.767.505,00	7.668.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	33.607.230,00	25.839.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	160.628.600,00	103.317.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	53.732.480,00	15.551.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	106.896.120,00	87.765.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	181.494.341,00	149.407.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	7.342.700,00	4.247.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	7.342.700,00	4.247.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	174.151.641,00	145.160.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	26.904.282,00	23.442.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	8.712.900,00	4.187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	131.749.140,00	117.415.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6.785.319,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	30.468.681.412,00	26.184.019.180,31	21.280.440,00	19.647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01			KECAMATAN	30.468.681.412,00	26.184.019.180,31	21.280.440,00	19.647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00		Kecamatan Tanjungpandan	10.977.872.301,00	9.050.410.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.491.300.231,00	8.620.899.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.643.320,00	3.405.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	697.200,00	697.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	697.200,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	697.200,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.551.720,00	1.397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.856.508.949,00	8.160.557.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.855.065.349,00	8.159.168.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	955.800,00	955.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	487.800,00	433.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	175.551.762,00	122.294.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.183.590,00	3.769.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.769.807,00	26.021.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.595.065,00	5.850.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.556.250,00	49.043.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.047.050,00	19.462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.400.000,00	13.648.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	278.869.200,00	205.280.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.800.000,00	53.431.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.069.200,00	151.848.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.727.000,00	129.361.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.391.000,00	25.602.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.618.000,00	13.289.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.630.000,00	13.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.088.000,00	76.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	141.423.620,00	131.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	141.423.620,00	131.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	27.467.720,00	24.629.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	113.955.900,00	106.855.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	259.072.825,00	216.653.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	259.072.825,00	216.653.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	17.260.450,00	16.169.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	241.812.375,00	200.484.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	86.075.625,00	81.372.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	86.075.625,00	81.372.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	41.488.125,00	41.286.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.00	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	44.587.500,00	40.085.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.01		KELURAHAN KOTA	808.838.471,00	774.622.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.01	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	354.664.937,00	339.946.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.01	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	494.400,00	494.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.01	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	247.200,00	247.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.01	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	247.200,00	247.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.01	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	494.400,00	494.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.01	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	247.200,00	247.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.01	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	247.200,00	247.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.01	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.038.137,00	62.248.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.01	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.998.600,00	5.983.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.01	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.762.580,00	11.743.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.01	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.495.200,00	3.481.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.01	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.851.477,00	18.370.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.01	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.393.000,00	6.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.01	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.937.280,00	2.678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.01	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.600.000,00	13.597.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.01	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.891.000,00	202.087.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.01	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	36.196.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.01	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.891.000,00	165.891.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.01	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.747.000,00	74.621.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.01	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.505.000,00	12.073.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.01	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.303.000,00	5.821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.01	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.940.000,00	16.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.01	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.999.000,00	39.892.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.01	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	123.375.000,00	123.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.01	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	123.375.000,00	123.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.01	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	123.375.000,00	123.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.01	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	319.198.534,00	300.101.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.01	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	319.198.534,00	300.101.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.01	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.999.615,00	11.668.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.01	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	307.198.919,00	288.432.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.01	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.600.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.01	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.600.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.01	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	11.600.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02		KELURAHAN PARIT	730.098.636,00	696.750.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	247.099.778,00	228.110.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	999.600,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	499.800,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	499.800,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	999.600,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	499.800,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	499.800,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	83.013.178,00	67.766.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.476.631,00	2.945.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.543.489,00	16.261.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.887.108,00	4.402.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.433.150,00	24.033.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.210.000,00	6.117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.862.800,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.600.000,00	12.505.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.289.400,00	116.744.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.754.800,00	17.387.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.534.600,00	99.356.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.798.000,00	41.940.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.648.000,00	8.307.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.220.000,00	11.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.930.000,00	21.887.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	166.575.000,00	166.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	166.575.000,00	166.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	166.575.000,00	166.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	306.623.858,00	293.064.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	306.623.858,00	293.064.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.585.025,00	8.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	297.038.833,00	284.752.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.800.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.800.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.02	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	9.800.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03		KELURAHAN KAMPONG DAMAI	701.011.480,00	693.110.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	264.709.783,00	259.508.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	70.534.983,00	67.313.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.997.330,00	5.969.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.714.606,00	12.702.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.278.495,00	4.055.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.611.772,00	27.350.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.443.600,00	7.443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.489.180,00	4.791.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.712.800,00	155.451.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.000.000,00	22.738.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.712.800,00	132.712.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.962.000,00	34.244.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.892.000,00	5.288.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.140.000,00	7.135.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.930.000,00	21.819.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	125.747.000,00	124.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	125.747.000,00	124.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	125.747.000,00	124.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	303.581.897,00	301.723.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	303.581.897,00	301.723.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.498.800,00	6.498.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	297.083.097,00	295.224.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.972.800,00	6.928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	6.972.800,00	6.928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.03	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	6.972.800,00	6.928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04		KELURAHAN PAAL SATU	802.200.626,00	747.175.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	236.146.775,00	228.936.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.228.600,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	614.300,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	614.300,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.228.600,00	1.214.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	614.300,00	614.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	614.300,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.709.975,00	64.235.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.185.000,00	4.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.678.487,00	12.551.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.165.100,00	4.164.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.667.828,00	22.222.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.051.000,00	7.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.990.560,00	4.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.972.000,00	8.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.334.600,00	125.307.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.800.000,00	25.773.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.534.600,00	99.534.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.645.000,00	36.979.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.648.000,00	9.648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.064.000,00	11.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.933.000,00	15.861.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	200.400.000,00	200.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	200.400.000,00	200.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	200.400.000,00	200.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	306.394.209,00	267.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	306.394.209,00	267.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.963.932,00	8.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	92.665.750,00	81.718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	204.764.527,00	177.244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	59.259.642,00	50.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	59.259.642,00	50.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.04	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	59.259.642,00	50.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05		KELURAHAN LESUNG BATANG	844.493.194,00	754.521.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	281.981.476,00	220.628.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	999.600,00	996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	499.800,00	497.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	499.800,00	498.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	999.600,00	993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	499.800,00	499.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	499.800,00	493.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.546.476,00	74.882.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.142.188,00	3.139.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.539.159,00	20.388.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.999.773,00	4.997.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.385.356,00	26.397.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.683.200,00	11.669.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.196.800,00	3.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.600.000,00	5.130.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.712.800,00	103.132.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000,00	17.421.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.712.800,00	85.710.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.723.000,00	40.625.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.547.000,00	4.226.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.446.000,00	1.671.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.230.000,00	13.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.500.000,00	21.497.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	186.099.000,00	181.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	186.099.000,00	181.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	186.099.000,00	181.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	316.076.843,00	297.652.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	316.076.843,00	297.652.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.947.885,00	5.411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	99.927.750,00	99.069.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	210.201.208,00	193.171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	60.335.875,00	55.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60.335.875,00	55.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.05	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60.335.875,00	55.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06		KELURAHAN PANGKAL LALANG	1.096.592.073,00	1.006.008.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	368.190.429,00	294.142.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.999.200,00	1.666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	999.600,00	833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	999.600,00	833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.999.200,00	1.666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	999.600,00	833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	999.600,00	833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.359.229,00	88.987.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.243.530,00	3.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.035.162,00	21.069.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.845.037,00	5.795.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.173.600,00	31.408.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.867.100,00	10.047.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.194.800,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.000.000,00	14.746.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.912.800,00	121.397.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.200.000,00	41.217.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.712.800,00	80.180.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.920.000,00	80.424.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.683.000,00	9.547.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.024.000,00	8.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.223.000,00	22.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.990.000,00	39.852.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	364.999.800,00	364.966.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	364.999.800,00	364.966.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	364.999.800,00	364.966.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	339.307.144,00	324.149.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	339.307.144,00	324.149.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25.106.644,00	22.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	99.999.900,00	88.959.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	214.200.600,00	212.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	24.094.700,00	22.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	24.094.700,00	22.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.06	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	24.094.700,00	22.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07		KELURAHAN TANJUNG PENDAM	814.803.865,00	713.160.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	299.909.585,00	223.011.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.250.000,00	2.117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	750.000,00	672.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.500.000,00	1.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.061.785,00	78.638.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.485.844,00	3.455.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.163.528,00	19.038.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.994.333,00	5.695.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.445.680,00	32.034.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.775.600,00	8.688.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.196.800,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.000.000,00	8.525.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.212.800,00	85.748.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.500.000,00	16.627.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.712.800,00	69.121.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.385.000,00	56.506.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.993.000,00	9.125.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.202.000,00	5.529.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.990.000,00	13.652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	172.800.000,00	172.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	172.800.000,00	172.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	172.800.000,00	172.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	340.794.280,00	316.949.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	340.794.280,00	316.949.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	29.998.567,00	29.402.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	99.712.500,00	98.856.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	211.083.213,00	188.689.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.07	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		Kecamatan Badau	3.125.603.554,00	2.638.575.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.850.761.877,00	2.382.309.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.650.000,00	4.549.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	750.000,00	649.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.352.724.491,00	1.953.448.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.352.124.491,00	1.952.848.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.800.000,00	32.290.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	38.800.000,00	32.290.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	168.001.186,00	143.211.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.389.498,00	1.356.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.986.887,00	11.021.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.943.161,00	6.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.475.320,00	88.059.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.662.000,00	7.624.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.544.320,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.000.000,00	26.413.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.769.200,00	188.641.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.000.000,00	22.100.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.069.200,00	165.891.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.817.000,00	60.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.123.000,00	30.806.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.210.000,00	11.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.484.000,00	17.466.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	42.967.210,00	39.843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	42.967.210,00	39.843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.886.310,00	18.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.080.900,00	21.357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	182.898.375,00	173.494.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	182.898.375,00	173.494.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	32.307.275,00	28.077.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150.591.100,00	145.416.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	48.976.092,00	42.928.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	48.976.092,00	42.928.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24.284.250,00	21.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	24.691.842,00	20.961.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		Kecamatan Sijuk	3.567.449.826,00	3.026.556.339,00	21.280.440,00	19.647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.160.240.026,00	2.624.653.839,00	21.280.440,00	19.647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.678.200,00	1.678.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	223.800,00	223.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	138.600,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	310.200,00	310.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	214.200,00	214.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	206.400,00	206.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.697.540.926,00	2.203.284.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.696.742.926,00	2.202.486.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	169.200,00	169.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	628.800,00	628.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.800.000,00	23.190.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27.800.000,00	23.190.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	201.695.300,00	190.313.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.278.000,00	5.252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.360.700,00	34.001.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.274.400,00	6.231.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	108.604.000,00	103.104.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.378.200,00	5.020.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.800.000,00	36.703.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	21.280.440,00	19.647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	21.280.440,00	19.647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.784.600,00	114.935.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.000.000,00	15.151.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.534.600,00	99.534.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.741.000,00	91.250.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.868.000,00	19.751.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.158.000,00	32.733.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.990.000,00	14.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.725.000,00	24.211.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	66.907.000,00	66.567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	66.907.000,00	66.567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17.427.000,00	17.427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	49.480.000,00	49.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	316.127.800,00	311.160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	316.127.800,00	311.160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	193.154.000,00	191.586.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	122.973.800,00	119.573.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	24.175.000,00	24.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	24.175.000,00	24.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17.020.000,00	17.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.155.000,00	7.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		Kecamatan Membalong	3.685.870.083,00	3.345.279.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.288.614.483,00	2.973.029.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.253.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	375.500,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	375.500,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	375.500,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	375.500,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	375.500,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	375.500,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.778.037.788,00	2.588.928.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.777.286.788,00	2.588.178.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	375.500,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	375.500,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000,00	17.723.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	17.723.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	186.418.895,00	169.465.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.378.616,00	3.625.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.586.998,00	29.718.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.269.281,00	4.585.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.984.000,00	90.842.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.200.000,00	7.104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.000.000,00	33.589.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.712.800,00	121.246.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.000.000,00	40.081.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.712.800,00	80.164.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.192.000,00	73.416.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.848.000,00	33.868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.624.000,00	21.938.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.420.000,00	13.319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.300.000,00	4.291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	99.575.000,00	87.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	99.575.000,00	87.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	75.575.000,00	63.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	277.359.600,00	265.156.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	277.359.600,00	265.156.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	142.379.600,00	130.726.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	134.980.000,00	134.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.321.000,00	19.561.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.321.000,00	19.561.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18.491.000,00	18.483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.830.000,00	1.078.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		Kecamatan Selat Nasik	3.313.847.303,00	2.737.848.162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.968.967.141,00	2.421.560.811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.729.408,00	2.338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	446.392,00	425.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	497.076,00	492.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	494.172,00	492.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	449.500,00	449.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	467.532,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	374.736,00	369.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.377.086.783,00	1.878.894.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.376.400.983,00	1.878.232.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	685.800,00	661.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.450.000,00	18.212.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.450.000,00	18.212.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.547.510,00	87.619.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.635.471,00	4.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.833.822,00	10.687.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.514.705,00	2.499.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.215.175,00	47.668.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.548.337,00	3.413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.800.000,00	18.789.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.141.000,00	160.597.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.250.000,00	14.060.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.891.000,00	146.537.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.012.440,00	273.899.296,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.818.480,00	19.160.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.660.960,00	35.304.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.533.000,00	20.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	198.614.396,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	114.431.440,00	92.688.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	114.431.440,00	92.688.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14.362.290,00	13.597.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.069.150,00	79.090.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	219.858.582,00	213.214.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	219.858.582,00	213.214.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	142.840.652,00	138.668.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	77.017.930,00	74.546.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.590.140,00	10.384.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.590.140,00	10.384.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.565.950,00	2.553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8.024.190,00	7.831.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.158.033.241,00	7.607.046.085,00	20.179.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.158.033.241,00	7.607.046.085,00	20.179.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.158.033.241,00	7.607.046.085,00	20.179.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.265.989.625,00	3.870.443.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.550.968,00	4.662.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	794.429,00	751.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	823.122,00	643.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	898.602,00	587.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	998.841,00	954.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	853.548,00	816.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.182.426,00	908.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.757.928.409,00	3.389.443.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.755.953.176,00	3.387.866.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	990.636,00	766.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	984.597,00	809.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.000.000,00	28.028.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000,00	28.028.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	170.355.648,00	167.496.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.499.100,00	3.483.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.456.426,00	28.088.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.995.400,00	4.983.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.554.100,00	60.356.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.690.000,00	21.280.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.680.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.480.622,00	43.304.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.634.600,00	143.228.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.600.000,00	41.898.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.534.600,00	99.529.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.520.000,00	137.585.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.868.000,00	16.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.253.000,00	36.829.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.399.000,00	34.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	49.550.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.063.798.159,00	984.566.384,00	14.646.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.063.798.159,00	984.566.384,00	14.646.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	842.582.159,00	806.204.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	173.080.000,00	136.157.500,00	14.646.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	48.136.000,00	42.204.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.795.516.800,00	1.774.978.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.795.516.800,00	1.774.978.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.694.689.000,00	1.685.284.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	72.802.800,00	62.524.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	28.025.000,00	27.169.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	70.325.400,00	62.913.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	70.325.400,00	62.913.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	37.976.100,00	33.454.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	32.349.300,00	29.459.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	497.143.300,00	459.465.257,00	5.533.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	497.143.300,00	459.465.257,00	5.533.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	85.948.000,00	58.400.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	348.695.300,00	343.411.920,00	5.533.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	62.500.000,00	57.652.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	465.259.957,00	454.678.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	465.259.957,00	454.678.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	136.833.424,00	135.128.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	88.426.533,00	81.237.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	240.000.000,00	238.312.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jumlah	888.104.600.616,70	798.966.103.189,53	43.619.973.682,00	38.837.469.692,00	1.250.000.000,00	0,00	106.639.282.805,00	105.622.017.300,00

BUPATI BELITUNG,

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	2025	2024
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	99.023.375.881,70	185.632.032.036,77
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	99.023.375.881,70	185.632.032.036,77
3	**Sub Total (1 - 2)**	**(0,00)**	**-**
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	95.840.033.255,26	99.023.375.881,70
5	**Sub Total (3+4)**	**95.840.033.255,26**	**99.023.375.881,70**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-
7	Lain-lain	-	-
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)**	**95.840.033.255,26**	**99.023.375.881,70**

BUPATI BELITUNG

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	**PENDAPATAN**				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**				
3	Pendapatan Pajak Daerah	105.008.343.186,00	97.654.261.782,25	7.354.081.403,75	7,53
4	Pendapatan Retribusi Daerah	85.513.242.490,47	41.311.650.044,33	44.201.592.446,14	107,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.886.428.412,02	5.566.654.063,95	(680.225.651,93)	(12,22)
6	Lain-lain PAD Yang Sah	23.101.463.910,24	49.941.062.808,29	(26.839.598.898,05)	(53,74)
7	**JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH(3 s.d 6)**	**218.509.477.998,73**	**194.473.628.698,82**	**24.035.849.299,91**	**12,36**
8					
9	**PENDAPATAN TRANSFER**				
10	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**				
11	Bagi Hasil	59.762.052.300,00	80.960.067.654,00	(21.198.015.354,00)	(26,18)
12	Dana Alokasi Umum	478.853.010.054,00	485.393.500.051,00	(6.540.489.997,00)	(1,35)
13	Dana Alokasi Khusus - Fisik	8.848.258.410,00	10.766.768.288,00	(1.918.509.878,00)	(17,82)
14	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	91.209.342.578,00	84.237.114.249,00	6.972.228.329,00	8,28
15	*Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (11 s.d 14)*	638.672.663.342,00	661.357.450.242,00	(22.684.786.900,00)	(3,43)
16	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**				
17	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-
18	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
19	Dana Keistimewaan	-	-	-	-

No.	Uraian	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
20	Dana Desa	-	-	-	-
21	Dana Insentif Fiskal	20.586.869.000,00	15.976.321.000,00	4.610.548.000,00	-
22	*Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (17 s.d 21)*	20.586.869.000,00	15.976.321.000,00	4.610.548.000,00	28,86
23	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**				
24	Pendapatan Bagi Hasil	40.858.291.815,00	61.977.343.754,00	(21.119.051.939,00)	(34,08)
25	Bantuan Keuangan	1.666.032.500,00	3.971.626.000,00	(2.305.593.500,00)	(58,05)
26	*Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (24 s.d 25)*	42.524.324.315,00	65.948.969.754,00	(23.424.645.439,00)	(35,52)
27	**JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (15 + 22 + 26)**	**701.783.856.657,00**	**743.282.740.996,00**	**(41.498.884.339,00)**	(5,58)
28					
29	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**				
30	Pendapatan Hibah - LO	51.347.265.824,11	11.266.690.519,50	40.080.575.304,61	355,74
31	Pendapatan Dana Darurat - LO	-	-	-	-
32	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	10.777.416.768,00	(10.777.416.768,00)	(100,00)
33	**JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH (30 s.d 32)**	**51.347.265.824,11**	**22.044.107.287,50**	**29.303.158.536,61**	**132,93**
34	**JUMLAH PENDAPATAN (7 + 27+ 33)**	**971.640.600.479,84**	**959.800.476.982,32**	**11.840.123.497,52**	**1,23**
35					
36	**BEBAN**				
37	**BEBAN OPERASI**				
38	Beban Pegawai	471.605.712.348,00	475.497.347.943,00	(3.891.635.595,00)	(0,82)
39	Beban Barang dan Jasa	286.754.146.394,84	347.045.862.133,99	(60.291.715.739,15)	(17,37)
40	Beban Bunga	-	-	-	-
41	Beban Subsidi	540.823.627,00	638.399.797,00	(97.576.170,00)	(15,28)
42	Beban Hibah	37.361.616.916,89	61.847.287.249,00	(24.485.670.332,11)	(39,59)
43	Beban Bantuan Sosial	447.746.725,00	235.972.000,00	211.774.725,00	-
44	Beban Penyisihan Piutang	2.203.344.840,25	2.219.208.425,00	(15.863.584,75)	(0,71)
45	Beban Lain-Lain	-	-	-	-
46	**BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI**				
47	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	47.650.288.680,32	50.627.260.955,50	(2.976.972.275,18)	(5,88)

No.	Uraian	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
48	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.615.916.201,64	16.231.191.204,91	1.384.724.996,73	-
49	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	98.326.431.494,63	101.325.728.955,00	(2.999.297.460,37)	(2,96)
50	Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya	8.370.833,34	40.576.816,00	(32.205.982,66)	(79,37)
51	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	280.049.531,42	297.465.102,25	(17.415.570,83)	-
52	**BEBAN TRANSFER**				
53	Beban Bagi Hasil	11.787.830.000,00	9.753.057.800,00	2.034.772.200,00	20,86
54	Beban Bantuan Keuangan	53.213.600.500,00	56.618.570.900,00	(3.404.970.400,00)	(6,01)
55	**JUMLAH BEBAN (38 s.d 54)**	**1.027.795.878.093,32**	**1.122.377.929.281,65**	**(94.582.051.188,33)**	**(8,43)**
56	**SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (34-55)**	**(56.155.277.613,48)**	**(162.577.452.299,33)**	**106.422.174.685,85**	**(65,46)**
57	**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**				
58	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	-	-	-	
59	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	
60	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	-	(39.285.000,00)	39.285.000,00	-
61	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
62	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(1.336.086.458,28)	(2.215.548.871,20)	879.462.412,92	-
63	**JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL(58 s.d 62)**	**(1.336.086.458,28)**	**(2.254.833.871,20)**	**918.747.412,92**	**-**
64	**SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (56 + 63)**	**(57.491.364.071,76)**	**(164.832.286.170,53)**	**107.340.922.098,77**	**(65,12)**
65					
66	**POS LUAR BIASA**				
67	Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	-
68	Beban Luar Biasa	-	-	-	-
69	**POS LUAR BIASA (67-68)**	-	-	-	-
70	**SURPLUS/DEFISIT- LO (64 + 69)**	**(57.491.364.071,76)**	**(164.832.286.170,53)**	**107.340.922.098,77**	**(65,12)**

BUPATI BELITUNG,

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	2.265.137.100.521,02	2.397.705.035.838,05
SURPLUS/DEFISIT-LO	(57.491.364.071,76)	(164.832.286.170,53)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Koreksi Ekuitas Lainnya	(122.432.555.963,24)	32.264.350.853,50
EKUITAS AKHIR	**2.085.213.180.486,02**	**2.265.137.100.521,02**

BUPATI BELITUNG

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

Lampiran V : Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No.	URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	**ASET**		
2	**ASET LANCAR**		
3	Kas di Kas Daerah	73.461.228.388,10	14.510.560.075,04
4	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
6	Kas di BLUD	21.680.027.005,16	22.477.704.910,66
7	Kas yang dibatasi penggunaannya	179.430.727,00	178.536.273,00
8	Kas di Bendahara JKN	-	221.461.131,00
9	Kas di Bendahara BOS	115.612.674,00	211.800.588,00
10	Setara Kas	-	60.000.000.000,00
11	Kas lainnya	-	-
12	Kas Dana BOK Puskesmas	584.451.809,00	1.603.135.798,00
13	Investasi Jangka Pendek	-	-
14	Piutang Pajak	*25.042.753.089,00*	*24.116.925.873,00*
15	*Penyisihan Piutang Pajak*	*(16.315.590.736,50)*	*(14.910.346.601,00)*
16	Piutang Pajak Netto	*8.727.162.352,50*	*9.206.579.272,00*
17	Piutang Retribusi	*19.763.128.348,00*	*15.901.432.340,00*
18	*Penyisihan Piutang Retribusi*	*(3.072.906.210,00)*	*(2.686.329.149,00)*
19	Piutang Retribusi Netto	*16.690.222.138,00*	*13.215.103.191,00*
20	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	*1.910.766.218,80*	*19.990.000,00*
21	*Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah*	*(1.505.947.116,05)*	*(19.990.000,00)*
22	Piutang Lainnya Netto	*404.819.102,75*	-

No.	URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
23	Piutang Transfer	*30.944.166.265,00*	-
24	*Penyisihan Piutang Transfer*	-	-
25	Piutang Transfer Netto	*30.944.166.265,00*	-
26	Bagian lancar tagihan penjualan angsuran	*19.990.000,00*	*15.067.479.618,00*
27	*Penyisihan Bagian lancar tagihan penjualan angsuran*	*(19.990.000,00)*	-
28	Bagian lancar tagihan penjualan angsuran Netto	-	15.067.479.618,00
29	Bagian lancar tuntutan ganti rugi	-	*856.704.401,80*
30	*Penyisihan Bagian lancar tuntutan ganti rugi*	-	*(793.163.401,80)*
31	Bagian lancar tuntutan ganti rugi Netto	-	*63.541.000,00*
32	Beban Dibayar Dimuka	17.688.773,97	27.885.580,84
33	Persediaan	26.706.284.784,82	24.296.991.685,15
34	**JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d 33)**	**179.511.094.020,30**	**161.080.779.122,69**
35	**INVESTASI JANGKA PANJANG**		
36	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
37	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	-	-
38	Investasi dalam Obligasi	-	-
39	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
40	Dana Bergulir	-	-
41	Deposito Jangka Panjang	-	-
42	Investasi Non Permanen Lainnya	-	-
43	*JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen (36 s.d 42)*	-	-
44	Investasi Jangka Panjang Permanen		
45	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	56.255.072.691,00	56.937.452.463,29
46	Investasi Permanen Lainnya	-	-
47	*JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen (45 s.d 46)*	*56.255.072.691,00*	*56.937.452.463,29*
48	**JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (43 + 47)**	**56.255.072.691,00**	**56.937.452.463,29**

No.	URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
49	**ASET TETAP**		
50	Tanah	383.491.117.462,64	370.676.122.840,53
51	Peralatan dan Mesin	734.764.018.545,72	720.367.617.851,82
52	Gedung dan Bangunan	793.514.762.654,07	785.386.635.067,07
53	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.220.982.321.608,24	2.175.527.297.933,24
54	Aset Tetap Lainnya	70.140.997.963,36	67.445.072.900,35
55	Konstruksi Dalam Pengerjaan	20.648.667.305,68	20.050.310.260,68
56	Akumulasi Penyusutan	(2.286.712.083.228,67)	(2.109.621.307.295,71)
57	*JUMLAH ASET TETAP (50 s.d 56)*	*1.936.829.802.311,04*	*2.029.831.749.557,98*
58	**DANA CADANGAN**		
59	Dana Cadangan	-	-
60	*JUMLAH DANA CADANGAN (59)*	-	-
61	**ASET LAINNYA**		
62	Tagihan Jangka Panjang	-	-
63	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.300.385.276,00	8.861.250.276,00
64	Aset Tidak Berwujud	*5.886.276.917,00*	*5.855.151.917,00*
65	*Amortisasi Aset Tak Berwujud*	*(5.531.606.307,19)*	*(5.489.127.812,50)*
66	Aset Tidak Berwujud Netto	354.670.609,81	366.024.104,50
67	Aset Lain-lain	47.888.109.757,68	41.756.965.860,58
68	*Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat*	(28.599.140.451,03)	(23.614.889.410,60)
69	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	225.005.000,00
70	*JUMLAH ASET LAINNYA (62 s.d 69)*	*20.944.025.192,46*	*27.594.355.830,48*
71	**PROPERTI INVESTASI**		
72	Properti investasi Tanah	3.575.471.000,00	3.575.471.000,00
73	*JUMLAH PROPERTI INVESTASI (72)*	*3.575.471.000,00*	*3.575.471.000,00*
74	**JUMLAH ASET (34 + 48 + 57 + 60 + 70+73)**	**2.197.115.465.214,80**	**2.279.019.807.974,44**

No.	URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
75	**KEWAJIBAN**		
76	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**		
77	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	179.430.727,00	178.536.273,00
78	Utang Bunga	-	-
79	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
80	Pendapatan Diterima Dimuka	935.699.527,78	1.088.438.935,42
81	Utang Belanja	12.191.592.474,00	12.615.732.245,00
82	Utang Jangka Pendek Lainnya	98.595.562.000,00	-
83	Utang Pajak	-	-
84	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (77 s.d 83)	111.902.284.728,78	13.882.707.453,42
85	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**		
86	Utang Dalam Negeri	-	-
87	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
88	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (86 s.d 87)	-	-
89	**JUMLAH KEWAJIBAN (84 + 88)**	**111.902.284.728,78**	**13.882.707.453,42**
90	**EKUITAS**		
91	EKUITAS	2.085.213.180.486,02	2.265.137.100.521,02
92	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (89 + 91)**	**2.197.115.465.214,80**	**2.279.019.807.974,44**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPATI BELITUNG

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK YAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
METODE LANGSUNG

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**		
2	**Arus Masuk Kas**		
3	Penerimaan Pajak Daerah	104.082.515.970,00	95.733.329.497,25
4	Penerimaan Retribusi Daerah	92.848.376.288,50	28.328.429.252,00
5	Penerimaan Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.886.428.412,02	5.566.654.063,95
6	Penerimaan Lain-lain PAD Yang sah	11.559.039.274,57	54.319.752.323,13
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil	38.705.944.300,00	80.735.062.654,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	478.853.010.054,00	485.393.500.051,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik	8.848.258.410,00	10.766.768.288,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	10.598.402.698,00	47.359.587.685,00
11	Penerimaan Dana Insentif Fiskal	20.586.869.000,00	15.976.321.000,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	46.262.718.168,00	59.001.661.334,00
13	Penerimaan Pendapatan Bantuan Keuangan	1.666.032.500,00	3.971.626.000,00
14	Penerimaan Pendapatan Hibah	-	-
15	Penerimaan Pendapatan Dana Darurat	-	-
16	Penerimaan Lainnya	-	-
17	**Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 16)**	818.897.595.075,09	887.152.692.148,33
18	**Arus Keluar Kas**		

No	Uraian	2025	2024
19	Pembayaran Pegawai	427.711.386.764,00	475.592.481.642,00
20	Pembayaran Barang	280.031.499.855,53	328.060.841.961,78
21	Pembayaran Subsidi	540.823.627,00	638.399.797,00
22	Pembayaran Hibah	16.237.928.030,00	41.600.053.850,00
23	Pembayaran Bantuan Sosial	447.746.725,00	235.972.000,00
24	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	11.787.830.000,00	9.753.057.800,00
25	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	53.213.600.500,00	56.618.570.900,00
26	Pembayaran Tak terduga	-	-
27	**Jumlah Arus Keluar Kas (19 s.d 26)**	**789.970.815.501,53**	**912.499.377.950,78**
28	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (17 - 27)**	**28.926.779.573,56**	**(25.346.685.802,45)**
29	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**		
30	**Arus Masuk Kas**	**-**	**-**
31	Pencairan Dana Cadangan	-	-
32	Penjualan atas Tanah	-	-
33	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	113.125.800,00	-
34	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
35	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
36	Penjualan atas Tanah	-	-
37	Penjualan Aset Tetap	-	-
38	Penjualan Aset Lainnya	-	1.084.877.500,00
39	**Jumlah Arus Masuk Kas (31 s.d 38)**	**113.125.800,00**	**1.084.877.500,00**
40	**Arus Keluar Kas**		
41	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
42	Perolehan Tanah	491.325.000,00	4.135.660.290,00
43	Perolehan Peralatan dan Mesin	11.224.534.843,00	22.585.890.296,00
44	Perolehan Gedung dan Bangunan	9.112.758.960,00	18.418.277.038,62
45	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.996.019.657,00	14.696.115.290,00

No	Uraian	2025	2024
46	Perolehan Aset Tetap Lainnya	9.435.000,00	62.000.000,00
47	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	38.895.000,00	164.983.850,00
48	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	3.000.000.000,00
49	**Jumlah Arus Keluar Kas (41 s.d 48)**	31.872.968.460,00	63.062.926.764,62
50	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (39 - 49)**	**(31.759.842.660,00)**	**(61.978.049.264,62)**
51	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**		
52	**Arus Masuk Kas**		
53	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
54	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
55	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-
56	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
57	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
58	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
59	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
60	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
61	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
62	**Jumlah Arus Masuk Kas (53 s.d 61)**	-	-
63	**Arus Keluar Kas**		
64	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
65	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
66	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
67	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
68	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
69	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
70	**Jumlah Arus Keluar Kas (64 s.d 69)**	**-**	**-**
71	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (62 - 70)**	**-**	**-**
72	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**		
73	**Arus Masuk Kas**		

No	Uraian	2025	2024
74	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	**52.804.641.890,00**	**43.905.049.808,00**
75	Penerimaan Pengembalian Belanja tahun berjalan	3.762.632.629,00	2.901.350.952,00
76	Penerimaan Pengembalian Belanja Dana BOS/BOP	-	-
77	Penerimaan Sisa kas Bendahara penerimaan tahun lalu	-	-
78	**Jumlah Arus Masuk Kas (74 s.d 77)**	**56.567.274.519,00**	**46.806.400.760,00**
79	**Arus Keluar Kas**		
80	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	52.804.641.890,00	43.905.049.808,00
81	Pengeluaran Pengembalian Pendapatan	-	173.806.600,00
82	Pemberian Uang Persediaan	2.998.040.266,00	2.526.513.811,00
83	**Jumlah Arus Keluar Kas (80 s.d 82)**	**55.802.682.156,00**	**46.605.370.219,00**
84	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (78 - 83)**	**764.592.363,00**	**201.030.541,00**
85	**Kenaikan/Penurunan Kas (28 + 50 + 71 + 84)**	**(2.068.470.723,44)**	**(87.123.704.526,07)**
86	**Saldo Awal Kas BUD**	**97.209.726.116,70**	**184.111.969.511,77**
87	**Saldo Akhir Kas BUD**	**95.141.255.393,26**	**96.988.264.985,70**
88	- Kas di Kas Daerah	**73.461.228.388,10**	**74.510.560.075,04**
89	- Kas di Badan Layanan Umum Daerah	21.680.027.005,16	22.477.704.910,66
90	**Kas Bendahara Pengeluaran**	-	-
91	**Kas Bendahara Penerimaan**	-	-
92	**Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN**	-	**221.461.131,00**
93	**Kas di Bendahara Pengeluran BOS**	**115.612.674,00**	**211.800.588,00**
	Kas di Bendahara Dana BOK	**584.451.809,00**	**1.603.135.798,00**
94	**Kas lainnya**	-	-
95	**Saldo Akhir Kas**	**95.841.319.876,26**	**99.024.662.502,70**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPATI BELITUNG,

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

Lampiran VII : Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

KABUPATEN BELITUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I		**Pendahuluan**
	1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
	1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
	1.3	Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
BAB II		**Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**
	2.1	Keadaan Umum
	2.2	Ekonomi Makro
	2.3	Kebijakan Keuangan
	2.4	Pencapaian Target Kinerja APBD
	2.5	Permasalahan atas Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021
BAB III		**Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**
	3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
	3.2	Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
BAB IV		**KebijakanAkuntansi**
	4.1	Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keaungan Daerah
	4.2	Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	4.3	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pemerintah Daerah
BAB V		**Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan**
	5.1	Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
	5.1.1	Pendapatan - LRA
	5.1.2	Belanja
	5.1.3	Pembiayaan
	5.2	Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
	5.3	Pos-pos Neraca
	5.3.1	Aset
	5.3.2	Kewajiban
	5.3.3	Ekuitas
	5.4	Pos-pos Laporan Operasional
	5.4.1	Pendapatan - LO
	5.4.2	Beban
	5.5	Laporan Arus Kas
	5.5.1	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
	5.5.2	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

	5.5.3	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan
	5.5.4	Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris
	5.6	Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
		Informasi Tambahan
BAB VI		**Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan**
BAB VII		**Penutup**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan satuan kerja dan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung khususnya selaku entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Adapun informasi yang disajikan antara lain informasi tentang posisi keuangan pada satuan kerja/instansi dan pemerintah daerah mengenai aset, utang/kewajiban, dan ekuitas dana serta pendapatan dan belanja pada periode pelaporan.

Dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini diharapkan dapat berguna untuk kepentingan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas, sebagai instrumen pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada publik;
2. Manajerial, membantu dalam pelaksanaan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana bagi pengguna;
3. Transparansi, memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan ini didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung nomor 35);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembar Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembar Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 17);
20. Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 39);
21. Peraturan Bupati Belitung Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 26);C
22. Peraturan Bupati Belitung Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 Nomor 68).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam catatan atas laporan keuangan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
Bab ini memuat informasi tentang keadaan umum Kabupaten Belitung, ekonomi makro, kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2025, pendekatan penyusunan laporan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD.

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
Bab ini menjelaskan tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi
Bab ini memuat informasi tentang entitas akuntansi/ entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan daerah, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan daerah dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari pos Pendapatan-LRA, Belanja, Pembiayaan, Perubahan SAL, Aset, Kewajiban, Pendapatan –LO, Beban, Ekuitas dan komponen-komponen Laporan Arus Kas.

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non-Keuangan
Bab ini berisikan penjelasan mengenai susunan perangkat daerah dan pemimpin lembaga eksekutif dan legislatif.

Bab VII Penutup
Bab ini memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

2.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Belitung secara geografis terletak antara 107°08' BT sampai 107°58' BT dan 02°30' LS sampai 03°15' LS dengan luas daratan seluruhnya 229.369 ha. Kabupaten Belitung merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari sekitar seratus buah pulau besar dan kecil. Pulau yang terbesar adalah Pulau Belitung. Disamping itu, masih ada pulau besar lainnya, seperti : Pulau Seliu, Pulau Mendanau, dan Pulau Nadu.

Pada peta dunia Pulau Belitung dikenal dengan nama BILLITONIT yang bergaris tengah Timur-Barat + 79 km dan garis tengah Utara-Selatan + 77 km. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Gaspar.

Daerah yang paling tinggi di Kabupaten Belitung hanya mempunyai ketinggian kurang lebih 500 m dari atas permukaan laut dengan puncak tertinggi ada di daerah Gunung Tajam. Sedangkan daerah hilir (pantai) terdiri atas beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yakni:

1. Sebelah Utara oleh DAS Buding
2. Sebelah Selatan oleh DAS Pala dan Kembiri, dan
3. Sebelah Barat oleh DAS Brang dan Cerucuk.

Keadaan tanah di Kabupaten Belitung pada umumnya didominasi oleh kuarsa dan pasir, batuan aluvial dan batuan granit. Menurut letaknya, batuan kuarsa dan pasir tersebar secara merata di seluruh wilayah kecamatan dengan luas mencapai 266.865 ha atau 56,98 persen dari luas Kabupaten Belitung. Untuk batuan aluvial dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah kecamatan, kecuali Kecamatan Selat Nasik dengan luas total seluruhnya mencapai 133,5 km2 atau 5,82 persen dari luas Kabupaten Belitung .

Kabupaten Belitung dengan ibu kota kabupaten di Tanjungpandan merupakan wilayah pengembangan sektor perdagangan dan jasa, pertanian, pariwisata, industri pengolahan dan perikanan laut. Hingga saat ini, Kabupaten Belitung terdiri dari 42 buah desa dan 7 Kelurahan yang tersebar di lima kecamatan yaitu Kecamatan Membalong, Tanjungpandan, Sijuk, Badau dan Selat Nasik.

Tabel 1 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2025

Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Persentase
Kecamatan Membalong	941,11	41,47
Kecamatan Tanjungpandan	181,48	8,00
Kecamatan Badau	496,25	21,87
Kecamatan Sijuk	480,00	21,15
Kecamatan Selat Nasik	170,52	7,51
Jumlah	2.269,36	100,00

Sumber : Belitung Dalam Angka 2025

Terbentuknya Kabupaten Belitung adalah berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi /PDRB

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil disuatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian disuatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah bruto barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi berdasarkan harga pada setiap tahun. Sementara itu PDRB atas dasar harga konstan berdasarkan harga pada tahun dasar, dalam hal ini tahun 2010.

Bila dilihat berdasarkan lapangan usaha, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kabupaten Belitung tahun 2025 ditopang oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan. Kedua kategori lapangan usaha ini memberikan kontribusi masing-masing sebesar 27,10 persen dan 12,67 persen.

Tabel 2 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung, 2023-2025

No.	Uraian	2023	2024	2025
1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)	13.504,09	14.124,70	15.243,01
2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)	7.500,36	7.638,90	7.948,69
3.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,74	1,85	4,06

Sumber : Belitung Dalam Angka 2026

Berdasarkan data Belitung Dalam Angka Tahun 2025, PDRB ADHB Kabupaten Belitung tahun 2025 adalah 15.243,01 miliar rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang nilainya 14.124,70 miliar rupiah. Demikian juga dengan PDRB ADHK juga mengalami peningkatan dari 7.638,90, miliar rupiah di tahun 2024, menjadi 7.948,69. miliar rupiah di tahun 2025.

Setelah mengalami kontraksi ekonomi pada 2020, perekonomian Kabupaten Belitung kembali mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2025 perekonomian Kabupaten Belitung mengalami pertumbuhan tertinggi dalam 5 tahun terakhir, yaitu mencapai 4,06 persen. Pertumbuhan tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi ketiga se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.1.3 Inflasi

Indikator ekonomi makro yang penting untuk mengetahui pertumbuhan riil ekonomi adalah tingkat inflasi. Artinya, tingkat pertumbuhan ekonomi semestinya masih lebih besar dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan inflasinya. Apabila pertumbuhan ekonomi lebih kecil dari inflasi, maka secara nominal masyarakat meningkat pendapatan perkapitanya, namun secara riil tidak mengalami peningkatan kesejahteraan, karena harga-harga barang pokok mengalami kenaikan di atas kenaikan pendapatan.

Dalam perekonomian, faktor harga sangat menentukan bagi dunia bisnis maupun konsumen. Daya beli masyarakat dapat dipengaruhi oleh perubahan indeks harga konsumen/ inflasi. Inflasi yang tinggi akan membatasi gerak investor dan akan mengurangi daya beli masyarakat, sebaliknya bila tingkat inflasi rendah akan merangsang dunia usaha untuk melakukan investasi.

Inflasi Kota Tanjungpandan sebesar 1,44 persen pada tahun 2025, lebih rendah dari pada tahun sebelumnya, yakni sebesar 1,68 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi terbesar tahun 2025 adalah makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,68 persen

Tabel 3 Laju Inflasi Tahunan Kota Tanjungpandan, 2023-2025

Tahun	Inflasi
2023	3,80
2024	1,68
2025	1,44

Sumber : Belitung Dalam Angka 2025.

2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Belitung tahun 2025 sebesar 69,18 persen artinya sebesar 69,18 persen penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Adapun tingkat pengangguran terbuka untuk Kabupaten Belitung tahun 2025 sebesar 3,64 persen artinya dari 1000 penduduk yang termasuk angkatan kerja, secara rata-rata 36 orang diantaranya merupakan pencari kerja.

Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
2023	4,14	68,09
2024	3,88	68,18
2025	3,64	69,18

Sumber: Belitung Dalam Angka 2025

2.1.5 Kemiskinan

Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang rata-rata pengeluarannya di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin yang menurun tidak selalu berarti jumlah penduduk miskin juga menurun.

Tabel 5 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Belitung, 2023-2025

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin terhadap Total Penduduk (%)
2023	12,51	6,46
2024	11,97	6,11
2025	12,76	6,44

Sumber : Belitung Dalam Angka 2025.

Dari tabel diatas menunjukkan penduduk miskin di Kabupaten Belitung pada tahun 2023 sebesar 12,51 ribu jiwa mengalami penurunan sebesar 0,54 ribu jiwa menjadi 11,97 ribu jiwa pada tahun 2024 dan pada tahun 2025 naik menjadi 12,76 ribu jiwa.

2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belitung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Belitung tersebut mengindikasikan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang. Perkembangan IPM Kabupaten Belitung dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia
2023	74,49
2024	74,96
2025	75,29

Sumber: Belitung Dalam Angka 2025

Dari tabel diatas menunjukkan IPM Kabupaten Belitung terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa angka IPM yang naik menandakan pembangunan manusia di Kabupaten Belitung mengalami kemajuan menuju ke arah yang lebih baik. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2025 sebesar 75,29 mengalami peningkatan sebesar 0,33 point dari tahun 2024 sebesar 74,96.

2.1.7 Gini Ratio

Gini ratio merupakan indikator yang menunjukkan ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai ratio gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai ratio gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang tinggi. Ratio gini yang bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan uang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan apabila ratio gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan

sempurna yang artinya satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa.

Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Di Kabupaten Belitung tahun 2025 rasio gini adalah sebesar 0,205 yang artinya turun sebesar 0,043 poin dibandingkan tahun 2024 rasio gini yang bernilai 0,248.

Tabel 7 Gini Ratio

Tahun	Gini Ratio
2023	0,253
2024	0,248
2025	0,205

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung

2.2 Kebijakan Keuangan

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang- undangan.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Belitung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Pemerintah Kabupaten Belitung sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Sebagaimana arahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2025, maka pemenuhan belanja pelayanan dasar dan pemenuhan standar pelayanan minimal tentunya menjadi prioritas utama dalam skema belanja daerah. Disamping itu program prioritas atau inovatif guna implementasi pencapaian visi dan misi kepala daerah juga menjadi prioritas serta pemulihan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah.

Pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2025 merupakan implementasi arah dan prioritas pembangunan yang digariskan dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 juga menjadi prioritas dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan sumber utama bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Struktur pendapatan Kabupaten Belitung Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
2. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

3. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan).
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Kebijakan Perencanaan pendapatan daerah mengacu kepada dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029, maka arah kebijakan perencanaan daerah difokuskan kepada peningkatan pengelolaan penerimaan pendapatan daerah.

Secara umum, daerah mengupayakan pencapaian target pendapatan daerah melalui :

A. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui :
   1. Optimalisasi pungutan pajak yang terdiri dari :
      a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
      b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
      c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), terdiri dari :
         1. Makanan dan/atau Minuman;
         2. Tenaga Listrik;
         3. Jasa Perhotelan;
         4. Jasa Parkir; dan
         5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
      d. Pajak Reklame;
      e. Pajak Air Tanah;
      f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
      g. Pajak Sarang Burung Walet;
      h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) ; dan
      i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB)
   2. Optimalisasi pungutan retribusi daerah terdiri dari :
      a. Retribusi jasa umum;
      b. Retribusi jasa usaha;
      c. Retribusi perizinan tertentu.
   3. Peningkatan kesadaran para wajib pajak/retribusi daerah akan kewajibannya melalui penerapan sanksi dan insentif;
   4. Pelaksanaan rangkaian pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam proses pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
   5. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan serta pendayagunaan kekayaan/aset daerah.
   6. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen dan tata kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah secara profesional dan sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta berbasis Teknologi Informasi (TI);
   7. Evaluasi kebijakan dan ketetapan yang tertuang dalam produk-produk hukum daerah tentang pajak dan retribusi daerah dalam rangka penyempurnaan peningkatan pendapatan asli daerah.

B. Optimalisasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah khususnya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah dalam mendukung perekonomian daerah memiliki fungsi yang sangat penting karena mampu mempengaruhi tingkat konsumsi yang dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Belitung. Oleh karena itu harapan agar kebijakan daerah menggunakan sumber-sumber produksi dalam negeri diharapkan mampu menggerakkan potensi ekonomi produktif dan mampu memperkokoh perekonomian daerah bahkan nasional.

Pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dilaksanakan dalam upaya pencapaian fokus belanja daerah yang meliputi :

1. Pembiayaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan publik akan pelayanan yang berkualitas melalui pembiayaan belanja tidak langsung;
2. Pembiayaan belanja pembangunan yang berorientasi kepada penyelesaian berbagai permasalahan daerah dan kemampuan untuk memberikan jaminan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik berupa 1) penyediaan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan; 2) penyediaan fasilitas sosial dan umum; 3) penyediaan infrastruktur sosial ekonomi kemasyarakatan; 4) dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan khusus yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi; dan 5) pemulihan ekonomi lokal dan daya saing ekonomi berbasis kesejahteraan masyarakat; melalui pembiayaan belanja langsung yang diimplementasikan kepada pembiayaan program prioritas daerah dan program pendukung program prioritas daerah;
3. Pembiayaan belanja daerah berbasis disiplin anggaran, efisiensi, efektivitas, akuntabel, transparan dan berkelanjutan.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah tersusun dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari 1) sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; 2) pencairan dana cadangan; 3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4) penerimaan pinjaman daerah; 5) penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan 6) penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari 1) pembentukan dana cadangan; 2) penyertaan modal (investasi) daerah; 3) pembayaran pokok hutang; dan 4) pemberian pinjaman daerah. Daerah mengarahkan kebijakan pembiayaan daerah kepada penanggulangan dan penyehatan defisit yang terjadi pada anggaran.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah adalah optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah melalui efisiensi dan efektivitas penggunaan dana sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang berorientasi kepada pembiayaan kebutuhan riil belanja daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah adalah minimalisasi pengeluaran pembiayaan daerah melalui efisiensi dan efektivitas di dalam penyertaan modal yang didasarkan atas pendekatan analisa ekonomi dan kebutuhan daerah.

Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada, serta kebutuhan pembangunan daerah, maka arah kebijakan pembiayaan Kabupaten Belitung antara lain sebagai berikut:

1. Menciptakan pembiayaan anggaran yang *less risky* dan relatif tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah;
2. Skenario penanggulangan defisit, sebagai konsekuensi dari proyeksi kemampuan pendapatan yang lebih rendah daripada rencana kebutuhan belanja, sebagai berikut:
   a. Melakukan penajaman kembali kebutuhan belanja program/kegiatan pembangunan, dengan memperhatikan prioritas penanganan masalah dan pemanfaatan peluang;
   b. Menyesuaikan kebutuhan input (sumber daya) program/kegiatan dengan output dan outcome yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan;
   c. Melakukan upaya-upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Kabupaten Belitung tahun anggaran 2025 merupakan pedoman bagi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun usulan program, kegiatan dan anggaran tahun 2025.

Kebijakan umum tersebut disusun sesuai dengan kebijakan yang tertuang pada dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2025 serta mempertimbangkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029. Komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian pada setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran diharapkan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan Tema Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2025 yaitu ”Peningkatan Perekonomian yang Inklusif melalui Penguatan Daya Saing dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan” memedomani RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029, serta memperhatikan prioritas pembangunan pusat dan provinsi Tahun 2025, ditetapkan prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penguatan perekonomian.
   Dengan sasaran adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menurunnya kemiskinan penduduk.
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
   Dengan sasaran adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.
3. Peningkatan infrastruktur.
   Dengan sasaran adalah meningkatnya infrastruktur kewilayahan.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
   Dengan sasaran adalah meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan.
5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.
   Dengan sasaran adalah terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel, dan terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional.

Secara rinci penjelasan tentang rencana kerja pemerintah daerah tertuang di dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025.

Dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Belitung telah merumuskan tujuan strategis yang berkaitan dengan aspek keuangan daerah yaitu meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Dari tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam dua sasaran strategis, yaitu meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan terwujudnya efisiensi biaya dalam APBD.

Pengukuran Capaian Kinerja Keuangan dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja tujuan/sasaran, yaitu dilakukan dengan membandingkan perkembangan dan peningkatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp940.590.481.222,00** dengan realisasi sebesar **Rp940.242.247.555,09** atau mencapai **99,96%**. Capaian realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 lebih rendah sebesar **Rp37.127.857.095,24** dari Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp977.370.104.650,33** atau turun sebesar **3,80%**.

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar **Rp202.354.324.639,00** dengan realisasi sebesar **Rp213.489.485.745,09** atau **105,50%**. Sedangkan Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar **Rp738.236.156.583,00** dengan realisasi sebesar **Rp726.752.761.810,00** atau **98,44%**. Dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak ada alokasi anggaran pada tahun 2025.

Belanja Daerah

Pencapaian target kinerja Belanja APBD dapat dicermati melalui optimalisasi capaian kinerja program. Berdasarkan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025. Belanja Daerah dianggarkan sebesar **Rp1.039.613.857.103,70** dengan realisasi sebesar **Rp943.425.590.181,53** atau **90,75%**.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 berasal dari Belanja Operasi yang dianggarkan sebesar **Rp888.104.600.616,70** dengan realisasi sebesar **Rp798.966.103.189,53** atau **89,96%**,

Belanja Modal dianggarkan sebesar **Rp43.619.973.682,00** dengan realisasi sebesar **Rp 38.837.469.692,00** atau **89,04%**, Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar **Rp 1.250.000.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp0,00** atau **0,00%** dan Belanja Transfer dianggarkan sebesar **Rp106.339.282.805,00** dengan realisasi sebesar **Rp 105.622.017.300,00** atau **99,05%**.

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar **Rp99.023.375.881,70** dengan realisasi sebesar **Rp99.023.375.881,70** atau **100,00%**. Rincian realisasi pembiayaan netto adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

   Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar **Rp99.023.375.881,70** dengan realisasi sebesar **Rp99.023.375.881,70** atau **100%.** Penerimaan Pembiayaan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar **Rp182.632.032.036,77**.
2. Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2025 tidak dianggarkan.

Pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung pada tahun anggaran 2025, alokasi belanja daerah yang terbesar adalah untuk menunjang pelaksanaan urusan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp278.641.618.532,66** atau **26,80%** dari total anggaran belanja daerah yang digunakan untuk mendanai program dan kegiatan tahun anggaran 2025. Sedangkan urusan Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp238.876.414.117,00** atau **22,98%**, urusan keuangan alokasi anggaran sebesar **Rp131.652.911.314,00** atau **12,66%**. Untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang alokasi anggaran sebesar **Rp56.992.906.044,04** atau **5,48%**. Berikut adalah gambaran secara rinci alokasi Belanja daerah untuk setiap urusan :

Tabel 8 Alokasi Belanja Daerah per Urusan Tahun Anggaran 2025

No	Urusan	Jumlah Program	ANGGARAN	REALISASI
I	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**		**601.534.237.526,70**	**546.280.826.142,00**
1	Pendidikan	3	238.876.414.117,00	221.530.296.917,00
2	Kesehatan	5	278.641.618.532,66	247.910.211.799,00
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	48.296.663.592,04	43.867.435.937,00
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	4	8.696.242.452,00	8.413.618.081,00
5	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	4	18.522.862.399,00	17.074.040.457,00
6	Sosial	7	8.500.436.434,00	7.485.222.951,00
II	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**		**107.110.962.464,00**	**96.390.432.749,68**
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	1.068.325.655,00	868.085.744,00
2	Pangan	3	417.962.667,00	350.058.883,68
3	Tenaga Kerja	2	366.029.053,00	355.169.440,00
4	Pertanahan	1	23.322.800,00	21.335.881,00
5	Lingkungan Hidup	10	16.499.628.266,00	15.817.382.918,00
6	Administrasi Kependudukan dan Capil	5	5.518.829.571,00	4.999.349.540,00
7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	3	7.949.075.660,00	6.740.369.358,00
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	4.336.544.280,00	3.678.843.623,00
9	Perhubungan	3	25.441.754.047,00	23.136.306.304,00
10	Komunikasi dan Informatika	3	8.926.852.860,00	7.821.270.461,00
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4	8.977.171.645,00	7.249.227.382,00
12	Penanaman Modal	5	5.805.468.690,00	5.182.666.336,00
13	Kepemudaan dan Olahraga	4	9.769.055.105,00	9.001.808.871,00
14	Statistik	1	257.315.367,00	250.665.200,00
15	Persandian	1	262.360.709,00	205.052.802,00
16	Kebudayaan	3	4.998.738.397,00	4.436.016.141,00
17	Perpustakaan	2	6.412.157.594,00	6.199.418.071,00
18	Kearsipan	1	80.370.098,00	77.405.794,00
III	**Urusan Pilihan**		**44.261.751.498,00**	**38.434.622.159,64**
1	Kelautan dan Perikanan	5	10.016.566.106,00	8.855.314.129,99
2	Pariwisata	4	13.864.253.138,00	11.771.444.546,00
3	Pertanian	7	18.113.018.254,00	16.018.397.137,65
4	Perdagangan	3	1.545.456.820,00	1.196.830.546,00
5	Perindustrian	1	699.627.512,00	573.537.829,00
6	Kehutanan	1	22.829.668,00	19.097.971,00

No	Urusan	Jumlah Program	ANGGARAN	REALISASI
IV	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**		**286.706.905.615,00**	**262.319.709.130,21**
1	Administrasi Pemerintahan	10	48.448.702.762,00	43.416.106.981,00
2	Pengawasan	3	11.385.275.163,00	10.113.194.498,00
3	Perencanaan	3	10.290.562.642,00	9.767.473.853,90
4	Keuangan	4	131.652.911.314,00	124.297.612.235,00
5	Kepegawaian	2	9.169.918.911,00	8.058.359.008,00
6	Pendidikan dan Pelatihan	1	1.063.504.883,00	712.536.794,00
7	Penelitian dan Pengembangan	1	105.077.307,00	69.746.706,00
8	Sekretariat DPRD	2	35.922.778.540,00	32.053.866.789,00
9	Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan	4	30.489.961.852,00	26.203.666.180,31
10	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	8.178.212.241,00	7.627.146.085,00
	Jumlah	**150**	**1.039.613.857.103,70**	**943.425.590.181,53**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi gedung (kantor, gedung sekolah, puskesmas), pengadaan buku pelajaran dan kepustakaan, tersedianya meubelair, peralatan kantor untuk menunjang kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat, terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jalan dan jembatan, saluran drainase, peralatan kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Penjelasan secara rinci mengenai hasil pencapaian dari kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dapat ditemui pada laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Belitung tahun 2025.

2.4 Permasalahan atas Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Belitung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah APBD TA. 2025 Nomor 14 Tahun 2024 tanggal 27 Desember 2024 telah ditetapkan Anggaran Pendapatan Kabupaten Belitung sebesar **Rp953.887.632.449,00** dan Anggaran Belanja TA. 2025 sebesar **Rp1.068.887.632.449,00.** APBD Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kabupaten Belitung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 1 September 2025. Dalam APBD-P TA 2025, telah ditetapkan Anggaran Pendapatan Kabupaten Belitung sebesar **Rp940.590.481.222,00 atau berkurang sebesar Rp13.297.151.227,00 atau 1,41% dan Anggaran Belanja sebesar Rp1.039.613.857.103,70 atau berkurang sebesar Rp29.273.775.345,30 atau 2,82%.**

Tabel 9 Permasalahan atas Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 (Belanja Daerah) Secara Umum

Uraian	Plafon Anggaran (Rupiah)			Penyebab Perubahan
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	513.381.192.309,00	529.950.395.509,00	16.569.203.200,00	
Belanja Barang dan Jasa	365.254.229.032,00	335.543.976.031,70	(29.710.253.000,30)	Penyesuaian belanja daerah terkait Penyesuaian pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta Peningkatan Pendapatan daerah
Belanja Subsidi	778.200.000,00	648.688.228,00	(129.511.772,00)	Penyesuaian belanja subsidi terkait subsidi bunga pinjaman bagi KUKM
Balanja Hibah	19.945.815.530,00	21.495.325.230,00	1.549.509.700,00	penyesuaian belanja hibah BOS Pada Dindikbud
Belanja Bantuan Sosial	230.653.118,00	466.215.618,00	235.562.500,00	penyesuaian dari penerimaan pendapatan Insentif Fiskal Daerah
BELANJA MODAL				

Uraian	Plafon Anggaran (Rupiah)			Penyebab Perubahan
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Modal Tanah	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Penyesuaian belanja daerah terkait Penyesuaian pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta Peningkatan Pendapatan daerah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.976.486.026,00	17.118.173.570,00	(858.312.456,00)	Penyesuaian belanja daerah terkait Penyesuaian pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta Peningkatan Pendapatan daerah
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.913.757.934,00	11.732.488.800,00	(16.181.269.134,00)	Penyesuaian belanja daerah terkait Penyesuaian pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta Peningkatan Pendapatan daerah
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.998.703.180,00	11.192.587.965,00	2.193.884.785,00	Penyesuaian belanja daerah terkait Penyesuaian pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta Peningkatan Pendapatan daerah
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.212.864.320,00	3.037.603.347,00	(2.175.260.973,00)	Penyesuaian belanja daerah terkait Penyesuaian pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta Peningkatan Pendapatan daerah
Belanja Modal Aset Lainnya	56.140.000,00	39.120.000,00	(17.020.000,00)	Penyesuaian belanja daerah terkait penyesuaian belanja blud
Belanja Tak Terduga	2.000.000.000,00	1.250.000.000,00	(450.000.000,00)	Penyesuaian belanja terkait penyesuaian belanja daerah baik dana dari pemerintah pusat dan Provinsi dan adanya hibah untuk provinsi yg terdampak bencana
BELANJA TRANSFER				
Belanja Bagi Hasil	11.711.555.000,00	11.811.046.305,00	99.491.305,00	Penyesuaian belanja bagi hasil dikarenakan peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah
Belanja bantuan keuangan	95.428.036.000,00	94.828.236.500,00	(599.799.500,00)	Penyesuaian alokasi dana desa dari pemerintah pusat

Sumber: Laporan Keuangan OPD 2025 (diolah)

BAB III
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1 Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah APBD TA. 2025 Nomor 14 Tahun 2024 tanggal 27 Desember 2024 dan Perda Perubahan APBD Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 1 September 2025, Pemerintah Kabupaten Belitung telah menargetkan Pendapatan Daerah baik sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditunjang oleh sektor pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 Periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 menunjukkan pendapatan daerah sebesar **Rp940.242.247.555,09** atau **99,96%** dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar **Rp940.590.481.222,00**. Realisasi Pendapatan daerah sebesar **Rp940.242.247.555,09** tersebut terdiri dari :

- Pendapatan Asli Daerah	Rp	213.489.485.745,09
- Pendapatan Transfer	Rp	726.752.761.810,00
- Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah	Rp	940.242.247.555,09

Dari target pendapatan asli daerah sebesar **Rp202.354.324.639,00** terealisasi sebesar **Rp213.489.485.745,09** atau **105,50%.** Jika dibandingkan dengan TA 2024 terjadi kenaikan penerimaan PAD sebesar **Rp 28.456.443.108,76** di mana pada TA 2024 realisasi penerimaan PAD sebesar **Rp185.033.042.636,33** Lebih rinci dapat dilihat pada penjelasan pos-pos laporan realisasi anggaran.

Pada sektor pendapatan transfer dari target anggaran atas dana bagi hasil (DBH). DBH Pajak Bumi dan Bangunan ditargetkan sebesar **Rp12.091.252.000,00** terealisasi sebesar **Rp11.957.169.800,00** atau **98,89%,** DBH PPh Pasal 21 dari target sebesar **Rp7.591.287.000,00** terealisasi sebesar **Rp6.966.590.300,00** atau **91,77%,** DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN dari target sebesar **Rp312.678.000,00** terealisasi sebesar **Rp281.410.200,00** atau **90,00 %,** DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi dari target sebesar **Rp399.837.000,00** terealisasi sebesar **Rp399.837.000,00** atau **100%,** DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent dari target sebesar **Rp1.469.117.000,00** terealisasi sebesar **Rp1.539.146.000,00** atau **104,76%,** DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty dari target sebesar **Rp10.804.195.000,00** terealisasi sebesar **Rp10.804.195.000,00** atau **100%,** DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dari target sebesar **Rp243.373.000,00** terealisasi sebesar **Rp243.373.000,00** atau **100%,** DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan dari target sebesar **Rp2.726.950.000,00** terealisasi sebesar **Rp2.726.950.000,00** atau **100%.**

Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan wujud perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dari jumlah yang dialokasikan sebesar **Rp489.709.683.000,00** terealisasi sebesar **Rp478.853.010.054,00** atau **97,78%** sampai akhir tahun anggaran 2025. Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025 terdiri dari DAK Fisik Reguler yang dialokasikan pada bidang pendidikan, bidang kesehatan dan KB, bidang air minum. DAK Fisik pada Tahun 2025 dari target sebesar **Rp10.821.511.000,00** terealisasi **81,76%** yaitu sebesar **Rp8.848.258.410,00** Sedangkan DAK Non Fisik dialokasikan untuk BOS Reguler, BOS Kinerja, Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Tamsil Guru PNSD, BOP Pendidikan Kesetaraan, BOP Museum dan Taman Budaya, BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan, BOKB-KB, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, BOP PAUD Reguler, BOP PAUD Kinerja, BOK Kabupaten/Kota, BOK Puskesmas, Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah, Bantuan Operasional Penyuluh. DAK Non Fisik terealisasi sebesar **Rp91.209.342.578,00** atau **99,62%** dari target sebesar **Rp91.553.177.190,00**.

Transfer Dana Desa dari Pemerintah Pusat yang ditargetkan sebesar **Rp41.614.636.000,00** terealisasi sebesar **Rp40.620.586.800,00** atau **97,61%.**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang berasal dari Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya sebesar **Rp20.586.869.000,00** terealisasi sebesar **Rp20.586.869.000,00** atau **100%.**

Pendapatan transfer antar daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di mana pendapatan bagi hasil pajak provinsi ditargetkan sebesar **Rp42.743.036.393,00** dapat direalisasikan sebesar **Rp46.262.718.168,00** atau **108,23%.** Dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang ditargetkan sebesar **Rp1.781.282.000,00** dapat direalisasikan sebesar **Rp1.666.032.500,00** atau **93,52%.**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak terdapat alokasi anggaran pada tahun 2025. Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP dialokasikan pada objek Pendapatan BLUD yang bersumber dari Pelayanan Kesehatan,sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Kabupaten Belitung Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

3.1.2 Realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2025

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 Periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 menunjukkan realisasi belanja dan transfer daerah sebesar **Rp943.425.590.181,53** atau **90,75%** dari anggaran belanja sebesar **Rp1.039.613.857.103,70**. Realisasi belanja dan transfer daerah sebesar **Rp943.425.590.181,53** tersebut terdiri dari:

- Belanja Operasi	Rp	**798.966.103.189,53**
- Belanja Modal	Rp	**38.837.469.692,00**
- Belanja Tak Terduga	Rp	**0,00**
- Belanja Transfer	Rp	**105.622.017.300,00**
Jumlah	Rp	**943.425.590.181,53**

Belanja daerah pada TA 2025 tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja/prestasi kerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dari total anggaran belanja daerah sebesar **Rp1.039.613.857.103,70** direalisasikan sebesar **Rp943.425.590.181,53** berarti terjadi penghematan belanja sebesar **Rp117.553.170.623,87** atau **11,08%.** Penghematan tersebut terdapat pada belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai yang hanya terealisasi sebesar **Rp473.457.900.870,00** atau **89,34%** dari yang dianggarkan sebesar **Rp529.950.395.509,00**, belanja barang dan jasa terealisasi sebesar **Rp303.357.300.325,53** atau **90,40%** dari yang dianggarkan sebesar **Rp335.543.976.031,70** belanja subsidi terealisasi sebesar **Rp540.823.627,00** atau **83,37%** dari yang dianggarkan sebesar **Rp648.688.228,00**, belanja hibah terealisasi sebesar **Rp21.162.331.642,00** atau **98,45%** dari yang dianggarkan **Rp21.495.325.230,00,** belanja bantuan sosial terealisasi sebesar **Rp447.746.725,00** atau **96,04%** dari yang dianggarkan sebesar **Rp466.215.618,00**.

Dari belanja modal yang terdiri dari belanja modal tanah terealisasi sebesar **Rp491.325.000,00** atau **98,27%** dari anggaran sebesar **Rp500.000.000,00**, belanja modal peralatan mesin terealisasi sebesar **Rp15.344.503.359,00** atau **89,63%** dari anggaran sebesar **Rp17.118.173.570,00** , belanja modal gedung dan bangunan terealisasi sebesar **Rp8.954.328.979,00** atau **76,32%** dari anggaran sebesar **Rp11.732.488.800,00**, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan terealisasi sebesar **Rp10.996.019.657,00** atau **98,24%** dari anggaran sebesar **Rp11.192.587.965,00,** belanja modal aset tetap lainnya terealisasi sebesar **Rp3.012.397.697,00** atau **99,20%** dari anggaran sebesar **Rp 3.037.603.347,00** dan belanja modal aset lainnya terealisasi sebesar **Rp38.895.000,00** atau **99,42%** dari anggaran sebesar **Rp39.120.000,00**.

Belanja tak terduga dari anggaran sebesar **Rp1.250.000.000,00** dan tidak terealisasi sampai akhir tahun anggaran 2025.

Dari belanja transfer yang terdiri dari belanja bagi hasil terealisasi sebesar **Rp11.787.830.000,00** atau **99,80%** dan belanja bantuan keuangan kepada desa terealisasi sebesar **Rp93.834.187.300,00** atau **98,95%** dari anggaran sebesar **Rp94.528.236.500,00.**

3.1.3 Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2025

Rincian pembiayaan periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Rincian Pembiayaan periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
Penerimaan Pembiayaan			
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	99.023.375.881,70	99.023.375.881,70	100,00
Pengeluaran Pembiayaan			
Penyertaan Modal Daerah			
Pembiayaan Netto	99.023.375.881,70	99.023.375.881,70	100,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

3.1.4 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 secara keseluruhan mencapai **105,50%.** Bila dilihat dari target anggaran yang ditetapkan untuk Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah telah melampaui anggaran. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 terjadi kenaikan penerimaan ditahun 2025, hal ini dikarenakan perubahan nomenklatur pencatatan Pendapatan transfer bagi hasil pajak provinsi menjadi pajak daerah yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

2. Pendapatan Transfer

a. Dana transfer merupakan penerimaan yang masih mendominasi dari sumber pendanaan anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Belitung, adanya kebijakan pengurangan dana transfer pusat khususnya dana bagi hasil SDA berdampak pada pengurangan dan efisiensi anggaran belanja daerah, sementara itu pendapatan asli daerah belum mampu menopang kebutuhan pelayanan publik.

b. Dana Alokasi Khusus kurang dari target dikarenakan sebagai berikut :
   - DAK Fisik realisasi sesuai dengan nilai kontrak
   - DAK Non Fisik penyaluran dengan memperhitungkan sisa dana yang ada di RKUD Tahun Anggaran sebelumnya.

c. Dana Desa kurang dari target , sisa pagu merupakan transfer Dana Desa Air ayak, Desa Tanjung Rusa, Desa Padang Kandis, Desa Batu Itam dan Desa Keciput yang tidak disalurkan, hal ini dikarenakan keterlambatan Desa dalam pengajuan dokumen persyaratan wajib pengajuan Dana Desa tahap II sehingga menyebabkan pencairan Dana Desa tahap II tidak terealisasi 100%.

d. Dana Bantuan Khusus Provinsi kurang dari target dikarenakan dana bantuan keuangan yang dialokasikan untuk Pembangunan Monumen Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak dicairkan karena kegiatan tidak dilaksanakan mengingat pelaksanaan yang tidak memungkinkan. Adapun realiasi penerimaan dana bantuan keuangan sebesar **Rp1.666.032.500,00.**

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2025 tidak terdapat Anggaran dan Realisasinya.

4. Belanja Daerah

Penyerapan belanja daerah tahun 2025 teralisasi sebesar **90,75%,** secara persentase penyerapan anggaran tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai **92,28%,** secara umum tidak terdapat kendala dalam pelaksanan anggaran tahun 2025, penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan pada saat pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.

Berikut beberapa pejelasan terkait pelaksanaan kegiatan tahun 2025 di SKPD :

a. Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan yaitu belanja modal gedung dan bangunan pemeliharaan/rehabilitasi pertokoan KV Senang serta sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro yaitu pengadaan Videotron tidak terealisasi dikarenakan belum tersedia anggaran untuk penambahan daya listrik di Mampau Food Court pada APBD Perubahan Tahun 2025 dan APBD Induk Tahun 2026 kemudian proses pengadaan barang jasa untuk pengadaan kedua sarana prasarana diatas, tidak dimungkinkan untuk proses lelang dalam kurun waktu yang singkat dalam APBDP.
b. Sarana air minum komunal di Kabupaten Belitung hampir disetiap desa sudah ada namun setelah dilakukan kunjungan lapangan belum ada satupun sarana air minum komunal yang mempunyai SK penerima manfaat dari Desa. Sesuai dengan aturan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023, salah satu syarat untuk melakukan pengawasan eksternal pada sarana air minum komunal adalah SK Desa tidak dapat dilakukan pengambilan dan pemeriksaan kualitas air minum perpipaan/komunal.
c. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, terealisasi sebesar 75,58%. Bentuk dari kegiatan ini salah satunya adalah fogging untuk membasmi demam berdarah. Realisasi kegiatan ini menyesuaikan dengan kasus yang terjadi.
d. Adanya penggunaan dan penerapan aplikasi secara online yang mengakibatkan adanya efisiensi biaya sehingga pengeluaran belanja kegiatan tidak maksimal.
e. Adanya Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan E-Purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional Tahun Anggaran 2023 yang mengimbau/mendorong Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan pengadaan Laptop PDN yang telah tersedia di catalog elektronik etalase konsolidasi laptop PDN melalui metode E-Purchasing Katalog akan tetapi ketersediaan barang/unit yang sesuai TKDN terbatas sehingga untuk pemesanan barang tidak terealisasi sesuai dengan perencanaan.
f. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan belanja transportasi dan akomodasi banyak dilakukan secara daring baik ditingkat pusat maupun provinsi.
g. Pelaksanaan koordinasi melalui rapat teknis dan rapat koordinasi yang melibatkan OPD teknis masih dilakukan secara daring.
h. Spesifikasi barang di DPA sudah terkunci dan tidak dapat dilakukan perubahan sehingga sulit untuk menyesuaikan spesifikasi barang dengan produk yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40%.

BAB IV
Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan dalam Laporan Keuangan Per 31 Desember 2025 adalah Pemerintah Kabupaten Belitung. Selain itu Pemerintah Kabupaten Belitung memiliki Entitas Akuntansi yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada entitas pelaporan. OPD di Pemerintah Kabupaten Belitung meliputi Dinas, Badan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.

Tabel 11 Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025

1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Dinas Kesehatan
3.	RSUD dr. H. Marsidi Judono
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5.	Satuan Polisi Pamong Praja
6.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
7.	Dinas Lingkungan Hidup
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.	Dinas Perhubungan
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika
12.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja.
13.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
14.	Dinas Pemuda dan Olahraga
15.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16.	Dinas Perikanan
17.	Dinas Pariwisata
18.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
19.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
20.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
21.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
22.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
23.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
24.	Sekretariat Daerah
25.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
26.	Inspektorat Kabupaten Belitung
27.	Kecamatan Tanjungpandan
28.	Kecamatan Membalong
29.	Kecamatan Sijuk
30.	Kecamatan Badau
31.	Kecamatan Selat Nasik
32.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selain entitas akuntansi berupa OPD sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Belitung juga menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada unit kerja RSUD dr. H. Marsidi Judono, UPT Puskesmas Tanjungpandan, UPT Puskesmas Air Saga, UPT Puskesmas Perawas, UPT Puskesmas Badau, UPT Puskesmas Tanjung Binga, UPT Puskesmas Sijuk, UPT Puskesmas Simpang Rusa, UPT Puskesmas Membalong, dan UPT Puskesmas Selat Nasik.

4.2 Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

4.3 Kebijakan akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung.
Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung dalam rangka mengatur kebijakan atas konsesi jasa dan properti investasi sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2021 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/ PMK.05/2021 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi, maka Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan penyesuaian kebijakan akuntansi terkait Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi dan Properti Investasi.

Basis pengukuran yang mendasari penyajian pos-pos laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Kas

Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

Uang daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah yang meliputi rupiah dan valuta asing. Uang daerah terdiri dari uang dalam Kas Daerah dan pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

Pengelola Uang daerah terdiri dari :

a. BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan umum daerah yaitu kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD);
b. Bendahara Penerimaan SKPD yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD; dan
c. Bendahara Pengeluaran SKPD yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.

Kas di kas daerah berada dibawah penguasaan BUD yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pembukaan RKUD dilakukan oleh Kepala SKPKD selaku BUD pada Bank Sentral dan/atau Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati.

Kas Pemerintah daerah yang penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh selain Bendahara Umum Daerah (BUD) meliputi :

a. Saldo kas di bendahara penerimaan, apabila bendahara penerimaan bukan bagian dari BUD;
b. Saldo kas di bendahara pengeluaran, apabila bendahara pengeluaran bukan bagian dari BUD;
c. Saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan;
d. Saldo Kas di BLUD;
e. Saldo Kas Dana BOS;
f. Kas Dana Kapitasi pada FKTP;
g. Kas Dana BOSP;dan
h. Kas Dana BOK Puskesmas.

Kas di bendahara adalah kas dalam pengelolaan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas daerah dan/atau masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendaharawan Umum Daerah.

Penerimaan Kas dicatat berdasarkan bukti transfer, STS/nota kredit atau bukti penerimaan lainnya.

Pengeluaran kas dicatat berdasarkan penerbitan SP2D.

Kas dan setara kas yang yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
b. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
c. Klasifikasi Kas Lainnya bisa dijadikan bagian dari Kas sepanjang berada dalam pengelolaan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh adalah Pendapatan Hibah pada SKPD.
d. Penerimaan kas yang belum teridentifikasi penggunaannya akan tidak digolongkan sebagai bagian pendapatan daerah sepanjang pemerintah daerah belum dapat mengidentifikasi penggunaannya dan untuk sementara akan diakui sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya dan apabila sudah jelas identifikasi dan penggunaan akan dilakukan jurnal penyesuaian.
e. Aset Non Lancar sebagai kas yang dibatasi penggunaannya sebagai uang yang tidak memenuhi definisi aset lancar yaitu suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, dan uang yang tidak memenuhi definisi kas menurut paragraf 8 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan yaitu uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang dapat digunakan setiap saat untuk membiayai kegiatan pemerintah.

2. Piutang

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui pada saat :

a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah lainnya misalnya SKP, SKR, SKTJM, Surat Keputusan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi; atau
b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Transfer/Dana Perimbangan/Dana Bagi Hasil (DBH) diakui sebesar nilai definitif sesuai alokasi definitif menurut yang telah ditetapkan dangan Peraturan perundangan/Surat Keputusan Kementerian Keuangan yang menjadi hak tagih pemerintah daerah yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan dengan surat keputusan gubernur namun sampai akhir tahun belum dibayar/ditransfer ke daerah.

Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Akun ini merupakan reklasifikasi dari tagihan penjualan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya atau yang jatuh tempo tetapi belum diselesaikan. Perkiraan ini disajikan sebesar nilai nominal.

Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan sebagai berikut:

a. Diakui apabila telah diterbitkan/ditetapkan SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
b. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
c. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Piutang Lainnya

Perkiraan ini untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D,

Bagian Lancar TP/TGR, dan Piutang Pajak/ Retribusi yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Belitung namun belum diterima sampai akhir tahun.

Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

a. Kualitas Piutang Lancar;
b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
c. Kualitas Piutang Diragukan;
d. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak baik yang dipungut dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) maupun yang ditetapkan secara jabatan (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas Lancar, umur piutang 0 sampai dangan 1 tahun;
b. Kualitas Kurang Lancar, umur piutang di atas 1 sampai dengan 3 tahun;
c. Kualitas Diragukan, umur piutang di atas 3 sampai dengan 5 tahun; dan
d. Kualitas Macet, umur piutang diatas 5 tahun.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak, khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 tahun;
b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 2 sampai dengan 3 tahun;
d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 tahun.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak dan Retribusi dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Tabel 12 Penentuan Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0 %
2.	Kurang Lancar	25 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

3. Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka merupakan biaya yang telah dikeluarkan/dibayarkan oleh pemerintah daerah dalam suatu periode namun sebagian dari biaya atau beban tersebut bukan biaya atau beban pada periode berjalan namun merupakan biaya atau beban pada periode yang akan datang.

4. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Sistem pencatatan persediaan menggunakan metode periodik. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode.
Persediaan disajikan sebesar :

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
   Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
   Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
Persediaan dinilai dengan menggunakan metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis;
Pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya oleh Pemerintah daerah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain, tidak disajikan sebagai aset tetap melainkan disajikan sebagai persediaan.
Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak disajikan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

a. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen
   Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
b. Investasi Jangka Panjang Permanen
   Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable).

Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

Metode Penilaian Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah sebagai berikut:

a. Metode Biaya untuk kepemilikan kurang dari 20 % dan tidak memiliki kendali yang signifikan, investasi dicatat sebesar nilai perolehan.
b. Metode Ekuitas untuk kepemilikan lebih dari 50%, kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan/atau kepemilikan 20% atau lebih, investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.

6. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Klasifikasi penyajian aset tetap adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Harga perolehan aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksud. Biaya-biaya yang diatribusikan langsung atau biaya yang dapat dikapitalisasi ke dalam harga perolehan aset tetap yaitu biaya jasa perencanaan dan biaya jasa pengawasan.

Aset tetap yang diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:

a. Pengeluaran untuk perolehan peralatan dan mesin dapat dikapitalisasi apabila nilai perolehannya minimal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit;
b. Pengeluaran untuk perolehan gedung dan bangunan dapat dikapitalisasi bila nilai perolehannya minimal sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
c. Pengeluaran untuk perolehan aset tetap lainnya berupa alat olahraga, hewan, ternak dan tanaman dapat dikapitalisasi apabila nilai perolehannya minimal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit;

Batas minimal kapitalisasi aset tetap di atas, dikecualikan untuk perolehan aset tetap berupa tanah, jalan irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan/ buku dan barang bercorak kesenian/ kebudayaan.

Nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun dicatat sebagai aset ekstrakomptabel dan diungkapkan di CaLK.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pemeliharaan/ perbaikan yang merupakan pemeliharaan rutin/ berkala/ terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat.

Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Pengeluaran jasa perencanaan yang belum disertai dengan pekerjaan konstruksi pada tahun berjalan, sementara diklasifikasikan sebagai KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN dan dikapitalisasi sebagai aset tetap setelah pekerjaan konstruksinya selesai pada tahun berikutnya.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Belitung Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung.
Nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak memperhitungkan nilai residu, diasumsikan bahwa aset tetap tidak memiliki nilai residu.
Selain tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman,seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
Aset tetap berupa buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman dihapuskan pada saat aset tetap tersebut tidak dapat digunakan atau mati.
Aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi disusutkan dengan perhitungan nilai aset tetap renovasi dibandingkan dengan masa perjanjian pinjam pakai atau sewa.
Pendekatan yang digunakan dalam perhitungan penyusutan aset yang diperoleh diawal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun ditentukan dengan menggunakan pendekatan bulan penggunaan yaitu bulan saat aset tersebut digunakan.
Aset yang pengadaannya diterima 100% sampai dengan 31 Desember tahun berjalan maka penyusutan dimulai dan disusutkan penuh selama (1) satu bulan.
Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
c. Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset yang tidak digunakan (Idle) untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

7. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan investasi permanen. Aset lainnya terdiri dari:

a. Aset Tak berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud ini meliputi software komputer, lisensi dan franchise, hak cipta (*copyright*), paten, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
Perangkat lunak (*software*) komputer adalah semua program yang dapat digunakan pada sistem operasi computer.
Software yang diakui sebagai Aset tak berwujud merupakan software yang terpisah dari peralatan komputer.
Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Metode amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus. Penentuan masa manfaat aset tak berwujud mengacu pada Undang-undang Pajak Penghasilan. Masa manfaat dan tarif amortisasi sebagai berikut:

Tabel 13 Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa manfaat	Tarif amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%

Masa manfaat dan tarif amortisasi Aset tak berwujud berupa perangkat lunak (software) dikategorikan dalam kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun dan tarif amortisasi 25% dengan metode garis lurus.

Pelepasan/pemindahtanganan aset tak berwujud dilakukan dengan cara :

- Dijual;
- Dipertukarkan;
- Dihibahkan; atau
- Dijadikan penyertaan modal daerah.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya.

Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional. Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran.

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Sedangkan bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung adalah bentuk kerjasama pinjam pakai, Bangun, Kelola, Serah (BKS) berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

c. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

d. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TP/TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) dan/atau diterbitkannya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

e. Aset lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, hilang dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal) dan atau proses penghapusan. Aset lain-lain diakui pada saat aset tetap dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

8. Properti Investasi

a. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
   i. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau:
   ii. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Aset yang merupakan properti investasi antara lain:
   - tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
   - tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika pemerintah daerah belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
   - bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah (atau dikuasai oleh pemerintah daerah melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
   - bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/ atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
   - properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.

c. Aset yang bukan merupakan properti investasi antara lain:
   - properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
   - properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
   - properti yang digunakan sendiri, termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
   - properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
   - Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
   - properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur aset tetap.
   - properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

d. Apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

e. **Pengakuan properti investasi** diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat

ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:

- besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

f. Properti investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah, dan disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

g. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan.

h. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

9. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain, utang bunga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), bagian lancar utang jangka panjang, Pendapatan di terima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

10. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

11. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Belitung, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Belitung.

12. Pendapatan -LO

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan nilai nominal pendapatan sebelum dikurangi dengan pengeluaran yang terkait dengan pendapatan tersebut. Pendapatan LO diakui pada saat:

a. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*. Timbulnya hak atas pendapatan dimulai saat ditetapkannya surat ketetapan untuk pajak, retribusi dan ketetapan lainnya.

b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang diterima pembayarannya secara tunai (*realized*). Pendapatan–LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan dengan pengakuan pendapatan bersamaan dengan pendapatan LRA.

Pengakuan pendapatan LO untuk kelompok **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak daerah (SKP) atau dokumen lain yang dipersamakan telah diterbitkan yang menunjukkan hak pemda untuk memungut pajak tersebut.

b. Pendapatan Retribusi

Pendapatan retribusi pada prinsipnya diakui pada saat pelayanan jasa telah dilaksanakan. Pengakuan pendapatan dapat diakui secara andal bila surat ketetapan retribusi (SKR) atau dokumen/bukti lain yang dipersamakan telah diterbitkan yang menunjukkan hak pemda untuk menerima retribusi tersebut. Adapun untuk jenis pendapatan retribusi yang diperoleh dari penjualan karcis dan sejenisnya akan diakui pada saat kas telah diterima (karcis telah terjual).

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat telah ada penetapan resmi hasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan/atau berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

d. Lain-Lain PAD yang Sah

Untuk jenis pendapatan yang didahului dengan penerbitan surat ketetapan (SK) atas pendapatan terkait, pengakuannya dilakukan setelah SK tersebut ditetapkan. Adapun untuk jenis pendapatan yang tanpa penetapan SK, pengakuannya dilakukan pada saat kas diterima.

Pendapatan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan tidak masuk ke dalam kelompok PAD-LO melainkan akan masuk ke dalam akun Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, yaitu sejumlah kas hasil penjualan dikurangi nilai buku aset yang dijual.

Pengakuan pendapatan LO untuk kelompok **Pendapatan Transfer** dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat
   Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat diakui pada saat telah ditetapkannya Peraturan Presiden/Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan/Keputusan/Surat Edaran dari pejabat Kementerian Keuangan yang berwenang yang terkait dengan Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian.
b. Pendapatan transfer dari Provinsi, seperti dana bagi hasil, diakui pada saat telah ditetapkannya SK Gubernur tentang dana bagi hasil ke Kabupaten.
c. Pendapatan transfer yang bersifat khusus, seperti Dana Alokasi Khusus, diakui pada saat semua persyaratan yang ditentukan oleh pihak pemberi transfer telah dipenuhi oleh pemda.
d. Bantuan keuangan dari pemda lainnya dapat diakui pada saat SK Kepala Daerah Pemda lainnya tentang bantuan keuangan tersebut telah ditetapkan.

Pengakuan pendapatan LO untuk kelompok **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk ke dalam PAD dan Pendapatan Transfer.

Pendapatan jenis ini antara lain mencakup pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, maupun dari lembaga/organisasi swasta dan masyarakat, serta bantuan keuangan dari pemda lainnya.

Pendapatan hibah diakui pada saat Naskah Perjanjian Hibah atau berita acara hibah telah ditandatangani oleh para pihak yang terkait. Pendapatan hibah yang tidak menggunakan naskah perjanjian hibah atau berita acara hibah diakui pada saat kas/barang diterima pemerintah daerah.

13. Pendapatan - LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

a. diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
b. diterima oleh SKPD; atau
c. kas atas pendapatan telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkan kepada BUD.

14. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan

sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban penyisihan piutang, beban transfer, dan beban luar biasa.

Beban Pegawai diakui pada saat SPP-LS telah disahkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD. Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban Barang dan Jasa yang dibayarkan dengan menggunakan UP/GU/TU selama periode berjalan, pengakuannya pada saat bukti-bukti pengeluaran belanja telah disahkan oleh PA/KPA. Beban barang dan jasa yang dibayarkan secara LS diakui saat SPP-LS telah disahkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD.

Beban Penyusutan Aset Tetap dihitung secara bulanan, yaitu jika aset diperoleh pada tahun berjalan, maka aset tersebut mulai disusutkan sejak bulan perolehan aset tersebut.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih timbul dari adanya pembentukan penyisihan piutang tak tertagih yang bertujuan agar nilai piutang yang dilaporkan di dalam neraca menunjukkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu nilai piutang bruto dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Pengakuan penyisihan piutang tak tertagih dibuat pada setiap akhir tahun melalui jurnal penyesuaian berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan.

15. Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Belitung.

Belanja dicatat sebesar nilai uang yang telah dibayarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus untuk belanja yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran, belanja dicatat sebesar nilai uang yang pertanggungjawaban belanjanya telah disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan/atau oleh Fungsi Perbendaharaan BUD/Kuasa BUD.

16. Pembiayaan (financing)

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA bukan merupakan aliran kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

SiLPA itu sendiri merupakan kas yang ada di Rekening Kas Umum Daerah di luar jumlah kas yang berasal dari utang PFK (Perhitungan Fihak Ketiga). Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

17. Laporan keuangan konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah kabupaten belitung sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD).

Proses konsolidasi dilakukan dengan cara menggabungkan saldo akun-akun yang sifatnya sama pada laporan keuangan seluruh entitas akuntansi (OPD) termasuk BLUD ditambah dengan akun-akun yang ada dalam laporan keuangan PPKD. Proses tersebut dilakukan oleh aplikasi SIMDA Keuangan yang digunakan Kabupaten Belitung.

Adapun tahapan penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan kertas kerja (worksheet) dengan lajur sesuai dengan banyaknya OPD dan PPKD sebagai alat untuk menyusun Neraca Saldo Gabungan OPD dan PPKD.

b. Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo SKPD yang dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasi adalah Neraca Saldo yang sudah disesuaikan.
c. Setelah memasukkan neraca saldo kedalam kertas kerja konsolidasi, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal eliminasi untuk menghapus akun transitoris yaitu akun RK-PPKD lawan RK-SKPD.
d. Berdasarkan Neraca saldo setelah eliminasi, fungsi Akuntansi Pemda kemudian mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO) dan Neraca.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemda, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur rekening struktur laporan realisasi anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pendapatan- LRA dan belanja diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas BUD.

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Selanjutnya penerimaan- LRA adalah penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Realisasi Pendapatan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp940.242.247.555,09** atau **99,96%** dari total anggaran pendapatan sebesar **Rp940.590.481.222,00** Realisasi pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar **Rp213.489.485.745,09**, dan Pendapatan Transfer sebesar **Rp726.752.761.810,00.**

Realisasi pendapatan daerah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar **Rp37.127.857.095,24** atau **3,80%**. Di mana jumlah realisasi pendapatan tahun sebelumnya sebesar **Rp977.370.104.650,33**.

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 14 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2025

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025			Realisasi Per 31 Desember 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	202.354.324.639,00	213.489.485.745,09	105,50	185.033.042.636,33
2	Pendapatan Transfer	738.236.156.583,00	726.752.761.810,00	98,44	781.559.645.246,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	10.777.416.768,00
Jumlah		**940.590.481.222,00**	**940.242.247.555,09**	**99,96**	**977.370.104.650,33**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

5.1.1.1.1 Pajak Daerah – LRA

Pajak Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung dan dapat dipungut serta disetorkan ke kas daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak dan Retribusi Daerah untuk Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir diklasifikasikan menjadi satu jenis pajak dengan nama PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu).

Dari total anggaran pendapatan pajak daerah sebesar **Rp109.084.621.493,00** terealisasi sebesar **Rp104.082.515.970,00** atau **95,41%**. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 terjadi kenaikan realisasi pendapatan pajak sebesar **Rp 8.349.186.472,75** atau **8,72%**. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2025 terdapat pemasangan alat rekam transaksi pada objek pajak hotel, restoran dan hiburan, pendaftaran objek pajak baru hasil pendataan/verifikasi, intensifikasi melalui pengawasan/monitoring objek pajak, jemput bola/penagihan langsung kewajiban pajak dan meningkatnya transaksi jual beli lahan serta dibukanya kembali objek wisata dan pelaksanaan event-event nasional dan internasional di Kabupaten Belitung. Selain itu kenaikan realisasi pendapatan pajak daerah juga disebabkan adanya perubahan nomenklatur pencatatan Pendapatan transfer bagi hasil pajak provinsi menjadi pajak daerah yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah TA 2025 sebagai berikut:

Tabel 15 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2025

No	Jenis Pajak	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pajak Reklame	1.200.000.000,00	1.133.447.464,00	94,45	1.129.618.657,85
2	Pajak Air Tanah	150.000.000,00	156.388.923,00	104,25	140.791.668,00
3	Pajak Sarang Burung Walet	1.000.000.000,00	145.611.550,00	14,56	115.970.000,00
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	23.250.000.000,00	24.403.540.787,00	104,96	25.845.285.183,00
5	Pajak Bumi dan Bangunan Perdessaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.000.000.000,00	9.864.231.398,00	109,60	8.609.662.611,00
6	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	16.250.000.000,00	10.032.985.399,00	61,74	21.371.176.637,00
7	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT]	36.228.906.245,00	36.870.662.393,00	101,77	38.520.824.740,40
8	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	16.954.515.204,00	16.243.841.156,00	95,80	0,00
9	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	5.051.200.044,00	5.231.806.900,00	103,57	0,00
Jumlah		**109.084.621.493,00**	**104.082.515.970,00**	**95,41**	**95.733.329.497,25**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 diuraikan sebagai berikut:

1. **Pajak Reklame**

   Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, di mana objek pajaknya adalah semua penyelenggaraan reklame. Pendapatan dari Pajak Reklame TA 2025 terealisasi sebesar **Rp1.133.447.464,00** atau **94,45%** dari anggaran sebesar **Rp1.200.000.000,00**. Realisasi Pajak Reklame ini naik sebesar **Rp3.828.806,15** atau **0,34%** dari realisasi TA 2024 sebesar **Rp1.129.618.657,85**.

   Adapun rincian Pajak Reklame adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Reklame TA 2025

No	Pajak Reklame	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
1	Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron	1.012.630.000,00	948.333.325,00	93,65	963.372.592,32
2	Reklame Kain	143.170.000,00	152.787.253,00	106,71	131.871.067,75
3	Reklame Melekat/Stiker	5.200.000,00	2.208.713,00	42,47	1.356.988,96
4	Reklame Selebaran	3.000.000,00	-	-	-
5	Reklame Berjalan	36.000.000,00	30.118.173,00	83,66	33.018.008,82
Jumlah		**1.200.000.000,00**	**1.133.447.464,00**	**94,45**	**1.129.618.657,85**

Sumber: data BPKAD (diolah)

2. **Pajak Air Tanah**

   Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Pendapatan dari Pajak Air Tanah TA 2025 terealisasi sebesar **Rp 156.388.923,00** atau

104,25% dari anggaran sebesar **Rp150.000.000,00**. Realisasi Pajak Air Tanah ini meningkat sebesar **Rp 15.597.255,00** atau **11,08%** dari realisasi TA 2024 sebesar **Rp140.791.668,00**.

3. **Pajak Sarang Burung Walet**
   Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Pendapatan dari Pajak Sarang Burung Walet TA 2025 terealisasi sebesar **Rp 145.611.550,00** atau **14,56%** dari anggaran sebesar **Rp1.000.000.000,00**. Realisasi Pajak Sarang Burung Walet ini mengalami kenaikan sebesar **Rp29.641.550,00** atau **25,56%** dari realisasi TA 2024 sebesar **Rp115.970.000,00**.

4. **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**
   Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pendapatan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2025 terealisasi sebesar **Rp24.403.540.787,00** atau **104,96%** dari anggaran sebesar **Rp23.250.000.000,00**. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ini turun sebesar **Rp 1.441.744.396,00** atau sebesar **-5,58%** dari realisasi TA 2024 sebesar **Rp 25.845.285.183,00**. Adapun rincian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2025

No	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
1	Pajak Granit/Andesit	329.926.783,00	107.875.710,00	32,69	231.344.330,50
2	Pajak Kaolin	5.468.007.159,00	6.856.159.786,00	125,38	8.118.962.258,50
3	Pajak Pasir dan Kerikil	4.612.072.237,00	1.473.824.000,00	31,96	5.069.290.383,50
4	Pajak Pasir Kuarsa	9.485.824.449,00	10.818.492.163,00	114,04	8.673.560.714,50
5	Pajak Tanah Liat	3.231.669.372,00	5.134.758.108,00	158,88	3.689.015.496,00
6	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	122.500.000,00	12.431.020,00	10,14	63.112.000,00
Jumlah		**23.250.000.000,00**	**24.403.540.787,00**	**104,96**	**25.845.285.183,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5. **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)**
   Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pungutan yang harus dibayarkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan maupun kedudukan sosial ekonomi bagi orang pribadi atau badan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan TA 2025 terealisasi sebesar **Rp9.864.231.398,00** atau sebesar **109,60%** dari anggaran sebesar **Rp9.000.000.000,00**. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini mengalami peningkatan sebesar **Rp1.254.568.787,00** atau sebesar **14,57%** dari realisasi TA 2024 sebesar **Rp8.609.662.611,00.**

6. **Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**
   Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pendapatan dari Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan TA 2025 terealisasi sebesar **Rp10.032.985.399,00** atau sebesar **61,74%** dari anggaran sebesar **Rp16.250.000.000,00**. Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ini mengalami penurunan sebesar Rp **11.338.191.238,00** atau sebesar **53,05%** dari realisasi TA 2024 sebesar **Rp21.371.176.637,00**. Penurunan drastis dikarenakan kebijakan pusat yang berupa pembebasan BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan menurunnya transaksi jual beli tanah/properti dikarenakan keadaan ekonomi mengalami penurunan.

7. **Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)**
   Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Objek

PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi: Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir dan Jasa Kesenian dan Hiburan. Pendapatan dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu TA 2025 terealisasi sebesar **Rp 36.870.662.393,00** atau sebesar **101,77%** dari anggaran sebesar **Rp36.228.906.245,00**. Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu mengalami penurunan sebesar **Rp 1.650.162.347,40** atau sebesar **4,28%** dari realisasi TA 2024 sebesar **Rp38.520.824.740,40**. Adapun rincian Pajak Barang dan Jasa Tertentu adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu TA 2025

No	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
1	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	11.724.312.000,00	12.167.870.846,00	103,78	11.834.758.312,49
2	PBJT-Tenaga Listrik	15.300.000.000,00	15.197.201.287,00	99,32	15.907.252.874,00
3	PBJT-Jasa Perhotelan	7.871.857.377,00	8.353.271.239,00	106,11	9.479.056.211,08
4	PBJT-Jasa Parkir	355.630.280,00	253.472.646,00	71,27	350.378.300,00
5	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	977.106.588,00	898.846.375,00	91,99	949.379.042,83
Jumlah		**36.228.906.245,00**	**36.870.662.393,00**	**101,77**	**38.520.824.740,40**

Sumber: data BPKAD (diolah)

8. **Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**
   Opsen Pajak Kendaraan Bermotor adalah pungutan tambahan pajak atas pokok PKB yang dikenakan oleh daerah dengan tarif tertentu dengan tujuan untuk mempercepat penerimaan pajak langsung ke daerah untuk pembangunan infrastruktur. Realisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2025 terealisasi sebesar **Rp16.243.841.156,00** atau **95,80%** dari anggaran sebesar Rp **16.954.515.204,00.**

9. **Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB**)
   Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pungutan tambahan pajak atas pokok PKB yang dikenakan oleh daerah dengan tarif tertentu dengan tujuan untuk mempercepat penerimaan pajak langsung ke daerah untuk pembangunan infrastruktur. Realisasi Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2025 terealisasi sebesar **Rp5.231.806.900,00** atau **103,57%** dari anggaran sebesar **Rp5.051.200.044,00.**

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah – LRA

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung dan dapat dipungut serta disetorkan ke kas daerah. Dari jumlah anggaran retribusi daerah TA 2025 sebesar **Rp78.007.440.946,00** terealisasi sebesar **Rp81.467.881.793,50** atau **104,44%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar **Rp28.328.411.252,00** terjadi peningkatan realisasi pendapatan retribusi daerah sebesar **Rp53.139.470.541,50** atau **187,58%** Hal tersebut disebabkan adanya pengalihan penganggaran objek Pendapatan BLUD yang bersumber dari Jasa Pelayanan Kesehatan yang sebelumnya dianggarkan dan dicatat pada objek Lain-lain PAD pada tahun 2025 dianggarkan dan dicatat sebagai pendapatan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Kabupaten Belitung Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Selain peningkatan pendapatan retribusi disebabkan adanya peningkatan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah (jasa air bersih), penerimaan retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga terdampak dengan dibukanya kembali objek wisata dan pelaksanaan event-event pariwisata dan olahraga, pengelola usaha kuliner yang mulai membuka kembali usahanya seiring dengan kondisi perekonomian yang mulai membaik di Kabupaten Belitung.

Dari total Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah diluar dari pendapatan BLUD terealisasi sebesar **Rp10.446.023.346,00.** Rekapitulasi pendapatan retribusi diluar pendapatan BLUD sebagai berikut :

No	Retribusi	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	2.571.660.000,00	3.884.444.700,00	151,05	2.828.128.317,00
2	Retribusi Jasa Usaha	4.501.631.225,00	5.778.437.515,00	128,36	6.017.074.438,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	700.000.000,00	783.141.131,00	111,87	669.433.583,00
	Total	**7.773.291.225,00**	**10.446.023.346,00**	**134,38**	**9.514.636.338,00**

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi sebagai berikut :

Tabel 19 Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025

No	Retribusi	OPD	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
1	Retribusi Jasa Umum :					
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan	RSUD, Dinkes, DLH	70.234.149.721,00	72.205.053.147,50	102,80	19.333.842.934,00
3	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	DLH	795.000.000,00	885.833.000,00	111,42	793.916.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dishub	105.000.000,00	126.840.000,00	120,80	138.230.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar	KUKMPT,	1.590.060.000,00	1.588.477.000,00	99,90	1.287.869.751,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	DLH	81.600.000,00	100.100.000,00	122,67	86.000.000,00
7	Retribusi Pelayanan Pendidikan	Dinkes	-	-	-	2.044.546,00
8	**Subtotal Retribusi Jasa Umum**		**72.805.809.721,00**	**74.906.303.147,50**	**102,88**	**21.641.903.231,00**
9	Retribusi Jasa Usaha:					
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dindikbud, Dinkes, DPUPR, DLH, Dishub, KUKMPT, Perikanan, Sekretariat Daerah	301.084.025,00	445.090.500,00	147,82	977.699.525,00
11	Retribusi Terminal	Dishub	-	-	-	54.910.000,00
12	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Dindikbud, KUKMPT	183.200.000,00	210.114.000,00	114,69	197.947.000,00
13	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	Sekretariat Daerah	87.900.000,00	112.000.000,00	127,41	73.350.000,00
14	Retribusi Rumah Potong Hewan	DKPP,	110.000.000,00	119.810.000,00	108,91	114.715.000,00
15	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	Dishub, Perikanan	261.537.200,00	480.556.350,00	183,74	435.323.800,00
16	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Dindikbud, Dispora, Dispar	1.866.910.000,00	2.457.657.345,00	131,64	2.235.358.708,00
17	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	DPUPR, Perikanan	401.000.000,00	499.584.000,00	124,58	1.425.287.225,00
18	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	DPUPR	1.175.000.000,00	1.215.708.320,00	103,46	446.332.180,00
19	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	DKPP, Dishub	115.000.000,00	237.917.000,00	206,88	56.151.000,00
20	**Subtotal Retribusi Jasa Usaha**		**4.501.631.225,00**	**5.778.437.515,00**	**128,36**	**6.017.074.438,00**
21	Retribusi Perizinan Tertentu :					
22	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	DPMPTSPP	700.000.000,00	783.141.131,00	111,87	669.433.583,00
23	**Sub total Retribusi Perizinan Tertentu**		700.000.000,00	783.141.131,00	111,87	669.433.583,00
24	**Total Retribusi Daerah**		**78.007.440.946,00**	**81.467.881.793,50**	**104,43**	**28.328.411.252,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rekapitulasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan pada BLUD

No.	Nama BLUD	Jumlah pendapatan retribusi pelayanan kesehatan
1	RSUD dr. H. Marsidi Judono	69.242.969.747,50
2	Puskesmas Tanjungpandan	316.320.600,00
3	Puskesmas Air Saga	138.599.800,00
4	Puskesmas Perawas	143.720.000,00
5	Puskesmas Sijuk	136.831.900,00

No.	Nama BLUD	Jumlah pendapatan retribusi pelayanan kesehatan
6	Puskesmas Tanjung Binga	217.621.200,00
7	Puskesmas Badau	183.408.100,00
8	Puskesmas Simpang Rusa	112.274.900,00
9	Puskesmas Membalong	252.763.400,00
10	Puskesnas Selat Nasik	114.657.800,00
	Total	**70.859.167.447,50**

Adapun ringkasan pencapaian target anggaran Pendapatan Retribusi pada 31 Desember 2025 antara lain sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum
   - Capaian Retribusi Pelayanan Kesehatan melebihi target, ini dikarenakan peningkatan Restribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT BLUD RSUD H. Marsidi Judono yg terdiri dari :
     a) Jasa Layanan
     Secara umum dikarenakan meningkatnya kunjungan pasien rawat jalan selama periode berjalan di. Peningkatan jumlah kunjungan tersebut berdampak pada meningkatnya pemanfaatan pelayanan kesehatan, baik layanan medis maupun layanan penunjang, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan jasa layanan;
     b) Hasil Kerjasama dengan pihak lain
     Peningkatan pendapatan tersebut dipengaruhi oleh bertambahnya pelaksanaan kegiatan diklat dan kerjasama pelatihan selama periode berjalan;
     c) Lain-lain Pendapatan BLUD
     Peningkatan pendapatan tersebut dikarenakan oleh peningkatan Pendapatan Jasa Giro yang dipengaruhi besarnya saldo kas BLUD yang tersimpan pada rekening Bank selama periode berjalan.
   - Capaian Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus melebihi target anggaran dikarenakan bertambahnya pelanggan retribusi (kebersihan, kakus dan laboratorium) yang meminta pelayanan, serta adanya kenaikan tarif retribusi pelayanan sesuai Peraturan Bupati Belitung Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus tanggal 14 November 2022;
   - Capaian Retribusi Parkir di Tepi Jalan umum melebihi target di karenakan adanya penambahan Kontrak dan Pelunasan tahun sebelumnya.

2. Retribusi Jasa Usaha
   - Capaian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah melebihi target secara umum karena adanya perpanjangan sewa pemakaian serta peningkatan efektifitas penagihan, termasuk penagihan atas tunggakan retribusi;
   - Capaian Retribusi Tempat Khusus Parkir melebihi target, hal ini dikarenakan adanya peningkatan efektifitas pengelolaan dan penagihan retribusi parkir, termasuk penyelesaian kewajiban pembayaran (tunggakan) dari periode sebelumnya yang direalisasikan pada tahun berjalan;
   - Capaian Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila melebihi target hal ini dikarenakan peningkatan permintaan pelayanan yang melebihi target;
   - Capaian Retribusi Rumah Potong Hewan melebihi target hal ini dikarenakan Kebutuhan daging pada saat hari besar keagamaan meningkat, sehingga kebutuhan pemotongan saat Hari Raya Besar Keagamaan juga meningkat;
   - Capaian retribusi pelayanan kepelabuhan melebihi target dikarenakan di pelabuhan ada kunjungan kapal yang tidak masuk dalam jadwal bulanan yaitu kapal LCT.ATAKA sehingga menyumbang Retribusi Kepelabuhan dan penambahan kapal lebih besar milik PT. ASDP yaitu KUALA BT.2;
   - Capaian Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga melebihi target dikarenakan peningkatan jumlah event atau kegiatan yang dilaksanakan dikawasan destinasi wisata sehingga meningkatkan jumlah kunjungan;

- Capaian Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah melebihi target berasal dari penjualan benih kerapu, penjualan benih ikan air tawar dan ikan air tawar konsumsi dari UPT BBI Membalong, penjualan es balok dari pabrik es Tanjungpandan dan pabrik es Tanjung Binga. Rata-rata mengalami peningkatan karena peningkatan permintaan pasar baik benih ikan, ikan konsumsi maupun es balok;
- Capaian Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah melebihi target, ini terjadi dikarenakan pada tahun 2025 pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dilaksanakan dari awal tahun anggaran selain itu realisasi melebihi target ini juga disebabkan adanya pelunasan Piutang tahun sebelumnya.

3. Retribusi Perizinan Tertentu
   - Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung melebihi target, hal ini dikarenakan adanya peningkatan penerimaan retibusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. Jumlah bagian laba/dividen Per 31 Desember 2025 berasal dari pendapatan Dividen dari PT Bank Sumsel Babel dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025

No	Objek Pendapatan	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	5.600.000.000,00	4.886.428.412,02	87,25	5.566.654.063,95
Jumlah		**5.600.000.000,00**	**4.886.428.412,02**	**87,25**	**5.566.654.063,95**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pembagian dividen dari PT Bank Sumsel Babel merupakan pembagian dividen tahun buku 2025 berdasarkan hasil RUPS pada tahun 2025 sebesar **Rp4.886.428.412,02**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar **Rp5.566.654.063,95** terjadi penurunan realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar **Rp680.225.651,93** atau **12,22%**.

Setoran saham Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung per *cut off* Desember 2025 sebagai berikut :

a.	Jenis saham		Seri A
b.	Setoran Saham	Rp	24.327.000.000,00
c.	Agio Saham	Rp	9.921.716.000,00
d.	Sisa Setoran Saham	Rp	751.464,77
e.	Jumlah Setoran Saham (b+c+d)	Rp	34.249.467.464,77
f.	Lembar saham yang dimiliki		24.327
g.	Total lembar saham gabungan		1.197.039
h.	Persentase kepemilikan		2,03%

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah untuk menampung pendapatan yang bukan berasal dari pajak daerah. retribusi dan bagian laba dari BUMD dan investasi lainnya yang disetor ke kas daerah. Dari jumlah anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah TA 2025 sebesar **Rp9.662.262.200,00** terealisasi sebesar **Rp23.052.659.569,57** atau **238,58%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar **Rp55.404.647.823,13** terjadi penurunan realisasi pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar **Rp32.351.988.258,56** atau **58,39%.** Hal ini dikarenakan pengalihan pencatatan Pendapatan BLUD dari jasa layanan menjadi Retribusi Daerah yaitu Restribusi Layanan Kesehatan.

Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2025

No	Lain-lain PAD Yang Sah	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	150.000,00	16.214.000,00	10.809,33	34.575.000,00
2	Hasil Kerja Sama Daerah	17.000.000,00	3.902.500,00	22,95	15.827.207,00
3	Jasa Giro	1.500.000.000,00	946.156.503,00	63,07	2.522.185.887,00
4	Pendapatan Bunga	1.200.000.000,00	2.515.890.784,00	209,65	1.813.150.725,84
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	6.500.000.000,00	7.277.217.901,57	111,95	3.429.707.340,01
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	-
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	400.000.000,00	777.444.949,00	194,36	792.560.866,99
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	4.162.200,00	25.543.233,00	613,69	14.055.108,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	30.000.000,00	93.145.470,00	310,48	286.082.588,00
10	Pendapatan BLUD	10.950.000,00	11.397.144.229,00	104.083,50	46.496.503.100,29
Jumlah		**9.662.262.200,00**	**23.052.659.569,57**	**238,58**	**55.404.647.823,13**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Penjelasan objek lain-lain PAD yang sah sebagai berikut:

a. Hasil pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan penerimaan hasil sewa tanah dan bangunan milik pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22 Rincian Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

No.	Uraian	Jumlah Realisasi Pendapatan
1.	Pendapatan Sewa sebagian Luas Tanah dan bangunan Eks Hotel harlika Jaya	16.214.000,00
	Total	**16.214.000,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

b. Hasil Kerja Sama Daerah merupakan hasil kerja sama pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana diatur dengan perjanjian kerja sama/pemanfaatan BMD antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan pihak ketiga. Rincian hasil kerja sama sebagai berikut:

Tabel 23 Rincian Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah

No.	Uraian	Jumlah Realisasi Pendapatan
1.	Pendapatan kontribusi sewa kios dari PT Puncak Jaya Lestari	3.902.500,00
	Total	**3.902.500,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

c. Penerimaan jasa giro merupakan penerimaan bunga saldo giro yang diberikan oleh bank yang ditunjuk sebagai pemegang rekening kas daerah berupa rekening giro kas daerah dan rekening giro kas pada bendahara dalam mengelola dana APBD.

d. Penerimaan bunga merupakan penerimaan bunga atas deposito yang berjangka dengan masa jatuh tempo 1 bulan. Pembentukan deposito sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.

e. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain merupakan pendapatan yang berasal dari pengembalian belanja atas kelebihan bayar tahun sebelumnya berdasarkan temuan pemeriksaan, denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, dan lain-lain. Akun ini juga menampung Pengembalian sisa dana hibah dari KPU Belitung sebesar **Rp4.708.494.640,00**. Sedangkan total Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk

Lain Tahun 2025 sebesar **Rp7.277.217.901,57.** Rincian Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan merupakan penerimaan berupa denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan melebihi waktu dari pelaksanaan kontrak.

g. Pendapatan denda pajak merupakan penerimaan berupa sanksi administratif yang dikenakan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang bayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran. Pengenaan tarif bunga/denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

h. Pendapatan denda retribusi merupakan penerimaan berupa sanksi administratif yang dikenakan atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang bayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.

i. Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah, ini merupakan pendapatan Jasa Giro BLUD Puskesmas.

Rincian realisasi pendapatan BLUD sebagai berikut :

Tabel 24 Rincian Realisasi Pendapatan BLUD TA 2025

No.	Uraian	Jumlah Realisasi Pendapatan
1.	Pendapatan jasa layanan umum BLUD	11.380.494.495,00
2.	Pendapatan hasil kerja sama BLUD	-
3.	Pendapatan lain-lain BLUD	16.649.734,00
	Total	**11.397.144.229,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah.

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan, Insentif Fiskal, Dana Desa (DD) dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan desentralisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Dari jumlah anggaran pendapatan transfer TA 2025 sebesar **Rp738.236.156.583,00** terealisasi sebesar **Rp726.752.761.810,00** atau **98,44%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar **Rp781.559.645.246,00** terjadi penurunan realisasi pendapatan transfer sebesar **Rp 54.806.883.436,00** atau **7,01%**. Penurunan ini disebabkan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Anggaran dan realisasi pendapatan transfer sebagai berikut:

Tabel 25 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
A	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	39.425.962.000,00	38.705.944.300,00	98,17	80.735.062.654,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	489.709.683.000,00	478.853.010.054,00	97,78	485.393.500.051,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	10.821.511.000,00	8.848.258.410,00	81,76	10.766.768.288,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana	91.553.177.190,00	91.209.342.578,00	99,62	84.237.114.249,00

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik				
5	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dana Desa	41.614.636.000,00	40.620.586.800,00	97,61	41.477.591.670,00
7	Insentif Fiskal	20.586.869.000,00	20.586.869.000,00	100,00	15.976.321.000,00
B	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
1	Pendapatan Bagi Hasil	42.743.036.393,00	46.262.718.168,00	108,23	59.001.661.334,00
2	Bantuan Keuangan	1.781.282.000,00	1.666.032.500,00	93,52	3.971.626.000,00
	Jumlah	**738.236.156.583,00**	**726.752.761.810,00**	**98,44**	**781.559.645.246,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.1.1.2.1 Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Bagi Hasil berasal dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam yang dianggarkan sebesar **Rp39.425.962.000,00** dapat direalisasikan sebesar **Rp 38.705.944.300,00** atau **98,17%.** Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar **Rp80.735.062.654,00** terjadi penurunan realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar **Rp42.029.118.354,00** atau **52,06%**.

Rincian anggaran dan realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil sebagai berikut:

Tabel 26 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil TA 2025

No	Objek Bagi Hasil Pajak	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	12.091.252.000,00	11.957.169.800,00	98,89	11.969.552.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	7.591.287.000,00	6.966.590.300,00	91,77	7.270.573.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	312.678.000,00	281.410.200,00	90,00	416.057.000,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	399.837.000,00	399.837.000,00	100,00	722.426.000,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.469.117.000,00	1.539.146.000,00	104,76	1.127.252.000,00
6	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	10.804.195.000,00	10.804.195.000,00	100,00	48.714.397.000,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	243.373.000,00	243.373.000,00	100,00	6.773.903.654,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.726.950.000,00	2.726.950.000,00	100,00	3.740.902.000,00
9	DBH Sawit	3.787.273.000,00	3.787.273.000,00	100,00	
	Jumlah	**39.425.962.000,00**	**38.705.944.300,00**	**98,17**	**80.735.062.654,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.1.1.2.2 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nilai transfer DAU kepada kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Dari jumlah anggaran pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2025 sebesar **Rp489.709.683.000,00** terealisasi sebesar **Rp478.853.010.054,00** atau **97,78%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar **Rp485.393.500.051,00** terjadi penurunan realisasi pendapatan Dana Alokasi Umum sebesar **Rp6.540.489.997,00** atau **1,35%**.

Berikut jumlah anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum TA 2025:

Tabel 27 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum

Objek Dana Perimbangan	Anggaran (Rp)	Realisasi Per 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi Per 31 Desember 2024 (Rp)
Dana Alokasi Umum	489.709.683.000,00	478.853.010.054,00	97,78	485.393.500.051,00
Jumlah	**489.709.683.000,00**	**478.853.010.054,00**	**97,78**	**485.393.500.051,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sebesar **Rp478.853.010.054,00** terdiri dari :

DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang ditransfer ke Kas Daerah sebanyak 12 bulan dengan total nilai transfer sebesar Rp431.550.162.245,00.

DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*) untuk penggajian formasi PPPK, pendanaan kelurahan, dan pendanaan layanan publik bidang Pendidikan, dan Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28 Rincian Realisasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya

No. Urut	Uraian DAU	Realisasi Per 31 Desember 2025 (Rp)
1.	Pendanaan kelurahan	1.400.000.000,00
2.	Penggajian formasi PPPK	7.158.086.809,00
3.	Pendanaan layanan publik bidang Pendidikan	29.825.805.000,00
4.	Pendanaan layanan publik bidang Kesehatan	8.918.956.000,00
5.	Pendanaan layanan publik bidang Pekerjaan Umum	-
	Jumlah	**47.302.847.809,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.1.1.2.3 Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)-Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Alokasi transfer DAK kepada kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik).

Realisasi DAK Fisik per 31 Desember 2025 yang ditransfer ke kas daerah sebesar **Rp8.848.258.410,00** atau **81,76%** dari alokasi DAK Fisik 2025 sebesar **Rp10.821.511.000,00.** Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar **Rp10.766.768.288,00** terjadi penurunan realisasi pendapatan DAK Fisik sebesar **Rp1.918.509.878,00** atau **17,82%**.

Penyaluran DAK dilakukan secara triwulanan dengan rincian tahap I sebesar 30%, tahap II dan III sebesar 25% dan tahap IV sebesar 20%. Pengajuan pencairan DAK ke pemerintah pusat diajukan apabila penyerapan SP2D mencapai minimal 75%. Berikut rincian anggaran dan realisasi DAK Fisik berdasarkan bidang:

Tabel 29 Rincian Anggaran dan Realisasi DAK Fisik TA 2025

No	Rincian DAK	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	-	-	-	675.590.000,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	214.449.000,00	204.096.996,00	95,17	993.508.527,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	-	-	2.943.484.969,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.283.126.000,00	1.039.009.820,00	80,97	-
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	-	-	-	169.200.000,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	-	-	-	5.984.984.792,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	4.983.993.000,00	3.480.761.594,00	69,83	-
8	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	4.339.943.000,00	4.124.390.000,00	95,03	-

No	Rincian DAK	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Jumlah	**10.821.511.000,00**	**8.848.258.410,00**	**81,76**	**10.766.768.288,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.1.1.2.4 Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Transfer Khusus - DAK Non Fisik yang pada dasarnya merupakan perubahan nomenklatur dari dana transfer lainnya pada transfer ke Daerah yaitu dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

Realisasi DAK Non Fisik per 31 Desember 2025 yang ditransfer ke kas daerah sebesar **Rp91.209.342.578,00** atau **99,62%** dari alokasi DAK Non Fisik 2025 sebesar **Rp91.553.177.190,00.** Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar **Rp84.237.114.249,00** terjadi kenaikan realisasi pendapatan DAK Non Fisik sebesar **Rp6.972.228.329,00** atau **8,28%**.

Berikut rincian anggaran dan realisasi DAK Non Fisik:

Tabel 30 Rincian Anggaran dan Realisasi DAK Non Fisik TA 2025

No	Rincian DAK	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	26.050.348.988,00	26.038.929.878,00	99,95	26.077.111.359,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.081.500.000,00	1.081.500.000,00	100,00	1.355.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	44.115.152.000,00	45.311.726.300,00	102,71	37.681.343.000,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	785.000.000,00	455.750.000,00	58,05	797.966.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.065.220.000,00	1.054.100.000,00	98,95	774.375.000,00
7	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	645.455.000,00	625.431.800,00	96,89	630.000.000,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	298.158.000,00	298.158.000,00	100,00	355.601.200,00
13	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	-	-	-	263.575.500,00
14	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2.501.000.000,00	2.172.300.700,00	86,85	1.690.887.100,00
16	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690.000,00	302.797.160,00	59,87	520.000.000,00
17	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	1.993.920.000,00	1.991.840.500,00	99,89	2.050.955.885,00
18	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	60.000.000,00
19	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	6.960.329.000,00	6.325.404.038,00	90,87	5.420.214.885,00
20	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.632.093.202,00	4.632.093.202,00	100,00	6.560.084.320,00
22	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	691.911.000,00	691.911.000,00	100,00	-
23	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	182.400.000,00	182.400.000,00	100,00	-
	Jumlah	**91.553.177.190,00**	**91.209.342.578,00**	**99,62**	**84.237.114.249,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Penjelasan terkait DAK Non Fisik :

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun anggaran 2025 dialokasikan pada kelompok pendapatan transfer sub rincian objek Dana transfer Khusus – DAK Non Fisik. Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tanpa melalui kas daerah (BUD). Dana langsung ditransfer ke rekening sekolah penerima dana BOS. Pencatatan pada LRA berdasarkan SP2B yang disah oleh BUD.

Alokasi DAK Non Fisik-BOS Reguler termasuk didalamnya untuk bantuan operasional sekolah (BOS) pada satuan pendidikan swasta. Adapun jumlah transfer DAK Non Fisik-BOS Reguler ke satuan pendidikan swasta sebagai berikut:

Tabel 31 Realisasi Dana BOS Sekolah Swasta TA 2025

No.	Nama Sekolah	TRANSFER BOS OLEH PUSAT		
		Sem I	Sem II	Total
1	SD Regina Pacis T.Pandan	118.910.000,00	117.256.260,00	236.166.260,00
2	SD Muhammadiyah T.Pandan	59.690.000,00	59.329.010,00	119.019.010,00
3	SD Anugrah T.Pandan	135.360.000,00	135.090.771,00	270.450.771,00
4	SD IT Bina Insani T.Pandan	179.540.000,00	179.510.000,00	359.050.000,00
5	SD UNIVERSAL	213.850.000,00	213.199.010,00	427.049.010,00
6	SD Muhammadiyah 2 T.Pandan	52.170.000,00	52.170.000,00	104.340.000,00
7	SD Alam Aqila	29.140.000,00	22.764.500,00	51.904.500,00
TOTAL SD SWASTA		**788.660.000,00**	**779.319.551,00**	**1.567.979.551,00**
1	SMP PGRI 1 T.Pandan	33.630.000,00	33.608.000,00	67.238.000,00
2	SMP PGRI 2 T.Pandan	31.920.000,00	31.851.800,00	63.771.800,00
3	SMP Regina Pacis T.Pandan	82.080.000,00	81.894.139,00	163.974.139,00
4	SMP Yaperbel T.Pandan	18.240.000,00	18.155.000,00	36.395.000,00
5	SMP Muhammadiyah T.Pandan	29.070.000,00	28.967.000,00	58.037.000,00
6	SMP Anugrah T.Pandan	95.760.000,00	95.760.000,00	191.520.000,00
7	SMP Keluarga Universal T.Pandan	112.290.000,00	112.193.200,00	224.483.200,00
8	SMP IT Bina Insani T.Pandan	62.130.000,00	62.120.000,00	124.250.000,00
TOTAL SMP SWASTA		**465.120.000,00**	**464.549.139,00**	**929.669.139,00**
TOTAL SD & SMP SWASTA		**1.253.780.000,00**	**1.243.868.690,00**	**2.497.648.690,00**

Sumber: Rekapan SP2B (diolah)

Pedoman pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelola Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk tahun anggaran 2025.

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah di bidang kesehatan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat dialokasikan pada kelompok pendapatan transfer sub rincian objek Dana transfer Khusus – DAK Non Fisik-BOKKB Akreditasi Puskesmas. Penyaluran dana BOK Puskesmas dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke Rekening Puskesmas, adapun pengelolaan dana BOK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan.

5.1.1.2.5 Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja nasional kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Pada APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 tidak menerima Dana Insentif Daerah.

5.1.1.2.6 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Besaran nilai Dana Desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, PMK Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan PMK 81 tahun 2025 tentang perubahan atas PMK 108 tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Desa Tahun Anggaran 2025.

Penyaluran dana desa dibagi dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan:

a. Tahap I sebesar 60% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi dana desa untuk BLT desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima.
b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi dana desa untuk BLT desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh.

Realisasi penyaluran Dana Desa dari RKUN sebagai berikut:

Tabel 32 Realisasi Dana Desa TA 2025

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Dana Desa Tahap I	23.547.787.200,00	21.917.023.800,00
2.	Dana Desa Tahap II	17.072.799.600,00	18.259.923.870,00
3.	Insentif Desa	-	1.300.644.000,00
	Jumlah	**40.620.586.800,00**	**41.477.591.670,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Penyaluran Dana Desa dari RKUN hanya mencapai **97,61%** dari pagu Dana Desa sebesar **Rp41.614.636.000,00** sisa pagu merupakan transfer Dana Desa Tahap II dari Desa Air Raya, Tanjung Rusa, Padang Kandis, Batu Itam, dan Keciput yang tidak disalurkan sebesar **Rp994.049.200,00** hal ini dikarenakan keterlambatan Desa dalam pengajuan dokumen persyaratan wajib pengajuan Dana Desa tahap II sehingga menyebabkan pencairan Dana Desa tahap II tidak terealisasi 100%**.** Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar **Rp41.477.591.670,00** terjadi penurunan realisasi pendapatan Dana Desa sebesar **Rp857.004.870,00** atau **2,07%**.

5.1.1.2.7 Insentif Fiskal

Dana Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kelompok kategori kesejahteraan masyarakat menurut provinsi/Kabupaten/Kota yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penghapusan kemiskinan ekstrem,penurunan stunting, penggunaan produk dalam negeri dan percepatan belanja daerah.

Besaran nilai Dana Insentif Fiskal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 dan PMK Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah.

Tabel 33 Realisasi Dana Insenif Fiskal TA 2025

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Dana Insentif Fiskal Tahap I	10.293.434.500,00	7.988.160.500,00
2.	Dana Insentif Fiskal Tahap II	10.293.434.500,00	7.988.160.500,00
	Jumlah	**20.586.869.000,00**	**15.976.321.000,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Penyaluran Dana Insentif Fiskal dari RKUN mencapai **100%** dari pagu Dana Insentif Fiskal sebesar **Rp20.586.869.000,00**.

Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan perhitungan pembagian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang penetapan dana bagi hasil pajak provinsi yang meliputi bagi hasil PKB, BBNKB, bagi hasil PBB-KB dan bagi hasil pajak pengambilan

dan pemanfaatan air permukaan, hasil pajak rokok serta bantuan keuangan dari provinsi dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1.2.8 Pendapatan Bagi Hasil

Penerimaan atas pendapatan bagi hasil pajak berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang penetapan dana bagi hasil pajak provinsi yang meliputi bagi hasil PKB, BBNKB, bagi hasil PBB-KB dan bagi hasil pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. serta bagi hasil pajak rokok. Tata cara pembagian sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011. Pada Tahun 2025 penerimaan pendapatan dana bagi hasil pajak provinsi dianggarkan sebesar **Rp42.743.036.393,00** dan terealisasi sebesar **Rp46.262.718.168,00** atau **108,23%** yang merupakan pembagian bagi hasil pajak periode tahun 2025 dan kurang bayar pembagian bagi hasil pajak periode tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar **Rp59.001.661.334,00** terjadi penurunan realisasi pendapatan bagi hasil pajak provinsi sebesar **Rp12.738.943.166,00** atau **21,59%**.

Realisasi penerimaan transfer bagi hasil pajak provinsi sebagai berikut:

Tabel 34 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil TA 2025

No	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	4.325.376.767,00	4.458.270.783,00	103,07	14.094.802.688,00
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.175.405.140,00	1.263.561.342,00	107,50	5.199.621.087,00
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	24.646.008.275,00	26.707.688.193,00	108,36	28.309.804.590,00
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	2.270.561.341,00	2.794.317.043,00	123,06	2.478.456.566,00
5	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	10.325.684.870,00	11.038.880.807,00	106,90	8.918.976.403,00
	Jumlah	**42.743.036.393,00**	**46.262.718.168,00**	**108,23**	**59.001.661.334,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Adapun rincian pendapatan transfer bagi hasil pajak provinsi masing-masing objek pajak dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

5.1.1.2.9 Bantuan Keuangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi berupa Bantuan Keuangan dari Provinsi pada tahun 2025 dialokasikan sesuai Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 100.3.3.1/527/BAKUDA/2025 tanggal 28 Oktober 2025 tentang Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025.

Dari jumlah alokasi sebesar **Rp1.781.282.000,00** hanya terealisasi sebesar **Rp1.666.032.500,00** atau **93,52%** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 35 Rincian Realisasi Bantuan Keuangan TA 2025

Bantuan Keuangan dari Provinsi	PAGU Dana Sesuai SK Gubernur	Realisasi Per 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi Per 31 Desember 2024 (Rp)
Bantuan pendidikan ke satuan pendidikan nonformal	80.000.000,00	60.000.000,00	75,00	0,00
Insentif guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di pulau	360.000.000,00	323.400.000,00	89,83	0,00
Bantuan keuangan untuk Marbot Masjid	124.362.000,00	124.362.000,00	100,00	0,00
Bantuan keuangan untuk Guru Ngaji	115.920.000,00	115.920.000,00	100,00	0,00
Bantuan keuangan untuk Kelompok Masyarakat Berprestasi	150.000.000,00	141.950.000,00	94,63	0,00

Bantuan Keuangan dari Provinsi	PAGU Dana Sesuai SK Gubernur	Realisasi Per 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi Per 31 Desember 2024 (Rp)
Bantuan Keuangan untuk Pemuka Agama (Muslim)	660.000.000,00	660.000.000,00	100,00	0,00
Bantuan Keuangan untuk Pemuka Agama (Non Muslim)	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00
Penyusunan DED Rehabilitasi/Pembangunan Tambat Labuh Baro Kab. Belitung	150.000.000,00	99.400.500,00	66,26	0,00
Stimulus Persiapan Persalinan Bagi Ibu Hamil	117.000.000,00	117.000.000,00	100,00	0,00
Pembangunan Monumen Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	3.971.626.000,00
Jumlah	**1.781.282.000,00**	**1.666.032.500,00**	**93,52**	**3.971.626.000,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.1.1.3 Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan berupa penerimaan yang berasal dari pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2025 penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak dianggarkan lagi ini dikarenakan terdapat pengalihan penyajian pencatatan objek Pendapatan BLUD yang bersumber dari Pelayanan Kesehatan yang sebelumnya dicatat pada objek Lain-lain PAD yang sah sejak perubahan APBD Tahun 2025,sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Kabupaten Belitung Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Tabel 36 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

No	Objek Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	-	-	10.777.416.768,00
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**10.777.416.768,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rekapitulasi pendapatan menurut klasifikasi ekonomi. organisasi dan fungsi dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

5.1.2 Belanja

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah dalam rangka menyelenggaraan operasional pemerintah daerah. Belanja Operasi selanjutnya diklasifikasikan menurut jenis belanja menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, subsidi, hibah, bantuan sosial. Pada Tahun 2025 belanja operasi dianggarkan sebesar **Rp 888.104.600.616,70** dan terealisasi sebesar **Rp798.966.103.189,53** atau **89,96%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar **Rp885.984.171.231,78** terjadi penurunan realisasi belanja operasi sebesar **Rp87.018.068.042,25** atau **9,82%**. Penurunan ini disebabkan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 37 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2025

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Pegawai	529.950.395.509,00	473.457.900.870,00	89,34	475.569.482.472,00
2	Belanja Barang dan Jasa	335.543.976.031,70	303.357.300.325,53	90,40	363.320.239.519,78
3	Belanja Subsidi	648.688.228,00	540.823.627,00	83,37	638.399.797,00
4	Belanja Hibah	21.495.325.230,00	21.162.331.642,00	98,45	46.220.077.443,00
5	Belanja Bantuan Sosial	466.215.618,00	447.746.725,00	96,03	235.972.000,00
	Total Belanja Operasi	**888.104.600.616,70**	**798.966.103.189,53**	**89,96**	**885.984.171.231,78**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang yang dibayarkan kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Belitung dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara dan ASN.

Belanja pegawai mencakup antara lain: Belanja Gaji dan Tunjangan. Belanja Tambahan Penghasilan ASN. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN. Belanja Pegawai dana BOS dan Belanja Pegawai BLUD.

Pada Tahun 2025 belanja pegawai dianggarkan sebesar **Rp529.950.395.509,00** dan terealisasi sebesar **Rp473.457.900.870,00** atau **89,34%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar **Rp475.569.482.472,00** terjadi penurunan realisasi belanja pegawai sebesar **Rp2.111.581.602,00** atau **0,44%** Hal tersebut disebabkan adanya penurunan belanja pegawai BLUD, Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK dan tambahan penghasilan berdasarkan petimbangan objektif lainnya ASN pada tahun 2025.

Rincian belanja pegawai sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025

No	Objek Belanja Pegawai	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	268.395.211.185,00	234.437.268.335,00	87,34	233.031.430.698,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	203.260.105.916,00	187.743.241.192,00	92,36	155.968.439.956,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	42.843.419.399,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.841.288.000,00	12.687.561.649,00	91,66	12.869.165.644,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	962.717.194,00	780.402.103,00	81,06	446.691.471,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	816.000.000,00	801.600.000,00	98,23	784.800.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	42.675.073.214,00	37.007.827.591,00	86,72	29.625.535.304,00
	Total Belanja Pegawai	**529.950.395.509,00**	**473.457.900.870,00**	**89,34**	**475.569.482.472,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Perhitungan belanja pegawai sebagai berikut:

	Dalam rupiah
Nilai SP2D Belanja Pegawai	**390.682.596.979,00**
Ditambah :	
SP2B Belanja Pegawai BLUD RSUD dr. H Marsidi Judono	**29.306.800.647,00**
SP2B Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	**7.701.026.944,00**
SP2B Belanja Pegawai Tunjangan Profesi Guru dan Tamsil	**45.767.476.300,00**
Dikurangi :	
Pengembalian Belanja Pegawai (CP)	**(20.962.194,00)**
Jumlah Belanja Pegawai	**473.457.900.870,00**

Pengembalian belanja (*contra pos*) pada belanja pegawai sebesar **Rp20.962.194,00** terdiri dari:

Tabel 39 Rincian Pengembalian Belanja pada Belanja Pegawai TA 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pengembalian gaji dan tunjangan	14.068.894,00
2.	Pengembalian belanja tambahan penghasilan PNS	6.893.300,00
	Jumlah	20.962.194,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2025 berdasarkan OPD dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

Penjelasan lainnya terkait belanja pegawai:

1. Belanja Tambahan Penghasilan PNS (TPP) merupakan tambahan penghasilan bagi PNS dalam rangka meningkatkan motivasi dan produktifitas kinerja serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. Pemberian tambahan sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. Dengan adanya peraturan ini maka honor-honor kegiatan bagi PNS yang melekat pada kegiatan sudah ditiadakan dan dialihkan penganggarannya pada belanja TPP tersebut.
2. Belanja pegawai BLUD merupakan belanja pegawai pada BLUD RSUD dr. H. Marsidi Judono dan BLUD Puskesmas yang sumber pembiayaannya berasal dari pendapatan BLUD. Belanja pegawai dibukukan berdasarkan SPB yang disahkan oleh BUD.
3. Belanja Pegawai untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) adalah alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru ASN daerah, di mana TPG diberikan pada guru bersertifikat sebagai penghargaan profesional, sementara Tamsil diberikan kepada guru ASN yang belum bersertifikat sebagai tambahan penghasilan.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai. Akun ini juga menampung objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat seperti Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang bersumber dari dana DAK BOP PAUD dan BOP Kesetaraan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang memiliki kegiatan di bidang pendidikan seperti kelompok belajar TPA PAUD.

Pada Tahun 2025 belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar **Rp335.543.976.031,70** dan terealisasi sebesar **Rp303.357.300.325,53** atau **90,40%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar **Rp363.320.239.519,78** terjadi penurunan realisasi belanja barang dan jasa sebesar **Rp59.962.939.194,25** atau **16,50 %**.

Rincian belanja barang dan jasa sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025

No	Objek Belanja	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	52.459.176.473,00	46.409.816.150,68	88,46	62.654.241.648,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	4.168.100,00	4.140.344,00	99,33	-
	Jumlah Belanja Barang	**52.463.344.573,00**	**46.413.956.494,68**	**88,46**	**62.654.241.648,00**
3	Belanja Jasa Kantor	86.053.992.516,00	74.180.757.408,00	86,20	87.297.486.826,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	36.859.869.764,00	34.132.823.304,00	92,60	33.252.595.612,00
5	Belanja Sewa Tanah	-	0,00	0,00	4.000.000,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.319.608.250,00	1.741.553.494,00	75,07	2.405.622.126,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	714.720.358,00	553.993.975,00	77,51	1.007.354.000,00
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	33.000.000,00	32.500.000,00	98,48	88.560.000,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.692.520.300,00	2.211.647.938,00	82,14	5.551.682.749,00

No	Objek Belanja	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.085.847.950,00	1.073.739.750,00	98,88	1.143.267.710,00
11	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	-	-	-	16.074.000,00
12	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.146.500.000,00	973.756.599,00	84,93	1.378.777.596,00
13	Belanja Kursus/Pelatihan. Sosialisasi. Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.100.250.000,00	1.489.532.500,00	70,92	2.523.394.134,00
14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	269.136.103,00
15	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	58.115.300,00	57.165.134,00	98,36	31.993.092,00
	Jumlah Belanja Jasa	**133.064.424.438,00**	**116.447.470.102,00**	**87,51**	**134.969.943.948,00**
14	Belanja Pemeliharaan Tanah	-	-	-	-
15	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.054.589.342,00	14.033.581.151,99	93,21	17.407.060.267,00
16	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.125.259.987,00	7.852.527.684,86	96,64	10.516.524.162,06
17	Belanja Pemeliharaan Jalan. Jaringan. dan Irigasi	18.025.428.238,04	16.958.591.904,00	94,08	18.834.560.958,72
18	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	90.000.000,00	89.911.110,00	99,90	208.469.687,00
	Jumlah Belanja Pemeliharaan	**41.295.277.567,04**	**38.934.611.850,85**	**94,28**	**46.966.615.074,78**
19	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.221.610.037,00	22.752.160.717,00	86,76	45.354.751.107,00
20	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-	-	126.895.607,00
21	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.585.025.500,00	5.019.451.300,00	89,87	8.180.432.000,00
22	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.689.686.000,00	11.122.702.500,00	95,14	8.279.670.500,00
23	Belanja Barang dan Jasa BOS	-	-	-	18.304.974.839,00
	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	17.643.922.703,00	17.558.632.279,00	99,51	-
24	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	392.802.000,00	392.052.000,00	99,80	378.405.460,00
25	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	184.547.000,00	184.547.000,00	100,00	182.310.000,00
26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	47.003.336.213,66	44.531.716.082,00	94,74	37.921.999.336,00
	Total Belanja Barang dan Jasa	**335.543.976.031,70**	**303.357.300.325,53**	**90,40**	**363.320.239.519,78**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Perhitungan belanja barang dan jasa sebagai berikut:

	dalam rupiah
Nilai SP2D Belanja Barang dan Jasa	**235.499.783.773,53**
Ditambah :	
SP2B Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD dr. H Marsidi Judono	**40.697.784.709,00**
SP2B Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas	**3.833.931.373,00**
SP2B Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	**17.558.632.279,00**
SP2B Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)	**576.599.000,00**

SP2B Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	**5.650.777.191,00**
Dikurangi :	
Pengembalian Belanja Barang dan Jasa (CP)	**(460.208.000,00)**
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	**303.357.300.325,53**

Pengembalian belanja (*contra pos*) pada Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp460.208.000,00** terdiri dari:

Tabel 41 Rincian Pengembalian Belanja pada Belanja Barang dan Jasa TA 2025

No	Uraian	OPD	Jumlah (Rp)
1.	Setoran kelebihan pembayaran Honorarium Tim pelaksana kegiatan sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Dindikbud	1.800.000,00
2.	Setoran kelebihan pembayaran perjalanan dinas an. Yayan Afrianti	Dindikbud	144.500,00
3.	Setoran kelebihan pembayaran Honorarium Narsumber Kegiatan perlindungan, pengembangan ,Pemanfaatan Obyek pemajuan Kebudayaan	Dindikbud	1.100.000,00
4.	Setoran kelebihan pembayaran Honorarium Tim pelaksana kegiatan sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Dindikbud	1.800.000,00
5.	Setoran pengembalian kelebihan pembayaran TBP 19.02/06.0/001326/UP Tahun 2025 Bantuan Provinsi untuk penghargaan Prestasi Bidang Pendidikan	Dindikbud	300.000,00
6.	Setoran pengembalian biaya perjalanan dinas luar daerah bulan Februari 2025 ke Jakarta An. SUKSESYADI	Dinkes	791.900,00
7.	Setoran pengembalian honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Uang Piket) an. Andri, Anita, Fajar, Ria, dan Puspa Bulan Juli 2025	Satpolpp	3.075.000,00
8.	Setoran pengembalian belanja dana Token Listrik bulan Juni 2025	Dishub	369.123.000,00
9.	Setoran pengembalian kelebihan pesanan barang Alat Tulis Kantor an. CV. Penyairan Indah	Diskominfo	157.000,00
10.	Setoran pengembalian belanja makan minum Aktivitas Lapangan atas kesalahan sub kegiatan dari BOKP ke Orientasi.pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga	DPPKBPMD	3.025.000,00
11.	Setoran pengembalian dari Bag. Hukum SETDA kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Setda	147.000,00
12.	Setoran pengembalian belanja pemeliharaan Gedung GIC tahun 2025 a.n. CV SELATAN JAYA	Dispar	69.885.000,00
13.	Setoran pengembalian kelebihan pembayaran Biaya penginapan Panitia Pelaksana JPT Pratama Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN TA. 2025	BKPSDM	570.000,00
14.	Setoran Pengembalian kesalahan bayar JKK Non PNS Kecamatan Tg. Pandan	Kec. Tg Pandan	39.600,00
15.	Setoran pengembalian Honorarium Tenaga Administrasi Bagian Bulan Juni 2025 pada kelurahan Lesung Batang	Kel. Lesung Batang	8.250.000,00
	Jumlah		**460.208.000,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa berdasarkan OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

Daftar nama penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang bersumber dari DAK BOSP PAUD TA 2025 pada **Lampiran 6.**

Penjelasan lainnya terkait belanja barang dan jasa:

1. Belanja barang dan jasa dana BOS merupakan belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang dikelola satuan pendidikan dasar (SD/SMP Negeri). Pencatatan belanja barang dan jasa berdasarkan SPB yang disahkan oleh BUD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Bantuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah, Pedoman pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971 – 7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran. Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

2. Belanja barang dan jasa BLUD merupakan belanja barang dan jasa pada BLUD RSUD dr. H. Marsidi Judono dan BLUD Puskesmas yang sumber pembiayaannya berasal dari pendapatan BLUD. Belanja barang dan jasa dibukukan berdasarkan SP2BP yang disahkan oleh BUD.

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik daerah (BUMD dan /atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja subsidi diberikan kepada Kredit Usaha Kecil Menengah (KUKM) berupa subsidi biaya bunga kredit pada Bank Sumsel Babel dan biaya pengikatan Jaminan Notarial. Pemberian subsidi ini sebagai pendukung pelaksanaan program pengembangan ekonomi kerakyatan melalui penguatan koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan menengah. Tata cara pembayaran subsidi bunga sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama antara PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan Pemerintah Kabupaten Belitung tentang Program Pengembangan Ekonomi Kerakyatan melalui perkuatan Koperasi. Usaha Mikro. Usaha Kecil. dan Menengah Addendum Kedua Nomor 009/TJP/PKS/2016 dan Nomor 181/004/PK/II/2016. Selain itu belanja subsidi juga diberikan kepada PDAM dalam rangka membantu biaya produksi air minum agar tersedia pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Perusahaan Air Minum Kabupaten Belitung.

Pada Tahun 2025 belanja subsidi dianggarkan sebesar **Rp648.688.228,00** dan terealisasi sebesar **Rp540.823.627,00** atau **83,37%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar **Rp638.399.797,00** terjadi penurunan realisasi belanja subsidi sebesar **Rp97.576.170,00** atau **15,28%**.

Anggaran dan realisasi belanja subsidi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi TA 2025

No	Objek Belanja Subsidi	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja subsidi kepada BUMD	537.073.627,00	537.073.627,00	100,00	636.899.797,00
2	Belanja subsidi kepada koperasi	111.614.601,00	3.750.000,00	3,35	1.500.000,00
	Jumlah	**648.688.228,00**	**540.823.627,00**	**83,37**	**638.399.797,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Anggaran Belanja Subsidi pada tahun anggaran 2025 sebesar **Rp648.688.228,00** direncanakan untuk 2 (dua) jenis pembiayaan. yaitu:

1. Belanja Subsidi kepada BUMD diberikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belitung sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Perusahaan Air Minum Kabupaten Belitung.

   Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Belitung Nomor 13 Tahun 2019 dihitung berdasarkan selisih kurang tarif rata-rata dengan harga pokok produksi setelah diaudit.

   Dalam hal Bupati memutuskan tarif lebih kecil dari yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh *(full cost recovery)* Pemerintah Daerah akan menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.

   Besaran subsidi ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung.
2. Belanja subsidi berupa subsidi biaya bunga bank untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Belitung dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan surat Keputusan Bupati Belitung tentang pemberian hibah daerah. Hibah berupa uang/barang dianggarkan di OPD pada kelompok belanja operasi yang diuraikan dalam jenis belanja hibah objek belanja hibah kepada pemerintah dan belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan.

Mekanisme pemberian hibah mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Tahun 2025 belanja hibah dianggarkan sebesar **Rp21.495.325.230,00** dan terealisasi sebesar **Rp21.162.331.642,00** atau **98,45%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar **Rp46.220.077.443,00** terjadi penurunan realisasi belanja hibah sebesar **Rp25.057.745.801,00** atau **54,21%**.

Selain itu pada tahun 2025 ini belanja Dana BOS untuk sekolah swasta dicatat sebagai belanja hibah berdasarkan Permendagri No 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah.

Anggaran dan realisasi belanja hibah pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2025

No	Objek Belanja Barang	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	325.000.000,00	325.000.000,00	100,00	22.701.415.600,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.210.000.000,00	7.068.990.422,00	98,04	12.093.903.552,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.448.135.230,00	1.393.418.030,00	96,22	3.432.099.500,00
4	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.050.000.000,00	2.031.964.000,00	99,12	4.058.115.000,00
5	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	3.400.260.000,00	3.323.340.000,00	97,73	-
6	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	388.050.000,00	368.850.000,00	95,05	2.565.340.041,00
7	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.627.320.000,00	1.627.320.000,00	100,00	1.369.203.750,00
8	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	2.638.810.000,00	2.628.898.690,00	99,62	-
9	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.566.360.000,00	1.564.280.500,00	99,86	-
10	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	841.390.000,00	830.270.000,00	98,67	-
	Jumlah	**21.495.325.230,00**	**21.162.331.642,00**	**98,45**	**46.220.077.443,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Belanja Hibah tahun 2025 diberikan kepada lembaga pemerintah non kementerian yang berada dalam daerah Kabupaten Belitung yaitu Kepolisian Resort Belitung. Sedangkan hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berkedudukan di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Belitung.

Perhitungan realisasi belanja hibah sebagai berikut:

	dalam rupiah
Nilai SP2D/BP Belanja hibah	**16.237.928.030,00**
Ditambah :	
Nilai SP2B Belanja Hibah Dana BOS dan BOP	**5.023.449.190,00**

Dikurangi :

Pengembalian Belanja Hibah(CP)	**(99.045.578,00)**
Jumlah Belanja hibah	**21.162.331.642,00**

Berikut rincian belanja hibah tahun 2025:

No	Uraian	OPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
A.	**Hibah Kepada pemerintah Pusat**			
1.	Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat (Hibah Uang Untuk Kepolisian Resor Belitung) NPHD No. 181/01/NPHD/I/2025 Tanggal 13 Maret 2025	Sekretariat Daerah	325.000.000,00	-
	Sub Jumlah		**325.000.000,00**	**-**
B.	**Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**			
1	Belanja Hibah Uang kepada Kwarcab Pramuka Belitung NPHD No. 400.4.8/02/NPHD/Dispora/2025 Tanggal 31 Januari 2025	Dinas Pemuda dan Olahraga	400.000.000,00	70.442.964,00
2	Belanja Hibah Uang kepada DPD KNPI Kab.Belitung NPHD No. 400.4.8/01/NPHD/Dispora/20252025 Tanggal 31 Januari 2025	Dinas Pemuda dan Olahraga	200.000.000,00	715.320,00
3	Belanja Hibah Uang kepada PMI Kabupaten Belitung NPHD No. 400.6.2.3/180.4/NPHD/DINKES/2025 Tanggal 12 Februari 2025	Dinas Kesehatan	1.200.000.000,00	3.023,00
4	Belanja Hibah KONI Kabupaten Belitung NPHD No. 181/03/NPHD/DISPORA/2025 Tanggal Juni 2025	Dinas Pemuda dan Olahraga	800.000.000,00	-
5	Belanja Hibah Uang kepada LPTQ Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/01/NPHD/II/2025 Tanggal 13 Juni 2025	Sekretariat Daerah	3.350.000.000,00	1.806.304,00
6	Belanja Hibah Uang kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/03/NPHD/II/2025 Tanggal 23 Juni 2025	Sekretariat Daerah	450.000.000,00	-
7	Belanja Hibah Uang Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/02/NPHD/II/2025 Tanggal 23 Juni 2025	Sekretariat Daerah	130.000.000,00	481.967,00
8	Belanja Hibah Uang kepada Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/04/NPH D/II/2025 Tanggal 23 Juni 2025	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	15.000,00
9	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan An Nawawi Mubaarok NPHD No. 100.3.8/08/NPHD/II/2025 Tanggal 15 Juli 2025	Sekretariat Daerah	75.000.000,00	-
10	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Permata Belitung NPHD No. 100.3.8/20/NPHD/II/2025 Tanggal 30 Juli 2025	Sekretariat Daerah	75.000.000,00	-
11	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Ahlul Qur'an NPHD No. 100.3.8/23/NPHD/II/2025 Tanggal 6 Agustus 2025	Sekretariat Daerah	75.000.000,00	-
12	Belanja Hibah Uang kepada Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) NPHD No. 100.3.8/19/NPHD/II/2025 Tanggal 30 Juli 2025	Sekretariat Daerah	20.000.000,00	182.000,007

No	Uraian	OPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
13	Belanja Hibah Uang kepada Badan Musyawarah Antar Gereja Lembaga Keagamaan Kristen (BAMAG-LKK) Indonesia Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/24/NPHD/II/2025 Tanggal 6 Agustus 2025	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	-
14	Belanja Hibah Uang kepada Badan Yayasan Nurul Musthofa Belitung NPHD No. 100.3.8/26/NPHD/II/2025 Tanggal 15 Agustus 2025	Sekretariat Daerah	75.000.000,00	-
15	Belanja Hibah Uang kepada Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/27/NPHD/II/2025 Tanggal 2 September 2025	Sekretariat Daerah	140.000.000,00	7.363.000,00
16	Belanja Hibah Uang kepada PKBM Sumber Ilmu (DABA Provinsi Tahun 2025)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.000.000,00	-
17	Belanja Hibah Uang kepada PKBM Cahaya Ilmu (DABA Provinsi Tahun 2025)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.000.000,00	-
18	Belanja Hibah Uang kepada PKBM Mitra Sejahtera (DABA Provinsi Tahun 2025)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.000.000,00	-
19	Belanja Hibah Uang kepada PKBM Fajrul Islam (DABA Provinsi Tahun 2025)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.000.000,00	-
20	Belanja Hibah Uang kepada PKMB Al Zahrawi (DABA Provinsi Tahun 2025)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.000.000,00	-
21	Belanja Hibah Uang kepada UPT SKB (DABA Provinsi Tahun 2025)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.000.000,00	-
	Sub Jumlah		**7.150.000.000,00**	**81.009.578,00**
C.	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**			
1.	Belanja Hibah Barang kepada Ardhiansyah (Ketua Pokdakan Bintang Laut) BAST No. 500.4.1/02/BAST-HDPE/PERIK.III/2025 Tanggal 12 Agustus 2025	Dinas Perikanan	17.138.100,00	-
2.	Belanja Hibah Barang kepada Sulaidi (Ketua Pokdakan Do'a Ibu) BAST No. 500.4.1/02/BAST-HDPE/PERIK.III/2025 Tanggal 12 Agustus 2025	Dinas Perikanan	17.138.100,00	-
3.	Belanja Hibah Barang kepada Tegar Al Gafhani (Ketua Pokdakan HSRT Betangan) BAST No. 500.4.1/02/BAST-HDPE/PERIK.III/2025 Tanggal 12 Agustus 2025	Dinas Perikanan	34.276.200,00	-
4.	Belanja Hibah Barang kepada Sunardi (Ketua Pokdakan Samudera Biru)) BAST No. 500.4.1/02/BAST-HDPE/PERIK.III/2025 Tanggal 12 Agustus 2025	Dinas Perikanan	28.563.500,00	-
5.	Belanja Hibah Barang kepada Yuliani (Ketua Kelompok UMKM LinggaBAST No. 500.4.1/ 002 /APBD.BAST/PPKL/2025 Tanggal 14 Agustus 2025	Dinas Perikanan	46.731.000,00	-
6.	Belanja Hibah Barang kepada Hendra Supriadi (Ketua Pokdakan Pulau Simpor) BAST No. 500.4.1/02/BAST-PKSPI/PERIK.III/2025 Tanggal 13 Oktober 2025	Dinas Perikanan	73.788.000,00	-
7.	Belanja Hibah Barang kepada Arfian (Ketua KUB Palo Panjang) BAST No. 000.2.6.1/01-MKP/PPTK-PKNK/PERIK.II/2025 Tanggal 3 Desember 2025	Dinas Perikanan	71.550.600,00	-

No	Uraian	OPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
8.	Belanja Hibah Barang kepada Jalaludin(Ketua KUB Cahya) BAST No. 000.2.6.1/01-BK/PPTK-PSUPT/PERIK.II/2025Tanggal 3 Desember 2025	Dinas Perikanan	31.468.500,00	-
9.	Belanja Hibah Barang kepada Sunardi (Ketua KUB Kepiting Laut) BAST No. 000.2.6.1/02-BK/PPTK-PSUPT/PERIK.II/2025Tanggal 3 Desember 2025	Dinas Perikanan	35.209.755,00	-
10.	Belanja Hibah Barang kepada Juliandi (Ketua KUB Ketam Mirah) BAST No. 000.2.6.1/03-BK/PPTK-PSUPT/PERIK.II/2025Tanggal 3 Desember 2025	Dinas Perikanan	31.468.500,00	-
11.	Belanja Hibah Barang kepada Baharum (Ketua KUB Permata Senja) BAST No. 000.2.6.1/04-BK/PPTK-PSUPT/PERIK.II/2025Tanggal 3 Desember 2025	Dinas Perikanan	31.468.500,00	-
12.	Belanja Hibah Barang kepada Alio (Ketua KUB Tajor BAST No. 000.2.6.1/01-JK/PPTK-PSUPT/PERIK.II/2025 Tanggal 3 Desember 2025	Dinas Perikanan	100.455.000,00	-
13.	Belanja Hibah Barang kepada Gabungan Kelompok Tani Tunas Baru BAST No. 000.2.6.1/17/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	17.791.851,00	-
14.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Kampong Agro Makmur BAST No. 000.2.6.1/07/BAST-CABAI2025/TPH/DKPP/2025 dan 000.2.6.1/01/BAST-CULTIVATOR RD4/PSP/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	83.168.020,00	-
15.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Putra Tanjung Birik BAST No. 000.2.6.1/126/BAST-PBT/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	62.356.320,00	-
16.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Karya Tani BAST No. 000.2.6.1/14/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.234.882,00	-
17.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Kremak Jaya BAST No. 000.2.6.1/15/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12.939.528,00	-
18.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Manggis Lestari BAST No. 000.2.6.1/128/BAST-PBT/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	122.878.800,00	-
19.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Tanjung Kruing BAST No. 000.2.6.1/02/BAST-CULTIVATOR RD4/PSP/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	55.500.000,00	-
20.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Agro Kenupu BAST No. 000.2.6.1/19/BASTPADI/TPH /DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	24.261.615,00	-
21.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Bakul BAST No. 000.2.6.1/10/BAST-PADI/TPH/ DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	40.436.025,00	-
22.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Licin BAST No. 000.2.6.1/16/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.852.323,00	-
23.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Manda Maju Bersama BAST No. 000.2.6.1/12/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.469.764,00	-
24.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Simpor BAST No. 000.2.6.1/20/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025 dan 000.2.6.1/21/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.469.764,00	-

No	Uraian	OPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
25.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Dukong Jaya Mandiri BAST No. 000.2.6.1/08/BAST-CABAI2025/TPH/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	27.668.020,00	-
26.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Ibul Makmur BAST No. 000.2.6.1/22/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.234.882,00	-
27.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Jaya Mandiri Lestari BAST No. 000.2.6.1/125/BAST-PBT/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	62.300.320,00	-
28.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Kelekak Tintang Sejahtera BAST No. 000.2.6.1/11/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.087.205,00	-
29.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Kridatama BAST No. 000.2.6.1/18/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	16.174.410,00	-
30.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Mandiri Jaya BAST No. 000.2.6.1/03/BAST-CABAIDAU2025/TPH/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	37.770.525,00	-
31.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Sawah Harapan BAST No. 000.2.6.1/23/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.852.323,00	-
32.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Setia BAST No. 000.2.6.1/09/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.087.205,00	-
33.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Sinar Jaya BAST No. 000.2.6.1/04/BAST-CABAIDAU2025/TPH/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	37.770.525,00	-
34.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Suga Ketakong Makmur BAST No. 000.2.6.1/13/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.852.323,00	-
35.	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Sumber Makmur BAST No. 000.2.6.1/06/BAST-CABAIDAU2025/TPH/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	18.885.262,50	-
36	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Sumber Jaya BAST No. 000.2.6.1/05/BAST-CABAIDAU2025/TPH/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	18.885.262,50	-
37	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Tunas Jaya BAST No. 000.2.6.1/127/BAST-PBT/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	62.356.320,00	-
38	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Sumber Rezeki BAST No. 000.2.6.1/129/BAST-PBT/DKPP/2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	122.878.800,00	-
	Sub Jumlah		**1.393.418.030,00**	**-**
D.	**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**			
1.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Al Mihrab NPHD No. 100.3.8/07/NPHD/II/2025 Tanggal 23 Juni 2025	Sekretariat Daerah	175.000.000,00	-
2.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan At Taqwa NPHD No. 100.3.8/06/NPHD/II/2025 Tanggal 23 Juni 2025	Sekretariat Daerah	45.000.000,00	-
3.	Belanja Hibah Uang kepada Gereja Katolik Paroki Regina Pacis NPHD No. 100.3.8/05/NPHD/II/2025 Tanggal 23 Juni 2025	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	-
4.	Belanja Hibah Uang kepada Gereja Persekutuan Kristen Perawas NPHD No. 100.3.8/10/NPHD/II/2025 Tanggal 15 Juli 2025	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	-
5.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid As Sajadah NPHD No. 100.3.8/16/NPHD/II/2025 Tanggal 21 Juli 2025	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	-
6.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Attaubah NPHD No. 100.3.8/17/NPHD/II/2025 Tanggal 21 Juli 2025	Sekretariat Daerah	90.000.000,00	-

No	Uraian	OPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
7.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Gunung Cangir NPHD No. 100.3.8/14/NPHD/II/2025 Tanggal 21 Juli 2025	Sekretariat Daerah	100.000.000,00	-
8.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Asysuhada NPHD No. 100.3.8/12/NPHD/II/2025 Tanggal 21 Juli 2025	Sekretariat Daerah	175.000.000,00	-
9.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Anugerah Sejahtera Abadi NPHD No. 100.3.8/15/NPHD/II/2025 Tanggal 21 Juli 2025	Sekretariat Daerah	75.000.000,00	2.850.000,00
10.	Belanja Hibah Uang kepada Perkumpulan Lembaga Masjid Nurul Hikmah NPHD No. 100.3.8/15/NPHD/II/2025 Tanggal 15 Juli 2025	Sekretariat Daerah	120.000.000,00	-
11.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Riyadu Sholihiin NPHD No. 100.3.8/11/NPHD/II/2025 Tanggal 21 Juli 2025	Sekretariat Daerah	65.000.000,00	-
12.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Nurussholeh NPHD No. 100.3.8/13/NPHD/II/2025 Tanggal 21 Juli 2025	Sekretariat Daerah	75.000.000,00	-
13.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Jami Al Ihsan NPHD No. 100.3.8/18/NPHD/II/2025 Tanggal 30 Juli 2025	Sekretariat Daerah	75.000.000,00	-
14.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Al Iman NPHD No. 100.3.8/21/NPHD/II/2025 Tanggal 5 Agustus 2025	Sekretariat Daerah	45.000.000,00	1.340.000,00
15.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Raudhatul Hidayah Belitung NPHD No. 100.3.8/21/NPHD/II/2025 Tanggal 6 Agustus 2025	Sekretariat Daerah	100.000.000,00	-
16.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid An Nur NPHD No. 100.3.8/25/NPHD/II/2025 Tanggal 6 Agustus 2025	Sekretariat Daerah	110.000.000,00	-
17.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Al Muhajirin NPHD No. 100.3.8/28/NPHD/II/2025Tanggal 2 September 2025	Sekretariat Daerah	40.000.000,00	-
18.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Yayasan Al Amin NPHD No. 100.3.8/33/NPHD/II/2025 Tanggal 2 September 2025	Sekretariat Daerah	125.000.000,00	13.795.000,00
19.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Baitul Jannah NPHD No. 100.3.8/32/NPHD/II/2025 Tanggal 2 September 2025	Sekretariat Daerah	90.000.000,00	50.000,00
20.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Hidayatullah NPHD No. 100.3.8/30/NPHD/II/2025 Tanggal 2 September 2025	Sekretariat Daerah	75.000.000,00	1.000,00
21.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Assholihin NPHD No. 100.3.8/31/NPHD/II/2025 Tanggal 2 September 2025	Sekretariat Daerah	140.000.000,00	0,00
22.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Baitul Mamur NPHD No. 100.3.8/29/NPHD/II/2025 Tanggal 2 September 2025	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	0,00
23.	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Mishbahul Munir NPHD No. 100.3.8/34/NPHD/II/2025 Tanggal 10 Oktober 2025	Sekretariat Daerah	130.000.000,00	0,00
	Sub Jumlah		**2.050.000.000,00**	**18.036.000,00**
E.	**Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**			
1	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Hanura BAST No. 210/001/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 5 Mei 2025	Badan Kesbangpol	136.860.000,00	-
2	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Persatuan Pembangunan BAST No. 210/004/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 5 Mei 2025	Badan Kesbangpol	122.970.000,00	-
3	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Keadilan Sejahtera BAST No. 210/007/BA-BKPP/BKBP/V/202 tanggal 5 Mei 2025	Badan Kesbangpol	107.160.000,00	-
4	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Bulan Bintang BAST No 210/009/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 5 Mei 2025	Badan Kesbangpols	96.300.000,00	-

No	Uraian	OPD	Besaran Dana (Rp)	Pengembalian Sisa Dana ke Kasda (Rp)
5	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Golongan Karya BAST No 210/002/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 5 Mei 2025	Badan Kesbangpol	155.340.000,00	-
6	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Kebangkitan Bangsa BAST No 210/008/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 5 Mei 2025	Badan Kesbangpol	152.505.000,00	-
7	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Amanat Nasional BAST No. 210/005/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 5 Mei 2025	Badan Kesbangpol	104.055.000,00	-
8	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Nasional Demokrat BAST No. 210/003/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 5 Mei 2025	Badan Kesbangpol	163.515.000,00	-
9	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan BAST No. 210/006/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 5 Mei 2025	Badan Kesbangpol	221.595.000,00	-
10	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Gerakan Indonesia Raya BAST No. 210/010/BA-BKPP/BKBP/VI/2025 tanggal 7 Juli 2025	Badan Kesbangpol	151.680.000,00	-
11	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan BAST No. 210/011/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 7 Juli 2025	Badan Kesbangpol	119.070.000,00	-
12	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan BAST No. 210/012/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 1 Oktober 2025	Badan Kesbangpol	96.270.000,00	-
	Sub Jumlah		**1.627.320.000,00**	**-**
F.	**Belanja Hibah Barang Dana BOS untuk Satdikdas Negeri**			
1	BOP PAUD Negeri	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	443.400.000,00	-
2	BOP SD Negeri	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.968.240.000,00	-
3	BOP SMP Negeri	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	877.200.000,00	-
4	BOP pendidikan Kesetaraan Negeri (SKB)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	34.500.000,00	-
	Sub Jumlah		**3.323.340.000,00**	**-**
G.	**Belanja Hibah Barang Dana BOS untuk Satdikdas Swasta**			
1	BOP SD Swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	202.680.000,00	-
2	BOP SMP Swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	97.920.000,00	-
3	BOP pendidikan Kesetaraan Swasta (PKBM)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	68.250.000,00	-
	Sub Jumlah		**368.850.000,00**	**-**
H.	**Belanja Hibah Dana BOSP-BOS**			**-**
1	BOS Reguler SD Swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.567.979.551,00	-
2	Bos Kinerja SD Swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	58.750.000,00	-
3	BOS Reguler SMP Swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	929.669.139,00	-
4	Bos Kinerja SMP Swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	72.500.000,00	-
	Sub Jumlah		**2.628.898.690,00**	**-**
H.	**Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD**			**-**
1	BOP reguler PAUD Swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.534.280.500,00	-
2	BOP Kinerja PAUD Swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.000.000,00	-
	Sub Jumlah		**1.564.280.500,00**	**-**
I.	**Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan**			**-**
1	BOP reguler Kesetaraan Swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	785.270.000,00	-
2	BOP Kinerja Kesetaraan Swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	45.000.000,00	-
	Sub Jumlah		**830.270.000,00**	**-**
	Jumlah		**21.261.377.220,00**	**99.045.578,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Belanja Hibah kepada Partai Politik diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Belitung. Alokasi belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik TA. 2025 ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/087/KEP/BKBP/2025 tentang Penetapan Besaran Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Partai Politik TA. 2025.

Belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan kepada partai politik yang mendapatkan jatah kursi di DPRD. Partai politik menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya kepada BPK RI sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melebihi batas waktu dan/ atau tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban akan dikenakan sanksi yaitu tidak diberikan bantuan keuangan sampai dengan dilakukannya pemeriksaan oleh BPK RI.

Berdasarkan Permendagri No 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah bahwa belanja Dana BOS pada satdikdas maupun satdikmen dicatat sebagai belanja hibah.

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

Belanja Bantuan Sosial pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar **Rp466.215.618,00** terealisasi sebesar **Rp447.746.725,00**atau **96,04%** sampai dengan 31 Desember 2025. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 202 sebesar **Rp235.972.000,00** terjadi kenaikan realisasi belanja bantuan sosial sebesar **Rp211.774.725,00** atau **89,75%**.

Bantuan sosial diberikan dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022. Bantuan sosial juga ditujukan dalam rangka membantu pemerintah dalam rangka mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem seperti yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022-2025. Selain itu mekanisme Belanja Bantuan Sosial berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Program Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/355/KEP/DSPPPA/2023 tentang Penetapan Besaran Nominal Bantuan Program Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

Rincian anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025

No	Objek Belanja	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	210.544.618,00	202.200.000,00	96,03	23.500.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	230.671.000,00	221.089.800,00	95,84	212.472.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	25.000.000,00	24.456.925,00	97,82	-
	Jumlah	**466.215.618,00**	**447.746.725,00**	**96,03**	**235.972.000,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/atau mengadakan barang modal. Klasifikasi menurut jenis belanja terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Penganggaran Belanja Modal pada APBD TA 2025 adalah mencakup anggaran terkait perolehan/terbentuknya fisik aset tetap tersebut, dan biaya lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan diatribusikan ke nilai aset tetap tersebut. Adapun komponen biaya lainnya tersebut terbagi menjadi dua penganggaran, yaitu:

1. Dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa terkait biaya langsung. yaitu biaya yang langsung berhubungan dengan perolehan aset tetap. seperti biaya konsultan perencanaan dan konsultan pengawas, biaya pematangan lahan dan biaya sertifikasi untuk tanah.
2. Dianggarkan pada Belanja Modal terkait biaya administrasi. yaitu biaya penunjang kegiatan perolehan aset tetap. tetap, seperti honorarium panitia pengadaan dan honorarium panitia pemeriksa barang, biaya ATK dokumen tender/lelang, biaya pengumuman lelang dan biaya lainnya dalam rangka menunjang perolehan aset tetap.

Pada Tahun 2025 belanja modal dianggarkan sebesar **Rp43.619.973.682,00** dan terealisasi sebesar **Rp38.837.469.692,00** atau **89,03%**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar **Rp67.145.369.203,62** terjadi penurunan realisasi belanja modal sebesar **Rp28.307.899.511,62** atau **42,16%**.

Anggaran dan realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

No	Objek Belanja Modal	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
1	**Belanja Modal Tanah**				
2	Belanja Modal Tanah Persil	500.000.000,00	491.325.000,00	98,26	4.135.660.290,00
3	**Sub Jumlah**	**500.000.000,00**	**491.325.000,00**	**98,26**	**4.135.660.290,00**
4	**Belanja Peralatan dan Mesin**				
5	Belanja Modal Alat Besar Darat	-	-	-	69.800.000,00
6	Belanja Modal Alat Bantu	-	-	-	90.000.000,00
7	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	-	4.785.175.450,00
8	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	-	2.950.000,00
9	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	130.300.000,00	126.540.000,00	97,11	25.735.000,00
11	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	147.829.800,00	-	-	-
12	Belanja Modal Alat Ukur	12.273.700,00	12.200.000,00	99,39	15.506.000,00
13	Belanja Modal Alat Pengolahan	10.122.000,00	10.122.000,00	100,00	35.000.000,00
14	Belanja Modal Alat Kantor	337.399.560,00	295.913.813,00	87,70	1.175.067.000,00
15	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.673.840.060,00	4.329.614.068,00	92,63	5.025.688.560,00
16	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	-	132.000.000,00
17	Belanja Modal Alat Studio	758.098.930,00	578.538.800,00	76,31	613.281.000,00
18	Belanja Modal Alat Komunikasi	7.872.120,00	7.720.000,00	98,06	94.300.000,00
19	Belanja Modal Peralatan Pemancar	-	-	-	1.760.000.000,00
20	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.023.420.564,00	1.682.299.440,00	83,14	1.927.057.092,00
21	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	-	-	-	176.045.694,00
22	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	266.785.525,00	266.069.197,00	99,73	342.850.000,00
23	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	-	-	-	8.000.000,00
24	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	19.000.000,00	18.759.000,00	98,73	129.600.000,00
25	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	-	-	-	45.000.000,00
26	Belanja Modal Komputer Unit	1.437.711.200,00	1.100.433.494,00	76,54	3.155.793.000,00

No	Objek Belanja Modal	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
27	Belanja Modal Peralatan Komputer	403.633.070,00	325.720.412,00	80,69	1.509.316.500,00
28	Belanja Modal Sumur	-	-	-	47.600.000,00
29	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	100.000.000,00	99.900.000,00	99,90	-
30	Belanja Modal Alat Deteksi	80.000.000,00	79.809.000,00	99,76	-
31	Belanja Modal Alat SAR	-	-	-	-
32	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	-	-	-	18.000.000,00
33	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	405.743.980,00	397.491.969,00	97,96	1.190.910.000,00
34	Belanja Modal Peralatan Olahraga	140.040.000,00	131.550.000,00	93,93	97.740.000,00
35	Belanja Modal Peralatan Mesin BOS	-	-	-	3.428.167.239,00
36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	4.106.886.726,00	4.101.965.126,00	99,88	-
37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	27.050.000,00	27.050.000,00	100,00	-
38	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	16.900.000,00	16.900.000,00	100,00	32.900.000,00
39	Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD	2.013.266.335,00	1.735.907.040,00	86,22	396.600.000,00
40	**Sub Jumlah**	**17.118.173.570,00**	**15.344.503.359,00**	**89,63**	**26.330.082.535,00**
41	**Belanja Gedung dan Bangunan**				
42	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.351.088.800,00	8.374.324.399,00	80,90	6.135.285.292,62
43	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	-	-	-
44	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	-	-	-	3.971.626.000,00
45	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.381.400.000,00	580.004.580,00	41,98	1.365.338.746,00
46	Belanja Modal Bangunan Gedung BLUD	-	-	-	6.946.027.000,00
47	**Sub Jumlah**	**11.732.488.800,00**	**8.954.328.979,00**	**76,32**	**18.418.277.038,62**
48	**Belanja Jalan. Irigasi dan Jaringan**				
49	Belanja Modal Jalan	4.329.756.764,00	4.288.190.560,00	99,03	9.599.644.811,00
50	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	346.164.560,00	345.656.000,00	99,85	777.501.000,00
51	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.380.726.710,00	1.378.947.000,00	99,87	1.406.207.700,00
52	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	25.410.000,00	25.391.250,00	99,92	74.776.500,00
53	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	557.262.890,00	556.109.647,00	99,79	139.705.779,00
54	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.153.502.041,00	1.149.757.000,00	99,67	1.492.665.500,00
55	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	-	-	-	289.500.000,00
56	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	385.765.000,00	309.345.200,00	80,19	-
57	Belanja Modal Jaringan Air Minum	3.014.000.000,00	2.942.623.000,00	97,63	916.114.000,00

No	Objek Belanja Modal	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
58	Belanja Modal Jaringan Listrik	-	-	-	-
59	**Sub Jumlah**	**11.192.587.965,00**	**10.996.019.657,00**	**98,24**	**14.696.115.290,00**
60	**Belanja Aset Tetap Lainnya**				
61	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	9.990.000,00	9.435.000,00	94,44	-
62	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	-	-	-	62.000.000,00
63	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	-	-	-	3.338.250.200,00
64	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	2.952.522.347,00	2.927.871.697,00	99,16	-
65	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD	52.708.000,00	52.708.000,00	100,00	-
66	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan	22.383.000,00	22.383.000,00	100,00	-
67	**Sub Jumlah**	**3.037.603.347,00**	**3.012.397.697,00**	**99,17**	**3.400.250.200,00**
68	**Belanja Modal Aset Lainnya**				
69	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	39.120.000,00	38.895.000,00	99,42	164.983.850,00
70	**Sub Jumlah**	**39.120.000,00**	**38.895.000,00**	**99,42**	**164.983.850,00**
71	**Total Belanja Modal**	**43.619.973.682,00**	**38.837.469.692,00**	**89,03**	**67.145.369.203,62**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Perhitungan Belanja Modal sebagai berikut:

	Dalam Rupiah
Nilai SP2D Belanja Modal	**30.137.061.420,00**
Ditambah :	
SP2BP Belanja Modal BLUD RSUD dr. H Marsidi Judono dan BLUD Puskesmas	**1.735.907.040,00**
SPB Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS	**4.101.965.126,00**
SPB Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dana BOS	**2.927.871.697,00**
SPB Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOP	**43.950.000,00**
SPB Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dana BOP	**75.091.000,00**
Dikurangi :	
Pengembalian Belanja (CP)	**184.376.591,00**
Jumlah Belanja Modal	**38.837.469.692,00**

Anggaran dan realisasi belanja modal tahun anggaran 2025 berdasarkan OPD dapat dilihat pada **Lampiran 7** dan dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar **Rp1.250.000.000,00** dan tidak terealisasi.

5.1.2.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari pemerintah daerah ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan dan dana bagi hasil ke pemerintah desa oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

Pada Tahun 2025 belanja transfer dianggarkan sebesar **Rp106.639.282.805,00** dan terealisasi sebesar **Rp105.622.017.300,00** atau **99,04%**. Jika dibandingkan dengan realisasi

tahun 2024 sebesar **Rp107.849.220.370,00** terjadi penurunan realisasi belanja transfer sebesar **Rp. 2.227.203.070,00** atau **2,07%**.

Anggaran dan realisasi belanja transfer tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 46 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2025

No	Objek Belanja Transfer	Tahun Anggaran 2025			Realisasi 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Bagi Hasil	11.811.046.305,00	11.787.830.000,00	99,80	9.753.057.800,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	94.528.236.500,00	93.834.187.300,00	99,26	98.096.162.570,00
	Jumlah	**106.339.282.805,00**	**105.622.017.300,00**	**99,32**	**107.849.220.370,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Belanja Bagi hasil merupakan alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten belitung kepada desa sebesar 100% dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Belitung. Besaran pembagian dana bagi hasil sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penetapan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2025.

Transfer bantuan keuangan desa diberikan kepada 42 desa yang tersebar pada lima Kecamatan yang ada di Kabupaten Belitung. Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa terdiri dari Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD dan alokasi dana APBN berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 dan PMK Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan PMK 81 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Besaran bagian Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2025.

Pada alokasi Belanja Bantuan Keuangan juga terdapat realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi sebagai tindaklanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4/9595/SJ tentang Bantuan keuangan kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penanganan Masyarakat terdampak bencana alam. Pemerintah Kabupaten Belitung memberikan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi tersebut diatas masing-masing **Rp.100.000.000,00** sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/1012/KEP/BPKAD/2025 untuk Pemerintah Provinsi Aceh, Nomor 100.3.4/1013/KEP/BPKAD/2025 untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan 100.3.4/1014/KEP/BPKAD/2025 untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Alokasi dan realisasi transfer bagi hasil dan bantuan keuangan masing-masing desa dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

Adapun ringkasan belanja menurut fungsi dan klasifikasi, urusan pemerintahan, dapat dilihat pada **Lampiran 10** sedangkan pencapaian kinerja berdasarkan program dan kegiatan dapat dilihat pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025.

5.1.3 Pembiayaan (*financing*)

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

5.1.3.1.1 Penggunaan SiLPA

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Jumlah anggaran dan realisasi pembiayaan penerimaan daerah Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Anggaran dan Realisasi SiLPA TA 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Per 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi Per 31 Desember 2024 (Rp)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	99.023.375.881,70	99.023.375.881,70	100,00	185.632.032.036,77
Jumlah	**99.023.375.881,70**	**99.023.375.881,70**	**100,00**	**185.632.032.036,77**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Realisasi penerimaan SiLPA Tahun 2025 terdiri dari:

Uraian	Jumlah Saldo (Rp)
1. Saldo anggaran lebih pada BUD	74.510.781.254,04
2. Saldo anggaran lebih BLUD dr. H Marsidi Judono	22.477.704.910,66
3. Saldo anggaran lebih dana Kapitasi JKN pada FKTP	221.461.131,00
4. Saldo anggaran lebih Dana BOS Reguler	210.292.788,00
5. Saldo anggaran lebih Dana BOS Kinerja	-
6. Saldo anggaran lebih Dana BOP	-
7. Saldo anggaran lebih Dana BOK	1.603.135.798,00

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman/utang dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan/transfer ke dana cadangan.

Pada tahun anggaran 2025 tidak dianggarkan untuk pengeluaran pembiayaan.

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Komponen Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:

1. **Saldo Anggaran Lebih Awal**

   Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar **Rp99.023.375.881,70**.

2. **Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**

   Penggunaan SAL Tahun 2025 sebesar **Rp99.023.375.881,70**.

3. **Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)**

   Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2025 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar **Rp95.840.033.255,26** yang berasal dari:

   a. Tidak tercapainya target anggaran pendapatan daerah sebesar **Rp(348.235.666,91)**;
   b. sisa pelaksanaan belanja daerah sebesar **Rp96.188.266.922,17**;
   c. sisa pelaksanaan pembiayaan **Rp0,00**;

4. **Lain-lain**

   Tidak terdapat koreksi lain-lain pada Laporan Perubahan SAL Tahun 2025.

5. **Saldo Anggaran Lebih Akhir**

   Saldo Anggaran Lebih Akhir Per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp95.840.033.255,26** yang terdiri dari:

Uraian	Jumlah Saldo (Rp)
a. Saldo anggaran lebih pada BUD	73.461.449.567,10
b. Saldo anggaran lebih BLUD dr. H Marsidi Judono	20.627.264.302,16
c. Saldo anggaran lebih dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.052.762.703,00
d. Saldo anggaran lebih Dana BOS Reguler	113.354.098,00
e. Saldo anggaran lebih Dana BOS Kinerja	776,00
f. Saldo anggaran lebih Dana BOP	750.000,00
g. Saldo anggaran lebih Dana BOK	584.451.809,00
Jumlah	**95.840.033.255,26**

SiLPA per 31 Desember 2025 jika disandingkan dengan saldo akhir kas pada LAK sebesar **Rp95.841.319.876,26** terdapat perbedaan saldo sebesar **Rp1.286.621,00**, saldo tersebut merupakan sisa kas yang berasal dari transaksi kas namun tidak mempengaruhi transaksi Perubahan SAL yang terdiri dari :

Tabel 48 Rincian Transaksi Sisa Kas

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Saldo kas BOS dikarenakan sekolah buka rekening baru yang ada NPSN pada akhir tahun 2021.	150.000,00
2. Penyesuaian penambahan Kas BOS pada SDN 25 Tanjungpandan yang berasal dari pengembalian atas kelebihan belanja tahun 2022 sesuai LHP Evaluasi Dana BOS Tahun Anggaran 2022 No:700/074/PKeuPD/INSPEK/2023	1.357.800,00
3. Kelebihan setoran atas potongan PFK dari kas daerah ke RKUN Tahun 2023.	(221.179,00)
Total	**1.286.621,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Saldo anggaran lebih pada BUD sebesar **Rp73.461.228.388,10** termasuk didalamnya sisa dana transfer pusat antara lain :

Uraian	Jumlah Saldo (Rp)
a. SiLPA DAU BG	-
b. SiLPA DAU SG (Ditentukan Penggunaannya)	-
• Sisa tahun sebelumnya	2.601.426.342,00
• Sisa tahun 2025	1.171.079.342,00
c. SiLPA DBH SG (Ditentukan Penggunaannya)	334.688.600,00
d. SiLPA DBH BG	-
e. DAK Non Fisik	1.657.667.893,00
f. Insentif Fiskal	-

5.3 Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

5.3.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Total aset yang disajikan di neraca per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp 2.197.115.465.214,80** yang terdiri dari aset lancar sebesar **Rp179.511.094.020,30** dan aset non lancar sebesar **Rp2.017.604.371.194,50**.

Jika dibandingkan dengan nilai aset tahun 2024 sebesar **Rp2.279.019.807.974,44** mengalami penurunan sebesar **Rp81.904.342.759,64** atau 3**,59 %**.

5.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Saldo kas di kas daerah adalah saldo rekening giro pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas daerah. Rekening kas daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/803/KEP/BPKAD/2024 tanggal 30 Desember 2024 Tentang Penetapan Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025. Adapun rekening untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas daerah sebagai berikut:

1. Rekening giro **Nomor 146.300.0001** pada Bank Sumsel Babel Cabang Tanjungpandan, rekening ini digunakan untuk transaksi pembayaran SP2D kepada OPD maupun Pihak ketiga.
2. Rekening giro **Nomor 146.300.0004** pada Bank Sumsel Babel Cabang Tanjungpandan, rekening ini untuk menampung penerimaan daerah yang berasal dari PAD, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang sah.
3. Rekening giro **Nomor 0131.01.000262.30.8** pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjungpandan, rekening ini untuk menampung penerimaan daerah yang berasal dari Pajak Penerangan Jalan.
4. Rekening giro **Nomor 0131.01.000964.30.8** pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjungpandan, rekening ini untuk menampung penerimaan daerah yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan.

Penunjukan bank sebagai pemegang rekening kas umum daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 100.3.4/799/KEP/BPKAD/2024 Tanggal 30 Desember 2024 tentang Penunjukan Bank Sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah, Pemegang Rekening Penerimaan Dan Pemegang Rekening Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025.

Sisa kas pada rekening giro milik Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2025 sebesar **Rp73.461.228.388,10** yang merupakan saldo kas dari rekening giro yang dikelola BUD**.** Jika dibandingkan dengan nilai kas di kas daerah tahun 2024 sebesar **Rp14.510.560.075,04** mengalami kenaikan sebesar **Rp58.950.668.313,06** atau **406,26%**. Kenaikan kas dikarenakan adanya pencairan setara kas berupa Deposito pada bulan Desember 2025 dan dipindahbukukan ke rek. 1463000004.

Adapun rincian saldo kas daerah yang berupa rekening giro pada bank yang dikelola oleh BUD sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Saldo Kas

Rekening Giro	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
Bank Sumsel Cab. Tanjungpandan		
146.300.0001	10.303.726.557,56	7.316.174.295,09
146.300.0004	63.157.501.830,54	7.194.385.779,95
BRI Cabang Tanjungpandan		
0131-01-000262-30-8	-	-
0131-01-000964-30-8	-	-
Jumlah	**73.461.228.388,10**	**14.510.560.075,04**

Sumber: Rekening Koran Bank

1. Saldo kas daerah per 31 Desember 2025 menurut laporan bank pada rekening giro Nomor 146.300.0001 sebesar **Rp10.303.726.557,56**, tidak terdapat perbedaan dengan saldo kas menurut BUD.
2. Saldo kas daerah per 31 Desember 2025 menurut laporan bank pada rekening giro Nomor 146.300.0004 sebesar **Rp63.157.501.830,54**, tidak terdapat perbedaan dengan saldo kas menurut BUD.
3. Saldo kas daerah per 31 Desember 2025 menurut laporan bank pada rekening giro nomor 0131-01-000262-30-8 sebesar **Rp0,00**, rekening ini sebelumnya digunakan untuk menampung setoran penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Bunga Jasa Giro.
4. Saldo kas daerah per 31 Desember 2025 menurut laporan bank pada rekening giro nomor 0131-01-000964-30-8 sebesar **Rp0,00**, rekening ini sebelumnya digunakan untuk menampung setoran penerimaan PBB namun rekening ini tidak digunakan lagi sejak tahun 2018.
5. Tidak terdapat pembentukan maupun pencairan dana cadangan pada tahun 2023.

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke kas daerah dan/atau masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah.

Rekening kas untuk menampung penerimaan pada Bendahara Penerimaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/711/KEP/BPKAD/2025 tanggal 1 September 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/802/KEP/BPKAD/2024 tentang Penetapan Rekening Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar **Rp0,00**, seluruh saldo kas di bendahara penerimaan telah disetor ke kas daerah per 31 Desember 2025.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas daerah dan/atau masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah.

Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/711/KEP/BPKAD/2025 tanggal 1 September 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/802/KEP/BPKAD/2024 tentang Penetapan Rekening Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar **Rp0,00**, seluruh saldo kas di bendahara pengeluaran telah disetor ke kas daerah per 31 Desember 2025. Tidak terjadi kenaikan atau penurunan dari tahun sebelumnya.

5.3.1.1.4 Kas di Bendahara BLUD

Kas di Bendahara BLUD merupakan kas yang berada dibawah tanggung jawab bendahara BLUD yang sumbernya berasal dari penerimaan dan pengeluaran operasional pada unit yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU. Pada tahun 2025 selain RSUD dr. H. Marsidi Judono, Unit Pelaksana Teknis Puskesmas juga telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Saldo kas di BLUD dengan rincian saldo kas per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 50 Rincian Saldo Kas BLUD

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)
1.	Kas dibendahara Penerimaan BLUD RSUD dr. H. Marsidi Judono	20.627.264.302,16	22.477.704.910,66
2.	Kas dibendahara Pengeluaran BLUD UPT. Puskesmas Tanjungpandan	339.377.201,00	-
3.	Kas dibendahara Pengeluaran BLUD UPT. Puskesmas Air Saga	32.447.400,00	-
4.	Kas dibendahara Pengeluaran BLUD UPT. Puskesmas Perawas.	109.736.355,00	-
5.	Kas dibendahara Pengeluaran BLUD UPT. Puskesmas Sijuk	89.706.378,00	-
6.	Kas dibendahara Pengeluaran BLUD UPT. Puskesmas Tanjung Binga	125.941.739,00	-
7.	Kas dibendahara Pengeluaran BLUD UPT. Puskesmas Badau	84.376.366,00	-
8.	Kas dibendahara Pengeluaran BLUD UPT. Puskesmas Simpang Rusa	51.533.190,00	-
9.	Kas dibendahara Pengeluaran BLUD UPT. Puskesmas Membalong	54.430.508,00	-
10.	Kas dibendahara Pengeluaran BLUD UPT. Puskesmas Selat Nasik	165.213.566,00	-
	Jumlah	**21.680.027.005,16**	**22.477.704.910,66**

Sumber: Rekening Koran Bank

Saldo kas BLUD RSUD dr. H. Marsidi Judono jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar **Rp22.477.704.910,66** terjadi penurunan sebesar **Rp797.677.905,50** atau **3,55%.**

5.3.1.1.5 Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Aset Non Lancar sebagai kas yang dibatasi penggunaannya sebagai uang yang tidak memenuhi definisi aset lancar yaitu suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, dan uang yang tidak memenuhi definisi kas menurut paragraf 8 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan yaitu uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang dapat digunakan setiap saat untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebesar **Rp179.430.727,00** yang terdiri dari bunga deposito dan jasa giro jaminan reklamasi dan kesungguhan yang merupakan hak pihak ketiga yang tercatat pada rekening 146.301.0374 dan rekening 146.301.0093 atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung dengan total sebesar **Rp179.430.727,00**. Jika di dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan saldo bunga deposito dan jasa giro jaminan reklamasi dan kesungguhan hal ini dikarenakan penerimaan jasa giro pada rekening 146.301.0374 atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung pada tahun 2025.
Berikut perbandingan saldo kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2025:

Tabel 51 Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)
1.	Kas yang dibatasi penggunaannya atas Bunga deposito dan jasa giro jaminan reklamasi dan kesungguhan	179.430.727,00	178.536.273,00
	Jumlah	**179.430.727,00**	**178.536.273,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Saldo kas yang dibatasi penggunaannya jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar **Rp178.536.273,00** terjadi kenaikan sebesar **Rp894.454,00** atau **0,50%**.

5.3.1.1.6 Kas di Bendahara JKN

Kas di Bendahara JKN merupakan sisa kas yang berasal dari pengelolaan dana JKN pada FKTP yang telah diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (BUD). Dengan telah ditetapkannya tata kelola keuangan BLUD pada FKTP maka pengelolaan dana kapitasi JKN menjadi pendapatan BLUD pada masing-masing FKTP. Saldo kas sisa dana kapitasi tahun sebelumnya menjadi saldo awal kas BLUD.

Saldo Kas Dana Kapitasi JKN pada Bendahara FKTP terkait dengan pengelolaan Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2025 sebesar **Rp0,00**, dengan rincian saldo kas sebagai berikut:

Tabel 52 Saldo Kas Dana Kapitasi Per Puskesmas

No	Kas Dana Kapitasi JKN pada Bendahara FKTP	Saldo Per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)
1.	Puskesmas Tanjungpandan	-	182.811.647,00
2.	Puskesmas Air Saga	-	16.013.308,00
3.	Puskesmas Perawas	-	1.663.644,00
4.	Puskesmas Sijuk	-	1.000.440,00
5.	Puskesmas Tanjung Binga	-	969.082,00
6.	Puskesmas Badau	-	-
7.	Puskesmas Simpang Rusa	-	12.788.188,00
8.	Puskesmas Membalong	-	6.091.252,00
9.	Puskesmas Selat Nasik	-	123.570,00
	Jumlah	-	**221.461.131,00**

Sumber: Rekening Koran Bank

5.3.1.1.7 Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan sisa kas yang berasal dari pengelolaan dana BOS yang telah diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (BUD).

Dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan berasal dari pemerintah pusat yang ditransfer **langsung** ke rekening pengelolaan dana BOS sekolah setiap triwulan dan digunakan seluruhnya untuk mengelola BOS. Saldo kas pada bendahara pengelola dana BOS pada per 31 Desember 2025 sebesar **Rp115.612.674,00,** jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar **Rp211.800.588,00** terjadi penurunan sebesar **Rp96.187.914,00** atau **45,41%**, yang terdiri dari :

Tabel 53 Saldo Kas Dana BOS

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)
1.	Saldo Dana BOS Reguler	114.861.898,00	209.998.812,00
2.	Saldo Dana BOS Afirmasi dan Kinerja	776,00	1.801.776,00
3.	Saldo Dana BOP	750.000,00	-
	Total	**115.612.674,00**	**211.800.588,00**

Sumber: Rekening Koran Bank

Saldo kas tersebut terdiri saldo kas di Bendahara BOS Reguler pada Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp72.758.341,00, pada Bendahara BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) sebesar Rp42.103.557,00. Rekapitulasi saldo kas BOS Reguler per sekolah pada **Lampiran 11** dan Rekapitulasi saldo kas BOS Kinerja dan BOSP per sekolah pada **Lampiran 11a dan 11b.**

Saldo kas di bendahara BOS jika dibandingkan dengan SiLPA dana BOS pada LRA tahun 2025 sebesar Rp114.104.874,00 terdapat selisih sebesar Rp1.507.800,00. Selisih tersebut berasal dari penambahan Kas BOS pada SDN 25 Tanjungpandan yang berasal dari pengembalian atas kelebihan belanja tahun 2022 sesuai LHP Evaluasi Dana BOS Tahun Anggaran 2022 No:700/074/PKeuPD/INSPEK/2023 sebesar Rp1.357.800,00 dan saldo kas BOS dikarenakan sekolah membuka rekening baru yang ada NPSN pada akhir tahun 2021 sebesar Rp150.000,00.

5.3.1.1.8 Setara Kas

Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas pada Pemerintah Kabupaten Belitung ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Setara Kas pada Pemerintah Kabupaten Belitung berupa deposito berjangka dengan masa jatuh tempo 1 bulan, sampai dengan akhir tahun 2025 setara kas per 31 Desember 2025 sebesar **Rp0,00** seluruh deposito pada akhir tahun telah dicairkan dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah no. 146.300.0004.

Tabel 54 Saldo Setara Kas

Rekening Giro/Deposito	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
Deposito 1 Bulan		
Bank Sumsel Cab. Tanjungpandan		
146-41-02022	-	15.000.000.000,00
146-41-02122	-	15.000.000.000,00
146-41-00723	-	15.000.000.000,00
146-41-00823	-	15.000.000.000,00
Jumlah	**-**	**60.000.000.000,00**

Sumber: Rekening Koran Bank

Saldo setara kas jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar **Rp60.000.000.000,00** terjadi penurunan nilai setara kas hal ini karenakan adanya pencairan dan penyetoran deposito ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan yang menyatakan bahwa deposito dan/atau investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember .

5.3.1.1.9 Kas lainnya

Kas Lainnya merupakan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari potongan pajak pemerintah yang belum disetor ke rekening RKUN. Pada tahun 2025 tidak terdapat potongan pajak yang belum disetor ke RKUN.

Tabel 55 Rincian Pajak yang Belum Disetor

No	Uraian	Jenis Potongan Pajak (Rp)				Jumlah (Rp)
		PPh ps 21	PPh ps 23	PPN	PFK lainnya	
1	-	-	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.3.1.1.10 Kas Dana BOK Puskesmas

Kas Dana BOK Puskesmas sebesar **Rp584.451.809,00** yang disajikan di Neraca merupakan Kas di Bendahara dana Bantuan Operasional Kesehatan pada UPT Puskesmas yang berupa sisa saldo kas atas pengelolaan dana BOK tahun 2025.

Saldo kas dana Bantuan Operasional Kesehatan pada puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 56 Saldo Kas Dana BOK Per Puskesmas

No	Puskesmas	Saldo Per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)
1.	Puskesmas Tanjungpandan	74.713.616,00	244.293.857,00
2.	Puskesmas Air Saga	52.799.343,00	306.533.226,00
3.	Puskesmas Perawas	17.292.298,00	141.757.930,00
4.	Puskesmas Sijuk	56.321.007,00	130.752.376,00
5.	Puskesmas Tanjung Binga	68.003.982,00	163.667.289,00
6.	Puskesmas Badau	80.582.553,00	135.435.879,00
7.	Puskesmas Simpang Rusa	91.540.275,00	111.877.695,00
8.	Puskesmas Membalong	71.726.781,00	257.688.817,00
9.	Puskesmas Selat Nasik	71.471.954,00	111.128.729,00
	Jumlah	**584.451.809,00**	**1.603.135.798,00**

Sumber: Rekening Koran Bank

5.3.1.1.11 Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas di mana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

Pada tahun 2025 tidak terdapat investasi jangka pendek pada Pemerintah Kabupaten Belitung.

5.3.1.1.12 Piutang Pajak

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang pajak diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang pajak dapat diakui pada saat:

1. diterbitkan surat ketetapan pajak/dokumen yang sah lainnya;
2. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
3. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Akun ini menampung saldo piutang pokok pajak daerah yang terdiri dari pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, pajak reklame, dan penambangan bahan galian golongan C serta piutang pajak bumi dan bangunan. Tunggakan atas pajak galian golongan C merupakan tunggakan dari tahun 1998 s.d. tahun 2011 namun sampai dengan 31 Desember 2025 belum tertagih. Rincian piutang pajak sebagai berikut:

Tabel 57 Rincian Piutang Pajak

Objek Piutang	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	30.302.744,00	5.983.562,00
Piutang Pajak Reklame Kain	210.000,00	-
Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.900.000,00	5.100.000,00
Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya	2.750.000,00	3.050.000,00
Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya	50.330.000,00	52.990.000,00
Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	9.400.000,00	9.400.000,00
Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	16.725.950,00	16.725.950,00
Piutang Pajak Permainan Biliar dan Bowling	885.000,00	885.000,00
Pajak Air Bawah Tanah	17.803.200,00	17.562.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	348.009.138,00	348.009.138,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	24.563.437.057,00	23.657.220.223,00
Jumlah	**25.042.753.089,00**	**24.116.925.873,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Jumlah piutang pajak sebesar **Rp25.042.753.089,00** berasal dari tagihan pajak tahun 2025 yang belum dibayar oleh wajib pajak sampai akhir tahun 2025 sebesar **Rp3.231.405.966,00** dan sisanya sebesar **Rp21.811.347.123,00** piutang pajak tahun sebelumnya yang belum tertagih sampai tahun 2025.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya secara keseluruhan terdapat kenaikan saldo piutang pajak sebesar **Rp925.827.216,00**, kenaikan tersebut berasal dari penambahan piutang pajak tahun berjalan sebesar **Rp3.231.405.966,00** sedangkan pengurangan piutang pajak tahun sebelumnya sebesar **Rp(2.305.578.750,00)**. Secara umum mutasi piutang pajak sebagai berikut:

Tabel 58 Mutasi Piutang Pajak

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Piutang Awal	**24.116.925.873,00**
Pengurangan	
1. Pelunasan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	(2.657.200,00)
2. Pelunasan piutang pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	(2.200.000,00)
3. Pelunasan piutang pajak Kantin dan Sejenisnya	(300.000,00)
4. Pelunasan piutang pajak warung dan Sejenisnya	(2.660.000,00)
5. Pelunasan piutang pajak Air bawah Tanah	(252.000,00)
6. Pelunasan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	(2.297.509.550,00)
Penambahan	
1. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	26.976.382,00
2. Pajak Reklame kain	210.000,00
3. Piutang pajak Air bawah Tanah	493.200,00
4. Piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	3.203.726.384,00
Saldo Piutang akhir	**25.042.753.089,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Sedangkan penyisihan piutang tak tertagih atas piutang pajak sebagai berikut:

Tabel 59 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Pajak

No	Uraian	Kualitas Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)
		Lancar (≤ 1 thn)	Kurang Lancar (di atas 1 s/d 3 thn)	Diragukan (di atas 3 s/d 5 thn)	Macet (di atas 5 thn)	
1	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron	26.976.382,00	3.326.362,00	-	-	30.302.744,00
2	Piutang Pajak Reklame Kain	210.000,00	-	-	-	210.000,00
3	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	-	-	-	3.100.000,00	3.100.000,00
4	Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya	-	-	-	2.750.000,00	2.750.000,00
5	Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya	-	-	-	50.130.000,00	50.130.000,00
6	Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	-	-	-	9.400.000,00	9.400.000,00
7	Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/ Tari/ Busana	-	-	-	16.725.950,00	16.725.950,00
	Piutang Pajak Permainan Biliar dan Bowling	-	-	-	885.000,00	885.000,00
	Pajak Air Bawah Tanah	493.200,00	309.600,00	5.275.200,00	11.725.200,00	17.803.200,00
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	-	348.009.138,00	348.009.138,00
	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3.203.726.384,00	4.845.503.778,00	3.712.527.963,00	12.801.678.932,00	24.563.437.057,00
	Sub jumlah	**3.231.405.966,00**	**4.849.139.740,00**	**3.717.803.163,00**	**13.244.404.220,00**	**25.042.753.089,00**
	% penyisihan piutang	0%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	1.212.284.935,00	1.858.901.581,50	13.244.404.220,00	16.315.590.736,50
	Piutang Netto	**3.231.405.966,00**	**3.636.854.805,00**	**1.858.901.581,50**	**-**	**8.727.162.352,50**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Dari tabel penyisihan piutang tak tertagih terdapat jumlah penyisihan piutang tak tertagih tahun 2025 sebesar **Rp16.315.590.736,50**, sedangkan jumlah penyisihan piutang per 31 Desember 2024 sebesar **Rp14.910.346.601,00** terjadi kenaikan sebesar **Rp1.405.244.135,50** atau **9,42%**. Mutasi penyisihan piutang sebagai berikut:

Saldo awal	**14.910.346.601,00**
Pelunasan piutang tak tertagih	(521.678.165,25)
Beban penyisihan piutang tahun 2025	1.926.922.300,75
Saldo akhir	**16.315.590.736,50**

Status penagihan atas piutang pajak yang belum tertagih masih ditangani pemerintah daerah dan belum diserahkan ke PUPN/KPKNL. Tabel rincian piutang pajak dapat dilihat pada **Lampiran 12** laporan keuangan ini.

5.3.1.1.13 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan imbalan yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan. Piutang retribusi timbul dikarenakan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

Piutang retribusi dapat diakui pada saat :

1. diterbitkan surat ketetapan retribusi/dokumen yang sah lainnya;

2. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
3. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang retribusi daerah terdiri dari saldo piutang retribusi tahun sebelumnya yang belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2025, dan piutang retribusi tahun berjalan yang belum dibayar/dilunasi oleh pihak ketiga. Dasar pengenaan kewajiban pihak ketiga berdasarkan Surat Ketetapan/Keputusan yang dikeluarkan oleh dinas/instansi terkait tentang penunjukan pihak ketiga sebagai pengelola dan penetapan nilai kontrak/setoran yang menjadi kewajiban pihak ketiga selaku pengelola/pemakai tempat usaha kepada Pemerintah Kabupaten Belitung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 60 Rincian Piutang Retribusi

Objek Piutang Retribusi	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan - Dinas Kesehatan	420.392.000,00	234.381.600,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD	15.327.977.612,00	12.260.995.039,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14.912.500,00	14.912.500,00
Retribusi tempat khusus parkir	30.260.000,00	46.670.000,00
Retribusi parkir di tepi jalan umum	106.041.000,00	96.261.000,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan	12.085.000,00	12.085.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	4.000.000,00	4.000.000,00
Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan /sewa petak toko-kios dan Los	518.525.342,00	164.825.342,00
Retribusi Terminal (pemakaian tempat usaha)	71.184.000,00	85.019.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	66.582.400,00	-
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.501.290.469,00	2.405.322.014,00
Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	19.100.000,00	19.100.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	654.013.025,00	541.095.845,00
Retribusi Izin Gangguan	16.765.000,00	16.765.000,00
Jumlah	**19.763.128.348,00**	**15.901.432.340,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Jumlah piutang retribusi sebesar **Rp19.763.128.348,00** berasal dari tagihan retribusi tahun 2025 yang belum dibayar oleh wajib retribusi sebesar **Rp16.318.555.165,00** dan sisanya sebesar **Rp 3.444.573.183,00** merupakan piutang retribusi tahun sebelumnya yang belum tertagih sampai tahun 2025.

Jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar **Rp15.901.432.340,00** terdapat kenaikan saldo piutang retribusi sebesar **Rp 3.861.696.008,00**, atau **24,29%**. Kenaikan tersebut berasal dari penambahan piutang tahun berjalan sebesar **Rp15.921.873.165,00** dan koreksi kurang catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS) sebesar **Rp22.682.000,00** serta koreksi kurang catat piutang retribusi pertokoan sebesar **Rp374.000.000,00.** Sedangkan pelunasan piutang retribusi tahun berjalan sebesar **Rp12.447.044.757,00** dan koreksi lebih catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS) sebesar **Rp9.814.400,00.**

Secara umum mutasi piutang retribusi sebagai berikut:

Tabel 61 Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Piutang Awal	**15.901.432.340,00**
Pengurangan	
1. Pelunasan piutang retribusi pelayanan kesehatan-Puskesmas	(234.381.600,00)
2. Pelunasan piutang retribusi pelayanan kesehatan-RSUD	(11.919.884.537,00)
3. Pelunasan piutang retribusi tempat khusus parkir	(45.120.000,00)
4. Pelunasan piutang retribusi parkir di tepi jalan umum	(14.060.000,00)
5. Pelunasan Piutang retribusi los	(24.640.000,00)
6. Pelunasan piutang retribusi terminal (pemakaian tempat usaha)	(4.675.000,00)
7. Pelunasan piutang retribusi pemanfaatan aset daerah - sewa kios terminal	(39.250.000,00)
8. Piutang retribusi tempat rekreasi dan olahraga	(51.614.100,00)
9. Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	(165.250,00)
10. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah	(113.254.270,00)
11. Koreksi lebih catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS) pada Puskesmas Air Saga	(3.535.000,00)
12. Koreksi lebih catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS) pada Puskesmas Badau	(15.000,00)
13. Koreksi lebih catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS) pada Puskesmas Tg.Binga	(980.000,00)
14. Koreksi lebih catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS) pada Puskesmas Simpang Rusa	(4.996.000,00)

Uraian	Jumlah (Rp)
15. Koreksi lebih catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS) pada Puskesmas Membalong	(288.400,00)
Penambahan	
1. Piutang retribusi pelayanan kesehatan-Dinas Kesehatan	407.524.400,00
2. Piutang retribusi pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD dr . H. Marsidi Judono	14.986.867.110,00
3. Piutang retribusi tempat khusus parkir	28.710.000,00
4. Piutang retribusi parkir di tepi jalan umum tahun berjalan	23.840.000,00
5. Piutang retribusi los	4.340.000,00
6. Piutang pemanfaatan aset daerah - sewa kios terminal	30.090.000,00
7. Piutang retribusi pelayanan kepelabuhan	66.582.400,00
8. Piutang penjuanelretribusi tempat rekreasi dan olahraga	147.582.555,00
9. Piutang retribusi penjualan produksi usaha daerah	226.336.700,00
10. Koreksi kurang catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS) pada Puskesmas Tg.Pandan	990.000,00
11. Koreksi kurang catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS) pada Puskesmas Perawas	4.110.000,00
12. Koreksi kurang catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS) pada Puskesmas Selat Nasik	17.582.000,00
13. Koreksi kurang catat piutang retribusi pertokoan dikawasan KV Senang	374.000.000,00
Saldo Piutang akhir	**19.763.128.348,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pungutan objek penerimaan retribusi pelayanan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Rincian piutang pelayanan pendidikan sebagai berikut:

Tabel 62 Rincian Piutang Pelayanan Pendidikan 2025

Uraian	Jumlah
1. Biaya penyelenggaraan kuliah tetap	3.750.000,00
2. Biaya penyelenggaraan kuliah tidak tetap	1.585.000,00
3. Biaya praktik klinik	1.750.000,00
4. Pengembangan Pendidikan	5.000.000,00
Total	**12.085.000,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Sedangkan penyisihan piutang tak tertagih atas piutang retribusi daerah sebagai berikut:

Tabel 63 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Retribusi 2025

No	Uraian	Kualitas Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)
		Lancar (≤ 1 thn)	Kurang Lancar (di atas 1 s/d 2 thn)	Diragukan (di atas 2 s/d 3 thn)	Macet (di atas 3 thn)	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-Puskesmas	420.392.000,00	-	-	-	420.392.000,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan-RSUD	14.986.867.110,00	341.110.502,00	-	-	15.327.977.612,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-	-	-	14.912.500,00	14.912.500,00
3	Retribusi tempat khusus parkir	28.710.000,00	-	1.550.000,00	-	30.260.000,00
4	Retribusi parkir di tepi jalan umum	23.840.000,00	1.500.000,00	-	80.701.000,00	106.041.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan	-	-	-	12.085.000,00	12.085.000,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	-	-	-	4.000.000,00	4.000.000,00
7	Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan /sewa petak toko		136.000.000,00	238.000.000,00	131.645.342,00	505.645.342,00
8	Retribusi Los	4.340.000,00	-	8.540.000,00		12.880.000,00
9	Retribusi Terminal (pemakaian tempat usaha)				39.114.000,00	39.114.000,00
10	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah - Sewa Kios Terminal	30.090.000,00	1.980.000,00	-	-	32.070.000,00

No	Uraian	Kualitas Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)
		Lancar (≤ 1 thn)	Kurang Lancar (di atas 1 s/d 2 thn)	Diragukan (di atas 2 s/d 3 thn)	Macet (di atas 3 thn)	
11	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	66.582.400,00	-	-	-	66.582.400,00
12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	147.582.555,00	91.781.392,00	56.472.000,00	2.205.454.522,00	2.501.290.469,00
13	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga				19.100.000,00	19.100.000,00
14	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	226.336.700,00	142.025.750,00	134.804.280,00	150.846.295,00	654.013.025,00
15	Retribusi Izin Gangguan				16.765.000,00	16.765.000,00
	Sub Jumlah	15.934.740.765,00	714.397.644,00	439.366.280,00		19.763.128.348,00
	% Penyisihan Piutang	0%	25%	50%	2.674.623.659,00	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	178.599.411,00	219.683.140,00	100%	3.072.906.210,00
	Piutang Netto	15.934.740.765,00	535.798.233,00	219.683.140,00	2.674.623.659,00	16.690.222.138,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Dari tabel penyisihan piutang tak tertagih terdapat jumlah penyisihan piutang tak tertagih atas piutang retribusi per 31 Desember 2025 sebesar **Rp3.072.906.210,00**, jika dibandingkan dengan saldo penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2024 sebesar **Rp2.686.329.149,00** terjadi kenaikan sebesar **Rp386.577.061,00** atau **14,39 %**.

Mutasi penyisihan piutang sebagai berikut:

Saldo awal	**2.686.329.149,00**
Pelunasan piutang tak tertagih	(11.235.425,00)
Beban penyisihan piutang tahun 2025	244.812.486,00
Koreksi kurang catat penyisihan piutang retribusi	153.000.000,00
Saldo akhir	**3.072.906.210,00**

Rincian saldo piutang retribusi tercantum pada **Lampiran 13** laporan keuangan ini.

5.3.1.1.14 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Perkiraan ini untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar TP/TGR, dan Piutang Pajak/Retribusi yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Belitung namun belum diterima sampai akhir tahun.

Piutang Lain-lain PAD yang Sah yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2025 merupakan piutang yang timbul karena adanya tunggakan pungutan Pendapatan Asli Daerah selain pajak dan retribusi yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Akun ini menampung piutang atas denda keterlambatan pembayaran pajak, retribusi daerah, dan piutang atas kontribusi aset yang dikerjasamakan.

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 menyajikan saldo sebesar **Rp 1.910.766.218,80**, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 64 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 2025

Objek Piutang Lainnya	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
Denda keterlambatan pembayaran Pajak :	**367.384.497,80**	**367.384.497,80**
Pajak Galian golongan C	363.370.269,80	363.370.269,80
Pajak Hiburan	4.014.228,00	4.014.228,00
Denda keterlambatan pembayaran Retribusi	**337.598.411,00**	**239.822.837,00**
Retribusi izin gangguan/keramaian	2.833.600,00	2.833.600,00
Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan /sewa petak toko	89.760.000,00	-
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	242.520.711,00	235.036.837,00
Retribusi Terminal (pemakaian tempat usaha)	654.900,00	737.800,00
Retribusi parkir di tepi jalan umum	1.337.200,00	1.199.600,00
Retribusi Pemakaian kekayaan daerah - Penyewaan Bangunan	492.000,00	-
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	15.000,00

Objek Piutang Lainnya	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
Piutang Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD dr. H Marsidi Judono	**213.562.131,00**	**215.355.888,00**
Piutang Lain-lain PAD yang sah Lainnya	**992.000.000,00**	**33.920.000,00**
Kontribusi hasil kerjasama – PT Puncak Jaya Lestari	-	1.920.000,00
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	32.000.000,00	32.000.000,00
Koreksi kurang catat piutang kontribusi hasil kerjasama daerah pada PT. Ranati	540.000.000,00	-
Koreksi kurang catat piutang kontribusi hasil kerjasama daerah pada PT. BGR	420.000.000,00	-
Piutang kelebihan setoran potongan PFK ke RKUN	**221.179,00**	**221.179,00**
Jumlah	**1.910.766.218,80**	**856.704.401,80**

Sumber: data BPKAD (diolah)

1. Piutang Kontribusi kerjasama operasional aset Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT Puncak Jaya Lestari berdasarkan perjanjian kerjasama sebagaimana telah diaddendum dengan addendum terakhir Nomor 181/01/PK/II/2008, di mana pada pasal 1 ayat (7) disebutkan bahwa dalam hal pihak kedua menyewakan dan/atau mensubkontrakkan sebagian dari bangunan gedung kepada pihak lain harus dengan persetujuan pihak pertama dengan memberikan uang kontribusi sebesar 2,5% dari harga sewa atau sub kontrak perbulan. Pada tahun 2025 tidak terdapat piutang kontribusi kerjasama operasional dengan PT Puncak Jasa Lestari, kontribusi tersebut telah disetor ke kas daerah pada tanggal 31 Desember 2025
   Jumlah hak atas kontribusi Pemerintah Kabupaten Belitung di tahun 2025 sebesar **Rp3.902.500,00** dengan perhitungan sebagai berikut:
   Jumlah harga sewa kios yang diterima: Rp156.100.000,00
   Setoran untuk Pemkab. Belitung: Rp156.100.000,00 x 2,5% = 3.902.500,00.
2. Denda keterlambatan pembayaran Pajak Galian sebesar **Rp363.370.269,80**, jumlah ini tidak terjadi pengurangan dari tahun sebelumnya, Pajak Hiburan sebesar **Rp4.014.228,00** tidak ada pengurangan dari tahun lalu karena tidak diketahui lagi alamat masing-masing wajib pajak yang bersangkutan, sehingga upaya penagihan yang dilakukan belum berhasil.
3. Piutang kelebihan setoran potongan PFK ke RKUN merupakan piutang yang timbul akibat adanya kelebihan setoran ke RKUN atas potongan PFK sebesar **Rp221.179,00** dengan rincian sebagai berikut:
   a. Potongan PPh ps.21 atas pembayaran gaji bulan oktober pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp88.184,00.
   b. Iuran jaminan kesehatan PPPK bulan Desember 2023 pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp132.995,00
4. Piutang kontribusi hasil kerjasama daerah pada PT. Ranati merupakan Koreksi kurang catat piutang kontribusi hasil kerjasama daerah pada PT. Ranati periode Tahun 2017 – 2025 senilai Rp540.000.000,00 (60.000.000,00 x 9 tahun). Kewajiban membayar kontribusi tetap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung sebagai pendapatan daerah setiap tahun sebesar Rp60.000.000,00 sebagaimana tercantum pada pasal 5 angka 1 putusan pengadilan Nomor : 15/Pdt.G/2012/PN. Tdn tanggal 23 januari 2013 Juncto pasal 6 ayat (4) Memorandum of Understanding antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Putra Ciptawahana Sejati tentang Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Tanjung Tinggi Kabupaten Belitung Nomor : 181/01/MOU/II/2005, Nomor : 144/RNT-Dirut/I/05 tanggal 6 Januari 2025.
5. Piutang kontribusi hasil kerjasama daerah pada PT. Belitung Golf and Resorts (BGR) periode Tahun 2019 – 2025 senilai Rp420.000.000,00 (60.000.000,00 x 7 tahun). Kewajiban membayar kontribusi tetap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung sebesar Rp60.000.000,00 / tahun yang berlaku sejak mulai beroperasinya Black Rocks, Golflink Belitung sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat 4 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Belitung Golf and Resorts Nomor :181/03/MOU/II/2006, Nomor : 07/BGR-Dir/MOU/II/06 tanggal 10 Feberuari 2026 beserta perubahannya, perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Belitung Golf and Resorts tentang pelaksanaan

Pembangunan dan Pengelolaan lapangan Golf di Kawasan Wisata Pantai Tanjung Tinggi Kabupaten Belitung Nomor : 181/05/PK/II/2006, Nomor : 08/BGR-Dir/PK/V/06 tanggal 9 Mei 2006 beserta perubahannya.

Adapun piutang retribusi perizinan tertentu (iuran tetap) sebelumnya tercatat pada Ex. Dinas Pertambangan disajikan pada laporan keuangan PPKD.

Piutang lainnya berupa tunggakan atas pungutan lain-lain PAD yang sah, jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar **Rp856.704.401,80** terjadi kenaikan saldo piutang sebesar **Rp 1.054.061.817,00** atau **123,04%**. Kenaikan tersebut karena adanya pelunasan piutang tahun sebelumnya sebesar **Rp5.919.923,00** sedangkan untuk penambahan piutang lainya tahun berjalan sebesar **Rp10.221.740,00.**

Secara umum mutasi piutang lainnya sebagai berikut:

Tabel 65 Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Piutang Awal	**856.704.401,80**
Pengurangan	
Pelunasan piutang denda retribusi tempat rekreasi dan olahraga	(1.967.066,00)
Pelunasan piutang denda retribusi terminal	(82.900,00)
Pelunasan piutang denda retribusi parkir di tepi jalan umum	(141.200,00)
Pelunasan piutang jasa layanan BLUD	(1.793.757,00)
Pelunasan piutang lan-lain PAD yang sah (kontribusi hasil kerja sama pada PT. Puncak jaya Lestari)	(1.920.000,00)
Pelunasan Piutang Retribusi penjualan produksi Usaha Daerah	(15.000,00)
Penambahan	
Denda Retribusi tempat rekreasi dan olahraga	9.450.940,00
Denda Retribusi parkir di tepi jalan umum	278.800,00
Denda Retribusi Pemakaian kekayaan daerah - Penyewaan Bangunan	492.000,00
Koreksi kurang catat piutang kontribusi hasil kerjasama daerah pada PT. Ranati	540.000.000,00
Koreksi kurang catat piutang kontribusi hasil kerjasama daerah pada PT. BGR	420.000.000,00
Koreksi kurang catat piutang denda retribusi pertokoan dikawasan KV Senang	89.760.000,00
Saldo Piutang akhir	**1.910.766.218,80**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Sedangkan penyisihan piutang tak tertagih atas piutang lainnya sebagai berikut:

Tabel 66 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	Kualitas Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)
		Lancar (≤ 1 thn)	Kurang Lancar (di atas 1 s/d 2 thn)	Diragukan (di atas 2 s/d 3 thn)	Macet (di atas 3 thn)	
1	Denda keterlambatan pembayaran pajak daerah	-	-	-	367.384.497,80	367.384.497,80
2	Denda keterlambatan pembayaran retribusi daerah	10.221.740,00	35.995.195,00	68.183.340,00	223.198.136,00	337.598.411,00
3	Piutang BLUD Pelayanan Kesehatan	-	-	36.797.414,00	176.764.717,00	213.562.131,00
4	Lain-lain PAD yang sah lainnya	-	420.000.000,00	-	572.000.000	992.000.000,00
5	Piutang PFK	-	-	221.179,00	-	221.179,00
	Sub Jumlah	**10.221.740,00**	**455.995.195,00**	**105.201.933,00**	**1.339.347.350,80**	**1.910.766.218,80**
	% Penyisihan Piutang	0%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang tak Tertagih	**-**	**113.998.798,75**	**52.600.966,50**	**1.339.347.350,80**	**1.505.947.116,05**
	Piutang Netto	**10.221.740,00**	**341.996.396,25**	**52.600.966,50**	**0,00**	**404.819.102,75**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Dari tabel penyisihan piutang tak tertagih terdapat jumlah penyisihan piutang tak tertagih atas piutang lainnya per 31 Desember 2025 sebesar **Rp1.505.947.116,05**,

sedangkan jumlah penyisihan piutang per 31 Desember 2024 sebesar **Rp793.163.401,80**, terjadi kenaikan sebesar **Rp712.783.714,25** atau **89,87%** dari tahun sebelumnya.

Status penagihan atas piutang lainnya yang belum tertagih masih ditangani pemerintah daerah belum diserahkan ke PUPN. Rincian saldo piutang lainnya tercantum pada **Lampiran 15** laporan keuangan ini.

5.3.1.1.15 Piutang Transfer

Piutang transfer merupakan piutang yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat berupa dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dan dana bagi hasil pajak provinsi yang merupakan bagian pemerintah daerah namun belum ditransfer ke kas daerah. Jumlah piutang transfer per 31 Desember 2025 sebesar **Rp 30.944.166.265,00**, yang terdiri dari:

1. **Piutang Transfer Pemerintah Pusat DBH Pajak dan SDA**

   Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Sumber Daya Alam (SDA) dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Pada tahun 2025 terdapat piutang transfer DBH sebesar **Rp. 21.281.113.000,00** yang merupakan kurang bayar DBH berdasarkan PMK 120 tahun 2025.

   Berikut tabel piutang transfer DBH :

Tabel 67 Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat

No	Jenis Piutang	PMK	Jumlah (Rp)	Ket
1	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21	**PMK 120 Tahun 2025**	2.799.212.000,00	
2	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN		747.668.000,00	
3	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB		5.259.735.000,00	
4	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi		464.718.000,00	
5	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent		529.552.000,00	
6	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty		11.418.594.000,00	
7	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH		61.634.000,00	
		Jumlah	**21.281.113.000,00**	

2. **Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi**

   Merupakan pendapatan transfer dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi yang merupakan bagian Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung namun sampai akhir tahun belum dibayar/ditransfer ke daerah.

   Piutang transfer dana bagi hasil pajak provinsi yang belum ditransfer ke kas daerah Kabupaten Belitung sebesar **Rp9.663.053.265,00.** Jumlah tersebut sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi Bagian Tahun 2025.

   Berikut tabel piutang dana bagi hasil pajak provinsi:

Tabel 68 Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi 2025

No	Jenis Pajak	Keputusan Gubernur Babel	Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	188.4/15/BAKUDA/2026	5 Februari 2026	7.326.218.323,00	Triwulan IV 2025
2	Pajak Air Permukaan	188.4/15/BAKUDA/2026	5 Februari 2026	671.295.099,00	Triwulan IV 2025
3	Pajak Rokok	188.4/15/BAKUDA/2026	5 Februari 2026	1.665.539.843,00	Triwulan IV 2025
		Jumlah		**9.663.053.265,00**	

Sumber: data BPKAD (diolah)

Beban penyisihan piutang tak tertagih atas dana transfer sebagai berikut:

Tabel 69 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Transfer

No	Uraian	Kualitas Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)
		Lancar (≤ 1 thn)	Kurang Lancar (di atas 1 s/d 2 thn)	Diragukan (di atas 2 s/d 3 thn)	Macet (di atas 3 thn)	
1	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.326.218.323,00	-	-	-	7.326.218.323,00
2	Pajak Air Permukaan	671.295.099,00	-	-	-	671.295.099,00
3	Pajak Rokok	1.665.539.843,00	-	-	-	1.665.539.843,00
	Sub Jumlah	**9.663.053.265,00**	**-**	**-**	**-**	**9.663.053.265,00**
	% Penyisihan Piutang	0%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang tak Tertagih	-	-	-	-	-
	Piutang Netto	**9.663.053.265,00**	**-**	**-**	**-**	**9.663.053.265,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rincian saldo piutang transfer tercantum pada **Lampiran 14** laporan keuangan ini.

5.3.1.1.16 Piutang Lainnya

5.3.1.1.16.1 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan tagihan penjualan angsuran/cicilan yang akan jatuh tempo pada tahun berikutnya. Penjualan aset tetap pemerintah seperti kendaraan roda empat atau penjualan rumah dinas kepada pegawai dengan cara mengangsur lebih dari satu periode akuntansi berikutnya disajikan sebagai tagihan penjualan angsuran pada kelompok aset lainnya.

Akun ini merupakan bagian lancar tagihan penjualan kendaraan roda empat berdasarkan SK Nomor 01375/Kep/IV/2004 tanggal 25 November 2004.

Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan Dinas	**Per 31 Des 2025 (Rp)**	**Per 31 Des 2024 (Rp)**
Total harga penjualan	304.799.500,00	304.799.500,00
Pelunasan	(284.809.500,00)	(284.809.500,00)
Jumlah	19.990.000,00	19.990.000,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran:		
Jatuh Tempo s.d Desember 2022	-	-
Tunggakan	19.990.000,00	19.990.000,00
Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	**19.990.000,00**	**19.990.000,00**
Saldo Tagihan Penjualan Angsuran	**-**	**-**

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan tunggakan atas penjualan kendaraan dinas roda empat yang belum dibayar/dilunasi per 31 Desember 2025. Tunggakan tersebut merupakan tunggakan penjualan angsuran mobil minibus *Isuzu* dengan Plat Nomor BN 3077 BZ kepada Desa Suak Gual sebesar **Rp19.990.000,00**.

Penyelesaian tagihan atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran masih ditangani pemerintah daerah.

Adapun penyisihan piutang tak tertagih atas bagian lancar tagihan penjualan angsuran adalah sebagai berikut:

Tabel 70 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

No	Uraian	Kualitas Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)
		Lancar (≤ 1 thn)	Kurang Lancar (di atas 1 s/d 2 thn)	Diragukan (di atas 2 s/d 3 thn)	Macet (di atas 3 thn)	
1	Bagian Lancar TPA				19.990.000,00	19.990.000,00
	Sub Jumlah				**19.990.000,00**	**19.990.000,00**

No	Uraian	Kualitas Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)
		Lancar (≤ 1 thn)	Kurang Lancar (di atas 1 s/d 2 thn)	Diragukan (di atas 2 s/d 3 thn)	Macet (di atas 3 thn)	
	% Penyisihan Piutang	0%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang tak Tertagih	-	-	-	19.990.000,00	19.990.000,00
	Piutang Netto	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.3.1.1.16.1 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Belitung Semester II TA 2022 Nomor 23/LHPt/XVIII.PPG/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 diketahui terdapat 470 kasus senilai **Rp9.458.365.298,48** yang telah ditetapkan dan telah dilunasi seluruhnya sehingga nilai Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Rp0,00 (nihil).

5.3.1.1.17 Beban Dibayar Di muka

Beban Dibayar Di muka adalah pengeluaran satker/pemerintah daerah yang telah dibayarkan namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati oleh satker/pemerintah daerah.

Mutasi beban di bayar dimuka sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo awal	**27.885.580,84**
Penambahan :	
Biaya sewa dibayar di muka tahun 2025	17.688.773,97
Pengurangan :	
Biaya sewa dibayar dimuka tahun sebelumnya yang menjadi beban tahun 2025	(27.885.580,84)
Saldo per 31 Desember 2025	**17.688.773,97**

Beban Dibayar Di muka per 31 Desember 2025 sebesar **Rp17.688.773,97** merupakan biaya sewa rumah dinas dokter pada RSUD, jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar **Rp27.885.580,84** terjadi penurunan sebesar **Rp10.196.806,87** atau **36,57%**.

Rincian beban dibayar di muka sebagai berikut:

Tabel 71 Rincian Beban Dibayar Di Muka 2025

No	Uraian	Nilai Sewa (Rp)	Masa berlaku	Terhitung Mulai	Nilai Per hari (Rp)	Beban Tahun 2025 (Rp)	Beban Dibayar Di muka (Rp)
1	Sewa Rumah dinas dokter spesialis Orthopedi (dr. Dwi Kartika Sari Sp.OT)	17.800.000,00	1 tahun/ 12 bln	01/05/2025	48.633,88	11.915.300,55	5.884.699,45
2	Biaya sewa menyewa TLD BADGE BARC GAMMA	18.781.200,00	1 tahun/ 12 bln	01/07/2025	51.455,34	9.467.783,01	9.313.416,99
3	Biaya sewa menyewa Evaluasi TLD Mata Soca Dosimeter	3.330.000,00	1 tahun/ 12 bln	01/10/2025	9.123,29	839.342,47	2.490.657,53
	Total	**39.911.200,00**				**22.222.426,03**	**17.688.773,97**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rincian Beban dibayar dimuka 2025 tercantum pada **Lampiran 93** laporan keuangan ini.

5.3.1.1.18 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-

barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat dengan menggunakan sistem periodik di mana nilai persediaan yang disajikan berdasarkan berita acara hasil *stock opname* per 31 Desember 2025.

Persediaan dinilai dengan menggunakan :

1. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis;
2. Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3. Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Jumlah persediaan per 31 Desember 2025 sebesar **Rp26.706.284.784,82** yang terdiri dari:

1. Persediaan barang habis pakai untuk kegiatan operasional sebesar **Rp16.838.313.679,25.** Rekapitulasi persediaan barang habis pakai berdasarkan jenis persediaan sebagai berikut:

Tabel 72 Rekapitulasi Persediaan Barang Habis Pakai 2025

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Bahan Kimia	955.080.905,56	648.988.106,75
2	Bahan Bakar dan Pelumas	53.316.000,00	249.412.500,00
3	Bahan/Bibit Tanaman	30.765.688,00	34.553.350,00
4	Isi Tabung Gas	1.299.500,00	-
5	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	-	5.369.500,00
6	Bahan Lainnya	127.136.700,00	128.098.241,00
7	Suku Cadang Alat Laboratorium	-	175.000,00
8	Suku Cadang Lainnya	183.408.408,00	-
9	Alat Tulis Kantor	433.223.149,50	459.973.115,00
10	Kertas dan Cover	117.925.865,00	105.269.300,00
11	Bahan Cetak	735.829.980,00	645.087.293,00
12	Benda Pos	2.790.000,00	4.030.000,00
13	Bahan Komputer	134.897.000,00	157.509.000,00
14	Perabot Kantor	15.840.000,00	-
15	Alat Listrik	165.856.923,00	174.007.006,00
16	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.218.635.756,82	2.564.697.909,00
17	Obat	7.741.653.701,80	6.839.283.668,83
18	Obat-obatan Lainnya	3.903.895.601,57	3.975.270.112,37
19	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	-	-
20	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	-	235.360.000,00
21	Natura	3.436.500,00	2.911.500,00
22	Pakan	-	5.450.000,00
23	Natura dan Pakan Lainnya	11.270.000,00	-
24	Persediaan Dalam Proses	2.052.000,00	-
	Jumlah	**16.838.313.679,25**	**16.235.445.601,95**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rekapitulasi persediaan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

2. Persediaan barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga berasal dari belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga dan reklasifikasi dari belanja modal yang sampai dengan akhir tahun belum diserahkan/diterbitkan Berita Acara Serah Terima Barang sebesar **Rp9.867.971.105,57** yang terdiri dari:

Tabel 73 Persediaan Barang Untuk Diserahkan Ke Masyarakat/Pihak Ketiga

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Tanah, bangunan dan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum	9.212.946.732,00	7.492.719.700,00
3	Pengadaan kursi roda untuk bantuan sosial kepada individu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.895.000,00	5.895.000,00
4	Persediaan logistik dan bahan bantuan untuk penanggulangan bencana dan Alat Kesehatan	328.625.175,20	109.718.567,20

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
	Penanganan Covid pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
5	Pengadaan sumur resapan		47.600.000,00
6	Pembangunan Tanggul/Dam penahan ROB sungai		199.500.000,00
7	Pengadaan cadangan pangan berupa beras untuk diserahkan ke masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	320.504.198,37	206.112.816,00
	Jumlah	**9.867.971.105,57**	**8.061.546.083,20**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rincian Persediaan Barang yang Akan Diserahkan pada **Lampiran 17.**

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan persediaan barang untuk diserahkan, dikarenakan adanya penambahan pengadaan barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga yang belum diserahterimakan ke masyarakat/pihak ketiga dari OPD ke penerima barang. Mutasi persediaan barang untuk diserahkan sebagai berikut:

Saldo awal	**8.061.546.083,20**
Mutasi Tambah	
- Pengadaan barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga	9.114.765.260,68
Mutasi Kurang	
- Persediaan barang yang telah diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga	(7.308.340.238,31)
Saldo akhir	**9.867.971.105,57**

Mutasi tambah persediaan barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga sebagai berikut:

Tabel 74 Rincian Mutasi Tambah Persediaan Barang Untuk Diserahkan Ke Masyarakat/Pihak Ketiga

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
1	Jalan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Tanjungpandan	214.224.032,00
2	Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah Perkantoran (Opsen PKB 2025)	291.335.000,00
3	Pembangunan Lobby dan Aula Kantor Kejaksaan Negeri Belitung	2.657.000.000,00
4	Renovasi Markas Komando Kepolisian Resor Belitung (Lanjutan)	2.307.100.000,00
5	Rehab Rumah Dinas Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan	894.570.000,00
6	Pembangunan Jalan Karya Bakti Kec.Membalong	1.100.000.000,00
7	Pembangunan Jalan Karya Bakti Kec.Sijuk	1.100.000.000,00
8	Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Lobby dan Aula Kantor Kejaksaan negeri Belitung	34.870.500,00
9	Jasa Konsultan Pengawasan Renovasi Markas Komando Resor Belitung (Lanjutan)	34.870.500,00
10	Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Rumah Dinas Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan	29.889.000,00
11	Masker dan peralatan penanganan kesehatan lainnya (covid)	235.360.000,00
12	Pengadaan cadangan pangan berupa beras untuk diserahkan ke masyarakat	215.546.228,68
	Jumlah	**9.114.765.260,68**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Mutasi kurang persediaan barang untuk di serahkan kepihak ketiga dikarenakan persediaan barang tersebut telah diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sesuai dengan BAST, barang yang telah diserahkan sebagai berikut:

Tabel 75 Rincian Mutasi Kurang Persediaan Barang Untuk Diserahkan Ke Masyarakat/Pihak Ketiga

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
1	Pembuatan DED mess Kejaksaan Negeri Belitung	99.345.000,00
2	Pembuatan DED renovasi Markas Komando Kepolisian Resort Kabupaten Belitung	99.278.000,00
3	Pembangunan Mess Kejaksaan Negeri Belitung	2.590.115.000,00
4	Pembangunan shelter dan bangunan pelengkap lapangan tembak Astra Jingga	179.646.000,00
5	Rehabilitasi Kantor Kodim	497.350.000,00

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
6	Rehabilitasi Kantor Koramil	185.341.000,00
7	Rehabilitasi Rumah Dinas Kasdim	199.267.000,00
8	Renovasi Markas Komando Kepolisian Resort Belitung	2.894.844.000,00
9	Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Mess Kejaksaan Negeri Belitung	98.990.000,00
10	Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi Markas Komando Kepolisian Resort Belitung	99.456.000,00
11	Bahan Bangunan dan kontruksi/Bahan Logistik Bahan Bantuan untuk penanggulangan bencana	16.453.392,00
12	Paket Pengadaan Sumur Resapan	47.600.000,00
13	Paket Pembangunan Tanggul/Dam penahan ROB sungai	199.500.000,00
14	Pengadaan cadangan pangan berupa beras untuk diserahkan ke masyarakat	101.154.846,31
	Jumlah	**7.308.340.238,31**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Catatan terkait dengan persediaan adalah sebagai berikut:

1) Persediaan barang pakai habis yang telah kedaluwarsa/*expired* tidak disajikan pada neraca, nilai persediaan barang pakai habis yang telah kedaluwarsa*/ expired* per 31 Desember 2025 sebesar Rp.**619.104.373,92** berupa persediaan dalam kondisi kedaluwarsa/ rusak.
2) Pada tahun 2025 telah dilakukan pemusnahan barang milik daerah berupa obat-obatan dan bahan medis habis pakai kondisi kedaluwarsa/expired pada UPT RSUD dr H Marsidi Judono, Gudang Farmasi dan UPT Puskesmas Dinas Kesehatan sebagai berikut:
   a) Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemusnahan Obat-Obatan dan Vaksin kondisi kedaluwarsa/*expired* dibawah Pengelolaan UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono Kabupaten Belitung, sebanyak 49.953 buah senilai Rp157.564.851,04 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung selaku Pengelola Barang Nomor: 000.2.6.1/2029/BPKAD/2025 tanggal 30 Desember 2025.
   b) Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemusnahan Barang Persediaan Berupa Bahan Kimia kedaluwarsa/*expired* dibawah pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, sebanyak 84.851,34 gram senilai Rp43.276.600,50 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung selaku Pengelola Barang Nomor: 000.2.6.1/069//BPKAD/ 2025 tanggal 08 Desember 2025.
   c) Penghapusan Barang Milik Daerah Tindak Lanjut Pemusnahan Barang Persediaan Berupa Bahan Cetak dibawah pengelolaan Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung, sebanyak 308 buku senilai Rp2.772.000,00 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung selaku Pengelola Barang Nomor: 188.46/072/KEP/BPKAD/ 2025 tanggal 08 Desember 2025.

Rekap persediaan barang kedaluwarsa*/ expired* dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

5.3.1.2 Aset Nonlancar

Aset Nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya..

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan investasi jangka panjang permanen pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pada lembaga keungan perbankan.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. **Metode biaya**

   Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2. **Metode ekuitas**

   Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan.

3. **Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan**

   Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
2. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
3. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
4. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Nilai penyertaan modal per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 76 Rekap Penyertaan Modal 2025

No.	Nama Perusahaan/Badan Usaha	Nilai Penyertaan Modal	
		Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
1.	**Perumda AM Tirta Batu Mentas**	**7.974.575.884,10**	**8.639.151.508,28**
2.	**PT. Belitong Mandiri**	**1.513.790.414,51**	**1.895.025.485,19**
3.	**BPR Syari'ah Bangka Belitung**		
	- Setoran modal yang telah diterbitkan sertifikat sahamnya	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
	- Agio Saham	10.000.000,00	10.000.000,00
	Jumlah Penyertaan modal pada BPR Syari'ah Bangka Belitung	**7.010.000.000,00**	**7.010.000.000,00**
4.	**PT Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**
5.	**PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia**	**507.238.927,62**	**143.808.005,05**
6.	**PT Bank Sumsel Babel**		
	- Setoran Modal yang telah diterbitkan sertifikat saham	24.327.000.000,00	24.327.000.000,00
	- Agio Saham	9.921.716.000,00	9.921.716.000,00
	- Sisa yang belum dijadikan saham	751.464,77	751.464,77
	Jumlah Penyertaan modal pada Bank Sumsel Babel	**34.249.467.464,77**	**34.249.467.464,77**
	Total Penyertaan Modal Pemda	**56.255.072.691,00**	**56.937.452.463,29**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Penyajian nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada Badan Usaha Milik Daerah dengan menggunakan metode ekuitas untuk BUMD PT Belitong Mandiri, Perumda AM Tirta Batu Mentas, dan PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia sedangkan penyajian nilai penyertaan modal pada PT Bank Sumsel Babel, Bank Syariah

Bangka Belitung dan PT Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung menggunakan metode biaya (*cost*). Perhitungan penyajian sebagai berikut:

1. **Perumda AM Tirta Batu Mentas**

   Nilai total penyertaan modal pada Perumda AM Tirta Batu Mentas per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp30.417.346.549,00**. Nilai tersebut tidak mengalami kenaikan/penurunan dari tahun sebelumnya.

   Penilaian investasi/penyertaan modal pada **Perumda AM Tirta Batu Mentas** menggunakan **metode ekuitas** di mana nilai penyertaan modal yang disajikan di Neraca adalah sebesar **nilai kekayaan bersih** yaitu nilai total penyertaan modal ditambah/dikurangi dengan proporsi keuntungan/kerugian.

   Berdasarkan laporan keuangan Perumda AM Tirta Batu Mentas tahun 2025 (*Audited*), total kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sampai dengan tahun 2025 sebesar sebesar **Rp66.128.631.320,93 (100%)** yang terdiri dari:

Tabel 77 Kekayaan Pemda Pada Perumda AM Tirta Batu Mentas

Entitas	Nilai Penyertaan (Rp)	%
- Kabupaten Belitung	30.417.346.548,93	46,00
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	731.225.000,00	1,10
- Pemerintah Pusat (termasuk penyertaan yang belum ditetapkan statusnya)	34.980.059.772,00	52,90
Jumlah	**66.128.631.320,93**	**100,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Dalam Laporan keuangan Perumda AM Tirta Batu Mentas Tahun 2025 (*Audited*), disajikan laba yang belum dibagikan (akumulasi kerugian) sebesar **Rp(47.346.741.056,51)** dan Rugi tahun berjalan sebesar **Rp(1.444.816.245,42)**.

Tabel 78 Laba Yang Belum Dibagikan Perumda AM Tirta Batu Mentas 2025

Entitas	Nilai Penyertaan (Rp)	Akumulasi Kerugian (Rp)	Kerugian Tahun Berjalan (Rp)	%
- Kabupaten Belitung	30.417.346.548,93	(21.778.195.040,65)	(664.575.624,18)	46,00
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	731.225.000,00	(523.542.073,04)	(15.976.222,98)	1,10
- Pemerintah Pusat	34.980.059.772,00	(25.045.003.942,82)	(764.264.398,26)	52,90
Jumlah	**66.128.631.320,93**	**(47.346.741.056,51)**	**(1.444.816.245,42)**	100,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Perhitungan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada Perumda AM Tirta Batu Mentas dengan **Metode Ekuitas** sebagai berikut.

Tabel 79 Penyertaan Modal Pemda Belitung Pada Perumda AM Tirta Batu Mentas

Keterangan	Nilai (Rp)
- Kekayaan Pemda yang dipisahkan s/d Tahun 2025	30.417.346.548,93
- Laba yang Belum dibagikan (akumulasi Kerugian)	(21.778.195.040,65)
- Laba/(Rugi) tahun berjalan	(664.575.624,18)
Jumlah Kekayaan Bersih	**7.974.575.884,10**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Nilai penyertaan modal pada Perumda AM Tirta Batu Mentas disajikan pada laporan keuangan adalah sebesar proporsional perhitungan nilai kekayaan bersih sebesar **Rp7.974.575.884,10** terjadi penurunan nilai kekayaan bersih dari tahun sebelumnya sebesar **Rp(664.575.624,18)**.

Laporan Keuangan Perumda AM Tirta Batu Mentas tahun 2025 merupakan hasil Audit KAP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. **PT Belitong Mandiri**

   Pada tahun 2025 tidak terjadi penambahan nilai penyertaan modal pada PT Belitong Mandiri **total modal PT. Belitong Mandiri sebesar Rp10.601.636.328,00 (100%)** terdiri dari **Pemerintah Kabupaten Belitung sebesar Rp10.401.636.328,00 (98,11%)** dan **Zulkifli sebesar Rp200.000.000,00 (1,89%).** Penilaian investasi/penyertaan modal pada PT Belitong Mandiri menggunakan **metode ekuitas**.

Dalam Laporan Keuangan Tahun 2025 (*Audited*) PT Belitong Mandiri melaporkan adanya kerugian tahun berjalan sebesar Rp388.565.361,00 sehingga proporsi kerugian yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Belitung tahun berjalan adalah sebesar Rp381.235.070,68 (Rp388.565.361,00 x 98,11%). Perhitungan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT Belitong Mandiri dengan metode ekuitas sebagai berikut:

Tabel 80 Penyertaan Modal Pemda Belitung di PT Belitong Mandiri

Keterangan	Nilai (Rp)
Kekayaan Pemda yang dipisahkan s/d Tahun 2025	10.401.636.328,00
Laba/(rugi) yang belum dibagikan (akumulasi kerugian)	(8.506.610.842,81)
Laba/(rugi) tahun berjalan	(381.235.070,68)
Jumlah Kekayaan Bersih	**1.513.790.414,51**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Nilai penyertaan modal pada PT Belitong Mandiri disajikan pada laporan keuangan adalah sebesar proporsional perhitungan nilai kekayaan bersih sebesar **Rp1.513.790.414,51,** terjadi penurunan nilai kekayaan bersih dari tahun sebelumnya sebesar **Rp(381.235.070,68)** hal ini disebabkan adanya proporsional perhiutngan nilai kekayaan bersih akibat kerugian tahun berjalan.
Laporan Keuangan PT Belitong Mandiri tahun 2025 merupakan hasil Audit KAP dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

3. **Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung**
Nilai total penyertaan modal pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp7.010.000.000,00 dengan jumlah kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Belitung sebesar 14,73%**. Pada tahun 2025 tidak terjadi penambahan penyertaan modal pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung terakhir pada tahun 2015 sebesar Rp5.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung TA 2015. Penilaian investasi/penyertaan modal pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung menggunakan **metode biaya (*cost*).**

4. **PT Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung**
PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bangka Belitung adalah suatu lembaga keuangan yang bergerak di bidang penjamin kredit milik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 tahun 2010 Tentang Pembentukan BUMD PT Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Pada TA 2013 Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan penyertaan modal pada PT Jamkrida Kepulauan Bangka Belitung guna menunjang pendirian dan operasional dengan nilai penyertaan sebesar Rp5.000.000.000,00 yang dialokasi dalam 2 (dua) tahun anggaran, yaitu tahun 2013 sebesar Rp2.500.000.000,00 dan tahun 2014 sebesar Rp2.500.000.000,00 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT Penjaminan Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Nilai penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp5.000.000.000,00 dengan persentase kepemilikan sebesar 14,29%,** tidak terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya. Penilaian investasi/penyertaan modal menggunakan **metode biaya (*cost*).**

5. **PT Bank Sumsel Babel**
Nilai total penyertaan modal saham pada PT Bank Sumsel Babel sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp34.249.467.464,77 dengan jumlah kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Belitung sebesar 2,04%**. Pada TA 2025 terjadi

penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebesar 3.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Pemerintah Kabupaten Belitung kepada PT Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Penambahan penyertaan modal berupa lahan seluas 708 m^2 yang berada di jalan Kapten Pierre Tendean Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan Belitung senilai Rp1.776.100.000,00 telah dicatat sebagai penambahan penyertaan modal tahun 2023 dan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang sebesar Rp3.000.000.000,00 yang disetor pada tahun 2025.

Penilaian investasi/penyertaan modal pada PT Bank Sumsel Babel menggunakan **metode biaya (*cost*).**

6. **PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia**

PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia merupakan badan usaha pelabuhan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2015. Pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan penyertaan modal pada PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia sebesar Rp5.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015. Perhitungan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung dengan **Metode Ekuitas.**

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai penyertaan modal pada PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia **berdasarkan data laporan keuangan tahun 2025** Audited.

Berdasarkan laporan keuangan PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia tahun 2025 (*Audited*), total kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp5.250.000.000,00 (100%) yang terdiri dari:

Tabel 81 Rincian Penyertaan Modal Pada PT Pelabuhan Tanjung Batu

Entitas	Nilai Penyertaan (Rp)	%
- Kabupaten Belitung	5.000.000.000,00	95,24
- Dalai Kosim Kwok	250.000.000,00	4,76
Jumlah	**5.250.000.000,00**	**100,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Tabel 82 Penyertaan Modal di PT Pelabuhan Tanjung Batu

Entitas	Nilai Penyertaan (Rp)	Akumulasi Kerugian (Rp)	Kerugian Tahun Berjalan (Rp)	%
- Kabupaten Belitung	5.000.000.000,00	(4.867.043.618,10)	374.282.545,71	95,24
- Dalai Kosim Kwok	250.000.000,00	(243.352.180,90)	18.714.127,29	4,76
Jumlah	**5.250.000.000,00**	**(5.110.395.799,00)**	**392.996.673,00**	**100,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Perhitungan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia dengan **Metode Ekuitas** sebagai berikut.

Tabel 83 Kekayaan Pemda Belitung Pada PT Pelabuhan Tanjung Batu

Keterangan	Nilai (Rp)
Kekayaan Pemda yang dipisahkan s/d Tahun 2020	5.000.000.000,00
- Laba yang belum dibagikan (akumulasi kerugian)	(4.867.043.618,10)
- Laba/(Rugi) tahun berjalan	374.282.545,71
Jumlah Kekayaan Bersih	**507.238.927,62**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Nilai penyertaan modal pada PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia disajikan pada laporan keuangan adalah sebesar proporsional perhitungan nilai kekayaan bersih sebesar **Rp507.238.927,62.**

5.3.1.2.2 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2025 *(Audited)* adalah senilai **Rp4.223.541.885.539,71** mengalami peningkatan senilai **Rp84.088.826.686,02** atau meningkat **2,03%** dibandingkan saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 senilai **Rp4.139.453.056.853,69.**

Rincian Aset Tetap menurut jenisnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 84 Saldo Aset Tetap Kabupaten Belitung per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama Barang	Saldo Akhir Per 31 Desember 2025	Saldo Akhir Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	Prosentase Kenaikan/ Penurunan
1	Tanah	383.491.117.462,64	370.676.122.840,53	12.814.994.622,11	3,46
2	Peralatan dan Mesin	734.764.018.545,72	720.367.617.851,82	14.396.400.693,90	2,00
3	Gedung dan Bangunan	793.514.762.654,07	785.386.635.067,07	8.128.127.587,00	1,03
4	Jalan, Jaringan dan irigasi	2.220.982.321.608,24	2.175.527.297.933,24	45.455.023.675,00	2,09
5	Aset Tetap Lainnya	70.140.997.963,37	67.445.072.900,35	2.695.925.063,02	4,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	20.648.667.305,68	20.050.310.260,68	598.357.045,00	2,98
Jumlah		**4.223.541.885.539,71**	**4.139.453.056.853,69**	**84.088.828.686,03**	**2,03**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Adapun rincian atas kenaikan/penurunan saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan saldo akhir per 31 Desember 2024 (*audited*) adalah sebagai berikut:

1. Saldo aset tetap berupa tanah Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2025 adalah senilai **Rp383.491.117.462,64** mengalami kenaikan senilai **Rp12.814.994.622,11** atau meningkat **3.46%** dibandingkan saldo aset tetap berupa tanah Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 (*audited*) senilai **Rp370.676.122.840,53.**
2. Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp734.7643018.545,72 mengalami kenaikan senilai Rp14.396.400.693,90 atau meningkat **2,00%** dibandingkan saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 (audited) senilai **Rp720.367.617.851,82.**
3. Saldo aset tetap berupa gedung dan bangunan Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp793,514,762,654.07 mengalami kenaikan senilai Rp8,128,127,587.00 atau meningkat **1,03%** dibandingkan saldo aset tetap berupa gedung dan bangunanPemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 (*audited*) senilai **Rp785.386.635.067,07.**
4. Saldo aset tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 adalah senilai **Rp2,220,982,321,608.24** mengalami peningkatan senilai Rp45,455,023,675.00 atau sebesar **2.09%** dari saldo akhir 31 Desember 2024 (*Audited*) yaitu **Rp2.175.527.297.933,24**.
5. Saldo aset tetap berupa aset tetap lainnya per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp70,140,997,963.37 mengalami kenaikan senilai Rp2,695,925,063.02 atau sebesar **4.00%** dari saldo akhir 31 Desember 2024 (*auditted*) yaitu **Rp67.445.072.900,35.**
6. Saldo aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2025 adalah senilai **Rp20.648.667.305,68** mengalami kenaikan senilai **Rp598.357.045,00** atau meningkat **2.98%** dibandingkan saldo aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 (*audited*) senilai **Rp20.050.310.260,68.**

Berdasarkan data diatas, beberapa poin-poin penting perubahan aset Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jalan, jaringan, dan irigasi memberikan kontribusi peningkatan nominal terbesar, yaitu bertambah senilai Rp45,455,023,675.00 miliar atau naik 2,09%).
2. Aset tetap lainnya mencatatkan persentase pertumbuhan tertinggi bertambah senilai Rp2,695,925,063.02 atau naik 4,00%.
3. Seluruh kategori komponen aset tetap secara konsisten mengalami tren kenaikan positif di sepanjang tahun anggaran 2025.

Rincian informasi mengenai mutasi dan pergerakan mendalam dari masing-masing pos Aset Tetap di atas dapat dilihat pada **Lampiran 19 s.d. Lampiran 23**.

5.3.1.2.2.1 Tanah

Aset tetap berupa tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, pajak dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Aset tetap tanah tidak ada batasan nilai minimal kapitalisasi.

Saldo aset tetap berupa tanah Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp383.491.117.462,64 mengalami kenaikan senilai Rp12.814.994.622,11 atau meningkat 3,46% dibandingkan saldo aset tetap berupa tanah Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 (*audited*) senilai Rp370.676.122.840,53.

Peningkatan tersebut disebabkan adanya mutasi kumulatif atas aset tetap untuk tahun 2025 berupa mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap tanah, dengan perhitungan:

Tabel 85 Mutasi Aset Tetap Tahun 2025

Uraian		Jumlah (Rp)
-	Saldo awal aset tetap berupa tanah per 1 Januari 2025	370.676.122.840,53
-	Mutasi penambahan aset tetap berupa tanah tahun 2025:	15.490.650.637,06
-	Mutasi pengurangan aset tetap berupa tanah tahun 2025:	(2.675.656.014,95)
-	Saldo akhir aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2025	383.491.117.462,64

Sumber: data BPKAD (diolah)

Mutasi penambahan aset tetap berupa tanah tahun 2025 senilai Rp15.490.650.637,06 dengan perincian sebagai berikut yaitu:

1. Belanja Modal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp491.325.000,00 terdapat pada Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp491.325.000,00
2. Pemindahtanganan Dalam Bentuk Hibah (Hibah Masuk) Aset Tetap Tanah dengan total nilai Rp11.384.609.500,00 terdapat pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
   a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hibah dari Bapak Zaptirawi Wara, dengan Surat Keterangan Pengakuan Penguasaan Fisik Tanah Nomor: 003/SKPPFT/KMB/VI/2025 Tanggal 16 Juni 2025 Dan Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/921/KEP/BPKAD/ 2025 Tanggal 12 November 2025, senilai Rp28.600.000,00;
   b. Dinas Kesehatan dengan total nilai Rp364.200.000,00 terdiri dari:
      1) Hibah dari Bapak Anuarisnen, Berita Acara Penyerahan tanggal 23 November 2015 dan Surat Keputusan Bupati Nomor:

100.3.4/922/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 10 November 2025, senilai Rp86.840.000,00.

2) Hibah dari Hasnawi, Berita Acara Penyerahan tanggal 26 Mei 2016 dan Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/904/KEP/ BPKAD/2025 Tanggal 28 Oktober 2025, senilai Rp270.000.000,00.

3) Hibah dari Samsir, Akta Pelepasan Hak Nomor: 0194/Plh/I 2017 Tanggal 28 Juli 2017 dan Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/923/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 10 November 2025, senilai Rp7.360.000,00.

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan total nilai Rp10.991.809.500,00 terdiri dari:

1) Hibah dari Bapak Antoni, BAST Nomor:…/ /2025 - 000:326/BPKAD.V Tanggal 3 Maret 2025 dan Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/468/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 28 Mei 2025, senilai Rp192.091.500,00;

2) Hibah dari Lim Siu Ing, BAST Nomor:…/ /2025 - 000:205/BPKAD.V Tanggal 3 Februari 2025 dan Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/206/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 13 Maret 2025, senilai Rp380.538.000,00; dan

3) Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, BAST Nomor:732/BA/Satker PJN II Babel/2025 – No:600.1/359/BA/DPUPR/2025 Tanggal 29 April 2025 dan Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/460/KEP/ BPKAD/2025 Tanggal 26 Mei 2025, dengan total nilai Rp10.419.180.000,00.

3. Pengalihan Antar OPD dengan total nilai Rp524.341.137,06 terdapat pada Perangkat Daerah sebagai berikut:

a. Dinas Kesehatan, pengalihan dari UPT Puskesmas senilai Rp374.862.000,00;

b. Sekretariat Daerah, pengalihan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja, Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/418/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 9 Mei 2025, senilai Rp19.872.000,00;

c. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindusrian, pengalihan dari Dinas Lingkungan Hidup, Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/437/KEP/BPKAD/2025 Tanggal Mei 2025, senilai Rp92.928.000,00;

d. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pengalihan dari Kecamatan Membalong, Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/227/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 17 Maret 2025, senilai Rp2.479.137,06; dan

e. Dinas Komunikasi dan Informatika, pengalihan dari Dinas Perikanan, Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/457/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 26 Mei 2025, senilai Rp34.200.000,00.

4. Koreksi Kurang Catat (tahun sebelumnya) dengan total nilai Rp3.090.375.000,00 terdapat pada Perangkat Daerah sebagai berikut:

a. Dinas Kesehatan senilai Rp49.500.000,00, Penambahan ini hasil dari inventarisasi tanah yang sudah bersertifikat akan tetapi belum tercatat sebagai barang milik daerah oleh pengguna barang. Oleh karena itu, ditetapkan status penggunaan atas tanah bangunan puskesmas/posyandu dengan luasan ± 176 m², dasar penetapan nilai menggunakan NJOP tahun 2025 adalah senilai Rp200.000,00/m². Penetapan ini didasarkan pada Keputusan Bupati Belitung Nomor:

100.3.4/540/KEP/BPKAD/2025 tanggal 26 Juni 2025 dan tanah kosong yang sudah diperuntukkan dengan luasan ± 715 m², dasar penetapan nilai menggunakan NJOP tahun 2025 adalah senilai Rp20.000,00/m². Penetapan ini didasarkan pada Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/922A/KEP/BPKAD/2025 tanggal 10 November 2025; dan

b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp3.040.875.000,00. Penambahan ini hasil dari inventarisasi tanah bawah jalan diseputaran gedung nasional ditemukan lahan kosong yang belum bersertipikat. Oleh karena itu, ditetapkan status penggunaan atas tanah kosong yang sudah diperuntukkan dengan luasan ± 901 m², dasar penetapan nilai menggunakan NJOP tahun 2025 adalah senilai Rp3.375.000,00/m². Penetapan ini didasarkan pada Keputusan Bupati Belitung Nomor:100.3.4/924/KEP/BPKAD/2025 tanggal 10 November 2025.

Daftar rincian penambahan aset tetap berupa tanah disajikan dalam **Lampiran 24 s.d 29**

Untuk penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal, tidak terdapat perbedaan pengakuan antara penambahan aset tetap (yang disajikan sebagai aset intrakomptabel) tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi belanja modal sebagaimana yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Uraian	Jumlah (Rp)
- Realisasi belanja modal berupa tanah (LRA)	Rp491.325.000,00
- Selisih Perbedaan Pengakuan	-
- Jumlah Penambahan Saldo Aset Tetap berupa Tanah dari Realisasi Belanja Modal	Rp491.325.000,00

Mutasi pengurangan nilai aset berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2025 sebesar Rp2.675.656.014,95 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pemindahtanganan Dalam Bentuk Hibah (Hibah Keluar) Aset Tatap Tanah dengan total nilai Rp1.886.999.607,29, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
   a. Sekretariat Daerah, Hibah Barang Milik Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung, Naskah Hibah Nomor: 000.2.6.1/029/ BPKAD/2025 – Nomor: 001/RT.07-NH/1902/2025 Tanggal 12 Juni 2025, senilai Rp64.520.000,00;
   b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Hibah Barang Milik Daerah kepada Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Naskah Hibah Nomor: 000.2.6.1/1600/BPKAD/2025 – Nomor: 11089/MK/ LK.01.03/2025 Tanggal 19 November 2025, senilai Rp1.755.678.450,00;
   c. Dinas Perikanan, Hibah Barang Milik Daerah kepada Kepolisisan Resos Belitung, Kepolisisan Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Naskah Hibah Nomor: 000.2.6.1/1041/BPKAD/2025 – Nomor: 01/X/LOG.1.4/2025/Res Belitung Tanggal 16 Oktober 2025, senilai Rp60.008.627,30; dan
   d. Kecamatan Selat Nasik, Hibah Barang Milik Daerah kepada Kepolisisan Resos Belitung, Kepolisisan Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Naskah Hibah Nomor: 000.2.6.1/1043/BPKAD/2025 – Nomor: 02/X/LOG.1.4/2025/Res Belitung Tanggal 16 Oktober 2025, senilai Rp6.792.529,99.
2. Pengalihan Antar Perangkat Daerah dengan total nilai Rp524.341.137,06, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
   a. UPT Puskesmas pengalihan ke Dinas Kesehatan, senilai Rp374.862.000,00;
   b. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja pengalihan ke Sekretariat Daerah, Surat Keputusan Bupati Nomor:

100.3.4/418/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 9 Mei 2025, senilai Rp19.872.000,00;

c. Dinas Lingkungan Hidup pengalihan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindusrian, Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/437/KEP/BPKAD/2025 Tanggal Mei 2025, senilai Rp92.928.000,00;

d. Kecamatan Membalong pengalihan ke Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/227/KEP/ BPKAD/2025 Tanggal 17 Maret 2025, senilai Rp2.479.137,06; dan

e. Dinas Perikanan pengalihan ke Dinas Komunikasi dan Informatika, Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/457/KEP/ BPKAD/2025 Tanggal 26 Mei 2025, senilai Rp34.200.000,00.

3. Penghapusan Sebab Lainnya berupa Aset Tetap Tanah dengan total nilai Rp264.315.270,60, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:

a. Dinas Perhubungan, Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 000.2.6.1/070/BPKAD/2025 Tanggal 8 Desember 2025, senilai Rp22.680.000,00. Penghapusan tersebut disebabkan karena rekonsiliasi aset tumpeng tindih dengan provinsi kepulauan bangka Belitung berdasarkan Berita Acara rekon Nomor: 000.2.5/0025/BAKUDA - 000.2.6.1/1595/BPKAD.V Tanggal 4 November 2025;

b. Dinas Kesahatan, Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 000.2.6.1/068/BPKAD/2025 Tanggal 8 Desember 2025, senilai Rp11.200.000,00. Penghapusan tersebut disebabkan karena terdapat duplikasi pencatatan berdasarkan berita acara hasil rekonsiliasi data barang milik daerah pada UPT Puskesmas Air Saga dan UPT Puskesmas Tanjungpandan Nomor: 000.2.6/242/PKM AS dan 000.2.6.2/033/PKM TP Tanggal 12 November 2025; dan

c. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 000.2.6.1/073/BPKAD/2025 Tanggal 29 Desember 2025, senilai Rp230.435.270,60. Penghapusan tersebut disebabkan karena rekonsiliasi aset tumpeng tindih dengan provinsi kepulauan bangka Belitung berdasarkan Berita Acara rekon Nomor: 000.2.5/0025/BAKUDA - 000.2.6.1/1595/BPKAD.V Tanggal 4 November 2025.

Daftar rincian pengurangan aset tanah disajikan dalam **Lampiran 30 s.d 32**

Beberapa perubahan data aset tetap berupa tanah yang terjadi untuk tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan Pemindahtanganan dalam bentuk hibah kepada Pemerintah Pusat yaitu:

1) Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan Dan Tradisi dengan total nilai Rp1.755.678.450,00. Luas tanah yang dihibahkan adalah 43.920m^2 dengan alas hak Sertifikat Hak Pakai No. 23 Sijuk/ Th. 2013 tanggal 04 April 2013 yang beralamat di Kecamatan Sijuk berdasarkan Naskah Hibah Nomor: 000.2.6.1/1599/BPKAD/2025 dan 11088/MK/LK.01.03/2025, tanggal 19 November 2025 dan Berita Acara Serah Terima Nomor: dan Berita Acara Serah Terima Nomor 000.2.6.1/1600/BPKAD/2025 dan 11089/MK/LK.01.03/2025, tanggal 19 November 2025 Atas pelaksanaan hibah ini telah dilakukan penghapusan dari daftar inventaris pengguna barang Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung berdasarkan Surat

Keputusan Sekretaris Daerah nomor: 000.2.6.1/067/BPKAD/2025, Tanggal 29 Desember 2025

2) Kepolisian Resor Belitung dengan total nilai Rp66.801.157,29, dengan peruntukkan sebagai berikut:
   a) Markas Komando Satuan Polisi Air (Mako Satpolair) dengan total nilai Rp60.008.627,30 (Rp14.408.627,30 + 45.600.000,00), masing-masing memotong luasan tanah bersertifikat Hak Pakai No.143/Kel.Kota/2014 tanggal 07 Oktober 2014 dan Sertifikat Hak Pakai No.141/Kel.Kota/2014 tanggal 2 September 2014 atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung; dan
   b) Markas Komando Kepolisian Sektor Selat Nasik dengan total nilai Rp 6,792,529.99 (Rp 7.350,69 + Rp500.000,00 + Rp6.285.179.30) masing-masing memotong luasan tanah bersertifikat Hak Pakai No. 00009 Selat Nasik/ Th.2012 tanggal 14 Februari 2012, Hak Pakai No. 00005 Selat Nasik / Th.2012 tanggal 14 Februari 2012, dan Hak Pakai No.00015 Selat Nasik / Th.2012 tanggal 27 April 2012 atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung.

3) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dengan total nilai Rp64.520.000,00. Luas tanah yang dihibahkan adalah 1.503,5 m² dengan dokumen alas hak SKT (053/X/KEL.PKL/SK/I/2023 Tanggal 4 Oktober 2023, yang beralamat di Jalan Anwar, Kelurahan Pangkallalang Kecamatan, Tanjungpandan berdasarkan Naskah Hibah Nomor: 000.2.6.1/029/BPKAD/2025 dan 001/RT.07-NH/1902/2025, tanggal 12 Juni 2025 dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 000.2.6.1/030/BPKAD/2025 dan 001/RT.07-BA/1902/2025, tanggal 12 Juni 2025. Atas pelaksanaan hibah ini telah dilakukan penghapusan dari daftar inventaris pengguna barang Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah nomor: 000.2.6.1/1747/BPKAD/2025, Tanggal 12 November 2025.

2. Atas pelaksanaan pemindahtanganan dalam bentuk hibah telah dilakukan pemecahan luas dan penyerahan bukti kepemilikan tanah yaitu:
   1) Pelepasan sebagian luas Sertifikat Hak Pakai No.143/Kel.Kota/2014 tanggal 07 Oktober 2014 dengan luasan awal ±10.687 m² sebagai berikut:
      - Luas tanah yang dilepaskan adalah ±1.265 m², kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
      - Luas tanah yang dilepaskan adalah ±750 m², kepada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
      - Luas tanah yang dilepaskan adalah ±82 m², kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
      - Luas tanah yang dilepaskan adalah sebagian luas ±115 m², kepada Kepolisian Resor Belitung.

        Sisa luasan tanah yang tercatat di dalam Sertifikat Hak Pakai No.143/Kel.Kota/2014 tanggal 07 Oktober 2014 atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung adalah ±8.406,23 m².

2) Pelepasan sebagian luas Sertifikat Hak Pakai No.141/Kel.Kota/2014 tanggal 2 September 2014 dengan luasan awal ±718 m² sebagai berikut:
Luas tanah yang dilepaskan adalah sebagian luas ±285 m², kepada Kepolisian Resor Belitung
Sisa luasan tanah yang tercatat di dalam Sertifikat Hak Pakai No.141/Kel.Kota/2014 tanggal 2 September 2014 atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung adalah ± 433 m².

Catatan lain yang perlu diungkapkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025, yaitu:

1. Terhadap temuan BPK RI pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016 atas aset tetap tanah yang tercatat pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung dengan alamat di Jalan A.Yani, Tanjungpandan (Kode Barang 01.01.11.04.01) seluas 10.486 m^2.
   Atas temuan ini telah selesai ditindaklanjuti. Pemerintah Kabupaten Belitung dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan rekonsiliasi yang dituangkan dalam Berita acara rekonsiliasi nomor : 000.2.5/0025/BAKUDA dan 000.2.6.1/1595/BPKAD.V tanggal 04 November 2025. Atas hasil rekonsiliasi ini telah ditindaklanjuti dengan Penetapan status penggunaan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/1058/KEP/BPKAD/2025 tanggal 24 Desember 2025. Pemerintah Kabupaten Belitung hanya mencatat sebagian luas tanah ± 3.967,76m² dari total luasan 10.185$m^{2,}$ karena sisanya seluas ± 6.217,5m² dicatat oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung peruntukan kantor Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Terkait dengan permasalahan yang termuat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020 atas huruf b. Permasalahan yang belum selesai ditindaklanjuti) angka 1) Melengkapi informasi yang tercatat pada database atas Aset Tetap Jalan agar menggambarkan kondisi ruas dan sub ruas jalan yang sebenarnya. Permasalahan yang belum selesai ditindaklanjuti, Luas dan nilai Aset Tetap Jalan dalam Buku Inventaris Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan masih belum disesuaikan dengan Keputusan Bupati.
   Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan penyesuaian atas 242 ruas dari jumlah 360 ruas yang terdapat pada SIMDA KIB D atau sebesar 67,22% per 31 Desember 2021. Masih terdapat sisa sebanyak **118** (**360-242**) atau 32,78%, ruas jalan yang belum disesuaikan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/207/KEP/DPUPR/2018 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dan Jembatan Menurut Statusnya Sebagai Jalan dan Jembatan Kabupaten dan Tanah Bawah Jalan pada KIB A.Tim Percepatan Penyelesaian Permasalahan Aset/Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan pendampingan rutin dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung terkait permasalahan jalan ini.Adapun kendala yang dihadapi terkait Penyesuaian Jalan dan Tanah Bawah Jalan tahap II tahun 2022, adanya pemaketan kegiatan waktu pembangunan jalan dahulu sehingga harus dipastikan jalan yang dibangun baru kemudian disesuaikan dengan ruas berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/207/KEP/DPUPR/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dan Jembatan Menurut Statusnya Sebagai Jalan dan Jembatan Kabupaten. Atas temuan ini terus dilakukan proses tindak lanjutnya, sisa yang belum ditindaklanjuti yaitu 118 ruas jalan atau 32,78%, ruas jalan yang belum disesuaikan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/207/KEP/DPUPR/2018 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dan Jembatan Menurut Statusnya Sebagai Jalan dan Jembatan Kabupaten dan Tanah Bawah Jalan pada KIB A.
   Sampai dengan pemeriksaan pendahuluan ini, terus dilakukan penyesuaian tersebut dikarenakan terdapat penambahan dan pemuktahiran jalan di dalam surat keputusan ruas jalan kabupaten nomor: 100.3.4/237.A/KEP/DPUPR/2024 tanggal 28 Juni 2024

tentang Ruas-Ruas Jalan dan Jembatan Menurut Statusnya sebagai Jalan dan Jembatan Kabupaten.

3. Pemerintah Kabupaten Belitung akan menerima hibah jalan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) paket pekerjaan jalan yaitu jalan tembus Buluh Tumbang-Aik Mungkui di Desa Buluh Tumbang Kecamatan Tanjungpandan dan jalan Pasir Panjang Desa Selat Nasik Kecamatan Selat Nasik. Akan tetapi penyerahan atas pelaksanaan hibah belum dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui satker jalan, balai pemantapan jalan nasional. Atas rencana penyerahan ini belum dilakukan pencatatan ke dalam buku inventaris, disebabkan pemerintah kabupaten Belitung belum menerima Naskah Hibah dan Berita acara serah terima sebagai dasar pencatatan.

   Serah terima dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan yang telah selesai dilakukan antara Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bangka Belitung dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dengan Nomor : 142/BA/Satker PJN II Babel/2025 dan Nomor : 600/134/DPUPR.I/2025 pada hari senin, tanggal 10 Februari 2025

4. Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan inventarisasi data tanah dan/ atau bangunan yang belum optimal dilakukan pemanfaatan aset (*idle*). Pemanfaatan ini dalam rangka untuk menunjang pendapatan daerah. Hasil inventarisasi akan dimanfaatkan untuk menentukan bentuk kebijakan pemanfaatan atas aset (*idle*) ini yang akan dikategorikan menurut jenis pemanfaatannya, seperti Sewa, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI) atau pemanfaatan lain untuk menunjang tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. Hal ini untuk memastikan penggunaan tertinggi dan terbaik *(Highest and Best Used)* atas pemanfaatan aset yang lebih optimal untuk menunjang pendapatan daerah.

5. Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan inventarisasi data tanah dan/ atau bangunan yang berpotensi untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk memperoleh kenaikan nilai yang dapat dikatagorikan sebagai properti investasi. Data awal yang bersumber dari daftar barang pengguna terdapat beberapa aset tanah dan/ atau bangunan yang belum dimanfaatkan secara optimal/ *idle.* Adapun jumlah tanah yang memenuhi kategori Properti Investasi adalah 6 (enam) bidang. Aset tanah tersebut telah dilakukan reklasifikasi pencataannya dari aset tetap ke kelompok Properti Investasi.

   Pada tahun 2025, sudah ada peminat sebanyak 2 (dua) lokasi dan telah diupayakan penilaian untuk tujuan pemanfaatan dalam bentuk sewa untuk barang kategori properti investasi tersebut yaitu:

   1) Tanah Bangunan Hotel/Penginapan/Motel yang terletak di Jalan Kemuning Tanjungpandan, saat ini sedang berproses perjanjian sewa dengan pihak penyewa (bapak Andi pemilik rumah makan Pondok Nelayan); dan
   2) Tanah Bangunan Kantor Pemerintah yang terletakdi Jalan Zainuddin Aba/Bukit, Tahap negosiasi harga dengan pihak pemohon (bpk Raymon).

   Daftar properti investasi tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 33**

6. Pemerintah Kabupaten Belitung terus melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung terkait pengamanan barang milik daerah berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung dan mengikuti program/kegiatan Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Tahun 2025 sebagai tindak lanjut program *Monitoring Center for Prevention* (*MCP*) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah Kabupaten Belitung juga telah mengidentifikasi dan melakukan pemetaan tanah yang masih belum bersertifikat berdasarkan kelompok 1 sampai kelompok 4.

   1) Kelompok 1 adalah status *clean & clear* (*C&C*) yaitu Pengamanan administrasi dan hukum lengkap dan tidak terdapat permasalahan.

Jumlah per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) register. Berkurang sebanyak 33 (tiga puluh tiga) register dibandingkan jumlah per 31 Desember 2024 sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) persil.

2) Kelompok 2 adalah status *clean & not clear* (*C&NC*) yaitu Pengamanan administrasi lengkap, Pengamanan hukum tidak lengkap dan tidak terdapat permasalahan.
   Jumlah per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 62 (enam puluh dua) register.
   Tahun 2025 telah diupayakan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:
   a. Terdapat 2 (dua) register yaitu tanah di Jalan Telex Air Ketekok Tanjungpandan dan Pantai Tanjung Pendam di Jalan Kemuning Tanjungpendam telah diusulkan ke Kantor Pertanahan Belitung untuk perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai selama dipergunakan atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung. Sampai dengan pemeriksaan pendahuluan ini, sertifikat belum juga diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung.
   b. Tanah Kebun Percobaan alamat Desa Badau, luas ±60.000 m², nilai perolehan Rp236.302.500,00, peruntukkan Kebun Sentra Bibit Buah-buahan telah dilakukan pengurusan pelepasan hak melalui Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Andrias Tjahya, S.H., M.KN
3) Kelompok 3 adalah status *not clean & clear* (*NC & C*) yaitu Pengamanan administrasi tidak lengkap, Pengamanan hukum lengkap dan tidak terdapat permasalahan.
   Jumlah per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 7 (tujuh) register.
   Sebagian bidang telah ditindaklanjuti oleh Dinas Perikanan Kabupaten Belitung dengan melakukan pengecekan lahan dan inventarisasi ulang lahan.
4) Kelompok 4 adalah status *not clean & not clear* (*NC&NC*) yaitu Pengamanan administrasi dan Pengamanan hukum tidak lengkap dan terdapat permasalahan.
   Jumlah per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) register.
   Tahun 2025 telah diupayakan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:
   a) Tanah Kebun Induk, alamat Jalan Pesantren RT.14 RW.04 Dusun Badau Kecamatan Badau, luas ±1.197.500 m² nilai perolehan Rp32.332.500.000,00, telah dilakukan pengukuran bersama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung pada tanggal 1 September 2025
   b) Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu, alamat Perumnas Air Pelempang, luas ±800 m², nilai perolehan Rp11.200.000,00 telah dilakukan rekonsiliasi antara UPT Puskesmas Tanjungpandan dan UPT Puskesmas Air Saga karena masing-masing mencatat atas barang yang sama yang dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi nomor: 000.2.6.2/242/PKM AS dan 000.2.6.2/033/PKM TP tanggal 12 November 2025 dan telah dihapuskan dari daftar barang inventaris kuasa pengguna barang UPT Puskesmas Air Saga berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah nomor 000.2.6.1/068/BPKAD/2025 tanggal 08 Desember 2025.
   c) Tanah Bangunan Pembibitan alamat Dusun Buluh tumbang, luas ±60.000 m², nilai perolehan Rp219.000.000,00, peruntukkan Lahan pembibitan telah dilakukan pengecekan bersama dengan unsur Pemerintah Kabupaten Belitung (Bagian Umum Sekretariat Daerah/ BPKAD Kabupaten Belitung) dan Tim BPK Perwakilan pada tanggal 11 November 2025
   d) Tanah Kebun Percobaan alamat Dusun Sungai Samak, luas ±10.000 m², nilai perolehan Rp35.000.000,00, peruntukkan Tanah Perkebunan telah dilakukan pengecekan dan identifikasi batas oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung untuk memastikan letak lahan dan fisik barang.
   e) Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III alamat Jalan Kerejan, luas ±50.310m², nilai perolehan Rp503.100.000,00, peruntukkan Rumah Dinas PNS telah dilakukan pengecekan bersama dengan unsur Pemerintah

Kabupaten Belitung (Bagian Umum Sekretariat Daerah/ BPKAD Kabupaten Belitung) dan Tim BPK Perwakilan Provinsi Kep. Bangka Belitung pada tanggal 23 September 2025 untuk memastikan letak lahan dan fisik barang.

f) Tanah Bangunan Rumah Penjaga, alamat Desa Tanjung Tinggi, Kecamatan Sijuk, luas ±997m², nilai perolehan Rp7.595.000,00, peruntukkan Eks. PRPTE Tanjung Tinggi. Telah pernah dilakukan koordinasi bersama Direktorat jenderal perkebunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bahwa aset tersebut masih tercatat juga di Barang Milik Negara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Untuk memastikan kejelasan status barang agar direkonsiliasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Agar tertib administrasi penatausahaannya.

g) Untuk Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Gedung Sekolah SD Negeri 10,11, 12, 13 dan 14 Membalong dan fasilitas umum dan sosial (fasum dan fasos) di Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau yang masuk dalam kawasan hutan lindung pantai telah dikoordinasikan bersama pimpinan DPRD Kabupaten Belitung dengan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, terdapat 9 (sembilan) aset milik Pemerintah Kabupaten Belitung yang berada dalam kawasan hutan lindung pantai dan belum dapat disertifikatkan terdiri dari 2 unit di Desa Sungai Samak (Kecamatan Badau) dan 7 unit di Desa Lassar (Kecamatan Membalong).

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.516/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2021 tanggal 26 Agustus 2021, sebagian kawasan hutan di wilayah Kabupaten Belitung telah dilepaskan dan ditetapkan menjadi Area Penggunaan Lain (APL). Namun demikian, masih terdapat beberapa objek aset yang belum dikeluarkan dari kawasan hutan. Terhadap aset yang masih berada dalam kawasan, pengusulan pelepasan dapat dilakukan setiap tahun melalui Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XIII Pangkalpinang untuk proses penataan batas dan penetapan lebih lanjut. Verifikasi awal dapat dilakukan melalui aplikasi SIGAP KLHK.

h) Untuk Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Gedung Sekolah SD) di yang berada di desa Sungai Padang dan Desa Air Selumar) dibawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia agar dilakukan inventarisasi atas lahan dan dilakukan tindakan pengamanan administrasi. Setelah dokumen alas hak lengkap, baru diusulkan ke kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung untuk ditingkatkan menjadi sertifikat.

i) Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan alamat Dusun Ibul Km. 25, Badau, luas ±150m², nilai perolehan Rp525.000,00, peruntukkan Rumah Dinas. Bangunan rumah dinas ini berada diatas lahan/tanah milik masyarakat. Hal ini telah dilakukan pengecekan bersama dengan unsur Pemerintah Kabupaten Belitung (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung/ BPKAD Kabupaten Belitung) dan Tim BPK Perwakilan pada tanggal 21 Oktober 2025

j) Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah, alamat desa Dukong, Kecamatan Tanjungpandan, luas ±10.000m², nilai perolehan Rp35.000.000,00 peruntukkan TPA Dukong. Dokumen alas hak berupa Surat Keterangan Tanah hilang dan tidak ditemukan lagi keberadaannya sehingga menyulitkan bagi Bidang aset daerah untuk meningkatkan status menjadi hak pakai selama dipergunakan. Terakhir telah dilakukan inventarisasi ulang batas dan letak berdasarkan koordinat yang ada yang disinkronkan dengan kondisi fisik di lapangan bersama tim Dinas

Lingkungan Hidup dan Bidang Aset Daerah BPKAD Kabupaten Belitung. Upaya penerbitan surat keterangan juga telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, akan tetapi sampai dengan pemeriksaan pendahuluan ini belum ada disampaikan informasi dan update terakhir terhadap dokumen alas hak tersebut.

Pemerintah Kabupaten Belitung dan Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung menyepakati bahwa sertifikat yang terbit tahun 2025 adalah sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) persil. Pengamanan atas aset tetap tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum.

7. Pada tahun 2023 terdapat pengadaan tanah untuk kepentingan umum kegiatan Pembangunan Jalan Provinsi atas dua bidang tanah berupa tanah untuk jalan yang tercatat dengan dengan luas '-' m^2, tidak terdapat luasan dikarenakan merupakan pembayaran ganti rugi bangunan warga Desa Pelepak Pute yang terdampak Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi pada ruas Jl. Simpang Empat (Sijuk) - Buding Dusun Aik Kalak dan ganti rugi bangunan warga Desa Membalong yang terdampak Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi pada ruas Jl. Air Kundur - Tanjung Rusa. Tanah tersebut tercatat di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dengan total nilai Rp553.184.500,00 dengan informasi sebagai berikut :
   a. Tanah untuk jalan tanggal perolehan 19/12/2023 dengan asal usul pembelian senilai Rp489.740.500,00; dan
   b. Tanah untuk jalan tanggal perolehan 22/12/2023 dengan asal usul pembelian senilai Rp63.444.000,00.

   Atas pengadaan tanah tersebut akan ditindaklanjuti dengan penetapan status penggunaan berdasarkan keputusan Bupati Belitung tahun 2026.

   Tanah yang telah dibebaskan tersebut diatas akan diserahkan dalam bentuk hibah kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

8. Pada tahun 2024 terdapat pengadaan tanah untuk kepentingan umum nama kegiatan Pembangunan Jembatan nomor DPPA: 1.03.10.2.01.0040. Kegiatan ini adalah *cost sharing* antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dimana untuk pembangunan jembatan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pembebasan lahan untuk akses jalan menuju jembatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung.

   Pembebasan lahan terdapat di 2 (dua) desa yaitu desa Dukong dan desa Juru Seberang Kecamatan Tanjungpandan. Di desa Dukong terdapat 8 (delapan) bidang tanah yang terdampak pembebasan lahan dan 4 (empat) bidang tanah di desa Juru Seberang Kecamatan Tanjungpandan dan pendukung pelaksanaan kegiatan dengan total nilai Rp4.626.985.290,00 dibawah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.
   a. Tanah untuk jembatan tanggal perolehan 18/12/2024 dengan asal usul pembelian senilai Rp4.135.660.290,00; dan
   b. Tanah untuk jembatan tanggal perolehan 17/09/2025 dengan asal usul pembelian senilai Rp491.325.000,00.

   Tahun 2025 telah selesai ditindaklanjuti dengan pemuktahiran data di sistem barang e BMD Kabupaten Belitung tahun 2023 dengan luas 7.354m^2 dan tahun 2025 dengan luas 1.256,23m^2.

   Atas pengadaan tanah tersebut akan ditindaklanjuti dengan penetapan status penggunaan berdasarkan keputusan Bupati Belitung tahun 2026.

   Tanah yang telah dibebaskan tersebut diatas akan diserahkan dalam bentuk hibah kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung (BPJN Babel) setelah selesai proses pembebasan lahan**.**

9. Pemerintah Kabupaten Belitung menerima penyerahan dari Kejaksaan Negeri Belitung berdasarkan surat perintah kepala Kejaksaan Negeri Belitung Nomor PRIN-718/L.9.12/Fu.1/07/2025 tanggal 7 Juli 2025 dalam perkara atas nama terdakwa Iwan

Sahie. Bahwa barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penuntutan karena untuk pelaksanaan putusan Makamah Agung RI Nomor 4234 K/Pid Sus/2025 tanggal 26 Mei 2025 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 9/PID/TPK/2024/PT BBL tanggal 31 Desember 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp tanggal 5 Desember 2024 telah mengembalikan barang bukti berupa satu bidang tanah dengan luas ±8.236,725m^2 yang beralamat di Jalan Kapten Saridin RT.12 RW.09 Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 594/001/SKT/KEL/PS/I/2023 tanggal 04 Januari 2023 atas nama Iwan Sahie.

Atas penyerahan ini belum dilakukan pencatatan di daftar inventaris barang Pemerintah Kabupaten Belitung karena Iwan Sahie masih melakukan proses kasasi atas putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tdn tanggal 02 Desember 2024 dan putusan Nomor 8/G/2025/PTUN. Pgp tanggal 02 Desember 06 Januari 2026.

10. Data tanah yang dilakukan pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai per 31 Desember 2025 yaitu sebanyak 8 (delapan) bidang tanah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Kecamatan Membalong dan Kecamatan Badau yang dilakukan pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai kepada Instansi/ Pemerintah Pusat yaitu kepada Kementerian Agama, Pangkalan TNI AL Bangka Belitung - Pos TNI Mendanau Tanjungpandan, Badan Amil dan Zakat Nasional Kabupaten Belitung, Dandim 0414/ Belitung, Komando Operasi AU I- Pangkalan TNI AU H.AS. Hanandjoeddin dan Badan Gizi Nasional untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Tanjungpandan, Badau dan Membalong.

5.3.1.2.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya alat besar, pajak serta biaya yang terkait langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung, ditetapkan batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah senilai Rp1.000.000,00 per unit peralatan dan mesin.

Aset tetap berupa peralatan dan mesin dikelompokkan menjadi alat besar, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pengeboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, peralatan proses/ produksi, rambu-rambu, dan peralatan olahraga.

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp734.764.018.545,72 mengalami kenaikan senilai Rp 14.396.400.693,90 atau meningkat 2,00% dibandingkan saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 (*audited*) senilai Rp720.367.617.851,82.

Peningkatan tersebut disebabkan adanya mutasi kumulatif atas aset tetap untuk tahun 2025 berupa mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap peralatan dan mesin, dengan perhitungan:

Tabel 86 Mutasi Peralatan dan Mesin 2025

Uraian		Jumlah (Rp)
- Saldo awal aset tetap peralatan dan mesin per 1 Januari 2025	Rp	720.367.617.851,82
- Mutasi penambahan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2025:	Rp	33.547.795.256,00
- Mutasi pengurangan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2025:	Rp	(19.151.394.562,10)
- Saldo akhir aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2025	Rp	734.764.018.545,72

Sumber: data BPKAD (diolah)

Mutasi penambahan nilai aset tetap peralatan dan mesin tahun 2025 senilai Rp33.547.795.256,00 dengan perincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp9.462.681.193,00 terdapat pada Perangkat Daerah Dinas sebagai berikut:
   a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp1.217.885.744,00;
   b. Sekretariat Daerah senilai Rp223.222.100,00;
   c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp426.184.500,00;
   d. Dinas Perhubungan senilai Rp2.961.075.819,00;
   e. Dinas Kesehatan senilai Rp445.497.903,00;
   f. Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. Marsidi Djudono senilai Rp1.985.924.987,00;
   g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp431.089.717,00;
   h. Dinas pemuda dan Olahraga senilai Rp131.550.000,00;
   i. Dinas Sosial Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp12.459.750,00;
   j. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian senilai Rp109.561.440,00;
   k. Dinas Kependudkan dan Pencatatan Sipil senilai Rp21.675.600,00;
   l. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp141.424.500,00;
   m. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp21.772.500,00;
   n. Dinas Perikanan senilai Rp126.540.000,00;
   o. Dinas Koperasi Usaha Kecin dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja senilai Rp53.125.000,00;
   p. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp63.880.500,00;
   q. Badan Pendapatan Daerah senilai Rp138.228.300,00;
   r. Inspektorat senilai Rp76.212.600,00;
   s. Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp325.035.750,00;
   t. Dinas Pariwisata senilai Rp126.806.370,00 ;
   u. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp20.100.000,00;
   v. Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp123.348.750,00;
   w. Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp13.203.450,00;
   x. Dinas Komunikasi dan informatika senilai Rp247.228.913,00; dan
   y. Kecamatan Sijuk senilai Rp19.647.000,00.
2. Belanja Modal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) senilai Rp1.735.907.040,00 terdapat pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
   a. Dinas Kesehatan senilai Rp647.082.040,00; dan
   b. Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. Marsidi Djudono senilai Rp1.088.825.000,00.
3. Belanja Modal Belanja Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp3.724.210.700,00 terdapat pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Belanja Modal Belanja Operasional Sekolah (BOS) Kinerja senilai Rp377.754.426,00 terdapat pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Belanja Modal Belanja Operasional Pendidikan (BOP) senilai Rp43.950.000,00 terdapat pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

6. Belanja Barang dan Jasa dengan total nilai Rp2.361.029.304,00 terdapat pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
   a. Sekretariat Daerah senilai Rp2.025.000,00;
   b. Dinas Perhubungan senilai Rp2.283.277.104,00;
   c. Dinas pemuda dan Olahraga senilai Rp58.500.000,00;
   d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil senilai Rp6.127.200,00; dan
   e. Dinas Komunikasi dan informatika senilai Rp11.100.000,00.
7. Belanja Barang dan Jasa Belanja Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp4.900.000,00 terdapat pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Belanja Operasional Pendidikan (BOP) senilai Rp6.000.000,00 terdapat pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Pemindahtanganan Dalam Bentuk Hibah (Hibah Masuk) Barang Milik Daerah peralatan dan mesin dengan total nilai Rp3.758.653.281,00 terdapat pada Perangkat Daerah Dinas sebagai berikut:
   a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp2.744.530.281,00, BAST Nomor: 513.3/BA/DC/2024 dan 000.2.4/896/BPKAD Tanggal 12 Juli 2024 dan Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/212/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 17 Maret 2025;
   b. Dinas Kesehatan senilai Rp805.410.000,00 BAST Nomor: KN.02.07/B.III/1773/2024 Tanggal 20 Mei 2024 dan Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/729/KEP/ BPKAD/2025 Tanggal 1 September 2025;
   c. Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. Marsidi Djudono senilai Rp120.000.000,00 BAST Nomor: 445/0993.A/UPT RSUD Dr. H. JD Tanggal 24 Maret 2025 dan Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/760/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 15 September 2025;
   d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp24.000.000,00 BAST Nomor: 900/01/PENGADAAN/Komite SDN 16 TP/2025 Tanggal 29 Desember 202; dan
   e. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp64.713.000,00 BAST Nomor: 014.a/BASTB/APBN/HOLTIKULTURA.TP/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 dan Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/860/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 13 Oktober 2025.
10. Pengalihan Antar Perangkat Daerah dengan total nilai Rp8.676.439.603,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
   a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp3.352.200,00 Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/1054/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 24 Desember 2025;
   b. Sekretariat Daerah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp13.408.800,00 Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/1041/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 24 Desember 2025;
   c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp87.970.000,00 Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/986/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 28 November 2025;
   d. Dinas Perhubungan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp2.801.273.000,00 Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/987/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 28 November 2025;
   e. Dinas Kesehatan senilai Rp4.402.468.403,00 dengan rincian sebagai berikut:
      1) Pengalihan aset tetap dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp3.352.200,00, Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/1053/KEP/BPKAD/ 2025 Tanggal 24 Desember 2025;
      2) Pengalihan aset tetap dari UPT Dinas Kesehatan senilai Rp4.399.116.203,00.

f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp6.704.400,00 Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/1044/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 24 Desember 2025;
g. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian dari Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp38.958.400,00 Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/437/KEP/BPKAD/ 2025 Tanggal Mei 2025;
h. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp6.704.400,00 Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/1043/KEP/BPKAD/ 2025 Tanggal 24 Desember 2025; dan
i. Dinas Lingkungan Hidup dari Dinas Perikanan senilai Rp1.315.600.000,00 Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/226/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 17 Maret 2025.

11. Reklasifikasi antar Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan total nilai Rp951.204.500,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
    a. Sekretariat Daerah senilai Rp9.435.000,00;
    b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp917.548.200,00; dan
    c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp24.221.300,00.
12. Reklasifikasi dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan total nilai Rp2.088.665.209,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
    a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp394.182.651,00;
    b. Sekretariat Daerah senilai Rp11.194.600,00;
    c. Dinas Kesehatan senilai Rp18.439.000,00;
    d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1.61 0.040.508,00;
    e. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp28.305.000,00;
    f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah senilai Rp13.203.450,00; dan
    g. Dinas Pariwisata senilai Rp13.300.000,00;
13. Koreksi dengan total nilai Rp356.400.000,00, pada Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Koreksi disebabkan oleh pemisahan nilai peralatan dan mesin dimana sebelumnya tercatat satu paket dengan nilai bangunan dan Gedung. Koreksi dilakukan bersadarkan surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor: 000.2.6.1/187/I/2025 Tanggal 28 Oktober 2025 Perihal: Mohon Pemisahan Penetapan Genset pada Sekretariat DPRD.

Daftar rincian penambahan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin disajikan pada **Lampiran 34 s.d 48**

Penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal, terdapat perbedaan pengakuan antara penambahan aset tetap yang disajikan sebagai aset intrakompatabel tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi belanja modal sebagaimana yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Perbedaan tersebut dikarenakan adanya pengakuan yang berbeda antara realisasi belanja modal berdasarkan SP2D dengan verifikasi atas hasil pengadaan yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pengakuan. Perbedaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 87 Mutasi Perbedaan Peralatan dan Mesin

Uraian	Jumlah (Rp)
- Realisasi belanja modal berupa peralatan dan mesin (LRA)	Rp 15.344.503.349,00
- Selisih Perbedaan Pengakuan	(Rp 4.830.257.909,00)
- Jumlah Penambahan Saldo Aset Tetap berupa peralatan dan mesin dari Realisasi Belanja Modal	Rp 10.514.245.440,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Atas perbedaan pengakuan sebesar Rp4.830.257.909,00 tersebut dari klasifikasi pengurangan atas:

1. Reklasifikasi antar kartu inventaris barang dengan total nilai Rp1.103.709.000,00 pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
   a. Rumah Sakit Umum Daerah dr.H. Marsidi Djudono senilai Rp1.088.825.000,00;
   b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp5.449.000,00; dan
   c. Sekretariat Daerah senilai Rp9.435.000,00.
2. Reklasifikasi dalam kartu inventaris barang dengan total nilai Rp2.088.665.209,00 pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
   1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp394.182.651,00;
   2) Sekretariat Daerah senilai Rp11.194.600,00;
   3) Dinas Kesehatan senilai Rp18.439.000,00;
   4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1.610.040.508,00;
   5) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp28.305.000,00;
   6) Dinas Pariwisata senilai Rp13.300.000,00; dan
   7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp13.203.450,00.
3. Reklasifikasi belanja modal ke aset ekstrakompatabel dengan total nilai Rp649.870.050,00 pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
   a. Sekretariat Daerah senilai Rp12.719.000,00;
   b. Dinas Kesehatan senilai Rp24.062.050,00; dan
   c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp613.089.000,00.
4. Reklasifikasi belanja modal ke beban pemeliharaan senilai Rp970.528.500,00. pada Perangkat Daerah Dinas Perhubungan.
5. Reklasifikasi belanja modal ke barang pakai habis dengan total nilai Rp17.485.150,00 pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
   a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp51.000,00;
   b. Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp2.800.000,00;
   c. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp10.122.000,00; dan
   d. Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp4.512.150,00.

   Daftar rincian Perbedaan Pengakuan aset tetap Peralatan dan Mesin tahun 2025 disajikan pada **Lampiran 49 s.d 53**

Mutasi pengurangan nilai aset tetap peralatan dan mesin tahun 2025 dengan total nilai Rp14.321.136.653,10 dengan perincian sebagai berikut :

1. Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan total nilai Rp797.274.400,00, pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah nomor: 188.46/036/KEP/BPKAD.V/2025 tanggal 02 Juli 2025;
2. Pengalihan antar Perangkat Daerah dengan total nilai Rp8.676.439.603,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
   a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan total nilai Rp2.922.765.000,00 terdiri dari:
      1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ke Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp3.352.200,00 Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/1054/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 24 Desember 2025.
      2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ke Dinas Kesehatan senilai Rp3.352.200,00 Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/1053/KEP/BPKAD/ 2025 Tanggal 24 Desember 2025
      3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ke Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp3.352.200,00 Surat Keputusan

Bupati Nomor: 100.3.4/1054/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 24 Desember 2025.

4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ke Sekretariat Daerah senilai Rp13.408.800,00 Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/1041/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 24 Desember 2025
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp6.704.400,00 Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/1044/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 24 Desember 2025.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ke Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja senilai Rp6.704.400,00 Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/1043/KEP/BPKAD/ 2025 Tanggal 24 Desember 2025.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp87.970.000,00 Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/986/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 28 November 2025.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ke Dinas Perhubungan senilai Rp2.801.273.000,00 Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/987/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 28 November 2025.

b. Dinas Perikanan ke Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp1.315.600.000,00 Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/226/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 17 Maret 2025;
c. Dinas Kesehatan ke UPT Puskesmas senilai Rp4.399.116.203,00; dan
d. Dinas Lingkungan Hidup ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian senilai Rp38.958.400,00 Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.4/437/KEP/BPKAD/ 2025 Tanggal Mei 2025.

3. Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin akibat perubahan kondisi barang dengan total nilai Rp4.847.422.650,10, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
   a. Dinas Kesehatan senilai Rp1.447.248.000,00;
   b. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian senilai Rp177.234.000,10;
   c. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp25.840.000,00;
   d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp453.946.650,00;
   e. Badan Pendapatan Daerah senilai Rp27.940.000,00;
   f. Dinas Pariwisata senilai Rp23.947.000,00 ;
   g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp1.837.807.500,00;
   h. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp100.997.000,00;
   i. Kecamatan Tanjungpandan senilai Rp29.500.000,00;
   j. Kecamatan Badau senilai Rp20.600.000,00;
   k. Kecamatan Membalong senilai Rp434.612.500,00; dan
   l. Kecamatan Selat Nasik senilai Rp267.750.000,00.

   Daftar rincian Perbedaan Pengakuan aset tetap Peralatan dan Mesin tahun 2025 disajikan pada **Lampiran 54 s.d 56**

Catatan lain yang perlu diungkapkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025, yaitu:

1. Terdapat hibah berupa barang dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) unit peralatan dan mesin dengan total nilai Rp2.744.530.281,00 berupa Ultra violet viewing box and Lampu Ultra violet, berdasarkan naskah hibah barang milik negara (BMN) antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Nomor: 543.2/BA/DC/2024 dan Nomor:

002.2.4/895/BPKAD tanggal 12 Juli 2024, dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 513.3/BA/DC/2024 dan Nomor: 002.2.4/896/BPKAD tanggal 12 Juli 2024. Sehubungan dengan baru diselesaikan penandatanganan dokumen hibah tersebut maka atas pelaksanaan hibah ini akan ditetapkan status penggunaan melalui Keputusan Bupati Belitung tahun 2025.

Atas hibah ini telah ditindaklanjuti dengan dilakukan penetapan status penggunaan pada tahun 2025 berdasarkan keputusan Bupati Belitung nomor: 100.3.4/212/KEP/BPKAD/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Atas Hibah Antara Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Berupa Peralatan dan Mesin, Gedungdan Bangunan serta Jalan Irigasi dan Jaringan Menjadi Barang Milik Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dan Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung.

2. Data kendaraan yang dilakukan pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai per 31 Desember 2025 yaitu sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit mobil berbagai merk pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung yang dilakukan pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai kepada berbagai instansi seperti Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II Tanjungpandan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung, Komando Operasi TNI Angkatan Udara H.AS. Hanandjoeddin, Komandan Distrik Militer 0414/ Belitung, Detasemen Polisi Militer II/4 Subdenpom Persiapan Belitung, Pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung, Pengadilan Agama Tanjungpandan, Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Kejaksaan Negeri Belitung, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan dan Kepolisian Resor Belitung.

3. Bantuan Digitalisasi Pembelajaran Tahun Anggaran 2025

   Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung menerima Bantuan Digitalisasi Pembelajaran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Bantuan dimaksud disalurkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Nomor 8622/C/DM.00.03/2025 tanggal 30 September 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Nomor 3989/C/DM.00.03/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Digitalisasi Pembelajaran Tahun Anggaran 2025. Mekanisme penyaluran bantuan dilaksanakan secara langsung dari Pemerintah Pusat kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung penerima. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung melakukan penerimaan barang dan menandatangani Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang (BAPP) bersama pihak penyedia. Namun demikian, dokumen BAPP dimaksud belum mencantumkan informasi nilai atau harga perolehan barang yang diterima.

   Sampai dengan tanggal penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Belitung belum melakukan pencatatan atas bantuan dimaksud sebagai Barang Milik Daerah (BMD). Hal tersebut disebabkan proses administrasi penyerahan aset belum sepenuhnya selesai, karena belum diterimanya dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dari masing-masing Direktorat sesuai jenjang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, yaitu Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Direktorat Sekolah Dasar (SD), dan Direktorat Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung penerima. Belum dilakukannya pencatatan BMD tersebut bukan merupakan pengabaian kewajiban administrasi pengelolaan aset daerah, melainkan dilakukan dengan

mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, kecukupan bukti administrasi, serta ketentuan pengelolaan barang milik daerah yang mensyaratkan adanya dokumen sumber yang memadai sebagai dasar pengakuan dan pencatatan aset. Pemerintah Kabupaten Belitung melalui perangkat daerah terkait tetap melakukan inventarisasi dan pemantauan atas keberadaan barang dimaksud sambil menunggu kelengkapan dokumen penyerahan dari pihak pemberi bantuan. Jumlah penerima Bantuan Digitalisasi Pembelajaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung negeri terdiri atas 114 (seratus empat belas) Sekolah Dasar Negeri, 21 (dua puluh satu) Sekolah Menengah Pertama Negeri, 12 (dua belas) Taman Kanak-kanak Negeri dan 1 (satu) Sanggar Kegiatan Belajar. Sementara itu, jumlah penerima Bantuan Digitalisasi Pembelajaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung swasta terdiri atas 7 (tujuh) Sekolah Dasar Swasta, 8 (delapan) Sekolah Menengah Pertama Swasta, 47 (empat puluh tujuh) TK/PAUD Swasta dan 2 (dua) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Fajrul Islam di Kecamatan Tanjungpandan dan Cahaya Ilmu di Kecamatan Sijuk. Atas bantuan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Belitung akan melakukan proses verifikasi, rekonsiliasi, dan pencatatan ke dalam administrasi Barang Milik Daerah setelah seluruh dokumen pendukung yang dipersyaratkan, termasuk Berita Acara Serah Terima dan informasi nilai perolehan barang, diterima secara lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.3.1.2.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, jasa perencanaan, jasa pengawasan, biaya pengurusan IMB, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukan untuk keperluan pembangunan, biaya notaris, dan pajak

Aset tetap berupa gedung dan bangunan terdiri dari beberapa jenis kelompok barang seperti bangunan gedung, monumen, bangunan menara dan tugu titik kontrol/pasti.

Berdasarkan berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung, ditetapkan batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah senilai Rp10.000.000,00.

Saldo aset tetap berupa gedung dan bangunan Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp793.514.762.654,07 mengalami kenaikan senilai Rp 8.128.127.587,00 atau meningkat 1,03% dibandingkan saldo aset tetap berupa gedung dan bangunan Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 (*audited*) senilai Rp785.386.635.067,07.

Peningkatan tersebut disebabkan adanya mutasi kumulatif atas aset tetap untuk tahun 2025 berupa mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap gedung dan bangunan, dengan perhitungan:

Tabel 88 Mutasi Gedung dan Bangunan 2025

Uraian		Jumlah (Rp)
- Saldo awal aset tetap berupa gedung dan bangunan per 1 Januari 2025	Rp	785.386.635.067,07
- Mutasi penambahan aset tetap berupa gedung dan bangunan tahun 2025:	Rp	23.347.122.849,00
- Mutasi pengurangan aset tetap berupa gedung dan bangunan tahun 2025:	Rp	(15.218.995.262,00)
- Saldo akhir aset tetap berupa gedung dan bangunan per 31 Desember 2025	Rp	793.514.762.654,07

Sumber: data BPKAD (diolah)

Aset tetap berupa gedung dan bangunan terdiri dari beberapa jenis seperti bangunan gedung, monumen, bangunan menara dan tugu titik kontrol/pasti**.** Berikut rincian atas mutasi penambahan gedung dan bangunan yang terjadi pada tahun 2025 senilai Rp23.347.122.849,00 berdasarkan kelompok aset tetap sebagai berikut:

1. Belanja Modal dengan total nilai Rp8.954.328.979,00, pada Perangkat daerah sebagai berikut:
   a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp946.703.200,00;
   b. Dinas Kesehatan senilai Rp3.515.516.094,00;
   c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp2.489.745.010,00;
   d. Dinas Sosial Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp951.110.299,00;
   e. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp882.275.600,00;
   f. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp119.555.000,00; dan
   g. Badan Perencanaan Pembangunan Derah senilai Rp49.420.776,00.

2. Belanja Barang dan Jasa dengan total nilai Rp974.102.739,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
   a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp49.861.200,00;
   b. Dinas Kesehatan senilai Rp231.913.198,00;
   c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp102.237.150,00;
   d. Dinas Sosial Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp142.274.000,00;
   e. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp63.716.220,00;
   f. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja senilai Rp184.406.000,00; dan
   g. Badan Perencanaan Pembangunan Derah senilai Rp199.694.971,00.

3. Pemindahtanganan dalam bentuk hibah (Hibah Masuk) dengan total nilai Rp8.012.440.083,00, pada Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BAST nomor: 513.3/BA/DC/2024 dan 000.2.4/896/BPKAD tanggal: 12 Juli 2024, Surat Keputusan Bupati nomor: 100.3.4/212/KEP/BPKAD/2025 tanggal: 17 Maret 2025

4. Pengalihan Antar Perangkat Daerah dengan total nilai Rp5.096.001.523,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
   a. Sekretariat Daerah Pengalihan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja senilai Rp14.960.000,00, Surat Keputusan Bupati nomor: 100.3.4/418/KEP/BPKAD/2025 tanggal: 9 Mei 2025;
   b. Dinas Kesehatan Pengalihan dari UPT Puskesmas senilai Rp3.733.275.292,00;
   c. Dinas Pemuda dan Olahraga Pengalihan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp119.895.000,00, Surat Keputusan Bupati nomor: 100.3.4/541/KEP/BPKAD/2025 tanggal: 26 Juni 2025;
   d. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Pengalihan dari Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp833.856.231,00, Surat Keputusan Bupati nomor: 100.3.4/437/KEP/BPKAD/2025 tanggal: Mei 2025;
   e. Badan Perencanaan Pembangunan Derah Pengalihan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp39.600.000,00, Surat Keputusan Bupati nomor: 100.3.4/1042/KEP/BPKAD/2025 tanggal: 24 Desember 2025;

f. Dinas Komunikasi dan informatika Pengalihan dari Dinas Perikanan senilai Rp154.815.000,00, Surat Keputusan Bupati nomor: 100.3.4/457/KEP/BPKAD/2025 tanggal: 26 Mei2025; dan
g. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp196.600.000,00, Surat Keputusan Bupati nomor: 100.3.4/541/KEP/BPKAD/2025 tanggal: 26 Juni 2025;

5. Reklasifikasi Antar Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan senilai Rp126.350.125,00, pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

6. Reklasifikasi Dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan total nilai Rp183.899.400,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp29.155.000,00; dan
b. Dinas Kesehatan senilai Rp154.744.400,00.

Daftar rincian penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan tahun 2025 disajikan pada **Lampiran 57 s.d 64**.

Penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal, terdapat perbedaan pengakuan antara penambahan aset tetap yang disajikan sebagai aset intrakomptabel tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi belanja modal sebagaimana yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Perbedaan tersebut dikarenakan adanya pengakuan yang berbeda antara realisasi belanja modal berdasarkan SP2D dengan verifikasi atas hasil pengadaan yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pengakuan. Perbedaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
- Realisasi belanja modal berupa gedung dan bangunan (LRA)	8.954.328.979,00
- Selisih Perbedaan Pengakuan	(1.390.947.600,00)
- Jumlah Penambahan Saldo Aset Tetap berupa gedung dan bangunan dari Realisasi Belanja Modal	7.563.381.379,00

Atas perbedaan pengakuan sebesar Rp1.390.947.600,00 tersebut dari klasifikasi pengurangan atas:

1. Reklasifikasi Antar Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan total nilai Rp1.207.048.200,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
   c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp917.548.200,00; dan
   d. Dinas Kesehatan senilai Rp289.500.000,00.
2. Reklasifikasi Dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan total nilai Rp183.899.400,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
   a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp29.155.000,00; dan
   b. Dinas Kesehatan senilai Rp154.744.400,00.

   Daftar rincian perbedaan pengakuan aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan dalam **Lampiran 65 s.d 66**

Sedangkan mutasi pengurangan aset tetap gedung dan bangunan yang terjadi selama tahun 2025 adalah senilai Rp13.828.047.662,00 sebagai berikut:

1. Penghapusan Aset Tetap dengan total nilai Rp526.379.639,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
   a. Dinas Perhubungan senilai Rp63.502.500,00, Surat Keputusan Sekretaris Daerah nomor: 000.2.6.1/1635/ BPKAD/2025 tanggal 8 Desember 2025; dan

b. Dinas Pariwisata senilai Rp462.877.139,00, Surat Keputusan Sekretaris Daerah nomor: 000.2.6.1/054/KEP/BPKAD/2023 tanggal 25 Januari 2023.

2. Pemindahtanganan dalam bentuk hibah (Hibah Keluar) dengan total nilai Rp7.290.462.500,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
   a. Sekretariat Daerah senilai Rp375.480.000,00, Naskah Hibah nomor: 000.2.6.1/029/BPKAD/2025 dan 001/RT.07-NH/1902/2025 tanggal 12 Juni 2025; dan
   b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp6.914.982.500,00 BAST nomor: 000.2.6.1/1600/BPKAD/2025 dan 11089/MK/LK.01.03/2025 tanggal 19 November 2025.
3. Pengalihan Antar Perangkat Daerah dengan total nilai Rp5.096.001.523,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
   a. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Pengalihan ke Sekretariat Daerah senilai Rp14.960.000,00, Surat Keputusan Bupati nomor: 100.3.4/418/KEP/BPKAD/2025 tanggal: 9 Mei 2025;
   b. Dinas Kesehatan Pengalihan Puskesmas senilai Rp3.733.275.292,00
   c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pengalihan ke Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp119.895.000,00, Surat Keputusan Bupati nomor: 100.3.4/541/KEP/BPKAD/2025 tanggal: 26 Juni 2025;
   d. Dinas Lingkungan Hidup Pengalihan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian senilai Rp833.856.231,00, Surat Keputusan Bupati nomor: 100.3.4/437/KEP/BPKAD/2025 tanggal: Mei 2025;
   e. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengalihan ke Badan Perencanaan Pembangunan Derah senilai Rp39.600.000,00, Surat Keputusan Bupati nomor: 100.3.4/1042/KEP/BPKAD/2025 tanggal: 24 Desember 2025;
   f. Dinas Perikanan Pengalihan ke Dinas Komunikasi dan informatika senilai Rp154.815.000,00, Surat Keputusan Bupati nomor: 100.3.4/457/KEP/BPKAD/2025 tanggal: 26 Mei2025; dan
   g. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pengalihan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp196.600.000,00, Surat Keputusan Bupati nomor: 100.3.4/541/KEP/BPKAD/2025 tanggal: 26 Juni 2025.
4. Pengurangan Aset Tetap akibat perubahan kondisi barang dengan total nilai Rp445.160.000,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
   a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp66.100.000,00;
   b. Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp227.065.000,00;
   c. Dinas Pariwisata senilai Rp138.755.000,00; dan
   d. Kecamatan Badau senilai Rp13.240.000,00.
5. Koreksi Lebih Catat dengan total nilai Rp470.044.000,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
   a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp356.400.000,00;
   b. Dinas Kesehatan senilai Rp43.745.000,00;
   c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp53.510.000,00; dan
   d. Dinas Sosial Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp16.389.000,00.

   Daftar rincian pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan dalam **Lampiran 65 s.d 71**

Catatan lain yang perlu diungkapkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025, yaitu:

1. Terdapat aset tetap gedung dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Belitung, namun berdiri diatas tanah milik pihak lain, yaitu:
   1) Bangunan Polindes di Desa Dukong Kecamatan Tanjungpandan (kode barang 03.11.01.06.10.0001) seluas 30 m^2 pengadaan tahun 1995 senilai Rp16.500.000,00. Bangunan berdiri diatas tanah milik Pemerintah Desa Dukong dan proses untuk penghibahan terus dilakukan untuk memberikan kepastian hukumnya.

      Berdasarkan hasil survei lapangan tanggal 17 April 2024, bangunan yang sebelumnya diperuntukkan sebagai Polindes Desa Dukong telah berubah fungsi menjadi Rumah Dinas Bidan Desa Dukong dan saat ini tidak dimanfaatkan. Bangunan tersebut berdiri di atas tanah milik Desa Dukong, Kecamatan Tanjungpandan. Pemerintah Desa Dukong telah menyampaikan surat kepada Pemerintah Kabupaten Belitung terkait rencana pemanfaatan bangunan dimaksud untuk mendukung Program Desa Bersih Narkoba bersama BNN Kabupaten Belitung. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Belitung akan melakukan pengkajian atas usulan hibah dari Pemerintah Desa Dukong dan menindaklanjuti rencana pemindahtanganan aset dalam bentuk hibah kepada Pemerintah Desa Dukong pada tahun 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama proses tersebut berlangsung, aset dimaksud tetap dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bentuk pengamanan Barang Milik Daerah.
   2) Bangunan Polindes Sungai Samak berdiri di atas Kawasan Hutan Lindung Pantai.

      Dalam rangka penyelesaian status hukum aset tanah, Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan koordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XIII Pangkalpinang dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan juga telah melakukan inventarisasi aset tanah oleh Pengguna Barang pada yang dituangkan dalam berita acara sebagai dasar pembuatan alas hak dan peningkatan status menjadi Hak Pakai selama digunakan, termasuk pengukuran ulang salah satu objek seluas ±672 m^2. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 9 (sembilan) unit aset yang terindikasi berada dalam Kawasan Hutan Lindung Pantai, sebagian telah berstatus Area Penggunaan Lain (APL), sementara sebagian lainnya belum ditetapkan pelepasannya. Terhadap objek yang belum dikeluarkan dari kawasan hutan, Pemerintah Kabupaten Belitung mengupayakan penyelesaian melalui pengusulan perubahan peruntukan kawasan hutan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan dukungan verifikasi melalui aplikasi SIGAP KLHK.
   3) Bangunan Sekolah SDN 30 Membalong di Kecamatan Membalong, berdiri diatas Hak Guna Usaha PT Foresta Lestari Dwikarya, Tbk., sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit.

      Bangunan Sekolah Dasar Negeri 30 Membalong merupakan aset tetap Pemerintah Kabupaten Belitung yang berdiri di atas tanah berstatus Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Foresta Lestari Dwikarya. Sampai dengan tanggal pelaporan, status kepemilikan

tanah dimaksud belum menjadi milik Pemerintah Kabupaten Belitung. Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna memperoleh kejelasan dan penyelesaian status hukum atas tanah tersebut, namun sampai dengan pemeriksaan laporan keuangan berakhir belum terdapat penetapan atau realisasi penyerahan hak atas tanah dimaksud. Sehubungan dengan kondisi tersebut, bangunan sekolah tetap dicatat dan disajikan sebagai aset tetap Pemerintah Kabupaten Belitung sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pemerintah Kabupaten Belitung secara berkelanjutan melakukan upaya administratif sesuai ketentuan yang berlaku sebagai langkah pengamanan Barang Milik Daerah.

2. Pemerintah Kabupaten Belitung memiliki tanah dan bangunan Pasar Rakyat Kecamatan Membalong dibawah Pengelolaaan Pengguna barang Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja yang dibangun di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung dan sampai dengan tanggal pelaporan belum dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Membalong serta melakukan pengkajian dan survei lapangan bersama perangkat daerah terkait untuk rencana kerja sama pengelolaan dan pemanfaatan bangunan dimaksud. Sampai dengan saat ini, pola pemanfaatan Barang Milik Daerah tersebut belum ditetapkan dan bangunan pasar masih dalam kondisi belum dimanfaatkan (idle). Sehubungan dengan hal tersebut, aset dimaksud tetap dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Hasil inventarisasi yang disajikan dalam pos koreksi kurang catat (tahun sebelumnya) sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan total nilai Rp896.853.000,00 berupa bangunan gedung yaitu bangunan gedung pertemuan permanen, bangunan gedung pendidikan permanen, bangunan tempat pendidikan lain-lain (dst) dan bangunan gedung perpustakaan permanen disebabkan belum adanya penyerahan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

   Dasar Pencatatan Barang Milik Daerah tersebut menggunakan Berita Acara hasil Inventarisasi yang kemudian akan ditetapkan menggunakan Keputusan Bupati Belitung terkait penetapan status penggunaan tahun 2025.Pelaksanaan Pekerjaan ini berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. 014/UGB.Percontohan/Sarpras/C2.3/2019 antara Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung tentang Pemberian Bantuan Unit Gedung Baru PAUD Percontohan Termasuk Mebelair dan Sarana Pembelajaran Tahun 2019.

   Hasil inventarisasi ini telah ditindaklnajuti dengan dilakukan penetapan status penggunaan pada tahun 2025 berdasarkan keputusan Bupati Belitung nomor:100.3.4/528/KEP/BPKAD/2025 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Yang Berasal Dari Sumber Perolehan Lainnya Yang Sah Berupa Unit Gedung Baru PAUD Percontohan, Meubelair dan Sarana Pembelajaran Tahun 2019 Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung tanggal 23 Juni 2025.

4. Terdapat hibah berupa barang dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 6 (enam) unit gedung dan bangunan dengan rincian 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp4.019.145.780,00 berupa tugu lainnya dan sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp3.993.294.303,00 berupa bangunan fasilitas umum lainnya, berdasarkan naskah hibah barang milik negara (BMN) antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Nomor: 543.2/BA/DC/2024 dan Nomor: 002.2.4/895/BPKAD tanggal 12 Juli 2024, dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 513.3/BA/DC/2024 dan Nomor: 002.2.4/896/BPKAD tanggal 12 Juli 2024. Sehubungan dengan baru diselesaikan penandatanganan dokumen hibah tersebut maka atas pelaksanaan hibah ini akan ditetapkan status penggunaan melalui Keputusan Bupati Belitung tahun 2025.
   Atas hibah ini telah ditindaklnajuti dengan dilakukan penetapan status penggunaan pada tahun 2025 berdasarkan keputusan Bupati Belitung nomor: 100.3.4/528/KEP/BPKAD/2025 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Yang Berasal Dari Sumber Perolehan Lainnya Yang Sah Berupa Unit Gedung Baru PAUD Percontohan, Meubelair dan Sarana Pembelajaran Tahun 2019 Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung tanggal 23 Juni 2025.
5. Data gedung dan bangunan yang dilakukan pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai per 31 Desember 2025 yaitu sebanyak 1 (satu) unit bangunandibawah pengelolaan Kuasa Pengguna Barang Bagian Umum Sekretariat Daerah yang dilakukan pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai kepada DANDIM 0414 / BELITUNG berupa tanah dan bangunan Rumah Dinas Dandim 0414/ Belitung.Atas pelaksanaanpemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai telah dituangkan kedalam surat perjanjian pinjam pakai nomor 000.2.6.1/001/PP/VII/2025, yang berlaku selama 5 (lima) terhitung sejak 27 Agustus 2025 sampai dengan 27 Agustus 2030
6. Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung menerima Bantuan Revitalisasi Bangunan Sekolah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Bantuan tersebut diberikan melalui mekanisme penyaluran langsung dari Pemerintah Pusat kepada rekening masing-masing Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung penerima sesuai ketentuan program bantuan pemerintah pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dasar pelaksanaan bantuan dimaksud antara lain mengacu pada Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sekolah Dasar Nomor: 19283/C3.2/BP2.01/VII/SK/2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Revitalisasi Sekolah Dasar Tahun 2025 Angkatan 2 Tahap 4 serta dokumen perjanjian kerja sama antara Direktorat terkait dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung penerima bantuan. Sampai dengan tanggal penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, bantuan revitalisasi dimaksud belum dilakukan pencatatan sebagai penambahan Barang Milik Daerah (BMD). Hal tersebut disebabkan proses administrasi penyerahan aset belum sepenuhnya selesai dan Pemerintah Kabupaten Belitung belum menerima dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai dokumen sumber yang memadai untuk mendukung proses pengakuan dan pencatatan aset sesuai ketentuan pengelolaan barang milik daerah. Selain itu, nilai yang tercantum dalam dokumen perjanjian kerja sama merupakan nilai pagu atau alokasi anggaran sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Pejabat Pembuat Komitmen dan belum sepenuhnya dapat dijadikan dasar nilai

pengakuan aset. Hal ini karena dana bantuan yang ditransfer kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung tidak seluruhnya direalisasikan menjadi nilai hasil pekerjaan fisik. Dalam pelaksanaannya, apabila terdapat sisa dana setelah penyelesaian kegiatan dan pertanggungjawaban pelaksanaan, maka sisa dana tersebut dikembalikan dan disetorkan kembali ke rekening Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah sesuai ketentuan yang berlaku.Dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, substansi ekonomi transaksi, kecukupan bukti administrasi, serta untuk menghindari risiko salah saji nilai aset, Pemerintah Kabupaten Belitung belum melakukan pengakuan maupun pencatatan atas bantuan revitalisasi tersebut ke dalam administrasi Barang Milik Daerah. Meskipun demikian, perangkat daerah terkait tetap melakukan pemantauan, inventarisasi, dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung penerima serta pihak kementerian guna memperoleh kelengkapan dokumen administrasi yang dipersyaratkan. Penerima Bantuan Revitalisasi Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung negeri terdiri dari:

1. Sekolah Dasar Negeri (5 sekolah):
    1) SD Negeri 2 Badau;
    2) SD Negeri 3 Sijuk;
    3) SD Negeri 17 Membalong;
    4) SD Negeri 19 Membalong;
    5) SD Negeri 48 Tanjungpandan.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (2 sekolah):
    1) SMP Negeri 1 Selat Nasik;
    2) SMP Negeri 5 Membalong.

5.3.1.2.2.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Jalan, Jaringan dan Irigasi mencakup Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai. Jalan, Jaringan dan Irigasi tidak ada batasan nilai kapitalisasi aset tetap.

Berdasarkan berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung, ditetapkan tidak ada batasan minimal kapitalisasi aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan.

Saldo aset tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp2.220.982.321.608,24 mengalami peningkatan senilai Rp45.455.023.675,00 atau sebesar 2.09% dari saldo akhir 31 Desember 2024 (*Audited*) yaitu Rp2.175.527.297.933,24.

Peningkatan tersebut disebabkan adanya mutasi kumulatif atas aset tetap untuk tahun 2025 berupa mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi, dengan perhitungan:

Tabel 89 Mutasi Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025

Uraian		Jumlah (Rp)
- Saldo awal aset tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi per 1 Januari 2025	Rp	2.175.527.297.933,24
- Mutasi penambahan aset tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2025:	Rp	47.445.619.272,00

- Mutasi pengurangan aset tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2025:	Rp	(1.990.595.597,00)
- Saldo akhir aset tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025	Rp	2.220.982.321.608,24

Sumber: data BPKAD (diolah)

Aset tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi terdiri dari beberapa jenis kelompok barang seperti jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan. Berikut data mutasi penambahan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan yang terjadi pada tahun 2025 senilai Rp47.445.619.272,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan total nilai Rp10.996.019.657,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
   a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp10.105.173.560,00;
   b. Dinas Perhubungan senilai Rp548.851.808,00;
   c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp32.649.089,00; dan
   d. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja senilai Rp309.345.200,00.
2. Belanja Barang dan Jasa Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan total nilai Rp10.221.918.469,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
   a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp10.056.838.969,00;
   b. Dinas Perhubungan senilai Rp49.797.000,00;
   c. Dinas Kesehatan senilai Rp11.147.000,00; dan
   d. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja senilai Rp104.135.500,00.
3. Pemindahtanganan dalam bentuk hibah (Hibah Masuk) Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan total nilai Rp24.021.844.596,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
   a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hibah dari Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp19.364.955.096,00, BAST nomor: 513.3/BA/DC/2024 dan 000.2.4/896/BPKAD tanggal: 12 Juli 2024 Keputusan Bupati nomor: 100.3.4/212/KEP/BPKAD/2025 tanggal 17 Maret 2025; dan
   b. Dinas Pariwisata Hibah dari Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp4.656.889.500,00 BAST nomor: 513.3/BA/DC/2024 dan 000.2.4/896/BPKAD tanggal: 12 Juli 2024 Keputusan Bupati nomor: 100.3.4/212/KEP/BPKAD/2025 tanggal 17 Maret 2025.
4. Pengalihan antar Perangkat Daerah Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan total nilai Rp429.618.250,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
   a. Dinas Kesehatan pengalihan dari UPT Dinas Kesehatan senilai Rp289.500.000,00; dan
   b. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian pengalihan dari Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp140.118.250,00, Surat Keputusan Bupati nomor: 100.3.4/437/KEP/BPKAD/2025 tanggal: Mei 2025.
5. Reklasifikasi antar Kartu Inventaris Barang (KIB) Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan total nilai Rp1.676.943.300,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
   a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp298.618.300,00;
   b. Dinas Kesehatan senilai Rp289.500.000,00; dan
   c. Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. Marsidi Djudono senilai Rp1.088.825.000,00.

6. Reklasifikasi dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan total nilai Rp99.275.000,00, pada Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

   Rekapitulasi saldo aset tetap berupa jalan, jaringan dan irigasi beserta penambahan dan pengurangan per 31 Desember 2025 disajikan pada **Lampiran 72 s.d 79**

Penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal, terdapat perbedaan pengakuan antara penambahan aset tetap yang disajikan sebagai aset intrakomptabel tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi belanja modal sebagaimana yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Perbedaan tersebut dikarenakan adanya pengakuan yang berbeda antara realisasi belanja modal berdasarkan SP2D dengan verifikasi atas hasil pengadaan yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pengakuan. Perbedaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
- Realisasi belanja modal berupa jalan, jaringan dan irigasi (LRA)	10.996.019.657,00
- Selisih Perbedaan Pengakuan	(698.511.300,00)
- Jumlah Penambahan Saldo Aset Tetap berupa jalan, jaringan dan irigasi dari Realisasi Belanja Modal	10.745.379.616,00

Atas perbedaan pengakuan sebesar Rp698.511.300,00 tersebut dari klasifikasi pengurangan atas :

1. Reklasifikasi Antar Kartu Inventaris Barang (KIB) senilai Rp6.471.300,00, pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Reklasifikasi Dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) senilai Rp99.275.000,00, pada Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
3. Reklasifikasi Belanja Modal ke Persediaan senilai Rp592.765.000,00, pada Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Daftar rincian perbedaan pengakuan aset tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi disajikan dalam **Lampiran 80 s.d 82**.

Mutasi pengurangan nilai aset tetap jalan, jaringan dan irigasi tahun 2025 dengan total nilai Rp1.292.084.297,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengalihan Antar Perangkat Daerah senilai Rp429.618.250,00, pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
   a. UPT Dinas Kesehatan Pengalihan ke Dinas Kesehatan senilai Rp289.500.000,00; dan
   b. Dinas Lingkungan Hidup Pengalihan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian dengan Surat Keputusan Bupati nomor: 100.3.4/437/KEP/BPKAD/2025 Tanggal: Mei 2025 senilai Rp140.118.250,00.
2. Pengurangan Aset Tetap akibat perubahan kondisi barang senilai Rp250.640.047,00, pada Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup; dan
3. Koreksi Lebih Catat senilai Rp611.826.000,00, pada Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

   Daftar rincian pengurangan aset tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi disajikan dalam **Lampiran 83 s.d 85**

Catatan lain yang perlu diungkapkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025, yaitu:

1. Terkait dengan permasalahan yang termuat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun

Anggaran 2020 atas huruf b. Permasalahan yang belum selesai ditindaklanjuti) angka 1) Melengkapi informasi yang tercatat pada database atas Aset Tetap Jalan agar menggambarkan kondisi ruas dan sub ruas jalan yang sebenarnya. Permasalahan yang belum selesai ditindaklanjuti, Luas dan nilai Aset Tetap Jalan dalam Buku Inventaris Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan masih belum disesuaikan dengan Keputusan Bupati.

Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan penyesuaian atas 242 ruas dari jumlah 360 ruas yang terdapat pada SIMDA KIB D atau sebesar 67,22% per 31 Desember 2021. Masih terdapat sisa sebanyak **118** (**360-242**) atau 32,78%, ruas jalan yang belum disesuaikan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/207/KEP/DPUPR/2018 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dan Jembatan Menurut Statusnya Sebagai Jalan dan Jembatan Kabupaten dan Tanah Bawah Jalan pada KIB A. Tim Percepatan Penyelesaian Permasalahan Aset/Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan pendampingan rutin dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung terkait permasalahan jalan ini. Adapun kendala yang dihadapi terkait Penyesuaian Jalan dan Tanah Bawah Jalan tahap II tahun 2022, adanya pemaketan kegiatan waktu pembangunan jalan dahulu sehingga harus dipastikan jalan yang dibangun baru kemudian disesuaikan dengan ruas berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/207/KEP/DPUPR/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dan Jembatan Menurut Statusnya Sebagai Jalan dan Jembatan Kabupaten.

Atas temuan ini terus dilakukan proses tindak lanjutnya, sisa yang belum ditindaklanjuti yaitu 118 ruas jalan atau 32,78%, ruas jalan yang belum disesuaikan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/207/KEP/DPUPR/2018 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dan Jembatan Menurut Statusnya Sebagai Jalan dan Jembatan Kabupaten dan Tanah Bawah Jalan pada KIB A.

Sampai dengan pemeriksaan pendahuluan ini, terus dilakukan penyesuaian tersebut dikarenakan terdapat penambahan dan pemuktahiran jalan ruas jalan Kabupaten Belitung berdasarkan Keputusan Bupati Belitung nomor: 100.3.4/237.A/KEP/DPUPR/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Ruas-ruas Jalan dan Jembatan menurut Statusnya sebagai Jalan dan Jembatan Kabupaten.

2. Pemerintah Kabupaten Belitung akan menerima hibah jalan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) paket pekerjaan jalan yaitu jalan tembus Buluh Tumbang-Aik Mungkui di Desa Buluh Tumbang Kecamatan Tanjungpandan dan jalan Pasir Panjang Desa Selat Nasik Kecamatan Selat Nasik. Akan tetapi penyerahan atas pelaksanaan hibah belum dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui satker jalan, balai pemantapan jalan nasional. Atas rencana penyerahan ini belum dilakukan pencatatan ke dalam buku inventaris, disebabkan pemerintah kabupaten Belitung belum menerima Naskah Hibah dan Berita acara serah terima sebagai dasar pencatatan.

   Sampai dengan pemeriksaan audited, Berita Acara Serah terima yang telah selesai dilakukan adalah serah terima dokumen pelaksanaan kegiatan antara Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bangka Belitung dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dengan Nomor: 142/BA/Satker

PJN II Babel/2025 dan Nomor : 600/134/DPUPR.I/2025 yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025.

3. Terdapat hibah berupa barang dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) unit jalan khusus komplek dengan total nilai Rp1.351.500.000,00 berdasarkan naskah hibah barang milik negara (BMN) antara Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Nomor: 1740/PKS/Dr/2024 dan Nomor: 000.2.4/110/BPKAD.V tanggal 18 Desember 2024, dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 1740/PKS/Dr/2024 dan Nomor: 000.2.4/111/BPKAD tanggal 18 Desember 2024. Sehubungan dengan baru diselesaikan penandatanganan dokumen hibah tersebut maka atas pelaksanaan hibah ini akan ditetapkan status penggunaan melalui Keputusan Bupati Belitung tahun 2025.

   Atas hibah ini telah ditindaklnajuti dengan dilakukan penetapan status penggunaan pada tahun 2025 berdasarkan keputusan Bupati Belitung nomor: 100.3.4/211/KEP/BPKAD/2025 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Atas Hibah Antara Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Berupa Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Jalan Kompleks Perumahan Menjadi Barang Milik Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung tanggal 17 Maret 2025

4. Terdapat hibah berupa barang dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan total nilai Rp14.956.712.436,00 berdasarkan naskah hibah barang milik negara (BMN) antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Nomor: 543.2/BA/DC/2024 dan Nomor: 002.2.4/895/BPKAD tanggal 12 Juli 2024, dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 513.3/BA/DC/2024 dan Nomor: 002.2.4/896/BPKAD tanggal 12 Juli 2024. Sehubungan dengan baru diselesaikan penandatanganan dokumen hibah tersebut maka atas pelaksanaan hibah ini akan ditetapkan status penggunaan melalui Keputusan Bupati Belitung tahun 2025.

   Atas hibah ini telah ditindaklanjuti dengan dilakukan penetapan status penggunaan pada tahun 2025 berdasarkan keputusan Bupati Belitung nomor: 100.3.4/212/KEP/BPKAD/2025 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Atas Hibah Antara Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Berupa Peralatan dan Mesin, Gedungdan Bangunan serta Jalan Irigasi dan Jaringan Menjadi Barang Milik Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dan Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung tanggal 17 Maret 2025.

5. Terdapat hibah berupa barang dari Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan total nilai Rp2.038.955.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 226.1/BA/Dc/2024 dan Nomor: 000.2/235/BPKAD tanggal 18 Maret 2024. Sehubungan dengan baru diselesaikan penandatanganan dokumen hibah tersebut maka atas pelaksanaan hibah ini akan ditetapkan status penggunaan melalui Keputusan Bupati Belitung tahun 2025.

Atas hibah ini telah ditindaklanjuti dengan dilakukan penetapan status penggunaan pada tahun 2025 berdasarkan keputusan Bupati Belitung nomor: 100.3.4/471/KEP/BPKAD/2025 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Atas Hibah Antara Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Berupa Sistem Penyediaan Air Minum Menjadi Barang Milik Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung tanggal 28 Mei 2025.

6. Terdapat hibah berupa barang dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dengan total nilai Rp5.674.677.160,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 732/BA/Satker PJN II Babel/2025 dan Nomor: 600.1/359/BA/DPUPR/2025 tanggal 29 April 2025 dan penetapan status penggunaan berdasarkan keputusan Bupati Belitung nomor: 100.3.4/460/KEP/BPKAD/2025 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Atas Hibah Antara Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Berupa Tanah Jalan Nasional, Jalan Nasional Kolektor dan Jembatan pada Jalan Nasional Kolektor Menjadi Barang Milik Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung tanggal 26 Mei 2025.
7. Hasil inventarisasi yang disajikan dalam pos koreksi kurang catat (tahun sebelumnya) sebanyak 3 (tiga) unit dengan total nilai Rp94.147.000,00 berupa Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) disebabkan belum adanya penyerahan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dasar Pencatatan Barang Milik Daerah tersebut menggunakan Berita Acara hasil Inventarisasi yang kemudian akan ditetapkan menggunakan Keputusan Bupati Belitung terkait penetapan status penggunaan tahun 2025. Pelaksanaan Pekerjaan ini berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. 014/UGB.Percontohan/Sarpras/C2.3/2019 antara Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung tentang Pemberian Bantuan Unit Gedung Baru PAUD Percontohan Termasuk Meubelair dan Sarana Pembelajaran Tahun 2019.

   Hasil inventarisasi ini telah ditindaklnajuti dengan dilakukan penetapan status penggunaan pada tahun 2025 berdasarkan keputusan Bupati Belitung nomor: 100.3.4/528/KEP/BPKAD/2025 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Yang Berasal Dari Sumber Perolehan Lainnya Yang Sah Berupa Unit Gedung Baru PAUD Percontohan, Meubelair dan Sarana Pembelajaran Tahun 2019 Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung tanggal 23 Juni 2025.

5.3.1.2.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung, ditetapkan batasan minimal kapitalisasi aset tetap lainnya berupa barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga dapat dikapitalisasi apabila nilai perolehannya minimal senilai Rp1.000.000,00. Batas

minimal kapitalisasi aset tetap lainnya dikecualikan untuk perolehan aset tetap lainnya berupa bahan perpustakaan dan barang bercorak kesenian/ kebudayaan.

Saldo aset tetap berupa aset tetap lainnya per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp70.140.997.963,36 mengalami kenaikan senilai Rp2.695.925.063,01 atau sebesar 4.00% dari saldo akhir 31 Desember 2024 (*auditted*) yaitu Rp67.445.072.900,35.

Peningkatan tersebut disebabkan adanya mutasi kumulatif atas aset tetap untuk tahun 2025 berupa mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap berupa aset tetap lainnya, dengan perhitungan:

Tabel 90 Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

Uraian		Jumlah (Rp)
-	Saldo awal aset tetap berupa aset tetap lainnya per 1 Januari 2025	67.445.072.900,35
-	Mutasi penambahan aset tetap berupa aset tetap lainnya tahun 2025	3.079.614.297,00
-	Mutasi pengurangan aset tetap berupa aset tetap lainnya tahun 2025	(383.689.233,99)
-	Saldo akhir aset tetap berupa aset tetap lainnya per 31 Desember 2025	70.140.997.963,36

Sumber: data BPKAD (diolah)

Aset tetap berupa aset tetap lainnya terdiri dari beberapa jenis seperti bahan perpustakaan, barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga, hewan, biota perairan, tanaman, barang koleksi non budaya, dan aset tetap dalam renovasi.Mutasi penambahan aset tetap lainnya yang terjadi pada tahun 2025 senilai Rp3.079.614.297,00 sebagai berikut:

1. Belanja Modal total nilai Rp9.435.000,00, terdapat pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah;
2. Belanja Modal Belanja Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp2.840.677.600,00, terdapat pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Belanja Modal Belanja Operasional Sekolah (BOS) Kinerja senilai Rp87.194.097,00, terdapat pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Belanja Modal Belanja Operasional Pendidikan (BOP) senilai Rp75.091.000,00, terdapat pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Belanja Barang dan Jasa Belanja Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp1.234.800,00, terdapat pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Reklasifikasi Antar Kartu Inventaris Barang (KIB) senilai Rp14.884.000,00, terdapat pada Perangkat Daerah Sebagai Berikut:
   a. Sekretariat Daerah senilai Rp9.435.000,00; dan
   b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp5.449.000,00.
7. Reklasifikasi Dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) senilai Rp51.097.800,00, terdapat pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Daftar rincian Penambahan aset tetap berupa aset tetap lainnya disajikan dalam **Lampiran 86 s.d 94.**

Tahun 2025, terdapat penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal untuk kelompok aset tetap berupa aset tetap lainnya, sehingga terdapat perbedaan pengakuan antara penambahan aset tetap (yang disajikan sebagai aset intrakomptabel) tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi belanja modal sebagaimana yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA):

Tabel 91 Mutasi Perbedaan Aset Tetap Lainnya

Uraian	Jumlah (Rp)
- Realisasi belanja modal, belanja modal BOS dan belanja modal BOS kinerja berupa aset tetap lainnya (LRA)	Rp 3.012.397.697,00
- Selisih Perbedaan Pengakuan	(Rp 79.403.400,00)
- Jumlah Penambahan Saldo Aset Tetap aset tetap lainnya dari Realisasi Belanja Modal	Rp 2.932.994.297,00

Sumber: data BPKAD (diolah)

Atas perbedaan pengakuan sebesar Rp79.403.400,00 tersebut dari klasifikasi pengurangan atas :

1. Reklasifikasi Antar Kartu Inventaris Barang (KIB) senilai Rp27.185.000,00, terdapat pada Perangkat Daerah Sebagai Berikut:
   a. Sekretariat Daerah senilai Rp9.435.000,00; dan
   b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp17.750.000,00.
2. Reklasifikasi Dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) senilai Rp51.097.800,00, terdapat pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Reklasifikasi Belanja Modal ke Aset ekstrakontabel senilai Rp1.120.600,00, pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

   Daftar rincian Perbedaan Pengakuan aset tetap berupa aset tetap lainnya disajikan dalam **Lampiran 95 s.d 97.**

Mutasi pengurangan nilai aset tetap lain tahun 2025 dengan Penghapusan Aset Tetap senilai Rp304.285.833,99 pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Daftar rincian pengurangan aset tetap berupa aset tetap lainnya disajikan dalam **Lampiran 98**

5.3.1.2.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap yang bersangkutan atau aset definitifnya.

Saldo aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp20.648.667.305,68 mengalami kenaikan senilai Rp598.357.045,00 atau meningkat 2.98% dibandingkan saldo aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 (*audited*) senilai Rp20.050.310.260,68.

Kenaikan tersebut disebabkan adanya mutasi kumulatif atas aset tetap untuk tahun 2025 berupa mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tetap tanah, dengan perhitungan:

Tabel 92 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo awal konstruksi dalam pengerjaan per 1 Januari 2025	Rp20.050.310.260,68
Mutasi penambahan konstruksi dalam pengerjaan tahun 2025	Rp1.023.325.470,00
Mutasi pengurangan konstruksi dalam pengerjaan tahun 2025	Rp(424.968.425,00)
Saldo akhir konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025	Rp20.648.667.305,68

Sumber: data BPKAD (diolah)

Mutasi penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang terjadi pada tahun 2025 senilai Rp1.023.325.470,00 yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa. Pada Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp282.968.250,00;
2. Dinas Perhubungan senilai Rp99.820.000,00;
3. Dinas Kesehatan senilai Rp179.263.920,00;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp219.196.550,00;
5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp95.876.250,00;
6. Dinas Perikanan senilai Rp99.400.500,00; dan
7. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja senilai Rp46.800.000,00.

Daftar rincian penambahan aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan 25 disajikan pada **Lampiran 99 s.d 101**

Tahun 2025, tidak terdapat penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal untuk kelompok aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan, sehingga tidak perbedaan pengakuan antara penambahan aset tetap (yang disajikan sebagai aset intrakomptabel) tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi belanja modal sebagaimana yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Sedangkan mutasi pengurangan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan yang terjadi selama tahun 2025 adalah senilai Rp424.968.425,00 yang berasal dari Reklasifikasi Antar Kartu Inventaris Barang. Pada Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp298.618.300,00
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp126.350.125,00

Daftar rincian pengurangan aset tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam **Lampiran 102**

Rincian aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) KDP senilai Rp20.648.667.305,68 (dua puluh milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima koma enam puluh delapan rupiah) sebagaimana disajikan dalam **Lampiran 103**.

5.3.1.2.2.7 Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan merupakan akumulasi penyusutan untuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya (kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan).

Perubahan kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung. Perubahan kebijakan akuntansi penyusutan terkait dengan metode pendekatan perhitungan penyusutan di mana sebelumnya pendekatan perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan diubah menggunakan pendekatan perhitungan secara bulanan.

Waktu yang digunakan dalam perhitungan penyusutan aset yang diperoleh di awal tahun pertengahan tahun atau akhir tahun ditentukan dengan menggunakan pendekatan bulan penggunaan, misalnya aset tetap yang diperoleh pada bulan Oktober maka penyusutan akan dihitung selama 3 (tiga) bulan sampai akhir periode akuntansi.

Aset yang pengadaannya diterima 100% (seratus persen) sampai dengan 31 Desember tahun berjalan maka penyusutan dimulai dan disusutkan selama 1 (satu) bulan.

Berikut rincian Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2025:

Tabel 93 Rincian Akumulasi Penyusutan Tahun 2025

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	624.923.189.338,60
2	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	197.059.009.442,74
3	Akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan	1.459.296.963.937,54
4	Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya	5.432.920.509,80
	Jumlah	2.286.712.083.228,67

Sumber: data BPKAD (diolah)

Apabila disandingkan dengan nilai perolehan aset tetap, maka akan diperoleh nilai buku untuk masing-masing aset tetap per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 94 Daftar Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2025

No	Uraian	Nilai Perolehan Aset Tetap	Nilai Buku (Rp.)
1	**Tanah**		383.491.117.462,64
2	**Peralatan dan Mesin**	734.764.018.545,72	

No	Uraian	Nilai Perolehan Aset Tetap	Nilai Buku (Rp.)
	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	(624.923.189.338,60)	
	Nilai buku aset tetap peralatan dan mesin		109.840.829.207,12
3	**Gedung dan Bangunan**	793.514.762.654,07	
	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	(197.059.009.442,74)	
	Nilai buku aset tetap gedung dan bangunan		596.455.753.211,33
4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**	2.220.982.321.608,24	
	Akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan mesin	(1.459.296.963.937,54)	
	Nilai buku aset tetap jalan, irigasi dan jaringan		761.685.357.670,70
5	**Aset Tetap Lainnya**	70.140.997.963,36	
	Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya	(5.432.920.509,80)	
	Nilai buku aset tetap lainnya		64.708.077.453,56
6.	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**		20.648.667.305,68
	Total Nilai Buku Aset Tetap		**1.936.829.802.311,03**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Nilai akumulasi penyusutan Tahun 2025 adalah **Rp2.286.712.083.228,67**. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar **Rp177.090.775.932,96** atau **8,39%**, di mana nilai penyusutan Tahun 2024 sebesar **Rp2.109.621.307.295,71.** Kenaikan tersebut disebabkan penambahan akumulasi penyusutan dari beban penyusutan tahun 2025 sebesar **Rp 163.601.007.209,92** dan koreksi penyusutan sebesar **Rp13.489.768.723,04.** Mutasi penyusutan aset tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 95 Mutasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025

No.	URAIAN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan irigasi	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	TOTAL
1	**SALDO AWAL**	**578.862.537.033,15**	**178.502.884.345,91**	**1.346.812.004.851,63**	**5.443.881.065,02**	**2.109.621.307.295,71**
2	**MUTASI TAMBAH**					
3	**Beban Penyusutan 2025**	**47.650.288.680,32**	**17.615.916.201,64**	**98.326.431.494,63**	**8.370.833,34**	**163.601.007.209,92**
4	Koreksi/Penyesuaian Kurang catat akumulasi penyusutan tahun sebelumnya	9.962.050.225,85	7.843.490.884,93	289.442.161,12	661.111,44	18.095.644.383,34
5	Penyesuaian akibat pengalihan aset antar OPD	4.238.876.783,33	551.637.405,00	99.817.611,00	-	4.890.331.799,33
6	Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan karena pembulatan	597,58	71,70	353,53	-	1.022,81
7	Penyesuaian akumulasi penyusutan dari aset tetap perolehan hibah masuk	387.929.500,00	-	-	-	387.929.500,00
8	Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan akibat penyesuaian migrasi data BMD	924.893.000,00	65.135.154,73	39.972.086.134,08	-	40.962.114.288,81
9	**Jumlah mutasi tambah**	**63.164.038.787,08**	**26.076.179.718,00**	**138.687.777.754,36**	**9.031.944,78**	**227.937.028.204,21**
10	**MUTASI KURANG**					
11	Koreksi/Penyesuaian lebih catat akumulasi penyusutan tahun sebelumnya	7.233.063.889,57	3.926.345.574,87	175.693.892,37	19.992.500,00	11.355.095.856,81
12	Penyesuaian akibat pengalihan aset antar OPD	4.238.876.783,33	551.637.405,00	99.817.611,00	-	4.890.331.799,33

No.	URAIAN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan irigasi	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	TOTAL
13	Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan karena pembulatan	360,23	175,93	532,38	-	1.068,54
14	Reklasifikasi akumulasi penyusutan aset tetap ke akumulasi penyusutan aset lainnya (ubah kondisi menjadi rusak berat)	4.833.676.048,50	327.449.245,00	99.154.681,00	-	5.260.279.974,50
15	Penyesuaian akumulasi penyusutan dari aset tetap perolehan hibah keluar	-	1.672.601.103,00	-	-	1.672.601.103,00
16	Penyesuaian akumulasi penyusutan dikarenakan penghapusan BMD	797.274.400,00	-	-	-	797.274.400,00
17	Koreksi lebih catat akumulasi penyusutan akibat penyesuaian migrasi data BMD	495.000,00	1.042.021.117,37	25.828.151.951,70	-	26.870.668.069,07
18	**Jumlah mutasi Kurang**	**17.103.386.481,63**	**7.520.054.621,17**	**26.202.818.668,45**	**19.992.500,00**	**50.846.252.271,25**
19	**SALDO PER 31 DESEMBER 2025**	**624.923.189.338,60**	**197.059.009.442,74**	**1.459.296.963.937,54**	**5.432.920.509,80**	**2.286.712.083.228,67**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rekapitulasi akumulasi penyusutan aset tetap per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 104.**

Sedangkan barang-barang milik daerah yang tidak memenuhi batas minimal nilai kapitalisasi aset tetap (ekstrakomptabel) berjumlah total **Rp 73.509.557.472,33** sebanyak **379.303** unit tersebar pada seluruh UPB. Rekapitulasi barang *ekstrakomptabel* per UPB sebagaimana terlampir pada **Lampiran105** laporan keuangan ini.

Selain aset tetap yang disajikan di dalam neraca. Pemerintah Kabupaten Belitung juga memiliki cagar budaya (**Lampiran 106**) aset bersejarah (*heritage assets*) berupa bangunan bersejarah dan barang-barang peninggalan bersejarah/bercorak kebudayaan yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif.

Aset bersejarah berupa situs/bangunan terdiri dari:

Tabel 96 Aset Bersejarah Tahun 2025

No	Nama Situs / Bangunan Bersejarah	Letak Administratif	Jumlah Unit	Fungsi Sekarang
1	Eks Kantor Pusat *Billiton Mij*	Jl. Veteran. Tg. Pandan	1	Barata Dept. Store
2	Eks *Chineesche Hospital*	Jl. Rumah Sakit. Tg. Pandan	1	Asrama Mhs Akper Bel
3	Eks *Europeesche Kliniek*	Jl. Melati. Tg. Pandan	1	RSUD Kab. Belitung
4	Rumah Kolonial	Jl. Veteran. Tg. Pandan	1	Rumah Dinas Danlanud
5	Rumah Kolonial	Jl. Veteran. Tg. Pandan	1	Rumah Dinas Dandim
6	Eks Hotel Juliana	Jl. Melati. Tg. Pandan	1	Museum Tg. Pandan
7	Eks *Societeit*	Jl. Gegedek. Tg. Pandan	1	Hotel & Club Billiton
8	Eks Hollands-Indische School	Jl. Sekolah. Tg. Pandan	1	SMPN 1 Tg. Pandan
9	Eks Gedung Landraad	Jl. Sekolah. Tg. Pandan	1	UPTD TK/SD Tg. Pandan
10	Eks Tuindienst	Jl. Sekolah. Tg. Pandan	1	Sekretariat PWRI
11	Eks Kantor Asisten Residen	Jl. Merdeka. Tg. Pandan	1	Dinas Pendidikan Kab. Bel

12	Situse Banteng Kuehn	Jl. Bukit. Tg. Pandan	1	Statiun RTVS Dinamika
13	Gedung Nasional	Jl. Yos Sudarso. Tg. Pandan	1	Gedung Nasional
14	Eks *Inlandsch-Chineesch School*	Jl. Sriwijaya. Tg. Pandan	1	SDN 1 dan 2 Tg. Pandan
15	Situs Kota Tanah Cerucuk	Desa Cerucuk. Kec. Badau	1	Makam KA Hatam & KA M. Saleh
16	Situs Ai' Labu Kembiri	Ai' Labu. Kembiri. Membalong	1	Makam KA Rahad
Jumlah			**16**	

Sumber: data BPKAD (diolah)

Sedangkan barang-barang Peninggalan bersejarah/bercorak kebudayaan terdiri dari barang pecah belah (guci. mangkok. piring. teko. tempat air minum). keris. tombak. pedang. lukisan. gong dan lain-lain dengan jumlah 1.800 unit. secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 107.**

5.3.1.2.3 Dana Cadangan

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana Cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Pada tahun 2025 tidak terdapat pembentukan maupun pencairan Dana Cadangan.

5.3.1.2.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan, Aset lainnya diklasifikasikan menjadi tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan aset lain-lain.

5.3.1.2.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri dari tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah. Pada tahun 2025 tidak terdapat tagihan jangka panjang.

5.3.1.2.4.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo aset lainnya Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2025 adalah senilai **Rp1.300.385.276,00** mengalami penurunan sebesar Rp7.560.865.000,00 dibandingkan saldo aset lainnya Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2024 (*audited*) senilai Rp8.861.250.276.00. Adapun rinciannya aset kemitraan dengan pihak ketiga sebagai berikut:

1. Aset Pemerintah Kabupaten Belitung yang pengelolaannya di kerjasamakan dengan Pihak Ketiga untuk menghasilkan pendapatan misalnya dalam bentuk sewa, kerjasama pemanfaataan, Bangun Serah Guna (BSG), Bangun Guna Serah (BGS), Kerjasama Pemanfaatan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI).

   Saldo aset Pemerintah Kabupaten Belitung yang pengelolaannya di kerjasamakan dengan Pihak Ketiga untuk menghasilkan pendapatan per 31 Desember 2025 senilai **Rp905.885.276.00**. tidak mengalami kenaikan dan penurunan. Sehingga saldo akhir 31 Desember 2025 senilai **Rp905.885.276.00**.

Tabel 97 Aset Yang Dikerjasamakan Tahun 2025

Nama Pengelola Aset yang Dikerjasamakan	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
PT Hotel Usaha Karya Mandiri Utama (Tanah dan Bangunan)	369.529.276,00	369.529.276,00
PT Puncak Jaya Lestari	531.604.000,00	531.604.000,00
PT Telekomunikasi Indonesia	4.752.000,00	4.752.000,00
Jumlah	**905.885.276.00**	**905.885.276.00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Informasi lain terkait aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk menghasilkan pendapatan yaitu

1) PT. Hotel Usaha Karya Mandiri Utama

a. Pengelolaan Hotel Billiton

Pemerintah Kabupaten Belitung memiliki aset berupa tanah yang berlokasi di Jalan Depati Gegedek Nomor 50 Tanjungpandan yang dimanfaatkan melalui Kerja Sama Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer*/BOT) dengan PT. Hotel Usaha Karya Mandiri Utama berdasarkan Perjanjian Nomor 181/10/PK/II/2006 dan 0114/H-UKM/XII/2006 dengan jangka waktu 25 tahun sampai dengan 28 Desember 2031, atas objek kerja sama berupa tanah ±1.005 m² dan bangunan ±1.147 m².

Dalam rangka penatausahaan pemanfaatan aset dimaksud, Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) telah melakukan rapat koordinasi pada 22 Januari 2026 untuk menindaklanjuti pemberitahuan dari pihak mitra kerja sama terkait kondisi operasional objek kerja sama.

Pemerintah Kabupaten Belitung masih melakukan penelaahan administratif atas pelaksanaan kerja sama serta pencatatan kontribusi sesuai ketentuan perjanjian, guna memastikan kesesuaian pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah dengan ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Ke depan, pemanfaatan aset dimaksud akan terus ditata dan dioptimalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

b. Pengelolaan City Club

Pemerintah Kabupaten Belitung memiliki aset berupa Bangunan City Club yang berlokasi di Jalan Depati Gegedek Nomor 50 Tanjungpandan di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung. Pada tahun 2007 dilakukan kerja sama pengelolaan dengan PT. Hotel Usaha Karya Mandiri Utama, yang selanjutnya pada tahun 2010 pengelolaannya dialihkan kepada BUMD PT. Belitong Mandiri berdasarkan surat Bupati Belitung dan dokumen terkait lainnya.

Sehubungan dengan pengalihan pengelolaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Belitung masih melakukan penataan administrasi dan penelaahan dokumen terkait pengelolaan serta pencatatan aset dimaksud sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selain itu, pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung masih tercatat aset tetap lainnya yang berlokasi di Jalan Gegedek, antara lain bangunan kolam renang dan bangunan eks asrama karyawan PT Timah.

2) PT Puncak Jaya Lestari

Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Puncak Jaya Lestari tentang Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Nomor 37 Eks Bioskop Garuda Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Nomor : 028.8/00964/VII/2004 tanggal 21 Juli 2004 yang telah mengalami beberapa kali addendum yaitu Addendum Pertama Atas Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Puncak Jaya Lestari tentang Pengguna-Usahaan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Yang Terletak Di Jalan Jenderal Sudirman Tanjungpandan Nomor : 181/05/PK/II/2005, NOMOR : 008/Pjl/VIII/05 tanggal 21 Juli 2005, Addendum Kedua Atas Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Puncak Jaya Lestari tentang Pengguna-Usahaan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Yang Terletak Di Jalan Jenderal Sudirman Tanjungpandan Nomor : 181/01/PK/II/2008,

Nomor : 001/Pjl/I/08 tanggal 8 Januari 2008, dan Addendum Ketiga Atas Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Puncak Jaya Lestari tentang Pengguna-Usahaan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Yang Terletak Di Jalan Jenderal Sudirman Tanjungpandan Nomor : 181/004/PK/II/2016, Nomor : 010/PJL/V/16 tanggal 3 Mei 2016.

Berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Puncak Jaya Lestari Nomor : 001/DIR/PC-PJL/TJP/XII/2025 tanggal 10 Desember 2025 Perihal Permohonan Peralihan Hak Sewa Gedung Milik Pemerintah Kabupaten dan Surat Bupati Belitung Nomor : 100.3.8/1988/III/2025 Tanggal 22 Desember 2025 Hal Persetujuan Pengalihan Hak Sewa Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Belitung serta berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) Perjanjian Kerja Sama Awal antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Puncak Jaya Lestari tentang Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Nomor 37 Eks Bioskop Garuda Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Nomor : 028.8/00964/VII/2004 tanggal 21 Juli 2004, PT. Puncak Jaya Lestari dapat mengalihkan kepada pihak lain apabila mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Belitung, setelah melalui pembahasan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah pada Tanggal 7 Januari 2026 ditandatangani Perjanjian Pengalihan Kerja Sama di Ruang Rapat Bupati Belitung yang dihadiri seluruh Tim Koordinasi Kerjasama Daerah, PT.Puncak Jaya Lestari dan CV.Babel Mart.

Sehingga untuk saat ini dasar hukum kerjasama pengelolaan Barang Milik daerah atas objek Gedung nomor 37 Eks Bioskop Garuda Milik Pemerintah Kabupaten Belitung adalah Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT.Puncak Jaya Lestari dan CV.Babel Mart Tentang Pengalihan Penggunausahaan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Belitung yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Tanjungpandan Nomor 100.3.7/01/PKS/VII/2026, Nomor 011/PJL/I/2026, Nomor 03/SPP/I/2026 tanggal 7 Januari 2026.

3) PT Telekomunikasi Indonesia

Pemerintah Kabupaten Belitung memiliki aset berupa tanah yang dimanfaatkan sebagai landing point PT Telekomunikasi Indonesia di kawasan Pantai Tanjung Pendam, dengan pengenaan kontribusi pemanfaatan berdasarkan ketentuan peraturan daerah yang berlaku.

Sebagai bagian dari proses penataan pemanfaatan aset, telah dilakukan penilaian oleh KPKNL Pangkalpinang atas sebagian tanah seluas ±176 m² dengan indikasi nilai sewa wajar sebesar Rp8.120.000 per tahun sebagaimana tertuang dalam Laporan Penilaian Nomor LP-0008/1/KNL.0404/2026 tanggal 12 Januari 2026.

Pemerintah Kabupaten Belitung masih melakukan koordinasi dengan pihak PT Telekomunikasi Indonesia dalam rangka penyesuaian mekanisme pemanfaatan aset sesuai hasil penilaian serta ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah yang berlaku.

2. Kerjasama pemanfaatan BMD antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan pihak ketiga di mana pihak ketiga mempunyai kewajiban dan komitmen untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.

Tabel 98 Aset Kerja Sama Tahun 2025

Nama Pengelola Aset yang Dikerjasamakan	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
PT. Putra Ciptawahana Sejati (PT. Ranati)	-	-
PT. Belitung Golf & Resort	-	6.000.000.000,00
PT. Belitong Inti Permai	394.500.000,00	608.500.000,00
Yayasan Sejahtera Warga Bulog	-	1.346.865.000,00
Jumlah	**394.500.000,00**	**7.955.365.000,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pada tahun 2025 terjadi penurunan atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Belitung dengan pihak ketiga di mana pihak ketiga mempunyai kewajiban dan komitmen untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah dengan total nilai Rp7.560.865.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) PT. Belitung Golf & Resort

Kerja sama pengembangan kawasan antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT Putra Ciptawahana Sejati (PT Ranati) dilaksanakan berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahun 2005 beserta perubahan-perubahannya. Sengketa terkait status hak atas tanah dalam kawasan kerja sama tersebut telah diselesaikan melalui Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.Tdn Tahun 2013, yang pada pokoknya menetapkan perubahan status HGB di atas HPL menjadi HGB atas nama PT Ranati dengan tetap mengakui hak Pemerintah Kabupaten Belitung sesuai ketentuan kerja sama.

Dengan telah selesai Sengketa terkait status hak atas tanah dalam kawasan kerja sama, Pemerintah Kabupaten Belitung akan menghapus pencatatan nilai perjanjian yang tercantum di Kerjasama pemanfaatan BMD antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan pihak ketiga di mana pihak ketiga mempunyai kewajiban dan komitmen untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah dengan total nilai Rp6.000.000.000.00. Untuk kepastian nilai, maka penghapusan atas nilai pencatatan perjanjian akan dituangkan dalam Keputusan Bupati Belitung.

PT BGR mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kontribusi senilai Rp60.000.000,00 per tahun setelah mulai beroperasi.

Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban kontribusi dalam kerja sama dimaksud, sebagian pembayaran telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Belitung sesuai laporan keuangan daerah dan Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan langkah administratif kepada pihak terkait untuk menindaklanjuti pemenuhan kewajiban sesuai perjanjian.

2) PT. Belitung Inti Permai

Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan kerja sama dengan PT. Belitung Inti Permai berdasarkan Perjanjian Nomor 181/05/PK/II/2010 dan Nomor 8001/BIP/PEJ/DIR/IV/2010 tanggal 15 April 2010 untuk pembangunan Billiton Beach Hotel dan pengelolaan kawasan wisata Pantai Tanjung Kelayang di atas tanah milik Pemkab Belitung dengan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 00003/Belitung seluas 121.700 m². Atas kerja sama tersebut diterbitkan HGB Nomor 42/Keciput atas nama PT. Belitung Inti Permai seluas 121.700 m² di atas HPL dimaksud.

Dalam pelaksanaannya, pihak PT. Belitung Inti Permai tidak merealisasikan pembangunan sebagaimana perjanjian meskipun Pemerintah Kabupaten Belitung telah memberikan beberapa kali peringatan, terakhir melalui Surat Nomor 005/0819/III/2020 tanggal 20 Oktober 2020 (Peringatan ke-3). Selanjutnya dilakukan addendum perjanjian kerja sama tanggal 10 November 2021, namun sampai dengan tahun 2023 pembangunan tetap tidak terealisasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Belitung menetapkan pengakhiran kerja sama melalui Keputusan Bupati Belitung Nomor 703/KEP/BPKAD/2023 tanggal 12 Desember 2023, yang diikuti dengan pemisahan HGB No. 42/Keciput seluas 121.700 m² menjadi:

1. HGB No. 42/Keciput seluas 78.340 m² tetap atas nama PT. Belitung Inti Permai dengan nilai perolehan proporsional sekitar Rp394.500.000,00.
2. HGB No. 383/Keciput seluas 42.800 m² dilepaskan melalui Akta Pelepasan Hak Nomor 1 tanggal 4 September 2023, sehingga hak atas

tanah tersebut hapus dan kembali menjadi bagian dari HPL Nomor 00003/Belitung atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung**,** dengan nilai proporsional sekitar Rp214.000.000,00**.**

Pemerintah Kabupaten Belitung akan menghapus pencatatan nilai perjanjian yang tercantum di Kerjasama pemanfaatan BMD antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan pihak ketiga di mana pihak ketiga mempunyai kewajiban dan komitmen untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah dengan total nilai Rp214.000.000,00.

Sehingga nilai perjanjian yang masih tercatat setelah dikurangi HGB No. 383/Keciput seluas 42.800 m² dilepaskan melalui Akta Pelepasan Hak Nomor 1 tanggal 4 September 2023**,** sehingga hak atas tanah tersebut hapus dan kembali menjadi bagian dari HPL Nomor 00003/Belitung atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung adalah Rp394.500.000,00 (Rp608.500.000.00-Rp214.000.000,00).

Atas pemisahan tersebut, telah ditetapkan status penggunaan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 100.3.4/105/KEP/BPKAD/2024 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah dengan Sebagian Luas 42.800 meter persegi alamat jalan pantai tanjung kelayang desa keciput kecamatan sijuk yang semula tercatat di kelompok aset lainnya-kemitraan pihak ketiga menjadi aset tetap dibawah pengelolaan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung dengan nilai perolehan disesuaikan berdasarkan nilai NJOP yang berlaku Rp19.859.200.000,00 (Rp464.000,00/m x 42.800 m²).

3) Yayasan Sejahtera Warga Bulog berkurang Rp150.000.000.00

Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan kerja sama dengan Yayasan Bina Sejahtera Warga Bulog berdasarkan Perjanjian Nomor 181/14/MOU/II/2010 dan 03/MOU/BP-YTR/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 terkait pembangunan dan pengelolaan Wisma Yabinstra di Kawasan Wisata Pantai Tanjung Kelayang pada lahan seluas 299.373 m² dengan nilai perolehan Rp1.496.865.000,00, yang berasal dari HPL Nomor 4/Keciput seluas 150.530 m² dan HPL Nomor 2/Keciput seluas 148.843 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung.

Dalam perkembangannya dilakukan pemisahan sebagian lahan seluas 30.000 m² menjadi HPL Nomor 31/Kab. Belitung berdasarkan Surat Ukur Nomor 108/Belitung/2018, dengan nilai perolehan proporsional berdasarkan NJOP saat perjanjian sebesar Rp150.000.000,00 (Rp5.000/m²)**.** Atas bagian tanah tersebut dilakukan penghapusan sebagian dari daftar aset kerja sama dengan pihak ketiga. Jadi sisa nilai perjanian tercatat adalah Rp1.346.865.000.00 (Rp1.496.865.000,00-150.000.000,00).

Dengan telah selesai Sengketa terkait status hak atas tanah dalam kawasan kerja sama, Pemerintah Kabupaten Belitung akan menghapus pencatatan nilai perjanjian yang tercantum di Kerjasama pemanfaatan BMD antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan pihak ketiga di mana pihak ketiga mempunyai kewajiban dan komitmen untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah dengan total nilai Rp1.346.865.000.00. Untuk kepastian nilai, maka penghapusan atas nilai pencatatan perjanjian akan dituangkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.

Yayasan Bina Sejahtera Warga telah memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran pada tanggal 21 Agustus 2017 untuk biaya kompensasi dari Yabistra tahun 2015-2035 senilai Rp600.000.000,00.

Atas pemisahan tersebut, telah ditetapkan status penggunaan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/464.A/KEP/BPKAD/2020 tanggal 31 Agustus 2020, dengan rincian tanah kosong yang sudah diperuntukkan. kode barang 1.3.1.01.002.002.002. register 11. alamat Desa Keciput Kecamatan Sijuk.

dokumen kepemilikan sertifikat hak pengelolaan nomor 00031/Kab.Belitung tanggal 17 Januari 2018. NIB 29.03.00.00.00232. luas 30.000 m². keterangan pemisahan hak pengelolaan nomor: 0029/Belitung, yang semula tercatat di kelompok aset lainnya-kemitraan pihak ketiga menjadi aset tetap dibawah pengelolaan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung dengan nilai perolehan disesuaikan berdasarkan nilai NJOP yang berlaku Rp1.440.000.000,00 (Rp48.000/m² x 30.000 m²).

Catatan lain terkait aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga:

1. PT. Istana Kawi Kencana

   Kerja sama pemanfaatan aset berupa gedung milik Pemerintah Kabupaten Belitung yang berlokasi di Jalan Veteran–Depati Gegedek dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Belitung dan PT. Istana Kawi Kencana Nomor 028.8/00078/2002 tanggal 23 Januari 2002 sebagaimana telah di-addendum pada tanggal 29 April 2002 Nomor 028.8/00638/2002. Berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor 1 Tahun 2005, sebagian objek kerja sama dibatalkan sehingga luas objek yang dikerjasamakan berubah dari gedung seluas 6.307 m² di atas tanah 10.314 m² menjadi gedung seluas 3.111 m² di atas tanah 5.236 m².

   Sehubungan dengan perubahan tersebut, kewajiban pembayaran PT. Istana Kawi Kencana kepada Pemerintah Kabupaten Belitung disesuaikan dari Rp1.250.000.000,00 menjadi Rp625.000.000,00 dan telah direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku. Status kepemilikan atas tanah dan bangunan tetap sebagai Barang Milik Daerah dan pada saat berakhirnya masa perjanjian pemanfaatan seluruh aset beserta bangunan yang ada di atasnya menjadi milik Pemerintah Kabupaten Belitung.

   Pelaksanaan operasional pemanfaatan gedung dilakukan oleh PT. Barataguna Indoganesha sebagai mitra kerja PT. Istana Kawi Kencana sebagaimana diperkenankan dalam perjanjian kerja sama. Pemerintah Kabupaten Belitung tetap melakukan pemantauan atas pemanfaatan aset dimaksud serta mengupayakan penataan kembali kerja sama guna meningkatkan efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah.

   Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Belitung terus mengupayakan pengakhiran perjanjian dengan PT. Istana Kawi Kencana.

2. PT. Belitong Inti Permai

   Pemerintah Kabupaten Belitung telah melayangkan surat kepada direktur PT. Belitong Inti Permai nomor: 000.2.6/747/BPKAD/2025 tanggal 16 Juni 2025, Hal Konfirmasi terkait bangunan hotel yang intinya Pemerintah Kabupaten Belitung meminta konfirmasi terkait bangunan berupa eks. bangunan hotel yang belum selesai dibangun dan sekarang dalam kondisi tidak termanfaatkan dengan baik/ *idle,* tercatat sebagai aset PT. Belitung Inti Permai atau akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Belitung.

   Pemerintah Kabupaten Belitung telah melayangkan surat kepada direktur PT. Belitong Inti Permai nomor: 000.2.3.2/252/BPKAD/2026 tanggal 11 Februari 2026, Hal Penegasan Tindak Lanjut Penyerahan Tanah sebagai tindak lanjut hasil koordinasi antara Direktur PT Belitung Inti Permai dengan Bupati Belitung pada tanggal 19 Desember 2025, tindak lanjut pengakhiran Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT Belitung Inti Permai yang telah dilakukan pada tahun 2023. Sampai dengan saat ini masih terdapat sisa tanah seluas ± 78.340 m² dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 42/Keciput atas nama PT Belitung Inti Permai di atas Hak Pengelolaan Nomor 0003/Belitung yang belum dilepaskan dan dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Belitung.

Pemerintah Kabupaten Belitung pada prinsipnya bersedia menerima penyerahan aset berupa tanah seluas ± 78.340 m² dengan dokumen kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 42/Keciput atas nama PT Belitung Inti Permai, termasuk bangunan yang telah dibukukan dan telah dilakukan pencadangan *impairment* sebesar 100% oleh PT Belitung Inti Permai. Penyerahan dimaksud agar dipastikan terlebih dahulu dalam kondisi *clean and clear* secara internal PT Belitung Inti Permai**,** berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau mekanisme korporasi lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebenaran data fisik, luas, nilai, serta pencatatan akuntansi atas objek tanah dan bangunan dimaksud sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Belitung Inti Permai. Proses pelepasan Hak Guna Bangunan dan pengembalian tanah ke dalam Hak Pengelolaan Nomor 0003/Belitung atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan seluruh biaya yang timbul agar dikomunikasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Kabupaten Belitung. Penyerahan objek agar dituangkan secara formal dalam Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima antara PT Belitung Inti Permai dan Pemerintah Kabupaten Belitung, yang selanjutnya akan menjadi dasar pencatatan sebagai Barang Milik Daerah serta dasar penghapusan dari daftar aset PT Belitung Inti Permai.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Belitung meminta PT Belitung Inti Permai untuk menyampaikan surat resmi penegasan kesediaan penyerahan objek dimaksud beserta kelengkapan dokumen pendukung**,** sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Belitung dalam mengambil kebijakan lanjutan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegasan ini dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah dan tidak dimaksudkan sebagai penetapan adanya pelanggaran atau wanprestasi oleh para pihak**.**

5.3.1.2.4.3 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aset ini dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa. atau digunakan untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi kriteria aset. maka Aset Tak Berwujud harus dapat diidentifikasi dan dikendalikan oleh entitas serta memiliki potensi manfaat ekonomi di masa mendatang.

Aset Tak Berwujud yang disajikan pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2025 dengan total nilai perolehan sebesar **Rp5.886.276.917,00** berupa *Software*/aplikasi yang terdapat pada OPD. baik yang diperoleh dengan cara membangun sendiri aplikasi maupun melalui pengadaan/pembelian. Nilai Aset Tak Berwujud yang disajikan pada neraca sebesar nilai buku *(nilai perolehan dikurangi amortisasi*). Rincian Aset Tak Berwujud per OPD pada **Lampiran 111.**

Mutasi Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

Tabel 99 Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2024	**5.855.151.917.00**
Mutasi tambah tahun 2025:	
1. Buku Elektronik	31.125.000,00
2. Software Aplikasi Kasir (Dekranasda)	7.770.000,00
Mutasi kurang tahun 2025:	
Koreksi atas kelebihan pembayaran pengadaan software (aplikasi kasir)	7.770.000,00
Tidak ada	-
Saldo per 31 Desember 2025	**5.886.276.917,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Jumlah Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 terdapat pada OPD sebagai berikut:

Tabel 100 Rincian Aset Tak Berwujud Per OPD

OPD/Sekolah	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	187.685.600.00	187.685.600,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	626.809.700.00	626.809.700,00
Dinas Kesehatan	47.440.000.00	47.440.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	278.852.462.00	278.852.462,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	288.651.400,00	257.526.400,00
BPKAD	209.130.000.00	209.130.000,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	197.251.000.00	197.251.000,00
Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah. Perdagangan dan Tenaga Kerja	34.000.000.00	34.000.000,00
Sekretariat Daerah	334.030.350.00	334.030.350,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.170.941.750.00	1.170.941.750,00
Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	78.500.000.00	78.500.000,00
Dinas Perhubungan	393.648.850.00	393.648.850,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	152.090.716.00	152.090.716,00
Bappeda	356.052.000.00	356.052.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	96.500.000.00	96.500.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.070.751.500.00	1.070.751.500,00
SMP Negeri 1 Badau	31.250.000.00	31.250.000,00
SMP Negeri 3 Badau	2.500.080.00	2.500.080,00
SMP Negeri 1 Tanjungpandan	31.420.080.00	31.420.080,00
SMP Negeri 2 Tanjungpandan	50.258.109.00	50.258.109,00
SMP Negeri 3 Tanjungpandan	34.453.000.00	34.453.000,00
SMP Negeri 4 Tanjungpandan	24.454.000.00	24.454.000,00
SMP Negeri 5 Tanjungpandan	24.454.000.00	24.454.000,00
SMP Negeri 6 Tanjungpandan	28.920.000.00	28.920.000,00
SMP Negeri 7 Tanjungpandan	24.454.000.00	24.454.000,00
SMP Negeri 2 Membalong	38.929.080.00	38.929.080,00
SMP Negeri 3 Membalong	2.500.080.00	2.500.080,00
SMP Negeri 4 Membalong	2.500.080.00	2.500.080,00
SMP Negeri 5 Membalong	2.500.080.00	2.500.080,00
SMP Negeri 1 Selat Nasik	36.429.000.00	36.429.000,00
SMP Negeri 2 Sijuk	28.920.000.00	28.920.000,00
Nilai Perolehan	**5.886.276.917,00**	**5.855.151.917,00**
Amortisasi	**(5.531.606.307,19)**	**(5.489.127.812.50)**
Nilai Buku	**354.670.609,81**	**366.024.104.50**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi Aset Tak Berwujud berupa *software* menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat 4 tahun.

Penentuan masa manfaat untuk *software* mengacu pada Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP_316/PJ./2002 pasal 2 ayat 1 Perangkat lunak komputer merupakan harta tak berwujud (*intangible asset*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan termasuk dalam kelompok 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2025 adalah **Rp5.531.606.307,19**. sedangkan jumlah Amortisasi per 31 Desember 2024 sebesar **Rp5.489.127.812.50**. Terjadi kenaikan sebesar **Rp42.478.494,69**. kenaikan tersebut berasal dari mutasi tambah dan kurang Amortisasi Aset Tak Berwujud 2025 sebagai berikut :

Tabel 101 Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2024	**5.489.127.812,50**
Mutasi tambah tahun 2025:	
Penyesuaian Beban Amortisasi Penyusutan Aset Tidak	240.192.752,25
Koreksi kurang catat akumulasi amortisasi aset tak berwujud	41.799.279,17
Mutasi kurang tahun 2025:	
Koreksi lebih catat akumulasi amortisasi aset tak berwujud	237.571.036,73
Koreksi atas kelebihan pembayaran pengadaan software (aplikasi kasir)	1.942.500,00
Saldo per 31 Desember 2025	**5.531.606.307,19**

5.3.1.2.4.4 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokan ke dalam aset tak berwujud. tagihan penjualan angsuran. tuntutan perbendaharaan. tuntutan ganti rugi dan kemitraan dengan pihak ketiga dan aset yang tidak digunakan dalam operasional

pemerintah daerah. Aset Lain-Lain yang disajikan dalam laporan keuangan per 31 Desember 2025 sebesar **Rp47.888.109.757,68** yang terdiri dari aset tetap yang rusak berat/hilang dikeluarkan pencatatannya dari aset tetap dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah yang merupakan akun penampung kelebihan pembayaran atas pengadaan Aset tetap.

Aset Lain-Lain berupa aset tetap yang rusak berat/hilang sebesar **Rp47.154.869.757,68** yang dikeluarkan pencatatannya dari aset tetap.

	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
- Aset Rusak Berat	47.105.102.757,68	41.707.198.860.58
- Aset Hilang	49.767.000,00	49.767.000.00
Jumlah	**47.154.869.757,68**	**41.756.965.860,58**
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(28.599.140.451,03)	(23.614.889.410,60)

Rincian Aset Lain-Lain per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 84.**

Aset yang hilang terdiri dari:

Tabel 102 Daftar Aset Hilang Tahun 2025

No	OPD	Nama Barang	Nilai Perolehan (Rp)
1.	Sekretariat DPRD	Laptop	6.545.000.00
2.	Sekretariat DPRD	Kamera Digital	13.040.000.00
3.	Dinas Kesehatan	Motor Yamaha Alpa	3.000.000.00
4.	Kecamatan Membalong	Motor Yamaha YT. 115	10.500.000.00
5.	Inspektorat	Laptop Fujitsu lifebook LH 532 Core i3	7.755.000.00
6.	Inspektorat	Laptop Lenovo ideapad S410p	8.927.000.00
		Total	**49.767.000.00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Mutasi Aset Rusak Berat pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 103 Mutasi Aset Rusak Berat Tahun 2025

No	Uraian	OPD	Jumlah (Rp)
1.	**Saldo Awal**		**41.756.965.860,58**
2.	**Mutasi Tambah :**		
3.	Reklasifikasi Aset Alat Kantor Lainnya ke Aset Rusak Berat/Usang berdasarkan surat No.000.2.6.2/649a/I/BPPRD tentang Usulan Perubahan Kondisi BMD	Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah	27.940.000,00
4.	Pengalihan Alat Angkut Bermotor Khusus Dari Selat Nasik Ke Dinkes Bast No: 400.6.22/529/Pkm-Sn/2025 Tgl 21 Okt 2025 Dan Sekaligus Ubah Kondisi Menjadi Rusak Berat	Dinas Kesehatan	1.447.248.000,00
5.	Pengalihan Kendaraan Dari Puskesmas Perawas	Dinas Kesehatan	1.500.000,00
6.	Pengalihan Aset Rusak Berat (Motor) Dari Puskesmas Sprusa Ke Dinkes	Dinas Kesehatan	26.510.000,00
7.	Reklasifikasi atas Aset Alat Angkutan Kendaraan bermotor ke Aset lain lain (Rusak berat) pada DKPP Tahun 2025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	25.840.000,00
8.	Reklasifikasi pencatatan perubahan kondisi aset tetap peralatan dan mesin kelompok alat bengkel dan alat ukur, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar dan komputer dari kondisi baik menjadi rusak berat menjadi kelompok Aset Lain-lain	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	177.234.000,10
9.	Reklasifikasi aset peralatan dan mesin menjadi aset lainnya, yang terdiri dari : Mobil dan Motor Dinas BKPSDM	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100.997.000,00
10.	Reklasifikasi per 31 Desember 2025 Kecamatan Selat Nasik	Kecamatan Selat Nasik	267.750.000,00
11.	Reklasifikasi Per 31 Desember 2025 Kecamatan Badau	Kecamatan Badau	33.840.000,00
12.	Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Lainnya pada Dinas Pariwisata Kab. Belitung	Dinas Pariwisata	162.702.000,00
13.	Jurnal Mutasi Aset Per 31 Desember 2025 Kec Membalong dari Aset Tetap ke Aset Lain-Lain	Kecamatan Membalong	434.612.500,00
14.	Jurnal penghapusan aset kendaraan bermotor beroda dua tahun 2025	KELURAHAN KOTA	29.500.000,00
15.	Reklas Aset Tetap menjadi Aset Lainnya	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.837.807.500,00

No	Uraian	OPD	Jumlah (Rp)
16.	Mutasi Tambah Aset dari SATPOLPP	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.000.000,00
17.	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan Mesin Ke Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 (berubah kondisi baik ke rusak berat)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	453.946.650,00
18.	Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2025 (berubah kondisi baik ke rusak berat)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	66.100.000,00
19.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Lain-lain	Dinas Lingkungan Hidup	477.705.047,00
20.	Penyesuaian koreksi kurang catat Aset Lain-lain per 31 Desember 2025	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	12.000.000,00
21.	**Mutasi Kurang :**		
22.	Pengalihan kendaraan dari puskesmas perawas	Upt Puskesmas Perawas Dinas Kesehatan Kab. Belitung	(1.500.000,00)
23.	Pengalihan aset rusak berat (motor) dari puskesmas sprusa ke dinke	Upt Puskesmas Simpang Rusa Dinas Kesehatan Kab. Belitung	(26.510.000,00)
24.	Penghapusan Per 31 Desember 2025 Kecamatan Badau	Kecamatan Badau	(43.480.000,00)
25.	Penghapusan per 31 Desember 2025 pada DSPPPA Kab. Belitung	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(64.350.000,00)
26.	Mutasi Pengalihan Aset Lain-lain Ke BPBD	Satuan Polisi Pamong Praja	(20.000.000,00)
27.	Mutasi Aset Pemusnahan Per 31 Desember 2025 Kecamatan Membalong	Kecamatan Membalong	(14.950.000,00)
28.	Koreksi Mutasi Kurang Aset Tetap Karena Duplikasi Pencatatan	Dinas Perhubungan	(31.945.000,00)
39.	penghapusan Aset tetap Lainnya (Buku) sebesar Rp304.285.833,99 dan Aset Rusak Berat (Buku) sebesar Rp 2.593.800,00 SMPN 1 Badau Tahun 2025.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(2.593.800,00)
	Saldo Akhir		**47.154.869.757,68**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Nilai akumulasi penyusutan aset rusak berat per 31 Desember 2025 sebesar **Rp(28.599.140.451,03)**. nilai tersebut merupakan akumulasi penyusutan aset tetap sebelum perubahan kondisi menjadi aset rusak berat yang di r7eklasifikasi pencatatannya ke akumulasi penyusutan aset rusak berat. Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 pada Unit Pengelola Barang (UPB) Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 112.**

Tabel 104 Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat Tahun 2025

No	Uraian	OPD	Jumlah (Rp)
1.	**Saldo Awal**		**23.614.889.410,60**
2.	**Mutasi Tambah :**		
3.	Jurnal Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat per 30 Juni 2025	Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah	25.611.666,67
4.	Jurnal Penyesuaian Pengalihan Alat Angkut Bermotor Khusus Dari Selat Nasik Ke Dinkes Bast No: 400.6.22/529/Pkm-Sn/2025 Tgl 21 Okt 2025 Dan Sekaligus Ubah Kondisi Menjadi Rb	Dinas Kesehatan	1.475.258.000,00
5.	Jurnal Penyesuaian Mutasi Aset per 31 Desember 2025 berupa reklas pengalihan aset peralatan dan mesin menjadi aset lainnya, yang terdiri dari : Mobil dan Motor Dinas BKPSDM	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100.997.000,00
6.	Reklasifikasi akumulasi penyusutan aset peralatan dan mesin menjadi akumulasi penyusutan aset lain-lain-aset rusak berat	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	176.704.166,76
7.	Jurnal Reflasifikasi per 31 Desember 2025 Kecamatan Selat Nasik	Kecamatan Selat Nasik	267.750.000,00
8.	Reklasifikasi Per 31 Desember 2025 Kecamatan Badau	Kecamatan Badau	32.516.000,00
9.	Reklas Pengalihan Aset Tetap menjadi Aset Lainnya pada Dinas Pariwisata Kab. Belitung	Dinas Pariwisata	70.905.400,00

No	Uraian	OPD	Jumlah (Rp)
10.	Jurnal Mutasi Aset Per 31 Desember 2025 Kec Membalong dari Aset Tetap ke Aset Lain-Lain	Kecamatan Membalong	434.612.500,00
11.	Jurnal penghapusan aset kendaraan bermotor beroda dua tahun 2025	Kelurahan Kota	29.500.000,00
12.	Jurnal Umum Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.853.912.500,00
13.	Jurnal Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan Mesin Ke Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 (berubah kondisi baik ke rusak berat)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	444.593.218,00
14.	Jurnal Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2025 (berubah kondisi baik ke rusak berat)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	21.006.000,00
15.	Reklas Aset Tetap Menjadi Aset Lain-lain	Dinas Lingkungan Hidup	169.287.289,00
16.	Jurnal Penyesuaian koreksi kurang catat Aset Lain-lain per 31 Desember 2025	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	12.000.000,00
	Reklas Aset Tetap Menjadi Aset Lain-lain	Dinas Pertanian dan Pangan	25.840.000,00
17.	**Mutasi Kurang :**		
18.	Jurnal Penyesuaian Pengalihan Kendaraan Dari Puskesmas Perawas	UPT. Puskesmas Perawas Dinas Kesehatan Kab. Belitung	(1.500.000,00)
19.	Jurnal Penyesuaian Pengalihan Aset Rusak Berat (Motor) Dari Puskesmas Sprusa Ke Dinke	UPT. Puskesmas Simpang Rusa Dinas Kesehatan Kab. Belitung	(26.510.000,00)
20.	Penghapusan Per 31 Desember 2025 Kecamatan Badau	Kecamatan Badau	(43.480.000,00)
21.	Jurnal Penghapusan per 31 Desember 2025 pada DSPPPA Kab. Belitung	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(32.175.000,00)
22.	Jurnal Penyesuaian Mutasi Pengalihan Aset Lain-lain Ke BPBD	Satuan Polisi Pamong Praja	(20.000.000,00)
23.	Jurnal Mutasi Aset Pemusnahan Per 31 Desember 2025 Kecamatan Membalong	Kecamatan Membalong	(14.950.000,00)
34.	Koreksi Mutasi Kurang Aset Tetap Karena Duplikasi Pencatatan	Dinas Perhubungan	(17.627.700,00)
	Saldo Akhir		**28.599.140.451,03**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Adapun aset tetap yang telah dicatat sebagai aset lain-lain (rusak berat) tidak disusutkan lagi.

Untuk aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah rinciannya sebagai berikut :

Tabel 105 Rincian Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah

No	Uraian	OPD	Jumlah (Rp)
1.	Kelebihan pembayaran Gedung dan Bangunan atas pekerjaan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.389.000,00
2.	Kelebihan pembayaran Jalan, Jaringan dan Irigasi termasuk diantaranya pemeliharaan JIJ yang dikapitalisasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	611826000
3.	Jurnal Koreksi Kelebihan pembayaran Gedung dan Bangunan atas Pekerjaan Rehabilitasi Atap Museum Tanjungpan dan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Museum Tahun 2025 (DAU EARMARKED) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.140.000,00
4.	Jurnal Koreksi Kelebihan pembayaran Gedung dan Bangunan atas pekerjaan Pembangunan Pagar Sekolah TK Negeri Keciput Sijuk (DAU EARMARKED)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	37.370.000,00
5.	Koreksi atas kelebihan pembayaran pengadaan software (aplikasi kasir)	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	7.770.000,00
6.	Kelebihan pembayaran Gedung dan Bangunan atas pekerjaan pembangunan baru pustu ILP Air Kundur (DAK Fisik)	UPT Puskesmas Membalong – Dinas Kesehatan	43.745.000,00

No	Uraian	OPD	Jumlah (Rp)
	Jumlah		733.240.000,00

5.3.1.2.4.5 Dana Bagi hasil Treasury Deposit Facility (TDF)

Dana Bagi Hasil (DBH) Treasury Deposit Facility (TDF) adalah dana yang bersumber dari DBH dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU) yang disalurkan ke daerah secara nontunai melalui fasilitas TDF. Pada Tahun 2025 dana TDF untuk Kabupaten Belitung sebesar Rp.0,00. Sedangkan dana TDF tahun 2024 sebesar **Rp225.005.000,00** telah dicairkan pada tanggal 11 April Tahun 2025.

5.3.1.2.5 Properti Investasi

Properti Investasi merupakan properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk :

a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan untuk masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa dengan tujuan administratif
b. Dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan inventarisasi dan pencatatan tanah dan/ atau bangunan yang berpotensi untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk memperoleh kenaikan nilai yang dapat dikategorikan sebagai properti investasi. Data awal yang bersumber dari daftar barang pengguna terdapat beberapa aset tanah dan/ atau bangunan yang belum dimanfaatkan secara optimal/ *idle*. Pada 31 Desember 2025 total nilai Properi Investasi adalah sebesar **Rp3.575.471.000,00**. Adapun jumlah tanah yang memenuhi kategori Properti Investasi adalah 6 (enam) bidang pada OPD sebagai berikut :

- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian dengan nilai **Rp1.474.450.000,00** berupa Tanah Kawasan Industri.
- Sekretariat Daerah dengan total nilai **Rp. 2.101.021.000** berupa:
- Tanah Bangunan Hotel/ Penginapan/ Motel (Penginapan dan Restoran (HARLIKA) senilai Rp47.415.000,00
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Stasiun Relay Mini) Rp157.950.000,00,
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Eks Tanah Bangunan STM, SMEA, SMA, SMP Yaperbel &SPG senilai Rp1.306.228.000,00,
- Tanah Bangunan Gedung Pusat Perbelanjaan (Barata Dept Store) senilai Rp515.700.000,00
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Eks. Asrama Karyawan Timah/SPM/STAIN) senilai Rp73.728.000,00

5.3.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya. yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Akun ini menampung utang perhitungan pihak ketiga (PFK), pendapatan diterima dimuka dan utang belanja daerah yang belum dibayarkan pada tahun 2025. dengan rincian sebagai berikut :

	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
1. Utang PFK	179.430.727.00	178.536.273.00
2. Pendapatan Diterima Dimuka	935.699.527,78	1.088.438.935.42
3. Utang Belanja	12.191.592.474.00	12.615.732.245.00
4. Utang Jangka Pendek Lainnya	98.595.562.000,00	-
Jumlah	**111.902.284.728,78**	**13.882.707.453.42**

1. **Utang Perhitungan kepada Pihak Ketiga** per 31 Desember 2025 sebesar **Rp179.430.727,00** terdiri dari:

1) Utang bunga giro/deposito jaminan reklamasi dan jaminan kesungguhan sebesar **Rp179.430.727,00** yang merupakan hak pihak ketiga dari tahun 2011 s.d tahun 2025 yang ditampung dalam rekening giro atas nama Bupati Belitung Nomor 146.301.0374 dan 146.301.0093 pada Bank Sumsel Babel Cabang Tanjungpandan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 106 Rincian Hutang PFK Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Bunga jaminan kesungguhan untuk 34 perusahaan	169.694.112,00
2	Jasa giro rekening 146.301.0374 untuk 34 perusahaan	9.196.559,00
3	Jasa giro rekening 146.301.0093	490.056,00
4	Saldo giro rekening 146.301.0093	50.000,00
	Total	**179.430.727,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Utang bunga giro/deposito jaminan reklamasi dan jaminan kesungguhan jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar **Rp178.536.273,00** terjadi kenaikan sebesar **Rp894.454,00** atau **0,50%** dikarenakan penerimaan bunga pada rekening 146.301.0374.

Penjelasan lebih lanjut terkait jaminan reklamasi dan jaminan kesungguhan dapat dilihat pada penjelasan lain-lain di BAB ini.

2) Tahun 2025 tidak terdapat utang PFK pada Bendahara BOS, semua potongan PFK telah di setor ke kas negara per 31 Desember 2025.

Tabel 107 Utang Pajak Tahun 2025

No	Uraian	Jenis Potongan Pajak (Rp)				Jumlah (Rp)
		PPh ps 21	PPh ps 23	PPN	PFK lainnya	
1	-	-	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber: data BPKAD (diolah)

2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan penerimaan pendapatan dari periode yang akan datang yang diterima dalam periode sekarang. Masa sewa dihitung sejak tanggal BA. perjanjian sewa. Apabila perjanjian sewa terjadi pada pertengahan bulan maka perhitungan masa sewa mulai dihitung pada bulan tersebut (terhitung 1 bulan).

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2025 sebesar **Rp935.699.527,78** yang merupakan pendapatan sewa atas pemakaian kekayaan daerah.

Mutasi pendapatan diterima di muka sebagai berikut :

Tabel 108 Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	**Saldo Awal**	**1.088.438.935,42**
2	Mutasi Tambah :	
3	Pendapatan sewa diterima di muka berdasarkan perjanjian sewa tahun 2025	794.633.694,44
4	Mutasi Kurang :	
5	Pendapatan sewa yang diterima pada tahun lalu namun baru diakui sebagai pendapatan-LO di tahun 2024	(945.940.102,08)
6	Penyesuaian atas kelebihan pembayaran sewa tempat usaha dan jasa kebersihan bulan september dan oktober 2024 an. Nurhadi	(1.433.000,00)
7	**Saldo Akhir**	**935.699.527,78**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pendapatan sewa diterima dimuka dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 109 Mutasi Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Tahun 2025

No	Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
1	Sewa Bangunan Petak Toko di kawasan Kave Senang Tanjungpandan	544.000.000,00	408.000.000,00
2	Sewa Area/lokasi ATM Center Milik Pemkab Belitung di Kawasan Galeri KUKM Jln. Sriwijaya Tanjungpandan (PT. Bank Sumsel Babel)	14.457.666,67	14.457.666,67
3	Sewa Area/lokasi ATM Center Milik Pemkab Belitung di Kawasan Kave Senang Tanjungpandan (PT. Bank Sumsel Babel)	15.000.000,00	15.000.000,00
4	Sewa Area/lokasi ATM Center Milik Pemkab Belitung di Kawasan Kave Senang Tanjungpandan (PT. Bank Rakyat Indonesia)	3.333.333,33	3.333.333,33
5	Sewa Area/lokasi ATM Center Milik Pemkab Belitung di Kawasan Galeri KUKM Jln. Sriwijaya Tanjungpandan (PT. BSI Cab. Tanjungpandan)	11.666.666,67	11.666.666,67
6	Sewa lahan di lokasi pasar Berehun Tg.Pandan	2.475.000,00	2.475.000,00
7	Sewa lahan bagian samping kanan petak/toko milik Pemkab. Belitung di lokasi pasar ikan Tg.Pandan	90.583,33	67.668,75
8	Sewa Bangunan Petak Toko dikawasan Pasar Berehun Tanjungpandan	22.800.000,00	17.100.000,00
9	Sewa Sebagaian Tanah seluas 359 m2 dan 1 (satu) Unit bangunan Cold Storage seluas 359 m2 milik Pemerintah Kabupaten Belitung di jalan DOK kelurah Kota Kecamatan Tanjungpandan. (PT.Belitung Berkah Mandiri)	12.500.000,00	87.500.000,00
10	Sewa sebagian bidang tanah seluas 137 m2 dan bangunan gedung bengkel seluas 75 m2 milik Pemerintah Kabupaten Belitung yang terletak di Jln. Dok Kelurahan Kota Kec. Tanjungpandan. (sdr. Sandy Sumbadji)	28.194.444,44	4.031.666,67
11	Sewa sebagian bidang tanah seluas 299 m2 dan Unit bangunan Cold Storage seluas 126 m2 milik Pemerintah Kabupaten Belitung di jalan DOK kelurah Kota Kecamatan Tanjungpandan. (PT. Laskar Gemilang Serumpun – Wara Prasiddha Swastika)	118.030.500,00	39.343.500,00
12	Pendapatan Sewa Lahan ATM di RSUD	18.456.000,00	18.456.000,00
13	Sewa Area/lokasi ATM Center Milik Pemkab Belitung di kawasan Kantor Bupati Belitung di Jln Jend. A Yani Nomor 001 Tg. Pandan	-	18.422.000,00
14	Sewa sebagian bidang tanah seluas 4.284 m2 yang berlokasi di Pebuhan penyeberangan Tanjung RU' Desa Pegantungan	-	259.515.000,00
15	Sewa lahan tempat usaha dikawasan wisata pantai tanjungpendam	28.784.166,67	42.600.566,67
16	Sewa GOR Non Komersil	-	1.500.000,00
17	Sewa Area/lokasi ATM Center Milik Pemkab Belitung di Jln.Sudirman Kantor BPKAD Kabupaten Belitung	41.666.666,67	61.666.666,67
18	Sewa Area/lokasi ATM Center Milik Pemkab Belitung di Jln.Sriwijaya Kantor BPPRD Kabupaten Belitung	35.115.000,00	51.970.200,00
19	Sewa Area/lokasi ATM Center Milik Pemkab Belitung di Jln.Sriwijaya Kantor BPPRD Kabupaten Belitung	23.000.000,00	29.900.000,00
20	Sewa lahan di lokasi pasar Berehun Tg.Pandan	816.666,67	-
21	Sewa lahan di lokasi pasar Berehun Tg.Pandan	450.000,00	-
22	Sewa sebagian tanah dan bangunan Eks Hotel Harlika Jaya Jln. Kemuning keluraahan Parit, kecamatan Tg. Pandan seluas 24m2	14.862.833,33	-
23	Kelebihan pembayaran sewa tempat usaha dan jasa kebersihan bulan september dan oktober 2025 an. Nurhadi	-	1.433.000,00
	Total	**935.699.527,78**	**1.088.438.935,42**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rincian perhitungan pendapatan sewa diterima di muka dapat dilihat pada **Lampiran 114.**

3. Utang Belanja

Utang belanja merupakan belanja operasional yang masih menjadi kewajiban OPD yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar **Rp12.191.592.474,00**

terdiri dari utang belanja pegawai **Rp4.819.811.876,00** utang belanja barang dan jasa **Rp7.371.780.598,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 110 Rincian Utang Belanja Tahun 2025

Uraian		Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
Utang Belanja			
1	**Utang Belanja Pegawai**	**4.819.811.876,00**	**6.887.850.127,00**
	- Utang belanja pegawai pada BLUD berupa Jasa layanan Rumah Sakit Umum Daerah	4.746.737.576,00	6.776.385.847,00
	- Utang belanja pegawai pada BLUD berupa Jasa layanan pada Puskesmas Selat Nasik	16.510.455,00	0,00
	- Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	56.563.845,00	109.423.280,00
	- Biaya Upah Pungut Retribusi Daerah	0,00	2.041.000,00
2	**Utang belanja barang dan jasa**	**7.371.780.598,00**	**5.727.882.118,00**
	- Utang jasa tanaga kesehatan	0,00	152.348.040,00
	- Utang belanja jasa telepon	45.729.832,00	55.340.890,00
	- Utang belanja jasa air	6.644.584,00	18.753.212,00
	- Utang belanja jasa listrik	350.141.818,00	501.547.673,00
	- Utang belanja jasa surat kabar	410.000,00	995.000,00
	- Utang belanja jasa Kawat/Faksimili/ Internet	86.622.711,00	74.942.979,00
	- Utang belanja jasa kantor-paket/pengiriman	204.000,00	237.000,00
	- Utang belanja perjalanan dinas	40.618.164,00	21.337.360,00
	- Utang belanja dan jasa BLUD :	**6.841.409.489,00**	**4.902.379.964,00**
	• RSUD dr. H. Marsidi Judono	6.775.384.607,00	4.902.379.964,00
	• Puskesmas Tanjungpandan	4.921.857,00	0,00
	• Puskesmas Air saga	201.625,00	0,00
	• Puskesmas Sijuk	8.959.000,00	0,00
	• Puskesmas Selat Nasik	51.942.400,00	0,00
	Jumlah	**12.191.592.474,00**	**12.615.732.245,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rincian utang belanja dapat dilihat pada **Lampiran 115 - 116.**

4. Utang jangka pendek lainnya

Pada tahun 2025 realisasi utang jangka pendek lainnya adalah sebesar Rp98.595.562.000,00 ini merupakan koreksi atas kelebihan pembayaran transfer DBH berdasarkan PMK 120 tahun 2025 sedangkan pada tahun 2024 tidak ada realisasi utang jangka pendek lainnya.

Rinciannya sebagai berikut :

Tabel 111 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer

Uraian		Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
Utang Jangka Pendek Lainnya			
	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer		
1	Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.987.791.000,00	-
2	Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	433.320.000,00	-
3	Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.106.169.000,00	-
4	Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	82.034.476.000,00	-
5	Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	207.730.000,00	-
6	Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	3.589.676.000,00	-
7	Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sawit	7.236.400.000,00	-
	Jumlah	**98.595.562.000,00**	

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Pada tahun 2025 tidak terdapat utang jangka panjang.

5.3.3 Ekuitas

5.3.3.1 Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Belitung yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Jumlah ekuitas Pemerintah Kabupaten Belitung per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp2.085.213.180.486,02.**

5.4 Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Struktur Laporan Operasional pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.4.1 Pendapatan - LO

Pendapatan - LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih. Munculnya hak tagih pada saat ditetapkannya surat ketetapan Pajak/Retribusi Daerah atau pada saat direalisasi artinya bahwa hak yang telah diterima tanpa terlebih dahulu adanya penagihan dengan pengakuan pendapatan bersamaan dengan pendapatan LRA.

Realisasi pendapatan-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp971.640.600.479,84** yang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 112 Rincian Realisasi Pendapatan - LO Tahun 2025

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Asli daerah - LO	218.509.477.998,73	194.473.628.698,82	24.035.849.299,91	12,36
Pendapatan Transfer – LO	701.783.856.657,00	743.282.740.996,00	(41.498.884.339,00)	(5,58)
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	51.347.265.824,11	22.044.107.287,50	29.303.158.536,61	132,93
Jumlah	**971.640.600.479,84**	**959.800.476.982,32**	**11.840.123.497,52**	**1,23**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang diakui berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP)/Surat Ketetapan Retribusi (SKR)/surat ketetapan lainnya yang terdiri dari:

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak - LO

Realisasi pendapatan pajak daerah yang disajikan pada Laporan Operasional per 31 Desember 2025 sebesar **Rp105.008.343.186,00** merupakan pendapatan pajak daerah yang diakui berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP)/surat ketetapan lainnya yang diakui sebagai hak pemerintah daerah. jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar **Rp7.354.081.403,75** atau **7,53%** di mana pendapatan pajak LO pada tahun 2024 sebesar **Rp97.654.261.782,25**.

Secara rinci pendapatan pajak yang disajikan pada LO sebagai berikut:

Tabel 113 Rincian Pendapatan Pajak - LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pajak Reklame - LO	1.157.976.646,00	1.135.602.219,85	22.374.426,15	1,97
Pajak Air Tanah - LO	156.630.123,00	138.988.668,00	17.641.455,00	12,69

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pajak Sarang Burung Walet – LO	145.611.550,00	115.970.000,00	29.641.550,00	25,56
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	24.403.540.787,00	25.845.285.183,00	(1.441.744.396,00)	(5,58)
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	10.770.448.232,00	10.582.062.510,00	188.385.722,00	1,78
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	10.032.985.399,00	21.371.176.637,00	(11.338.191.238,00)	(53,05)
Pajak dan Barang Jasa Tertentu (PBJT) - LO	36.865.502.393,00	38.465.176.564,40	(1.599.674.171,40)	(4,16)
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	16.243.841.156,00	-	16.243.841.156,00	100
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	5.231.806.900,00	-	5.231.806.900,00	100
Jumlah	**105.008.343.186,00**	**97.654.261.782,25**	**7.354.081.403,75**	**7,53**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pendapatan pajak daerah yang disajikan pada Laporan Operasional (LO) apabila disandingkan dengan pendapatan pajak pada LRA sebesar **Rp104.082.515.970,00** terdapat perbedaan sebesar **Rp925.827.216,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 114 Rincian Selisih Pendapatan Pajak LO dan LRA

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Penyesuaian Penambahan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	26.976.382,00
2. Penyesuaian Penambahan Piutang Pajak Reklame Kain	210.000,00
3. Penyesuaian Penambahan Piutang Pajak Air Tanah	493.200,00
4. Penyesuaian Penambahan Piutang Pajak PBB P2	3.203.726.384,00
5. Penyesuaian Pelunasan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	(2.657.200,00)
6. Penyesuaian Pelunasan Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	(2.000.000,00)
7. Penyesuaian Pelunasan Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya	(300.000,00)
8. Penyesuaian Pelunasan Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya	(2.860.000,00)
9. Penyesuaian Pelunasan Piutang Pajak Air tanah	(252.000,00)
10. Penyesuaian Pelunasan Piutang Pajak PBB P2	(2.297.509.550,00)
Total	**925.827.216,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Selisih tersebut dikarenakan adanya pengakuan pendapatan pajak pada LO yang telah ditetapkan namun belum diterima pembayarannya/penyetorannya sampai dengan akhir tahun 2025 (Piutang) dan penyesuaian pelunasan piutang pajak tahun lalu.

Adapun pendapatan pajak-LO diperoleh sebagaimana berikut ini:

Tabel 115 Mutasi Perolehan Pendapatan Pajak LO

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Pajak (LRA)	104.082.515.970,00
Dikurangi :	
Pelunasan piutang pajak tahun 2024 dan tahun sebelumnya	(2.305.578.750,00)
Ditambah :	
Pengakuan piutang pajak tahun 2025	3.231.405.966,00
Jumlah Pendapatan Pajak-LO	**105.008.343.186,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi - LO

Realisasi pendapatan retribusi daerah yang disajikan pada Laporan Operasional TA 2025 sebesar **Rp85.513.242.490,47** merupakan pendapatan retribusi daerah yang diakui berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR)/surat ketetapan lainnya yang diakui sebagai hak pemerintah daerah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar **Rp44.201.592.446,14** atau **107,00%** di mana pendapatan retribusi LO pada tahun 2024 sebesar **Rp41.311.650.044,33**.

Secara rinci pendapatan retribusi yang disajikan pada LO sebagai berikut:

Tabel 116 Rincian Pendapatan Retribusi LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	75.905.680.168,50	31.677.099.973,00	44.228.580.195,50	139,62
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	885.833.000,00	793.916.000,00	91.917.000,00	11,58
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	136.620.000,00	132.360.000,00	4.260.000,00	3,22
Retribusi Pelayanan Pasar - LO	1.426.477.000,00	1.282.191.000,00	144.286.000,00	11,25
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	0,00	0,00	-	-
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	0,00	0,00	-	-
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	100.100.000,00	86.000.000,00	14.100.000,00	16,40
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LRA	0,00	0,00	-	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	693.888.140,97	1.296.011.358,33	(602.123.217,36)	(46,46)
Retribusi Terminal – LO	0,00	54.910.000,00	(54.910.000,00)	(100,00)
Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	193.704.000,00	207.227.000,00	(13.523.000,00)	(6,53)
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa - LO	112.000.000,00	73.350.000,00	38.650.000,00	52,69
Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	119.810.000,00	114.715.000,00	5.095.000,00	4,44
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	547.138.750,00	435.323.800,00	111.814.950,00	25,69
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga - LO	2.556.558.800,00	2.415.021.200,00	141.537.600,00	5,86
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	499.584.000,00	1.555.177.950,00	(1.055.593.950,00)	(67,88)
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah daerah-LO	1.328.625.500,00	446.332.180,00	882.293.320,00	197,68
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah - LO	224.082.000,00	72.581.000,00	151.501.000,00	208,73
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung - LO	783.141.131,00	669.433.583,00	113.707.548,00	16,99
Jumlah	**85.513.242.490,47**	**41.311.650.044,33**	**44.201.592.446,14**	**107,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pendapatan retribusi yang disajikan Laporan Operasional apabila disandingkan dengan pendapatan retribusi pada LRA sebesar **Rp92.848.376.288,50** terdapat perbedaan sebesar **Rp(7.335.133.798,03).**

Perbedaan tersebut dikarenakan adanya koreksi dan penyesuaian pengakuan pendapatan retribusi pada LO per 31 Desember 2025. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 117 Rincian Selisih Pendapatan Retribusi LO

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penyesuaian penambahan piutang retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas non kapitasi BPJS tahun 2025	407.524.400,00
2	Koreksi kurang catat pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas akibat pengenaan potongan biaya administrasi bank yang di potong langsung pada setoran klaim BPJS	986.000,00
3	Penyesuaian penambahan piutang retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah tahun 2025	14.986.867.110,00
4	Koreksi kurang catat pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah akibat pengenaan potongan biaya administrasi bank yang di potong langsung pada setoran klaim BPJS	473.400,00
5	Penyesuaian hasil sewa ruang ATM atas pendapatan diterima dimuka pada BLUD RSUD dr. H Marsidi Judono namun baru diakui sebagai pendapatan tahun ini	18.456.000,00
6	Penyesuaian pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah atas pengembalian klaim BPJS tahun 2023-2024 pada pendapatan tahun ini.	322.817.605,00
7	Penyesuaian penambahan piutang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2025	23.840.000,00
8	Penyesuaian penambahan piutang retribusi pelayanan pasar (Los) tahun 2025	4.340.000,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
9	Penyesuaian pendapatan retribusi pelayanan pasar dari pendapatan sewa kios yang telah diterima tahun sebelumnya namun baru diakui sebagai pendapatan tahun 2025 (KUKM)	425.100.000,00
10	Penyesuaian pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah dari pendapatan tanah dan bangunan yang telah diterima tahun sebelumnya namun baru diakui sebagai pendapatan tahun 2025 (*Cold Storage*-Dinas Perikanan)	118.375.166,66
11	Penyesuaian pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah dari pendapatan tanah dan bangunan yang telah diterima tahun sebelumnya namun baru diakui sebagai pendapatan tahun 2025 (Lahan ATM-KUKM)	47.000.335,42
12	Penyesuaian pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah atas pendapatan yang diterima dimuka pada tahun 2025 (lahan tanjung ru – (Dishub)	259.515.000,00
13	Penyesuaian pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah atas pendapatan yang diterima dimuka pada tahun sebelumnya namun baru diakui sebagai pendapatan tahun 2025 (ATM- Sekretariat Daerah)	18.422.000,00
14	Penyesuaian penambahan piutang retribusi tempat khusus parkir tahun 2025.	28.710.000,00
15	Penyesuaian penambahan piutang retribusi pelayanan kepelabuhan tahun 2025.	66.582.400,00
16	Penyesuaian penambahan piutang retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun 2025	147.582.555,00
17	Penyesuaian pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang telah diterima tahun sebelumnya namun baru diakui sebagai pendapatan tahun 2025 (Sewa petak kios TanjungPendam)	1.433.000,00
18	Penyesuaian pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang telah diterima tahun sebelumnya namun baru diakui sebagai pendapatan tahun 2025 (Sewa Gedung Olahraga	1.500.000,00
19	Penyesuaian penambahan piutang retribusi penjualan hasil produksi pemerintah daerah tahun 2025	226.336.700,00
20	Penyesuaian penambahan piutang retribusi pemanfaatan aset daerah tahun 2025	30.090.000,00
21	Koreksi kurang catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS) pada Puskesmas Tg.Pandan	990.000,00
22	Koreksi kurang catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS) pada Puskesmas Perawas	4.110.000,00
23	Koreksi kurang catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS) pada Puskesmas Selat Nasik	17.582.000,00
24	Penyesuaian pengurangan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan atas pelunasan piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2024	(154.899.700,00)
25	Penyesuaian pengurangan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah atas pelunasan piutang retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah tahun 2024	(11.894.465.394,00)
26	Penyesuaian pengurangan penerimaan retribusi parkir ditepi jalan umum atas pelunasan piutang retribusi parkir ditepi jalan umum tahun 2024	(14.060.000,00)
27	Penyesuaian pengurangan penerimaan retribusi pelayanan pasar (Los) atas pelunasan piutang retribusi Los tahun 2024	(24.640.000,00)
28	Penyesuaian pendapatan retribusi pelayanan pasar - Kios atas pendapatan yang diterima dimuka pada tahun 2025	(566.800.000,00)
29	Penyesuaian pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah atas pendapatan yang diterima dimuka pada tahun 2025 (lahan ATM – KUKM)	(48.289.916,67)
30	Penyesuaian pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah atas pendapatan yang diterima dimuka tahun pada tahun 2025 (cold storage – Dinas Perikanan	(118.030.500,00)
31	Penyesuaian pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah atas pendapatan yang diterima dimuka tahun pada tahun 2025 (Bengkel – Dinas Perikanan	(28.194.444,44)
32	Penyesuaian pengurangan penerimaan retribusi tempat khusus parkir atas pelunasan piutang retribusi pelayanan tempat khusus parkir tahun 2024	(45.120.000,00)
33	Penyesuaian pengurangan penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga atas pelunasan piutang retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun 2024	(51.614.100,00)
34	Penyesuaian pengurangan penerimaan retribusi penjualan produksi usaha daerah atas pelunasan Retribusi penjualan produksi usaha daerah tahun 2024	(113.419.520,00)
35	Penyesuaian pengurangan penerimaan retribusi Pemanfaatan Aset daerah atas pelunasan Pemanfaatan Aset daerah 2024	(43.925.000,00)
36	Reklasifikasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan ke lain-lain PAD yang sah atas penerimaan kapitasi pada puskesmas karena tidak terkait langsung dengan jumlah pelayanan kepada pasien dan telah diatur tersendiri	(11.380.494.495,00)
37	Koreksi lebih catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS) pada Puskesmas Air Saga	(3.535.000,00)
38	Koreksi lebih catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS) pada Puskesmas Badau	(15.000,00)
39	Koreksi lebih catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS) pada Puskesmas Tg.Binga	(980.000,00)
40	Koreksi lebih catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS) pada Puskesmas Simpang Rusa	(4.996.000,00)
41	Koreksi lebih catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS) pada Puskesmas Membalong	(288.400,00)
	Total	**(7.335.133.798,03)**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Adapun pendapatan retribusi-LO diperoleh sebagaimana berikut ini:

Tabel 118 Mutasi Pendapatan Retribusi LO

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Retribusi (LRA)	92.848.376.288,50
Dikurangi :	
Penyesuaian pendapatan retribusi atas pelunasan piutang retribusi tahun lalu	(12.323.687.714,00)
Penyesuaian pendapatan retribusi yang diterima dimuka pada tahun berjalan	(779.770.861,11)
Reklasifikasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan ke lain-lain PAD yang sah atas penerimaan kapitasi pada puskesmas karena tidak terkait langsung dengan jumlah pelayanan kepada pasien dan telah diatur tersendiri	(11.380.494.495,00)
Koreksi lebih catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS)	(9.814.400,00)
Ditambah :	
Penyesuaian pengakuan piutang retribusi yang telah ditetapkan namun belum diterima sampai dengan akhir tahun 2025	15.921.873.165,00
Pendapatan retribusi yang terima di muka tahun sebelumnya diakui sebagai pendapatan periode tahun 2025	889.801.502,08
Koreksi kurang catat pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan di Rumah Sakit Umum Daerah akibat pengenaan potongan biaya administrasi bank yang di potong langsung pada setoran klaim BPJS	**1.459.400,00**
Penyesuaian pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah atas pengembalian klaim BPJS tahun 2023-2024 pada pendapatan tahun ini.	**322.817.605,00**
Koreksi kurang catat piutang retribusi pelayanan kesehatan (BPJS)	**22.682.000,00**
Jumlah Pendapatan Retribusi - LO	**85.513.242.490,47**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat pendapatan bagi hasil laba/dividen diterima oleh kas daerah dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

Tabel 119 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO	4.886.428.412,02	5.566.654.063,95	(680.225.651,93)	(12,22)
Jumlah	**4.886.428.412,02**	**5.566.654.063,95**	**(680.225.651,93)**	**(12,22)**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD – LO merupakan pembagian dividen tahun buku 2024 berdasarkan hasil RUPS pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 120 Rincian Dividen 2025

Nama BUMD/Perusahaan Milik Daerah	Dividen
PT. Bank Sumsel Babel	4.886.428.412,02
Jumlah	**4.886.428.412,02**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah - LO

Lain-Lain PAD yang Sah yang disajikan pada Laporan Operasional TA 2025 sebesar **Rp23.101.463.910,24** merupakan pendapatan yang didahului dengan penerbitan Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait. Adapun untuk jenis pendapatan yang tanpa penetapan SK, pengakuannya dilakukan pada saat kas diterima. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar **Rp26.839.598.898,05** atau **53,74%** di mana Lain-Lain PAD yang Sah - LO pada tahun 2025 sebesar **Rp49.941.062.808,29**.

Secara rinci Lain-lain PAD yang Sah yang disajikan pada LO sebagai berikut:

Tabel 121 Rincian Lain-Lain PAD yang Sah

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	58.922.766,67	55.346.600,00	3.576.166,67	6,46
Hasil Kerja Sama Daerah-LO	1.982.500,00	15.695.957,00	(13.713.457,00)	(87,37)
Jasa Giro-LO	946.156.503,00	2.522.185.887,00	(1.576.029.384,00)	(62,49)
Pendapatan Bunga-LO	2.515.890.784,00	1.804.931.928,00	710.958.856,00	39,39
Penerimaan Komisi. Potongan. atau Bentuk Lain-LO	7.277.217.901,57	3.429.707.340,01	3.847.510.561,56	112,18
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	777.444.949,00	792.560.866,99	(15.115.917,99)	(1,91)
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	33.558.807,00	18.845.669,00	14.713.138,00	78,07
Pendapatan dari Pengembalian-LO	93.145.470,00	286.082.588,00	(192.937.118,00)	(67,44)
Pendapatan dari BLUD-LO	11.397.144.229,00	41.015.705.972,29	(29.618.561.743,29)	(72,21)
Jumlah	**23.101.463.910,24**	**49.941.062.808,29**	**(26.839.598.898,05)**	**(53,74)**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pendapatan Lain-Lain PAD yang sah yang disajikan pada Laporan Operasional apabila disandingkan dengan pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah pada LRA sebesar **Rp11.672.165.074,57** terdapat perbedaan sebesar **Rp48.804.340,67**.

Perbedaan tersebut dikarenakan adanya koreksi dan penyesuaian pengakuan pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah pada LO per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 122 Rincian Selisih Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah LO dan LRA

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Penyesuaian hasil sewa BMD atas pendapatan diterima dimuka tahun sebelumnya namun baru diakui sebagai pendapatan tahun 2025 (sewa ATM – BPPRD)	43.755.200,00
2. Penyesuaian hasil sewa BMD atas pendapatan diterima dimuka tahun sebelumnya namun baru diakui sebagai pendapatan tahun 2025 (ATM – Tj Kelayang	13.816.400,00
3. Penyesuaian penambahan pendapatan denda retribusi daerah akibat penambahan piutang denda retribusi pelayanan parkir di tepi jalan Umum 2025)	278.800,00
4. Penyesuaian penambahan pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan akibat penambahan piutang denda retribusi pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan 2025)	492.000,00
5. Penyesuaian penambahan pendapatan denda retribusi daerah akibat penambahan piutang denda retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun 2025	9.450.940,00
6. Reklasifikasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan ke lain-lain PAD yang sah atas penerimaan kapitasi pada puskesmas karena tidak terkait langsung dengan jumlah pelayanan kepada pasien dan telah diatur tersendiri	11.380.494.495,00
7. Penyesuaian hasil sewa BMD atas pendapatan diterima dimuka tahun berjalan (Sewa sebagian luas tanah dan bangunan Eks hotel Harlika Jaya)	(14.862.833,33)
8. Penyesuaian pelunasan piutang piutang hasil kerja sama pemanfaatan BMD	(1.920.000,00)
9. Penyesuaian pelunasan piutang pendapatan denda retribusi parkir di tepi jalan umum	(141.200,00)
10. Penyesuaian pelunasan pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan akibat penambahan piutang denda retribusi pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan 2025)	(82.900,00)
11. Penyesuaian pelunasan piutang pendapatan denda retribusi tempat rekreasi dan olah raga (pemakaian tempat usaha)	(1.967.066,00)
12. Penyesuaian pelunasan piutang pendapatan denda retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah	(15.000,00)
Total	**11.429.298.835,67**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Adapun mutasi lain-lain PAD - LO diperoleh dari :

Tabel 123 Rincian Mutasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Lain-Lain PAD yang sah (LRA)	**11.672.165.074,57**
Dikurangi :	
Penyesuaian pelunasan piutang pendapatan denda retribusi parkir di tepi jalan umum	(141.200,00)
Penyesuaian pelunasan piutang pendapatan denda pemakaian kekayaan daerah (pemakaian tempat usaha)	(82.900,00)
Penyesuaian pelunasan piutang piutang hasil kerja sama pemanfaatan BMD (kontribusi sewa kios PT. Puncak Jaya Lestari) tahun 2024	(1.920.000,00)
Penyesuaian pelunasan piutang pendapatan denda retribusi tempat rekreasi dan olahraga (pemakaian tempat usaha)	(1.967.066,00)

Uraian	Jumlah (Rp)
Penyesuaian pendapatan BLUD atas pendapatan yang diterima di muka tahun berjalan	(14.862.833,33)
Penyesuaian pelunasan piutang pendapatan denda retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah	(15.000,00)
Ditambah :	
Penyesuaian penambahan piutang pendapatan denda retribusi parkir di tepi jalan umum	278.800,00
Penyesuaian penambahan pendapatan denda retribusi daerah akibat penambahan piutang denda retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun 2025 (UPT. Taman Hiburan)	9.450.940,00
Penyesuaian penambahan piutang pendapatan denda pemakaian kekayaan daerah (pemakaian tempat usaha)	492.000,00
Penyesuaian hasil sewa BMD atas pendapatan diterima dimuka namun baru diakui sebagai pendapatan tahun ini (sewa ATM –BPPRD)	43.755.200,00
Penyesuaian hasil sewa BMD atas pendapatan diterima dimuka namun baru diakui sebagai pendapatan tahun ini (ATM – Tj Kelayang)	13.816.400,00
Reklasifikasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan ke lain-lain PAD yang sah atas penerimaan kapitasi pada puskesmas karena tidak terkait langsung dengan jumlah pelayanan kepada pasien dan telah diatur tersendiri	11.380.494.495,00
Jumlah Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah - LO	**23.101.463.910,24**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan transfer mencakup pendapatan transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan maupun transfer lainnya berupa dana penyesuaian dan transfer dari pemerintah provinsi berupa pendapatan bagi hasil. Realisasi rincian pendapatan transfer sebagai berikut:

Tabel 124 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer – LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan transfer pemerintah pusat – Dana Perimbangan				
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	59.762.052.300,00	80.960.067.654,00	(21.198.015.354,00)	(26,18)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	478.853.010.054,00	485.393.500.051,00	(6.540.489.997,00)	(1,35)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	8.848.258.410,00	10.766.768.288,00	(1.918.509.878,00)	(17,82)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	91.209.342.578,00	84.237.114.249,00	6.972.228.329,00	8,28
Pendapatan transfer Pemerintah Pusat - lainnya				
Dana Insentif Daerah-LO	-	-	-	-
Dana Insentif Fiskal-LO	0,00	15.976.321.000,00	(15.976.321.000,00)	(100,00)
Dana Insentif Fiskal untuk penghargaan Kinerja tahun sbelumnya-LO	20.586.869.000,00	0,00	20.586.869.000,00	100,00
Pendapatan transfer Pemerintah Provinsi				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	40.858.291.815,00	61.977.343.754,00	(21.119.051.939,00)	(34,08)
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	1.666.032.500,00	3.971.626.000,00	(2.305.593.500,00)	(58,05)
Jumlah	**701.783.856.657,00**	**743.282.740.996,00**	**(41.498.884.339,00)**	**(5,58)**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pendapatan transfer yang disajikan Laporan Operasional apabila disandingkan dengan pendapatan transfer pada LRA sebesar **Rp726.752.761.810,00** terdapat selisih sebesar **Rp(24.968.905.153,00)**. Selisih tersebut dikarenakan adanya koreksi dan penyesuaian pengakuan pendapatan transfer pada LO per 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 125 Selisih Pendapatan Transfer LO dan LRA

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Pendapatan dana desa yang berdasarkan kebijakan Akuntansi tidak diakui di pendapatan-LO	(40.620.586.800,00)
2. Penyesuaian atas pelunasan piutang bagi hasil pajak provinsi tahun lalu yang diterima tahun ini	(15.067.479.618,00)
3. Penyesuaian pelunasan kurang catat atas pembentukan dana TDF Bagi Hasil Pajak/SDA Tahun 2025	(225.005.000,00)
4. Piutang pendapatan bagi hasil pajak provinsi tahun 2025.	9.663.053.265,00
5. Piutang DBH atas kurang bayar DBH berdasarkan PMK 120 Tahun 2025	21.281.113.000,00

Uraian	Jumlah (Rp)
Total	**(24.968.905.153,00)**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Adapun mutasi Pendapatan Transfer - LO diperoleh dari :

Tabel 126 Mutasi Pendapatan Transfer LO

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Transfer (LRA)	726.752.761.810,00
Ditambah :	
Piutang pendapatan bagi hasil pajak provinsi tahun 2025	9.663.053.265,00
Piutang DBH atas kurang bayar DBH berdasarkan PMK 120 Tahun 2025	21.281.113.000,00
Dikurangi :	
Pelunasan piutang pendapatan bagi hasil pajak provinsi tahun sebelumnya	(15.067.479.618,00)
Pendapatan dana desa yang berdasarkan kebijakan Akuntansi tidak diakui di pendapatan-LO	(40.620.586.800,00)
Penyesuaian pelunasan kurang catat atas pembentukan dana TDF Bagi Hasil Pajak/SDA Tahun 2025	(225.005.000,00)
Jumlah Pendapatan Transfer - LO	**701.783.856.657,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk ke dalam PAD dan Pendapatan Transfer yang terdiri dari pendapatan hibah. pendapatan dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO pada tahun 2025 sebesar **Rp51.347.265.824,11** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 127 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1. Pendapatan Hibah - LO	51.347.265.824,11	11.266.690.519,50	40.080.575.304,61	355,74
2. Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	10.777.416.768,00	(10.777.416.768,00)	(100,00)
Jumlah	51.347.265.824,11	**22.044.107.287,50**	**29.303.158.536,61**	**132,93**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah – LO

Pendapatan hibah adalah penerimaan daerah berupa uang atau barang yang tidak perlu dibayar kembali yang antara lain mencakup pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah lainnya, maupun dari lembaga/organisasi swasta dan masyarakat. serta bantuan keuangan dari pemda lainnya. Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima. Dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh. maka dicatat berdasarkan nilai wajar. Rincian pendapatan hibah sebagai berikut:

Tabel 128 Rincian Pendapatan Hibah LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	45.231.956.960,00	6.898.399.716,97	38.333.557.243,03	555,69
2. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	5.002.379.364,11	4.167.553.302,53	834.826.061,58	20,03)
3. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	1.112.929.500,00	166.037.500,00	946.892.000,00	570,29
4. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	0,00	34.700.000,00	(34.700.000,00)	(100,00)

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Jumlah	**51.347.265.824,11**	**11.266.690.519,50**	**40.080.575.304,61**	**355,74**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pendapatan hibah yang disajikan Laporan Operasional apabila disandingkan dengan pendapatan hibah pada LRA sebesar **Rp0,00** terdapat selisih sebesar **Rp51.291.165.824,11**. Selisih tersebut dikarenakan adanya koreksi dan penyesuaian penerimaan pendapatan hibah pada LO per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 129 Selisih Pendapatan Hibah LO dan LRA

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Barang Pakai Habis-dari Kementrian kepada Dinas Kesehatan	9.801.900,00
2. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berupa aset jalan, jaringan dan irigasi - bangunan MCK berdasarkan BAST No.513.3/BA/DC/2024 dan 000.2/896/BPKAD Tgl. 12 Juli 2024 kepada Dinas Pariwisata	4.656.889.500,00
3. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan SK No. 100.3.4/460/KEP/BPKAD/2025 tgl. 26 Mei 2025 berupa asset Tanah kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	10.419.180.000,00
4. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Direktur Jenderal Cipta Karya Kementrian PUPR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan SK No. 100.3.4/212/KEP/BPKAD/2025 tgl. 17 Maret 2025 berupa Ultra Violet Viewing Box dan lampu Ultra Violet kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.744.530.281,00
5. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan SK No. 100.3.4/212/KEP/BPKAD/2025 tgl. 17 Maret 2025 berupa aset bangunan Tugu kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	8.012.440.083,00
6. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan SK No. 100.3.4/460/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 26 Mei 2025,dan SK No. 100.3.4/211/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 17 Maret 2025, SK No. 100.3.4/212/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 17 Maret 2025 dan SK No. 100.3.4/471/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 28 Mei 2025 beruba aset jalan, jaringan dan irigasi terdiri dari jalan dan Jembatan, Saluran Drainase dan MCK, dan Jaringan Pembawa Kapasitas sedang kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	19.364.955.096,00
7. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah BMHP (paket Hemoglobin) dari Direktur Penyakit Menular kemenkes tahun 2025 kepada Dinas Kesehatan	23.090.000,00
8. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Buku KIA dari Dirjen Kesehatan Masyarakat kemenkes berdasarkan No.BJ.01.04/A.VI.10/PPK.4.1/BASTP/122/2025 Tgl. 1 Desember 2025 kepada Dinas Kesehatan	528.400,00
9. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Buku Saku Kader Kesehatan PMT Penyuluhan Balita dari Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan No. BJ. 01.03/B.II.11/PPK-OpsBarjas/3736/2025 tgl. 8 Desember 2025 kepada Dinas Kesehatan	541.700,00
10. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Obat-Obatan berupa Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi dari Perwakilan BKKBN Provinsi Babel tahun 2025 kepada DPPKBPMD	53.620.035,00
11. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Obat-Obatan berupa Insulin dari Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung No. 400.7.18/607/DINKES tgl. 9 September 2025 kepada Dinas Kesehatan	10.000.000,00
12. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Bahan makanan (Natura) dari Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung kepada Dinas Kesehatan	33.497.500,00
13. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah BMHP dan Obat-Obatan dari Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung No. 400.7.18/17/DINKES tgl. 31 Desember 2025 kepada Dinas Kesehatan	252.015.616,36
14. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Barang dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada DKPP	64.713.000,00
15. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Obat-Obatan dari Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung kepada Dinas Kesehatan	4.588.533.212,75
16. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya hibah barang berupa Cold Storage dari perorangan kepada RSUD dr. H. Marsidi Judono berdasarkan BAST No. 445/0993.A/UPT RSUD dr.H.M.JD tgl. 24 Maret 2025	120.000.000,00
17. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Bpk Antoni berlokasi di Jl.Gang Sambas Air ketekok berdasarkan SK No. 100.3.4./468/KEP/BPKAD/2025 tgl. 28 Mei 2025 dan Ibu Liu siu Ing berlokasi di Jl. Bunga Desa Desa Air Saga berdasarkan SK No.100.3.4.206/KEP/BPKAD/2025 tgl. 13 Maret 2025 dengan Pemerintah	572.629.500,00

Uraian	Jumlah (Rp)
Kabupaten Belitung berupa tanah untuk Jalan dan Drainase kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
18. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Bpk Hasnawi dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan KepBup No. 100.3.4/904/KEP/BPKAD/2025 tgl. 28 Oktober 2025 berupa tanah pada Puskesmas Sijuk	270.000.000,00
19. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Bpk Anuarisnen dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan KepBup No. 100.3.4/922/KEP/BPKAD/2025 tgl. 10 November 2025 berupa tanah pada Puskesmas Badau	86.840.000,00
20. Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Bpk Samsir dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan KepBup No. 100.3.4/923/KEP/BPKAD/2025 tgl. 10 November 2025 berupa tanah pada Puskesmas Simpang Rusa	7.360.000,00
21. Penyesuaian Penambahan Aset berupa tanah berdasarkan SK Nomor 100.3.4/921/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 12 November 2025 tentang penetapan status penggunaan BMD atas Hibah dari Bapak Zaptirawi Wara berupa tanah untuk makam bersejarah di Desa Kembiri Membalong	28.600.000,00
22. Penambahan Aset Tetap pada SDN 16 Tanjungpandan perolehan Hibah dari Komite Tahun 2025	27.500.000,00
Total	**51.347.265.824,11**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Adapun mutasi pendapatan hibah - LO diperoleh dari :

Tabel 130 Mutasi Pendapatan Hibah LO

Uraian	Jumlah (Rp)
Lain-lain pendapatan yang sah (LRA)	**0,00**
Ditambah :	
1. Penyesuaian penambahan pendapatan hibah dari pemerintah pusat karena adanya hibah berupa aset tetap	45.197.994.960,00
2. Penyesuaian penambahan pendapatan hibah dari pemerintah pusat karena adanya hibah berupa barang	33.962.000,00
3. Penyesuaian penambahan pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya karena adanya hibah berupa obat-obatan , vaksin dan barang	5.002.379.364,11
4. Penyesuaian penambahan pendapatan hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri berupa aset tetap	1.112.929.500,00
Dikurangi :	
Tidak ada	
Jumlah Pendapatan hibah – LO	**51.347.265.824,11**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rincian pendapatan hibah sebagai berikut:

Tabel 131 Subrincian Pendapatan Hibah LO Per OPD

No	Uraian	OPD	Nilai Perolehan (Rp)
A.	**Hibah dari Pemerintah Pusat**		
1.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Barang Pakai Habis-dari Kementerian ke pada Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	9.801.900,00
2.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berupa aset jalan . jaringan dan irigasi - bangunan MCK berdasarkan BAST No.513.3/BA/DC/2024 dan 000.2/896/BPKAD Tgl. 12 Juli 2024 kepada Dinas Pariwisata	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4.656.889.500,00
3.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan SK No. 100.3.4/460/KEP/BPKAD/2025 tgl. 26 Mei 2025 berupa aset Tanah kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	10.419.180.000,00
4.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan SK No. 100.3.4/212/KEP/BPKAD/2025 tgl. 17 Maret 2025 berupa Ultra Violet Viewing Box dan lampu Ultra Violet kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.744.530.281,00

No	Uraian	OPD	Nilai Perolehan (Rp)
5.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan SK No. 100.3.4/212/KEP/BPKAD/2025 tgl. 17 Maret 2025 berupa aset bangunan Tugu kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	8.012.440.083,00
6.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset antara Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan SK No. 100.3.4/460/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 26 Mei 2025,dan SK No. 100.3.4/211/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 17 Maret 2025, SK No. 100.3.4/212/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 17 Maret 2025 dan SK No. 100.3.4/471/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 28 Mei 2025 beruba aset jalan, jaringan dan irigasi terdiri dari jalan dan Jembatan, Saluran Drainase dan MCK, dan Jaringan Pembawa Kapasitas sedang kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	19.364.955.096,00
7.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah BMHP (paket Hemoglobin) dari Direktur Penyakit Menular kemenkes tahun 2025 kepada Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	23.090.000,00
8.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Buku KIA dari Dirjen Kesehatan Masyarakat kemenkes berdasarkan No.BJ.01.04/A.VI.10/PPK.4.1/BASTP/122/2025 Tgl. 1 Desember 2025 kepada Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	528.400,00
9.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Buku Saku Kader Kesehatan PMT Penyuluhan Balita dari Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan No. BJ. 01.03/B.II.11/PPK-OpsBarjas/3736/2025 tgl. 8 Desember 2025 kepada Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	541.700,00
B.	**Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO**		
1.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Obat-Obatan berupa Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi dari Perwakilan BKKBN Provinsi Babel tahun 2025 kepada DPPKBPMD	DPPKBPMD	53.620.035,00
2.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Obat-Obatan berupa Insulin dari Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung No. 400.7.18/607/DINKES tgl. 9 September 2025 kepada Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	10.000.000,00
3.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Bahan makanan (Natura) dari Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung kepada Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	33.497.500,00
4.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah BMHP dan Obat-Obatan dari Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung No. 400.7.18/17/DINKES tgl. 31 Desember 2025 kepada Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	252.015.616,36
5.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Barang dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada DKPP	Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian	64.713.000,00
6.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah Obat-Obatan dari Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung kepada Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	4.588.533.212,75
C.	**Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan – LO**		
1.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya hibah barang berupa Cold Storage dari perorangan kepada RSUD dr. H. Marsidi Judono berdasarkan BAST No. 445/0993.A/UPT RSUD dr.H.M.JD tgl. 24 Maret 2025	UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono	120.000.000,00

No	Uraian	OPD	Nilai Perolehan (Rp)
2.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Bpk Antoni berlokasi di Jl.Gang Sambas Air ketekok berdasarkan SK No. 100.3.4./468/KEP/BPKAD/2025 tgl. 28 Mei 2025 dan Ibu Liu siu Ing berlokasi di Jl. Bunga Desa Desa Air Saga berdasarkan SK No.100.3.4.206/KEP/BPKAD/2025 tgl. 13 Maret 2025 dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berupa tanah untuk Jalan dan Drainase kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	572.629.500,00
3.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Bpk Hasnawi dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan KepBup No. 100.3.4/904/KEP/BPKAD/2025 tgl. 28 Oktober 2025 berupa tanah pada Puskesmas Sijuk	Puskesmas Sijuk	270.000.000,00
4.	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Bpk Anuarisnen dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan KepBup No. 100.3.4/922/KEP/BPKAD/2025 tgl. 10 November 2025 berupa tanah pada Puskesmas Badau	Puskesmas Badau	86.840.000,00
5	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Bpk Samsir dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan KepBup No. 100.3.4/923/KEP/BPKAD/2025 tgl. 10 November 2025 berupa tanah pada Puskesmas Simpang Rusa	Puskesmas Simpang Rusa	7.360.000,00
6	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Bpk Zaptirawi Wara dengan Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan KepBup No. 100.3.4/921/KEP/BPKAD/2025 tgl. 12 November 2025 berupa tanah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.600.000,00
7	Penyesuaian penambahan pendapatan karena adanya Hibah aset dari Komite SDN 16 Tanjungpandan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	27.500.000,00
	Total		**51.347.265.824,11**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -LO

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan digunakan untuk mencatat Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 132 Rincian Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	0,00	10.777.416.768,00	(10.777.416.768,00)	(100,00)
Jumlah	**0,00**	**10.777.416.768,00**	**(10.777.416.768,00)**	**(100,00)**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Penganggaran pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan pada kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah objek pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sejak tahun 2023 hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Selain pendapatan tersebut diatas, terdapat pendapatan atas kegiatan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) yang diklaim ke BPJS Kesehatan namun belum dianggarkan dalam DPA masing-masing Puskesmas senilai Rp256.377.000,00. Atas pendapatan tersebut telah dibelanjakan seluruhnya. Sejak tahun 2025, Puskesmas di Belitung telah menjadi BLUD dan Pendapatan atas kegiatan Prolanis telah dianggarkan dalam Pendapatan BLUD masing-masing Puskesmas.

5.4.2 Beban

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yang terdiri dari beban pegawai. beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 133 Rincian Beban LO

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Pegawai	471.605.712.348,00	475.497.347.943,00	(3.891.635.595,00)	(0,82)
Beban Barang dan Jasa	286.754.146.394,84	347.045.862.133,99	(60.291.715.739,15)	(17,37)
Beban Bunga	-	-	-	-
Beban Subsidi	540.823.627,00	638.399.797,00	(97.576.170,00)	(15,28)
Beban Hibah	37.361.616.916,89	61.847.287.249,00	(24.485.670.332,11)	(39,59)
Beban Bantuan Sosial	447.746.725,00	235.972.000,00	211.774.725,00)	89,75
Beban Penyisihan Piutang	2.203.344.840,25	2.219.208.425,00	(15.863.584,75)	(0,71)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	163.881.056.741,34	168.522.223.033,66	(4.641.166.292,32)	(2,75)
Beban Transfer	65.001.430.500,00	66.371.628.700,00	(1.370.198.200,00)	(2,06)
Beban Lain-lain	-	-	-	-
Jumlah	**1.027.795.878.093,32**	**1.122.377.929.281,65**	**(94.582.051.188,33)**	**(8,43)**

Sumber: Data BPKAD (Diolah)

Pada tahun 2025, nilai beban pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Belitung adalah sebesar **Rp1.027.795.878.093,32** terjadi penurunan sebesar **Rp94.582.051.188,33 atau 8,43%.**

5.4.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai terdiri beban pegawai yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program kegiatan. Realisasi beban pegawai untuk tahun 2025 adalah sebesar **Rp471.605.712.348,00** dengan rincian beban pegawai sebagai berikut:

Tabel 134 Rincian Realisasi Beban Pegawai

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	234.384.408.900,00	233.074.193.679,00	1.310.215.221,00	0,56
Beban Tambahan Penghasilan ASN	187.741.200.192,00	155.968.439.956,00	31.772.760.236,00	20,37
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	42.819.681.029,00	(42.819.681.029,00)	(100,00)
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	12.687.561.649,00	12.869.165.644,00	(181.603.995,00)	(1,41)
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	780.402.103,00	446.691.471,00	333.710.632,00	74,71
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	784.800.000,00	16.800.000,00	2,14
Beban Pegawai BLUD	35.210.539.504,00	29.534.376.164,00	5.676.163.340,00	19,22
Jumlah	**471.605.712.348,00**	**475.497.347.943,00**	**(3.891.635.595,00)**	**(0,82)**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Beban pegawai yang disajikan pada laporan operasional apabila disandingkan dengan belanja pegawai pada LRA sebesar **Rp473.457.900.870,00** terdapat selisih sebesar **Rp1.852.188.522,00**. Selisih tersebut merupakan selisih antara mutasi tambah dan mutasi kurang pada pencatatan beban pegawai pada laporan operasional, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 135 Mutasi Selisih Beban Pegawai

Uraian	Jumlah (Rp)
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2025 pada Dinas Perikanan	11.910.891,00
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2025 pada UPT PUSKESMAS SIJUK	3.613.008,00

Uraian	Jumlah (Rp)
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2025 pada UPT PUSKESMAS BADAU	2.830.362,00
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2025 pada UPT PUSKESMAS SIJUK	746.012,00
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2025 pada UPT PUSKESMAS SIMPANG RUSA	558.572,00
Penyesuaian Beban Tunjangan Fungsional PNS atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2025 pada DSPPPA	34.320.000,00
Penyesuaian Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2025 pada BKPSDM	2.585.000,00
Penyesuaian beban pegawai BLUD atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2025 Pada UPT RSUD	4.746.737.576,00
Penyesuaian beban pegawai BLUD atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2025 Pada UPT PUSKESMAS SELAT NASIK	16.510.455,00
Penyesuaian beban gaji dan tunjangan ASN atas pembayaran utang belanja pegawai tahun 2024 pada Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(22.852.617,00)
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK atas pembayaran utang iuran jaminan kesehatan PPPK tahun 2024 pada BPKAD	(655.860,00)
Penyesuaian Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN atas pembayaran utang Tunjangan Fungsional Umum ASN tahun 2024 pada Dinas Perikanan	(7.030.000,00)
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS atas pembayaran utang iuran jaminan kesehatan PNS tahun 2024 pada BPKAD	(33.758.178,00)
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS atas pembayaran utang iuran jaminan kesehatan PNS tahun 2024 pada UPT PUSKESMAS TANJUNG BINGA	(431.299,00)
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS atas pembayaran utang iuran jaminan kesehatan PNS tahun 2024 pada UPT PUSKESMAS BADAU	(231.379,00)
Penyesuaian Beban Tunjangan Keluarga PPPK atas pembayaran utang Tunjangan Keluarga PPPK tahun 2024 pada Dinas Kesehatan	(9.015.280,00)
Penyesuaian Beban Gaji dan Tunjangan ASN atas pembayaran utang Gaji Pokok PNS tahun 2024 pada Dinas Perhubungan	(30.448.667,00)
Penyesuaian beban pegawai BLUD atas pelunasan utang belanja pegawai tahun 2023 pada RSUD	(6.560.536.118,00)
Penyesuaian Beban Tunjangan Jabatan PNS atas pembayaran utang Tunjangan Jabatan PNS tahun 2024 pada UPT RSUD	(5.000.000,00)
Penyesuaian Beban Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah atas pembayaran Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah tahun 2024 pada Dinas Perhubungan	(2.041.000,00)
Total	**(1.852.188.522,00)**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Adapun jumlah beban pegawai yang disajikan pada LO diperoleh sebagai berikut:

Tabel 136 Mutasi Beban Pegawai

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Pegawai (LRA)	473.457.900.870,00
Ditambah :	
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2025 pada Dinas Perikanan	11.910.891,00
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2025 pada UPT PUSKESMAS SIJUK	3.613.008,00
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2025 pada UPT PUSKESMAS BADAU	2.830.362,00
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2025 pada UPT PUSKESMAS SIJUK	746.012,00
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2025 pada UPT PUSKESMAS SIMPANG RUSA	558.572,00
Penyesuaian Beban Tunjangan Fungsional PNS atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2025 pada DSPPPA	34.320.000,00
Penyesuaian Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2025 pada BKPSDM	2.585.000,00
Penyesuaian beban pegawai BLUD atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2025 Pada UPT RSUD	4.746.737.576,00
Penyesuaian beban pegawai BLUD atas pengakuan utang belanja pegawai yang belum dibayar tahun 2025 Pada UPT PUSKESMAS SELAT NASIK	16.510.455,00
Dikurang:	
Penyesuaian beban gaji dan tunjangan ASN atas pembayaran utang belanja pegawai tahun 2024 pada Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(22.852.617,00)
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK atas pembayaran utang iuran jaminan kesehatan PPPK tahun 2024 pada BPKAD	(655.860,00)
Penyesuaian Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN atas pembayaran utang Tunjangan Fungsional Umum ASN tahun 2024 pada Dinas Perikanan	(7.030.000,00)
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS atas pembayaran utang iuran jaminan kesehatan PNS tahun 2024 pada BPKAD	(33.758.178,00)
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS atas pembayaran utang iuran jaminan kesehatan PNS tahun 2024 pada UPT PUSKESMAS TANJUNG BINGA	(431.299,00)

Uraian	Jumlah (Rp)
Penyesuaian Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS atas pembayaran utang iuran jaminan kesehatan PNS tahun 2024 pada UPT PUSKESMAS BADAU	(231.379,00)
Penyesuaian Beban Tunjangan Keluarga PPPK atas pembayaran utang Tunjangan Keluarga PPPK tahun 2024 pada Dinas Kesehatan	(9.015.280,00)
Penyesuaian Beban Gaji dan Tunjangan ASN atas pembayaran utang Gaji Pokok PNS tahun 2024 pada Dinas Perhubungan	(30.448.667,00)
Penyesuaian beban pegawai BLUD atas pelunasan utang belanja pegawai tahun 2023 pada RSUD	(6.560.536.118,00)
Penyesuaian Beban Tunjangan Jabatan PNS atas pembayaran utang Tunjangan Jabatan PNS tahun 2024 pada UPT RSUD	(5.000.000,00)
Penyesuaian Beban Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah atas pembayaran Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah tahun 2024 pada Dinas Perhubungan	(2.041.000,00)
Jumlah Beban Pegawai	**471.605.712.348,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa.

Realisasi beban barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Belitung pada tahun 2025 adalah sebesar **Rp286.754.146.394,84** termasuk di dalamnya terdapat beban barang dan jasa pada BLUD.

Beban barang dan jasa dirinci sebagai berikut:

Tabel 137 Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
a. Beban Barang	49.076.816.545,81	64.390.139.281,81	(15.313.322.736,00)	(23,78)
b. Beban Jasa	112.887.495.181,00	130.454.386.454,00	(17.566.891.273,00)	(13,47)
c. Beban Pemeliharaan	30.979.743.970,85	38.226.922.178,78	(7.247.178.207,93)	(18,96)
d. Beban Perjalanan Dinas	22.771.441.521,00	45.468.814.256,00	(22.697.372.735,00)	(49,92)
e. Beban uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/Masyarakat	5.445.647.800,00	9.111.098.400,00	(3.665.450.600,00)	(40,23)
f. Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	18.323.838.139,00	(18.323.838.139,00)	(100)
g. Beban Barang dan Jasa BOSP	18.127.422.479,00	546.965.460,00	17.580.457.019,00	3214,18
h. Beban Barang dan Jasa BLUD	47.465.578.897,18	40.523.697.964,40	6.941.880.932,78	17,13
Jumlah	**286.754.146.394,84**	**347.045.862.133,99**	**(60.291.715.739,15)**	**(17,37)**

Sumber: data BPKAD (diolah)

1. **Beban Barang** pada periode pelaporan tahun 2025 sebesar **Rp49.076.816.545,81** terdiri dari:

Tabel 138 Beban Barang

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Barang Pakai Habis	48.440.522.601,81	64.388.199.281,81	(15.947.676.680,00)	(24,77)
Beban Barang Tak Habis Pakai	4.140.344,00	-	4.140.344,00	100,00
Beban Aset Tetap Yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	632.153.600,00	1.940.000,00	630.213.600,00	32.485,24
Jumlah	**49.076.816.545,81**	**64.390.139.281,81**	**(15.313.322.736,00)**	**(23,78)**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Secara rinci beban barang terdiri dari :

Tabel 139 Rincian Beban Barang

Kode Akun	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)
Beban Bahan Pakai Habis		
8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	41.848.370,00
8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	1.607.919.788,44
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.590.294.438,00
8.1.02.01.01.0008	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	371.513.853,00
8.1.02.01.01.0009	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	10.166.500,00
8.1.02.01.01.0010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	67.733.250,00

Kode Akun	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)
8.1.02.01.01.0011	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	16.232.500,00
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	460.963.761,03
8.1.02.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00
8.1.02.01.01.0014	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0,00
8.1.02.01.01.0016	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	10.122.000,00
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.644.605.096,50
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	847.613.109,00
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.812.296.954,00
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	69.190.000,00
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	23.007.000,00
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	65.211.280,00
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	960.788.112,00
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	60.495.000,00
8.1.02.01.01.0034	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	848.560.594,00
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	405.141.305,00
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.289.342.564,83
8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat	663.547.873,00
8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.130.224.465,70
8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.204.372.713,00
8.1.02.01.01.0040	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	72.449.997,00
8.1.02.01.01.0041	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	101.154.846,31
8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	57.046.180,00
8.1.02.01.01.0044	Beban Natura dan Pakan-Pakan	254.316.100,00
8.1.02.01.01.0045	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	119.560.000,00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	6.661.275.210,00
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.274.478.440,00
8.1.02.01.01.0054	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	106.352.080,00
8.1.02.01.01.0055	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	107.994.400,00
8.1.02.01.01.0056	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	603.699.700,00
8.1.02.01.01.0057	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	14.157.180,00
8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.523.090.621,00
8.1.02.01.01.0059	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	6.500.000,00
8.1.02.01.01.0061	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	136.000.000,00
8.1.02.01.01.0062	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	34.000.000,00
8.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	68.000.000,00
8.1.02.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	295.448.807,00
8.1.02.01.01.0065	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	82.875.000,00
8.1.02.01.01.0066	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	43.375.000,00
8.1.02.01.01.0071	Beban Pakaian Kerja Laboratorium	0,00
8.1.02.01.01.0073	Beban Pakaian KORPRI	0,00
8.1.02.01.01.0074	Beban Pakaian Adat Daerah	109.435.000,00
8.1.02.01.01.0075	Beban Pakaian Batik Tradisional	375.090.996,00
8.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga	6.700.000,00
8.1.02.01.01.0077	Beban Pakaian Paskibraka	178.471.517,00
8.1.02.01.01.0079	Beban Barang Sampel Pangan	7.861.000,00
Beban Barang Tak Habis Pakai		
8.1.02.01.02.0012	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	4.140.344,00
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi		
8.1.02.01.04.0023	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	2.600.000,00
8.1.02.01.04.0116	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5.575.000,00
8.1.02.01.04.0117	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	71.082.400,00
8.1.02.01.04.0118	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	331.347.500,00
8.1.02.01.04.0121	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	109.675.000,00
8.1.02.01.04.0122	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	3.219.000,00
8.1.02.01.04.0123	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	83.396.600,00
8.1.02.01.04.0133	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	1.100.000,00
8.1.02.01.04.0237	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.273.100,00
8.1.02.01.04.0248	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	3.000.000,00
8.1.02.01.04.0311	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	885.000,00

Kode Akun	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)
8.1.02.01.04.0408	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	2.000.000,00
8.1.02.01.04.0410	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	16.000.000,00
Jumlah		**49.076.816.545,81**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Beban barang diperoleh dari:

Tabel 140 Mutasi Beban Barang

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	**LRA**	**46.413.956.494,68**
2	**Ditambah :**	
3	Penyesuaian beban persediaan awal 1 Januari 2025	11.348.909.719,37
4	Penyesuaian Penerimaan Hibah BMHP dari Kementrian Kesehatan tgl 28 April 2025 pada Dinas Kesehatan	9.801.900,00
5	Penyesuaian Penerimaan Hibah obat-obatan berupa obat kontrasepsi dan non kontrasepsi dari Perwakilan BKKBN Provinsi Babel Tahun 2025 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	53.620.035,00
6	Reklasifikasi Aset tetap menjadi Beban dari Peralatan Olahraga Lainnya menjadi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga (barang pakai habis) pada Dinas Pemuda dan Olahraga	2.800.000,00
7	Penyesuaian Penerimaan Hibah Insulin dari Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor 400.7.18/607/DINKES Tanggal 9 September 2025	10.000.000,00
8	Penyesuaian Penerimaan Hibah BMHP (Paket Hemoglobin) dari Direktur Penyakit Menular Kemenkes TA 2025 pada Dinas Kesehatan	23.090.000,00
9	Penyesuaian Penerimaan Hibah Buku KIA Bayi Kecil dari Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes No: BJ.01.04/A.VI.10/PPK.4.1/BASTP/122/2025 Tanggal 1 Desember 2025 pada Dinas Kesehatan	528.400,00
10	Penyesuaian Penerimaan Hibah Buku Saku Kader Kesehatan PMT Penyuluhan Balita dari Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes No BJ.01.03/B.II.11/PPK-OpsBarjas/3736/2025 tgl 8 Desember 2025 pada Dinas Kesehatan	541.700,00
11	Penyesuaian Penerimaan Hibah Bahan Makanan (natura pada Dinas Kesehatan) dari Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung	33.497.500,00
12	Penyesuaian Penerimaan Hibah BMHP dan Obat dari Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor 400.7.18/17/DINKES TGL 31 Desember 2025	252.015.616,36
13	Reklasifikasi Aset tetap menjadi Beban dari Aset Tetap Alat Laboratorium Pertanian menjadi Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium (barang pakai habis) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10.122.000,00
14	Penyesuaian Penerimaan Hibah Obat dari Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2025 pada Dinas Kesehatan	4.588.533.212,75
15	Penambahan Penerimaan Hibah Aset Tetap pada SDN 16 Tanjungpandan perolehan Hibah dari Komite Tahun 2025 menjadi Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	3.500.000,00
16	Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOSP ke Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi (aset ekstrakomptabel) pada Dinas Pendidkan dan Kebudayaan	1.725.000,00
17	Penyesuaian Penerimaan persediaan untuk UPT BLUD Puskesmas dari Dinas Kesehatan	7.286.808.110,19
18	Reklasifikasi Aset tetap ke Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi (aset ekstrakomptabel) pada Sekretariat Daerah	12.719.000,00
19	Reklasifikasi Aset tetap ke Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi (aset ekstrakomptabel) pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan	614.209.600,00
20	**Dikurang :**	
21	Penyesuaian beban persediaan akhir 31 Desember 2025	(11.906.080.743,85)
22	Penyesuaian pengalihan persediaan dari Dinas Kesehatan kepada UPT BLUD Puskesmas tahun 2025	(7.991.643.128,69)
23	Penyesuaian Reklas antar beban Beban dari Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Terdiri dari : Pembuatan DED Pembangunan Mess Kejaksaan Negeri Belitung, Pembuatan DED Renovasi Markas Komando Kepolisian Resort Belitung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(198.623.000,00)
24	Penyesuaian Reklas antar beban dari Beban Bahan-Bahan Lainnya menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya yaitu Pengalihan BMHP Pemeriksaan HPV DNA ke Labkesda Provinsi Kep. Bangka Belitung BAST No 000.2.6.1/79/DINKES/2025 Tanggal 3 November 2025	(366.095.000,00)
25	Reklasifikasi beban menjadi aset tetap dari Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya menjadi Aset Peralatan dan Mesin pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(6.127.200,00)
26	Reklasifikasi beban menjadi aset tetap dari dari Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga menjadi Peralatan Olahraga Lainnya pada Dinas Pemuda dan Olahraga	(58.500.000,00)
27	Reklasifikasi beban menjadi aset tetap dari Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya menjadi Aset tetap Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) pada Dinas Perhubungan	(1.060.467.670,00)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
28	Reklasifikasi beban menjadi aset tetap dari Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya menjadi Aset tetap Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) pada Sekretariat Daerah	(2.025.000,00)
	Jumlah Beban Barang	**49.076.816.545,81**

Sumber: data BPKAD (diolah)

2. **Beban Jasa** pada periode pelaporan tahun 2025 sebesar **Rp 112.887.495.181,00** terdiri dari:

Tabel 141 Beban Jasa

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Jasa Kantor	72.632.769.225,00	86.137.641.097,00	(13.504.871.872,00)	(15,68)
Beban Iuran Jaminan /Asuransi	34.132.823.304,00	33.252.595.612,00	880.227.692,00	2,65
Beban Sewa Tanah	-	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.741.553.494,00	2.405.622.126,00	(664.068.632,00)	(27,60)
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	553.993.975,00	1.007.354.000,00	(453.360.025,00)	(45,01)
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	32.500.000,00	88.560.000,00	(56.060.000,00)	(63,30)
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	210.761.200,00	2.195.970.984,00	(1.985.209.784,00)	(90,40)
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.062.639.750,00	1.143.267.710,00	(80.627.960,00)	(7,05)
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	-	16.074.000,00	(16.074.000,00)	(100,00)
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	973.756.599,00	1.378.777.596,00	(405.020.997,00)	(29,38)
Beban Kursus/Pelatihan. Sosialisasi. Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.489.532.500,00	2.523.394.134,00	(1.033.861.634,00)	(40,97)
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	27.500.000,00	269.136.103,00	(241.636.103,00)	(89,78)
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	29.665.134,00	31.993.092,00	(2.327.958,00)	(7,28)
Jumlah	**112.887.495.181,00**	**130.454.386.454,00**	**(17.566.891.273,00)**	**(13,47)**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Beban jasa berasal dari:

Tabel 142 Mutasi Beban Jasa

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	**LRA**	**116.447.470.102,00**
2	**Ditambah :**	
3	Penyesuaian beban jasa telepon, jasa air, jasa listrik, jasa langganan surat kabar, jasa kawat/faksimili/internet, Jasa paket/kiriman yang masih harus dibayar (utang beban) 31 Desember 2025	489.752.945,00
4	Penyesuaian Beban Administrasi pelunasan piutang pada Dinas Kesehatan Tahun 2025	84.100,00
5	Penyesuaian Beban Administrasi atas pendapatan kapitasi dan non kapitasi tahun 2025 pada Dinas Kesehatan	986.000,00
6	**Dikurang :**	
7	Penyesuaian beban jasa telepon, jasa air, jasa listrik, jasa langganan surat kabar, jasa kawat/faksimili/internet, Jasa paket/kiriman yang sudah dibayar (pelunasan utang beban) 31 Desember 2024	(804.164.794,00)
8	Penyesuaian reklas beban ke aset tetap dari Beban Penambahan Daya menjadi Jaringan Listrik Lainnya pada UPT Puskesmas Selat Nasik	(11.147.000,00)
9	Penyesuaian reklas beban ke aset tetap dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya dan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan (DED Puskesmas Air Kundur) pada Dinas Kesehatan	(148.234.800,00)
10	Penyesuaian reklas beban ke aset tetap dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya dan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur (jasa pengawasan Rumah Dinas Puskesmas Tanjungbinga) Kesehatan pada Dinas Kesehatan	(5.000.000,00)
11	Penyesuaian reklas beban ke aset tetap dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (jasa pengawasan IPAL) menjadi Bangunan Gedung Instalasi pada Dinas Kesehatan	(78.678.398,00)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
12	Penyesuaian reklas beban ke aset tetap dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya menjadi Gedung menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium (Labkesmas) pada Dinas Kesehatan	(179.263.920,00)
13	Penyesuaian reklas beban ke aset tetap darBeban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus menjadi Peralatan Personal Computer pada Dinas Komunikasi dan Informatika	(11.100.000,00)
14	Penyesuaian Persediaan Akhir 31 Desember 2025 Beban Paket/Pengiriman pada Dinas Kesehatan	(690.000,00)
15	Penyesuaian reklas beban ke aset tetap dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya (DED tambat labuh baro) pada Dinas Perikanan	(99.400.500,00)
16	Penyesuaian reklas beban ke aset tetap dariBeban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar dan Instalasi Air Buangan Domestik pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja	(76.191.500,00)
17	Penyesuaian reklas beban ke aset tetap dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya dan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur menjadi Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(142.274.000,00)
18	Penyesuaian reklas beban ke aset tetap dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur menjadi Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, Bangunan Gedung Kantor, dan Bangunan Gedung Museum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(82.250.150,00)
19	Penyesuaian reklas beban ke aset tetap dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung menjadi Pagar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(19.987.000,00)
20	Penyesuaian Persediaan Akhir 31 Desember 2025 dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung menjadi Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(99.630.000,00)
21	Penyesuaian Reklas beban ke aset tetap Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(95.876.250,00)
22	Penyesuaian Reklas beban ke aset tetap Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air menjadi Jaringan Sambungan ke Rumah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(208.741.000,00)
23	Penyesuaian Reklas beban ke aset tetap Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural menjadi Pagar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(49.861.200,00)
24	Penyesuaian Reklas beban ke aset tetap dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural dan Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Khusus, Bangunan gedung kantor dan Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(282.968.250,00)
25	Penyesuaian Reklas beban ke aset tetap dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya menjadi Bangunan Gedung Kantor, Bangunan Kesehatan, dan Bangunan Gedung Garasi/Pool pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(63.716.220,00)
26	Penyesuaian Reklas beban ke aset tetap dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya pada Dinas Perhubungan	(99.820.000,00)
27	Penyesuaian Reklas beban ke aset tetap dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi menjadi Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya pada Dinas Perhubungan	(49.797.000,00)
28	Penyesuaian Reklas beban ke aset tetap dari Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik menjadi Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) pada Dinas Perhubungan	(1.222.809.434,00)
29	Penyesuaian Reklas beban ke aset tetap dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, Tugu/Tanda Batas-Pagar, Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(219.196.550,00)
30	**Jumlah Beban Jasa**	**112.887.495.181,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Perolehan beban jasa berdasarkan klasifikasi rincian objek sebagai berikut:

Tabel 143 Rincian Beban Jasa

Uraian	Belanja Jasa	Penambahan (Penyesuaian/ reklas)	Pengurangan (Penyesuaian/kapitalisasi)	Realisasi 2025 (Rp)
Beban Jasa Kantor	74.180.757.408,00	490.823.045,00	(2.038.811.228,00)	72.632.769.225,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	34.132.823.304,00			34.132.823.304,00
Belanja Sewa Tanah	-			0,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.741.553.494,00			1.741.553.494,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	553.993.975,00			553.993.975,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	32.500.000,00			32.500.000,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.211.647.938,00		(2.000.886.738,00)	210.761.200,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.073.739.750,00		(11.100.000,00)	1.062.639.750,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (*Availaibility Payment*)	-			0,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	973.756.599,00			973.756.599,00
Beban Kursus/Pelatihan. Sosialisasi. Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.489.532.500,00			1.489.532.500,00
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	-	27.500.000,00		27.500.000,00
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	57.165.134,00		(27.500.000,00)	29.665.134,00
Jumlah	**116.447.470.102,00**	**518.323.045,00**	**(4.078.297.966,00)**	**112.887.495.181,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Selisih antara Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah dengan Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah ini disebabkan kesalahan Mapping di SIPD-RI dimana Beban insentif bagi pegawai Non ASN atas pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar **Rp.27.500.000,00** masuk ke Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN, seharusnya masuk ke Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.

1. **Beban Pemeliharaan** aset tetap dan barang inventaris dalam rangka mengembalikan pada kondisi awal pada periode pelaporan tahun 2025 sebesar **Rp30.979.743.970,85** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 144 Beban Pemeliharaan

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.033.756.151,99	17.453.471.125,00	(3.419.714.973,01)	(19,59)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.393.682.713,86	9.278.517.517,06	(1.884.834.803,20)	(20,31)
Beban Pemeliharaan Jalan. Irigasi. dan Jaringan	9.462.393.995,00	11.286.463.849,72	(1.824.069.854,72)	(16,16)
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	89.911.110,00	208.469.687,00	(118.558.577,00)	(56,87)
Total	**30.979.743.970,85**	**38.226.922.178,78**	**(7.247.178.207,93)**	**(18,96)**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Beban pemeliharaan diperoleh dari :

Tabel 145 Mutasi Beban Pemeliharaan

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja pemeliharaan	38.934.611.850,85
2.	**Ditambah :**	
3.	Penyesuaian Beban Persediaan awal Suku Cadang Alat Laboratorium dari Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan pada Dinas Perikanan	175.000,00
4.	Penyesuaian reklasifikasi aset tetap ke beban dari Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) menjadi Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain pada Dinas Perhubungan	970.528.500
5.	**Dikurang :**	
6.	Penyesuaian Persediaan Akhir Suku Cadang Lainnya ke Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya pada Dinas Perhubungan	(183.408.408)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
7.	Penyesuaian Reklasifikasi beban ke aset tetap dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar menjadi Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar dan Bangunan Pembuang Air Kotor pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja	(259.150.000,00)
8.	Penyesuaian Reklasifikasi beban ke aset tetap dari Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar menjadi Tugu/Tanda Batas Administrasi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	(199.694.971,00)
9.	Penyesuaian Persediaan Akhir Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya ke Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(214.224.032,00)
10.	Penyesuaian Reklasifikasi beban ke aset tetap dari Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten menjadi Jalan Khusus dan Jalan Kabupaten pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(7.541.327.871,00)
11.	Penyesuaian Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten menjadi Bangunan Pembuang Pengaman Sungai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(527.766.098)
	Jumlah Beban Pemeliharaan	**30.979.743.970,85**

Sumber: data BPKAD (diolah)

2. **Beban Perjalanan Dinas** dalam rangka koordinasi dalam pelaksanaan tugas pada periode pelaporan tahun 2025 sebesar **Rp22.771.441.521,00.**

Tabel 146 Beban Perjalanan Dinas

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Perjalanan Dinas	22.771.44.521,00	45.468.814.256,00	(22.697.372.735,00)	(49,92)

Sumber: data BPKAD (diolah)

Beban Perjalanan Dinas diperoleh dari :

Tabel 147 Mutasi Beban Perjalanan Dinas

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Perjalanan Dinas	22.752.160.717,00
2.	**Ditambah :**	
3.	Penyesuaian Beban Utang Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 - Dinas Kesehatan	40.618.164,00
4.	**Dikurang :**	
5.	Penyesuaian Beban Utang Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 - Dinas Kesehatan	(21.337.360,00)
6.	**Jumlah Beban Perjalanan Dinas**	**22.771.44.521,00**

3. **Beban Uang/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat** merupakan beban dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi pada periode pelaporan tahun 2025 sebesar **Rp5.445.647.800,00**

   Beban uang/jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat diperoleh dari :

Tabel 148 Beban Uang/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja uang/jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.142.153.800,00
2.	**Ditambah :**	
3.	Penyesuaian Persediaan Awal Barang yang akan diserahkan pada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya yaitu Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	6.844.429.000,00
4.	**Dikurang :**	
5.	Reklasifikasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat menjadi Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(6.745.009.000,00)
6.	Penyesuaian Persediaan Akhir Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yaitu Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(9.016.922.000,00)
7.	Reklasifikasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat menjadi Aset Tetap JIJ pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(1.779.004.000,00)
8.	**Jumlah Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**5.445.647.800,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

4. **Beban Barang dan Jasa BOS**

Pada periode pelaporan tahun 2025 tidak ada realisasi ini dikarenakan tidak dianggarkan Belanja Barang dan Jasa BOS pada tahun anggaran 2025. Penganggaran Belanja Barang dan Jasa BOS dialihkan ke rekening Belanja Barang dan Jasa BOSP.

Tabel 149 Beban Barang dan Jasa BOS

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Barang dana BOS	0,00	18.323.838.139,00	(18.323.838.139,00)	(100,00)

5. **Beban Barang dan Jasa BOSP** pada periode pelaporan tahun 2025 sebesar **18.135.231.279,00** yang terdiri dari:

Tabel 150 Beban Barang dan Jasa BOSP

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Barang dana BOS	18.127.422.479,00	546.965.460,00	17.580.457.019,00	3.214,18

Sumber: data BPKAD (diolah)

Beban barang dan jasa Dana BOS diperoleh dari :

Tabel 151 Mutasi Beban Barang dan Jasa BOSP

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja barang dan jasa BOSP (LRA)	18.135.231.279,00
2.	**Ditambah :**	
3.		
4.	**Dikurang :**	
5.	Reklas ke aset tetap	(7.808.800,00)
6.	**Jumlah Beban barang dan jasa Dana BOS**	**18.127.422.479,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

6. **Beban Barang dan Jasa BLUD** pada periode pelaporan tahun 2025 sebesar **Rp47.465.578.897,18**. yang terdiri dari:

Tabel 152 Beban Barang dan Jasa BLUD

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Barang dan Jasa BLUD	47.465.578.897,18	40.523.697.964,40	6.941.880.932,78	17,13

Sumber: data BPKAD (diolah)

Beban barang dan jasa BLUD Rumah Sakit Umum Daerah diperoleh dari:

Tabel 153 Mutasi Beban Barang dan Jasa BLUD

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja barang dan jasa BLUD (LRA)	44.531.716.082,00
2.	**Mutasi tambah :**	
3.	Penyesuaian beban persediaan Akhir BLUD UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono	6.103.477.965,78
4.	Penyesuaian beban sewa dibayar dimuka ke beban barang dan jasa BLUD pada UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono	27.885.580,84
5.	Reklasifikasi Aset tetap ke beban dari Alat Kesehatan Umum Lainnya menjadi beban barang dan jasa BLUD (aset ekstrakomptabe) pada UPT Puskesmas Badau	2.400.000,00
6.	Reklasifikasi Aset tetap ke beban dari Mebel menjadi beban barang dan jasa BLUD (aset ekstrakomptabe) BLUD (aset ekstrakomptabe) UPT Puskesmas Tanjung Binga	6.832.450,00
7.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD UPT Puskesmas Sijuk atas Pengakuan Utang BLUD 31 Desember 2025	8.959.000,00
8.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD UPT Puskesmas Selat Nasik atas Pengakuan Utang BLUD 31 Desember 2025	51.942.400,00
9.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD UPT Puskesmas Air Saga atas Pengakuan Utang BLUD 31 Desember 2025	201.625,00
10.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD UPT Puskesmas Tanjungpandan atas Pengakuan Utang BLUD 31 Desember 2025	4.921.857,00
11.	Reklasifikasi Aset tetap ke beban dari Alat Kantor Lainnya menjadi beban barang dan jasa BLUD (aset ekstrakomptabe) pada UPT Puskesmas Sijuk	11.429.600,00
12.	Reklasifikasi Aset tetap ke beban dari Elektronik/Electric menjadi beban barang dan jasa BLUD (aset ekstrakomptabe) pada UPT Puskesmas Simpang Rusa	3.400.000,00
13.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono atas Pengakuan Utang BLUD 31 Desember 2025	6.775.384.607,00
14.	Penyesuaian biaya administrasi keuangan pada beban barang dan jasa BLUD UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono atas Pelunasan Piutang BLUD 31 Desember 2023	2.900,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
15.	Penyesuaian biaya administrasi keuangan pada beban barang dan jasa BLUD UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono atas Pelunasan Piutang BLUD per 31 Desember 2024 dan Biaya Administrasi untuk Piutang Tahun 2024	99.600,00
16.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono atas penerimaan persediaan obat-obatan lainnya dari Dinkes Kab. Belitung	704.835.018,50
17.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono atas penyesuaian beban administrasi	473.400
18.	**Mutasi kurang :**	
19.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono atas pelunasan Utang BLUD 31 Desember 2025	(4.899.823.964,00)
20.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD UPT Puskesmas Tanjung Binga atas penyesuaian persediaan akhir 31 Desember 2025	(24.854.618,47)
21.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD UPT Puskesmas Selat Nasik atas penyesuaian persediaan akhir 31 Desember 2025	(5.908.174,00)
22.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD UPT Puskesmas Sijuk atas penyesuaian persediaan akhir 31 Desember 2025	(63.779.299,56)
23.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD UPT Badau atas penyesuaian persediaan akhir 31 Desember 2025	(27.744.028,00)
24.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD UPT Puskesmas Membalong atas penyesuaian persediaan akhir 31 Desember 2025	(104.837.289,24)
25.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD UPT Puskesmas Tanjung Binga atas penyesuaian persediaan akhir 31 Desember 2025	(28.621.010,00)
26.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD UPT Puskesmas Simpang Rusa atas penyesuaian persediaan akhir 31 Desember 2025	(19.771.720,00)
27.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono atas Beban dibayar dimuka 31 Desember 2025	(17.688.773,97)
28.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono atas pelunasan utang reagensia dan utang jasa covid dimuka 31 Desember 2025	(2.556.000,00)
39.	Penyesuaian beban barang dan jasa BLUD UPT UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono atas penyesuaian persediaan akhir 31 Desember 2025	(5.572.798.311,70)
30.	**Jumlah Beban barang dan jasa BLUD**	**47.465.578.897,18**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.2.3 Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Beban Subsidi pada Pemerintah Kabupaten Belitung sebesar **Rp 540.823.627,00** yang merupakan subsidi biaya bunga kredit dan biaya jaminan notarial bagi Kredit Usaha Kecil Menengah (KUKM) sebesar **Rp3.750.000,00** dan beban subsidi kepada BUMD yaitu pemberian subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belitung sebesar **Rp537.073.627,00**.

Tabel 154 Rincian Beban Subsidi

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Subsidi kepada BUMD	537.073.627,00	636.899.797,00	(99.826.170,00)	(15,67)
Beban Subsidi kepada Koperasi	3.750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	150,00
Total	540.823.627,00	638.399.797,00	(97.576.170,00)	(15,28)

Sumber: data BPKAD (diolah)

Subsidi kepada PDAM Kabupaten Belitung yang digunakan untuk menutup tarif rata-rata yang lebih kecil dibandingkan biaya yang dibutuhkan (*cost recovery*).

5.4.2.4 Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Kota lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Hibah pada Pemerintah Kabupaten Belitung sebesar **Rp37.361.616.916,89** berupa hibah kepada pemerintah pusat. hibah kepada organisasi kemasyarakatan, hibah kepada pihak ketiga/masyarakat, dan hibah kepada partai politik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 155 Beban Hibah

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
a. Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	325.000.000,00	22.701.415.600,00	(22.376.415.600,00)	(98,57)
b. Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	14.448.493.004,29	1.133.869.052,00	13.314.623.952,29	1.174,26
c. Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.189.295.270,60	13.098.809.354,00	(11.909.514.083,40)	(90,92)
d. Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya	567.497.000,00	799.051.000,00	(231.554.000,00)	(28,98)
e. Beban Hibah Uang/barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.068.990.422,00	12.093.903.552,00	(5.024.913.130,00)	(41,55)
f. Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.393.418.030,00	4.027.579.900,00	(2.634.161.870,00)	(65,40)
g. Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.031.964.000,00	4.058.115.000,00	(2.026.151.000,00)	(49,93
h. Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	3.317.340.000,00	0,00	3.317.340.000,00	100
i. Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	368.850.000,00	2.565.340.041,00	(2.196.490.041,00)	(85,62)
j. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.627.320.000,00	1.369.203.750,00	258.116.250,00	18,85
k. Beban Hibah Dana BOSP-BOS	2.628.898.690,00	0,00	2.628.898.690,00	100,00
l. Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.564.280.500,00	0,00	1.564.280.500,00	100,00
m. Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	830.270.000,00	0,00	830.270.000,00	100,00
Total	**37.361.616.916,89**	**61.847.287.249,00**	**(24.485.670.332,11)**	**(39,59)**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Beban Hibah diperoleh dari:

Tabel 156 Mutasi Beban Hibah

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja hibah	21.162.331.642,00
2	Penyesuaian Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat atas jasa yng telah diserahkanTerdiri dari : Pembangunan Mess Kejaksaan Negeri Belitung, Pembangunan Shelter dan Bangunan Pelengkap Lapangan Tembak Astra Jingga, Rehabilitasi Kantor Koramil, Rahabilitasi Kantor Kodim, Rehabilitasi Kantor Kodim, Renovasi Markas Komando Kepolisian Resort Belitung (Dinas PUPR)	6.546.563.000,00
3	Penyesuaian Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat per atas penyerahan barang yang Terdiri dari : Pembuatan DED Pembangunan Mess Kejaksaan Negeri Belitung, Pembuatan DED Renovasi Markas Komando Kepolisian Resort Belitung (Dinas PUPR)	198.623.000,00
4	Penyesuaian Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat atas Jasa Pengawasan yang Telah diserahkan pada Pihak Ketiga yang Terdiri dari : Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Mess Kejaksaan Negeri Beltung, Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi Markas Komando Kepolisian Resort Belitung. (Dinas PUPR)	198.446.000,00
5	Penyesuaian Beban Bahan-Bahan Lainnya menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya atas pengalihan BMHP pemeriksaan HPV DNA Ke Labkesda Prov.Kep. Bangka Belitung BAST NO 000.2.6.1/79/DINKES/2025 TGL 3 NOV 2025 (Dinkes)	366.095.000,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
6	Penyesuaian Hibah Aset tetap berupa tanah menjadi Beban hibah kepada pemerintah pusat atas hibah aset tetap kepada Polres Belitung Naskah hibah Nomor:000.2.6.1/LOG.1.4./Res Belitung (Kec. Selat Nasik)	6.792.529,99
7	Penyesuaian Hibah Aset tetap berupa tanah menjadi Beban hibah kepada pemerintah pusat atas hibah aset tetap kepada Polres Belitung Naskah hibah Nomor:000.2.6.1/037/KEP/BPKAD/2025. (Dinas Perikanan)	60.008.627,30
8	Penyesuaian Persediaan yang Telah Diserahkan pada Pemerintah Desa Terdiri dari : Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Mentigi (DAK), Optimalisasi SPAM Desa Padang Kandis (DIF), Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Tanjung Binga (DIF), Penyediaan Air Bersih untuk Masyarakat (PUKAT) (SIF 2023), Penyediaan Air Bersih untuk Masyarakat (PUKAT) Kecamatan Membalong (DIF) (Dinas PUPR)	567.497.000,00
9	Penyesuaian Hibah Bangunan Air Kotor Lainnya ke Pemerintah Desa terdiri dari : Pembangunan SPALD-S (Paket 1 dan 2) (DIF), Pembangunan SPALD-S (Paket 2,3 dan 4) (DIF), Pembangunan SPALD-S (Paket 4 dan 5) (DIF) (Dinas PUPR)	592.765.000,00
10	Penyesuaian Hibah Aset tetap berupa tanah menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya atas hibah aset tetap kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung SK Penghapusan Nomor: 000.2.5/0025/BAKUDA-000.2.6.1/1595/BPKAD.V (Dinas DPPKBPMD)	230.435.270,60
11	Penyesuaian Hibah Aset tetap berupa tanah dan bangunan menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat atas hibah aset tetap kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Belitung Naskah Hibah Nomor 000.2.6.1/029/BPKAD/2025 (Sekretariat Daerah)	345.582.800,00
12	Penyesuaian Hibah Aset tetap dalam bentuk berupa Tanah dan Bangunan Gedung Museum Permanen Peruntukan Museum Maritim menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat kepada Direktorat jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan No SK 100.3.4/708/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 29 Agustus 2025.	7.092.477.047,00
13	Reklasifikasi Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri menjadi Aset Tetap Pelatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(6.000.000,00)
	Total	**37.361.616.916,89**

Sumber: data BPKAD (diolah)

1. Beban hibah uang kepada pemerintah pusat sebesar **Rp325.000.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 157 Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Sekretariat Daerah	Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat (Hibah Uang Untuk Kepolisian Resor Belitung) NPHD No. 181/01/NPHD/I/2025 Tanggal 13 Maret 2025	325.000.000,00	Belanja Hibah
	Total		**325.000.000,00**	

Sumber: data BPKAD (diolah)

2. Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebesar **Rp 14.448.493.004,29** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 158 Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penyesuaian Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat atas jasa yng telah diserahkanTerdiri dari : Pembangunan Mess Kejaksaan Negeri Belitung, Pembangunan Shelter dan Bangunan Pelengkap Lapangan Tembak Astra Jingga, Rehabilitasi Kantor Koramil, Rahabilitasi Kantor Kodim, Rehabilitasi Kantor Kodim, Renovasi Markas Komando Kepolisian Resort Belitung	6.546.563.000,00	Beban Hibah
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penyesuaian Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat atas penyerahan barang yang Terdiri dari : Pembuatan DED Pembangunan Mess Kejaksaan Negeri Belitung, Pembuatan DED Renovasi Markas Komando Kepolisian Resort Belitung	198.623.000,00	Beban Hibah
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penyesuaian Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat atas Jasa Pengawasan yang Telah diserahkan pada Pihak Ketiga per yang Terdiri dari : Jasa Konsultansi Pengawasan	198.446.000,00	Beban Hibah

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
		Pembangunan Mess Kejaksaan Negeri Beltung, Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi Markas Komando Kepolisian Resort Belitung		
4	Kecamatan Selat Nasik	Penyesuaian Hibah Aset tetap berupa tanah menjadi Beban hibah kepada pemerintah pusat atas hibah aset tetap kepada Polres Belitung Naskah hibah Nomor:000.2.6.1/LOG.1.4./Res Belitung	6.792.529,99	Beban Hibah
5	Dinas Perikanan	Penyesuaian Hibah Aset tetap berupa tanah menjadi Beban hibah kepada pemerintah pusat atas hibah aset tetap kepada Polres Belitung Naskah hibah Nomor:000.2.6.1/037/KEP/BPKAD/2025	60.008.627,30	Beban Hibah
6	Sekretariat Daerah	Penyesuaian Hibah Aset tetap berupa tanah dan bangunan menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat atas hibah aset tetap kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah kabupaten Belitung Naskah Hibah Nomor 000.2.6.1/029/BPKAD/2025	345.582.800,00	Beban Hibah
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyesuaian Hibah Aset tetap dalam bentu berupa Tanah dan Bangunan Gedung Museum Permanen Peruntukan Museum Maritim menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat kepada Direktorat jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan No SK 100.3.4/708/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 29 Agustus 2025.	7.092.477.047,00	Beban Hibah
	Total		**14.448.493.004,29**	

Sumber: data BPKAD (diolah)

3. Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar **Rp1.189.295.270,60** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 159 Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	Penyesuaian Beban Bahan-Bahan Lainnya menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya atas pengalihan BMHP pemeriksaan HPV DNA Ke Labkesda Prov.Kep. Bangka Belitung BAST NO 000.2.6.1/79/DINKES/2025 TGL 3 NOV 2025	366.095.000,00	Beban Hibah
2	Dinas Pekerjaan Umum	Penyesuaian Hibah Bangunan Air Kotor Lainnya ke Pemerintah Desa terdiri dari : Pembangunan SPALD-S (Paket 1 dan 2) (DIF), Pembangunan SPALD-S (Paket 2,3 dan 4) (DIF), Pembangunan SPALD-S (Paket 4 dan 5) (DIF)	592.765.000,00	Beban Hibah
3	Dinas Pekerjaan Umum	Penyesuaian Hibah Aset tetap berupa tanah menjadi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya atas hibah aset tetap kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung SK Penghapusan Nomor: 000.2.50025/ BAKUDA-000.2.6.1/1595/BPKAD.V	230.435.270,60	Beban Hibah
	Total		**1.189.295.270,60**	

Sumber: data BPKAD (diolah)

4. Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar **Rp 567.497.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 160 Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum	Penyesuaian Persediaan yang Telah Diserahkan pada Pemerintah Desa Terdiri dari : Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Mentigi (DAK), Optimalisasi SPAM Desa Padang Kandis (DIF), Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Tanjung Binga (DIF), Penyediaan Air	567.497.000,00	Beban Hibah

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
		Bersih untuk Masyarakat (PUKAT) (SIF 2023), Penyediaan Air Bersih untuk Masyarakat (PUKAT) Kecamatan Membalong (DIF)		
	Total		**567.497.000,00**	

5. Beban Hibah Uang/ barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar **Rp7.068.990.422,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 161 Beban Hibah Uang/Barang Kepada Badan/Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pemuda dan Olahraga	Belanja Hibah Uang kepada Kwarcab Pramuka Belitung NPHD No. 400.4.8/02/NPHD/Dispora/2025 Tanggal 31 Januari 2025	329.557.036,00	Belanja Hibah
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	Belanja Hibah Uang kepada DPD KNPI Kab.Belitung NPHD No. 400.4.8/01/NPHD/Dispora/20252025 Tanggal 31 Januari 2025	199.284.680,00	Belanja Hibah
3	Dinas Kesehatan	Belanja Hibah Uang kepada PMI Kabupaten Belitung NPHD No. 400.6.2.3/180.4/NPHD/DINKES/2025 Tanggal 12 Februari 2025	1.199.996.977,00	Belanja Hibah
4	Dinas Pemuda dan Olahraga	Belanja Hibah KONI Kabupaten Belitung NPHD No. 181/03/NPHD/DISPORA/2025 Tanggal Juni 2025	800.000.000,00	Belanja Hibah
5	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada LPTQ Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/01/NPHD/II/2025 Tanggal 13 Juni 2025	3.348.193.696,00	Belanja Hibah
6	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/03/NPHD/II/2025 Tanggal 23 Juni 2025	450.000.000,00	Belanja Hibah
7	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/02/NPHD/II/2025 Tanggal 23 Juni 2025	129.518.033,00	Belanja Hibah
8	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/04/NPH D/II/2025 Tanggal 23 Juni 2025	49.985.000,00	Belanja Hibah
9	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan An Nawawi Mubaarok NPHD No. 100.3.8/08/NPHD/II/2025 Tanggal 15 Juli 2025	75.000.000,00	Belanja Hibah
10	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Permata Belitung NPHD No. 100.3.8/20/NPHD/II/2025 Tanggal 30 Juli 2025	75.000.000,00	Belanja Hibah
11	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Ahlul Qur'an NPHD No. 100.3.8/23/NPHD/II/2025 Tanggal 6 Agustus 2025	75.000.000,00	Belanja Hibah
12	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) NPHD No. 100.3.8/19/NPHD/II/2025 Tanggal 30 Juli 2025	19.818.000,00	Belanja Hibah
13	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Badan Musyawarah Antar Gereja Lembaga Keagamaan Kristen (BAMAG-LKK) Indonesia Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/24/NPHD/II/2025 Tanggal 6 Agustus 2025	50.000.000,00	Belanja Hibah
14	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Badan Yayasan Nurul Musthofa Belitung NPHD No. 100.3.8/26/NPHD/II/2025 Tanggal 15 Agustus 2025	75.000.000,00	Belanja Hibah
15	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Belitung NPHD No. 100.3.8/27/NPHD/II/2025 Tanggal 2 September 2025	132.637.000,00	Belanja Hibah
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Hibah Uang kepada PKBM Sumber Ilmu (DABA Provinsi Tahun 2025)	10.000.000,00	Belanja Hibah
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Hibah Uang kepada PKBM Cahaya Ilmu (DABA Provinsi Tahun 2025)	10.000.000,00	Belanja Hibah

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Hibah Uang kepada PKBM Mitra Sejahtera (DABA Provinsi Tahun 2025)	10.000.000,00	Belanja Hibah
19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Hibah Uang kepada PKBM Fajrul Islam (DABA Provinsi Tahun 2025)	10.000.000,00	Belanja Hibah
20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Hibah Uang kepada PKMB Al Zahrawi (DABA Provinsi Tahun 2025)	10.000.000,00	Belanja Hibah
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Hibah Uang kepada UPT SKB (DABA Provinsi Tahun 2025)	10.000.000,00	Belanja Hibah
		Total	**7.068.990.422,00**	

Sumber: data BPKAD (diolah)

6. Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar **Rp1.393.418.030,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 162 Beban Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada Ardhiansyah (Ketua Pokdakan Bintang Laut) BAST No. 500.4.1/02/BAST-HDPE/PERIK.III/2025 Tanggal 12 Agustus 2025	17.138.100,00	Belanja Hibah
2	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada Sulaidi (Ketua Pokdakan Do'a Ibu) BAST No. 500.4.1/02/BAST-HDPE/PERIK.III/2025 Tanggal 12 Agustus 2025	17.138.100,00	Belanja Hibah
3	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada Tegar Al Gafhani (Ketua Pokdakan HSRT Betangan) BAST No. 500.4.1/02/BAST-HDPE/PERIK.III/2025 Tanggal 12 Agustus 2025	34.276.200,00	Belanja Hibah
4	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada Sunardi (Ketua Pokdakan Samudera Biru)) BAST No. 500.4.1/02/BAST-HDPE/PERIK.III/2025 Tanggal 12 Agustus 2025	28.563.500,00	Belanja Hibah
5	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada Yuliani (Ketua Kelompok UMKM LinggaBAST No. 500.4.1/ 002 /APBD.BAST/PPKL/2025 Tanggal 14 Agustus 2025	46.731.000,00	Belanja Hibah
6	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada Hendra Supriadi (Ketua Pokdakan Pulau Simpor) BAST No. 500.4.1/02/BAST-PKSPI/PERIK.III/2025 Tanggal 13 Oktober 2025	73.788.000,00	Belanja Hibah
7	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada Arfian (Ketua KUB Palo Panjang) BAST No. 000.2.6.1/01-MKP/PPTK-PKNK/PERIK.II/2025 Tanggal 3 Desember 2025	71.550.600,00	Belanja Hibah
8	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada Jalaludin(Ketua KUB Cahya) BAST No. 000.2.6.1/01-BK/PPTK-PSUPT/PERIK.II/2025Tanggal 3 Desember 2025	31.468.500,00	Belanja Hibah
9	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada Sunardi (Ketua KUB Kepiting Laut) BAST No. 000.2.6.1/02-BK/PPTK-PSUPT/PERIK.II/2025Tanggal 3 Desember 2025	35.209.755,00	Belanja Hibah
10	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada Juliandi (Ketua KUB Ketam Mirah) BAST No. 000.2.6.1/03-BK/PPTK-PSUPT/PERIK.II/2025Tanggal 3 Desember 2025	31.468.500,00	Belanja Hibah
11	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada Baharum (Ketua KUB Permata Senja) BAST No. 000.2.6.1/04-BK/PPTK-PSUPT/PERIK.II/2025Tanggal 3 Desember 2025	31.468.500,00	Belanja Hibah
12	Dinas Perikanan	Belanja Hibah Barang kepada Alio (Ketua KUB Tajor BAST No. 000.2.6.1/01-JK/PPTK-PSUPT/PERIK.II/2025 Tanggal 3 Desember 2025	100.455.000,00	Belanja Hibah
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Gabungan Kelompok Tani Tunas Baru BAST No. 000.2.6.1/17/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	17.791.851,00	Belanja Hibah
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Kampong Agro Makmur BAST No. 000.2.6.1/07/BAST-CABAI2025/TPH/DKPP/2025 dan 000.2.6.1/01/BAST-CULTIVATOR RD4/PSP/DKPP/2025	83.168.020,00	Belanja Hibah
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Putra Tanjung Birik BAST No. 000.2.6.1/126/BAST-PBT/DKPP/2025	62.356.320,00	Belanja Hibah
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Karya Tani BAST No. 000.2.6.1/14/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	3.234.882,00	Belanja Hibah
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Kremak Jaya BAST No. 000.2.6.1/15/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	12.939.528,00	Belanja Hibah

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Manggis Lestari BAST No. 000.2.6.1/128/BAST-PBT/DKPP/2025	122.878.800,00	Belanja Hibah
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Tanjung Kruing BAST No. 000.2.6.1/02/BAST- CULTIVATOR RD4/PSP/DKPP/2025	55.500.000,00	Belanja Hibah
20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Agro Kenupu BAST No. 000.2.6.1/19/BASTPADI/TPH /DKPP/2025	24.261.615,00	Belanja Hibah
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Bakul BAST No. 000.2.6.1/10/BAST-PADI/TPH/ DKPP/2025	40.436.025,00	Belanja Hibah
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Licin BAST No. 000.2.6.1/16/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	4.852.323,00	Belanja Hibah
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Manda Maju Bersama BAST No. 000.2.6.1/12/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	6.469.764,00	Belanja Hibah
24	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Aik Simpor BAST No. 000.2.6.1/20/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025 dan 000.2.6.1/21/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	6.469.764,00	Belanja Hibah
25	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Dukong Jaya Mandiri BAST No. 000.2.6.1/08/BAST-CABAI2025/TPH/DKPP/2025	27.668.020,00	Belanja Hibah
26	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Ibul Makmur BAST No. 000.2.6.1/22/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	3.234.882,00	Belanja Hibah
27	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Jaya Mandiri Lestari BAST No. 000.2.6.1/125/BAST-PBT/DKPP/2025	62.300.320,00	Belanja Hibah
28	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Kelekak Tintang Sejahtera BAST No. 000.2.6.1/11/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	8.087.205,00	Belanja Hibah
29	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Kridatama BAST No. 000.2.6.1/18/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	16.174.410,00	Belanja Hibah
30	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Mandiri Jaya BAST No. 000.2.6.1/03/BAST-CABAIDAU2025/TPH/DKPP/2025	37.770.525,00	Belanja Hibah
31	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Sawah Harapan BAST No. 000.2.6.1/23/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	4.852.323,00	Belanja Hibah
32	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Setia BAST No. 000.2.6.1/09/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	8.087.205,00	Belanja Hibah
33	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Sinar Jaya BAST No. 000.2.6.1/04/BAST-CABAIDAU2025/TPH/DKPP/2025	37.770.525,00	Belanja Hibah
34	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Suga Ketakong Makmur BAST No. 000.2.6.1/13/BAST-PADI/TPH/DKPP/2025	4.852.323,00	Belanja Hibah
35	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Sumber Makmur BAST No. 000.2.6.1/06/BAST-CABAIDAU2025/TPH/DKPP/2025	18.885.262,50	Belanja Hibah
36	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Sumber Jaya BAST No. 000.2.6.1/05/BAST-CABAIDAU2025/TPH/DKPP/2025	18.885.262,50	Belanja Hibah
37	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Tunas Jaya BAST No. 000.2.6.1/127/BAST-PBT/DKPP/2025	62.356.320,00	Belanja Hibah
38	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Kelompok Tani Sumber Rezeki BAST No. 000.2.6.1/129/BAST-PBT/DKPP/2025	122.878.800,00	Belanja Hibah
	Total		**1.393.418.030,00**	

Sumber: data BPKAD (diolah)

7. Beban Hibah uang/barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar **Rp2.031.964.000,00**dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 163 Beban Hibah Uang/Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
1	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Al Mihrab NPHD No. 100.3.8/07/NPHD/II/2025 Tanggal 23 Juni 2025	175.000.000,00	Belanja Hibah

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
2	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan At Taqwa NPHD No. 100.3.8/06/NPHD/II/2025 Tanggal 23 Juni 2025	45.000.000,00	Belanja Hibah
3	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Gereja Katolik Paroki Regina Pacis NPHD No. 100.3.8/05/NPHD/II/2025 Tanggal 23 Juni 2025	50.000.000,00	Belanja Hibah
4	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Gereja Persekutuan Kristen Perawas NPHD No. 100.3.8/10/NPHD/II/2025 Tanggal 15 Juli 2025	50.000.000,00	Belanja Hibah
5	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid As Sajadah NPHD No. 100.3.8/16/NPHD/II/2025 Tanggal 21 Juli 2025	50.000.000,00	Belanja Hibah
6	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Attaubah NPHD No. 100.3.8/17/NPHD/II/2025 Tanggal 21 Juli 2025	90.000.000,00	Belanja Hibah
7	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Gunung Cangir NPHD No. 100.3.8/14/NPHD/II/2025 Tanggal 21 Juli 2025	100.000.000,00	Belanja Hibah
8	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Asysuhada NPHD No. 100.3.8/12/NPHD/II/2025 Tanggal 21 Juli 2025	175.000.000,00	Belanja Hibah
9	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Anugerah Sejahtera Abadi NPHD No. 100.3.8/15/NPHD/II/2025 Tanggal 21 Juli 2025	72.150.000,00	Belanja Hibah
10	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Perkumpulan Lembaga Masjid Nurul Hikmah NPHD No. 100.3.8/15/NPHD/II/2025 Tanggal 15 Juli 2025	120.000.000,00	Belanja Hibah
11	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Riyadu Sholihiin NPHD No. 100.3.8/11/NPHD/II/2025 Tanggal 21 Juli 2025	65.000.000,00	Belanja Hibah
12	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Nurussholeh NPHD No. 100.3.8/13/NPHD/II/2025 Tanggal 21 Juli 2025	75.000.000,00	Belanja Hibah
13	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Jami Al Ihsan NPHD No. 100.3.8/18/NPHD/II/2025 Tanggal 30 Juli 2025	75.000.000,00	Belanja Hibah
14	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Al Iman NPHD No. 100.3.8/21/NPHD/II/2025 Tanggal 5 Agustus 2025	43.660.000,00	Belanja Hibah
15	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Raudhatul Hidayah Belitung NPHD No. 100.3.8/21/NPHD/II/2025 Tanggal 6 Agustus 2025	100.000.000,00	Belanja Hibah
16	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid An Nur NPHD No. 100.3.8/25/NPHD/II/2025 Tanggal 6 Agustus 2025	110.000.000,00	Belanja Hibah
17	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Al Muhajirin NPHD No. 100.3.8/28/NPHD/II/2025Tanggal 2 September 2025	40.000.000,00	Belanja Hibah
18	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Masjid Yayasan Al Amin NPHD No. 100.3.8/33/NPHD/II/2025 Tanggal 2 September 2025	111.205.000,00	Belanja Hibah
19	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Baitul Jannah NPHD No. 100.3.8/32/NPHD/II/2025 Tanggal 2 September 2025	89.950.000,00	Belanja Hibah
20	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Hidayatullah NPHD No. 100.3.8/30/NPHD/II/2025 Tanggal 2 September 2025	74.999.000,00	Belanja Hibah
21	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Assholihin NPHD No. 100.3.8/31/NPHD/II/2025 Tanggal 2 September 2025	140.000.000,00	Belanja Hibah

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
22	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Baitul Mamur NPHD No. 100.3.8/29/NPHD/II/2025 Tanggal 2 September 2025	50.000.000,00	Belanja Hibah
23	Sekretariat Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Yayasan Mishbahul Munir NPHD No. 100.3.8/34/NPHD/II/2025 Tanggal 10 Oktober 2025	130.000.000,00	Belanja Hibah
	Total		**2.031.964.000,00**	

Sumber: data BPKAD (diolah

8. Beban hibah uang dana BOS yang diterima Satdikdas Negeri

Tabel 164 Beban Hibah Uang Dana BOS untuk Satdikdas Negeri

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BOP PAUD Negeri	443.400.000,00	Belanja hibah
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BOP SD Negeri	1.968.240.000,00	Belanja hibah
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BOP SMP Negeri	877.200.000,00	Belanja hibah
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BOP pendidikan Kesetaraan Negeri (SKB)	34.500.000,00	Belanja hibah
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Reklasifikasi Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri menjadi Aset Tetap Pelatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan	(6.000.000,00)	Beban hibah
	Total		**3.317.340.000,00**	

Sumber: data BPKAD (diolah)

9. Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta

Tabel 165 Beban Hibah Uang Dana BOS untuk Satdikdas Negeri

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BOP SD Swasta	202.680.000,00	Belanja hibah
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BOP SMP Swasta	97.920.000,00	Belanja hibah
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BOP pendidikan Kesetaraan Swasta (PKBM)	68.250.000,00	Belanja hibah
	Total		**368.850.000,00**	

Sumber: data BPKAD (diolah)

10. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 166 Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Hanura BAST No. 210/001/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 5 Mei 2025	136.860.000,00	Belanja hibah
2.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Persatuan Pembangunan BAST No. 210/004/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 5 Mei 2025	122.970.000,00	Belanja hibah
3.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Keadilan Sejahtera BAST No. 210/007/BA-BKPP/BKBP/V/202 tanggal 5 Mei 2025	107.160.000,00	Belanja hibah
4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Bulan Bintang BAST No 210/009/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 5 Mei 2025	96.300.000,00	Belanja hibah
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Golongan Karya BAST No 210/002/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 5 Mei 2025	155.340.000,00	Belanja hibah

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Kebangkitan Bangsa BAST No 210/008/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 5 Mei 2025	152.505.000,00	Belanja hibah
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Amanat Nasional BAST No. 210/005/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 5 Mei 2025	104.055.000,00	Belanja hibah
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Nasional Demokrat BAST No. 210/003/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 5 Mei 2025	163.515.000,00	Belanja hibah
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan BAST No. 210/006/BA-BKPP/BKBP/V/2025 tanggal 5 Mei 2025	221.595.000,00	Belanja hibah
10.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Gerakan Indonesia Raya BAST No. 210/010/BA-BKPP/BKBP/VI/2025 tanggal 7 Juli 2025	151.680.000,00	Belanja hibah
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan BAST No. 210/011/BA-BKPP/BKBP/V/2025tanggal 7 Juli 2025	119.070.000,00	Belanja hibah
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja hibah bantuan Keuangan partai politik tahun 2025 untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan BAST No. 210/012/BA-BKPP/BKBP/V/2025tanggal 1 Oktober 2025	96.270.000,00	Belanja hibah
	Total		**1.627.320.000,00**	

Sumber: data BPKAD (diolah)

11. Beban Hibah Dana BOSP-BOS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 167 Beban Hibah Uang Dana BOS untuk Satdikdas Negeri

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BOS Reguler SD Swasta	1.567.979.551,00	Belanja hibah
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bos Kinerja SD Swasta	58.750.000,00	Belanja hibah
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BOS Reguler SMP Swasta	929.669.139,00	Belanja hibah
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bos Kinerja SMP Swasta	72.500.000,00	Belanja hibah
	Total		**2.628.898.690,00**	

Sumber: data BPKAD (diolah)

12. Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 168 Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BOP reguler PAUD Swasta	1.534.280.500,00	Belanja hibah
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BOP Kinerja PAUD Swasta	30.000.000,00	Belanja hibah
	Total		**1.564.280.500,00**	

Sumber: data BPKAD (diolah)

13. Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 169 Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan

No.	SKPD	Uraian	Nilai(Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BOP reguler Kesetaraan Swasta	785.270.000,00	Belanja hibah
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BOP Kinerja Kesetaraan Swasta	45.000.000,00	Belanja hibah
	Total		**830.270.000,00**	

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.2.5 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang dapat berupa pengeluaran konsumsi aset atau timbulnya kewajiban pemerintah sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Beban Bantuan Sosial merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok masyarakat/perorangan. Pada tahun anggaran 2025 pemberian bantuan sosial berupa pengadaan bahan kebutuhan pokok berupa sembako, uang dan barang untuk penyandang disabilitas, anak terlantar, bahan kebutuhan bagi lansia terlantar dan bantuan persiapan persalinan bagi ibu hamil. Realisasi beban bantuan sosial pada tahun 2025 adalah sebesar **Rp 447.746.725,00** yang terdiri dari:

Tabel 170 Realisasi Beban Bantuan Sosial

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	202.200.000,00	23.500.000,00	178.700.000,00	760,43
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	221.089.800,00	212.472.000,00	8.617.800,00	4,06
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	24.456.925,00	-	24.456.925,00	100,00
Jumlah	**447.746.725,00**	**235.972.000,00**	**211.774.725,00**	**89,75**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Penjelasan beban bantuan sosial sebagai berikut:

1. Beban Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu berupa pengadaan bahan kebutuhan pokok berupa sembako untuk penyandang disabilitas dan bahan kebutuhan bagi lansia dan anak terlantar, pengadaan alat bantu/aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, paket bantuan spesifik korban kekerasan pada perempuan, paket bantuan pemulihan kesehatan.
2. Beban Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga berupa bantuan sembako.
3. Beban Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat berupa pengadaan bahan kebutuhan pokok berupa sembako untuk penyandang disabilitas dan bahan kebutuhan bagi lansia terlantar.
4. Beban Bantuan Sosial uang untuk Persiapan Persalinan bagi Ibu Hamil yang sumber dana berasal dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi.

5.4.2.6 Beban Penyusutan

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan. Realisasi beban penyusutan pada tahun 2025 adalah sebesar **Rp163.601.007.209,92** yang terdiri dari:

Tabel 171 Beban Penyusutan Aset Tetap

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	47.650.288.680,32	50.627.260.955,50	(2.976.972.275,18)	(5,88)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.615.916.201,64	16.231.191.204,91	1.384.724.996,73	8,53
Beban Penyusutan jalan. Irigasi dan Jaringan	98.326.431.494,63	101.325.728.955,00	(2.999.297.460,37)	(2,96)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	8.370.833,34	40.576.816,00	(32.205.982,66)	(79,37)
Jumlah	**163.601.007.209,92**	**168.224.757.931,41**	**(4.623.750.721,49)**	(2,75)

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rekapitulasi beban penyusutan aset tetap per OPD dapat dilihat pada **lampiran 118.**

5.4.2.7 Beban Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan. Realisasi amortisasi pada tahun 2025 adalah sebesar **Rp280.049.531,42.**

Tabel 172 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	280.049.531,42	297.465.102,25	(17.415.570,83)	(5,85)

Sumber: data BPKAD (diolah)

Perhitungan beban amortisasi dapat dilihat pada **Lampiran 111.**

5.4.2.8 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang pada Pemerintah Kabupaten Belitung untuk tahun 2025 adalah sebesar **Rp2.203.344.840,25** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 173 Beban Penyisihan Piutang

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Penyisihan piutang pendapatan				
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	1.926.922.300,75	2.008.129.759,25	(81.207.458,50)	(4,04
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	244.812.486,00	166.089.472,50	78.723.013,50	47,40
Beban Penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah	31.610.053,50	44.989.193,25	(13.379.139,75)	(29,74)
Beban Penyisihan piutang transfer	-	-	-	-
Beban Penyisihan piutang lainnya				
Beban Penyisihan bagian lancar tagihan penjualan angsuran	-	-	-	-
Beban Penyisihan bagian lancar tuntutan ganti rugi	-	-	-	-
Jumlah	**2.203.344.840,25**	2.219.208.425,00	(15.863.584,75)	(0,71)

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.2.9 Beban Transfer

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk Tahun 2025 Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Belitung sebesar **Rp65.001.430.500,00**. Realisasi beban transfer seluruhnya dalam bentuk pengeluaran kas yang ditujukan untuk pemberian bantuan keuangan ke desa yang terdiri dari:

Tabel 174 Beban Transfer

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	10.908.500.000,00	8.774.242.924,00	2.134.257.076,00	24,32
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	879.330.000,00	978.814.876,00	(99.484.876,00)	(10,16)
Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	-	-	-	-
Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	53.213.600.500,00	56.618.570.900,00	(3.404.970.400,00)	(6,01)
Total	**65.001.430.500,00**	**66.371.628.700,00**	**(1.370.198.200,00)**	**(2,06)**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.2.10 Beban Lain-lain

Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Per 31 Desember 2025 tidak terdapat realisasi atas beban lain-lain.

5.4.3 Surplus/Defisit Kegiatan Operasional

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama 1 (satu) periode pelaporan. Dalam Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2025 berdasarkan realisasi pendapatan sebesar **Rp971.640.600.479,84** dan realisasi beban operasi **Rp1.027.975.878.093,32** maka Pemerintah Kabupaten Belitung mengalami Defisit dari kegiatan operasi sebesar **Rp(56.155.277.613,48)**.

5.4.4 Surplus/Defisit Non Operasional

Surplus/Defisit Non Operasional merupakan kenaikan atau penurunan Ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional diantaranya surplus/defisit penjualan Aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Pada tahun 2025 nilai Defisit Non Operasional adalah sebesar **Rp1.336.086.458,28** seluruhnya berasal dari Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

5.4.4.1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar berasal dari penghapusan aset tetap dan aset lainnya. Pada pada tahun 2025 tidak ada realiasi.

Tabel 175 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Rincian	Nilai
-	-
-	-

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.4.2 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2025 adalah sebesar **Rp 1.336.086.458,28** yang berasal dari rincian sebagai berikut:

Tabel 176 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Rincian	Nilai
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
- Penyesuaian penghapusan Aset Rusak berat/Usang Gedung dan bangunan rusak berat pada Dinas Sosial, Pembedayaan perempuan dan perlindungan anak	32.175.000,00
- Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Bangunan Tempat Bermain Anak) pada Dinas Pariwisata	285.440.902,00
- Penyesuaian Penghapusan Aset Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan (Gapura) pada UPT PPTP Pelabuhan Tanjung RU Dinas Perhubungan	29.211.150,00
- Penyesuaian penyertaan modal pada Perumda Tirta Batu Mentas dikarenakan penurunan nilai kekayaan bersih tahun 2025 akibat kerugian tahun berjalan	664.575.624,18
- Penyesuaian penyertaan modal pada PT. Belitong Mandiri dikarenakan penurunan nilai kekayaan bersih tahun 2025 akibat kerugian tahun berjalan	381.235.070,68
- penyesuaian penyertaan modal pada PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia dikarenakan perubahan nilai kekayaan bersih tahun 2025 akibat koreksi akumulasi kerugian tahun lalu	10.851.623,14
- Penghapusan Aset tetap Lainnya (Buku) pada Dinas Penddikan dan Kebudayaan (SMPN 1 Badau) Tahun 2025 sesuai SK Penghapusan No. 000.2.6.1/1788/BPKAD/2025	304.285.833,99
- Penghapusan Aset Rusak Berat (Buku) pada Dinas Penddikan dan Kebudayaan (SMPN 1 Badau) Tahun 2025 esuai SK Penghapusan No. 000.2.6.1/1788/BPKAD/2025	2.593.800,00
- penyesuaian penyertaan modal pada PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia dikarenakan penurunan nilai kekayaan bersih tahun 2025 akibat kerugian tahun berjalan	(374.282.545,71)
Jumlah Defisit	**1.336.086.458,28**
Total Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**1.336.086.458,28**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.4.5 Pos Luar Biasa

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang. dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah. Pada tahun 2025 tidak terdapat realisasi atas beban luar biasa atau beban tidak terduga.

5.4.6 Surplus/(Defisit) – LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Defisit Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Belitung pada Tahun 2025 yaitu sebesar **Rp(57.491.364.071,76).**

5.5 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Laporan arus kas yang disajikan dalam laporan keuangan ini merupakan hasil konsolidasi laporan arus kas pemerintah daerah dengan laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi.

5.5.1.1 Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari aktivitas operasi merupakan jumlah penerimaan bruto dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 177 Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi

Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	104.082.515.970,00	95.733.329.497,25
Penerimaan Retribusi Daerah	92.848.376.288,50	28.328.429.252,00
Penerimaan Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.886.428.412,02	5.566.654.063,95
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	11.559.039.274,57	54.319.752.323,13
Penerimaan Dana Bagi Hasil	38.705.944.300,00	80.735.062.654,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	478.853.010.054,00	485.393.500.051,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik	8.848.258.410,00	10.766.768.288,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	10.598.402.698,00	47.359.587.685,00
Penerimaan Dana Insentif Fiskal	20.586.869.000,00	15.976.321.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	46.262.718.168,00	59.001.661.334,00
Penerimaan Pendapatan Bantuan Keuangan	1.666.032.500,00	3.971.626.000,00
Penerimaan Pendapatan Hibah	-	-
Penerimaan Pendapatan Dana Darurat	-	-
Penerimaan Lainnya	-	-
Jumlah	**818.897.595.075,09**	**887.152.692.148,33**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi merupakan jumlah konsolidasi termasuk pendapatan BLUD sebesar **Rp82.256.311.676,50** yang disajikan pada penerimaan retribusi daerah. Sedangkan untuk pendapatan dana BOS/BOP, pendapatan dana BOK Puskesmas serta penerimaan Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat tidak termasuk dalam laporan arus kas dikarenakan transaksi pendapatan tersebut tidak melalui kas daerah. Pencatatan pada LRA berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) yang dikonsolidasi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan pencatatan penerimaan dana desa berdasarkan daftar SP2DD Penyaluran dana desa dari KPPN Tanjungpandan.

5.5.1.2 Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas operasi merupakan pengeluaran kas untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah selama tahun berjalan sesuai nilai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 178 Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi

Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
Pembayaran Pegawai	427.711.386.764,00	475.592.481.642,00
Pembayaran Barang	280.031.499.855,53	328.060.841.961,78
Pembayaran Subsidi	540.823.627,00	638.399.797,00
Pembayaran Hibah	16.237.928.030,00	41.600.053.850,00
Pembayaran Bantuan Sosial	447.746.725,00	235.972.000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	11.787.830.000,00	9.753.057.800,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	53.213.600.500,00	56.618.570.900,00
Pembayaran Tak terduga	-	-
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
Jumlah	**789.970.815.501,53**	**912.499.377.950,78**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Jumlah arus kas keluar dari aktivitas operasi termasuk pengeluran kas BLUD berupa belanja pegawai sebesar **Rp37.007.827.591,00** dan belanja barang sebesar **Rp44.531.716.082,00** sedangkan pengeluaran kas dana BOS/BOP, BOK dan pengeluaran bagi hasil pendapatan lainnya berupa Dana Desa (DD) tidak termasuk dalam laporan arus kas. Pencatatan belanja pada LRA berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) yang dikonsolidasi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan pencatatan penerimaan dana desa berdasarkan daftar SP2DD Penyaluran dana desa dari KPPN Tanjungpandan

Arus kas bersih dari aktivitas operasi diperoleh dari jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi dikurangi pengeluaran kas untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah dengan total arus kas bersih sebesar **Rp28.926.779.573,56**.

5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

5.5.2.1 Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari aktivitas investasi aset merupakan jumlah penerimaan bruto dari pelepasan sumber daya ekonomi seperti penjualan aset dan pencairan dana cadangan. Pada tahun 2025 jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi sebesar **Rp113.125.800,00** yang berasal dari hasil penjualan tanpa lelang berupa kendaraan perorangan dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.

5.5.2.2 Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas investasi merupakan jumlah pengeluaran kas bruto dalam rangka memperoleh sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah seperti perolehan aset tetap, perolehan aset lainnya dan penyertaan modal pemerintah. jumlah arus kas keluar dari aktivitas investasi adalah sebagai berikut:

Tabel 179 Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi

Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Perolehan Tanah	491.325.000,00	4.135.660.290,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	11.224.534.843,00	22.585.890.296,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	9.112.758.960,00	18.418.277.038,62
Perolehan Jalan. Irigasi dan Jaringan	10.996.019.657,00	14.696.115.290,00
Perolehan Aset Lainnya	9.435.000,00	62.000.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	38.895.000,00	164.983.850,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	3.000.000.000,00
Jumlah	**31.872.968.460,00**	**63.062.926.764,62**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Jumlah arus kas keluar dari aktivitas investasi termasuk pengeluran kas BLUD berupa belanja modal peralatan dan mesin sebesar **Rp1.735.907.040,00.**

Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar **Rp(31.759.842.660,00)** diperoleh dari jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi dikurang pengeluaran kas untuk membiayai pengadaan aset tetap.

5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas Pendanaan merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Pada Pemerintah Kabupaten Belitung tidak terdapat arus kas masuk maupun arus kas keluar dari aktivitas pendanaan.

5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas Transitoris merupakan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), penerimaan pengembalian belanja tahun berjalan dan penerimaan pengembalian uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

5.5.4.1 Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari aktivitas Transitoris meliputi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). penerimaan pengembalian belanja tahun berjalan, penerimaan pengembalian uang persediaan dari bendahara pengeluaran dari bendahara pengeluaran.

Tabel 180 Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	52.804.641.890,00	43.905.049.808,00
Penerimaan Pengembalian Belanja tahun berjalan	3.762.632.629,00	2.901.350.952,00
Penerimaan Pengembalian sisa kas bendahara penerimaan tahun lalu	-	-
Jumlah	**56.567.274.519,00**	**46.806.400.760,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Penerimaan Pengembalian Belanja tahun berjalan sebesar Rp3.762.632.629,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 181 Rincian Pengembalian Belanja Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Jumlah (Rp)
Pengembalian belanja pegawai	20.962.194,00
Pengembalian belanja barang	460.208.000,00
Pengembalian belanja hibah	99.045.578,00
Pengembalian belanja modal peralatan dan mesin	25.946.610,00
Pengembalian belanja modal gedung dan bangunan	158.429.981,00
Pengembalian sisa uang persediaan	2.998.040.266,00
Total	**3.762.632.629,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

5.5.4.2 Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas Transitoris meliputi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan pemberian uang persediaan bendahara pengeluaran.

Tabel 182 Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	52.804.641.890,00	43.905.049.808,00
Pengeluaran Pengembalian Pendapatan	-	173.806.600,00
Pemberian Uang Persediaan	2.998.040.266,00	2.526.513.811,00
Jumlah	**55.802.682.156,00**	**46.605.370.219,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris adalah sebesar **Rp764.592.363,00**.

Dari jumlah total arus kas bersih, baik itu dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan serta aktivitas transitoris diperoleh penurunan kas sebesar **Rp(2.068.470.723,44)** dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 183 Rincian Penurunan Saldo Kas

Keterangan	Jumlah (Rp)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	28.926.779.573,56
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(31.759.842.660,00)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-

Keterangan	Jumlah (Rp)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	764.592.363,00
Kenaikan/(Penurunan) Kas	**(2.068.470.723,44)**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Dengan adanya kenaikan kas tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan saldo kas daerah yang dikelola oleh BUD dan BLUD di mana saldo awal kas per 1 Januari 2025 sebesar **Rp97.209.726.116,70** dikurang penurunan kas **Rp(2.068.470.723,44)** sehingga saldo akhir Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar **Rp95.141.255.393,26** yang terdiri dari:

Tabel 184 Rincian Saldo Akhir Kas

Rekening Kas	Jumlah (Rp)
Kas Di Kas Daerah	73.461.228.388,10
Kas di BLUD	21.680.027.005,16
Total	**95.141.255.393,26**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Pada tahun 2025 terdapat penyesuaian saldo awal kas BUD sebesar Rp221.461.131,00 yang berasal dari saldo kas BLUD puskesmas yang tahun sebelumnya tercatat sebagai saldo kas dana JKN sehingga saldo awal kas BUD yang disajikan di LAK yang sebelumnya sebesar Rp96.988.264.985,70 menjadi Rp97.209.726.116,70.

Selain itu terdapat saldo kas di bendahara SKPD yang terdiri dari:

Kas yang diterima dan digunakan langsung oleh Perangkat Daerah terdiri dari:

a. Kas di bendahara pengelola dana BOK pada Puskesmas sebesar Rp584.451.809,00.
b. Kas pada bendahara Dana BOSP dan BOP sebesar Rp115.612.674,00 yang terdiri dari:
   1. Saldo kas BOS Reguler Rp 114.861.898,00
   2. Saldo kas BOS Kinerja Rp 776,00
   3. Saldo kas BOP Rp 750.000,00

Total saldo akhir kas pada laporan arus kas per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp95.841.319.876,26**.

Jika dibandingkan dengan SiLPA sebesar **Rp95.840.033.255,26**. terdapat selisih saldo akhir kas pada LAK dengan SiLPA sebesar **Rp1.286.621,00**. selisih tersebut berasal dari :

Tabel 185 Selisih Saldo Akhir Kas Pada LAK dengan SiLPA

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo kas BOS dikarenakan sekolah buka rekening baru yang ada NPSN pada akhir tahun 2021.	150.000,00
Penyesuaian penambahan Kas BOS (SDN 25 Tanjungpandan) yang berasal dari pengembalian atas kelebihan belanja tahun 2022 sesuai LHP Evaluasi Dana BOS Tahun Anggaran 2022 No:700/074/PKeuPD/INSPEK/2023	1.357.800,00
Kelebihan setoran pot. PFK dari kasda ke RKUN	(221.179,00)
Total	**1.286.621,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Rekonsiliasi saldo kas di Neraca dengan saldo kas di LAK sebagai berikut:

Tabel 186 Rekonsiliasi Saldo Kas di Neraca dengan Saldo Kas di LAK

No.	Uraian	Saldo Kas Neraca (Rp)	Saldo kas LAK (Rp)	Selisih
1.	Kas di Kas Daerah	73.461.228.388,10	73.461.228.388,10	-
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-
4.	Kas di BLUD	21.680.027.005,16	21.680.027.005,16	-
5.	Kas di Bendahara BOSP/BOP	115.612.674,00	115.612.674,00	-
6.	Kas Dana BOK Puskesmas	584.451.809,00	584.451.809,00	
7.	Setara Kas	-	-	-
8.	Kas lainnya (Kas yang di batasi penggunaannya)	179.430.727,00	-	179.430.727,00
	Total	**96.020.750.603,26**	**95.841.319.876,26**	**179.430.727,00**

Sumber: data BPKAD (diolah)

Selisih saldo kas yang di sajikan pada neraca dengan saldo kas pada LAK sebesar **Rp179.430.727,00**. selisih tersebut merupakan kas yang dibatasi penggunaannya berupa bunga deposito dan jasa giro jaminan reklamasi dan kesungguhan yang merupakan hak pihak

ketiga yang tercatat pada rekening 146.301.0374 dan 146.301.0093 atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung namun bukan merupakan bagian kas dari pemerintah Kabupaten Belitung.

5.6 Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Perubahan Ekuitas

Komponen perubahan ekuitas terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir.

5.6.1 Ekuitas awal

Ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 adalah sebesar **Rp2.265.137.100.521,02.**

5.6.2 Surplus/Defisit (LO)

Jumlah Surplus (defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah defisit sebesar **Rp(57.491.364.071,76).** Surplus (defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang terdiri dari koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap dan koreksi ekuitas lainnya. Pada tahun 2025 Koreksi ekuitas yaitu sebesar **Rp(122.432.555.963,24)** dengan rincian sebagai berikut:

a. **Koreksi Nilai Persediaan** senilai Rp0,00.
   Pada tahun 2025 tidak terdapat koreksi nilai persediaan.
b. **Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap** senilai Rp0,00**.**
   Pada tahun 2025 tidak terdapat koreksi selisih revaluasi aset tetap.
c. **Koreksi Ekuitas Lainnya**
   Koreksi ekuitas lainnya **s**ebesar **Rp(122.432.555.963,24)** merupakan koreksi nilai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 187 Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya

No.	Uraian	Jumlah
	Mutasi Tambah :	
1	Penyesuaian Atas Saldo Penyusutan Aset Tetap Akibat Perhitungan Pembulatan	575,44
2	Penyesuaian Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Pelunasan Piutang Tahun Sebelumnya	521.678.165,25
3	Penyesuaian Penguasaan Lahan Tanah Pustu Pelepak Pute Kepbup No: 100.3.4/921a/Kep/Bpkad/2025 Tgl 10 Nov 2025	14.300.000,00
4	Penyesuaian Penguasaan Aset Tanah Poskesdes Tanjungpendam	35.200.000,00
5	Penyesuaian Pelunasan Penyisihan Piutang Denda Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Pemanfaatan Aset Daerah Per 31 Desember 2024	82.900,00
6	Penyesuaian Pelunasan Piutang Kurang Lancar dan BPJS Tenaga Kerja Per 31 Desember 2025	448.439,25
7	Penyesuaian Penambahan Aset Berupa Tanah Nomor 100.3.4/924/KEP/BPKAD/2025 Tanggal 10 November 2025 Tentang Penetapan Status Penggunaan BMD atas Sebidang Tanah di Jalan Yos Sudarso.	3.040.875.000,00
8	Penyesuaian Koreksi Kelebihan Catat Hutang Belanja Pegawai Jasa Pelayanan Covid Tahun 2022	215.849.729,00
9	Penyesuaian pelunasan penyisihan piutang Retribusi Parkir di tepi Jalan umum dan Pemanfaatan Aset Daerah per 31 Desember 2024	3.860.000,00
10	Penyesuaian Pelunasan Piutang tak tertagih per 31 Desember 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum	127.925,00
11	Penyesuaian Pelunasan Piutang tak tertagih per 31 Desember 2025 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja	7.262.500,00
12	Koreksi lebih catat akumulasi penyusutan diikarenakan salah pencatatan nilai baik karena kapitalisasi atau lebih catat nilai aset	11.043.376.289,42
13	Penyesuaian koreksi kurang catat Aset Lain-lain tahun lalu pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	12.000.000,00
14	Koreksi akumulasi penyusutan aset lainnya karena duplikasi pencatatan pada Dinas Perhubungan	17.627.700,00

No.	Uraian	Jumlah
15	Penerimaan Alat Kesehatan (USG dan Oxymeter) dari Dirjen Kemenkes, Keputusan Bupati Nomor 100.3.4/729/Kep/BPKAD/2025 dan BAST Nomor 000.2.6.2/80/Dinkes/2025	805.410.000,00
16	Koreksi lebih catat akumulasi amortisasi aset tak berwujud-software tahun sebelumnya	237.571.036,73
17	Koreksi kurang catat piutang retribusi pertokoan dikawasan KV Senang	374.000.000,00
18	Koreksi kurang catat piutang denda retribusi pertokoan di kawasan KV Senang	89.760.000,00
19	Koreksi kurang catat piutang kontribusi hasil kerja sama daerah pada PT. Ranati sebesar Rp540.000.000 dan pada PT. BGR sebesar Rp420.000.000	960.000.000,00
20	Koreksi lebih catat akumulasi penyusutan peralatan dan mesin akibat penyesuaian migrasi data BMD	495.000,00
21	Koreksi lebih catat akumulasi penyusutan gedung dan bangunan akibat penyesuaian migrasi data BMD	1.042.021.117,37
22	Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan irigasi akibat penyesuaian migrasi data BMD	25.828.151.951,70
	Jumlah Mutasi Tambah	**44.250.098.329,16**
	Mutasi Kurang :	
1	Penyesuaian Pengembalian BPJS Kesehatan 2023-2024 dengan memotong Piutang tahun 2024	(45.316.400,00)
2	Penyesuaian Koreksi Pelunasan Piutang Pasien Belum bayar angsuran tahun 2023 yang dibayar 2024 dan tidak mengurangi piutang	(250.000,00)
3	Penyesuaian Koreksi Saldo Piutang Jasa Pelayanan Kesehatan berdasarkan hasil verifikasi Klaim BPJS pada Dinas Kesehatan	(79.397.800,00)
4	Penyesuaian Atas Saldo Penyusutan Aset Tetap Akibat Perbedaan Pencatatan Bulan Perolehan	(35.200.663,59)
5	Penyesuaian Atas Saldo Penyusutan Aset Tetap Akibat Perhitungan Pembulatan	(425,04)
6	Penyesuaian Penghapusan Tanah Posyandu Aik Pelempang-Air Saga	(11.200.000,00)
7	Koreksi kurang catat akumulasi penyusutan diikarenakan salah pencatatan nilai baik karena kapitalisasi atau kurang catat nilai aset	(17.780.655.609,96)
8	Penyesuaian Pengembalian Klaim BPJS Kesehatan Tahun 2023 Dan 2024	(322.817.605,00)
9	Penyesuaian koreksi kurang catat akumulasi penyusutan aset Lain-lain (rusak berat) pada Bappeda	(12.000.000,00)
10	Koreksi aset tetap tanah dan bangunan karena duplikasi pencatatan pada Dinas perhubungan	(54.625.000,00)
11	Akumulasi Penyusutan Penerimaan Alat Kesehatan (Usg Dan Oxymeter) dari Dirjen Kesmas Kemenkes, Keputusan Bupati No 100.3.4/729/Kep/Bpkad/2025 Dan Bast No 000.2.6.2/80/Dinkes/2025	(387.929.500,00)
12	Penyesuaian pengakhiran kerja sama pemanfaatan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT. Belitung golf & Resort	(6.000.000.000,00)
13	Penyesuaian pengakhiran kerja sama Pemerintah Kabupaten Belitung dengan PT Belitung Inti Permai sesuai Keputusan Bupati Belitung Nomor 703/KEP/BPKAD/2023 tanggal 12 Desember 2023	(214.000.000,00)
14	Penyesuaian pengakhiran kerja sama pemanfaatan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Yayasan Sejahtera Warga Bulog	(1.346.865.000,00)
15	Koreski lebih bayar dana transfer umum - DBH berdasarkan PMK 120 tahun 2025	(98.595.562.000,00)
16	Koreksi kurang catat penyisihan piutang retribusi pertokoan di kawasan KV Senang	(153.000.000,00)
17	Koreksi kurang catat penyisihan piutang denda retribusi pertokoan dikawasan KV Senang	(36.720.000,00)
18	Koreksi kurang catat penyisihan piutang kontribusi hasil kerja sama daerah	(645.000.000,00)
19	Koreksi ekuitas dikarenakan kurang catat akumulasi penyusutan peralatan dan mesin akibat penyesuaian migrasi data BMD	(924.893.000,00)
20	Koreksi ekuitas dikarenakan kurang catat akumulasi penyusutan gedung dan bangunan akibat penyesuaian migrasi data BMD	(65.135.154,73)
21	Koreksi ekuitas dikarenakan kurang catat akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan irigasi akibat penyesuaian migrasi data BMD	(39.972.086.134,08)
22	**Jumlah Mutasi Kurang**	**(166.682.654.292,40)**
23	**Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya**	**Rp (122.432.555.963,24)**

Sumber: data BPKAD (diolah

5.6.4 Ekuitas akhir

Ekuitas akhir Pemerintah Kabupaten Belitung tahun anggaran 2025 adalah sebesar **Rp2.085.213.180.486,02** dan apabila dibandingkan dengan Ekuitas akhir tahun 2024 sebesar **Rp2.265.137.100.521,02** mengalami penurunan sebesar **Rp179.923.920.035,00 atau sebesar 7,94%.**

Penjelasan Lain-lain

Terdapat kas dan setara kas di luar rekening kas milik daerah berupa:

1. **Jaminan Reklamasi atas nama Pemda Kab. Belitung**

   Jaminan reklamasi yang ditampung dalam rekening Giro Bank Sumsel Babel Cabang Tanjungpandan a.n. Dana Jaminan Reklamasi Lainnya dengan nomor rekening 146.301.0093 dengan saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp50.000,00 dan Deposito atas nama Pemda Kab. Belitung dengan saldo dana jaminan reklamasi per 31 Desember 2023 senilai Rp786.081.549,00 sehingga total jaminan reklamasi atas nama Pemda Kab. Belitung per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp786.131.549,00 rincian pada **Lampiran 91**.

2. **Jaminan Reklamasi dan Jaminan Kesungguhan atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. Penyetor.**

   700/0026/ESDM tanggal 13 Januari 2020 Hal : Pemindahan Rekening Jaminan. Maka rekening Jaminan Reklamasi dan/atau Jaminan Pasca Tambang dan/atau Jaminan Kesungguhan dipindahkan menjadi atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. Penyetor dalam bentuk deposito berjangka. Adapun jaminan yang telah dipindahkan menjadi atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. Penyetor per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

   a. Jaminan reklamasi yang semula dalam bentuk 3 (tiga) deposito atas nama Pemda Kab. Belitung senilai Rp313.500.000,00 (pokok deposito) telah dipindahkan per tanggal 23 November 2020 menjadi 11 (sebelas) deposito atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. penyetor dalam bentuk deposito berjangka. dengan total deposito senilai Rp473.009.620,00 (pokok lama senilai Rp312.800.000,00 + bunga deposito senilai Rp160.209.620,00). sedangkan sisa pokok lama senilai Rp700.000,00 masih dalam bentuk deposito atas nama Pemda Kab. Belitung karena belum jelas nama penyetor jaminan reklamasi tersebut (rekening 146.411.4720).

   b. Jaminan reklamasi dalam bentuk deposito atas nama Pemda Kab. Belitung senilai Rp2.256.675.498,00 telah dipindahkan per tanggal 28 Oktober 2022 menjadi 60 (enam puluh) deposito atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. penyetor dalam bentuk deposito berjangka, dengan total deposito senilai Rp2.925.744.308,00 (pokok lama senilai Rp1.820.652.500,00 + bunga deposito senilai Rp1.105.091.808,00). sedangkan sisa pokok lama senilai Rp436.022.998.00 masih dalam bentuk 2 (dua) deposito atas nama Pemda Kab. Belitung karena belum jelas nama penyetor jaminan reklamasi tersebut yaitu rekening 146.411.5222 senilai Rp425.272.998,00 (pokok lama) dan rekening 146.411.5322 senilai Rp10.750.000,00 (pokok lama).

      Sebagai tindaklanjut Kesepakatan hasil rapat tanggal 24 Agustus 2023 tentang pemindahan nama rekening jaminan reklamasi (JAMREK) dari Pemerintah Kabupaten Belitung QQ. Bupati Belitung ke pemerintah Provinsi kepulauan Bangka Belitung QQ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung maka Pemerintah Kabupaten Belitung kembali mengajukan permohonan perubahan nama rekening deposito jaminan reklamasi an. Gubernur kepulauan Bangka Belitung QQ Penambang menyesuaikan dengan nominal pokok deposito baru sebagaimana surat Nomor : 900.1.15.5/1865/BPKAD tanggal 30 Agustus 2023 dengan total deposito senilai Rp2.987.237.082,00 (pokok lama senilai Rp2.925.744.308,00 + bunga deposito senilai Rp61.492.774,00).

   c. Jaminan reklamasi dalam bentuk deposito atas nama Pemda Kab. Belitung senilai Rp1.450.000.000,00 telah dipindahkan per tanggal 29 November 2022 menjadi

106 (seratus enam) deposito atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. penyetor dalam bentuk deposito berjangka, dengan total deposito senilai Rp2.223.318.603,00 (pokok lama senilai Rp1.397.000.000,00 + bunga deposito senilai Rp826.318.603,00). Sedangkan sisa pokok lama senilai Rp53.000.000,00 masih dalam bentuk deposito atas nama Pemda Kab. Belitung karena belum jelas nama penyetor jaminan reklamasi tersebut yaitu rekening 146.412.7422 senilai Rp53.000.000,00 (pokok lama).

- Jaminan reklamasi yang semula ditampung dalam bentuk giro pada rekening 146.301.0093 senilai Rp477.550.000,00 per tanggal 23 November 2020 telah dipindahkan menjadi 12 (dua belas) deposito atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. penyetor dalam bentuk deposito berjangka. dengan total deposito senilai Rp543.922.404,00 (pokok lama senilai Rp477.500.000,00 + bunga giro senilai Rp66.422.404,00) sedangkan sisa senilai Rp50.000,00 masih terdapat direkening 146.301.0093 karena belum jelas nama penyetor jaminan reklamasi tersebut.
- Terdapat 13 (tiga belas) deposito jaminan kesungguhan dengan total Rp352.500.000,00 yang semula atas nama Pemda Kab. Belitung per tanggal 23 November 2020 telah dipindahkan menjadi atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. Penyetor dalam bentuk deposito berjangka. dengan total deposito senilai Rp527.537.177,00 (pokok lama senilai Rp352.500.000,00 + bunga deposito senilai Rp175.037.177,00). rincian pada **Lampiran 119**.

3. Pemerintah Kabupaten Belitung telah mengalihkan jaminan reklamasi menjadi atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung qq. Penyetor senilai Rp4.007.952.500,00 atau sebesar 89% dari total jaminan reklamasi yang ada sedangkan sisanya senilai Rp489.722.998,00 masih atas nama Pemda Kab. Belitung karena belum jelas nama penyetor jaminan reklamasi dimaksud. Jaminan reklamasi yang telah dialihkan tersebut belum diserahkan ke Gubernur Kepulauan Bangka Belitung karena sebagian deposito tersebut masih dalam proses penandatangan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui Bank Sumsel Babel.

Informasi Tambahan

Di samping informasi utama tersebut. perlu diinformasikan beberapa hal yang dianggap penting dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

a. Tersebut batas minimal aset yang masuk dalam neraca adalah: **Dampak penyajian nilai aset dalam neraca akibat diberlakukannya batas minimal kapitalisasi aset.**
   Nilai aset yang disajikan dalam neraca adalah aset yang mempunyai nilai yang cukup material sesuai dengan kebijakan akuntansi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung mengenai batas minimal kapitalisasi aset. Dalam kebijakan akuntansi :
   - Peralatan dan mesin minimal nilai per unitnya Rp1.000.000,00.
   - Gedung dan Bangunan minimal nilai per unitnya Rp10.000.000,00.
   - Jalan dan Jembatan, Bangunan Air (Irigasi), Jaringan, dan Instalasi tidak ada batasan nilai.
   - Aset tetap lainnya berupa hewan/ternak/tanaman minimal nilai per unitnya Rp1.000.000,00. Sedangkan koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian dan kebudayaan/olahraga tidak ada batasan nilai.

b. Sementara itu untuk aset yang nilainya dianggap tidak material disajikan secara terpisah (*ekstrakomptable*) yang dari aset neraca yang sampai dengan tahun pelaporan senilai **Rp68.003.526.921,43.**

c. Selain itu juga terdapat Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan kepada satuan pendidikan dasar baik sekolah negeri maupun swasta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang berasal dari APBN kepada SD/SMP Negeri

maupun swasta yang berasal dari Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada SD/SMP Negeri telah dikonsolidasi pada LKPD Pemerintah Kabupaten Belitung.

Jumlah alokasi dan penggunaan dana BOS yang disalurkan kepada satuan pendidikan dasar swasta adalah sebagai berikut:

Tabel 188 Alokasi dan Penggunaan Dana BOS Satdikdas Swasta

No	Nama Sekolah	Saldo Awal Kas 1 Januari 2025 (Rp)	Penerimaan		Pengeluaran		Saldo Akhir Kas 31 Desember 2025 (Rp)
			Transferan Bos &Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Belanja Bos (Rp)	Biaya Bank (Rp)	
1	SD Regina Pacis T.Pandan	1.653.740,00	236.166.260,00		237.206.760,00		613.240,00
2	SD Muhammadiyah T.Pandan	360.990,00	119.019.010,00		119.335.000,00		45.000,00
3	SD Anugrah T.Pandan	269.229,00	270.450.771,00		270.595.200,00		124.800,00
4	SD IT Bina Insani T.Pandan	30.000,00	359.050.000,00		359.050.000,00		30.000,00
5	SD Keluarga Universal T.Pandan	650.990,00	427.049.010,00		427.621.997,00		78.003,00
6	SD Muhammadiyah 2 T.Pandan	42.500,00	104.340.000,00		103.740.000,00	42.500,00	600.000,00
7	SD Alam AQILA	6.375.500,00	51.904.500,00		58.280.000,00		0,00
8	SMP PGRI 1 T.Pandan	22.000,00	67.238.000,00		67.150.420,00		109.580,00
9	SMP PGRI 2 T.Pandan	68.200,00	63.771.800,00		63.797.600,00		42.400,00
10	SMP Regina Pacis T.Pandan	185.861,00	163.974.139,00		164.108.473,00		51.527,00
11	SMP Yaperbel T.Pandan	85.000,00	36.395.000,00		36.264.000,00		216.000,00
12	SMP Muhammadiyah T.Pandan	103.000,00	58.037.000,00		57.940.000,00		200.000,00
13	SMP Anugrah T.Pandan	147.179,00	191.520.000,00		191.012.500,00	147.179,00	507.500,00
14	SMP Keluarga Universal T.Pandan	96.800,00	224.483.200,00		224.525.700,00		54.300,00
15	SMP IT Bina Insani T.Pandan	10.000,00	124.250.000,00		124.175.000,00		85.000,00
TOTAL SD & SMP SWASTA		**10.100.989,00**	**2.497.648.690,00**	**0,00**	**2.504.802.650,00**	**189.679,00**	**2.757.350,00**

Sumber: data Dinas Pendidikan (diolah)

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Kabupaten Belitung dengan luas wilayah darat kurang lebih 2.293.69 km^2/sq.km Keberadaan pulau yang jauh dari pulau induk ini menjadi pertimbangan utama dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap penyediaan prasarana dasar yang dibangun Pemerintah Kabupaten Belitung.

Wilayah Kabupaten Belitung terdiri dari 42 desa dan 7 kelurahan, dengan Kantor Pemerintah Kabupaten yang terletak di Jalan Jendral A. Yani Nomor 001 Tanjungpandan. Seiring dengan perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, desa-desa khususnya di wilayah Kecamatan Tanjungpandan telah dimekarkan menjadi beberapa kelurahan sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan status Desa yaitu Paal Satu menjadi Kelurahan Paal Satu, Desa Tanjungpendam menjadi Kelurahan Tanjungpendam, Desa Lesung Batang menjadi Kelurahan Lesung Batang, Desa Pangkallalang menjadi Kelurahan Pangkallalang diwilayah Kecamatan Tanjungpandan. Pemekaran desa ini diharapkan selain dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. juga peningkatan kualitas pelayanan publik.

6.1 Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Belitung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

1) Sekretariat Daerah Tipe A;
2) Sekretariat DPRD Tipe C;
3) Inspektorat Daerah Tipe A;
   A. Dinas Daerah. terdiri dari :
      1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
      2. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
      3. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
      4. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
      5. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
      6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian pendudukan dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
      7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
      8. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;

9. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan. dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
10. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
12. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
13. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
14. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
15. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
17. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.

B. Badan Daerah. terdiri dari :
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian. pendidikan. dan pelatihan;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian pengembangan;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan bidang bencana dan sub bidang kebakaran;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik.

C. Kecamatan terdiri dari :
1. Kecamatan Tanjungpandan Tipe A;
2. Kecamatan Membalong Tipe A;
3. Kecamatan Sijuk Tipe A;
4. Kecamatan Badau Tipe A; dan
5. Kecamatan Selat Nasik Tipe A.

Pada Dinas Daerah dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. Adapun Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 39 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung terdiri atas :
   a. UPT Satuan Pendidikan SD, yang meliputi :
      1) Kecamatan Tanjungpandan
      2) Kecamatan Selat Nasik
      3) Kecamatan Badau
      4) Kecamatan Sijuk

5) Kecamatan Membalong

b. UPT Satuan Pendidikan SMP, yang meliputi :

1) Kecamatan Tanjungpandan terdiri atas :

a) UPT Pendidikan SMPN 1 Tanjungpandan
b) UPT Pendidikan SMPN 2 Tanjungpandan
c) UPT Pendidikan SMPN 3 Tanjungpandan
d) UPT Pendidikan SMPN 4 Tanjungpandan
e) UPT Pendidikan SMPN 5 Tanjungpandan
f) UPT Pendidikan SMPN 6 Tanjungpandan
g) UPT Pendidikan SMPN 7 Tanjungpandan

2) Kecamatan Badau, meliputi :

a) UPT Pendidikan SMPN 1 Badau
b) UPT Pendidikan SMPN 2 Badau
c) UPT Pendidikan SMPN 3 Badau

3) Kecamatan Sijuk, meliputi :

a) UPT Pendidikan SMPN 1 Sijuk
b) UPT Pendidikan SMPN 2 Sijuk
c) UPT Pendidikan SMPN 3 Sijuk
d) UPT Pendidikan SMPN 4 Sijuk

4) Kecamatan Membalong, meliputi :

a) UPT Pendidikan SMPN 1 Membalong
b) UPT Pendidikan SMPN 2 Membalong
c) UPT Pendidikan SMPN 3 Membalong
d) UPT Pendidikan SMPN 4 Membalong
e) UPT Pendidikan SMPN 5 Membalong

5) Kecamatan Selat Nasik, meliputi :

a) UPT Pendidikan SMPN 1 Selat Nasik
b) UPT Pendidikan SMPN 2 Selat Nasik
c) UPT Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar Belitung
d) UPT Museum.

2. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, meliputi :

a. UPT Laboratorium Kesehatan
b. UPT Puskesmas, yang meliputi :

1) Puskesmas Tanjungpandan
2) Puskesmas Perawas
3) Puskesmas Air Saga
4) Puskesmas Sijuk
5) Puskesmas Badau
6) Puskesmas Selat Nasik
7) Puskesmas Tanjung Binga
8) Puskesmas Simpang Rusa
9) Puskesmas Membalong

c. UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono

3. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, yang meliputi :

a. UPT Pengelolaan Air Minum
b. UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan, Perbekalan dan Laboratorium

4. Pada Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung yaitu UPT Perbenihan dan Pembibitan.
5. Pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung yaitu UPT Perikanan Budidaya
6. Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung yaitu UPT Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan
7. Pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung, yang meliputi :

a. UPT Laboratorium Lingkungan

b. UPT Pengelolaan Sampah.

8. Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah. Perdagangan dan Tenaga Kerja yaitu UPT Metrologi Legal dan Pengelolaan Pasar.

Tabel 189 Daftar Organisasi Perangkat Daerah untuk TA. 2025

No	OPD TA. 2025
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	UPT. Sanggar Kegiatan Belajar
	UPT. Negeri 1 Tanjungpandan
	UPT. Negeri 2 Tanjungpandan
	UPT. Negeri 3 Tanjungpandan
	UPT. Negeri 4 Tanjungpandan
	UPT. SMP Negeri 5 Tanjungpandan
	UPT. SMP Negeri 6 Tanjungpandan
	UPT. SMP Negeri 7 Tanjungpandan
	UPT. SMP Negeri 1 Membalong
	UPT. SMP Negeri 2 Membalong
	UPT. SMP Negeri 3 Membalong
	UPT. SMP Negeri 4 Membalong
	UPT. SMP Negeri 5 Membalong
	UPT. SMP Negeri 1 Sijuk
	UPT. SMP Negeri 2 Sijuk
	UPT. SMP Negeri 3 Sijuk
	UPT. SMP Negeri 4 Sijuk
	UPT. SMP Negeri 1 Badau
	UPT. SMP Negeri 2 Badau
	UPT. SMP Negeri 3 Badau
	UPT. SMP Negeri 1 Selat Nasik
	UPT. SMP Negeri 2 Selat Nasik
2	Dinas Kesehatan
	UPT. RSUD dr. H. Marsidi Judono
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4	Satuan Polisi Pamong Praja
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
6	Dinas Lingkungan Hidup
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9	Dinas Perhubungan
10	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
13	Dinas Pemuda dan Olahraga
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
15	Dinas Perikanan
16	Dinas Pariwisata
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
20	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
22	Sekretariat Daerah
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
24	Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung
25	Kecamatan Tanjungpandan
	UPT. Kelurahan Kota
	UPT. Kelurahan Parit
	UPT. Kelurahan Pangkal Lalang
	UPT. Kelurahan Tanjung Pendam
	UPT. Kelurahan Paal Satu
	UPT. Kelurahan Kampong Damai
	UPT. Kelurahan Lesung Batang
26	Kecamatan Membalong
27	Kecamatan Sijuk
28	Kecamatan Badau
29	Kecamatan Selat Nasik
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber: data BPKAD (diolah)

6.2 Pemimpin Lembaga Eksekutif dan Legislatif

6.2.1 Pemimpin Lembaga Eksekutif

Pada periode pelaporan.terhitung sejak tanggal 28 Januari 2025, Bupati dan Wakil Bupati terpilih **Djoni Alamsyah Hidayat, S.Sos** dan **Syamsir, S.I.Kom** disahkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2025 Masa Jabatan Tahun 2025-2030. Dan dilantik secara serentak pada tanggal 20 Februari 2025.

6.2.2 Pimpinan Lembaga Legislatif

Pada periode pelaporan keuangan ini masa jabatan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan hasil pemilu tahun 2019 masa jabatan 2019 – 2025 telah berakhir pada bulan September 2025 dan telah diresmikan pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil pemilu tahun 2025 masa jabatan 2025 – 2029 dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/497/I/2025 tanggal 19 September 2025 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Masa Jabatan Tahun 2025-2029 dan diketuai oleh **Vina Cristyn Ferani, S.E** Wakil Ketua I **Hilman** dan Wakil Ketua II **Joko Prianto** sesuai Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/523/I/2025 tanggal 14 Oktober 2025 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Masa Jabatan Tahun 2025 -2029.

BAB VII
PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Daerah disajikan bersama-sama laporan keuangan daerah lainnya adalah merupakan salah satu kelengkapan dari laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Pemerintah Kabupaten Belitung agar laporan keuangan yang disajikan dapat dipahami oleh para pengguna laporan keuangan secara jelas. yang tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. sehingga CaLK ini berfungsi pula untuk menghindari kesalahpahaman dengan memberikan informasi yang memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

CaLK ini meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Arus Kas, dan penyajian– penyajian informasi lainnya yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berupa pengungkapan pengungkapan lainnya yang memadai dan diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dokumen CaLK ini diharapkan dapat lebih memberikan penjelasan tentang Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang transparan akuntabel, bertanggung jawab dan bertanggung gugat.

BUPATI BELITUNG,

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

Lampiran VIII : Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

KABUPATEN BELITUNG
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6
		Piutang Pajak	**24.116.925.873,00**	**3.231.405.966,00**	**2.305.578.750,00**	**25.042.753.089,00**
1	BPPRD	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	5.983.562,00	26.976.382,00	2.657.200,00	30.302.744,00
2	BPPRD	Piutang Pajak Reklame Kain	-	210.000,00	-	210.000,00
3	BPPRD	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	5.100.000,00	-	2.200.000,00	2.900.000,00
4	BPPRD	Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya	3.050.000,00	-	300.000,00	2.750.000,00
5	BPPRD	Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya	52.990.000,00	-	2.660.000,00	50.330.000,00
6	BPPRD	Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	9.400.000,00	-	-	9.400.000,00
7	BPPRD	Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	16.725.950,00	-	-	16.725.950,00
8	BPPRD	Piutang Pajak Permainan Biliar dan Bowling	885.000,00	-	-	885.000,00
9	BPPRD	Pajak Air Bawah Tanah	17.562.000,00	493.200,00	252.000,00	17.803.200,00
10	BPPRD	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	348.009.138,00	-	-	348.009.138,00
11	BPPRD	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	23.657.220.223,00	3.203.726.384,00	2.297.509.550,00	24.563.437.057,00
		Piutang Retribusi	**15.901.432.340,00**	**16.308.740.765,00**	**12.447.044.757,00**	**19.763.128.348,00**
12	Dinas Kesehatan	Retribusi Pelayanan Kesehatan - diPuskesmas	234.381.600,00	420.392.000,00	234.381.600,00	420.392.000,00
13	BLUD RSUD	Retribusi Pelayanan Kesehatan - diRSUD	12.260.995.039,00	14.986.867.110,00	11.919.884.537,00	15.327.977.612,00
14	KUMKM	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14.912.500,00	-	-	14.912.500,00
15	KUMKM	Retribusi Tempat Khusus Parkir	46.670.000,00	28.710.000,00	45.120.000,00	30.260.000,00
16	Dinas Perhubungan	Retribusi parkir di tepi jalan umum	96.261.000,00	23.840.000,00	14.060.000,00	106.041.000,00
17	Dinas Kesehatan	Retribusi Pelayanan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan	12.085.000,00	-	-	12.085.000,00
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	-	-	-	-
20	KUMKM	Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan /sewa petak toko	131.645.342,00	374.000.000,00	-	505.645.342,00
21	KUMKM	Retribusi Los	33.180.000,00	4.340.000,00	24.640.000,00	12.880.000,00
22	Dinas Perhubungan	Retribusi Terminal (pemakaian tempat usaha)	43.789.000,00	-	4.675.000,00	39.114.000,00
23	Dinas Perhubungan	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah - Sewa Kios Terminal	41.230.000,00	30.090.000,00	39.250.000,00	32.070.000,00
24	Dinas Perhubungan	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan		66.582.400,00		66.582.400,00
25	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	2.405.322.014,00	147.582.555,00	51.614.100,00	2.501.290.469,00
26	Dispora	Retribusi Pelayanan Tempat Olah Raga	19.100.000,00	-		19.100.000,00
27	Dinas Pekerjaan Umum	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	285.815.825,00		165.250,00	285.650.575,00
28	Dinas Pekerjaan Umum	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah	255.280.020,00	226.336.700,00	113.254.270,00	368.362.450,00
29	DPMPTSPP	Retribusi Izin Gangguan	16.765.000,00	-	-	16.765.000,00

No.	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6
		Piutang Lain-lain PAD yang sah	**864.923.199,64**	**1.059.981.740,00**	**14.138.720,84**	**1.910.766.218,80**
30	BPPRD	Denda keterlambatan pembayaran pajak daerah	367.384.497,80	-	-	367.384.497,80
31	DPMPTSPP	Denda Retribusi izin gangguan/keramaian	2.833.600,00	-	-	2.833.600,00
32	Dinas Pariwisata	Denda Retribusi Pemakaian Tempat Usaha (UPTD Taman Hiburan)	235.036.837,00	9.450.940,00	1.967.066,00	242.520.711,00
33	Dinas Perhubungan	Denda Retribusi parkir di tepi jalan umum	1.199.600,00	278.800,00	141.200,00	1.337.200,00
34	Dinas Perhubungan	Denda Retribusi Terminal (pemakaian tempat usaha)	737.800,00	-	82.900,00	654.900,00
35	Dinas Perhubungan	Denda Retribusi Pemakaian kekayaan daerah - Penyewaan Bangunan	-	492.000,00	-	492.000,00
36	Dinas Pekerjaan Umum	Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	15.000,00	-	15.000,00	-
37	KUMKM	Denda Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan /sewa petak toko	-	89.760.000,00	-	89.760.000,00
38	BLUD	Piutang BLUD	215.355.888,00	-	1.793.757,00	213.562.131,00
39	BPPRD	Piutang Lain-lain PAD yang sah lainnya	33.920.000,00	960.000.000,00	1.920.000,00	992.000.000,00
40	BPPRD	Piutang Bunga Deposito Bank Sumsel Babel	8.218.797,84	-	8.218.797,84	-
41	BPKAD	Piutang kelebihan setoran potongan PFK ke RKUN	221.179,00	-	-	221.179,00
		Piutang Transfer	**15.067.479.618,00**	**30.944.166.265,00**	**15.067.479.618,00**	**30.944.166.265,00**
42	BPPRD	Bagi Hasil Pajak	-	8.806.615.000,00	-	8.806.615.000,00
43	BPPRD	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	12.474.498.000,00	-	12.474.498.000,00
44	BPPRD	Pajak Rokok	1.710.981.920,00	1.665.539.843,00	1.710.981.920,00	1.665.539.843,00
45	BPPRD	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4.325.376.768,00	-	4.325.376.768,00	-
46	BPPRD	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.175.405.140,00	-	1.175.405.140,00	-
47	BPPRD	Air Permukaan	767.506.285,00	671.295.099,00	767.506.285,00	671.295.099,00
48	BPPRD	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.088.209.505,00	7.326.218.323,00	7.088.209.505,00	7.326.218.323,00
		Total Piutang	**55.950.761.030,64**	**51.544.294.736,00**	**29.834.241.845,84**	**77.660.813.920,80**

BUPATI BELITUNG,

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

Lampiran IX : Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

KABUPATEN BELITUNG
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	**Piutang Pajak Daerah**	**25.042.753.089,00**	**16.315.590.636,50**	**8.727.162.452,50**
	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	30.302.744,00	831.590,50	29.471.153,50
	Piutang Pajak Reklame Kain	210.000,00	0,00	210.000,00
	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
	Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
	Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya	50.130.000,00	50.130.000,00	0,00
	Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00
	Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	16.725.950,00	16.725.950,00	0,00
	Piutang Pajak Permainan Biliar dan Bowling	885.000,00	885.000,00	0,00
	Pajak Air Bawah Tanah	17.803.200,00	14.440.100,00	3.363.100,00
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	348.009.138,00	348.009.138,00	0,00
	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	24.563.437.057,00	15.869.318.858,00	8.694.118.199,00
2	**Piutang Retribusi Daerah**	**19.763.128.348,00**	**3.072.906.210,00**	**16.690.222.138,00**
	Piutang Retribusi Jasa Umum	16.399.933.454,00	482.266.467,50	15.917.666.986,50
	Piutang Retribusi Jasa Usaha	3.346.429.894,00	2.573.874.742,50	772.555.151,50
	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	16.765.000,00	16.765.000,00	0,00
3	**Piutang Lain-lain PAD yang Sah**	**1.910.766.218,80**	**1.505.947.116,05**	**404.819.102,75**
	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	960.000.000,00	645.000.000,00	315.000.000,00

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	2	3	4	5 = 3 - 4
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	367.384.497,80	367.384.497,80	0,00
	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	337.598.411,00	266.288.604,75	71.309.806,25
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	221.179,00	110.589,50	110.589,50
	Piutang Pendapatan BLUD	213.562.131,00	195.163.424,00	18.398.707,00
4	**Piutang Transfer Pemerintah Pusat**	**21.281.113.000,00**	**0,00**	**21.281.113.000,00**
	Piutang Dana Transfer Umum-DBH	21.281.113.000,00	0,00	21.281.113.000,00
5	**Piutang Transfer Antar Daerah**	**9.663.053.265,00**	**0,00**	**9.663.053.265,00**
	Piutang Bagi Hasil	9.663.053.265,00	0,00	9.663.053.265,00

BUPATI BELITUNG,

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

Lampiran X : Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

KABUPATEN BELITUNG
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH DANA BERGULIR BERSIH
	NIHIL			

BUPATI BELITUNG,

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

KABUPATEN BELITUNG
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan awal tahun	Sisa Modal Tahun ini	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan akhir tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah Modal (investasi) yang diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	1984 s/d 2024	Bank Sumsel	Perda Kab. Belitung	Penyertaan Modal Saham	34.249.467.464,77	34.249.467.464,77	-	34.249.467.464,77	-	4.886.428.412,02	-	34.249.467.464,77
2	1986 s.d 2016	PDAM Kab. Belitung	Perda Kab. Belitung	Kekayaan Pemda yang dipisahkan	30.417.346.549,00	30.417.346.549,00	-	30.417.346.549,00	-	-	-	30.417.346.549,00
3	2009 s.d 2015	Bank Syari'ah	Perda Kab. Belitung	Penyertaan Modal Saham	7.010.000.000,00	7.010.000.000,00	-	7.010.000.000,00	-	-	-	7.010.000.000,00
4	2010 s.d 2018	PT. Belitung Mandiri	Perda Kab. Belitung	Kekayaan Pemda yang dipisahkan	10.401.636.328,00	10.401.636.328,00	-	10.401.636.328,00	-	-	-	10.401.636.328,00
5	2013	PT. Jamkrida Bangka	Perda Kab. Belitung	Penyertaan Modal Saham	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	5.000.000.000,00	-	-	-	5.000.000.000,00
6	2015	PT Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia	Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015	Penyertaan Modal Saham	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	5.000.000.000,00	-	-	-	5.000.000.000,00
	Jumlah				92.078.450.341,77	92.078.450.341,77	-	92.078.450.341,77	-	4.886.428.412,02	-	92.078.450.341,77

BUPATI BELITUNG,

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

Lampiran XII : Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

KABUPATEN BELITUNG
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	436.175.190.307,03	19.521.973.919,11	15.628.578.764,10	440.068.585.462,04
2	DINAS KESEHATAN	184.925.900.395,51	15.619.157.715,43	10.620.536.610,43	189.924.521.500,51
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. MARSIDI JUDONO	359.193.811.174,72	4.296.889.797,00	1.374.133.610,00	362.116.567.361,72
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	2.196.575.891.841,69	64.905.356.139,00	2.868.682.500,00	2.258.612.565.480,69
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.155.398.021,14	139.332.750,00	15.984.000,00	7.278.746.771,14
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	15.427.462.973,05	536.007.400,00	2.360.611.450,00	13.602.858.923,05
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNG	7.486.972.600,00	1.105.844.050,00	16.389.001,00	8.576.427.649,00
8	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	84.144.576.438,00	486.114.500,00	116.436.000,00	84.514.254.938,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	51.314.562.080,00	1.640.635.750,00	1.583.565.928,00	51.371.631.902,00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.263.819.589,00	27.802.800,00		8.291.622.389,00
11	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA	7.522.439.958,00	1.372.506.687,06	417.170.250,60	8.477.776.394,46
12	DINAS PERHUBUNGAN	174.960.892.144,39	8.744.094.731,00	1.056.711.000,00	182.648.275.875,39
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16.899.875.505,00	447.343.913,00	4.512.150,00	17.342.707.268,00
14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGA	62.975.607.560,06	704.516.100,00	34.832.000,00	63.645.291.660,06
15	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU P	10.441.063.687,00	1.215.422.321,00	177.234.000,10	11.479.252.007,90
16	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	19.702.987.785,24	309.945.000,00	2.800.000,00	20.010.132.785,24
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8.515.870.262,00			8.515.870.262,00
18	DINAS PERIKANAN	64.355.516.730,35	233.540.500,00	1.572.223.627,30	63.016.833.603,05
19	DINAS PARIWISATA	66.078.241.618,00	4.970.564.370,00	812.447.639,00	70.236.358.349,00
20	SEKRETARIAT DAERAH	242.710.733.381,90	328.587.500,00	1.295.658.000,00	241.743.662.881,90
21	INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG	4.896.569.812,00	76.212.600,00		4.972.782.412,00
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.245.494.358,00	288.715.747,00		6.534.210.105,00

No.	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
24	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	12.922.527.949,00	138.228.300,00	27.940.000,00	13.032.816.249,00
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAY	9.275.750.805,83		100.997.000,00	9.174.753.805,83
26	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	20.799.861.243,00	1.975.820.595,00	794.182.651,00	21.981.499.187,00
27	KECAMATAN TANJUNGPANDAN	29.474.471.430,78		29.500.000,00	29.444.971.430,78
28	KECAMATAN BADAU	1.605.598.600,00		33.840.000,00	1.571.758.600,00
29	KECAMATAN SIJUK	5.610.038.200,00	19.647.000,00		5.629.685.200,00
30	KECAMATAN MEMBALONG	2.495.763.020,00		437.091.637,06	2.058.671.382,94
31	KECAMATAN SELAT NASIK	4.997.547.150,00		274.542.529,99	4.723.004.620,01
32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.031.671.673,00	20.100.000,00		3.051.771.673,00
	Total	**4.139.453.056.853,69**	**129.188.240.684,60**	**45.099.411.998,58**	**4.223.541.885.539,71**

BUPATI BELITUNG,

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

KABUPATEN BELITUNG
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	TANAH	370.676.122.840,53	15.490.650.637,06	2.675.656.014,95	383.491.117.462,64
2	PERALATAN DAN MESIN	720.367.617.851,82	33.547.795.256,00	19.151.394.562,10	734.764.018.545,72
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	785.386.635.067,07	23.347.122.849,00	15.218.995.262,00	793.514.762.654,07
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	2.175.527.297.933,24	47.445.619.272,00	1.990.595.597,00	2.220.982.321.608,24
5	ASET TETAP LAINNYA	67.445.072.900,35	3.079.614.297,00	383.689.233,99	70.140.997.963,36
6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	20.050.310.260,68	1.023.325.470,00	424.968.425,00	20.648.667.305,68
	Total	**4.139.453.056.853,69**	**123.934.127.781,06**	**39.845.299.095,04**	**4.223.541.885.539,71**

BUPATI BELITUNG,

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

KABUPATEN BELITUNG
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	SKPD	Saldo Awal	Mutasi										REKLASIFIASI/ PENGHAPUSAN	Saldo Akhir
			Penambahan					Pengurangan						
			TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA		
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.157.436.850,00			219.196.550,00					126.350.125,00			-	1.250.283.275,00
2	DINAS KESEHATAN	657.931.500,00			179.263.920,00								-	837.195.420,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. MARSIDI JUDONO	579.138.800,00											-	579.138.800,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	9.043.594.915,00			184.178.250,00	98.790.000,00					298.618.300,00		-	9.027.944.865,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-											-	-
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	97.625.000,00											-	97.625.000,00
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK	244.953.000,00											-	244.953.000,00
8	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	380.607.012,00											-	380.607.012,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	672.908.500,00											-	672.908.500,00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-											-	-
11	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-			95.876.250,00								-	95.876.250,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	5.245.055.575,00				99.820.000,00							-	5.344.875.575,00
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-											-	-
14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA	8.899.000,00			46.800.000,00								-	55.699.000,00
15	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN	-											-	-
16	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	837.178.433,00											-	837.178.433,00
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	70.332.000,00											-	70.332.000,00
18	DINAS PERIKANAN	198.132.900,00				99.400.500,00							-	297.533.400,00
19	DINAS PARIWISATA	354.819.000,00											-	354.819.000,00
20	SEKRETARIAT DAERAH	451.797.775,68											-	451.797.775,68
21	INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG	-											-	-
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-											-	-
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-											-	-
24	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	-											-	-
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	-											-	-
26	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-											-	-
27	KECAMATAN TANJUNGPANDAN	49.900.000,00											-	49.900.000,00
28	KECAMATAN BADAU	-											-	-
29	KECAMATAN SIJUK	-											-	-
30	KECAMATAN MEMBALONG	-											-	-
31	KECAMATAN SELAT NASIK	-											-	-
32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-											-	-
	Total	**20.050.310.260,68**	-	-	**725.314.970,00**	**298.010.500,00**	-	-	-	**126.350.125,00**	**298.618.300,00**	-	-	**20.648.667.305,68**

BUPATI BELITUNG

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

Lampiran XV : Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

KABUPATEN BELITUNG
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2025

No.	SKPD	Saldo Awal	MUTASI		Saldo Akhir
			TAMBAH	KURANG	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.223.703.707,32	73.413.161,73	25.726.827,25	2.271.390.041,80
2	DINAS KESEHATAN	45.914.390,00	1.547.013.000,00	1.503.268.000,00	89.659.390,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. MARSIDI JUDONO	174.250.755,26			174.250.755,26
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	11.524.058.025,00	673.219.437,51	66.830.125,01	12.130.447.337,50
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	20.499.820,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.499.820,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	1.857.807.500,00	1.853.912.500,00	3.895.000,00
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK	32.175.000,00	48.564.000,00	64.350.000,00	16.389.000,00
8	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	128.552.550,00	25.840.000,00	25.840.000,00	128.552.550,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	873.531.991,57	477.705.047,00	169.287.289,00	1.181.949.749,57
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.190.000,00			2.190.000,00
11	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-			-
12	DINAS PERHUBUNGAN	2.161.496.158,09	55.436.498,96	73.190.962,50	2.143.741.694,55
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-			-
14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA	16.487.500,00			16.487.500,00
15	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN	-	194.716.500,10	186.416.666,76	8.299.833,34
16	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-			-
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	16.876.000,00	55.318.779,16	31.203.404,16	40.991.375,00
18	DINAS PERIKANAN	146.634.466,67			146.634.466,67
19	DINAS PARIWISATA	119.227.075,00	246.580.906,25	163.599.325,00	202.208.656,25
20	SEKRETARIAT DAERAH	183.204.560,00	10.392.953,12	24.943.087,50	168.654.425,62
21	INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG	55.670.200,00			55.670.200,00

No.	SKPD	Saldo Awal	MUTASI		Saldo Akhir
			TAMBAH	KURANG	
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	110.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	110.000,00
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	9.289.518.276,00	520.046.650,00	8.026.464.218,00	1.783.100.708,00
24	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	225.005.000,00	27.940.000,00	250.616.666,67	2.328.333,33
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	8.260.000,00	100.997.000,00	100.997.000,00	8.260.000,00
26	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	2.224.440,00			2.224.440,00
27	KECAMATAN TANJUNGPANDAN	2.434.303,57	29.500.000,00	29.500.000,00	2.434.303,57
28	KECAMATAN BADAU	10.584.000,57	77.320.000,00	75.996.000,00	11.908.000,57
29	KECAMATAN SIJUK	1.000.000,00			1.000.000,00
30	KECAMATAN MEMBALONG	1.827.040,00	449.562.500,00	449.562.500,00	1.827.040,00
31	KECAMATAN SELAT NASIK	328.642.000,00	267.750.000,00	267.750.000,00	328.642.000,00
32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	278.571,43			278.571,43
	Total	**27.594.355.830,48**	**6.771.123.933,83**	**13.421.454.571,85**	**20.944.025.192,46**

BUPATI BELITUNG,

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

Lampiran XVI : Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

KABUPATEN BELITUNG
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2025

No.	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	TRANSFER KE KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	NIHIL							-
	Total	-	-	-				-

BUPATI BELITUNG,

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

Lampiran XVI : Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

KABUPATEN BELITUNG
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2025

No.	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Utang PPh 21	-			-
2	Utang PPh 22	-			-
3	Utang PPN Pusat	-			-
4	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah	474.268.502,08	227.833.694,44	461.768.502,08	240.333.694,44
5	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan	614.170.433,34	566.800.000,00	485.604.600,00	695.365.833,34
6	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	24.464.865,00		24.464.865,00	-
7	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	15.705.144,00		15.705.144,00	-
8	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK	10.575.724,00		10.575.724,00	-
9	Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	9.020.000,00		9.020.000,00	-
10	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	-	34.320.000,00		34.320.000,00
11	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN- Tunjangan Fungsional PPPK	1.250.000,00		1.250.000,00	-
12	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	-	2.585.000,00		2.585.000,00
13	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN- Tunjangan Fungsional Umum PPPK	7.030.000,00		7.030.000,00	-
14	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	5.359.080,00		5.359.080,00	-
15	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PPPK	941.460,00		941.460,00	-
16	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS	-			-
17	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	-			-
18	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PPPK	291,00		291,00	-
19	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	34.420.856,00	18.354.261,00	34.420.856,00	18.354.261,00
20	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	655.860,00	1.304.584,00	655.860,00	1.304.584,00
21	Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	-			-
22	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS	-			-
23	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengujian Kendaraan Bermotor	2.041.000,00		2.041.000,00	-
24	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Tempat Rekreasi dan Olahraga	-			-
25	Utang Belanja Pegawai BLUD	6.776.385.847,00	4.763.248.031,00	6.776.385.847,00	4.763.248.031,00
26	Utang Belanja Barang Pakai Habis-alat/Bahan untuk kegiatan kantor -Alat Tulis Kantor	-			-
27	Utang Jasa Tenaga Kesehatan	152.348.040,00		152.348.040,00	-
28	Jasa Tenaga Laboratorium	-			-
29	Utang Tagihan Telepon	55.340.890,00	45.729.832,00	55.340.890,00	45.729.832,00
30	Utang Tagihan Air	18.753.212,00	6.644.584,00	18.753.212,00	6.644.584,00

No.	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
31	Utang Tagihan Listrik	501.547.673,00	350.141.818,00	501.547.673,00	350.141.818,00
32	Utang Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	995.000,00	410.000,00	995.000,00	410.000,00
33	Utang Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	74.942.979,00	86.622.711,00	74.942.979,00	86.622.711,00
34	Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman	237.000,00	204.000,00	237.000,00	204.000,00
35	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	-			-
36	Utang Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	-			-
37	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri-- Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.337.360,00	40.618.164,00	21.337.360,00	40.618.164,00
38	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	4.902.379.964,00	6.841.409.489,00	4.902.379.964,00	6.841.409.489,00
39	Utang Jangka Pendek Lainnya	178.536.273,00	894.454,00		179.430.727,00
40	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH		98.595.562.000,00		98.595.562.000,00
	Total	**13.882.707.453,42**	**12.987.120.622,44**	**13.563.105.347,08**	**111.902.284.728,78**

BUPATI BELITUNG,

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

Lampiran XVIII : Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

KABUPATEN BELITUNG
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2025

No.	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				
	Total	-	-	-	-

BUPATI BELITUNG,

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

Lampiran XIX : Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

KABUPATEN BELITUNG
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

No.	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	MUTASI				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH /KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	NIHIL							

BUPATI BELITUNG,

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

Lampiran XX.1 : Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

No.	BUMD/Perusahaan Daerah	Sumber	Status	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal disetor	BPYDS	Ekuitas lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5+6+7	9	10	11 = 9+10	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 x 18
1	Bidang Jasa lainnya																	
	1. PDAM Kabupaten Belitung	LK Audited 2025	BUMD	3.698.826.427,00	13.754.811.559,00	20.800.500,00	17.474.438.486,00	137.364.467,00	-	137.364.467,00	61.958.248.849,00	-	-	4.170.382.472,00	(48.791.557.302,00)	17.337.074.019,00	49,09%	8.510.769.635,93
	2. PT. Belitong Mandiri	LK Audited 2025	BUMD	138.402.865,00	1.690.301.981,00	-	1.828.704.846,00	285.807.657,00	-	285.807.657,00	10.601.636.328,00	-	-	-	(9.058.739.139,00)	1.542.897.189,00	98,11%	1.513.736.432,13
	3. PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia	LK Audited 2025	BUMD	526.726.380,00	12.082.000,00	-	538.808.380,00	6.207.506,00	-	6.207.506,00	5.250.000.000,00	-	-	-	(4.717.399.126,00)	532.600.874,00	95,24%	507.249.072,40

BUPATI BELITUNG,

UJONI HIDAYAT ALAMSYAH

Lampiran XX.2 : Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/(RUGI)) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

No.	BUMD/Perusahaan Daerah	Sumber	Status	Pendapatan	Beban	Laba(Rugi) kotor	Pendapatan diluar usaha	Beban di luar usaha	Laba(Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bidang Jasa lainnya								
	1. PDAM Kabupaten Belitung	LK Audited 2025	BUMD	4.272.076.900,00	7.581.815.809,00	(3.309.738.909,00)	567.838.084,00	4.584.215,00	(2.746.485.040,00)
	2. PT. Belitong Mandiri	LK Audited 2025	BUMD	241.901.078,00	599.926.806,00	(358.025.728,00)	788.470,00	488.396,00	(357.725.654,00)
	3. PT. Pelabuhan Tanjung Batu Belitong Indonesia	LK Audited 2025	BUMD	831.861.495,00	414.773.117,00	417.088.378,00	-	377.350,00	416.711.028,00

BUPATI BELITUNG,

DJONI HIDAYAT ALAMSYAH